

**devel oping EDUCATION
BASED ON NATIONALISM VALUES**

The Proceeding of International Seminar:
Building Education Based on Nationalism Values

developing EDUCATION BASED ON NATIONALISM VALUES

Copyright@2016, Ersis Warmansyah Abbas
Hak Cipta dilindungi undang-undang

Setting/Layout : Ersis Warmansyah Abbas
Desain Sampul : Ersis Warmansyah Abbas
Pemeriksa Aksara : Risna Warnidah
Cetakan Pertama : November 2016

Diterbitkan oleh:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Hasan Basry
Banjarmasin

ISBN: 978-602-96546-4-6

ISBN 978-602-96546-4-6



Chief Editor:
Ersis Warmansyah Abbas

Members:
Abdul Razaq Ahmad
Mohd Mahzan Awang
Heri Susanto

developing EDUCATION BASED ON NATIONALISM VALUES

The Proceeding of International Seminar:
Building Education Based on Nationalism Values

Acknowledgements:

Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.
Rector of Lambung Mangkurat University

Prof. Dr. Wahyu, M.S.
Dean of Faculty of Teacher Training and Education
Lambung Mangkurat University

Dr. Supriadi, MM
Chief of The Alumni of Faculty of Teacher Training and Education
Lambung Mangkurat University

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SAMBUTAN REKTOR ULM



Alhamdulillah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berjaya melaksanakan seminar internasional *Building Education Based on Nationalism Values* pada hari Sabtu, 8 Oktober 2016. Seminar internasional tersebut merupakan rangkaian seminar internasional ketiga yang dilaksanakan FKIP ULM dalam rancang aktivitas akademik tahunan. Aktivitas tersebut merupakan derap aktivitas akademik yang tengah giat-giatnya dilaksanakan di ULM.

Seminggu setelah seminar, Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd. datang ke ruang saya sembari menagih: “Pak Rektor, sambutannya sudah selesai kan? Buku segera dicetak untuk diterbitkan”. Nampaknya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan manakala teman-teman dari FKIP mengadakan seminar.

Bukan seminar internasional saja yang dibukukannya, tetapi seminar nasional dan lokal pun dibukukan. Sejujurnya, ada juga rasa bosan selalu diminta memberi sambutan. Saya memahami, sejak dulu Pak Ersis “hobinya” demikian. Sikapnya, kalau menulis buku bersama, memaksa-maksa. Tahun 2004 kami mengeditori buku *Menguk Atmosfir Akademik: Tulisan Terseleksi Aruh FKIP Unlam 2004*. Jadi, saya sudah hapal gaya Pak Ersis.

Bagaimanapun, hal tersebut tentu bagus bagi ULM. ULM mendukung dan serius membantu penerbitan hasil pemikiran insan-insan ULM dalam dayangan semangat insan-insan ULM berkarya akademik. Klop.

Saya mendukung, sekaligus sebagai harapan, pada seminar internasional berikutnya, tulisan-tulisan yang dipresentasikan bukan lagi dengan pertimbangan utama untuk memenuhi *cum*, tetapi berbasis kualitas. Semoga saja, pada tahun-tahun ke depan, manakala melaksanakan seminar (internasional) beberapa tulisan terpilih (dapat) dimuat di jurnal internasional. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku (prosiding) *Developing Education Based on Nationalism Values* sekaligus bangga atas karya insan-insan ULM, khususnya FKIP ULM.

Jayalah ULM.

Banjarmasin, 7 November 2016

Rektor ULM

Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Sc., M.Si.

SAMBUTAN

dekan fkip ULM



Aktivitas akademik sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan harian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Dalam kerangka tersebut, FKIP ULM mengadakan seminar akademik, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional sebagaimana pula FKIP ULM mengirim Sivitas Akademiknya ke berbagai perguruan tinggi, di dalam dan di luar negeri. Kegiatan akademik menjadi tonggak penopang kemajuan FKIP ULM.

Satu di antara ribuan aktivitas akademik tersebut adalah seminar internasional *Building Education Based on Nationalism Values*, Sabtu, 8 Oktober 2016. Seminar internasional *Building Education Based on Nationalism Values*, merupakan rangkaian seminar yang dilakukan FKIP ULM, program studi, ataupun seminar yang dilakukan mahasiswa FKIP ULM. Tidak pelak lagi, hal tersebut menggambarkan tingkat kesadaran yang hebat insan-insan FKIP ULM dalam memainkan peran dan kewajibannya sebagai insan akademik.

Dalam pada itu, terutama seminar yang diketuai Dr. Ersis Warmansyah Abbas, MPd., "ditutup" dengan membukukan (prosiding) makalah-makalah yang dipresentasikan pada seminar tersebut. Buku *Developing Education Based on Nationalism Values* sebagai prosiding makalah-makalah yang dipresentasikan sebagai "karya bersama" yang diterbitkan FKIP ULM. Berseminar dan menerbitkan karya ilmiah.

Sebagai Dekan FKIP ULM saya mengapresiasi seminar dan penerbitan buku sebagai karya FKIP Unlam yang membanggakan. Tentu saja kita tidak berhenti sampai di sini, sebab pada tahun mendatang telah dirancang rangkaian kegiatan sebagai usaha dan upaya membangun FKIP ULM berbasis akademik tangguh.

Akhirul kalam, sekali lagi, saya menyambut baik atas terbitnya buku *Developing Education Based on Nationalism Values*. Selamat berkarya dan jayalah FKIP ULM dalam dayungan universitas tercinta, ULM.

Banjarmasin, 7 November 2016

Dekan FKIP ULM

Prof. Dr. Wahyu, M.S.

SAMBUTAN KETUA IKA fkip U l m



Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyambut gembira terbitnya buku *Developing Education Based on Nationalism Values* sebagai prosiding seminar internasional *Membangun Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan* yang diadakan FKIP ULM pada 8 Oktober 2016. Seminar tersebut rangkaian dari dua seminar internasional yang diselenggarakannya pada tahun 2014 dan 2015.

Pertemuan akademik dalam bentuk seminar, baik lokal, nasional, maupun internasional, merupakan aktivitas yang tengah giat-giatnya dilakukan FKIP ULM, khususnya dalam rangka membangun atmosfir akademik. Bisa jadi, sebelumnya seminar internasional belum rutin dilakukan FKIP ULM, tetapi sekarang sudah menjadi hal teragenda setiap tahun. FKIP ULM semakin akrab dengan berbagai aktivitas akademik.

Lebih menggembirakan, pembicaraan akademik tersebut dibukukan sehingga apa-apa yang diperbincangkan dalam seminar didokumentasikan dalam bentuk buku (prosiding) dan dapat dibaca serta diambil manfaatnya oleh kalangan lebih luas. Dengan demikian, ide, gagasan, dan berbagai pemikiran seputar tema seminar terekam untuk dapat diperbincangkan lebih luas sehingga manfaatnya dapat diraih kalangan lebih luas. Artinya, melaksanakan seminar dan membukukan makalah-makalah seminar merupakan hal sangat positif.

Dalam kerangka itu, terutama dalam kegiatan akademik, IKA FKIP ULM tentu saja mendukungnya. Kepengurusan IKA FKIP ULM memang baru terbentuk, tetapi sesungguhnya individu-individu alumni FKIP ULM selama ini memberikan kontribusi dalam arti mendukung berbagai kegiatan FKIP ULM. Mudah-mudahan dengan terbentuknya pengurus IKA FKIP ULM kemitraan akan semakin kokoh.

Akhirnya, IKA FKIP ULM mengucapkan selamat atas terbitnya buku (prosiding) *Developing Education Based on Nationalism Values*. Salam sukses dan semoga bermanfaat adanya. Aamiin.

Banjarmasin, 7 November 2016

Ketua IKA FKIP ULM

Dr. Supriadi, MM

PENGANTAR

KETUA Penyunting



Pada tanggal 8 Oktober 2016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengadakan seminar *Building Education Based on National Values*. Sebelumnya, FKIP ULM telah dua kali mengadakan seminar internasional “Membangun Pendidikan” yaitu: *Building Nation Character Through Education* (2014), *International Seminar on Ethnopedagogy* (2015). FKIP ULM membangun pola seminar internasional dalam keberlanjutan.

Pada seminar ketiga ini, galangan kemitraan dengan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia telah menemukan “bentuk” awal. Sesungguhnya, ketika menerima tugas dari FKIP Unlam untuk menerbitkan buku *Pendidikan Karakter*, yang kemudian diujarkan pada Seminar Internasional Pendidikan Karakter, kami menjajaki kerjasama dengan berbagai universitas. Setelah seminar Pendidikan Karakter (2014), ULM memberangkatkan kami ---Ersis Warmasnyah Abbas, Herry Porda Nugroho Putra, Bambang Subiyakto, Mohammad Zaenal Anis, dan Heri Susanto--- ke UKM untuk merealisasikan *Memorandum of Understanding* antara ULM dan UKM.

Alhamdulillah, bersama Prof. Madya Dato’ Dr. Abdul Razak Ahmad dan Dr. Mahzan Awang dari Fakulti Pendidikan UKM Malaysia kami mengadakan seminar *Pendidikan Sejarah, Patriotisme dan Karakter Bangsa: Malaysia-Indonesia*. Makalah-makalah yang dipresentasikan pada seminar di Fakulti Pendidikan UKM 2 Desember 2014 tersebut dibukukan menjadi *Pendidikan Sejarah, Patriotisme dan Karakter Bangsa: Malaysia-Indonesia*.

Sejujurnya, penerimaan tugas melaksanakan seminar dalam kerangka belajar. *Pertama*, membentuk tim pelaksana yang terdiri dari anak-anak muda dengan target mengadakan empat kali seminar internasional, yang pada seminar keempat akan dijadikan “konferensi”. *Kedua*, pada seminar keempat, kalau semula makalah sangat kental dengan prinsip memudahkan teman-teman mendapatkan *cum*, ditingkatkan berorientasi kualitas. *Ketiga*, dipersiapkan jurnal (internasional) untuk mendukung seminar selanjutnya. Ambisi yang diapungkan, makalah-makalah terpilih akan ditayangkan pada jurnal yang kini tengah digodok penerbitannya.

Terlepas ambisi tersebut akan menjadi, Alhamdulillah, pada tiga kali seminar internasional, tantangan-tantangan serta kontrains sanggup dilalui. Semoga saja ke depan pelaksanaannya semakin bagus karena tenaga-tenaga muda telah dilatih untuk itu.

Kepada Prof. Madya Dato’ Dr. Abdul Razak Ahmad dan Dr. Mahzan Awang dari Fakultas Pendidikan UKM Malaysia kami ucapkan terima kasih khusus. Begitu juga kepada Rektor ULM, Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Sc., M.Si, Dekan FKIP ULM, Prof. Dr. Wahyu, MS, dan Ketua IKA ULM, Dr. Supriadi, MM. Tidak lupa kepada semua pihak yang membantu terselenggara dan berhasilnya seminar ini.

Banjarmasin, 7 November 2016

Ketua Penyunting

Dr. Drs. Ersis Warmansyah Abbas, BA, M.Pd.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR ULM	vii
SAMBUTAN DEKAN FKIP ULM.....	ix
SAMBUTAN KETUA IKA FKIP ULM	xi
PENGANTAR KETUA PENYUNTING	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I MAKALAH UTAMA	1
Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan: Pendidikan Politik dan Sosialisasi Politik	
Azyumardi Azra	3
Malaysia-Molded Patriotism Framework	
Abdul Razaq Ahmad	15
A Taxonomy of Malaysian Citizenship Competence	
Mohd Mahzan Awang	27
Developing Education Based on Traditional Values: A Case of Nonformal Adult Education in Uganda	
Wamaungo Juma Abdu and Achmad Hufad	41
Building Nationalism Through Education	
Wahyu	53
Mencari Musuh Bersama untuk Kebangkitan Nasional Abad Ke-21	

Sutarto Hadi	65
BAB II MAKALAH Presentasi 75	
Teks Naratif sebagai Sumber Belajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris untuk Menumbuhkan Nilai Moral Peserta Didik SMP	
Ahmad Sarwani dan Gunadi Harry Sulistyio	77
Mata Kuliah Bahasa Indonesia sebagai Upaya Menumbuhkan Generasi Bangsa Indonesia yang Berkarakter	
Ahsani Taqwiem	98
Upaya Praksis Pembelajaran untuk Penanaman Jiwa Nasionalisme Pada Setiap Warga Negara Indonesia	
Alimun Hakim	113
Promoting The Science Learning in Developing Fathonah Prophetic Character	
Arif Sholahuddin	127
Strategi Guru dalam Menanamkan Nasionalisme Kepada Peserta Didik	
Bambang Subiyakto	143
Urgensi Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar dalam Pembentukan Karakter Bangsa	
Barsihanor	157
Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Bakumpai di SDN Batik Kabupaten Barito Kuala	
Chairil Faif Pasani, Nanik Maryani, dan Syaharuddin	171
Islam dan Keutuhan Nasionalisme Indonesia: Meneladani Perilaku Mulia Sultan Tidore Zaenal Abidin Syah dalam Berjuang dan Mempertahankan Keutuhan NKRI dari Strategi Pecah Belah Belanda setelah Indonesia Merdeka	
Darmawijaya dan Irwan Abbas	199
Implantation of Respect and Courtesy Through Family Education on Early Childhood Stage	

Darmiyati	233
Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dengan Mengenal Potensi Laut dan Pesisir Indonesia	
Deasy Arisanty	243
Integrasi Sila-Sila Pancasila dalam Mendidik Anak melalui Nilai-Nilai Agama dan Sosial	
Desy Anindia Rosyida dan Abdul Hafiz	255
MEA dan Revitalisasi Pendidikan Karakter	
Entin Jumantini	271
Upaya Praksis Pembelajaran untuk Penanaman Jiwa Nasionalisme Pada Setiap Warga Negara Indonesia	
Ersis Warmansyah Abba s	277
Pembinaan Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia dalam Rangka Nasionalisme Indonesia	
Fatchul Mu'in	287
Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Setting Pendidikan Inklusi	
Hamsi Mansyur	297
Pendidikan dan Kesadaran Nasionalisme	
Heri Susanto	307
Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Pembelajaran Sejarah	
Herry Porda Nugroho Putro	315
Pembelajaran Sejarah untuk Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan	
Hieronymus Purwanta 329	
Membangun Nilai-Nilai Nasionalisme melalui Paradigma Pendidikan Inklusi	
Imam Yuwono	349
Strategi Pembinaan Nilai-Nilai Nasionalisme pada Siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin	
Irni Cahyani	361

Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah Dasar melalui Pemodelan Sekolah sebagai Laboratorium Religius, Demokratis dan Sosial Jamil	377
Membangun Pendidikan dan Membina Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kebangsaan Lyta Permatasari	393
Dinamika Demokrasi dalam Kerangka Nasionalisme di Indonesia Tahun 1945-2010 Mansyur	403
Kontribusi Pendidikan Olahraga Berbasis Nilai-Nilai Wawasan Nusantara dalam Menjaga Keutuhan NKRI Ma'riful Kahri	417
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Menghadapi Permasalahan Masyarakat Multikultural di Indonesia Melisa Prawitasari	431
Implementasi Nilai Pendidikan dan Kebangsaan melalui Social Skill Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Melly Agustina Permatasari	445
Kajian tentang Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Tingkat Sekolah Dasar Mohammad Yamin.....	463
Sejarah, Kesadaran Sejarah, dan Pupusnya Identitas Nasional Mohammad Zaenal Arifin Anis	487
Peran Koperasi Dalam Membangun Perekonomian Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Monry FNG Ratumbuang, Sitti Khadijah, dan Maulana Rizky	495

Nilai-Nilai dalam Sejarah Lokal Kalimantan Selatan	
Muhammad Azmi	501
Build Students Character on Physics Learning Through Integrated Brain Based Learning	
Muhammad Ichsan Nurjana dan Ikhwan Khairu Sadiqin	511
Revitalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Pelajar di Kota Banjarmasin	
Mutiani	523
Penerapan Prinsip Kesantunan dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	
Noor Cahaya	539
Implikasi Tingkat Pendidikan Terhadap Umur Pernikahan Wanita di Kalimantan Selatan: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012	
Norma Yuni Kartika, Muhajir Darwin, Sukamdi, Ellyn Normelani, dan Rosalina Kumalawati	555
Implementasi Pendidikan Kebangsaan dalam Pendidikan Olahraga	
Nurdiansyah	569
Pengembangan Nilai-Nilai Karakter di Sekolah Dasar Kabupaten Banjar	
Rabiatul Adawiah, Sarbaini, dan Dian Agus Rochliyadi	583
Nilai Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa: Telaah Sosiokultural Penanaman Karakter Mandiri Pada Usaha Emping Melinjo di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon	
Ratna Puspitasari	595
Perdagangan Kerajaan Banjar dan Pendidikan Kebangsaan	
Rizali Hadi	611
Nationalism in Present Context	

Rochgiyanti621
Nilai Didaktis dalam Cerita Rakyat Nusantara sebagai Pembentuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
Rusma Noortyani	633
Plus-Minus Budaya Banjar	
Rustam Effendi	647
Preparing Mathematics and Science Teachers in Indonesia: A Comparison to The Study of Preparing Teachers Around The World By ETS	
Sarah Miriam	667
Peran Pendidikan Geografi Menumbuhkan Sikap Kebangsaan Manusia Indonesia	
Sidharta Adyatma	683
Tinjauan Aksiologis Lagu "Indonesia Raya": Relevansinya bagi Penguatan Nilai Kebangsaan dan Penguatan Budi Pekerti di Sekolah	
Sumasno Hadi	697
Membudayakan Kompetisi Permainan Tradisional sebagai Penguat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
Sunarno Basuki	721
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi	
Suroto	739
Pengoptimalisasian Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Memperkuat Nasionalisme	
Suryaningsi	751
Menumbuhkan Nasionalisme Peserta Didik melalui Pendidikan Seni Musik	
Syusam Widiyanto	773

Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Jasmani Syamsul Arifin	785
Pendidikan Jasmani Adaptif bagi Anak Berkebutuhan Khusus Berwawasan Kebangsaan Utomo	809
Implementasi Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Memperkuat Nilai Kebangsaan Wahyu, Mariatul Kiptiah, dan Mohammad Yamin	827
Nasionalisme dan Transisi Demokrasi Indonesia Wisnu Subroto	849
PENYUNTING	859

BAB I

MAKALAH UTAMA

PENDIDIKAN BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN: Pendidikan Politik dan Sosialisasi Politik

Azyumardi Azra

azyumardiazra1@gmail.com

Bicara tentang pendidikan berbasiskan nilai-nilai kebangsaan tidak bisa lain berbicara tentang pendidikan politik. Lalu, pembicaraan tentang hubungan antara pendidikan dengan politik bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles sampai masa modern dan kontemporer, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian cukup intens pada masalah ini. Kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan "*as is the state, so is the school*" ("sebagaimana negara, seperti itulah sekolah"), atau "*What you want in the state, you must put into the school*" ("apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah"). Juga terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan, pendidikan adalah sebuah korelasi -jika tidak sebuah persyaratan bagi suatu tatanan demokratis (Coleman dalam Coleman, ed, 1956: 6).

Dalam konteks itu, kalau berbicara tentang pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) Indonesia, pembicaraan niscayalah menyangkut UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah prinsip dasar kebangsaan negara-bangsa Indonesia. Di sini kita pasti harus berbicara tentang politik. Lagi pula, pendidikan nasional merupakan lokus tidak hanya

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Guru Besar Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah

untuk transfer ilmu, kecakapan dan keterampilan, tetapi juga wahana untuk penanaman semangat kebangsaan.

Selanjutnya jika berbicara tentang pendidikan dalam kaitan dengan hal kebangsaan, orang harus berbicara --sekali lagi-- tentang 'pendidikan politik'. Hal ini tidak lain karena pendidikan politik merupakan wahana efektif untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kecintaan kepada ke empat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia (NKRI). Melalui 'pendidikan politik' --yang bisa berbentuk Mata pelajaran/Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Sejarah, dan bahkan Pendidikan Agama Islam (atau pendidikan agama-agama lain) dapat ditumbuhkan perasaan dan semangat cinta tanah air, yang dalam ajaran Islam disebut sebagai *hubbul al-wathan min al-iman*-- cinta tanah air adalah bagian daripada iman.

PENDIDIKAN DAN 'PENDIDIKAN POLITIK'

Dengan mengambil kasus dan pengalaman pendidikan Islam, hubungan antara pendidikan dengan politik juga dapat dilacak sejak masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, semacam madrasah. Sepanjang sejarah, terdapat hubungan amat erat antara pendidikan dengan politik. Kenyataan ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik. Contoh paling terkenal dalam hal ini adalah Madrasah Nizamiyyah di Baghdad yang didirikan sekitar 1064 oleh Wazir Dinasti Saljuk, Nizam al-Mulk; di madrasah ini terkenal bahwa pemikir dan ulama besar al-Ghazali pernah menjadi guru besar.

Signifikasi dan implikasi politik dan pengembangan madrasah atau pendidikan Islam umumnya bagi para penguasa Muslim sudah jelas. Madrasah-madrasah didirikan untuk menunjang kepentingan politik tertentu penguasa Muslim, di antaranya; untuk menciptakan dan memperkokoh citra penguasa sebagai orang yang mempunyai kesalehan, minat dan kepedulian pada kepentingan ummat, dan--ini lebih penting lagi--sebagai pembela ortodoksi Islam. Semua ini pada gilirannya mereka harapkan dapat memperkuat legitimasi penguasa vis-a-vis rakyat mereka. Persoalannya kemudian, sejauh mana madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya secara sadar juga difungsikan sebagai wahana "pendidikan politik" anak didik atau masyarakat Muslim umumnya?

Hemat saya, lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga masa pertengahan, atau tepatnya masa pra-modern, tidak menjadikan 'pendidikan politik' sebagai agenda. Seperti diketahui, lembaga-lembaga pendidikan Islam, di masa-masa tersebut lebih merupakan satu wahana utama bagi transmisi dan bahkan 'pengawetan' ilmu-ilmu Islam. Meski pendirian madrasah, misalnya, sering berkaitan erat dengan motif-motif politik, terdapat indikasi yang kuat untuk bahwa ia tidak terlibat dalam proses-proses politik. Absolutisme politik Muslim—sebagaimana terlihat dari eksistensi berbagai macam Dinasti—tidak memberikan ruang bukan hanya bagi keterlibatan komunitas madrasah, tetapi bahkan masyarakat Muslim umumnya, untuk turut serta dalam proses-proses politik, dan mewujudkan partisipasi politik mereka (lihat Azra, dalam Stanton: 1994).

'Pendidikan politik'—dalam pengertian modern—dengan demikian mungkin sedikit sekali mempunyai relevansi dengan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam klasik dan pertengahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa apa yang kita sebut sebagai 'pendidikan politik'—terlepas dari tingkatan intensitas dan kedalamannya—tidak berlangsung dalam masyarakat Muslim umumnya. Bahkan 'pendidikan politik' mungkin menjadi salah satu *concern* utama para pemikir politik Muslim, semacam al-Mawardi atau al-Ghazali. Sebagaimana bisa diduga dalam 'pendidikan politik' para pemikir politik Muslim merumuskan dan mengajarkan tentang, misalnya, hak-hak kewajiban timbal-balik antara penguasa dan rakyat. Bahkan para pemikir semacam ini menerbitkan kitab-kitab panduan, termasuk karya al-Ghazali *Nashihat al-Muluk*, yang diperuntukkan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Semua hal yang bisa dipandang sebagai termasuk ke dalam 'pendidikan politik' ini, umumnya dilihat dari perspektif syari'ah atau fiqh (lihat Lambton, 1991).

Barulah ketika modernisme mulai menemukan momentumnya di wilayah-wilayah Muslim di Timur Tengah, khususnya di Turki dan Mesir sejak paruh kedua abad ke-19, lembaga-lembaga pendidikan juga sedikit banyak berfungsi sebagai arena 'pendidikan politik'. Lembaga-lembaga pendidikan modern Islam ini diarahkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan keagamaan dan politik tertentu, yang tentu saja harus sesuai dengan semangat modernisme keagamaan dan politik Islam. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai 'pendidikan politik', kelihatannya lebih merupakan fenomena politik modern.

Sebab itulah pembahasan tentang 'pendidikan politik' dan pendidikan Islam lebih baik kalau difokuskan pada fenomena negara-bangsa Muslim dewasa ini.

PENDIDIKAN POLITIK ATAU SOSIALISASI POLITIK

Istilah 'pendidikan politik' (*political education*)—sebagaimana sering digunakan di Indonesia kelihatannya bukanlah suatu terma atau konsep yang lazim digunakan dalam kajian-kajian politik kontemporer. Keengganan menggunakan istilah 'pendidikan politik' agaknya berkaitan dengan konotasi negatif yang melekat pada dirinya. Dengan melihat kenyataan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan dikontrol pemerintah, Alfred de Grazia dalam buku klasiknya *The Elements of Political Science* hampir mengidentikkan 'pendidikan politik' dengan 'propaganda' untuk memperkuat legitimasi dan status *quo* penguasa. Batas antara pendidikan politik dengan propaganda sulit dibuat. Pendidikan politik—sama dengan propaganda—bertujuan membangun dukungan bagi kebijakan-kebijakan penguasa. Melalui pendidikan politik, penguasa 'mendidik' anak didik tentang, misalnya, bagaimana bertingkah laku sebagai warga negara atau bagaimana menyikapi pemerintah, negara-bangsa dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, pendidikan politik yang semula bersifat persuasif dapat berubah menjadi koersi (pemaksaan) fisik (de Grazia, 1952: 39, 255).

Agaknya karena mempertimbangkan hal di atas itulah James S. Coleman ketika berbicara tentang pendidikan dalam hubungannya dengan politik lebih senang menggunakan istilah 'sosialisasi politik' (*political socialization*) (Coleman dalam Coleman, ed: 1965: 18). Istilah dan konsep 'sosialisasi politik' sekarang telah menjadi bagian yang diterima sepenuhnya dalam kosa kata ilmu politik. Istilah sosialisasi politik mengacu kepada proses di mana individu-individu memperoleh sikap dan perasaan terhadap sistem politik; dan terhadap peranan mereka di dalamnya, yang mencakup: *cognition* (apa yang diketahui atau dipercayai seseorang tentang sistem politik, eksistensinya, dan modus operandi-nya); *feeling* (bagaimana perasaan seseorang terhadap sistem politik, termasuk kesetiaan dan perasaan kewajiban sipil); *sense of political competence* (apa peranan seseorang dalam sistem politik). Lebih tegas lagi, sebagaimana dirumuskan Almond, "sosialisasi politik adalah proses induksi [seseorang] ke dalam kebudayaan politik" (*political culture*)

(Almond, dalam Almond & Coleman, 1960: 27). Sistem dan lembaga pendidikan merupakan salah satu dari institusi terpenting dalam sosialisasi politik tersebut, terutama sejak seorang anak didik mulai memperoleh pendidikan sampai ia mencapai kedewasaan.

Almond dan Verba yang melakukan kajian perbandingan di lima negara bahkan memperkuat studi-studi sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang sangat menentukan (*decisive*) dalam proses sosialisasi politik. Kedua ahli politik ini menemukan korelasi positif antara pendidikan dengan kognisi dan partisipasi politik. Menurut Almond dan Verba, pencapaian dalam pendidikan kelihatannya merupakan memberikan dampak demografis terpenting terhadap sikap dan tingkah laku politik. Orang tidak terdidik atau dengan pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang yang telah mencapai tingkat pendidikan lebih tinggi (Almond & Verba, 1963: 379, 380-87).

Tetapi bagaimanakah sebenarnya hasil akhir sosialisasi politik yang dapat dicapai melalui pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan ini setidaknya terdapat empat hal penting yang perlu dikaji lebih jauh, karena melibatkan persoalan-persoalan cukup kompleks. Pertama, arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal; kedua, implikasi-implikasi kesesuaian (*congruence*) antara sistem pendidikan dengan lembaga-lembaga sosialisasi atau proses-proses lainnya; ketiga, konsekuensi-konsekuensi sosialisasi politik yang nyata (atau masuknya secara eksplisit muatan politik dalam kurikulum pendidikan); dan keempat, signifikansi lingkungan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi.

Arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal pada umumnya selaras dengan ideologi negara, sistem politik atau kebijaksanaan pemerintah yang menguasai lembaga pendidikan yang ada. Dalam negara-negara yang menganut sistem politik dan demokrasi seperti Indonesia, bisa diharapkan, arah orientasi politik yang dikembangkan melalui berbagai lembaga dan pranata sosial-kemasyarakatan—termasuk pendidikan—adalah pengembangan sistem politik, proses politik, dan kebudayaan politik demokratis berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yang tercakup dalam UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tetapi penting dicatat, arah orientasi politik yang dihasilkan pendidikan tidak selalu tercapai sebagaimana diharapkan, paling tidak oleh penguasa atau *the ruling elite* umumnya. Sebaliknya terdapat bukti dan indikasi kuat yang menunjukkan pengaruh pendidikan terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku politik jauh lebih kompleks, tidak pasti, dan penuh variabel. Orientasi politik demokratis yang ditanamkan melalui pendidikan, misalnya, tidak selalu menghasilkan anak didik yang demokratis pula; sebaliknya bisa menghasilkan konservatisme atau bahkan radikalisme. Gejala semacam ini terdapat di negara-negara Barat yang mempunyai orientasi politik seperti itu; dan seperti bisa disaksikan, pendidikan demokratis dan liberal di Amerika Serikat misalnya, juga menghasilkan orang-orang fundamentalis dan radikal, termasuk kalangan Yuppies (*young, urban, and professionals*). Begitu juga di banyak negara Muslim di Timur Tengah dan dalam batas tertentu di Indonesia; arah orientasi politik Islami tidak pula harus melahirkan orang-orang yang '*politically peaceful*'—seperti diajarkan Islam, tetapi juga orang-orang radikal, baik di pihak penguasa maupun masyarakat (lihat Azra, 1996; 2016).

Kompleksitas yang sama juga terlihat jelas dalam persoalan kedua, kesesuaian antara implikasi pendidikan dengan lembaga dan pengaruh lainnya yang berdampak terhadap sosialisasi politik. Di sini bahkan terlihat pendidikan hanya menduduki posisi relatif, karena pendidikan bukan satu-satunya lembaga sosialisasi politik; sebaliknya begitu banyak lembaga dan pengaruh lain yang membentuk sikap dan tingkah laku politik individu dan masyarakat. Misalnya saja, pendidikan formal dapat menumbuhkan sikap demokratis. Tetapi sikap demokratis itu bisa segera dilenyapkan pengalaman sosialisasi lainnya; sehingga ia justru menjadi radikal. Dalam konteks masyarakat Muslim, kenyataan ini bisa dilihat dari sikap politik tokoh-tokoh semacam Sayyid Quthb atau Abu al-A'la al-Mawdudi, yang semula memperoleh pendidikan relatif liberal, tetapi kemudian menjadi radikal—kalau tidak fundamentalis (lihat Azra, 1996; 2016).

Dengan demikian terjadi semacam ketidaksesuaian (*incongruence*) antara sosialisasi politik yang diperoleh melalui pendidikan dengan apa yang didapat dari lembaga sosial lainnya. Kembali dalam konteks negara-negara Muslim, ketidaksesuaian itu disebabkan dua faktor utama: pertama, tetap dominannya keutamaan keluarga dalam proses sosialisasi masyarakat yang

sebagiannya bermukim di wilayah pedesaan; dan kedua, sistem pendidikan formal memikul beban sosialisasi amat berat.

Berkelanjutannya dominasi keluarga dalam proses sosialisasi di negara-negara Muslim—termasuk Indonesia—khususnya di kawasan pedesaan, banyak disebabkan antara lain oleh terbatasnya mobilitas sosial, lemahnya penetrasi pemerintah, langkanya fasilitas transportasi dan komunikasi, dan tidak tersedianya pendidikan yang merata. Pada saat yang sama terjadi 'fragmentasi kultural', yakni diskontinuitas kebudayaan politik di antara sistem politik tradisional yang ada, disebabkan munculnya kebudayaan politik baru negara-bangsa (*nation-states*) (Lerner, 1962).

Pada pihak lain, sistem dan lembaga pendidikan bermuatan kurikulum terlalu banyak dan terlalu berat dikembangkan hampir di seluruh negara Muslim—lagi-lagi termasuk Indonesia. Dalam batas tertentu beban lembaga pendidikan yang *overloading* itu bisa dipahami. Pertama, Indonesia dan negara-negara Muslim yang relatif baru merdeka itu ingin mengukuhkan integritas dan kesatuan negara melalui pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan loyalitas tradisional yang mulai memudar itu lenyap sama sekali untuk digantikan rasa kebangsaan (*sense of nationhood*) yang baru. Kedua, lembaga pendidikan terpaksa memikul beban berat, karena kelangkaan lembaga-lembaga kultural lain yang mampu sedikit banyak melakukan sosialisasi politik seperti diharapkan para pemimpin negara. Tetapi harapan ini kebanyakannya tidak terpenuhi, karena beban berat itu pada gilirannya menjadi tidak lebih baik daripada sekedar *distraction* bagi anak didik umumnya. Sosialisasi politik terhimpit beban kurikulum lain, yang dipandang anak didik lebih penting bagi pendidikan dan masa depannya. Kenyataan ini paling jelas di Indonesia, di mana aktivisme politik mahasiswa menyusut secara signifikan setelah diberlakukannya sistem SKS sejak awal 1980-an.

Masalah besar ketiga, yakni dampak sosialisasi politik yang nyata dan terbuka (*manifest*) melalui lembaga pendidikan juga tak kalah rumitnya. Sosialisasi politik terbuka merupakan upaya sengaja untuk menanamkan sikap politik tertentu melalui pemasukan kandungan politik tertentu ke dalam kurikulum pendidikan. Semua ini bisa dilakukan dalam bentuk penyajian subyek tertentu dalam kurikulum (seperti mata pelajaran/kuliah Pancasila); indoktrinasi atau penataran (seperti, penataran P4 di masa Orde Baru), atau bahkan kegiatan

cuci otak (*brain washing*). Hasil sosialisasi politik secara terbuka ini sering diragukan orang. Pengajaran atau penataran terbuka bisa memperkuat kesadaran individu tentang kompetensi politik; tetapi juga dapat menjadi sekedar formalitas dan, lebih jauh lagi menimbulkan sinisme belaka.

Persoalan keempat atau terakhir, berkaitan dengan dampak lingkungan atau 'kultur' lembaga pendidikan itu sendiri dalam pembentukan sikap dan orientasi politik. Di negara-negara berkembang umumnya—termasuk Indonesia, lembaga pendidikan menghasilkan dua dampak yang signifikan pada sosialisasi politik, yakni orientasi prestasi (*achievement*) dan elitisme. Pendidikan memberikan pada anak didik dorongan dan rasa berprestasi melalui penguasaan pelajaran sebaik-baiknya. Prestasi akademis yang mereka capai, pada gilirannya, juga mendorong munculnya rasa elitisme, yang kemudian memunculkan sikap dan gaya hidup tersendiri, termasuk dalam kehidupan politik. Semakin terpisah lingkungan sekolah dari lingkungan masyarakat umumnya, semakin tinggi pula sikap elitisme. Elitisme yang bersumber dari sekolah kemudian memunculkan elite 'terpisah' dari masyarakat; tetapi pada saat yang sama, mereka memegang pendapat; dengan keunggulan dan *priveleges* yang mereka miliki, mereka mempunyai 'hak' alamiah memerintah masyarakat.

PENUTUP

'Pendidikan politik' atau 'sosialisasi politik' untuk menanamkan semangat kebangsaan bisa diduga berlangsung paling intens pada tingkat perguruan tinggi (universitas). Kenyataan ini bisa dengan mudah dipahami. Universitas memiliki mahasiswa yang sudah "matang" dan siap terlibat secara langsung dalam proses politik yang berlangsung. Kemudian, dari segi lain, mahasiswa merupakan lapisan masyarakat potensial untuk menjadi lahan rekrutmen politik dan, karena itu, mereka sebenarnya sangat rawan terhadap manipulasi politik.

Tetapi, penting dicatat, orang harus menahan diri untuk tidak melakukan semacam mitologi tentang keterlibatan dan peranan mahasiswa dalam politik. Menurut penelitian yang dilakukan di 9 negara berkembang (Nigeria, India, Iran, Pakistan, Turki, Argentina, Kolombia, dan Panama), hanya sepertiga dari jumlah mahasiswa secara keseluruhan yang sangat tertarik pada politik. Bahkan mahasiswa 'radikal' secara politik hanya merupakan minoritas amat kecil;

berkisar dari 0.3 persen sampai 4 persen di beberapa negara tertentu (lihat, Emmerson, 1968).

Lebih jauh lagi, aktivisme politik mahasiswa muncul terutama bukan disebabkan 'pendidikan politik' atau 'sosialisasi politik' yang berlangsung di universitas, tetapi lebih bersumber dari lembaga ekstra-universiter, khususnya organisasi mahasiswa *off campus*. Dan bahkan agama merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendorong munculnya aktivisme tersebut.

Dalam konteks Dunia Muslim, kenyataan ini bisa dilihat dari peranan penting yang dimainkan UGEMA (*Union Generale des Etudiants Musulmans Algeriens*, atau Persatuan Umum Mahasiswa Muslim Aljazair). Organisasi yang didirikan di Paris pada Juli 1955 ini mempunyai peranan besar dalam perjuangan pembebasan Aljazair dari Prancis yang berusaha melanjutkan cengkramannya setelah revolusi Aljazair pecah menjelang akhir 1954. Pengalaman yang hampir sama juga terlihat dalam kemunculan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Indonesia, yang menduduki peranan krusial dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam penumbangan Orde Lama pada 1966. Dengan melihat kasus EGEMA dan HMI, Emmerson menyatakan, terdapat korelasi positif di antara religiusitas dan politisasi mahasiswa (Emmerson, 1968: 394).

Dengan demikian jelas bahwa aktivisme politik mahasiswa bukanlah fenomena sederhana. Seperti dijelaskan dalam empat hal besar di atas, 'pendidikan politik' atau 'sosialisasi politik' yang berlangsung melalui sistem dan kelembagaan pendidikan merupakan satu variabel saja dari berbagai variabel lainnya, yang kait berkait satu sama lain.

***AZYUMARDI AZRA**

Lahir 4 Maret 1955 di Lubuk Alung Sumatera Barat, adalah guru besar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah; dan pernah menjabat Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta sejak Januari 2007 sampai April 2015. Ia juga pernah bertugas sebagai Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN, 1998-2002, dan UIN, 2002-2006).

Memperoleh gelar MA (Kajian Timur Tengah), MPhil dan PhD (Sejarah/ Comparative History of Muslim Societies) dari Columbia University, New York (1992) *with distinction*. Pada Mei 2005 dia memperoleh DR HC dalam *humane letters* dari Carroll College, Montana, USA. Ia juga guru besar kehormatan Universitas Melbourne (2006-9), selain itu juga anggota Dewan Penyantun International Islamic University, Islamabad, Pakistan (2005-12), Komite Akademis The Institute for Muslim Society and Culture (IMSC), International Aga Khan University (London, 2005-2010).

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset, dia adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI, 2005-sekarang); anggota Dewan Riset Nasional (DRN, 2005-9). Dia juga anggota Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP, Tokyo, 1999-2001); Asian Research Foundation-Asian Muslim Action Network (ARF-AMAN, Bangkok, 2004-sekarang); The Habibie Center Scholarship (2005-sekarang); Ford Foundation International Fellowship Program (IFP-IIEF, 2006-12); Asian Scholarship Foundation (ASF, Bangkok, 2006-10); Asian Public Intellectual (API), the Nippon Foundation (Tokyo, 2007-2014); anggota Selection Committee Senior Fellow Program AMINEF-Fulbright (2008); dan Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA, 2010-12).

Selain itu, dia anggota Dewan Pendiri Kemitraan—Partnership for Governance Reform in Indonesia (2004-sekarang); Dewan Penasehat United Nations Democracy Fund (UNDEF, New York, 2006-8); International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm (2007-13); Multi Faith Centre, Griffith University, Brisbane (2005-14); Institute of Global Ethics and Religion, USA (2004-sekarang); LibforAll, USA (2006-sekarang); Center for the Study of Contemporary Islam (CSCI, University of Melbourne, 2005-7); Tripartite Forum for Inter-Faith Cooperation (New York, 2006-sekarang); anggota World Economic Forum's Global Agenda Council on the West-Islam Dialogue (Davos 2008-sekarang).

Dia juga adalah pemimpin redaksi *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* (Jakarta, 1994-sekarang); *Journal of Qur'anic Studies* (SOAS, University of London, 2006-sekarang); *Journal of Usuluddin* (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006-sekarang); *Jurnal Sejarah* (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2005-sekarang); *The Australian Journal of Asian Law* (Sydney, Australia, 2008-sekarang); *IAIS Journal of Civilisation Studies* (International Institute of Advanced

Studies, Kuala Lumpur, 2008-sekarang); *Journal of Royal Asiatic Society (JRAS*, London, 2009-sekarang); *Journal Islamic Studies* (Islamic Research Institute, Islamabad, 2010-sekarang); *Jurnal Akademi* (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010-sekarang); dan *Journal of Islamic Studies* (Oxford Centre for Islamic Studies, 2013-16).

Dia telah menerbitkan lebih dari 36 buku, termasuk *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context* (Jakarta & Singapore, TAF, ICIP, Equinox-Solstice, 2006); *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Development* (Mizan International: 2007); (co-contributing editor), *Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory* (London: Ashgate: 2008); *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam* (Singapore: ISEAS, 2010); contributing-editor, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Jilid III, Kedatangan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Icthar Baru-Van Hoeve, 2012; dan contributing editor, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jilid III, 2015; Lebih 30 artikel dan bab buku berbahasa Inggris telah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal pada tingkat internasional.

Pada 2005 ia mendapatkan The Asia Foundation Award dalam rangka 50 tahun The Asia Foundation atas peran pentingnya dalam modernisasi pendidikan Islam; dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan RI, pada 15 Agustus 2005 mendapat anugerah Bintang Mahaputra Utama RI atas kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat; pada September 2010, ia mendapat penghargaan gelar CBE (Commander of the Most Excellent Order of British Empire) dari Ratu Elizabeth, Kerajaan Inggris atas jasa-jasanya dalam hubungan antar-agama dan peradaban. Kemudian pada 28 Agustus 2014 ia mendapat penghargaan 'MIPI Award' dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Selanjutnya, pada 4 Agustus 2014, ia dianugerahi 'Commendations' dari Kementerian Luar Negeri Jepang atas jasanya memperkuat saling pengertian antara Jepang dan Indonesia; dan 18 September 2014 dia terpilih sebagai salah satu dari tiga penerima anugerah bergengsi *Fukuoka Prize 2014* Jepang atas jasa dan kontribusi signifikannya pada peningkatan pemahaman masyarakat internasional terhadap budaya Asia. Pada 25 Juni 2015 dia mendapat penghargaan 'Cendekiawan Berdedikasi' dari Harian *Kompas*; pada 20 Agustus 2015 dia terpilih menyampaikan 'LIPI Sarwono

Memorial Lecture' dalam rangka ulang tahun ke-48 LIPI; dan pada 21 Agustus 2015 dia terpilih menerima 'Penghargaan Achmad Bakrie' dalam Pemikiran Sosial.

Selain itu, pada 2009 dia terpilih sebagai salah satu di antara '*The 500 Most Influential Muslim Leaders*' dalam bidang *Scholarly* (kesarjanaan/keilmuan) oleh Prince Waleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, Washington DC dan The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Yordania di bawah pimpinan Prof John Esposito dan Prof Ibrahim Kalin.

Dia dapat dikontak melalui azyumardiazra1@gmail.com / azyumardiazra1@yahoo.com

MALAYSIA-MOLDED PATRIOTISM FRAMEWORK

Abdul Razaq Ahmad

razaq@ukm.edu.my

ABSTRACT

Malaysia is a multi-racial country comprises of diverse lifestyles, cultures as well as religions. This situation requires a different approach in developing the strong values of patriotism in order to preserve the harmony and strengthen the nation's identity of Malaysia. The construction of this patriotism framework relies on Malay culture and Islam as the official religion of the country as well as not disregards other ethnic cultures and religions. The goal of patriotism in the context of Malaysia leads to the enrichment of pride values as Malaysian, loyalty to the King and country, have a sense of belonging, has a level of discipline and obedience towards the laws of the country and becoming a competitive and productive society. In order to make this aspiration a reality, various attempts have been made in myriad number of schools, higher education institutes and education as well as community which is driven by the government, private organizations as well as NGOs. Apart from that, a detailed discussion on issues related to the challenges in establishing racial harmony which is a major factor in the formation of Malaysian patriotism framework as well as the suggestions to enforce patriotism among Malaysian nation are also incorporated.

Keywords: patriotism framework, national pride, loyalty towards the King and country, sense of belonging and productive.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

** Faculty of Education, National University of Malaysia.

I. INTRODUCTION

The colonialism background has witnessed the changes on the citizens' demographic landscape when the British brought in immigrants to Malaya in order to fulfill their economic interests since the 18th century. This situation leads to the establishment of multi-racial communities comprises of indigenous people which majority of them are from Malay ethnicities as well as the presence of other ethnics including Chinese and Indians (Chamil Wariya, 2007).

After the establishment of Malaysia dated 16 September 1963, the acceptance of Sabah and Sarawak leads to the increment in the ethnics' number which categorized as Sabah and Sarawak indigenous ethnics. The implementation of divide and rule policy by the British during the colonial era have separated ethnic groups based on occupation and settlements, where Malay ethnic and aboriginals groups remain in traditional agriculture in rural areas based on plantation and rice cultivation, while the whereas the Chinese manage the mine areas which eventually developed into cities while the Indians conscripted as laborers in the farm and settle in estate areas.

After the country achieve its independence in 1957, the government took an action to change the settlement and occupation landscape via education and economy development, however, this situation can not be fully accomplished where the Malays and Indians are still lagging behind in economic development and education as compared to the Chinese communities. The majority Malays tend to work in the public sector, while the Indians are still focuses on labor-based economic activities while only small part of them have successfully improve their living standards. These factors have been identified as the main cause of the racial relationship rift in our country.

However, the fundamental reason which leads to the difficulties in embodying the spirit of patriotism among Malaysians is the retention of vernacular schools founded by the colonizers which result to the absence of interaction and a sense of belonging among students since childhood because of the existence of schools based on race.

II. MALAYSIA-MOLDED PATRIOTISM

To construct patriotism according to Malaysia's mold in unifying various ethnic groups in Malaysia, the principles that lead to the development of Malaysian patriotism has being implemented at various levels, through education, culture and economy. Education is a basic agenda in developing patriotism while economic and cultural are the aspects to enforce the developmental agenda of nation patriotism.

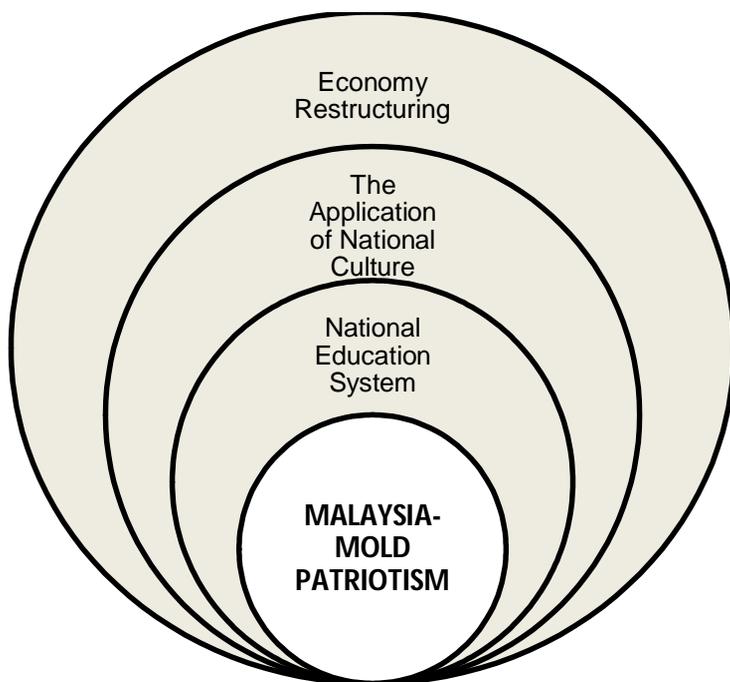


Figure 1 **Malaysia-mold patriotism**

The features of Malaysia-mold patriotism is covering the following aspects: (a) enrichment of nation pride values which make every citizen always practiced the spirit to develop the country and figure out what contribution can they make towards the country, (b) loyalty to the King and Country which becoming the core of Malaysian nation and a legacy that continues to be maintained as a symbol of national sovereignty. Malaysia is unique because it has nine Sultans

who became the Head of the states and the election of the King as the Head of the country, (c) have a sense of belonging, which has an affiliated value and always feel togetherness as a community, (d) have a level of discipline and obedience towards the laws of the country as well as (e) becoming a competitive and productive society.

2.1 Education and Patriotism

Educational approach is as observed in the National Education Ordinance 1957, which is based on the Razak Report 1956. This Razak Report has provided clear guidelines to ensure the success of the education role as an agent of for racial unities through the usage of uniform curriculum which makes the Malay language as the language of instruction and the establishment of type-based school namely National School / National Secondary School. The curriculum has been implemented in a centralized form to ensure the uniform implementation throughout the country (Kamaruddin, 1999).

The History subject in Secondary School level have been implemented since the beginning of independence, which also introduced in primary schools but still focuses on orientalist's view which hides the actual facts and consider the independence fighters as rebels instead of the real fighters (Khoo Kay Kim, 1992). However, after the independence, many attempts have been made in strengthening History curriculum based on Malaysian Centric where the freedom fighters which previously considered as rebels has been reappointed as a hero in the history of Malaysia and correcting the facts that had been long hidden.

The efforts to strengthen the History curriculum in implementing patriotism began drastically when the New Integrated Curriculum for Secondary School (ICSS) was introduced in 1985 with the integration of culture elements and values that drive patriotism among students. History curriculum that was introduced at this stage is only taught in secondary schools which involving two categories: History of World Civilization and History of Malaysia to educate Malaysians on the historical existence of the nation in the outside world and how the developmental aspect of the civilization can be applied for the country's development. It is expected that the students will learn about the global values to be instilled in their open mind.

On the other hand, the application of patriotism based on Malaysia history is associated with the local value by strengthening the students' knowledge on the history of nation building, the vagaries for the establishment of the nation and the challenges and threats as well as its relationship with the civilization of other nations in the world (History Syllabus, 2000). For this purpose, the fighting spirit of the national heroes in the struggle for independence until the emergence of radical nationalism and via political parties have being raised to increase the awareness on the value and the price of freedom which is achieved through struggle and sacrifice. In addition, the role of other ethnic groups in Malaysia history is also highlighted for the purpose to establish the sense of equality and creating a sense of belonging to show that every ethnic plays a vital role in creating a sovereign and harmonious nation country.

The goal for the establishment of World History and History of Malaysia curriculum is to produce a generation that values the identity in the spirit of localities, which love the race and country without neglecting the universal patriotism value learnt in World History in order to produce Malaysia nation which are not to obsessed on their own races and lead to the hatred towards other races. In this context, the underlying aspect for a harmonious country is not only limited to the local-based patriotism but also involving the global patriotism which have to be appreciated in order to contribute to the harmony and universal prosperities (Abdul Razaq Ahmad & Anuar Ahmad, 2011).

The patriotism values which are based on local and global spirit in order to make students to be more mature in deeply appreciating patriotism appreciate towards the local values as well as respecting other countries. This aims to make the established universal patriotism is not only for ensuring the security within country but also for global peace. This is the mold that wanted to be applied among Malaysians. However, the aspiration is still in the process which has many challenges and obstacles to serve effectively as an agent to strengthen patriotism because the knowledge of history is only studied for examination purposes and not to be applied and practiced to shape the patriotism values. Ahmad Razaai (2011) found that majority of students are less interested in studying History subject due to its compact contents only learning the subject for the purpose of passing the examination. Abdul Razaq Ahmad & Anuar Ahmad (2011) on the other hand, recognizes the occurrence of this situation is due to the

lack of skills and competencies of history teachers in implementing the patriotism spirit in the classroom because the teaching approach is also emphasizing on the examination requirements rather than to develop patriotism.

To reinforce this effort, the Ministry of Education has required the pass status of History subject for Malaysian Education Certificate examination since 2013 where the students who failed History subject history can not pursue higher education institutions. Apart from that, the History subject has also been reintroduced in Phase II (Year 4-6) primary schools, which have been neglected for so long. This is because the early stage of child development is an important stage for strengthening the patriotism because children are relatively easier to accept and live the values of applied patriotism. These subjects were also introduced in National-Type Chinese and Tamil School. In addition, to further strengthen the appreciation of patriotism, the civics and citizenship subject was also introduced at the secondary school level in which the concept of appreciation of the Constitution and National Principles has also been emphasized to educate and strengthen the value of patriotism among students.

For the continuation of patriotism, the core subjects at all higher education institutions, namely the relationship between ethnicity, citizenship, TITAS (Islamic and Asian Civilization) are also taught. It aims to provide a high intellectual understanding among students in order to understand the history of ethnic relations in Malaysia, civilization and nations culture in order to avoid misunderstandings and prejudices which are often driven by emotions and the absence of facts that gave rise to the conflict and lead to the estrangement of racial relationship and thus retarding the process of strengthening patriotism of Malaysian nation. This higher education level is more focused on the facts and research-based data which are scientific and regularly debated openly. This is the highest process in producing a nation of mature minded, open and respecting other ethnic principles, which can strengthen the values of patriotism and values of global peace that can be translated into the development of patriotism at the community level.

2.2 Economic and Patriotism

Economic approach is also becoming an important government agenda to bridge the economic gap between races. According to the study conducted by Hamidah Abdul Rahman, et al. (2002), the economic gap can make people

always tenuous and lead to the dissatisfaction toward other races as well as frequently looking for a variety of offenses to other races which result to all efforts that can be implemented through education will delay the formation of patriotism among Malaysians.

To overcome this problem, the Government has restructured the economy as soon as the independence through the establishment of New Economic Policy (NEP) to help the indigenous communities that have been left behind from economic development during the phase 1970 to 1990 as well as conducting various efforts and measures to help the Indians to bridge their economic disparities with other ethnic groups. This policy has also been successful in bridging the economic gap between the three main ethnic groups, resulting in a lack of quarrel and conflict between races. This is also a vital factor in supporting the development of patriotism in education field. Nowadays, the Malays and Indians have also dabbled in business and entrepreneurship, which previously monopolized by the Chinese. Professionalism field also involves various races regardless of their background. However, the gaps are still existing in the field of employment and the economy in which the Malays and Indians are mostly working in the public sector while the Chinese working in the private sector and business. Noraini et al, (1996) pointed out that this situation leads to a lack of inter-ethnic interaction in everyday life which also reduces the ethnic relations. Interaction and ethnic relations in everyday life is imperative to understand each other and create a sense of belonging to strengthen the values of patriotism among Malaysians.

Therefore, the restructuring of job placement is to create a balanced economic dominance among all races. If the aspiration in creating strong patriotism want to be realized in the real life of Malaysians as envisaged in Vision 2020, hence this economic restructuring is a vital aspect. Vision 2020 highlighted Malaysia as a developed nation with loyal nation towards the country through the productive economic activity which not only focuses on self-interest merely but also boasts Malaysia in the international arena. It is hope that eventually, Malaysia will becoming the new model of patriotism which is unique to Malaysia nation and can serve as a guide and benchmark for other nations comprises of ethnic diversity.

2.3 Culture and Patriotism

The race riots that happened and broke out on May 13, 1969 has provoked the government reflection to think about the basic philosophy of the country that need to be internalized by every citizen in order to avoid a similar conflict to happen, because all ethnic groups share a same country and hence there is a need for dominant step to maintain its stability. Thus, in 1970 National Principles has been proclaimed as the National Philosophy that should be practiced by all people regardless of race, which covering 5 principles:

1. Believe in God
2. Loyalty to the King and Country
3. Supremacy of the Constitution
4. Rule of Law
5. Good Behavior and Morality

National Cultural Policy (NCP) was introduced in 1974 through National Cultural Congress is led to the consideration of patriotism establishment among Malaysians. Shamsul Amri Baharuddin (2012) stated that Malaysia is still deemed as country without a nation. This means that each ethnic have their own sense of belonging and practice their respective lifestyle, culture and believe which seen as segregations such as the Chinese which still practice their way of life, as well as the Indians and Malays. To overcome this problem, implemented NCP has highlighted three principles to unify the culture of Malaysia nation, namely:

1. Culture is based on Malay culture and original people from this region.
Malay culture which is founded since the Malay Sultanate era in Malaya continue to remain as a preserved heritage and roots of nation's identity and Malay modesty value will become an important tool in strengthening the relations with other races.
2. National culture based on Islamic values
Malaysia nation has also accepted Islam as the official religion which spread the values of kindness as an effort to strengthen Malaysia's civilization that which is in moderate level and not driving towards extremisms.
3. Receive other non-conflicted cultural elements
To ensure harmonious relations between races as well as to maintain stability, the ethnic element is also taken into account in establishing

the basis of National Culture Policy. In other words, each ethnic is required to have mutual acceptance and respect towards each other.

To apply the appreciation of the belonging values which leads to the Malaysia nation patriotism, various efforts have been conducted related to the culture of various ethnic groups in Malaysia by organizing community activities as well as yearly races celebration as a national agenda. Apart from that, NGO's also held volunteerism- based activities to establish a strong belonging relationship to inculcate the patriotism values among various races as the foundation of a sustainable nation. Various ethnic groups in Malaysia are continuously encouraged to highlight the respective identity and diversity of their cultures to be accepted as the cultural heritage of Malaysia involving the arts, dance, dress, food, festivals as long as it is not contradictory and disturbing the sensitivities of other races. A range of activities was organized to develop patriotism through various approaches according to myriad situations and circumstances via open activities, individual and even social media.

III. MALAYSIA-MOLDED PATRIOTISM FRAMEWORK

Malaysia-molded patriotism framework can be summarized as figure below:

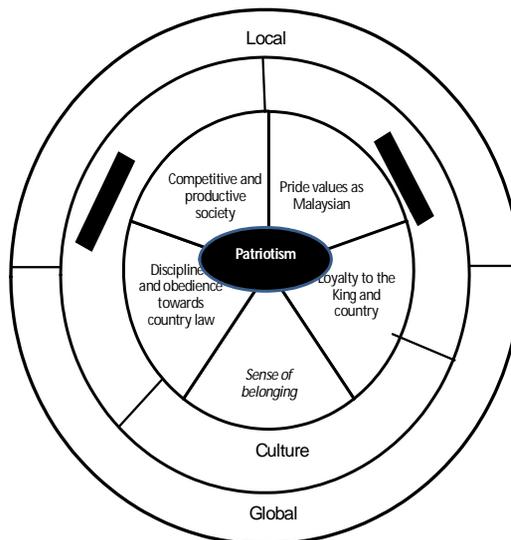


Figure 2 **Malaysia-Molded Patriotism Frameworks**

The discussion about the history of Malaysia nation patriotism development lead to the development of local and global characteristics to create a generation of Malaysians who have pride and love towards the country in a broad perspective, mature and rational as well as having global-level thinking, understand the rule and the principles of foreign countries which intertwined with the harmony and universal peace. This is vital in order to create the world that has a patriotism which is more open and respectful towards each other as well as can be used as a basis to curb extremism agenda and today's fundamentalist as a result of conflict and distorted foreign elements which carries agenda beyond the limits of humanity.

Malaysia-Molded Patriotism Framework as depicted in figure 1 above is based on a discussion regarding to the approach used in Malaysia to develop Malaysia Nation patriotism which uses educational approach as the main agenda for the realization of the application and practicality of patriotism values in shaping the national identity which later supported by economic and cultural approach. To further strengthen the patriotism values which is based on five aspects namely: to make Malaysia nations applying the patriotism based on strong local values and not easily influenced by foreign elements as well as making Malaysia nation to be matured and open towards other races and countries which are interdependent in creating global security. These patriotism values are very important to prevent the excessive obsession attitudes and hatred towards other races which can result to global conflict and it can also be used as an alternative model that can be expanded up to the world.

IV. SUMMARY

Malaysia nation patriotism is a prolonged process that has faced many twists and turns as well as challenges as a result of the colonial divide and rules policy executed by the British and leads to several conflicts between ethnic groups in Malaysia. The conflict has make Malaysia ethnics to be more matured in seeking understanding and tolerance in order to maintain inter-ethnic harmony in which the values of belonging, loyalty to king and country, obedience to the law and becoming a competitive and productive society are the patriotism values that can be used as the most important basis in the agenda of relationship development and the harmony of all races. These efforts have to be reinforced at

times using a variety of continuous approaches. Despite being in a relatively long process, the impacts and results of the efforts and approaches have slowly becoming visible in order to make 1 Malaysia aspiration of One Nation One State becoming a reality.

REFERENCES

- Abdul Razaq Ahmad and Anuar Ahmad. 2011. *Education and Ethnic Relations (Pendidikan dan Hubungan Etnik)*. UKM Publisher.
- Ahmad Razaq Ayuda, 2011. The effectiveness of the History curriculum in increasing the willingness to learn, achievement of goals and thinking skill among students. Unpublished thesis. (Keberkesanan kurikulum sejarah dalam meningkatkan kesediaan belajar, pencapaian matlamat dan pemikiran dalam kalangan pelajar) National University of Malaysia.
- Chamil Wariya, 2007. *Various perspective of a plural society in Malaysia. (Pelbagai perspektif tentang masyarakat majmuk di Malaysia)* Utusan Malaysia.
- Hamidah Abdul Rahman, Mohamad Daud and Norlin Ahmad. 2002. *Economic Development in Ethnic Relations. Ethnic relations in Malaysia, theory perspectives and practice (Pembangunan ekonomi dalam hubungan etnik. Hubungan etnik di Malaysia, perspektif teori dan praktik)*. National University of Malaysia.
- Kamaruddin, 1999. *The Challenge of Ethnic Relations in Malaysia. (Cabaran hubungan etnik di Malaysia)*. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar.
- Khoo Kay Kim, 1992. *Social and Political Issues in Malaysia. (Masalah Sosial dan Politik di Malaysia)* Kuala Lumpur: Gateway Publications
- Noraini Ahmad, Siti Aisyah Abdul Rahman and Fadilah Raini. 1996. *The Practice of Training and Human Resource Development in Malaysia. (Amalan latihan dan pembangunan sumber manusia di Malaysia)*.
- Syllabus History, 2000. *The content of History Curriculum in Secondary School. (Kandungan kurikulum sejarah sekolah menengah)*. Kuala Lumpur: Ministry of Education.

A TAXONOMY OF MALAYSIAN CITIZENSHIP COMPETENCE

Mohd Mahzan Awang

mahzan@ukm.edu.my

ABSTRACT

This paper proposes a taxonomy of Malaysian Citizenship Competence. The taxonomy is proposed based on the empirical evidence of past studies on citizenship as well as the political and historical background of Malaysia. This paper highlights the emergence of citizenship in Malaysia where it was rooted in the introduction of Malayan Union by the British Administration in 1945 (with the concept *Jus Soli*). Malayan Union leads to the formulation of the Constitutional Law for the Federation of Malaya where people from various ethnic backgrounds are accepted as Malaysian citizens (but they have to fulfil the requirement as stipulated in the Constitutional Law). Since then, many initiatives have been taken by the Government in order to promote citizenship and democratic values among people in Malaysia. Civic and Citizenship education for instance has been introduced in primary and secondary schools as one of the compulsory subjects regardless of types of schools. This historical background provides foundations to understand the conceptualization of Malaysian citizenship. As citizenship competence require the elements of competency, the Iceberg Model of Competency has been referred as a theoretical background to develop a taxonomy of Malaysian Citizenship Competence. The taxonomy proposes four levels of Malaysian Citizenship Competence namely awareness, participation, contribution and devotion. Justification of these elements are discussed briefly.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

**Faculty of Education, National University of Malaysia.

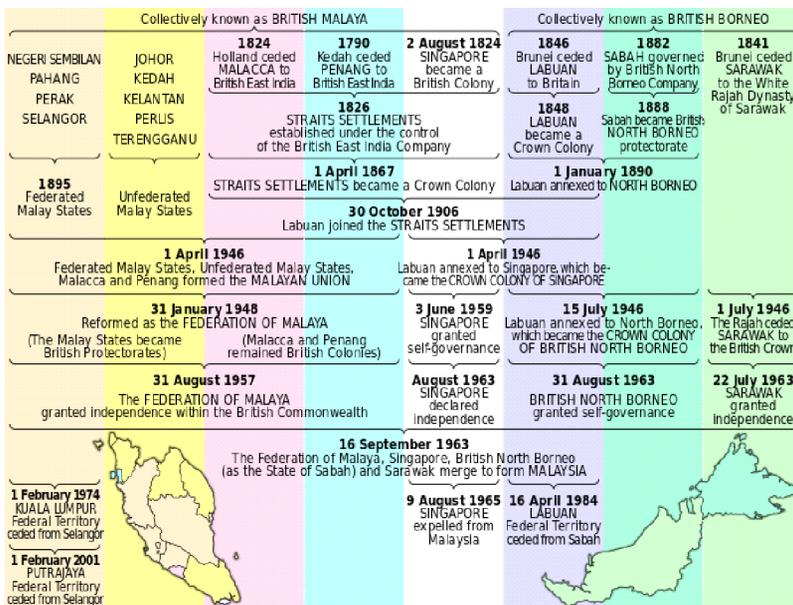
I. INTRODUCTION

Preserving the independence of a country is responsibility for every citizen. People awareness on the importance of protecting a country from colonisation is vital as it determines the sustainability of a country independence and development. It also requires a full commitment from every single citizen to ensure a country freedom from colonials. Without those efforts, the future of a country will be problematic. Historical evidence shows that internal and external conflicts will have a great impact on a country's sustainability. Many civilisations were ruined due to the people conflicts. To ensure the sustainable independence, reducing conflict and managing security threats are vital. Internal conflicts that may lead to a massive problem need to be dealt effectively. Without concrete measures to overcome these issues, a country security will be an issue. In order to comprehend this issue, an overview of historical background is vital.

II. HISTORICAL BACKGROUND OF MALAYAN CITIZENSHIP

Malaysia had been ruled by the British Administration for more than 100 years. During the British administration, a lot of changes had been introduced and implemented. The political structure in Malaya was found to be more complicated before the Second World War. During that decade, Malayan citizenship and Nationality were not given attention by political leaders. After the Second World War, Malayan citizenship and Nationality became an issue especially when the British introduced the concept Malayan Union. Historically, the idea of the Malayan Union was first expressed by the British on October 1945. The major part in Malayan Union that makes the Rulers and Malay population felt unhappy was regarding the citizenship via Jus Soli. Laterally, 'Jus soli' means birthright citizenship, meaning that is the right of anyone born in the territory of a state to nationality or citizenship. The British proposed Jus Soli where an individual has his/her right to get automatic citizenship and he/she will get equal rights. Specifically, the Malayan Union was automatically granted to people who were born in any state in British Malaya or Singapore and were living there before 15 February 1942, born outside British Malaya or the Straits Settlements only if their fathers were citizens of the Malayan Union and those who reached 18 years old and who had lived in British Malaya or Singapore "10 out of 15 years before 15

February 1942". In details, the group of people eligible for application of citizenship had to live in Singapore or British Malaya "for 5 out of 8 years preceding the application", had to be of good character, understand and speak the English or Malay language and "had to take an oath of allegiance to the Malayan Union". This proposal had highlighted issues of citizenship and people started talking and arguing on 'who are the Malayan citizen'. However, the Malayan Union version on citizenship proposal was never actually implemented. Due to opposition to the citizenship proposal, it was postponed then modified, which made it harder for many Chinese and Indian residents to obtain Malayan citizenship (Carnel, 1952). In order to summarize the evolution political history in Malaya, Figure 1 shows detailed chronological events of the administration in Malaya since 1824 until the formation Malaysia.



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Malaysia

Figure 1. Evolution towards Malaysia

Figure 1 shows that the Federation of Malaya contains 11 states (nine Malay states and two of the British Straits Settlements, Penang and Malacca) that existed from 1 February 1948 until 16 September 1963. The Federation of Malaya became independent from the British government on 31 August 1957.

The citizenship of people was clearly stipulated in the Constitution Law that was developed based on the advice of the Reid Commission. The Constitution came into force shortly after its independence on August 31, 1957. In 1963, the Federation of Malaya was reconstituted as Malaysia with the addition of Sabah and Sarawak.

III. MALAYSIAN CITIZENSHIP AND NATIONALITY

The historical background of political change in Malaya provides an overview of Malaysian citizenship. Before discussing further, it is relevant to clarify two terminologies namely Citizenship and nationality. These two terms are sometimes used interchangeably. Some people tend to equate the concept of nationality with citizenship. Although both terms are interrelated, there are several elements differentiate these two concepts. Generally, citizenship is a legal status for an individual in some country. His/her nationality status in a country is dependent on his/her residential status in some country. Citizenship is granted when an individual is accepted into that country's political framework through legal means. Citizenship is a legal status which means that an individual has been registered with the government of any given country. Nationality is got through inheritance from parents. Nationality is got through inheritance from parents. It is also called a natural phenomenon. On the other hand an individual becomes a citizen of a country only when he is accepted into that country's political framework through legal terms. No one will be able to change his nationality but one can have different citizenship. Applying in a Malaysian context, Malaysian nationality is more likely relating to biological background of people whereas Malaysian citizenship is referring to the residential status of a person in Malaysia.

The term citizenship is also mentioned in the Federal Constitution of Malaysia. Historically, the actual citizenship and nationality law of Malaysia was formed in 1948. Prior to that there are no such laws. The Citizenship law was clearly stipulated in the 1948 Federation of Malaya Agreement. In 1952, the law has been amended (Nazaruddin 2001). To date, citizenship in the Federal Constitution of Malaysia was set out in Part II (Freedom integral) - 5 to 13 related rights and responsibilities of citizens in the country. Part III (Citizenship) - 14 to 31. Malaysian Citizenship is a special status given to an individual (Nazaruddin 2001) which gives and individual the rights, benefits and privileges such as the rights to

participate in the election, actively participate in politics, hold key positions, own properties, and etc.

In order to comprehend the Malaysian citizenship requirement, a review of the Malaysian Constitutional Law (1964) regarding Malaysian citizenship requirement is imperative. There are two main methods to become a Malaysian citizen are (1) by naturalisation, and (2) by registration. Naturalization is the method by which people with no Malay heritage may become citizens. This process requires would-be citizens to live in Malaysia for 10 of the 12 years prior to the application and speak the Malay language. The level of speech and comprehension of Malay is vaguely defined in the constitution, which states applicants should have “adequate knowledge.” Besides providing one’s own identity and residence documents and proving knowledge of Malay, an applicant must submit the identity cards of two Malaysians who recommend the applicant for citizenship. Registration is the method of getting citizenship via application. A child born in Malaysia or outside of Malaysia to Malaysian parents is a Malaysian citizen. If the child has one Malaysian parent and is born in Malaysia, the child is also a citizen. If a child is born outside of Malaysia to one Malaysian parent, he is not a citizen, but may become a permanent resident of Malaysia and later apply for citizenship. In all of these cases, citizenship is conferred by law, but the parents must still register the child at the Malaysian National Registration Office to officially obtain the child’s Malaysian citizenship. An “elementary knowledge” of the Malay language is required to obtain citizenship by registration. It is important to highlight that Malaysia does not recognize dual citizens. If a citizen of Malaysia takes on citizenship in another country, her citizenship is revoked by the Malaysian government.

A person can become a citizen of Malaysia either by registration or naturalisation. In cases by registration, where a person is by operation of law is a citizen but have yet to be registered, such person is entitled to citizenship upon application and be registered as a citizen of Malaysia. For cases by naturalisation, this refers to the process of admitting a person not a citizen of Malaysia to citizenship. This is subjected to the requirements and conditions of the Federal Government. Any person holding Malaysian citizenship is also disallowed to hold any other country’s citizenship. Malaysia does not allow dual citizenship.

Those applying for citizenship by registration must have “an elementary knowledge of the Malay language”. Those applying to become naturalised citizens must have “an adequate knowledge of the Malay language” and have resided in the country for ten of the past twelve years, including the twelve months immediately preceding the application. These requirements are set out by Part III of the Constitution; however, as there is no objective definition of what constitutes elementary or adequate knowledge of Malay, in practice, the tests are often subjective, sometimes even varying in whether a written knowledge of Malay is required.

Citizenship could also be revoked for Malaysian expats living abroad who have not registered with the Malaysian Embassy, or citizens who work for a foreign government without permission of the Malaysian government. In details, a person who is a citizen can lose his citizenship in two ways: first, he refused citizenship because of their own reasons. Second, he has violated the law and making a prohibited act like a foreigner, use rights and facilities in other states while those rights to citizens only, act negatively disloyal to the state, in relation to the country's enemies and so on.

IV. PROMOTING CITIZENSHIP COMPETENCE IN MALAYSIA

In a Malaysian context, citizenship values are formally promoted in schools via academic subject i.e. Civic and Citizenship. This is a compulsory academic subject for all students in primary and secondary schools. Civics and Citizenship Education aims to bring awareness among students about their roles, rights and responsibilities in society. It also aims at promoting active participation, instilling patriotic values and acting democratically so they can contribute to the betterment of society, nation and world. It is in line with the National Education Philosophy where clearly stated that education in Malaysia is an on-going effort towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner, in order to produce individuals who are intellectually, spiritually, emotionally and physically, balanced and harmoniously, based on a firm belief in and devotion to God. Such an effort is designed to produce Malaysian citizens who are knowledgeable and competent, who possess high moral standards and who are responsible and capable of achieving a high level of personal wellbeing to contribute to the betterment of the nation, family and society.

At the primary school level, Civic and Citizenship Education contains three main domains in its curriculum namely the domain of knowledge, skills and values. Students at a primary school level are expected to have knowledge on good behaviour that can contribute to a good person; explain their roles and responsibilities towards the formation of happy family; explain the importance of living harmoniously; explain the Malaysian administration system and the contribution of the national leaders; and identify challenges and threats in a society. In addition, students are also expected (in a domain of skill) to be responsible and able to manage themselves; practising simplicity in behaviour; polite interaction with family, peers and society; solving conflict effectively; learn how to live together; involving in societal activities; and making a right decision. In a domain of values, there are seven citizenship values that are going to be instilled for primary school students: having self-confidence, appreciating the contribution of parents and family members, respecting other cultures and ethnicities, showing togetherness values, taking care of nature, respecting leaders and appreciating their contribution, and loving to a country and proud to be a Malaysian. To measure student learning in Civic and Citizenship Education in terms of knowledge, skills and values, teachers are encouraged to use various types of assessment. These include observation, behavioural checklists, tests, assignments and reports.

At the secondary school level, the curriculum of Civic and Citizenship education is also categorised into three main aspects i.e. knowledge, skills and values. In terms of knowledge, secondary school students are expected to have in-depth knowledge on personal characteristics that could contribute towards a country development. Students are also supposed to have knowledge on their roles and responsibilities for developing a well-being society. They also need to know various cultures and traditions for unity; be able to explain the government initiative to produce progressive, dynamic and patriotic society; able to elaborate the roles and responsibilities towards a country development; and have knowledge on preservative action to face challenges and national threats. From the domain of skills, students are expected to be disciplined in achieving the vision; able to carry out responsibilities as a family member for developing a happy family; able to carry out positive interaction with multi-ethnic society for the purpose of national unity; able to solve conflicts; able to work together in a society; able to get involved

in various civic activities; and able to take action in various situation. Eight citizenship values in secondary school Civic and Citizenship curriculum are as follows: (1) have visions to achieve targets at an individual, societal and national level; (2) appreciate the contribution of a family in establishing prosperous society; (3) proud with cultural diversity in Malaysia; (4) appreciate nature in improving quality of life; (5) aware of the needs in a community; (6) awareness of civic and citizenship responsibilities; (7) have high patriotism and willing to sacrifice for the country; (8) and show a sense of belonging in maintaining peace and harmony.

At the tertiary level, the Malaysian government has implemented the national service programme that aims at promoting patriotism among youth, unity and integration, positive characteristics and noble values, volunteerism and active, intelligent and self-confidence.

V. THEORETICAL MODELS OF IMPROVING CITIZENSHIP COMPETENCE

There are two main aspects that are required to be investigated when talking about citizenship competence. Firstly, the concept of citizenship, or in other words the content knowledge on citizenship by taking into account the socio-political and cultural background. As discussed earlier, the concept of Malaysian citizenship has an association with the Malaysian constitution law. Detailed elements to become a Malaysian citizen had been discussed from the legal perspective. In addition, several elements on citizenship as stipulated in the Malaysian Civic and Citizenship curriculums are considered to be parts of Malaysian citizenship.

Secondly, the concept of 'competence'. In this paper, the concept of 'competence' will be reviewed from the Iceberg Model of Competency (Spencer & Spencer, 1993). Spencer and Spencer (1993) proposed the "Iceberg Model" to divide underlying characteristics, which caused a person behaviours and performance into five elements, namely motives, traits, self-concept, knowledge and skills. According the "Iceberg Model" (Spencer and Spencer 1993), 'Motives' refers to an individual's desire to achieve the institutional or organisational goals. Motives are supposed to be consistent in order to ensure the successfulness of the achievement. Having a strong desire to achieve the target will automatically affect a person action and behaviour. Achievement motivation is important in

order to ensure the achievement of the goals. Traits refer to physical and mental characteristics related to the ways a person consistently responded in certain ways to situations and messages. It is also known as reaction time and emotional self-control. The third element in the "Iceberg Model" is Self-concept which is referring to an individual's attitudes, values, and self-image, including self-identity and self-confidence. Knowledge referred to a capability of an individual to understand a certain subject. The final element is 'Skills' which refers to the ability to accomplish a certain task by using various methods and strategies. These five elements are interrelated each other and vital for every single person in an organisation. Applying these elements in the context of a country, every single citizen must be able to have strong desires in achieving the country goals; practising suitable and effective ways to achieve the country vision; obtain a sufficient knowledge of good citizens; have a positive attitudes; and able to perform in a right way.

According Iceberg Model of Competency (Spencer & Spencer, 1993), knowledge and skills were visible and appeared at the top of the iceberg. Many empirical evidences suggest that knowledge and skills are relatively able to be developed and improved, especially through systematic training. On the other hand, motives traits seem to be more difficult as they are the innermost part of an individual's personality. This means that we are able to see the top of the iceberg (knowledge and skills) as it appears clearly; however, we are not really sure the bottom part of the iceberg (motives, traits, self-image and social role). Therefore, they were more difficult to develop and it requires various strategies that might be beyond the existing educational models. This model has been applied widely in many business organisations, especially in improving an individual potential and achievement. In addition to the idea of the iceberg model, the concept of soft skills and hard skills are also introduced. Soft skills are behavioural elements that are associated with the action for successful interpersonal interaction. This includes communication, leadership, interaction, problems solving, social relationship, networking, and management skills. Meanwhile, hard skills refer to visible competencies including overt behaviour and action of an individual. In comparison with the iceberg model, soft skills are more like likely to be hidden that are in the bottom of iceberg, on the other hand the hard skills are appeared at the top of iceberg.

Ten Dam (2011) has integrated these two main aspects (citizenship and Iceberg Model of Competency) in an academic discourse on citizenship competence. Ten Dam (2011) developed a model of citizenship competence by looking at social tasks for every individual in a country. According to this model, every single person need to have knowledge, skills and positive attitudes towards social tasks. Social tasks in this model are divided into four elements namely acting democratically, social responsivities, conflict management and managing differences. Ability to act democratically according to Ten Dam et al (2010) refers to a person capability in the views and listening to the opinions of others. Capability of adapting to society and ability to manage differences are two elements determining the competency level of an individual as a citizen. In term of attitudes, good citizens are supposed to (1) ready to listen to the views of others, actively participate in any discussions and able to contribute to critical ideas; (2) support social justice, ready to provide assistance; ready to examine conflicts, ready to consider views of solutions together and reach a consensus; and (3) the desire to positive attitude and open mindedness.

VI. CONCLUSION

Taxonomy of Malaysian Citizenship Competence?

It has been discussed earlier that two main components that are supposed to be taking into account when thinking of Malaysian citizenship are the content knowledge and values of citizenship and the elements of competency. Content knowledge required for Malaysian citizenship can be summarised as follows: (1) knowledge and values on political and historical background of Malaysia, (2) knowledge and values on Constitution Law especially on the Part I (the States, religion and Law of the Federations), Part II (Fundamental Liberties – liberty, freedom & rights), and Part III (Citizenship - Chapter 1 Acquisition of Citizenship, Chapter 2 Termination of Citizenship, and Chapter 3 Supplemental), (3) Knowledge and values on faiths, beliefs, multi-cultural, societal values and norms; and (4) knowledge and values on individual potential and elements of global citizen. By taking into these elements, I am proposing a taxonomy of Malaysian Citizenship Competence.

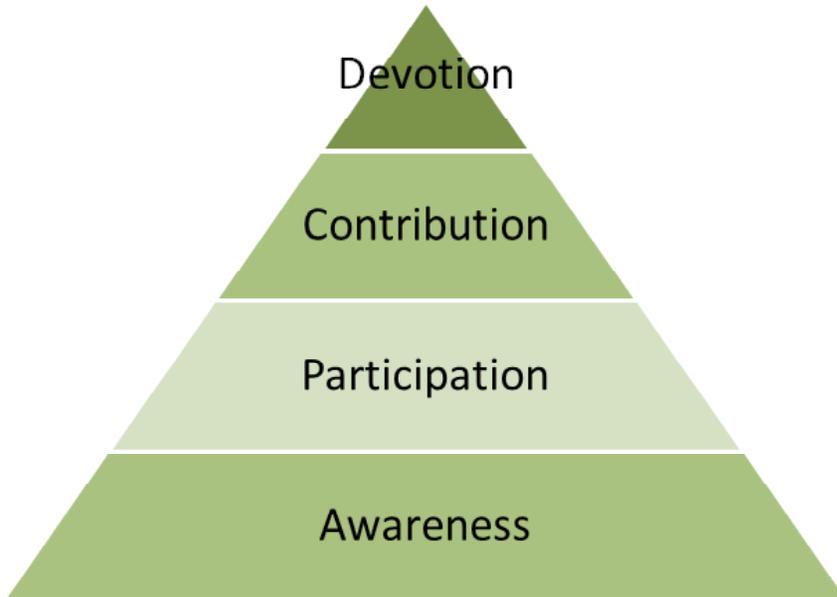


Figure 2. Taxonomy of Malaysian Citizenship Competence

Figure 1 shows that the Taxonomy of Malaysian Citizenship Competence contains three levels of competence. The foundation of citizenship competence is referring to the awareness to be a Malaysian citizen. At this stage, every citizen must accept his or her status as a Malaysia. Accepting the Malaysian citizenship means they need to have knowledge on historical background of Malaysia and also respect the Constitution law. Showing respect to the Constitution law require in-depth understanding on their own rights and responsibilities. The second level of Malaysian Citizenship is the participation in various civic and positive activities. This includes the participation in socio-economic activities. A competent citizen is supposed to have efforts to lead, manage and encourage people to get involved in various activities. By participating and engaging in those activities, a person will contribute to a development of a country. In this level, the contribution is supposed to have a positive impact on many aspects. The highest level of this taxonomy is Devotion referring to a commitment to dedication to a country. At this level, a competent citizen is willing to sacrifice many things for the sake of a country development and wellbeing.

BIBLIOGRAPHY

- Awang, M.M., A.R. Ahmad, N.A. Bakar, S.A. Ghani and C.P. Saad *et al.* 2014. Examining gaps between students' expectations and experiences in a private university. *Mediterranean J. Social Sci.*, 5: 396-401. DOI: 10.5901/mjss.2014.v5n8p396.
- Awang, M.M., Alfitri, Ahmad, A.R. & Ulu, N.L. 2016. Measuring Multi-Ethnic Students Citizenship Competence: Domains and Indicators. *American Journal of Applied Sciences*. 13(1), 123-130.
- Awang, M.M., D. Jindal-Snape and T. Barber, 2013. A documentary analysis of the Government's circulars on positive behavior enhancement strategies. *Asian Social Sci.*, 9: 203-208. DOI: 10.5539/ass.v9n5p203.
- Baharuddin, P.N.S. and H.H. Hashim, 2004. Model kompetensi perkhidmatan awam Malaysia. *J. Pengurusan Awam*, 3: 79-98. http://www.myjournal.my/filebank/published_article/24184/Article__7.PDF.
- Bandura, A., 1982. Self-efficacy mechanism in human agency. *Am. Psychologist*, 37: 122-147. DOI: 10.1037/0003-066X.37.2.122.
- Brimall, S. and J. White, 2000. Will the new National Curriculum live up to its aims? *Impact*, 6: 7-51. DOI: 10.1111/j.2048-416X.2000.tb00041.x.
- Carnell, Malayan Citizenship Legislation, *International and Comparative Law Quarterly*, 1952.
- Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2007. *Research Methods in Education*. London: Routledge.
- Dewey, J. (1966/1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. New York, NY: Macmillan.
- Escorza *et al.*, 2014. Study of citizen competences among students of a private university in Mexico. *Res. Higher Educ. J.*, 22: 1-14. www.aabri.com/manuscripts/131673.pdf.
- Johanson, G.A. and G.P. Brooks, 2010. Initial scale development: Sample size for pilot studies. *Educ. Psychological Measure.*, 70: 394-400. DOI: 10.1177/0013164409355692.
- Malhotra, N.K., 2007. *Essentials of Marketing Research: An Applied Orientation*. 2nd Edn., Pearson Education, Australia, ISBN-10: 0733984215.

- McBer, H., 1996. Scaled competency dictionary. Boston.
- MEM, 2014. Malaysia Educational Statistics. Putrajaya, Educational Planning and Research Division.
- Mohamed Ali, H. and Mohammad Redzuan, O. 2012. Pergaduhan kaum di tanah melayu selepas pendudukan jepun hingga darurat diisytiharkan. *J. Sejarah*, 20: 97-124. http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/25242/Article__5.PDF.
- Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Nora'asikin Abu Bakar, Sayuti Abd Ghani, Asyraf Nadia Mohd Yunus, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Jaya Chitra Ramalu, Che Pee Saad & Mohd Jasmy Abd Rahman. 2013. Students' Attitudes and Their Academic Performance in Nationhood Education. *International Education Studies*. 6(11), 21-28.
- Mohd Mahzan Awang, Noor Azam Abdul Rahman, Noraziah Mohd Amin, Abdul Razaq Ahmad. 2015. Mesej Perpaduan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 4 dan 5: Analisis terhadap Peribahasa Melayu. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*. 5(1), 44-52.
- Mohd. Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Nora'asikin Abu Bakar, Sayuti Abd Ghani, Che Pee Saad, Saliza Husin, Zaharuddin Hashim, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Alfitri. 2014. Examining Gaps between Students' Expectations and Experiences in a Private University. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(8). 396-401.
- Nik, A.N.P., 1996. Pendidikan dan nilai di Malaysia. Satu analisis tentang konsep dan realiti dari perspektif bersepadu. *Jurnal Kebajikan*.
- Sidin, R. and Z. Aziz, 1992. Pendidikan Sivik Sejak Merdeka: Satu Penilaian. In: *Isu-Isu Dalam Pendidikan Sivik: Ke Arah Kecemerlangan*, Jaafar, K. and H. Habib (Eds.), Institut Kajian Dasar, Kuala Lumpur, pp: 17-36.
- Sirat, M., 2004. Penilaian pendidikan kewarganegaraan: Analisis kandungan mata pelajaran Pengajian Am STPM. MSc. Thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Spencer, L., & Spencer, M. 1993. *Competence at work: Models for superior performance*, N.Y.: John Wiley & Sons. Johnson, C., 2001. *The teaching of social studies in secondary school*.

- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. 2001. *Using Multivariate Statistics*. Boston: Allyn and Bacon.
- Ten Dam, G. and M. Volman. 2007. Educating for adulthood or for citizenship: Social competence as an educational goal. *Educ. J. Educ.*, 42: 281-298. DOI: 10.1111/j.1465-3435.2007.00295.x.
- Ten Dam, G., F. Geijsel, R. Reumerman and G. Ledoux. 2010. Citizenship competences: The development of a measurement. *Pedagogische Studien*, 7: 313-333.
- Ten Dam, G., F. Geijsel, R. Reumerman and G. Ledoux, 2011. Measuring young people's citizenship competences. *Eur. J. Educ.*, 46: 355-372. DOI: 10.1111/j.1465-3435.2011.01485.x.
- Westheimer, J. 2008. *On the Relationship between Political and Moral Engagement*. In: *Getting Involved: Global Citizenship Development and Sources of Moral Values*. Oser, F. and W. Veugelers (Eds.), Sense Publishers, Rotterdam.

DEVELOPING EDUCATION BASED ON NATIONAL VALUES: A CASE OF NONFORMAL-ADULT EDUCATION IN UGANDA

Wamaungo Juma Abdu and Achmad Hufad
raisehope@hotmail.com

ABSTRACT

Access to education is one of the highest priorities on Uganda's Development agenda. To achieve the national Development goals, Nonformal-adult Education is increasingly being used as an essential tool for the extension of literacy for development across all sectors. Government caters for Non-formal education largely for children who still do not access education for various reasons such as social, economic and Environmental. These children include; over age, children in pastoral areas, and fishing villages and those in labour who are too old to return to school. Several initiatives have been undertaken by government in collaboration with other stakeholders with a view to enable the out of school youth benefit from education through alternative education delivery modalities. Apart from "Nonformal education for children and youths", several adult education programmes and activities in Uganda are in place. These contain a vital and significant educational component consisting of such elements as vocational training in various skills, artistic activities including theatre and drama, extra-mural studies, community development and club activities, various mass mobilisation programmes for general or specific adult groups and varied forms of extension work. In this presentation therefore, am to justify how nationalistic values have contributed to the development of education, especially nonformal-adult education which has also to the country's development.

Keywords: adult education, development, national development plan, and nonformal education.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

****Wamaungo Juma Abdu** Centre for Basic Research, Research Professional Organization, Uganda and **Achmad Hufad** Nonformal Education, Indonesia University of Education.

I. INTRODUCTION

The need for a transformed society is a vision for each country. More and more people, many well beyond school going age (Boyle, 1981), are looking for opportunities to expand their intellectual horizons, to develop better understanding of society and its institutions, and to enable them to cope with rapid change. Others, confronted by growing complexity of technology, seek retraining to upgrade their skills or prepare for entirely new careers (Boyle, 1981), and on the other hand, groups and individuals are pressing for new options in society, all looking forward to education as the key sector to greater opportunity and fulfillment.

This implies that the scope of Nonformal-adult education has increased significantly more so in this 21st century. The extent of Nonformal/Adult education is found virtually in every area (Boyle, 1981) of the nation (be it Health, social, political, economic, Information and technology etc). In such a situation national ideologies or values are obviously needed to shape sustainable development. For Uganda's case, like other developing countries, the development needs are enormous. This therefore calls for the contribution of many fields, including localised studies based on local values and a country's national ideologies. In this paper therefore, am to justify how nationalistic values can contribute to educational development, especially nonformal-adult education which plays a vital role in national development.

II. HISTORY OF NONFORMAL-ADULT EDUCATION IN UGANDA

Modern Nonformal-adult education in Uganda dates back to the coming of Arab traders in the 1840's, European explorers in the 1870's, Missionaries and colonial officials in the late nineteenth century. In particular, the missionaries taught their new adult converts and lay brothers various skills including blacksmith work, carpentry, shoe-making, moulding tiles, brick-making, masonry, book binding, printing etc. this was in addition to literacy, numeracy and agriculture (UMoGLSD, 1993). Though the mentioned skills were being offered, it's noted that at a certain point, there emerged a state of stagnation for quite long (UMoGLSD, 2006). There was very little done by the colonial government to develop adult education apart from teaching adults to grow cash crops such as cotton, coffee and tea. After 1945, and up to independence in 1962, the colonial

government became actively involved in adult education; many adult education institutions and programmes were initiated and developed (Odukene and Okello, 1985; UMoGLSD Report: April, 2008). These include:

- In 1946, the Public Relations and Social Welfare Department was established, marking the beginning of a systematic involvement of Government in Nonformal-adult education programmes. The department was staffed with resettled ex-servicemen and composed of two sections; Information and Broadcasting section and Community Development section. Important adult education institutions created under the department included: Uganda Council for Women (1947), Radio Uganda (1954) and the Local Government and Community Training Centre at Nsamizi (1954).
- Creation of the Department of Community Development in 1952; the department paid more attention to the provision of Nonformal-adult education;
- Establishment of District Farm Institutes (DFIs) between 1957 and 1962 under the Ministry of Agriculture for training local government staff and provide local chiefs and progressive small scale farmers with progressive agriculture skills;
- Establishment of Rural Training Centers (RTCs); alongside and sharing facilities with, DFIs, with the aim of providing a practical demonstration of a new and improved way of life for adults who passed through them. The RTCs were multi-purpose and ran multi-disciplinary courses including civic education, home economics, agriculture, handcrafts etc.
- Health education by Ministry of Health was also carried out with returning ex-servicemen were trained as health orderlies and used to demonstrate a hygienic way of life throughout the country;
- The establishment of the Department of Extra-Mural Studies at Makerere College (now Makerere University) in 1953 with the mission of spreading the principles and quality of university adult study to the majority of people who were not able to attend its internal courses.
- Other adult initiatives included the creation of an education section under MOH to spearhead health education, opportunities offered to prisoners and prisoner warders under Ministry of Internal Affairs to learn various skills, formation of cooperative unions, trade unions and multi-national and national companies that offered adult education and training to their members and workers.

In Uganda's history, it has been noted that, after Independence in 1962 and up to 1971, the period was marked by real growth in the development of Nonformal-adult education due to existing national ideologies adopted on the independence day. All institutions created during the colonial days continued to grow and the number of adult education institutions, programmes, personnel and learners increased. In 1967 the Department of Extra Mural Studies was renamed the Centre for Continuing Education (CCE) and provided further and continuing education programmes of various types, offered through correspondence and residential studies. Other government departments which offered Nonformal/adult education included Health, Cooperatives, Agriculture, Community Development, Local Government, Veterinary, Labor, Information and Education.

A number of other government institutions were also formed during the first decade of independence including the Institute of Public Administration (now Uganda Management Institute), the Law Development Centre, and the Fisheries Training institute, the Reformatory School of Young Offenders, the Management Training and Advisory Centre etc. A number of organizations and associations that promoted Nonformal/adult education were established and/or sponsored by government (UMoGLSD Report, 2008).

Projects and programmes geared towards adult education initiated during this period included; the mass literacy campaign (1964), the MOH's Home and Environment Competition, the MOE's Namutamba Project, promotion of newspapers, periodicals, journals and among others.

During the period of 1971 to 1980 there was political unrest which led to the weakening and a set back in the education system of Uganda, and also other social services and the economy at large lagged behind because of the embargos which were imposed on the country and the Amin regime at the time. This led to a huge backlog of illiteracy, aspirants of further education and training and wastage of manpower. The economic hardships, the politically unstable conditions at the time and the uncertainty forced most of the adult education organisations and activities to decline and eventually came to a stand still.

After the tremendous improvements achieved by Uganda due to the improved political environment and with the current developments the world over, there has been revival of Nonformal-adult education with a number of government adult education institutions rejuvenated and revitalized with the help

of the government and development partners, under the Economic Recovery Programmes. Supported by government policies and regulations (The Constitution of the Republic of Uganda, 1995).

A number of organizations affiliated to international parent organizations have also been established. There is also increase in the number of projects and programmes systematically and comprehensively planned and executed including health education programmes, agriculture programmes, vocational training to mention but a few, a number of Ministries including those responsible for agriculture, health, labor, education have been involved. A number of adult education institutions have also been formed. Various national and international NGOs have been registered that offer nonformal/ adult education programmes.

According to the 2008 National Report on the Development and State of the Art of Adult Learning and Education in Uganda, it's noted that in 1988, the National inter-Sectoral Committee for the eradication of illiteracy was formed and a plan for an Integrated Nonformal Basic Education Pilot Project was completed in 1991. In 1992 government white paper on education was formulated. The paper spelt out the most comprehensive government policy on adult education. Since then, overall, adult education institutions, programmes and activities have been revived over the period 1980 to date.

III. PHILOSOPHICAL BASE OF NONFORMAL-ADULT EDUCATION IN UGANDA: A REFLECTION OF STRONG NATIONAL VALUES AND OR IDEOLOGIES

Like in Indonesia, national ideologies and or values have contributed greatly to education and these values have are said to play a fundamental role in contributing to change and transformation of communities as well as providing a means for development, cultural preservation and transmission from society to society and generation to generation. Uganda, investment in education has been prioritised in the last 2 decades based on the national vision education. Uganda's current education is based on the following beliefs:

- ***Hope to facilitate reforms after a long period of civil strife;*** Education is expected to contribute to the accumulation of human capital, which is essential for higher incomes and sustained income growth (MoFPED, 2004). There has been extensive expansion of

the education system in order to make it accessible to the larger population.

- **Belief in empowerment for all** - Basic of fundamental education so as to make good the deficiencies many people experience because of curtailed education or non-existent period of formal schooling;
- **Continuous Professional Development** - Opportunities for further or continuing education in order to update professional competencies required by the world of work;
- **Belief in perfectibility** - Vocational and technical education necessary for the acquisition of certain specific skills needed for the improvement of job performance;
- **Belief in Creating a society that adhere to the principle of living together**
 - Education for building social, political and civic competencies, including instructions on national and international issues;
- **Education for leisure and relaxation** - As human beings were are expected to take a rest however busy our schedules may be; and
- **Belief in a health population** - Education on health, welfare and family life including guidance on physical and mental health, family problems, parenthood (Atim and Ngaka, 2004).

One may ask that why discuss the philosophy of education. By understanding the Philosophy of something, the significance of a given activity or programme becomes clear and there is in-depth examined light of a body of knowledge. In relation to Uganda's situation, after the 2006 elections, the Vice LC 5 of Mubende district is quoted to have said, "We must teach literacy so Government should increase more financial support to adult education in order for our people to vote wisely. I did not win the elections because most of my supporters were illiterates, while I was popular during campaigns, only a few voted for me". Mboya of Kenya notes that, "it isn't children of today to who hold the present destiny of Africa in their hands, it's the adults". So adults should learn and continue to learn mostly our values for they are change agents.

Because of the philosophy attached to nonformal-adult education in Uganda, the field is seen as the key to solutions for the many problems of development. Hence, highly prioritised for entailing national values. In this case, it serves as a need for enlightenment and a vehicle for shaping forward-looking citizenry.

IV. A REFLECTION OF NATIONAL VALUES IN UGANDA'S NATIONAL DEVELOPMENT PLAN FOR THE PERIOD 2010/11 TO 2014/15

According to the report by Monitor online of Thursday, 27 May 2010, the Uganda government recently launched its ambitious five-year national development plan which requires 54 trillion shillings to transform the country into a modern and prosperous one within 30 years. The national development plan was drawn up by the National Planning Authority (NPA) a government body and launched by President Yoweri Museveni, which was tasked to hold to the set national vision guiding the country.

The plan, which focuses on creating jobs and raising household incomes, envisages that Uganda will be a middle income economy by 2017. The transformation will be attained through raising human skills and gender equality, improving business competition as well as addressing the structural bottlenecks in the economy in order to accelerate socioeconomic transformation for prosperity. President Museveni is quoted to have said that, "to transform Uganda, power, roads, railway, training of human resources, market, liberal economic policies and the promotion of the private sector are necessary adding that the economy is doing well at 5.5 percent growth. He also said 2 billion barrels of oil had been discovered and an oil refinery would be constructed in western Uganda and a pipeline from Eldoret in Kenya to Kampala. There will also be focus on agriculture, industry and promotion of science and technology and innovations".

The government will pursue outward-oriented policies by encouraging foreign investments and exports with high value addition and pursuing sound macro economic policies and management. The chairperson of the Africa Peer Review Mechanism, professor Adebayo Adedeji said planning was the backbone of transformation and warned against guessing and the recycling of old statistics. The plan highlights the oil and gas sector and says there will be continued exploration across the country, continuous geological mapping, licence complement oil companies and carry out commercial production.

The government will also build infrastructure for distribution, regulate midstream activities, develop refineries, stock sufficient petroleum products and facilitate private sector participation.

V. STARTING TO A NATIONAL IDEOLOGY TO PROJECTED CHANGES: A CURRENT UGANDA'S NDP

The Ugandan economy experienced varying growth rates when the Poverty Eradication Action Plan was being implemented, with an average GDP growth rate of 7.2 per cent between 1997/98 and 2000/01, to 6.8 per cent between 2000/01 and 2003/04, increasing to 8 per cent over the period 2004/05 to 2007/08 (Government of Uganda Publication, 2010).

Based on economic forecasts, GDP growth rate over the National Development Plan (NDP) period is projected at an average of 7.2 per cent per annum. At this GDP growth rate, nominal per capita income is projected to increase from USD 506 in 2008/09 to about USD 850 by 2014/15. During the same period, the proportion of people living below the poverty line is expected to decline from the level of 31 per cent in 2005/06 to about 24.5 per cent in 2014/2015, above the MDG target of 28 per cent (Ibid).

The NDP also addresses structural bottlenecks in the economy in order to accelerate socio-economic transformation for prosperity. The NDP interventions aim at:

- Creating employment;
- Raising average per capita income levels;
- Improving the labour force distribution in line with sectoral GDP share;
- Raising country human development and gender equality indicators, and
- Improving the country's competitiveness to levels associated with middle income countries.

This requires the sustained orientation of Government expenditures and implementation capacity towards removal of the most binding constraints to the faster socio-economic transformation. Government's efforts shall be directed toward transforming Uganda from a predominantly peasant-based economy to a: 1) just, 2) peaceful and 3) prosperous middle-income country. During the Plan period, the investment priorities will include:

- Physical infrastructure development mainly in energy, railway, waterways and air transport;
- Human resources development in areas of education, skills development, health, water and sanitation;

- Facilitating availability and access to critical production inputs especially in agriculture and industry; and promotion of science, technology and innovation.

The development approach of the NDP intertwines economic growth and poverty eradication. This will be pursued in a quasi-market environment where the private sector will remain the engine of growth and development.

The Government, in addition to undertaking the facilitating role through the provision of conducive policy, institutional and regulatory framework will also actively promote and encourage public-private partnerships in a rational manner. Furthermore, the Government will continue to pursue outward-oriented policies by encouraging foreign investments and exports with high value addition, as well as pursuing sound macroeconomic policy and management. A "Business Approach" will be pursued to improve public service delivery. In addition, synergies and inter-intra sectoral linkages will be harnessed during the implementation of the NDP (Ibid).

VI. NONFORMAL/ADULT EDUCATION AND ITS IMPORTANCE TO UGANDA'S NATIONAL DEVELOPMENT PLAN

It is widely accepted that illiteracy is a major barrier to the reduction and eventual eradication of poverty. According to Uganda Poverty Status Report 2001, the current literacy rates stand at 64% of the population but much lower for rural areas (UMoGLSD Report, 2008). According to recent UNESCO, UNDP and World Bank reports, this rate is the lowest in East Africa and Uganda is one of the countries unlikely to meet the Millennium Development Goal target of halving illiteracy by 2015, despite government commitments in the National Adult Literacy Strategic Plan. At 77%, the rate for men is much higher than the one for their women counterparts, which stands at only 54%. In 2000, 5.5 million Uganda women were illiterate.

According to the National Adult Literacy Strategic Investment Plan 2002/3 – 2006/7, despite previous attempts to deliver adult literacy services, all government and NGO efforts currently reach only 4.3% of the nearly 7 million non-literate adult Ugandans. Yet, it is an established fact that literacy serves as a strong foundation for removing gender inequalities, increasing ordinary people's entrepreneurial capacities, enabling poor communities to collectively act more

effectively in pursuit of their development goals, improves agricultural practices, reinforces quality and access to education, enhances family health and health, increases civic participation and overall, raises living standards (MoFPED, 2010).

Currently the Ministry of Gender Labour and Social Development has the overall responsibility for coordination of adult literacy activities in Uganda. In the districts the responsibility is with the department for Community Development. These departments have community development officers and assistants in each sub-county. While activities are currently implemented in all the districts, the coverage is still limited in most (Uganda's National Development Strategic Plan, 2011/12 to 2014/15).

VII. THE ROLE OF NONFORMAL-ADULT EDUCATION IN ACHIEVING NATIONAL IDEOLOGIES: THE CASE OF UGANDA' VISION 2030

The current National Nonformal-adult Literacy Strategic Investment Plan aims to expand the Government functional adult literacy activities and scale up the literacy work of NGOs by taking a deliberate step to invite religious institutions and together, with donors and other partners/stakeholders, work collaboratively towards universal adult literacy and lifelong learning.

The plan commits to achieving 50% improvement in levels of adult literacy by 2007 and acknowledges the potential opportunities offered by the diversity of different Civil Society Organisations. One of the partner CSOs specifically mentioned in the Government Strategic Investment Plan is LABE (LABE Evaluation Report, 2008). In the plan it's stated, "There are two major national levels of Adult Literacy training NGOs – LABE and Reflect Coordination Unit (RCU) of Action Aid. LABE, the only indigenous national level NGO whose first interest and focus is literacy, operates as a literacy resource organisation, offering literacy management, Training of Trainers and literacy instructors, and consultancy and materials development for NGOs, CBOs and Government Departments" (CONFINTEA Adult learning: A key for the 21st Century, 1997).

Nonformal adult education is seen as that form of education which in its ideal application can bring about a maximum of adjustment of attitude within society, to any new and changed situation in skills and techniques required and made necessary by the change. The society has to learn any skills that help

them to live as well as the manner in which they can use and change their environment. In such a case, Nonformal adult education is important in transforming the society as a whole.

In the 2030 national vision, nonformal-adult education is relevant because Uganda's on the road to transformation and there challenges ahead accompanying the NDP and moreso if the country is to realize modernization as mentioned by the strategy. It has to address the development needs as already mentioned. Thus, Nonformal-adult Education can do the following:

- Prepare and build the people's capacity to better understand their situation especially the marginalized people of society, in order to allow them to contribute to the socio-economic transformation.
- Increase community productivity and competitiveness leading to increased incomes, to improve the social and economic well-being (Ministry of Gender, Labour and Social Development, 1995).
- Build capacity of the marginalized to challenge their subordinate position, self-confidence and self-respect and gain control over their lives and circumstances.
- Stimulating the dynamism in human learning using the principles of Andragogy in adult education.

VIII. CONCLUSION

One may keep wondering what may be the connection between education and development is? What role can nonformal adult education play in the national strategic plan apart from its cognitive features? Learning Needs Assessment has revealed that poverty is a priority concern among adult learners. It is for this reason that the Functional Adult Literacy programmes has been able to access Poverty Action Funds. These funds are set aside to address priority areas of Government. The Central Government disburses the funds for Functional Adult Literacy as Conditional grants to Local governments. The Local governments also contribute funds to the programme using locally raised funds in a form of taxes.

REFERENCES

- Atim, D and Ngaka, W. 2004. *"The Evolution of Adult Education in Uganda,"* in Okech Anthony (Ed.), *Adult Education in Uganda: growth, development, prospects and challenges*. Fountain Publishers. Kampala.
- Boyle G., Patrick. 1981. *Planning Better Programs*: McGraw-Hill Book Company.
- CONFINTEA Adult learning: A key for the 21st Century. 1997.
- Government of Uganda Publication. 2010. *Poverty Eradication Action Plan in Uganda*
- The Constitution of the Republic of Uganda. 1995.
- MoFPED. 2004. *The Social Development Sector Strategic Investment Plan (SDIP) 2003 -2009 "Integrating Human Progress with Economic Growth for Sustainable Development"*.
- MoFPED. 2010. *Submitted to the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS)*.
- Ministry of Gender, Labour and Social Development. 1995. *A Process Review of Functional Literacy Project in Uganda*, Kampala.
- LABE. 2008. *Report of LABE Evaluation Report*.
- Odurkene, J. N. and Okello, W. 1985. *The Development of Adult Education in Uganda, 1900 – 1985*. Kampala: The Uganda National Commission of UNESCO.
- UMoGLSD. 2006. *A World Fit for Children*. National Progress Report. Obtained from http://www.unicef.org/arabic/worldfitforchildren/files/Uganda_WFFC5_Report.pdf.
- UMoGLSD Report. 2008. *National Report On the Development and State of the Art of Adult Learning And Education (ALE) in Uganda*.
- Uganda's National Development Strategic Plan (2011/12 to 2014/15).
- Uganda's Ministry of Gender, Labour and social Development Report. April. 2008.
- UMoGLSD. 1993. *FAL Curriculum* Kampala.

BUILDING NASIONALISM THROUGH EDUCATION

Wahyu

profwahyu@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the nationalism which aims to fertilize the spirit for unity, the the similiar character on the basis of equality fate, patriotism, friendship taste and a sense of loyalty to the homeland of Indonesia. Indonesian nationality can be realized well starting from education, especially a character as an attempt to drive the ability to behave, think, and act politely and civilizedly.

Keywords: nationalism, education, and character.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

** Faculty of Teacher Training and Education Lambung Mangkurat University.

II. INTRODUCTION

In the colonialism era, Indonesian has experienced any sufferings in supplying the colonizer' wishes in their daily life demand. In such circumstances which was onerous, there was consciousness that has taken a long time in the young men's mindset about the nationalism consciousness. Ismail Arianto (2006) says that the birth of Indonesia consciousness is based on (1) due to the colony of the Dutch which resulted in the sufferings of the people, (2) birth of a new generation called the youth in the early 20th century who have received education mainly through the schools being organized by the Dutch in Indonesia, in addition to the opportunities for education in the Netherland itself.

Historically, the nationalism consciousness was born on May 20, 1908 more than a century ago. Every May 20, the Indonesia always celebrate it as the Day of Nationalism Awakening. At that time, the youth have realized that the life of the Indonesian people will not change without a joint movement. This consciousness awakens their desire to establish the associations, both patterned social, cultural, political, and regionalism. The search process toward the nationalism movement began by the birth of Budi Utomo in 1908 (Arianto Ismail, 2006). One of the founder figures is Dr. Sutomo. It aims to enhance and improve people's lives through education. According to them, education is believed to be one of the important element in building a society that is still underdeveloped and is in the shackle colonoy of the Dutch.

Fortunately in times of oppression, the Dutch provide the opportunity for indigenous young people to acquire the education in low level of education, secondary, and higher education. The chance access of educational opportunities is meant for the benefit of indigenous young people to be the employees for the government of the Dutch because the Dutch believe that an employee may not all come from the Netherlands while the purpose of the expansion and the number of employees at that was time more and more necessary. The Duchth in providing the education access to the indigenous include the introccion of a system of transportation, dictionaries, maps, Dutch, gardening, and farming practices.

The young men who had been educated, especially those who have graduated from low level of education, secondary, and higher education formed the organization with the primary objective to advance the standard of native life.

The youths who are knowledgeable had known various developments in Asia, Europe, and around the world. The young men began to know through reading that has lasted a revival of the East against Western domination. For example, Japan had been able to win the fight against the Russians in 1905. In addition, the young people also understood the existence of the reformers in Islam. The Indonesian youth who widely studied in the Middle East and partly also in Indonesia engaged in the activities of organizations such as the United Islam, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah did the movement for freedom. The other youth organizations such as Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, and Jong Minahasa took part in the movement to achieve Indonesia independent and anti against colonialism.

The colonialism created the reactions from nations in Asia, due principally the Asia did not only lose the political independence and suffer in the field of social and economic form of occurrence of poverty and misery, but also underwent the discovery of several cultural roots (Ruslan Abdulgani, 1967). Therefore, the nationalism has three meanings, namely: (1) aspect of politics. The colonialism has not only seized the rights of Politics nations colonized, but also of oppression both politically and legally against them, (2) social aspects of economic. It stops the exploitation of foreign economy and builds the new society free from poverty and misery, according to the ideals of social justice, and (3) aspect of culture. Reviving the personality is adapted to changing times. Indonesia as part of the Asia utilizes these three aspects as capital to struggle. Accordingly, it is also the youth of Indonesia who rose to regroup against oppression and cruelty being practiced by the Dutch.

The nationalism consciousness that was born in 1908 which is strengthened by the birth of the Youth Pledge October 28, 1928 states that the nation of Indonesia is one nation. In a further process, the statement of the nation is not only one step, but also is expressed further in the Proclamation of August 17, 1945: We are the nation of Indonesia hereby declaring the independence of Indonesia.

The Indonesia Republic was born through a long struggle that needs the much mind, much energy, body and soul of the nation. Only through fiery spirit and more confidence, the Indonesia won the struggle physically and through diplomacy.

In historical record, the Indonesian trip after getting the independence did not escape from the issue of unification, even within a given time there has

been a conflict in the country that disturbs the national unity. The history has proven that the Indonesian people are faced with several rebellions, that intends to overthrow the rightful government and that seeks to secede from Indonesia Republic. The past turbulency is a valuable lesson for the Indonesian nation to look at the future development.

II. DISCUSSION

Today Indonesia

In the past time, the nationalism aims to fertilize the spirit for unity, the the similiar character on the basis of equality fate, patriotism, friendship taste and a sense of loyalty to the homeland of Indonesia. At present, Indonesian nationalism shifts toward the issues of democracy, human rights, justice and prosperity. Such phenomenon is supported by the situation of strong desire of communities to be involved in providing the input to government policy, especially regarding issues of public interest. The control is stronger and wider with various forms of activities, such as the students with demonstration, mass media with press freedom, civic institutions with a critical attitude, state institutions such as parliament, that shows the ability speak more freely than before. The actual example is that the South Kalimantan Provincial Parliament had ever fired Governor and the Deputy Governor of South Kalimantan, Sjahriel Darham and Husin Kasah in August 21, 2002. Previously, it had ever occurred in Surabaya City in which the parliament attempted to impeach the two mayors although the effort was not supported and approved by the central government.

The nationalism issue has shifted to the issue that is more needed by the community in real time, such as economy: employment, revenue increasing, employment, poverty, unemployment, wages, social security, labor issues; field of politics: democracy, freedom, power, political system, political parties, government system, political stability, political climate, the political process; field of law: justice, rule of law, the legitimacy of the government, serenity, tranquility and public order, corruption, human rights violations; (socio-cultural sector: education, health, food, clothing, housing, obtaining equality. In such situations, is nationalism no longer important to be understood and used as the nation glue? Although the Indonesia nationalism has shifted more widely in the fields of economic, political, legal and socio-cultural, the nationalism sense should not

be forgotten. Whatever the answer is, the nationalism sense that is the adhesive of national life becomes the important part in the life of the state.

The nationalism sense is a national consciousness to unite as a nation born naturally because of the history, the aspirations of the struggle of the past, common interests, a sense of shared fate, a common view, expectations, and objectives in formulating national ideals for the future (Siswono Yudohusodo, 1996). Understanding the nationalism is dynamic depending on how a nation has the perception of the nation. The sense of nationalism and nationality are being tested.

First, the emergence of bad character being marked with the condition of our social and cultural life changed so drastical and fantastic. The former nation is known patient, friendly, and courteous and good at small talk suddenly become the angry, the abuser, the vindictive, the burning people in the noisy city, the mutilator, war between villages and tribes with the level of cruelty very savage. Even more tragically, our children who are still attending school have been able to kill each other in the streets.

Second, one fact that often disrupt the harmony between groups including the government is conflict. The conflict in several areas indicate that the relationship between communities of different origins, customs, tribes, and confidence still does not strengthen the unity of the nation. Such problem happens because of sectoral interest. Prioritizing the sectoral interest should be reduced and be lost. The public interest should be number one. By strengthening the cohesion among us called the public interest, there will be cohesion in national life. The fact about the conflict about race, religion, customs, and other interests, such as the riot in Banjarmasin in 1997, Sampit, Tapal Kuda in East Java, Poso, Ambon, Freeport, and Abepura should help the guidance to make us aware of the easiness of conflicts that give rising to resentment and it endangers the national unity.

Third, in the past three decades the central Indonesia underwent the loss process, ranging from the loss of the physical natural aspects, human, and culture. In the physical aspect, Indonesia had lost our fertile soil. The size of critical land in Indonesia in 2008, according to estimation of General Directorate of Land Rehabilitation and Social Forestry, Ministry of Forestry estimated 77.8 million hectares. The critical soil is expected to grow to 1 million hectares annually. We are increasingly losing rights to land for plantations because of increasing number of foreign companies being engaged in the plantation in Indonesia. In

the aspect of biological nature, we have lost tropical forests. Indonesia is now known as the state with the highest deforestation rates in the world. We also miss the natural wealth that comes from the sea being taken illegally by looters from home and abroad. In Indonesia human aspects of losing competitiveness based on the World Competitiveness Scoreboard 2007, Indonesia was ranked 54 out of 55 countries, down from rank 52 in 2006. We lost the intention to obey the law, even obey the rules of the simplest, namely the traffic rules (Raka, 2008: 3). In the aspect of our culture, we lost the love for traditional arts as a valuable cultural heritage of the nation. Some of us have lost honesty and shame. It has been so long and Indonesia received the title as one of the most corrupted countries in the world. Unfortunately, this predicate does not make us feel ashamed and corruption in fact continues with any ways that changes. We lose our sense of all Indonesian. It seems that we accentuate the local interests and groups rather than the interest nation. We lost the goal together (in-group feeling) as a nation. There is no longer "Indonesian Dream" that binds us together; the more prominent is the ideal group to defeat the other factions. Indonesia has lost a lot of things, and this loss is likely in progress. The question is, could this be the sign that we will slide toward losing everything.

Based on that, we do not expect that. We do not want to lose the character as a nation so that it will lose everything. Therefore, it needs to look seriously what the source of the turmoil is. Such similar turbulent situation can be explained sociologically because this has nothing to do with social structures and cultural systems that had been built in the past. For example, the Malaysian public to the concept of social and cultural development has succeeded in creating a culture of civic culture as an agreement to build inter racial and religious harmony. The political conflict as hard as anything that happens in Malaysia never disturb this agreement (Wirutomo, 2001: 7). Different from what happened in Indonesia, any political differences have always been drawn to the factor of different culture being most fundamental, mainly religion. This is what makes political issues never easily resolved.

While looking at the process of integration of the Indonesian nation, the problem lies in the lack of developing the values agreement naturally and participatively (normative integration) and rely more on power approaches (coercive integration). Based on the basis of this reality, the reform aspirations to

build a new Indonesia should be done by building on the results of a whole order overhaul life of the past. The core of these ideals is a democratic civil society that has Indonesian character being adaptive in the global era.

Indonesia in the Future

The Indonesian nationalism in the future is not the nationalism of the physical nature to achieve independence, but rather should be understood as the cultural nationalism respecting the humanity and nation culture. Nationalism is not simply to unite because of having the common enemy, but it should grow into an ideology that is cultural. The opening of the Constitution 1945 could be read as the doctrine of our nationalism. It teaches the the ism of nationalism very closely being related to the various values that are fundamental, such as humanity, justice, freedom, faith, progress, citizenship, democracy, and law, in addition to the nature of resisting the occupation, resisted the injustice, refusing power without limits (Ismail Arianto, 2006). The Indonesian nationalism is important in the future because of having any roles as the doctrine and one of the principal substance of our national ideology. Therefore, the second national revival is the reinvigoration of the spirit of Indonesian nationalism and it means that there is nothing other than the necessity to continue the ideals that have been formulated by the 1945 Constitution and especially fills the things that are still lagging behind (Taufik Abdullah, 2001). The lag in social justice, welfare, obidience to the law, democratization and human rights implementation will presumably hamper the future strengthening of the Indonesian nationalism in the sense of the fragility of the unity of the nation. The omission is still being felt today because it is not possible in a short time to eliminate. Many factors can hinder among others and one of them is mental attitude.

Feudalism has spawned and fostered what is called the slave mentality within the Indonesian nation. The slave mentality encourages people to think passive, afraid to think, and it makes them surrender. The slave minded people believe in things easily that do not make sense, superstitiuos, which will facilitate them exploited by those who think actively and rationally. The attitude to surrender and lazy for thinking to achieve a better tomorrow indicates that the Indonesian nation has put itself at the bottom of the layers of the countries that is developing in per capita income. The mental attitude is thus not capable of supporting sustainable development both in the political, economic, and social in building

the strong nationalism. Therefore, one important aspect in the life of the nation is to increase more democratic life in various fields through education properly and seriously. Through education, it is very strategic in shaping and changing attitudes, particularly for the younger generation. Education is necessary and strategic character education.

Education based on the character and culture of the nation is education that applies the principles and methodology towards the formation of character of the nation on their students through an integrated curriculum being developed at the school. The framework for the development of character and culture through learning among educators is categorized important. As agents of change, the educators are expected to instill the characteristics, traits, and character and independent spirit, responsibility, and proficiency in the lives of the learners. In addition, the character is also very necessary for educators because through this life, the educators will have to work oriented more efficiently, creatively, innovatively, productively and independently.

The education today only emphasizes the mastery of science and intelligence aspects of learners. When the learners have reached grades or graduated with the minimum completeness criteria, their study are considered to succeed. The character formation and cultural values of the nation in self-learners become increasingly marginalized. The fragility of the character and culture in national life could bring the setbacks civilization. In fact, the lives of people who have a strong character and culture will furtherly strengthen the existence of a nation.

The development of character-based education and culture should be the national program. In education, the formation of character and culture of the learners do not have to enter the curriculum. The values being fostered in the self-learners form the basic values agreed nationally. The values are honesty, trustworthy, solidarity, tolerance, responsibility and care for others.

Franz Magnis-Suseno in national seminar "Development of Culture and National Character Education" (14.1. 2010) said that this era does not only require the younger generation of strong character, but also the true, positive, and constructive. However, to form the learners with strong character there should be no feudalism educators. When the educators make students become "manutan" (obedient) with important values, tolerance, and not denied, the learners' character

will not flourish. When we expect the characters, the learners should be encouraged and supported so that those become brave, dare to take the initiative, dare to propose an alternative, and dare to express a different opinion. The students need to be taught how to think for themselves.

For the development of character-based education and culture, it requires the inputs among others, regarding the development models of character and culture as an integral part of the national education system. The need continues to be interpreted seriously as it requires a lot of sacrifice. The anxiety and longing of many parties to re-strengthen the character and culture education needs to be responded properly. Therefore, the accurate data regarding development models of character and culture need to be explored and implemented through empirical studies, namely the research.

Presenting the character education and nation culture in schools in a holistic manner is necessary. The character education cannot be separated from a form of education that is cognitive or academic. The concept of education should be integrated into the curriculum. This does not mean that the character education will be applied theoretically, but be reinforcing existing curriculum, namely by implementing it in everyday subjects and learners. The characters can be interpreted as a default, heart, soul, personality, character, behavior, personality, character, character, temperament, and character. The characters in this sense marks and focuses on the application of the virtues in the form of action or behavior. People who do not apply the values of kindness, such as dishonest, cruel, greedy, and other bad behavior can be categorized the bad character, but those whose behavior is in accordance with the moral code is called a noble character (Imam Suyitno, 2016).

The learners' character being expected is the noble character who can be developed to the learners. In this case, building the students' character leads toward developing the learners to have a personality, behavior, nature, character, and good character. Such character refers to the set of attitudes, behavior, motivation, and skills that fulfills the standards of values and norms being respected and obeyed.

The learners with the noble character have knowledge of his potency, which is characterized by values such as reflective, self-confident, rational, logical, critical, analytical, creative, and innovative, independent, healthy living,

responsible, love science, patience, cautious, self-sacrificing, courageous, trustworthy, honest, keeping promises, fair, humble, shy, err, forgiving, soft-hearted, loyal, hard working, diligent, tenacious/persistent, conscientious, initiative, positive thinking, discipline, anticipatory, initiative, visionary, earthy, vibrant, dynamic, economical/efficient, appreciate the time, dedication, self-control, productive, friendly, love of beauty (aesthetic), sporty, resilient, open, orderly (Imam Suyitno, 2016). In addition, those also have the awareness to do the best or superior and able to act on the potency and consciousness. They can realize the positive development as an individual (intellectual, emotional, social, ethical, and behavior). The learners in good character or superior always try to do things that are best for God, himself, neighbor, neighborhood, nation and country and the international community at large by optimizing the potency of (knowledge) and it is accompanied by the consciousness, emotion, and motivation.

The success of the character education program can be seen through the achievement of indicators by learners stated in the Graduate Competency Standard covering the following:

1. Practicing the teachings of the religion being professed according to the stage of adolescent development.
2. Understanding the advantages and disadvantages of self potency.
3. Showing the confident attitude.
4. Complying with the social rules that apply in a broader environment.
5. Appreciating the diversity of religion, culture, ethnicity, race, and socio economic groups in national scope.
6. Finding and applying the information of the surrounding environment and other sources logically, critically, and creatively.
7. Demonstrating the ability to think logically, critically, creatively and innovatively.
8. Demonstrating the ability to learn independently according to the self potency.
9. Demonstrating the ability to analyze and solve problems in everyday life.
10. Describing the natural and social phenomena.
11. Utilizing the environmental in responsible manner.
12. Applying the values of togetherness in the social, civic and state for the realization of unity within the republic.
13. Appreciating the work of art and national culture.
14. Appreciating the work task and having the ability to work.

15. Applying the clean living, healthy, fit, secure, and enjoying the free time well.
16. Communicating and interacting effectively and politely.
17. Understanding the rights and obligations of others in the association in the community; respecting the differences of opinion.
18. Showing indulgence to read and write a short script simple. Demonstrating the listening, speaking, reading, and writing skill in Indonesian and English in simple manner.
19. Mastering the knowledge necessary to follow the secondary education.
20. Having the entrepreneurial spirit.

Psychologically and socio-culturally, the character formation in the individual is the function of the whole potency of the human individual (cognitive, affective, conative, and psychomotor) in the context of socio-cultural interaction (in the family, school and community) and it lasts a lifetime. Configuring the characters in the context of the totality of the process of psychological and social - cultural can be grouped into: soul (spiritual and emotional development), the thought (intellectual development), sport and kinesthetic (physical and kinesthetic development), and feeling and intention (affective and creativity development) (Imam Suyitno, 2016).

According to Foerster (Koesoema, 2010), there are four basic traits of character education. The following four features are:

1. The first is the regularity of the interior. Every action is measured based on a hierarchy of value. The values become normative guidelines of each action.
2. The second is the coherence that gives courage, makes one firm on principle, not easily swayed in new situations or fear of risk. The coherence is the foundation that builds trust each other. The absence of coherence undermine the credibility of a person.
3. The third is autonomy. Someone internalizes the external code to be the personal values. It can be seen through judgment or personal decisions without being influenced or pressured the other.
4. The fourth is the constancy and fidelity. The tenacity is one's resistance to covet what is considered good and the loyalty is the basis for respecting or the commitment selected.

III. CONCLUSION

Based on the above discussion, establishing the nationalism, such as humanity, justice, freedom, human rights, democracy, law, faith, prosperity and progress should start from education. Therefore, education is the tip and base of the progress of a nation. Establishing the city by building a magnificent building will be destroyed when the people are not well educated. Likewise, when economic development is not accompanied by the development of education, the building will be bankrupt. In a word, establishing the human resources through education is the basic one to build the nation.

BIBLIOGRAPHY

- Ace Suryadi and Dasirun Budimansyah, 2009. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Idrus Affandi, et all, 2015. *Mempekokoh Jati Diri Bangsa: Belajar dari Kinerja dan Kultur Bangsa Jepang*. Bandung : Mutiara Press.
- Imam Suyitno, 2016. *Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal*. Accesed in 5 September 2016.
- Ismail Arianto, 2016. *Kebangsaan Indonesia Dulu, Kini dan Di Masa Depan*, dalam Dasim Budimansyah dan Syaifullah Syam, *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Labolatorium PKN FPIPS – UPI.
- Koesoema, Doni, 2010. *Pendidikan Karakter*. Roma: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian.
- Raka, H.G.D, 2008, *Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa: Menengok Kembali Peran Perguruan Tinggi*. Bandung: Majelis Guru Besar ITB.
- Roeslan Abdulgani, 1967. *Nasionalisme Asia*. Jakarta: Prapanca.
- Siswono Yudohusodo, 1996. *Semangat Baru Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Bangsa.
- Taufik Abdullah, 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Wirutomo, P.2001. *Membangun Masyarakat Adab*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Sosiologi pada Fisip UI.

MENCARI MUSUH BERSAMA UNTUK KEBANGKITAN NASIONAL ABAD KE-21

Sutarto Hadi
shadiunlam@gmail.com

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Sutarto Hadi

Setiap bangsa menyadari bahwa untuk bertahan di era kompetisi saat ini diperlukan sumber daya manusia yang handal. Bangsa besar adalah bangsa yang memiliki kemampuan untuk bertahan dari berbagai guncangan dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Perang, baik terbuka (berupa adu kekuatan senjata) maupun dalam bentuk lain seperti perang proxy, dapat menenyapkan sebuah negara dari muka bumi ini.

Membangun pendidikan adalah membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih baik dibanding era awal kemerdekaan. Kita tidak kekurangan orang pintar. Buktinya banyak orang Indonesia yang berkiprah dan diakui di luar negeri. Terakhir kita heboh dengan kasus menteri ESDM Archandra Tahar yang ternyata masih memegang paspor AS ketika dilantik. Karena kepintarannya Archandra Tahar bekerja dan menjadi warga negara AS. Kehebohan ini berakhir dengan diberhentikannya Archandra sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi, dan menjadi menteri yang paling singkat memegang jabatan, selama 20 hari.

Kita memiliki banyak orang pintar, tetapi secara umum SDM kita jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Berdasarkan beberapa studi komparatif internasional yang diikuti oleh anak-anak Indonesia, seperti TIMSS (*Trend International Mathematics and Sciences Study*) dan PISA (*Program for International Student Assessment*), kita tercecceh di urutan buncit. Ini menandakan bangsa kita kalah pintar dibandingkan bangsa lain.

Membangun Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Kebangsaan

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU ADIL DAN MAKMUR

Gambar 1: Visi pembangunan nasional Indonesia

Saya tidak tahu apakah ada korelasi antara kecerdasan dan cara pandang seseorang tentang kehidupan atau cara orang itu menyikapi hidup. Banyaknya kasus narkoba yang secara masif merasuk sendi-sendi kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan, mulai rakyat jelata hingga artis dan pejabat, menunjukkan bangsa kita rentan terhadap hal-hal buruk yang merusak. Orang-orang seperti kehilangan nalar untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar, serta mana yang salah dan merusak.

Selain itu, bangsa ini seperti terperosok semakin dalam ke tindak korupsi dengan berbagai modus dan tujuannya. Kasus terakhir adalah OTT terhadap Ketua DPD Irman Gusman. Bangsa ini seperti bangsa yang menuhankan uang. Saya khawatir kita sedang menuju kehancuran. Apakah Indonesia masih akan merayakan peringatan kemerdekaan ke 100? Mungkin Indonesia masih ada tapi kita tidak memiliki kekuatan mengatur diri kita sendiri.



Gambar 2: Tiga masalah pokok bangsa

Saya mengangkat isu di atas untuk mengingatkan bahwa isu pendidikan kebangsaan harus menyentuh kedua isu tersebut. Kebangsaan Indonesia harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu bangsa Indonesia yang cerdas, yang tidak mudah dipengaruhi godaan hedonisme, yaitu isme yang meletakkan kesenangan duniawi di atas segala-galanya, termasuk di atas kemungkinan ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan bangsa. Kalau ada pejabat (misalnya yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan) begitu mudah menjual aset negara kepada asing demi kepentingan pribadi dan golongannya, apatah yang bisa kita harapkan? Rakyat jelata tidak punya daya dan kekuatan untuk mencegahnya.

Aset-aset negara yang sudah berpindah kepemilikan kepada asing: Telkomsel dan Indosat, menjual gas alam ke China dengan harga sangat murah, menjual aset-aset strategis lainnya seperti kapal tanker Pertamina, bank BCA, BII, bank Danamon, dll. Menjual aset negara kepada asing adalah tindakan anasionalis alias tidak nasionalis apapun alasannya.

Seorang kawan menulis status FB sebagai berikut: [Adalah] riskan bangsa yang tidak sensitif ideologis dan kebangsaan seperti Indonesia adalah mudah dibawa berkelok-kelok. Bayangkan kalau Cina, Israel, Amerika atau Arab Saudi menggelontorkan Rp 5–10 triliun untuk membangun partai pro mereka di Indonesia? So, apa bisa cegat? Intelijen, tentara, polisi atau politisi? Tak ada yang meyakinkan mampu untuk itu. Bangsa yang korup bahkan bisa menjual kemerdekaannya untuk uang. So, konstitusi harus bisa menjamin ini (Status FB Radius Ardianas Hadariah).

Apalah gunanya kita melaksanakan upacara bendera, menyebut Pancasila kechang-kembang, atau menyanyikan Indonesia Raya dalam setiap upacara dan setiap even resmi, seperti di awal seminar hari ini, kalau dalam praktik kehidupan sehari-hari kita malas belajar, malas mengajar, telat masuk kantor, bangga membeli produk asing, apalagi kalau barang-barang impor itu dibeli dari uang hasil korupsi.

Kebodohan dan Keterbelakangan



Gambar 3: Akibat kebodohan dan keterbelakangan

Masih relevankah upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam setiap pembukaan seminar dan lain sebagainya, kalau itu hanya dimaknai sekadar kerutinan belaka? Saya dengar di negara lain hari kemerdekaan dimaknai dengan sederhana dan tidak diliburkan. Tidak ada pesta dan peringatan yang berlebihan. Buruh, nelayan, pegawai, guru, dosen dan karyawan perusahaan bekerja seperti biasa, karena kerja lebih bermakna untuk mensyukuri kemerdekaan bukan dengan pesta pora.

Apakah pernah terpikir dalam benak kita bahwa kalau kita belajar dengan tekun, menuntut ilmu (kalau perlu sampai ke negeri China) adalah demi Indonesia? Apakah pernah terpikir dalam benak kita bahwa kalau kita bekerja dengan tekun sehingga produktivitas bangsa ini meningkat adalah demi Indonesia? Apakah pernah terpikir dalam benak kita bahwa kalau kita membeli produk dalam negeri adalah demi Indonesia? Apakah pernah terpikir dalam benak kita bahwa kalau kita membuang sampah pada tempatnya, tidak boros menggunakan kertas dan sumber daya lainnya, adalah demi Indonesia?

Tapi kita masih punya harapan. Keberhasilan program tax amnesty (pengampunan pajak) adalah contoh bahwa masih ada nasionalisme Indonesia. Program tax amnesty tahap pertama yang berakhir pada 30 September 2016 telah mencatatkan dana deklarasi sebesar Rp.3.678 triliun dan dana repatriasi Rp.137 triliun. Menurut beberapa sumber program tax amnesty di Indonesia merupakan program yang paling sukses di dunia. Banyak pengusaha besar yang ikut program tax amnesty mengatakan inilah saatnya membantu negara. Mereka mengatakan kami lahir, besar, tinggal dan mencari nafkah di Indonesia, jadi kami harus berbuat untuk Indonesia.

Nilai mata uang rupiah pun mengalami penguatan terhadap dolar AS. Rupiah cenderung stabil, harga komoditas mulai membaik, suku bunga turun, semua itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah mulai membaik. Tapi ini semua akan hancur kalau penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat negara serta penegak hukum lainnya) menunjukkan perilaku koruptif.

Kesadaran bahwa kita semua lahir, besar, tinggal, dan mencari nafkah di Indonesia inilah yang harus ditumbuhkan dalam benak segenap tumpah darah Indonesia. Kesadaran keindonesiaan ini telah dibuktikan berhasil membawa bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Berdirinya Budi Utomo pada 20

Mei 1908 adalah momentum kebangkitan nasional yang mendorong pergerakan nasional dan melahirkan ide untuk mencetuskan persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan puncaknya pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Saat ini perlu dicetuskan “Sumpah Pemuda” Indonesia abad ke-21. Apakah kita perlu memiliki musuh bersama yang dapat membangkitkan nasionalisme Indonesia abad 21? Kalau dulu kita memiliki musuh bersama yakni penjajah Belanda, mungkin benar kita memerlukan musuh bersama saat ini. Musuh bersama ini harus benar-benar nyata, mudah dibayangkan orang secara visual dan dampaknya atau daya rusaknya betul-betul kita rasakan. Narkoba daya rusaknya sangat besar, tapi sebagian besar orang tidak pernah melihat benda itu dan tidak dapat merasakan akibat dari kecanduan narkoba. Korupsi sangat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, menyengsarakan rakyat, tapi justru sebagian orang melanggengkan praktik ini demi keuntungan pribadi dan golongannya.

Musuh bersama kita adalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin sangat lebar. Sebagian besar rakyat merasakan ini. Lebih 50 persen rakyat Indonesia hidup miskin dengan pengeluaran kurang dari 1 dolar per hari. Sementara ada orang Indonesia yang memiliki kekayaan lebih 100 triliun rupiah. R. Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia tahun 2016 memiliki total kekayaan US\$ 8,1 miliar setara dengan Rp.105,3 triliun.



Gambar 4: Kesenjangan kaya-miskin semakin lebar

Data Bank Dunia tentang konsentrasi kekayaan menunjukkan ketimpangan yang amat parah. Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Semakin parah jika melihat penguasaan 10 persen penduduk terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan nasional (Ahmad Syafii Maarif, 2016, "Negara Pancasila dan Kesenjangan Sosial", *Republika Online*: m.republika.co.id, 30 Agustus 2016).

Di Indonesia ini kasarnya sia-sia kita teriak nasionalisme Indonesia kalau perut kosong. Justeru, rakyat yang tidak beruntung menikmati kue pembangunan ini besar peluang mudah terpengaruh oleh ajaran ekstrem, menjual kehormatan diri dan keselamatan bangsa dan negara demi sejumlah rupiah. Meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu upaya yang bisa diambil. Keberhasilan program tax amnesty harus dimanfaatkan untuk membuka akses ekonomi kepada rakyat.

Pendidikan adalah instrumen penting dalam transformasi sosial-ekonomi. Negara harus hadir antara lain memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berterimakasih karena negara yang hadir dalam memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi, termasuk yang berasal dari keluarga tidak mampu. Tahun 2016 ULM memberikan beasiswa Bidikmisi kepada 980 orang mahasiswa. Total penerima Bidikmisi dari tahun 2012 s.d. 2016 adalah 3.962 orang. Selain ini, sebanyak 3.078 orang mahasiswa memperoleh beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik), dan sebanyak 3.264 orang menerima beasiswa BBM. Mahasiswa ULM juga memperoleh beasiswa dari berbagai sumber lainnya, seperti Bank Indonesia, Indocement, PT Djarum, Yayasan Salim, VDMS Belanda, Supersemar, dan Afirmasi Dikti. Total mahasiswa ULM penerima beasiswa adalah sebanyak 10.868 orang. Artinya lebih dari sepertiga mahasiswa ULM adalah penerima beasiswa.

Pendidikan dan penyediaan lapangan kerja akan berdampak sangat besar dalam mempersempit jurang kaya miskin apabila ada upaya sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi dan meminimalisir praktek kolusi dan nepotisme. Ada indikasi masih terjadi praktek KKN ini masih terjadi dalam

penerimaan pegawai dan aparatur sipil negara. Kita berharap ke depan praktek seperti ini tidak ada lagi di bumi Indonesia tercinta. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan penghidupan yang layak.

Membangun Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Kebangsaan

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU ADIL DAN MAKMUR

MANDIRI

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri

MAJU

Tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap

ADIL

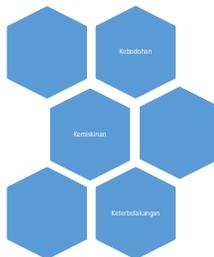
Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah

Kebodohan dan Keterbelakangan



Pendidikan Kebangsaan?

Pendidikan kebangsaan tidak memberi makna berarti kalau:



BAB II

MAKALAH PRESENTASI

TEKS NARATIF SEBAGAI SUMBER BELAJAR MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK MENUMBUHKAN NILA MORAL PESERTA DIDIK SMP

Ahmad Sarwani dan Gunadi Harry Sulistyو
wawankeren11@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak ini menyajikan gambaran tentang bagaimana teks naratif bisa dikembangkan menjadi sumber belajar untuk menumbuhkan nilai-nilai moral peserta didik pada jenjang SMP. Bahan ajar pada teks naratif ini merujuk pada cerita dan kisah-kisah fiksi berbahasa Inggris diajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman dan sikap peserta didik sesuai indikator efektivitasnya meliputi: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan lingkungan. Teks naratif yang telah diidentifikasi oleh pendidik dan menyesuaikan kompetensi bahan ajar sesuai karakteristik dari segi keaslian bahasa, kompleksitas bahasa, dan pemilihan kosa kata yang penting dalam proses pengembangan sumber belajar.

Kata Kunci: teks naratif, sumber belajar, nilai moral.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Ahmad Sarwani** mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Keguruan Bahasa Universitas Negeri Malang dan **Gunadi Harry Sulistyو** dosen Program Pasca Sarjana S2 Keguruan Bahasa Universitas Negeri Malang.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai bangsa yang berbeda. Mereka tinggal di wilayah yang sama yang dinaungi oleh pemerintahan yang resmi dan legal yang tergabung dalam sebuah kesatuan negara. Masyarakat Indonesia sejak dulu sebelum Indonesia berdiri terpisah-pisah oleh berbagai kerajaan yang berbeda. Namun, pada dasarnya mereka memiliki kepribadian yang sama, yaitu sama-sama menjunjung tinggi nilai moral. Hal ini terus dipertahankan, meskipun saat ini sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh arus budaya negatif modern yang mengesampingkan persoalan tersebut.

Persoalan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan banyak pihak yang peduli terhadap kepribadian bangsa Indonesia yang satu ini. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan agar nilai-nilai moral yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia ini dapat terus bertahan dan terus diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Budaya modern cenderung berusaha melepaskan diri dari adat istiadat dan kebiasaan lama yang ada di masyarakat. Tentu saja tidak semua budaya modern buruk. Beberapa efek positif yang muncul karena modernisasi antara lain (Prakoso, 2013) meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, tingkat kehidupan yang lebih baik kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, generasi muda yang tidak memahami hal ini lebih mengutamakan kulit luar dibandingkan nilai-nilai efektivitas yang sangat diutamakan dalam kehidupan modern. Mereka lebih banyak terkena efek negatif dari modernisasi, seperti (Prakoso, 2013) semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri (individualisme), dan adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Generasi muda mengartikan manusia modern sebagai orang yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun, bukan penguasaan teknologi yang dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, justru penguasaan teknologi yang menjauhkan nilai-nilai moral di masyarakat. Wijaya (2015) mengatakan bahwa di Indonesia, penggunaan yang merupakan lambang kemajuan teknologi saat ini sudah berlangsung sejak 2008, tepat ketika

Facebook naik daun dan penetrasi telepon seluler di negeri ini melewati angka 50 persen. Indonesia kini bahkan telah menjadi salah satu negara dengan pengguna Facebook dan Twitter terbesar di dunia yang penggunanya masing-masing mencapai 51 juta dan 19,5 juta orang.

Generasi muda lebih sibuk menggunakan gadget miliknya dibandingkan berkomunikasi dengan orang yang ada di hadapannya. Pembicaraan hangat antara anggota keluarga yang biasa terjadi saat makan malam atau nonton tv bersama, saat ini sudah menjadi pemandangan langka. Ayah sibuk di depan laptop, ibu tidak mau lepas dari tabletnya, dan anak-anak dengan santai memandang layar Blackberry. Kadang mereka lebih tahu kabar terbaru orang-orang yang jauh di belahan dunia yang berbeda dibandingkan orang-orang yang serumah dengannya. Gadget terbukti mendekatkan yang jauh, dan menjauhkan yang dekat.

Generasi muda terlalu mudah menuliskan keluhannya dengan menggunakan bahasa sarkastis di media sosial dibandingkan membicarakan persoalan yang mereka hadapi dengan orang yang bisa menyelesaikannya. Bahkan, tidak jarang mereka memojokkan seseorang yang tidak mereka sukai di berbagai media sosial. Budaya modern juga tidak jarang merusak hubungan antara generasi yang lebih tua dengan yang lebih muda. Melalui teknologi, informasi pun lebih mudah tersebar meskipun dari belahan bumi manapun dalam sekejap. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan kecerdasan penggunaannya dalam memilih dan memilah informasi yang benar atau informasi yang bohong. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tidak mengetahui sebuah peristiwa yang sebenarnya dapat diarahkan untuk ikut-ikutan menghardik seseorang atau institusi tertentu yang belum tentu bersalah.

Dr. Dimitri Mahayana (dalam Wijaya, 2015) yang merupakan pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa sekitar 5-10 persen *gadget* mania terbiasa menyentuh *gadget*nya sebanyak 100-200 kali dalam sehari, baik untuk mengirim pesan pendek (SMS), pesan instan, dan mengunggah status. Jika waktu efektif manusia beraktivitas 16 jam atau 960 menit sehari, dengan demikian orang yang kecanduan *gadget* akan menyentuh perangkatnya itu 4,8 menit sekali. Akibatnya, seorang pecandu *gadget* akan sulit untuk menjalani kehidupan nyata. Jangankan mengerjakan pekerjaan, untuk diajak ngobrol saja pasti sulit. Aktivitas orang-orang seperti ini di dunia nyata

akan berkurang, karena perhatiannya tersedot ke dunia maya. Jika dia dipisahkan dengan benda itu, mereka akan menjadi gelisah dan tidak dapat beraktivitas dengan tenang di dunia nyata. Kalau terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin orang seperti ini bisa menjadi seorang pengidap *attention deficit disorder* (ADD).

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya tidak bisa hidup dengan seenaknya sendiri, karena dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan, dimana aturan-aturan tersebut sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Manusia atau individu yang memiliki moral baik, dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata norma, nilai, dan kaidah-kaidah moral dalam bersosialisasi di kehidupan masyarakat mempunyai alasan pokok, yaitu salah satunya untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan norma, nilai dan kaidah sosial yang terdapat dalam masyarakat, maka di mana pun ia hidup, ia tidak dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai moral harus ditanamkan dengan kuat kepada generasi muda. Hal ini bertujuan agar generasi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa Indonesia.

Ada beraneka ragam cara yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia agar nilai-nilai moral ini terus-menerus bertahan dari generasi ke generasi. Salah satu upaya ialah melalui karya sastra. Karya sastra pada hakikatnya merupakan ungkapan baku dari apa yang telah disaksikan, didengarkan, dipelajari, dirasakan dan direnungkan orang dalam kehidupan. Karya sastra adalah ekspresi sastrawan yang berupa pandangan, ide-ide, perasaan, pikiran, dan semua kegiatan mental manusia ekspresi itu merupakan hasil pengalamannya dalam melihat, menghayati kehidupan ini sehingga terciptalah karya sastra. Hasil karya sastra itu dapat berupa novel, puisi, cerpen, dan drama.

Satu karya sastra yang dijadikan sebagai media untuk mewariskan nilai moral di masyarakat ialah melalui penggunaan salah satu sastra lama yang disebut Gurindam. Karya gurindam yang sangat masyhur ialah Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji. Arifanny (2008) dalam penelitian yang dilakukannya yang berjudul *Analisis Nilai Moral dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji* mencoba mengungkapkan apa saja nilai moral yang coba ditanamkan

oleh penulisnya. Dia menyatakan bahwa Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji memuat nilai-nilai luhur yang berguna bagi pengalaman hidup masyarakat atau pembaca. Hal itu berarti kehadiran karya sastra senantiasa membawa banyak muatan, termasuk muatan moral. Permasalahannya, banyak pembaca karya sastra belum bisa menggali nilai-nilai moral dalam karya sastra yang dibacanya. Hal itu dikarenakan penyampaian nilai-nilai moral dalam karya sastra tersebut secara implisit, sehingga pemaknaan nilai-nilai moral didalamnya pun memerlukan kepekaan interpretasi yang tinggi. Arifanny (2008) merumuskan ada empat nilai moral yang terkandung dalam karya ini, yaitu (1) nilai moral kehidupan manusia dengan diri sendiri yang meliputi: kearifan, kesederhanaan, kejujuran, keberanian hidup, dan kewaspadaan hidup, (2) nilai moral kehidupan manusia dengan orang lain yang meliputi: kesetiaan kepada sesama manusia, kebersamaan hidup, dan penghormatan kepada orang lain, (3) nilai moral kehidupan manusia dengan Tuhan yang meliputi: percaya kepada Tuhan dan istiqomah, (4) cara pengarang menyampaikan nilai moral yang meliputi: penyampaian nilai moral secara langsung dan penyampaian nilai moral secara tidak langsung.

Saat ini pewarisan nilai moral melalui karya sastra terus dilakukan oleh para penulis sastra modern melalui berbagai jenis karya sastra baik itu novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Beberapa penelitian telah membuktikan hal ini, yaitu dalam novel kajian nilai moral dilakukan oleh Ririn Setiowati (2013) dengan judul *Analisis Nilai-Nilai Moral dalam Novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana Kejora*, dalam cerpen kajian nilai moral dilakukan oleh Sumarni (2013) dengan judul *Analisis Unsur Nilai Moral dan Nilai Sosial terhadap Kumpulan Cerpen "Delapan Peri" Karya Sitta Karina*, dalam dongeng kajian nilai moral dilakukan oleh Chrysogonus Siddha Malilang dan Andrian Liem (2014) dengan judul *Penanaman Nilai dan Moral pada Anak sebagai Modal Sociopreneur Melalui Mendongengi* dan masih banyak lagi penelitian lain yang mengangkat persoalan ini. Semua ini menunjukkan bahwa nilai moral dapat ditemukan dalam banyak karya sastra sebagai refleksi pengamatan penulis terhadap masyarakat dan untuk mewariskannya ke generasi yang akan datang.

Pewarisan nilai moral juga dilakukan secara sistematis dan terprogram oleh pemerintah melalui pendidikan formal, yakni sekolah. Pada mata pelajaran bahasa Inggris, potongan karya sastra juga diajarkan kepada peserta didik dalam

rangka meningkatkan dan melatih pemahaman mereka. Materi yang sering diajarkan ialah tentang *narrative text* (teks naratif). Materi ini biasanya diajarkan agar peserta didik mampu memahami makna teks fungsional pendek dan monolog berbentuk naratif dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Mereka diharapkan dapat menyerap kosakata baru dalam teks monolog untuk menambah perbendaharaan kosakata siswa. Bila diperdalam kembali, sesungguhnya beragam nilai moral dapat ditanamkan melalui pembelajaran ini. Oleh sebab itu, materi tentang teks naratif dalam pelajaran bahasa Inggris tidak terbatas pada pembelajaran bahasa saja, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Pendidikan merupakan pilihan strategis bagi suatu bangsa untuk bangun dari keterpurukan. Begitu pun bagi bangsa Indonesia, sudah menjadi keharusan untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun bangsa. Secara tegas upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut tertuang dalam lembaran yuridis negara berupa undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis meyakini bahwa nilai moral harus terus dipertahankan dalam masyarakat Indonesia. Semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam melakukan hal ini. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan ialah menanamkannya kepada generasi muda sebagai penerus kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Ranah yang paling tepat untuk melakukan ini ialah melalui pendidikan formal, yaitu sekolah. Lembaga ini dapat memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai moral secara sistematis dan terarah. Adapun salah satu media yang dapat digunakan oleh para pendidik khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris ialah dengan menggunakan teks bacaan (*reading text*) dalam bentuk karya sastra. Media ini terbukti mengandung banyak nilai moral yang bisa ditanamkan kepada peserta didik. Karya sastra juga merupakan media yang menarik bagi peserta didik sehingga mereka akan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Inggris tidak terbatas pada penguasaan bahasa Inggris semata, tetapi

melibatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai moral yang harus mereka jaga dan terapkan di masyarakat.

II. KONSEP NILAI DAN MORAL

Nilai dan moral merupakan dua konsep berbeda yang dalam penggunaannya seringkali disandingkan. Nilai mempunyai makna yang penting dalam kehidupan seorang manusia. K. Bertens (dalam Murdiono, Wulandari, dan Halili, 2011: 12) menjelaskan definisi tentang nilai melalui cara memperbandingkannya dengan fakta. Fakta menurutnya adalah sesuatu yang ada atau berlangsung begitu saja. Sementara nilai adalah sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau menghimbau kita. Fakta dapat ditemui dalam konteks deskripsi semua unsurnya dapat dilukiskan satu demi satu dan uraian itu pada prinsipnya dapat diterima oleh semua orang.

Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh orang banyak. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sementara fakta menyangkut ciri-ciri objektif saja. Perlu dicatat dalam membedakan nilai dan fakta bahwa fakta selalu mendahului nilai. Terlebih dahulu ada fakta yang berlangsung, baru kemudian menjadi mungkin memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Kohlberg (dalam Ulfa, 2013: 16) mengklasifikasikan nilai menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif atau nilai universal yaitu nilai yang bersifat intrinsik, yakni nilai hakiki yang berlaku sepanjang masa secara universal. Termasuk dalam nilai universal ini antara lain hakikat kebenaran, keindahan dan keadilan. Ada pun nilai subjektif yaitu nilai yang sudah memiliki warna, isi dan corak tertentu sesuai dengan waktu, tempat dan budaya kelompok masyarakat tertentu.

Nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri sebagai berikut, *pertama*, nilai berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka tidak akan ada nilai. *Kedua*, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai. *Ketiga*, nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya, karena objek yang sama bagi pelbagai subjek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda.

Max Scheler (dalam Murdiono, Wulandari, dan Halili, 2011: 13) mendefinisikan nilai dari sudut pandang filosofis, menurutnya nilai adalah kualitas *a priori*. Nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Ketidaktergantungan tersebut mencakup setiap bentuk empiris, tidak hanya mengacu pada objek yang ada di dunia, melainkan juga reaksi manusia yang diberikan terhadap benda dan nilai. Lebih lanjut Scheler mencontohkan bahwa sekalipun pembunuhan tidak pernah "dinilai" jahat, itu akan tetap terus menjadi jahat. Dan meskipun yang baik tidak pernah "dinilai" sebagai sesuatu yang "baik", akan tetapi itu tetap menjadi baik.

K. Bertens (2007: 4) menyamakan etimologi kata moral dengan etika. Keduanya berasal dari kata yang berarti sama, yaitu adat kebiasaan. Menurutnya hanya bahasanya saja yang berbeda, etika berasal dari Yunani sementara moral berasal dari bahasa Latin. Lebih lanjut Bertens menyimpulkan bahwa arti kata 15 moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sementara moralitas menurutnya memiliki arti yang sama dengan moral, hanya saja lebih abstrak. Ketika berbicara tentang moralitas suatu perbuatan, itu berarti segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Terkait dengan pengertian moral, maka dijelaskan bahwa pendidikan moral adalah pendidikan mengenai prinsip-prinsip umum tentang moralitas dengan menggunakan metode pertimbangan moral atau cara-cara memberi pertimbangan moral (Koyan, dalam dalam Murdiono, Wulandari, dan Halili, 2011: 15). Pendidikan moral senantiasa melibatkan stimulasi perkembangan melalui tahap-tahap, dan tidak sekedar mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sudah baku. Dalam kaitan ini, peranan pendidik adalah memperkenalkan kepada peserta didik dengan masalah-masalah konflik moral atau dilema moral yang realistik. Meningkatkan keberhasilan pendidikan moral, maka pendidikan tersebut harus dilakukan dalam lingkungan sekolah yang pantas dan adil. Pendidikan mengenai nilai-nilai moral memerlukan rekayasa dan upaya pendidikan yang khusus, yakni proses pelakonan nilai-nilai moral. Dengan demikian nilai-nilai moral dan norma-norma yang semula bersifat keharusan akan berubah menjadi kelayakan dan mempribadi menjadi keyakinan.

Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali diri dalam bertingkah laku (Mulkan, 2012).

III. PENANAMAN NILAI MORAL

Penanaman nilai-nilai moral dan agama ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan nonformal maupun formal. Nonformal artinya dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat, sedangkan formal artinya dilakukan di lingkungan sekolah. Di sekolah penanaman nilai-nilai moral dan agama umumnya terintegrasi dengan kegiatan di sekolah dan masuk kurikulum. Setidaknya ada dua kiat yang dapat dilakukan oleh orangtua agar penanaman nilai moral keagamaan pada anak dapat berjalan efektif, yaitu dengan pembiasaan dan keteladanan.

Pembiasaan anak akan menjadi terbiasa untuk berbuat sesuatu tanpa terpaksa. Bila anak dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik. Sebaliknya jika anak dibiasakan dengan keburukan serta terlantarkan niscaya ia akan menjadi orang yang berperilaku buruk dan cenderung merusak. Sementara melalui keteladanan anak akan cenderung berbuat baik seperti yang dilakukan langsung oleh para orang tua. Di sini orang tua harus menjadi contoh yang baik. Bila orang tua menyuruh sang anak untuk bangun pagi dan sembahyang, maka mereka harus mau bangun lebih awal dan mengajak anak untuk sembahyang. Bila anak disuruh bangun pagi dan sembahyang sementara orang tuanya sendiri tidak melakukan hal itu, hal itu bukanlah bentuk keteladanan yang baik.

Tingkat keefektifitas proses penanaman nilai-nilai moral pada anak dapat diamati sudah efektif dapat diamati melalui sejumlah indikator sebagai berikut (Ulfa, 2013: 24).

3.1 Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Adapun indikatornya adalah:

- a. Mengagumi kebesaran Tuhan melalui kemampuan manusia dalam melakukan sinkronisasi antara aspek fisik dan kejiwaan.
- b. Mensyukuri keunggulan manusia sebagai makhluk pencipta dan penguasa dibandingkan makhluk lain.
- c. Mengagumi kebesaran Tuhan karena kemampuan dirinya untuk hidup bermasyarakat.
- d. Bersyukur kepada Tuhan karena menjadi warga negara Indonesia.
- e. Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta.
- f. Merasakan kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan keteraturan dalam semesta.
- g. Mengagumi kebesaran Tuhan karena adanya agama yang menjadi sumber keteraturan hidup.
- h. Merasakan kebesaran Tuhan dengan keberagaman agama yang ada di dunia.
- i. Mengagumi kebesaran Tuhan melalui berbagai pokok bahasan dalam berbagai mata pelajaran.

3.2 Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Adapun indikatornya adalah:

- a. Tidak menyontek ataupun menjadi plagiat dalam mengerjakan setiap tugas.
- b. Melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada di sekolah.
- c. Mengemukakan pendapat tanpa ragu dalam suatu pokok diskusi.
- d. Menyebutkan secara tegas keunggulan dan kelemahan suatu pokok bahasan.
- e. Mengemukakan rasa senang atau tidak senang terhadap suatu mata pelajaran.
- f. Mau bercerita tentang permasalahan dirinya dalam menerima pendapat temannya.
- g. Menyatakan sikap terhadap materi diskusi di kelas.
- h. Mengemukakan pendapat tentang sesuatu sesuai dengan yang diyakininya.
- i. Membayar barang yang dibeli dengan jujur.
- j. Mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan di tempat umum.

3.3 Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Adapun indikatornya adalah:

- a. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat.
- b. Memberi kesempatan kepada teman untuk berbeda pendapat.
- c. Menghormati teman yang berbeda adat istiadatnya.
- d. Bersahabat dengan teman lain tanpa membedakan agama, suku dan etnis.
- e. Bersahabat dengan teman dari kelas lain.
- f. Mau mendengarkan pendapat yang dikemukakan teman tentang budayanya.
- g. Mau menerima pendapat teman yang berbeda di kelasnya.

3.4 Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Adapun indikatornya adalah:

- a. Selalu tertib dalam melaksanakan tugas-tugas kebersihan sekolah.
- b. Selalu teliti dan tertib dalam mengerjakan tugas.
- c. Patuh dalam menjalankan ketetapan-ketetapan organisasi peserta didik.
- d. Menaati prosedur kerja dan prosedur pengamatan permasalahan sosial.
- e. Tertib dalam bahasa lisan dan tertulis.
- f. Mentaati aturan berbicara yang ditentukan dalam diskusi kelas.
- g. Mematuhi jadwal belajar yang telah ditetapkan sendiri.
- h. Tertib dalam menerapkan aturan penulisan untuk karya tulis.

3.5 Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Adapun indikatornya adalah:

- a. Mengerjakan semua tugas kelas selesai dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- b. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi.
- c. Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar.

- d. Menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas di dalam dan luar kelas.
- e. Selalu fokus dalam pelajaran.
- f. Selalu berusaha untuk mencari informasi tentang materi pelajaran dari berbagai sumber.

3.6 Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru dari yang telah dimiliki. Adapun indikatornya adalah:

- a. Mengajukan pendapat berkenaan dengan suatu pokok bahasan.
- b. Bertanya mengenai suatu hukum/teori/prinsip dari materi lain ke materi yang sedang dipelajari.
- c. Menerapkan hukum/teori/prinsip yang sedang dipelajari dalam aspek kehidupan masyarakat.

3.7 Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Adapun indikatornya adalah:

- a. Melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mencari sendiri sumber di perpustakaan untuk menyelesaikan tugas.
- c. Mencari sendiri di kamus terjemahan kata bahasa asing untuk bahasa Indonesia atau sebaliknya.
- d. Menerjemahkan sendiri kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya.

3.8 Demokratis

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Adapun indikatornya adalah:

- a. Memilih ketua kelompok berdasarkan suara terbanyak.
- b. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman.
- c. Memberikan suara dalam pemilihan di kelas dan sekolah.
- d. Menerima kekalahan dalam pemilihan dengan ikhlas.
- e. Mengemukakan pikiran tentang teman-teman di kelas.
- f. Mengemukakan pendapat tentang teman yang akan menjadi pemimpinnya.
- g. Ikut membantu melaksanakan program ketua kelas.

h. Memberi kesempatan kepada teman yang menjadi pemimpin untuk bekerja.

3.9 Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Adapun indikatornya adalah:

- a. Bertanya kepada guru dan teman tentang materi pelajaran.
- b. Bertanya atau membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang terkait tentang pelajaran.
- c. Bertanya kepada sesuatu tentang gejala alam yang baru terjadi.
- d. Membaca atau mendiskusikan tentang gejala alam yang baru terjadi.
- e. Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang didengar dari ibu, bapak, teman, radio dan televisi.
- f. Membaca atau mendiskusikan beberapa peristiwa alam, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi yang baru didengar.

3.10 Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Adapun indikatornya adalah:

- a. Menyenangi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia.
- b. Mengemukakan sikap mengenai kondisi geografis Indonesia.
- c. Menyenangi keragaman budaya dan seni di Indonesia.
- d. Mengemukakan sikap dan kepedulian terhadap keberagaman budaya dan seni di Indonesia.
- e. Menyenangi keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia.
- f. Mengemukakan sikap dan kepedulian terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia.
- g. Mengagumi keberagaman hasil-hasil pertanian, perikanan, flora dan fauna di Indonesia.
- h. Rasa bangga dan peduli terhadap berbagai unggulan produk Indonesia dalam pertanian, perikanan, flora dan fauna.
- i. Mengagumi dan menyenangi produk, industri dan teknologi yang dihasilkan bangsa Indonesia.

- j. Rasa bangga terhadap produk unggulan bangsa Indonesia di bidang industri dan teknologi.

3.11 Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Adapun indikatornya adalah:

- a. Mengerjakan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya.
- b. Rajin belajar untuk berprestasi tinggi.
- c. Berlatih keras untuk berprestasi dalam olahraga dan kesenian.
- d. Hormat kepada sesuatu yang telah dilakukan guru, kepala sekolah, dan personalia sekolah lain.
- e. Menghargai kerja keras guru, kepala sekolah dan personalia lainnya.
- f. Menceritakan prestasi yang dicapai orang tua.
- g. Menghargai berbagai upaya orang tua untuk mengembangkan berbagai potensi dirinya melalui pendidikan dan kegiatan lainnya.
- h. Menghargai hasil kerja pemimpin di masyarakat sekitarnya.
- i. Menghargai temuan-temuan yang telah dihasilkan manusia dalam bidang ilmu, teknologi, sosial, budaya dan seni.

3.12 Bersahabat / Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Adapun indikatornya adalah:

- a. Bekerja sama dalam kelompok di kelas.
- b. Memberikan pendapat dalam kelompok di kelas.
- c. Mendengarkan dan memberi pendapat dalam diskusi di kelas.
- d. Bergaul dengan teman sekelas ketika istirahat.
- e. Aktif dalam kegiatan sosial budaya kelas.
- f. Bergaul dengan teman kelas lain.
- g. Aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah.
- h. Berbicara dengan guru kepala sekolah dan personalia lainnya.

3.13 Cinta Damai

Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Adapun indikatornya adalah:

- a. Melindungi teman dari berbagai ancaman fisik.
- b. Ikut serta dalam berbagai kegiatan cinta damai.
- c. Berupaya mempererat pertemanan.
- d. Berkomunikasi dengan teman-temannya.
- e. Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di sekolah.

3.14 Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Adapun indikatornya adalah:

- a. Membaca buku atau tulisan keilmuan, sastra, seni, budaya, teknologi, dan humaniora.
- b. Membaca koran atau majalah dinding.
- c. Membaca buku atau tulisan tentang alam, sosial budaya, ekonomi politik.

3.15 Peduli Sosial dan Lingkungan

Sikap, upaya, dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain yang membutuhkan dan upaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Adapun indikatornya adalah:

- a. Berpartisipasi, merancang dan melaksanakan kegiatan sosial.
- b. Meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau tidak punya.
- c. Menghormati petugas-petugas sekolah.
- d. Membantu teman yang sedang memerlukan bantuan.
- e. Mengikuti berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kebersihan, keindahan dan pemeliharaan lingkungan.
- f. Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan.

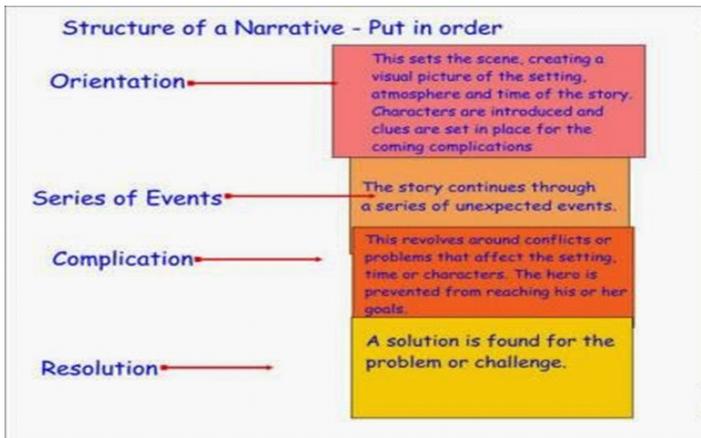
IV. TEKS NARATIF

Pembelajaran bahasa Inggris di tingkat menengah, baik SMP maupun SMA, tidak akan lepas dari pelajaran tentang teks naratif. Dalam pelajaran ini, siswa biasanya dituntut untuk bisa menceritakan sebuah kisah, dongeng ataupun

cerita dalam bentuk tulisan. Meski “*storytelling*” adalah salah satu komponen *spoken English* yang sekaligus meramaikan pelajaran ini, teks naratif kenyataannya lebih dominan diajarkan dalam bentuk tulisan, seperti memahami *generic structure* sebuah cerita, menganalisis karakter, latar, ataupun alur cerita naratif. Teks naratif dalam mata kuliah *writing and composition* biasanya disebut *narration*. Istilah ini merupakan salah satu jenis teks dalam sebuah bahasa sastra. Biasanya, teks naratif berisi tentang cerita—baik cerita fiksi, cerita non-fiksi, dongeng, cerita rakyat, cerita binatang/fabel dan sebagainya.

Thomas S. Kane (dalam Masrurroh, 2015) menjelaskan bahwa teks naratif merupakan “*A meaningful sequence of events told in words. It is sequential in that the events are ordered, not merely random. Sequence always involves an arrangement in time (and usually other arrangements as well). A straightforward movement from the first event to the last constitutes the simplest chronology.*” Teks naratif adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Jika diartikan secara harfiah naratif bermakna (1) sebuah cerita baik terucap atau tertulis tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan; (2) bagian yang diceritakan dalam sebuah karya sastra, berbeda dengan dialog; (3) Praktik atau seni bercerita. Jika disimpulkan, maka teks naratif adalah teks yang berisi sebuah cerita baik tertulis ataupun tidak tertulis dan terdapat rangkaian peristiwa yang saling terhubung.

Struktur utama dari teks naratif ada beberapa struktur, yaitu: *Orientation*, berisi pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita (siapa atau apa, kapan dan dimana); *Complication*, permasalahan muncul/mulai terjadi dan berkembang; *Resolution*, masalah selesai, secara baik ataupun buruk. Kadang-kadang susunan teks naratif juga bisa berisi: *Orientation, Complication, Evaluation, Resolution* dan *Reorientation*. Meski “*Evaluation*” dan “*Reorientation*” merupakan pilihan yang bisa ditambahkan dan bisa tidak. *Evaluation* berisi penilaian/evaluasi terhadap jalannya cerita atau konflik, sedangkan *Reorientation* berisi penyimpulan isi akhir cerita. Jika sudah mahir membuat cerita naratif, susunannya bisa diubah-ubah. Tata bahasa yang digunakan dalam teks naratif bahasa Inggris yang sering muncul menggunakan tenses “*Past*”, baik *simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous*, atau bisa saja *past future continuous*. Struktur ini dapat diamati pada gambar berikut:



Skematis Teks Narasi

V. PENANAMAN NILAI MORAL MELALUI TEKS NARATIF

Cerita dalam bentuk teks dapat dijadikan media untuk menanamkan nilai-nilai moral. Berbagai jenis cerita seperti dongeng dari budaya tempat anak berasal dapat menjadi medium pendidikan nonformal tentang kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Anak lebih mudah memahami konsep abstrak khususnya moralitas jika diberi contoh yang konkret. Satu hal yang digunakan untuk memberi contoh yang konkret adalah dongeng dengan tokoh binatang maupun manusia. Ada lima tahap untuk masa kanak-kanak awal agar mendongeng efektif untuk menanamkan nilai dan moral pada anak, yaitu berpikir reflektif dan diskusi, membandingkan beberapa dongeng serupa, memberi respons dengan menggambar dan menulis, dramatisasi, dan narasi oral (Malilang dan Liem, 2014: 20). Oleh karena itu, melalui paparan ini, para pendidik diharapkan mampu memanfaatkan dongeng secara efektif untuk menanamkan nilai dan moral pada anak-anak.

Bercerita untuk anak menurut Musfiroh (dalam Christianti, 2012: 7) memberi suatu nilai penting bagi anak dengan beberapa alasan yaitu antara lain: 1) merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak selain keteladanan; 2) merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar keterampilan lain seperti menyimak, berbicara, membaca dan menulis; 3) memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpati dan berempati terhadap peristiwa

yang menimpa orang lain (melatih kepekaan sosial), 4) memberi contoh pada anak cara menyikapi suatu masalah, memberi pelajaran pada anak untuk mengendalikan keinginan yang dinilai negatif oleh masyarakat, 5) memberikan barometer sosial pada anak, 6) memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti yang memiliki retensi lebih kuat dibandingkan melalui penuturan dan perintah langsung, 7) memberi ruang gerak pada anak agar nilai yang diperoleh dalam cerita dapat diaplikasikan, 8) memberi efek psikologis yang positif antara pencerita dan pendengar, seperti kedekatan emosional, 9) mengembangkan kemampuan untuk merangkai hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa dan membantu anak untuk belajar menelaah kejadian di sekitarnya, 10) memberikan daya tarik pada anak karena memberi efek rekreatif dan imajinatif, 11) mendorong anak untuk memberikan makna bagi proses belajar terutama mengenai empati sehingga anak dapat mengkonkretkan rabaan psikologis dalam memandang masalah dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian, kegiatan bercerita memberi nilai positif bagi anak untuk dikembangkan dan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Keberhasilan cerita yang disampaikan pendidik dipengaruhi oleh banyak faktor. Minat anak menjadi faktor utama karena tidak semua anak menyukai kegiatan bercerita. Cerita tidak boleh terlalu panjang dan tidak pula rumit agar anak mudah mengingat jalan cerita. Tema cerita juga harus dekat dengan anak agar anak memahami cerita dalam bentuk yang dapat dibayangkan. Gaya bercerita pendidik juga mempengaruhi menarik atau tidaknya cerita tersebut. Dengan demikian, pendidik harus memahami karakteristik cerita agar menumbuhkan minat dan menarik perhatian anak.

Penerapan kegiatan bercerita untuk anak dengan menggunakan cerita rakyat dapat dilakukan dengan tiga tahap utama (Christianti, 2012: 12), yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

5.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai moral yang akan ditanamkan pada anak sesuai dengan kebutuhan. Lalu memilih cerita yang berkaitan dengan nilai moral tersebut. Pada langkah selanjutnya, pendidik dapat menyiapkan alat peraga atau skenario cerita dan melakukan penjajakan lebih dalam mengenai cerita tersebut. Pendidik juga disarankan membuat rancangan pertanyaan yang mengacu pada cerita ataupun non cerita yang

dikaitkan langsung pada pengalaman anak secara kontekstual untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam bercerita dan pemahaman anak dalam memahami cerita. Selain itu, pendidik dapat membuat kegiatan terencana dalam bentuk program penerapan yang diperkirakan dalam jangka waktu tertentu, atau dalam bentuk aplikasi lainnya seperti menggambar, bermain sosiodrama, menceritakan kembali dan lain sebagainya.

5.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik yaitu antara lain: 1) anak dilibatkan dalam bercerita, libatkan anak dalam menghayati karakter tokoh dengan cara menirukan karakter tersebut secara bersama-sama, 2) menambahkan lagu-lagu yang sesuai dengan cerita untuk menumbuhkan rasa senang dan gembira, dan 3) perhatikan ekspresi anak ketika melihat gambar dan pastikan anak memperhatikan cerita dengan melihat gambar dan guru. Tutup kegiatan bercerita dengan bertanya jawab, menyusun gambar kembali, dan menceritakan kembali. Lagu dapat diulangi kembali untuk menyegarkan anak ketika habis mendengarkan cerita. Dekatkan anak yang menaruh perhatian penuh pada cerita dengan alat peraga yang digunakan guru.

5.3 Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dapat dilakukan pendidik dengan melakukan observasi terkait nilai yang ingin ditanamkan pada anak pada tahap perencanaan. Jika keberhasilan pendidikan karakter diukur dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik maka pendidik dapat melakukan evaluasi sebagai refleksi pada ketiga ranah tersebut. Pada ranah kognitif dapat dilihat secara langsung dari kemampuan anak menjawab pertanyaan terkait pilihan sikap yang harus dilakukan. Kemampuan pada ranah afektif cukup sulit dilakukan karena berkaitan dengan sesuatu yang abstrak dan tidak terlihat. Ranah ini dibantu dengan ranah psikomotorik. Dari ranah psikomotorik keberhasilan penanaman nilai moral dalam kegiatan bercerita dapat dilihat dari sikap anak ketika menghadapi permasalahan yang hampir sama dengan cerita tersebut. Keputusan-keputusan anak untuk memilih pada ranah afektif terlihat secara konkrit pada tingkah laku anak baik secara verbal maupun nonverbal pada ranah psikomotor. Jika disesuaikan dengan tahap penanaman nilai moral pada anak pada usia dini, anak harus

terus menerus diingatkan dan diberi penguatan untuk sikap-sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat.

VI. SIMPULAN

- Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari.
- Teks narasi adalah teks yang berisi sebuah cerita baik tertulis ataupun tidak tertulis dan terdapat rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Struktur yang ada di dalamnya meliputi *Orientation*, berisi pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita (siapa atau apa, kapan dan dimana); *Complication*, permasalahan muncul/mulai terjadi dan berkembang; *Resolution*, masalah selesai, secara baik ataupun buruk.
- Solusi penanaman nilai moral melalui teks bacaan ialah dengan menerapkan kegiatan bercerita untuk anak dengan menggunakan cerita rakyat dapat dilakukan dengan tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Oleh sebab itu, para guru perlu memahami kelebihan yang terkandung dalam berbagai teks naratif yang mereka gunakan dalam materi pembelajaran. Pemahaman ini akan mengantarkan para guru untuk menentukan dan memilih cerita apa yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai moral tertentu yang ingin ditanamkan kepada peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifanny, C. 2008. *Analisis Nilai Moral dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang), diakses 23 Agustus 2015.
- Christianti, M. 2012. *Penanaman Nilai-Nilai Moral Anak Usia Dini melalui Kegiatan Bercerita Bertema Cerita Rakyat Budaya Lokal*, diakses 27 Agustus 2015.

- Malilang, C. S., & Liem, A. 2014. *Penanaman Nilai dan Moral pada Anak sebagai Modal Sociopreneur Melalui Mendongeng*. *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, 2(1), 13-22, diakses 27 Agustus 2015.
- Masruroh, J. 2015. *Narrative Text: Materi dan Contoh Terlengkap*. (online), (<http://www.englishindo.com/2015/04/contoh-narrative-text.html>), diakses 27 Agustus 2015.
- Mulkan, H. 2012. *Perkembangan Nilai dan Sikap*. (online), (<http://sambil2lah.blogspot.com/2012/06/perkembangan-nilai-moral-dan-sikap.html>), diakses 27 Agustus 2015.
- Murdiono, M. Wulandari, K., Puji., dan Halili. 2011. *Analisis Muatan Nilai-Nilai Moral Dalam Panduan Etika Pergaulan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. (online). (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132314547/LAPORAN%20HASIL%20PENELITIAN%20LENGKAP.pdf>), diakses 23 Agustus 2015.
- Prakoso, A. R. 2013. *10 Dampak Positif dan Negatif Globalisasi*. (Online), (<http://asrilrahmatp.blogspot.com/2013/01/10-dampak-positif-negatif-globalisasi.html>), diakses 27 Agustus 2015.
- Setiowati, R. 2013. *Analisis Nilai-Nilai Moral dalam Novel Bintang Anak Tuhan Karya Kirana Kejora*, (online), diakses 26 Agustus 2015.
- Sumarni. 2013. *Analisis Unsur Nilai Moral dan Nilai Sosial terhadap Kumpulan Cerpen "Delapan Peri" Karya Sitta Karina*. (online), (<http://yemmiwoellandhary.blogspot.com/2013/07/jurnal-artikel-analisis-unsur-nilai.html>), diakses 26 Agustus 2015.
- Ulfa, Z. 2013. *Proses Penanaman Nilai-Nilai Moral pada Anak di TPO Muhammadiyah Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang), diakses 27 Agustus 2015.
- Wijaya, L. 2015. *Menjadi Pengguna Gadget yang Bijak*. (online), (<http://diskominfo.jabarprov.go.id/menjadi-pengguna-gadget-yang-bijak-2/#.Vd5G9X0pqf4>), diakses 27 Agustus 2015.

MATA KULIAH BAHASA INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN GENERASI BANGSA INDONESIA YANG BERKARAKTER

Ahsani Taqwiem

ahsanitaqwiem@unlam.ac.id

ABSTRAK

Karakter adalah pembentuk warga negara yang baik. Salah satu yang mampu membentuk karakter adalah bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia harus ambil bagian dalam usaha menumbuhkan karakter warga negara. Pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran wajib pada jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di jenjang perguruan tinggi. Sebagai sebuah mata kuliah, bahasa Indonesia diarahkan menjadi mata kuliah pengembang kepribadian. Tantangan mata kuliah Bahasa Indonesia semakin hari juga semakin berat. Berada di era globalisasi tentu membawa efek positif serta negatif, termasuk untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa maupun sebagai sebuah mata kuliah.

Kata kunci: bahasa Indonesia, karakter, globalisasi.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi PBSI FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Warga Negara yang baik tentu adalah warga negara yang memiliki karakter. Karakter sebagai sesuatu yang abstrak dan melekat pada masing-masing individu dapat ditanam serta ditumbuhkan lewat berbagai cara. Satu caranya adalah lewat bahasa, dalam konteks bangsa Indonesia tentu saja bahasa Indonesia yang menjadi ujung tombak dalam upaya menumbuhkan karakter masyarakat.

Sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sejak saat itu pula Sumpah Pemuda menjadi jiwa dalam mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menegaskan perannya sebagai pondasi kebangsaan, butir ketiga pada Sumpah Pemuda menjadi semacam cikal bakal perjuangan para pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Begitu pentingnya bahasa Indonesia terlihat dari selalu adanya mata pelajaran bahasa Indonesia dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah menu wajib dan utama. Hal ini adalah satu pengejawantahan dari peraturan dan semangat menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor satu.

Pengajaran bahasa Indonesia adalah salah satu cara untuk membentuk warga negara yang baik. Namun, sudah tercapaikah tujuan dari pengajaran bahasa Indonesia tersebut? Kiranya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya tentu saja sangat beragam tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tersirat mata pelajaran bahasa Indonesia juga membawa nilai-nilai kebangsaan. Hal ini sangat mendasar sebab bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Penjabaran mengenai pentingnya kehadiran bahasa ini juga terurai dalam banyak teks, semisal teks sumpah pemuda, teks pembukaan UUD '45, serta dengan pada pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia".

II. BAHASA INDONESIA SEBAGAI MATA KULIAH

Mengacu kepada SK Dirjen Dikti tentang Mata Kuliah Pengembang Kepribadian No. 43/Dikti/Kep/2006 sebenarnya perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi telah bergeser tujuannya, dari sekedar menghendaki mahasiswa memiliki penguasaan piranti-piranti kebahasaan menjadi lebih

komplek dan menyeluruh. Mata kuliah bahasa Indonesia diarahkan menjadi dasar dalam mengembangkan kompetensi dan kepribadian.

Tujuan yang semula sederhana menjadi lebih luas dan menyeluruh. Mata kuliah bahasa Indonesia menanggung beban yang tidak ringan, membentuk manusia-manusia Indonesia yang kompeten dan berkarakter. Berhasilkah pengajaran bahasa Indonesia selama ini? Kiranya jawaban dari pertanyaan ini sangat beragam. Sebab tentu saja seharusnya keberhasilan bahasa membentuk karakter dapat diamati pada hasil belajar atau yang lebih umum bisa kita lihat pada hasil Ujian Nasional yang sejak tahun 2003. Hubungan keduanya akan terlihat langsung sebab jika nilai UN mata pelajaran bahasa Indonesia jauh dari harapan dibanding mata pelajaran lain, tentu saja ini adalah sebuah indikator dan jawaban mengapa banyak siswa kita yang karakternya masih perlu dipertanyakan.

Fenomena ini memang bukan hal yang asing kita dengar. Isu mengenai rendahnya nilai mata pelajaran bahasa Indonesia adalah isu lama yang terus berulang. Bahkan pada tahun 2013 nilai UN jurusan bahasa yang notabene adalah jurusan dengan konsentrasi bahasa, termasuk bahasa Indonesia, hampir 25% tidak lulus dalam UN mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menjadi ironi dan begitu mengherankan. Belum lagi jika nilai bahasa Indonesia dibandingkan dengan nilai mata pelajaran yang lain seperti IPA dan IPS. Hal ini memunculkan pertanyaan ada apa dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebegitu susahkah mempelajari bahasa yang kita kenal bahkan sejak taman kanak-kanak, atau memang masalahnya bukan pada materi bahasa, tetapi ada pada subjek pembelajarannya.

Berkaca dari fakta di atas, serta tentu saja berlandaskan dari peraturan pemerintah, maka pertanyaan mengapa bahasa Indonesia perlu disajikan lagi sebagai mata kuliah pada jenjang perguruan tinggi dapat dipahami. Secara umum mata kuliah bahasa Indonesia diletakkan pada semester awal perkuliahan, meskipun dibeberapa jenjang disajikan pada semester atas dengan bobot 2 sampai 3 sks. Materi-materi pokok perkuliahan secara garis besar biasanya berisi tentang sejarah singkat bahasa Indonesia, ejaan, ragam bahasa, diksi, karya ilmiah dan notasinya, serta piranti-piranti bahasa seperti kata, kalimat dan paragraf.

Mata kuliah bahasa Indonesia menuntut pengajar yang kreatif dan inovatif, sebab materi-materi yang sudah bersifat baku kalau disampaikan dengan cara yang kurang menarik akan membuat mahasiswa semakin kesulitan dan merasa jenuh karena materi yang mereka dapatkan sebagian adalah materi yang sudah pernah mereka pelajari sewaktu bersekolah. Hal seperti ini akan menghambat perkuliahan bahasa Indonesia menjadi maksimal dalam mencapai tujuan perkuliahan.

II. HUBUNGAN MATA KULIAH BAHASA INDONESIA DAN NILAI KARATER BANGSA

Karakter mencuat menjadi topik yang selalu diperbincangkan, hal ini semakin kuat sejak Kemendikbud pada tahun 2011 merumuskan 18 jenis nilai karakter bangsa yaitu religius, jujur, toleransif, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Menurut KBBI (2008), karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak. Pengertian lain menyebutkan bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan (Philips, 2008: 235).

Hampir semua karakter yang diuraikan Kemendikbud pada hakikatnya bisa diintegrasikan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. Namun, ada beberapa karakter yang langsung terlihat dan terbangun pada saat pembelajaran bahasa khususnya bahasa Indonesia.

Karakter disiplin adalah karakter yang sangat berkaitan dan mampu tumbuh pada saat mahasiswa belajar bahasa Indonesia. Disiplin berasal dari bahasa latin *Discere* yang berarti belajar. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah, atau peraturan yang diberlakukan bagi dirinya sendiri (Lemhannas, 1995: 11).

Bahasa Indonesia diatur oleh ejaan. Ejaan adalah “Sistem atau aturan perlambangan bunyi bahasa dengan huruf (u.p. Huruf Latin), aturan menuliskan kata-kata atau cara-cara mempergunakan tanda baca (Kridalaksana, 1985: 38). Ejaan berisi aturan yang bersifat baku dan mengikat. Mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia mau tidak mau harus taat dan tunduk pada ejaan yang berlaku.

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) adalah ejaan yang sejak lama dikenal, namun hal ini berubah setelah pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa Ejaan Yang Disempurnakan diganti menjadi Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Jika dihitung EBI adalah sistem ejaan keempat yang pernah digunakan bangsa Indonesia.

EBI mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca serta penulisan unsur serapan. Mahasiswa mau tidak mau harus taat dan disiplin dalam menulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan taat pada aturan penulisan mahasiswa akan terlatih dan mampu menjadi pribadi yang taat dan disiplin pada aturan-aturan yang ruang lingkungannya lebih luas seperti aturan hukum dan aturan sosial kemasyarakatan.

Ada empat unsur-unsur disiplin yaitu aturan, hukuman, penghargaan dan konsistensi (Hurlock, 1970: 74). Aturan kebahasaan khususnya untuk bahasa resmi sebuah negara tentu saja bukan aturan yang boleh diremehkan. Harus ada hukuman bagi mereka yang tidak mau patuh dan menganggap aturan bahasa sebagai sesuatu yang serius. Cerita mengenai bangsa Jepang yang begitu menomor satukan bahasa mereka tentu adalah cerita yang sudah sering kita dengar. Setiap buku luar dan tidak berbahasa Jepang kalau ingin beredar di dalam negara mereka harus diubah dulu ke dalam bahasa mereka, semua buku, tidak terkecuali. Hal ini adalah salah satu contoh sederhana mengapa Jepang bisa tumbuh menjadi negara adidaya yang sejajar dengan negara-negara besar lain. Mereka mengerti bahwa bahasa adalah pondasi untuk menjadi bangsa yang besar.

Pemerintah kita kiranya masih dalam tahap berusaha mencapai level yang sama, atau berada pada tahap serius seperti negara lain memperlakukan bahasanya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesalahan ejaan yang dilakukan pihak pemerintahan seperti yang terlihat pada surat-surat resmi dan dokumen lainnya. Tidak bisa dielakkan hal ini terjadi karena faktor kurangnya

pengetahuan akan ejaan serta faktor tidak adanya hukuman jika tidak menerapkan ejaan sesuai dengan aturan. Pendapat ini memperkuat alasan mengapa mata kuliah bahasa Indonesia masih perlu diajarkan pada jenjang perguruan tinggi. Harapannya tentu saja agar para mahasiswa ketika sudah lulus dan bekerja di instansi pemerintahan dapat menerapkan pengetahuan yang sudah mereka dapat saat kuliah.

Banyaknya tindakan tidak terpuji khususnya yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa sebagai warga negara merupakan indikator bahwa mereka kurang disiplin terhadap peraturan yang berlaku. Bagaimana mungkin mereka mau taat kalau pada aturan sederhana seperti aturan penulisan saja mereka tidak bisa tunduk. Hal sederhana ini menyiratkan bahwa kuliah bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang dapat menunjang pembentukan karakter bangsa melalui generasi muda.

Aspek penghargaan bagi pengguna bahasa yang patuh tentunya juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemilihan duta bahasa Indonesia di setiap daerah yang berujung pada pemilihan tingkat nasional patut diapresiasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh badan bahasa beberapa tahun belakangan diharapkan dapat menjadi pembuka jalan dan menunjukkan bahwa pemakai bahasa Indonesia juga memiliki ajang untuk saling tampil dan dihargai. Konsistensi acara-acara seperti ini serta agenda-agenda yang dibuat oleh bahasa misalnya harus tetap dijaga agar tidak terlihat hanya ikut-ikutan dan kemudian hilang gaungnya.

Karakter selanjutnya yang dapat langsung terlihat pada saat pengajaran bahasa Indonesia adalah komunikatif. Komunikatif menurut KBBI adalah kata *adjektiva* atau kada sifat yang artinya menjelaskan nomina atau pronomina. Sedangkan artinya secara sederhana adalah mudah dipahami atau dimengerti.

Berbahasa dengan baik dan benar tidak hanya menekankan kebenaran dalam hal tata bahasa, melainkan juga memperhatikan aspek komunikatif. Bahasa yang komunikatif tidak selalu harus merupakan bahasa standar. Sebaliknya, penggunaan bahasa standar tidak selalu berarti bahwa bahasa itu baik dan benar. Sebaiknya, kita menggunakan ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar (Alwi dkk., 1998: 21).

Di dalam mata kuliah bahasa Indonesia mahasiswa diminta menggunakan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Namun, hal ini belakangan menjadi kendala serius sebab begitu hebatnya

arus bahasa *gaul* atau dalam bahasa Inggris disebut bahasa *slank*. Di sinilah mahasiswa diajak untuk tetap berkarakter komunikatif namun juga tidak kebablasan yang akhirnya terbawa arus meninggalkan aturan bahasa yang baik dan benar. Pemahaman bahwa bahasa Indonesia lebih komunikatif dalam suasana resmi dan formal harus dipahami mahasiswa. Tentu hal ini juga akan berdampak pada tulisan-tulisan ilmiah yang nantinya akan mahasiswa hasilkan, jika mereka tidak mampu menulis dengan ragam baku tentu kadar keilmiahannya serta nilai komunikatif tulisan mereka akan dipertanyakan.

Komunikasi dalam dunia kerja juga menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dunia kerja memiliki jangkauan yang umum dan universal, berbagai suku bahkan bangsa bersaing serta kemudian bekerja sama dalam instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Tidak mungkin tetap mempertahankan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah pada situasi seperti ini. Bahasa Indonesia adalah solusi agar tetap mampu berkomunikasi dengan baik. Melepaskan kedaerahan dalam berbahasa tentu bukan perkara mudah, selain itu mahasiswa juga harus benar-benar memahami kriteria penggunaan bahasa yang baik dan benar, karena itulah mata kuliah bahasa Indonesia hadir dan tetap penting diajarkan kepada para mahasiswa.

Kriteria penggunaan bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Pemilihan ini bertalian dengan topik yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak berbicara (kalau lisan) atau pembaca (jika tulis), dan tempat pembicaraan. Selain itu, bahasa yang baik itu bernalar, dalam arti bahwa bahasa yang kita gunakan logis dan sesuai dengan tata nilai masyarakat kita. Penggunaan bahasa yang benar tergambar dalam penggunaan kalimat-kalimat yang gramatikal, yaitu kalimat-kalimat yang memenuhi kaidah tata bunyi (fonologi), tata bahasa, kosa kata, istilah, dan ejaan. Penggunaan bahasa yang baik terlihat dari penggunaan kalimat-kalimat yang efektif, yaitu kalimat-kalimat yang dapat menyampaikan pesan/informasi secara tepat (Sugono, 1999: 21).

Karakter berikutnya adalah semangat kebangsaan serta cinta tanah air. Kedua karakter ini kiranya saling berkaitan dan berhubungan. Ketika seseorang memiliki semangat berbangsa dan bernegara tentu saja dia adalah individu yang cinta tanah air. Karakter semangat kebangsaan adalah karakter yang akan terpupuk pada saat mahasiswa mengikuti mata kuliah bahasa

Indonesia. Materi-materi seputaran sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia akan membuka wawasan mahasiswa mengenai bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia hadir karena semangat kebangsaan yang sangat kuat pada saat para pemuda ingin memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Pemikiran untuk memiliki bahasa yang dijunjung tinggi diantara banyaknya bahasa daerah tentu tidak mungkin lahir tanpa semangat kebangsaan yang kental. Dengan mengetahui sejarah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan meneladani semangat kebangsaan para pendahulu mereka.

Bahasa Indonesia dijadikan mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di setiap perguruan tinggi dengan tujuan agar para mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia diwujudkan dengan (1) kesetiaan bahasa, yang mendorong mahasiswa memelihara bahasa nasional dan, apabila perlu, mencegah adanya pengaruh bahasa asing, (2) kebanggaan bahasa, yang mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsanya, dan (3) kesadaran akan adanya norma bahasa, yang mendorong mahasiswa menggunakan bahasanya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku (Arifin dan Tasai, 2008: 2).

Deksripsi tujuan umum mata kuliah bahasa Indonesia di atas dapat kita cermati bahwa karakter cinta tanah air adalah karakter yang melekat pada tujuan perkuliahan. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki karakter cinta terhadap tanah airnya. Kenyataan dimasyarakat memang memperlihatkan pudarnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia, bukan karena bahasa Indonesia jelek atau kurang bagus, hanya saja arus gaya berbahasa yang diperlihatkan media masa atau media elektronik seringkali memberikan contoh yang kurang baik. Para pejabat dan tokoh publik seringkali mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dengan alasan kelihatan lebih bergengsi dan cendekia. Hal ini sebenarnya kurang tepat, bahasa Indonesia melalui kongres bahasa dan balai bahasa sebenarnya sudah berusaha mengantisipasi konsep-konsep baru dari luar yang belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Namun, kurangnya informasi kepada masyarakat serta kurang gencarnya pemerintah menyebarluaskan kosakata baru membuat usaha ini kurang maksimal.

Sikap positif sangat krusial dalam upaya menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi penerus seharusnya mampu memahami, sebab jika sikap positif ini luntur maka kecintaan dan kebanggaan akan bahasa persatuan juga akan pudar. Bahasa bukan sebuah hasil budaya yang kekal, bahasa bisa saja punah kalau para pemakai bahasa tidak berusaha menjaga dan melestarikan bahasa itu sendiri.

Sikap positif juga menuntut karakter lain yaitu karakter bertanggung jawab. Mata kuliah bahasa Indonesia menanamkan bahwa menjaga dan melestarikan bahasa adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia termasuk para mahasiswa. Tanggung jawab lain yang ditanamkan adalah tanggung jawab menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap tugas yang mahasiswa kerjakan. Makalah dan presentasi ilmiah yang menjadi tugas wajib mahasiswa dalam perkuliahan harus menggunakan media bahasa Indonesia. Para mahasiswa bertanggung jawab terhadap bahasa yang mereka gunakan, karena jika tidak bahasa Indonesia akan memiliki masa depan yang kurang cerah. Hal ini akan mengancam keberadaan bangsa Indonesia sebab bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi dua, pertama sebagai bahasa nasional dan kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda 1928. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berdasarkan UUD 1945 pasal 36.

Karakter gemar membaca juga menjadi karakter yang mampu ditumbuhkan mata kuliah bahasa Indonesia. Mahasiswa dalam perjalanan pembelajaran tentu harus membaca materi dan literatur mengenai bahasa Indonesia. Semakin banyak buku yang mereka baca maka secara tidak langsung memupuk kebiasaan membaca mereka. Dengan harapan buku yang mereka baca adalah buku berbahasa Indonesia. Selain dapat menambah wawasan dan memperkaya diksi, dengan membaca buku-buku berbahasa Indonesia secara tidak langsung turut menjaga dan melestarikan kelangsungan hidup bahasa Indonesia.

Dari beberapa karakter di atas yang mampu tumbuh dan berkembang saat mahasiswa mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia tentu dapat menjelaskan mengapa hingga saat ini mata kuliah bahasa Indonesia memiliki jatah dan tempat tidak tergantikan dalam ranah keilmuan pada jenjang perguruan tinggi. Karakter-karakter lain yang tidak diuraikan di atas bukan berarti karakter

yang terpisah dan tidak mampu ikut dipupuk saat perkuliahan bahasa Indonesia. Karakter lain seperti religius, jujur, toleransif, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab adalah karakter yang bisa disisipkan pada saat pemberian dan penilaian tugas. Peran pengajar atau dosen dalam hal ini sangat sentral, bagaimana dosen mampu melihat seorang mahasiswa bersikap jujur atau tidak pada saat kuliah berlangsung serta saat melakukan koreksi terhadap tugas yang dikumpulkan. Dosen harus mengingatkan kepada mahasiswa bahwa plagiat adalah perbuatan yang sangat tercela serta memiliki sanksi tegas jika dilakukan oleh mahasiswa.

IV. BAHASA INDONESIA DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Globalisasi membawa dampak positif namun juga turut membawa efek negatif kepada bangsa Indonesia. Globalisasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *globalization*. Kata *globalization* sendiri berasal dari kata *global* yang berarti *universal* yang kemudian mendapat imbuhan *-lization* yang dimaknai sebagai proses. Jadi globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia.

Globalisasi membuat bangsa Indonesia harus ikut ambil bagian di dalamnya. Perkembangan iptek harus diikuti agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dibanding bangsa-bangsa yang sedang berkembang lain. Ditambah lagi pada tahun 2015 kemarin era pasar bebas ASEAN (MEA) telah mulai dibuka. Hal ini semakin membuat batas-batas negara dan waktu mulai pudar berkat kemajuan teknologi informasi.

Arus globalisasi membawa ancaman tersendiri bagi bahasa Indonesia di negaranya sendiri. Informasi dan teknologi menjadi jembatan penghubung yang mampu menepiskan jarak dan waktu untuk membawa budaya asing atau budaya luar masuk ke Indonesia. Jika hal ini tidak dipandang serius dan difilter maka akan ada kebudayaan yang dikalahkan karena terus menerus dihegemoni oleh kebudayaan lain. Efek-efek seperti *culture shock*, *culture lag*, sekulerisme dan liberalism akan mengancam nilai-nilai budaya lokal serta nasional yang selama ini coba dipertahankan, belum lagi efek dibidang kebahasaan yang sangat cepat menjalar tanpa adanya penyaringan.

Televisi, internet, serta bahan bacaan yang begitu bebasnya masuk menggunakan bahasa asing membuat pelan-pelan pemikiran bahwa bahasa asing lebih penting dibanding bahasa Indonesia mau tidak mau akan muncul. Ancaman serius ini harus bisa ditanggulangi bersama dengan komando yang tepat dari pemerintah.

Upaya melindungi bahasa Indonesia dengan menjadikannya pelajaran wajib sudah baik, namun jika tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan lain maka tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Pemerintah tentu harus bekerja sama dengan merangkul semua aspek masyarakat yang terkait untuk merumuskan langkah-langkah untuk menanggulangi aspek negatif globalisasi di samping terus berusaha menyerap dan memanfaatkan aspek positif yang dibawanya.

Sebenarnya jika dicermati bahasa Indonesia dengan sendirinya membuktikan bahwa dia adalah salah satu bahasa penting yang ada di dunia. Dari sekitar 6.912 bahasa yang dituturkan di dunia (Lewis, 2009), bahasa Indonesia harus bersaing dalam upaya bertahan dari terbentuknya dunia yang tanpa batas di era globalisasi.

Penting tidaknya sebuah bahasa dilihat dari 3 aspek. Pertama aspek jumlah penutur bahasa itu sendiri. Dengan penutur sekitar 255 juta lebih secara jumlah bahasa Indonesia adalah bahasa dengan peringkat ke 7 dari daftar negara-negara dengan jumlah penutur terbanyak. Semakin banyak penutur sebuah bahasa maka semakin penting bahasa tersebut, begitu juga sebaliknya. Jumlah penutur yang besar itu juga yang membuat bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa dalam skala internasional.

Aspek kedua adalah dipandang dari luas penyebarannya. Bahasa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebuah negara yang tidak bisa dibilang kecil. Belum lagi para penutur bahasa Indonesia yang berada di luar negeri, baik untuk kuliah, bekerja maupun sekedar liburan, mereka secara sadar maupun tidak sadar membawa bahasa Indonesia dan memperluas daerah penyebarannya. Fakta-fakta bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat di Australia serta menjadi bahasa yang diajarkan di Negara Vietnam, Kanada bahkan Amerika memberikan bukti bahwa penyebaran bahasa Indonesia termasuk sangat luas menembus batas-batas teritorial negara.

Aspek ketiga adalah aspek dipakainya bahasa tersebut sebagai sarana ilmu, budaya dan sastra. Bahasa Indonesia mampu memenuhi tuntutan sebagai

sarana pengantar ilmu pengetahuan, kosakata pun terus berusaha ditambah agar dapat menyerah konsep-konsep baru yang berkembang dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan. Belum lagi produk budaya dan sastra yang dikembangkan dalam bahasa Indonesia sejak bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional.

Ketiga aspek di atas ternyata dapat memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting, karena itulah usaha menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia harus terus dilakukan. Jangan sampai kekayaan budaya seperti bahasa lebih dihargai oleh orang asing daripada oleh masyarakat Indonesia sendiri.

V. SIMPULAN

Warga negara yang baik atau *good citizen* adalah pondasi untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan setara dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia. Dalam upaya membentuk warga negara yang baik salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki karakter, dan bahasa memiliki peran dalam menumbuhkan karakter tersebut.

Pelajaran bahasa Indonesia menjadi menu wajib dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali pada jenjang perguruan tinggi. Mata kuliah bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu cara menumbuhkan karakter kepada para penerus bangsa, terutama di kalangan mahasiswa yang notabene generasi muda.

Pada hakikatnya 18 karakter yang dirumuskan oleh Kemendikbud pada tahun 2011 bisa diintegrasikan ke dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Namun, ada beberapa karakter yang kuat dan mampu ditonjolkan pada saat perkuliahan berlangsung. Karakter tersebut adalah disiplin, komunikatif, semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Melalui penjelasan di atas terlihat bahwa mata kuliah bahasa Indonesia memiliki andil yang cukup besar untuk menjadikan mahasiswa menjadi generasi yang berkarakter dan menjadi manusia Indonesia yang baik. Hal seperti ini harus terus dilanjutkan dan memerlukan dukungan oleh instansi atau pihak-pihak terkait agar ada sinergi dalam upaya melindungi bahasa Indonesia, apalagi kita berada

di dalam era globalisasi yang tidak mungkin dihindari. Mempertahankan dan menjaga kelestarian bahasa Indonesia berarti juga turut menjaga bangsa Indonesia, menjaga bahasa adalah menjaga martabat bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, Hasan *dkk.* 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, E. Zainal dan S. Amran *Tasai.* 2009. *Cermat Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Depdikbud. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hurlock, Elizabeth B. 1970. *Child Growth and Development*. Montana: Kessinger Publishing.
- Kridalaksana, Harimurti. 1985. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia. 1995. *Disiplin Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lewis, M. Paul (ed.), 2009. *Ethnologue: Languages of The World, Sixteenth edition*. Dallas, Texas: SIL International.
- Philips, Simon. 2008. *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugono, Dendy. 1999. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Puspa Swara.

UPAYA PRAKSIS PEMBELAJARAN UNTUK PENANAMAN JIWA NASIONALISME PADA SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA

Alimun Hakim

alimunhakim71@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya bangsa dengan komponen aspek pengetahuan (*cognitive*), sikap perasaan (*affection felling*), dan tindakan, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) baik untuk diri sendiri, masyarakat dan bangsanya.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Konselor SMPN 34 Banjarmasin.

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan karakter.

Pengembangan pendidikan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar dan pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat nilai pendidikan karakter merupakan usaha bersama sekolah dan oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru, semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Perkembangan terakhir kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini sangat memilukan dan memprihatinkan, banyak terjadi kekacauan, kerusuhan antar kelompok agama, kelompok masyarakat, antar pelajar, demonstrasi mahasiswa di luar toleransi atau sudah menjurus anarkisme bahkan kriminalitas. Aspirasi yang mereka bahwa dalam tuntutan demonstrasi tidak murni lagi, mudah dihasut oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan orang atau kelompok tersebut, hal itu salah satu sebabnya kurangnya pengetahuan, pemahaman mereka para generasi muda, atau para pemuda harapan bangsa terhadap makna Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta kurangnya pemahaman mereka terhadap nilai-nilai persatuan, kurang mewarisi semangat perjuangan, pudarnya rasa nasionalisme, maupun rasa patriotisme serta hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara.

Akibat dari arus globalisasi yang demikian serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka dampak yang ditimbulkan tentunya sangat besar. Hal tersebut berimbas bagi seluruh penduduk dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sedang berkembang pesat telah menyebabkan penurunan akhlak, moral, dan sikap dari bangsa Indonesia. Melalui media cetak maupun elektronik, masyarakat mampu mengakses informasi dari belahan dunia manapun tanpa menyaringnya terlebih dahulu, mana yang sesuai dengan budaya Indonesia dan mana yang tidak. Salah satu filter untuk menahan masuknya pengaruh

kebudayaan asing tersebut adalah melalui penanaman sikap nasionalisme. Perwujudan dari sikap nasionalisme antara lain berupa perilaku cinta terhadap tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, memiliki sikap rela berkorban, dan pantang menyerah (Risa Mesiana, 2012). Perasaan cinta tanah air tidak cukup hanya dituliskan dalam bentuk kata-kata saja, tetapi harus ditunjukkan melalui perilaku kita sehari-hari. Khususnya bagi anak usia sekolah dasar, perilaku tersebut dapat dilakukan dengan cara belajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, serta menunjukkan sikap yang positif seperti menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap dipertahankan untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri dengan kokoh dalam kerangka sejarah pendahulunya, dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman secara internal maupun ekseternal. Satu upaya terbaik yang harus ditempuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai sejarah melalui pembelajaran sejarah di sekolah. Namun, yang menjadi ironi saat ini adalah mata pelajaran sejarah di sekolah menjadi mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa dikarenakan oleh metode pembelajaran yang kurang variatif dan masih minimnya sumber dan media pembelajaran (Sardiman, AM: 2005), hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan oleh kita semua untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pembelajaran sejarah akan lebih bernilai dan tepat sasaran bila dikemas dalam kegiatan yang unik dan menarik. Sejarah akan menggugah setiap jiwa jika dalam penyampaiannya dapat membawa seseorang terbawa oleh alur cerita yang mengalir, dan akhirnya membawa orang tersebut seakan-akan hidup pada dunia yang belum pernah dia alami sebelumnya.

Generasi muda adalah satu aset Indonesia pada masa mendatang. Bangsa ini harus mampu menempatkan remaja-remajanya saat ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa mendatang. Tentu saja harus ada upaya-upaya untuk menanamkan sebuah ciri khas budaya bangsa ini untuk membedakannya dengan orang dari negeri lain. Selain itu adanya budaya lokal yang melekat pada diri pemuda-pemuda Indonesia akan mampu memperkuat jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis berusaha untuk memberikan sebuah solusi dalam rangka memperbaiki dan mempertahankan bangsa ini, karena seabad yang akan datang pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang akan bangsa Indonesia hadapi. Untuk menghadapi itu semua, pemuda yang menjadi ujung tombak dari estafet perjuangan bangsa ini harus memiliki perisai yang kokoh, salah satunya adalah jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi, khususnya bagi peserta didik dalam konteks pembelajaran di sekolah.

II. NASIONALISME

Kebudayaan Indonesia yang plural, cara hidup yang beragam, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan indikator bahwa negeri ini sangat kaya akan nilai budayanya. Faktor ini telah menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan melawan berbagai jenis penindasan. Atas dasar inilah penulis mencoba untuk mengeksplorasi kekayaan budaya Indonesia untuk menanamkan jiwa nasionalisme yang kuat.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini ternyata belum seperti yang dicita-citakan. Peristiwa politik tahun 1998 yang telah mengakhiri kekuasaan Orde Baru dengan berbagai euforianya ternyata menyisakan luka mendalam di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai bentuk pelanggaran masih terus terjadi. Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM, perilaku amoral dan runtuhnya budi pekerti luhur, anarkisme dan ketidaksabaran, ketidakjujuran, rentannya kemandirian dan jati diri bangsa, terus menghiasi kehidupan bangsa kita. Semangat kebangsaan, jiwa kepahlawanan, rela berkorban, saling bergotong royong di kalangan masyarakat kita mulai menurun. Kita seperti telah kehilangan karakter yang selama beratus-ratus tahun bahkan berabad-abad kita bangun. Satu fakta menarik yang menjadi bukti kuat adalah peristiwa di Aceh dimana bendera Merah Putih diturunkan orang-orang tidak dikenal, malahan ada yang dibakar sehingga mengundang keprihatinan bagi kita semua (Harian Berita Sore, 2007).

Hal tersebut tidak akan terjadi jika pemuda dan masyarakat saat ini tahu tentang sejarah dan mau mencontoh para pendiri negara kita tempo dulu, *the founding fathers* termasuk Bung Karno dan Bung Hatta yang

memproklamkan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia dan diakui bangsa-bangsa di dunia. Hal ironis seperti itu juga tidak akan terjadi jika kita ingat para pejuang Indonesia yang berdarah-darah dan mengorbankan jiwa dan raga merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan Jepang hingga negeri ini berdiri tegak dan kokoh sekarang ini, disinilah fungsi sejarah sebagai penguat jiwa nasionalis muncul di tengah lunturnya paham tersebut saat ini.

Nasionalisme secara luas dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang lebih rendah terhadap bangsa dan negara lain. Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Hubungan nasionalisme dan negara kebangsaan memiliki kaitan yang erat. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya di dasarkan pada semangat kebangsaan/nasionalisme. Artinya adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Rasa nasionalisme sudah dianggap muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan, semangat kebangsaan dan kesadaran kebangsaan. Paham nasionalisme akan menjadikan kita memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negara.

Nasionalisme menjadi persyaratan mutlak bagi hidupnya sebuah bangsa. Ideologi nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya, bahwa loyalitas tidak lagi diberikan kepada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, suku dan budaya (primordial), namun ditujukan kepada komunitas yang dianggap lebih tinggi, yaitu bangsa dan negara. Sebagai kesimpulannya, nasionalisme sebagai ide (ideologi) menjadi *conditio sine quanon* (keadaan yang harus ada) bagi keberadaan negara dan bangsa.

Negara kebangsaan dibangun atas dasar nasionalisme. Selanjutnya, nasionalisme yang tertanam dalam setiap warga negara akan memperkuat tegaknya negara kebangsaan. Gerakan untuk senantiasa mencintai dan membela bangsanya dari ancaman negara lain atau ancaman kehancuran melahirkan patriotisme.

Namun, perlu diperhatikan bahwa rasa mencintai dan berkorban untuk bangsa dan negara bukan berarti mencintai dan loyal kepada pemerintah negara.

Pemerintah hanyalah satu bagian atau unsur dari negara selain rakyat dan wilayah. Warga negara dapat saja tidak mencintai atau patuh pada pemerintahnya karena pemerintahnya telah melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, berbuat kejam kepada warga, dan serba berkuasa. Warga negara yang mencintai dan loyal pada bangsa dan negara menumbuhkan kekhawatiran jika bangsa dan negaranya rusak atau hancur gara-gara pemerintahannya yang buruk.

Semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme telah dibuktikan keberhasilannya ketika bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sifat dan semangat apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga mampu merebut kemerdekaannya? Semangat yang dimiliki tiada lain adalah semangat nasionalisme dan patriotisme. Nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa, agar mampu mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan sehingga mampu mensejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat; perwakilan politik. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul *Du Contract Sociale* (Mengenai Kontrak Sosial).

Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi bangsa harus disertai maksud mengembangkan semangat patriotik dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaiknya, jiwa nasionalisme dalam setiap pribadi warga perlu dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemampuan bangsa.

III. PEMBELAJARAN DAN NASIONALISME

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyentuh aspek jiwa pada pelajar. Patriotisme membawa kemajuan bangsa apalagi dalam bidang pendidikan. Sikap patriotisme, nasionalisme, dan hidup mandiri merupakan hal yang sangat penting. Karena akan membawa kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa.

Program ini harus ditanamkan pada anak sejak dini. Dengan menanamkan sikap tersebut sejak dini generasi penerus kita mampu bertindak

sesuai dengan nuraninya dan mampu membangun bangsa tanpa tergantung pada bangsa lain. Mengingat pentingnya hal tersebut sehingga harus diajarkan pada anak sejak usia dini. Sebab pendidikan yang diberikan pada anak sejak dini dapat memberikan dasar pengetahuan secara spiritual, emosional, dan intelektual dalam mencapai potensi yang optimal. Jika pendidikan sudah diberikan dengan tepat sesuai dengan bakat dan lingkungan peserta maka lima atau sepuluh tahun ke depan negara kita akan memiliki aset SDM yang berkualitas dan tangguh sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain dan memiliki keunggulan.

Sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya kita menghormati bangsa dan negara kita sendiri apapun adanya dan kondisinya. Orang-orang yang tidak menghormati serta membenci bangsa dan negara tempat kelahirannya bisa disebut sebagai pengkhianat. Apa salahnya tanah air kita yang begitu kaya raya dan indah, karena kesalahan hanya ada pada manusia-manusianya yang menciptakan kebencian.

Dengan adanya rakyat yang mencintai tanah airnya, maka negara akan aman dari berbagai macam gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negara. Dengan cinta tanah air kita dapat bahu membahu membangun negeri ini agar bisa sejajar dengan negara-negara maju. Dengan menyayangi negara Indonesia ini kita akan berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik bagi sesama, bukan malah menghancurkannya. Banyak pihak asing yang ingin menguasai dan merusak negara kita, sehingga perlu kita jaga dan pertahankan hingga titik darah penghabisan. Kalau bukan kita siapa lagi? dan kita mau tinggal di mana kalau kita kehilangan negara ini.

Pendidikan yang berdasarkan jiwa nasionalisme bertujuan membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan bagi negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, proses mengajar dan membelajarkannya, tidak hanya terbatas pada aspek-aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) saja, melainkan juga meliputi aspek akhlak (afektif) serta bertanggung jawab sesuai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar tersebut

tidak boleh dilepaskan dari lingkungan di mana peserta didik berada terutama dari lingkungan budayanya karena peserta didik hidup dalam lingkungan tersebut dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip tersebut akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.

Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari budaya di lingkungan terdekat, kemudian berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsanya dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing terhadap budaya terdekatnya maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsanya dan dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian maka dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan.

Dengan demikian peserta didik sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia akan memiliki wawasan, pola berpikir, pola sikap, dan pola tindak dan menyelesaikan masalah yang sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesia-annya. Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas yaitu “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Secara kultural pendidikan berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi muda melalui proses enkulturasi. Nilai-nilai dan prestasi tersebut akan menjadi kebanggaan bangsa dan pada gilirannya akan menjadikan bangsa tersebut lebih dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain berfungsi mewariskan nilai, pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan inti dari suatu

pendidikan. Pembentukan karakter pada setiap peserta didik merupakan tujuan dari pendidikan nasional, sesuai dengan Pasal I Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Pesan dari Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 tersebut bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang pandai, tetapi juga memiliki keperibadian atau berkarakter, sehingga nantinya lahir generasi bangsa yang tidak hanya memiliki kemampuan aspek pengetahuan yang baik, namun memiliki generasi yang berkembang dengan karakter yang bernapaskan moral yang baik, nilai-nilai luhur bangsa serta beragama.

IV. METODE PEMBELAJARAN BERKARAKTER NASIONALISME

Mewujudkan sikap nasionalisme dalam masa kini memang bukan suatu hal yang mudah. Akan tetapi, jika dunia pendidikan turut andil dalam menanamkan sikap nasionalisme, maka segala hal yang berkaitan dengan kekerasan maupun perpecahan dapat diselesaikan dengan jalan pikiran yang benar. Sikap nasionalisme akan tertanam dalam diri warga Negara Indonesia jika rakyat Indonesia mempunyai kesadaran akan pentingnya penanaman sikap nasionalisme. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan sikap nasionalisme tersebut, yaitu melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah.

Metode bercerita merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan. Tentunya cerita yang ditujukan untuk menanamkan nilai moral nasionalisme kepada siswa adalah cerita yang isinya memuat pesan-pesan nilai moral, khususnya nilai nasionalisme. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Hidayat (2005: 4-12) bahwa cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Terkait dengan nilai moral nasionalisme guru dalam bercerita memilih cerita yang di dalamnya mengandung pesan nilai moral nasionalisme. Cerita ini berisikan misalnya cerita tentang pahlawan wanita R.A. Kartini, cerita tentang K.H. Ahmad Dahlan, cerita tentang Antasari dan sebagainya.

Untuk memudahkan pesan dalam cerita diterima oleh anak, guru dalam bercerita menggunakan alat peraga sebagai alat bantu agar anak lebih mudah menerima isi cerita dan juga lebih menarik bagi anak-anak. Alat peraga ini bisa

berupa gambar, boneka tangan, papan flanel dan sebagainya. Tidak jarang dalam bercerita guru juga menggunakan peraga peristiwa langsung yang dialami siswa. Misalnya pengalaman siswa pergi ke tempat-tempat bersejarah. Fungsi alat peraga dalam bercerita adalah untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Alat peraga juga berfungsi untuk memusatkan perhatian anak agar lebih mudah untuk difokuskan.

Selain dalam bercerita didukung dengan penggunaan alat peraga, dalam membawakan cerita guru juga harus mampu membawakannya secara menarik, sehingga siswa akan senang menikmati dan memperhatikan isi ceritanya. Untuk membawakan cerita secara menarik guru bisa memanfaatkan kemampuan olah vokal yang dimilikinya untuk membuat cerita itu lebih hidup, sehingga lebih menarik perhatian siswa. Dengan memperhatikan secara seksama, siswa akan memiliki kesan yang mendalam dengan cerita yang dibawakan oleh gurunya. Dengan demikian siswa akan lebih mudah menangkap pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap proses internalisasi nilai moral ke dalam diri siswa.

Cerita yang dibawakan guru untuk mengembangkan nilai nasionalisme pada peserta didik ini seyogyanya tidak terlalu panjang. Pilih cerita yang mengandung nilai baik dan buruk yang jelas. Di samping itu cerita yang digunakan untuk menanamkan nilai moral nasionalisme berada dalam batas jangkauan anak. Maksudnya bahwa tokoh yang dimuat dalam cerita masih dekat dengan anak. Di dalam cerita tidak boleh ada unsur menakut-nakuti anak. Cerita yang dibawakan guru mampu membuat anak menjadi gembira. Dengan suasana yang seperti ini diharapkan pesan moral yang akan disampaikan guru akan lebih mudah diterima oleh anak. Melalui karakter yang ada pada dongeng atau cerita, siswa dapat belajar nilai-nilai kejujuran, rendah hati, rasa empati, juga sikap tolong-menolong. Saat mendongeng, pesan-pesan moral dan pelajaran etika yang hendak kita beri, dinilai tidak akan terlalu membebani perasaan anak. Untuk itu, sebagai seorang guru harus pandai memilih isi dari dongeng yang hendak kita berikan pada anak.

Pembelajaran sikap seseorang dapat dilakukan melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontoh. Modeling adalah proses peniruan terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya. Misalnya, ada seorang siswa yang sangat

mengagumi gurunya. Siswa tersebut akan cenderung meniru semua perilaku guru tersebut. Sebagai contoh, jika gurunya selalu berpakaian rapi saat di sekolah, maka siswa tersebut juga akan mengikuti hal yang sama seperti gurunya. Akan tetapi, guru tersebut juga harus menjelaskan alasannya karena agar sikap yang muncul nantinya didasari oleh kebenaran akan suatu sistem nilai. Pada dasarnya, salah satu karakteristik anak yang sedang berkembang adalah keinginan untuk mencontoh atau melakukan peniruan terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya. Jadi, guru dapat mencontohkan siswa untuk berperilaku sebagai seorang nasionalis agar dapat menanamkan nilai nasionalisme pada siswanya.

Selanjutnya, untuk menanamkan sikap nasionalisme pada siswa dapat dilakukan melalui cerita, dongeng dan bermain peran. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada siswa antara lain berupa media visual seperti gambar, foto, bendera pusaka, miniatur lambang negara, dan baju kebesaran daerah, media audio seperti pemutaran lagu kebangsaan dan lagu daerah, serta media audio visual seperti film dan video. Dengan bercerita anak dapat mendapatkan pesan moral yang didalamnya terdapat penanaman sikap nasionalisme contohnya dalam cerita rakyat atau pahlawan, dimana tokoh dari cerita tersebut digambarkan dengan menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah. Dari situlah siswa dapat meniru cara berpakaian para tokoh cerita bahwa sebenarnya Indonesia memiliki pakaian khas daerah yang menarik. Contohnya batik, sehingga siswa dengan sendirinya akan mencintai produk dalam negeri.

Guru menggunakan cerita perjuangan dalam menanamkan sikap nasionalisme kepada siswa. Guru bercerita mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda. Guru menyisipkan cerita mengenai tujuan Belanda menjajah Indonesia, yaitu untuk menguasai hasil kekayaan atau hasil bumi Indonesia. Oleh karena itu, di akhir cerita guru berpesan kepada siswa sebagai generasi penerus untuk senantiasa memanfaatkan, mempertahankan, dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan baik.

Penggunaan cerita keteladanan dengan cukup guru bercerita mengenai tokoh BJ Habibie sebagai teladan untuk siswa karena BJ Habibie telah berjuang untuk kesejahteraan negaranya. Selain itu, guru juga bercerita mengenai keteladanan lain yang dilakukan oleh seorang guru yang mau ditempatkan di

daerah terpencil, polisi dan tentara yang mau ditempatkan di daerah konflik atau yang sedang terjadi perselisihan, pejabat yang mau bekerja keras demi kemajuan daerahnya, serta atlet yang berjuang demi kemenangan untuk bangsa Indonesia.

Dongeng dapat dijadikan sarana yang cukup baik untuk menanamkan karakter yang baik dalam diri anak karena mereka akan dengan sangat senang menerimanya (Bimo, 2011). Selain itu dalam majalah Ayahbunda Online (2015) disebutkan bahwa salah satu manfaat lain dari mendongeng kepada anak adalah merangsang kreativitas dan menanamkan karakter dan moral yang baik. Di dalam penerapannya, dongeng-dongeng rakyat Indonesia dapat diberikan pada saat tahap sosialisasi. Dongeng rakyat yang baik tentu saja dapat diceritakan terlebih dahulu oleh guru. Anak-anak juga dapat memainkan peran tentang tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut.

Metode bercerita memiliki beberapa kelebihan dalam pembelajaran di sekolah. Menurut Widyasari (2010: 9) kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode ini dapat membuat bahan pelajaran yang diajarkan menjadi lebih bermakna.
2. Mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi.
3. Merangsang kecerdasan berbahasa yaitu melalui menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
4. Memupuk kerjasama dalam suasana gotong rotong.
5. Materi cerita akan tertanam secara maksimal pada pikiran anak sehingga dapat memunculkan perubahan perilaku.
6. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan mengolah informasi.
7. Mengembangkan potensi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisik.
8. Kekurangan metode cerita ini, harus punya banyak referensi bahan buku bacaan, guru harus bisa bercerita baik secara lisan, membaca maupun improvisasi, dapat membawa situasi kepada anak agar anak dapat hanyut dalam cerita.

V. PENUTUP

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa adalah upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme yang dapat dilaksanakan melalui semua mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat disisipi nilai-nilai karakter kebangsaan atau nilai-nilai nasionalisme untuk menumbuhkan karakter kebangsaan pada diri peserta didik (Kemendiknas, 2010).

Metode bercerita dapat mendapatkan sikap nasionalisme dari pesan moral yang terdapat di sebuah cerita tersebut. Karena siswa lebih tertarik melalui metode cerita dari pada siswa harus membaca sebuah cerita atau dongeng. Tetapi kadang guru memberikan tugas untuk membaca cerita tersebut. Pada dongeng atau cerita, siswa dapat belajar nilai-nilai kejujuran, rendah hati, rasa empati, juga sikap tolong-menolong.

Kendala dalam metode bercerita adalah jika cerita yang dipakai menggunakan bahasa daerah yang sulit dicerna oleh anak, seperti penggunaan bahasa Melayu. Kendala yang lain adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk bercerita, misalnya buku-buku cerita kepahlawanan, boneka/media cerita tentang kepahlawanan. Guru berusaha mencari sumber-sumber belajar ini di luar sekolah. Dalam bercerita guru menghadapi kendala lain yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengolah suara dan teknik bercerita. Hal ini menyebabkan daya tarik anak terhadap cerita yang dibawakan menjadi berkurang. Akan tetapi hal ini diatasi guru dengan cara menambah ilmu yang mendukung kemampuan bercerita melalui proses belajar.

DAFTAR RUJUKAN

- Wuryandani, Wuri. 2013. *Membangun Karakter Bangsa Melalui Penanaman Nilai Nasionalisme*. Jurnal Pendidikan. Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lemhanas. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

PROMOTING THE SCIENCE LEARNING IN DEVELOPING FATHONAH PROPHETIC CHARACTER

Arif Sholahuddin

arif.science.edu@unlam.ac.id

ABSTRACT

Fathonah mean smart, capable, and reliable, the prophetic character which endorse the individual ability to overcome problems they face in daily life. *Fathonah* prophetic character is an important character including three dimensions of intelligence that are intellectual, emotional and spiritual. Learning of the science concept through inquiry activities as well as its integration with awareness of the mighty of Allah behind every scientific phenomenon will be able to develop *fathonah* prophetic character. For this purpose we need to develop learning model that integrates science and awareness of God's creation to strengthen our efforts to develop it.

Keywords: *fathonah*, intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, science.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

** Faculty of Teacher Training and Education Lambung Mangkurat University.

I. INTRODUCTION

As a transmitter of messages and as leader of the community, a Prophet or Apostle equipped with four characters that are *shidiq*, *amanah*, *fathonah* and *tabligh*. The fourth characters are referred as the prophetic character. They are given by Allah so that they are able to guide his followers to the straight path, provide role models and even to be exemplary figure.

A prophet or apostle must has *shidiq* character, truth and sincerity in attitude, say and act both as individual and duty as leader of his community. A prophet or apostle must also be *amanah*, always maintain and keep what is entrusted to him both by the community he leads as well as by Allah SWT. A prophet or apostle must has character *tabligh*, they deliver truth, science and anything honestly and responsibly. A parophet or apostle also hase to be *fathonah*, smart, capable, and reliable which provide ability to face and overcome the problems encountered in life (Tusrianto, 2014).

All the characters must also be instilled in his followers, in order to be successful in the world life and in the hereafter. Developing of a person's character does not occur in a short time but it is proceed gradually, even when the man is still in the womb. Character is a pattern, good thoughts, attitudes and actions inherent in a person with a very strong and difficult to be removed or changed (Munir, 2010). Habits that are repeatedly perform preceded by awareness and understanding will be the character of a person, and genetic factors are only one factor that builds individual character.

The character develop mainly based on the conscious mind. Therefore, building character must start from the effort to develop the knowledge about good habits. In general, the more information is received and the more mature of belief system, and patterns of thought or self-image which is formed, the more clearly the actions, habits and unique character of each individual (Madjid & Andayani, 2013). It shows the important role of education and training in developing characters.

Natural science has the high potential to develop the prophetic character, because it involves relationship between the three components: scientific product, processes and attitudes in investigating phenomena (Carin, 1993). It mean that, when students learn the science they are not only gain the

knowledge about science but also develop their ability to think and their process skills, developing character and social skills as well as developing psychomotoric skills.

Indeed, the fourth prophetic characters actually can be developed through learning science, but further discussion is limited to the contribution of science education in developing *fathonah*. *Fathonah* definition above in line with the modern definition of intelligence suggested by experts which consist of intellectual, emotional and spiritual intelligence. The estuary of the intelligence is the ability to solve a personal, a particular group or wide society problems. This *fathonah* prophetic character is important to be possessed by each person so that he/she will succeed in carrying out duties as *kholifatullah*, in conjunction with the Creator, fellow human beings and the environment. The question is how the prophetic character *fathonah* can be developed through learning science?

II. PROPHETIC CHARACTERS

The God said that “ There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remember of Allah often” (QS Al-Ahzab: 21). Imitating the example of the Prophet Muhammad and follow him is a form of love of a servant to his Lord, and he will get the God’s love for him.

There are four characters prophetic owned by the prophets/apostles that should be followed by his followers, which is to be characteristic and is reflected in every behavior both as individuals and as a community leader. Four characters include *shidiq*, *amanah*, *fathonah*, *tabligh* (Tusrianto, 2014).

With *Shidiq* character Prophet learn the true science “is not a heretic” or “not suffer from misconception” and tell the truth as its fact. He has to do the truth as what he says in order to be model for others. Prophet’s attitudes and behavior can be a model for the people therefore his behavior and action feasible to be followed by his community.

The Prophet as the community leader carrying out the mandate or the trust granted, namely to convey the doctrine of Islam. The Prophet never uses his powers and authority as a leader for their own interests or the interests of his family, but that is done merely for the sake of Islam and the doctrine of God. With

Amanah character he kept secrets, convey the results of discussion in a genuine and honestly and convey anything deposited by others.

Even, each individual has accepted the mandate of God as a vicegerent on the earth. God has been entrusted humans to manage this nature in order to be utilized by human and several word. It means that we shall plan, manage and utilize correctly without causing damage. Utilization of coal as an energy source with limiting excessive exploration, as well as reclaiming mined land is example of the form of implementation of the mandate as a vicegerent of God on earth.

Prophet always convey everything that God revealed to him (*fathonah*), even though sometimes there is verse that the substance is insinuating him as expressed in the QS Abbasa, where the Prophet was reprimanded directly from God when Muhammad turned his face from Abdullah Ummi Maktum who is asking be taught some cases, but this verse not be hidden by him. He also not feel worried about his reputation would be degraded caused by the satire of Allah. Contrarily, his follower exactly believe toward his apostolic.

As a community leader prophet must has *fathonah* character, ability to use all his potential to overcome the problems faced in his real life. In contemporary views, this character include intellectual, emotional and spiritual intelligence as owned by the Prophet Muhammad SAW. Allah state that "O you who have believed, if you fear Allah, He will grant you criterion (*furqan*) and will remove from you your misdeeds and forgive you. And Allah is possessed of great bounty" (QS. Al-Anfal: 29).

Furqan demonstrate the ability of a prophet or a apostle to distinguish anything in detail so that he can explain clearly a hidden secret. He was not only able to distinguish the obvious thing, but it includes things that are similar or generally looked the same. With *furqan* he was able to explain perfectly revelations of God to the whole community. In other words, *furqan* is the intelligence given by God to him so he will be able to solve the problems faced in life when he perform his duties as leader and as mankind supervisor.

The following discussion only analyze the prophetic character of *fathonah* based on intelligence theory and science teaching practice.

III. MULTIPLE INTELLIGENCE

Intelligence quotient (IQ) is a general term used to describe the nature of the mind which includes a number of abilities such as the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend ideas, using language and learning. Intelligence is closely related to cognitive abilities possessed by individuals.

Howard Gardner, a leading psychologist from Harvard University, said there are eight intelligences possessed by humans, namely linguistic, mathematic or logic, spatial, and physic and kinetic, music, interpersonal, intrapersonal, and naturalist intelligences.

Gardner's theory have been contrary to theories of intelligence have been prevailed and also sharpens the view of intelligence. Previous opinion about the intellectual capacity state that human intelligence is fixed throughout their life. The intelligence can only be measured through language skills and logical or commonly known as IQ tests. According to Gardner, human intelligence is the ability to create and solve the problems (Gardner, 1993). The key of Gardner's theory is that all human have the eight intelligences which are independent of each other, but have difference level. Based on the understanding that the intelligence profile of each individual is not the same, so learning can be developed to evaluate the students' intelligence profiles and design learning activities based on the intelligence level.

Character of Multiple Intelligence

Gardner (Gardner, 1993; Armstrong, 2009) described the eight aspects and characteristics of each type of intelligence, namely:

(1) Linguistic intelligence

Linguistic intelligence is the ability to think in the form of words and to use language to express and appreciate complex meanings. The characteristics which are usually owned by someone who has a good linguistic intelligence, is have the ability to: learn through listening, reading, writing and discussion; memorize the names, places and dates; spell words easily and quickly; love poem, funny poems and a play on words; do crossword puzzles; enjoy and hear the words spoken, story books and radio; use a wider vocabulary than children in the same age; and read and write excellently.

(2) Mathematic-logic intelligence

Mathematic-logic intelligence is the ability to count, measure, and consider propositions and hypotheses, as well as solve the mathematical operations. Characteristics which are usually owned by someone who has a good mathematic-logic intelligence as follows: knowing concepts of quantity, time and causality; understanding pattern and relationship; counting quickly; using technology to solve mathematical problems; being skeptic, enjoying strategical games like chess, monopoly; explaining the problem logically; testing and experimenting; doing crossword puzzles are logical.

(3) Visual spatial intelligence

Spatial intelligence is the ability to imagine something. Characteristics which are usually owned by someone who has the well spatial intelligence as follows: easier to understand picture and illustration than text; easy to read through visual media such as drawing, painting, graphic, chart, map; enjoy three-dimensional formations, such as origami objects, artificial bridge, house or container; create a visual representation of information; likes to watch movies, slide, or see a pictures; enjoy scribble on paper or book.

(4) Bodily-kinesthetic intelligence

Bodily-kinesthetic intelligence is the ability to use of the body dexterity to overcome the problem, to produce something, to move objects and to perform the soft physical skills. Characteristics which are usually owned by someone who has a good bodily-kinesthetic intelligence, as follows: exploring the environment and object through touch and movement; learning by directly engaging and participating, learning through the perform will be better than just talking or paying attention; engaging in physical activities such as sports, games, gymnastic; have the skills of imitating movements, habits, behavior of others; enjoying disassembling objects or other things, and; living in the standard of physical health.

(5) Musical intelligence

Musical intelligence is the ability to express ourselves through a song, and understand music and singing. Characteristics which are usually owned by someone who has a good musical intelligence, as follows: interesting in a variety of sounds, including the human voice; enjoying learning with any musical accompaniment; kinesthetically, giving response to the music by be a conductor, intellectually, discussing and analyzing of the music, and aesthetically, evaluating and exploring the contents and meaning of music; being sensitive to the sounds in their surrounding; developing ability to sing or play an instrument individually or jointly with others; giving reaction to various types of music; and performing excellence achievement in the music art in school.

(6) Interpersonal intelligence

Interpersonal intelligence is the ability to cooperate with others effectively, the ability to empathize with and understand others. Characteristics which are usually owned by someone who has good interpersonal intelligence, as follows: establishing and maintaining social relationships; participating in collaborative activities and receive a variety of roles that need to be implemented in a common endeavor; influencing the opinions and actions of others; understand and communicate effectively either by verbal or non-verbal; adapting to the environment and the different groups and feedback from others; has talent as a leader; and enjoying to teach others.

(7) Intrapersonal intelligence

Intrapersonal intelligence is the ability to analyze ourselves, using his feelings to make plans and goals. Characteristics which are usually owned by someone who has a good intrapersonal intelligence, as follows: have a strong will; finding ways and solutions to express his feelings and thoughts; being realistic about his strengths and weaknesses; be motivated to identify and fight for the goal; working independently; can express his feelings;

(8) Naturalist intelligence

Naturalist intelligence is the intelligence related to sensitivity in appreciating the nature and environment includes skills and ability in identifying various categories of plant something, taking care, and training the animals, loving the earth, and preserving and protecting natural resources. Characteristics which are usually owned by someone who has a naturalist intelligence, as follows: being familiar with the pets; enjoying a walk in the open air; like gardening or near the garden; has a high ecological awareness; catching insects, leaves and other natural objects.

Emotional intelligence

Emotional intelligence or emotional quotient (EQ) shows a person's ability to receive, to assess, to manage, and to control his/her emotions and others around him. Emotions refers to the sense of the information about a relationship, whereas intelligence refers to the capacity to give a valid reason to a relationship. Emotional quotient recently judged to be less important than the intelligence quotient (IQ). A study revealed that EQ is twice more important than IQ in contributing to a person's success. There are 5 basic EQ includes being able to recognize and manage emotion themselves, response to the emotion of others, respond and negotiate with others emotionally, and can use emotion as a tool to motivate themselves.

Spiritual intelligence

Spiritual intelligence or spiritual quotient (SQ) is soul intelligence that helps a person to develop his or her self through the creation of possibilities to apply positive values. SQ helps a person overcome the problems and make a peace with it. A person who has SQ shows consciousness to use his experience as a form of application of value and meaning. The well developed of spiritual intelligence is marked with a person's ability to be flexible and adaptable to the environment, has a high level of awareness, to be survive toward suffering and pain, to take valuable lessons from failure, to realize a life in accordance with the vision and mission, to see the connection between things, independent, and ultimately, to make a person understand the meaning of his life.

Based on the analysis of the three types of intelligence mentioned above, it can be summarized some important indicators that show is someone has the intelligence as presented in Table 1.

Table 1 Intelligence Indicator

No	Intelligences	Indicators
1	Intellectual Intelligence	
	Linguistic intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Using language to express the meanings Reading and writing fluently
	Mathematic-logic intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Solving the problems quantitatively using mathematic calculation Explaining the causal relationship logically
	Visual spatial intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Creating a real representative of the abstract information Understanding the symbols to explain the concept
	Bodily-kinesthetic intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Using body dexterous to solve the problems Applying phycomotoric skills in sport and disassembly the arrangement of objects
	Musical intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Expressing themselves through song Understanding the symbols of music and song Having a strong response and reaction to various types of songs and music
	Interpersonal intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Cooperating with others Empathizing and understanding to others Communicating effectively both orally and in writing Adapting to different groups or environments
	Intrapersonal intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Has a personal goals in each of the activities he/she followed Finding a way to express his/her feelings and thoughts Knowing his/her strengths and weaknesses Has a high intrinsic motivation
	Naturalist intelligence	<ul style="list-style-type: none"> Has a positive attitude towards the environment Preserving and protecting of biotics natural resources Preserving and protecting of abiotics natural resources
2	Emosional	<ul style="list-style-type: none"> Recognizing and managing his/her emotions Performing sensitivities to others' emotions Responding and negotiating with others emotionally Using emotion as a tool to motivate his/her self
3	Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Being flexible and adaptable to the environment Surviving toward suffering and pain Taking valuable lessons from a failure Realizing the life in accordance with his/her vision and mission Being independent in his/her activity Understanding the meaning of his life Has a high consciousness to the mighty of Allah

IV. CONTRIBUTIONS OF SCIENCE EDUCATION IN DEVELOPING FATHONAH PROPHETIC CHARACTER

Mostly people can develop all kind of intelligences up to a sufficient level. Three factors can affect a person's intellectual development (Wikipedia, 2016a) they are (1) Biological factors include heredity or genetic and brain injury before, during and after birth (2) The individual history including experiences

with parents, teachers, peers, colleagues and others both which evokes and inhibits its development (3) The cultural and historical background, including the time and place of birth and growth as well as the nature, historical and cultural someone have been domiciled elsewhere.

The multiple intelligences theory placed parenting (nurture) equal to or even higher than the talent (nature) as an important factor affecting the intelligence development. The interaction of these factors will determine whether a person can develop intelligence to the highest level. It's suggests that education and learning play an important role in developing students' multiple intelligences. Learning activities can be craete to facilitate all of the students' multiple intelligences. Table 2 presented examples of learning activities that facilitate development of students' multiple intelligences.

Table 2. Examples of learning activities that facilitate students' multiple intelligences

Intelligences	Learning activities
Linguistic	Description, discussion, word games, storytelling, elocution, writing journal
Matematic-Logic	Sharpen the brain, problem solving, scientific experiment, the numbers game, critical thinking
Spasial	Visual presentations, art activities, imagination games, mind mapping, metaphor, visualization
Bodily-kinesthetic	Hands-on-learning, drama, sports which contains the subject matter, tactile activities / related to the sense of taste, relaxation exercises
Musical	Rhythmic lesson, dancing rap, using songs that contain the subject matter
Interpersonal	Learning cooperatively, peer-learning, join community activities, social gatherings, simulation
Intrapersonal	Individual learning, independent learning, the freedom to choose the field of study, building of self-esteem attitude
Naturalist	Nature study, ecological awareness, concern for living things

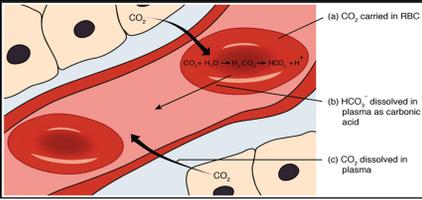
Sources: Armstrong (2009); Uno & Umar (2009)

Learning the science dimensions (products, processes and attitudes) using appropriate learning strategy will be strengthen the developing of various intelligences. Understanding and discover a product or science content knowledge involve the use of process skills and scientific attitudes such as curiosity, skeptical, discipline, hard work and others. For instance, how the students learn buffer solution concept. What is buffer solution? To understand this concept students have to do experiment with different solutions, collect data, interpret and then draw conclusion that "buffer solution is a solution that is able to keep the pH of solution relatively stable". The learning activity will involve a wide range of process skills such as observing, classifying, hypothesizing,

interpreting data, and making conclusions. In this learning, students use analysis-synthesis capabilities to explain the logical relationships between concepts. This process has been exercised their logical mathematical intelligence. Learning science also ask to students reporting both in written and verbally to train their interpersonal dan language intelligence. Moreover, when students elaborate buffer solution, they are dealing with abstract concepts. They are trained to make a real representation what happen in the body of solution, as ionization and interaction between particles through analogies. It will contribute in developing their spatial intelligence. Almost all of the multiple intelligences can be trained and customed through the learning science.

Why can buffer solution maintain pH? Buffer solution consist of mixed components, namely weak acid and conjugate base or weak bases and conjugate acids. There are buffer system in our body in blood and human cells. Food is consumed by humans may not cause coagulation of blood or disruption of cell metabolic reactions as a result of changes in the acidity of the blood caused by the influx of nutrients. As with any buffer system, the pH is balanced by the presence of both weak acid (i.e. H_2CO_3) and conjugate base (i.e. HCO_3^-) so that any excess acid or base introduced to the system is neutralized in order to maintain a normal pH of 7.4 in the blood (See Figur 1).

This buffer system is one proof of the God's state "We have certainly creat man in the best of stature" (QS Attien: 4), and the pH balance mecanism of the blood due to the buffer system is also evidence of God's intervention that "Indeed all thing We created with predestination (*Qadr*)" (QS Al-Qamar: 49). The *Qadr* mean certainty of the size and nature, so that all thing will perform equilibrium that lead to man and animal establishing their life.

<p>If in blood enter the acidic substances, so they will be neutralized by conjugate base:</p> $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ <p>If in blood enter the alkaline substances, so they will be neutralized by conjugate acid:</p> $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{HCO}_3^-$	 <p>Note: RBT = red blood cells</p> $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$
---	---

The bicarbonate buffer system is an acid-base homeostatic mechanism involving the balance of carbonic acid (H_2CO_3), bicarbonate ion (HCO_3^-), and carbon dioxide (CO_2) in order to maintain pH in the blood and duodenum, among other tissues, to support proper metabolic function (Krieg, et al 2014; Effendy, 2008) (See Fig. 2). Catalyzed by carbonic anhydrase, carbon dioxide (CO_2) reacts with water (H_2O) to form carbonic acid (H_2CO_3), which in turn rapidly dissociates to form a bicarbonate ion (HCO_3^-) and a hydrogen ion (H^+) (Oxtaby and Gilis, 2015). The existence of equilibrium all the particles associated with the buffer system is controlled by the function of the lung and kidney.

In addition to understand buffer mechanism, students also perform calculation the pH quantitatively by using concentration data of each substance in the mixture of weak acid-base conjugate or weak base-acid conjugate. To calculate the pH buffer solution they use the Henderson-Hasselbalch equation. These calculations can train and develop their mathematic-logic intelligence.

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \text{pK}_a + \log \frac{[\text{conjugate base}]}{[\text{acid}]} \\ \text{atau} \\ \text{pOH} &= \text{pK}_b + \log \frac{[\text{conjugate acid}]}{[\text{base}]} \\ \text{pH} &= 14 - \text{pOH} \end{aligned}$$

Activities of interpreting and collecting information about mechanism of maintaining the pH of the blood may develop mathematic-logic, visual, spatial, language, and intrapersonal intelligences. While the other intelligences as interpersonal, bodily-kinesthetic intelligence, and emotional intelligence, can be developed through the use of appropriate learning strategies involving students in hand-on and cooperative activities.

Many learning strategies can be applied in order to fully engage students in the learning process through the implementation of science and scientific attitude. For instant are inquiry, discovery and problem-based learning strategy. These strategies are characterized by a problem-based, emphasizing cognitive skills and knowledge; using small group discussions, active learning, self-learning, and student-centered learning, teacher as facilitator, focusing skills development learning outcomes, and lifelong learning (Hmelo-Silver and Barrow, 2006; Carin, 1993, and Llewellyn, 2005).

Carin (1993) also suggest some important attitude to learn and display in science learning include: being curious, insisting on evidence, and being skeptical. Through the learning science almost all the attitudes will be developed the intellectual intelligences (See Table 1), except the music and the interpersonal *intelligence*. Scientists must take a positive approach in accepting ambiguity, being cooperative in scientific activity, and taking a positive approach to failure and treat setback as temporary. The last attitude lead to develop interpersonal, emosional and spiritual *intelligence*.

Buffer mechanism that highly organized and complex is not a coincidence, but it is part of plan and creation of Allah. Awareness to the God's creation, must be integrated in science learning so that students not only develope their intellectual and emotional, but also evolve their spiritual intelligence, particularly with regard to a person's relationship with Allah. As a result, students were able to see connection between things, independent, and understand the meaning of their life.

Islam tought that human has to conduct investigations (*nazhar*) to all kinds of events in universe, including to the environment, social and previous history of nations, in order to develop science and technology. Allah state that: " Say, observe (*nazhar*) what is in the heavens and on earth. But of no avail will be signs or warners to a people who do not believe"(QS Yunus: 101). Allah also commanded people to observe the creation which are in us as the various forms of organ, their mechanism and regularity, "And in yourself. Then will you not see?"(QS Al-Dzariat: 21).

In contrast to the common scientific investigation, focuses solely on observation and scientific exploration to examine the substance of universe material. Religion ordered investigation is not just a mind work and sense, but also actively encouraged by manifestation of faith in Allah. Everything we have investigated actually limited to the creation which reflected His power. So, investigating and learning science to understand and discover science knowledge should also strengthen the faith and fear to Allah.

Al-Quran should be a basis of ideology, epistemology and axiology which lead the attitudes and behaviors of scientists, teachers and students so that their scientific activity anchored in the Creator. It show the integrating spitual dimension in scientific activity. Allah says: "Indeed, in the creation of the heavens and the

earth and the alternation of the night and the day, are Signs for those of understanding. Who remember Allah, while standing and sitting, or lying on their side and give give thought to the creation to the heavens and the earth, [saying]: "O Lord, you did not created this aimlessly. Exalted are you [above such a thing] then protect us from the punishment of the fire (QS Ali Imran: 190-191). Thus, through study and investigation, it is not only develope intellectual intelligence, but will also develop spiritual intelligence.

The above discussion show the necessary to empower science learning to give contribution in developing *fathonah* prophetic character. We have not the appropriate specific learning strategy designet to develop *fathonah* character. I suggest to conduct research and development of learning model that integrate learning products, inquiry learning strategy and awareness about the creator, in order to develop the three dimation of intelligence optimally.

IV. CONCLUSION

Fathonah prophetic character is important character which includes the dimensions of intellectual, emotional and spiritual. Learning the science concept and inquiry activities as well as its integration with the awareness that every event we observe and experience is part of God's mightiness, will be able to develop the prophetic character of *fathonah*. It's need to develop learning model that integrates science and awareness of God's creation in order to develop the three dimation of intelligence optimally.

REFERENCES

- Armstrong, T. 2009. *Multiple Intelligences in The Classroom*. 3rd Ed. Alexandria: ASCD.
- Carin, A. A. 1993. *Teaching Through Discovery*. 7th edition. New York: Macmillan.
- Depag. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Effendy. 2008. *A-Level Chemistry*. Malang: Bayu Media.
- Gardner, H. 1993. *Multiple Intelligences The Theory in Practice*. New York: Basic Book A Devision of Harper Collins Publisher.

- Goodman and Smart. 1999. *Emotional Intelligence*. New York: Bantans Books.
- Hmelo-Silver, C. E and Barrow, H. S. 2006. Goals and Strategies of a Problem-Based Learning Facilitator. *The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*. 1(1): 21-39.
- Krieg, B. J., Taghavi, S. M., Amidon, G. L., Amidon, G. E. 2014. In Vivo Predictive Dissolution: Transport Analysis of the CO₂, Bicarbonate In Vivo Buffer System". *Journal of Pharmaceutical Sciences*. **103** (11): 3473–3490. doi:10.1002/jps.24108. ISSN 1520-6017.
- Llewellyn, D. 2005. *Teaching High School Science Through Inquiry: A Case Study Approach*. California: Corwin Press.
- Madjid, A., dan Andayani, D., 2013. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya.
- Munir, A. 2010. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Oxtoby, D. W. and Gillis, P. 2015. *Acid-base equilibria. Principles of Modern Chemistry (8 ed.)*. Boston, MA: Cengage Learning. pp. 611–753.
- Tusriyanto. 2014. Kepemimpinan Spiritual Menurut M.Quraish Shihab. *Akademika* , 1991(01), 117-134.
- Uno, H. B dan Umar, M. K. 2009. *Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran: Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan*. Jakarta: P.T Bumi Aksara.
- Wikipedia. 2016a. *Multiple Intelligence*. www. wikipedia. org.
- Wikipedia. 2016b. *Bicarbonate Buffer System*. www. wikipedia.org.

STRATEGI GURU DALAM MENANAMKAN NASIONALISME KEPADA PESERTA DIDIK

Bambang Subiyakto
phetex73@yahoo.com

I. PENGANTAR

Pada masa sekarang tekanan terhadap eksistensi negara-kebangsaan semakin berat. Ideologi global menjadi pemicu munculnya kekaburan batas-batas suatu negara. Ideologi ini tampaknya turut menggeser pemaknaan terhadap paham kebangsaan. Prof. Praktikno (2012), mensinyalir bahwa nasionalisme religius yang menjadi ciri nasionalisme Indonesia kini sudah mengarah ke nasionalisme kosmopolitan. Menurutnya, gagalnya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional merupakan penyebab munculnya tantangan yang selanjutnya mengganggu nasionalisme bangsa ini. Sekarang ini menurut Praktikno sudah waktunya menerapkan pandangan bahwa nasionalisme bukan lagi sekadar perihal masyarakat harus rukun dengan sesama. Harus ada redefinisi lagi dari nasionalisme Indonesia sekarang. Definsi yang harus dikembangkan adalah kemampuan kita berdaulat, berdikari dan tetap bermartabat di dalam pergaulan internasional (*Kompas Online*, 2012).

Bung Karno pernah berucap, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kekhawatiran Bung Karno itu kini semakin nyata. Musuh terbesar yang merongrong keselamatan bangsa dan negara sekarang, muncul

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

dari dalam bangsa sendiri, antara lain ditandai dengan menurunnya semangat nasionalisme, rendahnya militansi, serta menurunnya jati diri dan kultur bangsa ini. Nasionalisme sebagian bangsa ini tampaknya sudah mulai tergerus oleh euforia demokrasi yang tak kunjung normal.

Budaya asing yang merasuki generasi demi generasi bangsa atau karena pengaruh globalisasi tidak dapat sepenuhnya dituding sebagai penyebab meredupnya semangat kebangsaan Indonesia. Korupsi merajalela, kesejahteraan rakyat kian menjauh, hukum kerap dipermainkan, serta yang juga penting sikap konsumtif yang terus melekat bahkan semakin kencang patut menjadi sebab utama redupnya nasionalisme itu. Kesemua ini semacam penyakit akut yang diderita bangsa Indonesia yang seolah tak dapat disembuhkan sama sekali. Bahwa semakin terbukanya dunia sekarang ini memang suatu keniscayaan yang menjadi tantangan berat bagi nasionalisme, bagi tetap tegaknya negara-kebangsaan. Akan tetapi, penyakit sebagaimana disebutkan itu pada hakikatnya ada di dalam diri kita sendiri, bukan karena faktor luar. Dalam kaitan ini Hamid Hasan (2012: 61) mengingatkan bahwa kerusakan moral adalah bencana yang paling dahsyat karena kerusakan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sementara itu Thomas Hylland Eriksen (1993: 2) berdasarkan teori-teori sosial telah mengisyaratkan bawa etnis dan nasionalisme akan berkurang pentingnya bahkan mungkin akan lenyap sebagai akibat dari pesatnya modernisasi, industrialisasi, dan individualisme.

Faktor luar juga pastilah turut mengganggu bahkan sangat mengganggu, pasti juga turut mengancam nasionalisme Indonesia. Arus budaya global yang sering dikaitkan dengan kemajuan di bidang komunikasi mencakup juga penyebaran informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronika mengancam kesadaran nasionalisme Indonesia. Pengaruh negatifnya adalah menyebabkan kesadaran terhadap nasionalisme dirasakan semakin tergerus. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya sendiri, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri (Pemerintah RI, 2010: 18).

Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu sikap politik segenap warga dari suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Oleh karena itu, warga bangsa itu merasakan adanya kesetiaan

yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Anthony D. Smith (1982: 87) mengartikan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu "bangsa" yang aktual atau "bangsa" yang potensial. Definisi ini mengikat ideologi pada gerakan yang berorientasi sasaran, karena sebagai ideologi, nasionalisme menetapkan jenis-jenis tindakan tertentu. Namun demikian, konsep inti ideologilah yang menetapkan sasaran gerakan, sehingga membedakannya dari jenis gerakan lainnya.

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme itu harus dimiliki dan dipelihara setiap warga negara agar bangsa ini tetap utuh dan tahan terhadap guncangan apapun. Oleh sebab itu, nasionalisme pada hakikatnya memiliki tujuan, yaitu: 1) Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan bangsa melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban; dan 2) Menghilangkan tuntutan yang berlebihan dari warga negara secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, jika negara-kebangsaan ingin tetap terdiri tegak maka menanamkan dan terus memupuk nasionalisme adalah wajib hukumnya.

Hasan (2012: 65) mengemukakan bahwa "Membangun sikap dan semangat kebangsaan adalah potensi pendidikan sejarah yang banyak dibahas para ahli. Hampir dapat dikatakan setiap tulisan mengenai tujuan pendidikan sejarah maka para ahli itu tidak lupa menyebutkan membangun sikap dan semangat kebangsaan sebagai tujuan utama pendidikan sejarah. Sayangnya, pada kenyataan pendidikan sejarah tujuan ini hanya menjadi sesuatu yang normatif, tercantum dalam tujuan tetapi tidak dikembangkan secara "adequate" dalam proses pembelajaran sejarah. Pendidikan sejarah sering bersikap "take it for granted" bahwa dengan belajar berbagai peristiwa sejarah "nasional" peserta didik akan memiliki sikap dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sikap seperti ini tidak boleh dilanjutkan karena sikap dan semangat kebangsaan tidak akan terbentuk.

Lebih jauh Hasan (2012: 63 dan 65) mengemukakan bahwa pendidikan sejarah memiliki banyak potensi, satu di antaranya adalah potensi membangun dan mengembangkan semangat kebangsaan. Potensi besar pendidikan sejarah untuk mengembangkan jati diri bangsa. Pendidikan sejarah adalah wahana yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melakukan proses

identifikasi diri sebagai anggota bangsa ini. Meskipun begitu, sejarah atau pendidikan sejarah bukanlah yang paling bertanggung jawab terhadap penanaman nasionalisme. Pemerintah pada masa Presiden SBY telah menyadari akan semakin terancamnya kehidupan bernegara dan berbangsa sekarang ini sehingga untuk menjaga keutuhannya dikeluarkan kebijaksanaan pembangunan karakter bangsa.

Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pemerintah RI, 2010: 7).

Di dalam program pembangunan karakter bangsa itu termuat 18 butir nilai karakter yang direkomendasikan pemerintah untuk diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap elemen bangsa “wajib” menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai itu ke setiap warga negara. Kebijakan itu tertuang di dalam buku *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025* atau di dalam buku *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007). Bagi dunia pendidikan, selain mengacu pada buku ini, telah dikeluarkan oleh Kemdiknas buku *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*.

Sebagaimana diketahui bahwa satu dari 18 nilai karakter itu ternyata adalah “semangat kebangsaan”. Oleh sebab itu, nilai inilah yang pada diskusi ini relevan dengan tema yang telah diajukan. Dari sini pula akan diketahui bahwa semangat kebangsaan atau nasionalisme bukan menjadi monopoli dan tanggung jawab dari para sejarawan atau para guru sejarah semata untuk ditanamkan dan dikembangkan kepada peserta didik umpamanya. Apalagi bahkan dipersempit bahwa nasionalisme hanya terkait pada pelajaran sejarah, bahkan lebih sempit lagi hanya sebagai bahasan pada materi pelajaran “sejarah pergerakan”.

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam uraian di atas bahwa nasionalisme telah menjadi persoalan yang serius dihadapi oleh bangsa

Indonesia saat ini. Indikasi memudarnya nasionalisme di kalangan generasi masa kini bukan hal yang dapat dianggap remeh jika bangsa ini ingin masih tetap utuh, berdiri tegak dan berdaulat. Semua pihak, segenap elemen bangsa, tak terkecuali guru dituntut keseriusannya dalam memahami persoalan nasionalisme agar bangsa ini tidak semakin terpuruk atau bahkan akan lenyap. Oleh karena itu, tulisan kali ini adalah mencoba mengemukakan mengenai apa dan bagaimana strategi guru dalam menanamkan nasionalisme kepada peserta didik dalam bentuk paparan secara umum.

II. STRATEGI GURU DALAM MENANAMKAN NASIONALISME

Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam pendidikan strategi dimaknai sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dick and Carey (1985) menyatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa (Wahab, 2008: 132 dan Sanjaya, 2007: 126).

Upaya mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien, maka diperlukan suatu metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi suatu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Misalnya, untuk melaksanakan strategi ekspositori bisa digunakan kombinasi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi (Wahab, 2008: 132). Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya (kekuatan) dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam pembelajaran, penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja

belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh karenanya, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi (Wahab, 2008: 132).

Menurut pendapat Edgar B. Wesley dan Stanley P. Wronski (1965) metode mengajar merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan oleh guru yang hasilnya adalah belajar pada siswa. Metode di sini berarti pula sebagai proses atau prosedur yang dihasilkannya adalah belajar atau dapat pula merupakan alat melalui makna belajar menjadi aktif. Yang lebih penting metode dapat dianggap sebagai suatu proses yang memungkinkan terjadinya belajar. Dalam hal ini metode atau teknik mengajar hanyalah satu komponen penting di dalam keseluruhan interaksi belajar-mengajar. Tidak ada satu metode mengajar yang terbaik dan cocok untuk semua situasi atau mata pelajaran, tidak ada "*magic solution*" dalam mengajar. Yang ada adalah terdapat banyak metode mengajar yang telah digunakan oleh guru dan telah memberinya pengalaman, maka strateginya bagi para guru muda adalah cepat belajar dengan menimba pengalaman dari para guru yang telah senior. Melalui pengalaman itu guru dapat menggunakan metode-metode mengajar untuk situasi-situasi yang berbeda dengan memperhatikan faktor siswa, materi pelajaran yang harus disampaikan, tujuan pengajaran, dan sarana yang tersedia (Wahab, 2008: 83 dan 85).

Asumsi-asumsi yang dikemukakan di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan memilih metode mengajar tentunya merupakan saran dan pendapat sebab yang terpenting bagi guru adalah mengetahui secara tepat dan secara sadar mengapa memilih metode/teknik/strategi mengajar itu. Strateginya dalam mengajar adalah mengkombinasikan berbagai metode dan teknik mengajar disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan keadaan siswa serta karakteristik materi pelajaran yang akan disampaikan (Wahab, 2008: 85-86). Dalam hal untuk menanamkan nasionalisme atau semangat kebangsaan guru dapat memilih dan menentukan sendiri strategi dan metode-metode yang akan digunakan.

Teknik dan strategi yang tepat digunakan untuk materi pelajaran yang bertujuan menanamkan nasionalisme harus mempertimbangkan tujuan

program, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan kematangan siswa. Jika diharapkan siswa memperoleh informasi maka hal itu dapat dicapai melalui membaca, berdiskusi dan pandangan (*viewing*) dan cara-cara lain yang melibatkan penyebaran informasi. Cara seperti ini dapat disebut sebagai "*expository teaching strategies*" (strategi pengajaran yang menjelaskan). Jika mengharapkan siswa mengembangkan kebiasaan berpikir kritis, mencari sendiri, informasi, dapat menyusun hipotesis dan mengujinya, maka yang tepat digunakan adalah "*inquiry teaching strategies*", dan sebagainya (Wahab, 2008: 87). Kedua contoh strategi itu tepat digunakan agar siswa bukan saja mendapatkan pengetahuan tentang sejarah pergerakan misalnya, tetapi juga siswa akan dapat memahami dan menjiwai nilai nasionalisme yang terkandung di dalamnya.

Sebagai telah disinggung sebelumnya bahwa pemerintah SBY telah berinisiatif dengan menetapkan semangat kebangsaan sebagai bagian dari 18 nilai karakter yang wajib ditanamkan ke dalam segenap jiwa warga negara guna menjaga keutuhan NKRI. Dengan demikian, dalam upaya menanamkan nasionalisme atau semangat kebangsaan tidak semata menjadi monopoli atau beban tanggung jawab para guru sejarah semata melainkan telah diperluas dilakukan oleh semua pihak dan pada setiap aspek kegiatan. Oleh sebab itu, di bidang pendidikan nasionalisme kini secara implisit terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran pada semua mata pelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan dalam arti bahwa proses menanamkan nilai nasionalisme, merupakan sebuah kegiatan yang merupakan proses berlangsung cukup panjang, dimulai dari awal siswa masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan (Kemdiknas, 2011b: 19).

Di dalam buku Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemdiknas (2010a: 9) dikemukakan mengenai terintegrasinya nilai-nilai karakter di sekolah. Dari sini kita dapat mempersempit pengertiannya menjadi khusus ke soal nasionalisme. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada buku itu maka turut ditegaskan bahwa penanaman semangat kebangsaan (nasionalisme): 1) dilakukan secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Integrasi yang dimaksud meliputi pemuatan nilai nasionalisme (rasa kebangsaan) ke dalam substansi pada semua mata pelajaran dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang memfasilitasi dipraktikkannya nilai nasionalisme dalam setiap aktivitas pembelajaran di dalam dan di luar kelas

untuk semua mata pelajaran; 2) diintegrasikan ke dalam pelaksanaan semua kegiatan terkait pembinaan kesiswaan; dan 3) ditanamkan melalui kegiatan pengelolaan semua urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah.

Penanaman nasionalisme sebagaimana dimaksudkan dalam pembangunan karakter bangsa itu akan mengerucut pada tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (Pemerintah RI, 2010: 3).

Sebagaimana yang telah diprogramkan dan dituangkan di *dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025* dan yang telah diperinci di dalam *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* oleh Kemdiknas, penanaman nilai nasionalisme dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Dalam kegiatan ko-kurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung pada materi suatu mata pelajaran) atau kegiatan ekstra kurikuler (kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan Kepramukaan, Dokter Kecil, Palang Merah Remaja, OSIS, Pecinta Alam, Liga Pendidikan Indonesia, Teater, Pencak Silat, dan kegiatan UKS lainnya, termasuk juga kegiatan upacara bendera) perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka penanaman nasionalisme (Pemerintah RI, 2010: 31-32 dan Kemdiknas, 2011a: 14).

Pengintegrasian nilai semangat kebangsaan (nasionalisme) ke dalam proses pembelajaran meliputi: a) Penanaman nilai nasionalisme secara terintegrasi ke dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai nasionalisme, dan penginternalisasian (dalam arti penghayatan terhadap nasionalisme sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku) nilai ke dalam tingkah laku siswa sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran; dan b) Perencanaan dan pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme dilakukan oleh semua anggota warga sekolah dan menerapkannya ke dalam kurikulum melalui program pengembangan diri, pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan budaya sekolah (Kemdiknas, 2011a: 30).

Penanaman nilai nasionalisme (semangat kebangsaan) yang oleh pemerintah dikonsepsikan sebagai cara berpikir, bersikap dan bertindak dan cara pandang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok di dalam pendidikan karakter berfungsi (1) membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; (2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; (3) membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. (Kemdiknas, 2011a: 7).

Kegiatan pembelajaran dalam kerangka menumbuhkan nasionalisme pada peserta didik bagi guru, apalagi guru sejarah, dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja, dan ICARE (*Introduction, Connection, Application, Reflection, Extension*) dapat digunakan untuk pendidikan karakter.

Perlu disadari betul oleh para guru pentingnya memahami konsep. Apapun strateginya jika masalah konsep tidak dipahami benar maka tidak akan didapat hasil belajar yang optimal. Dalam memilih konsep beberapa kriteria telah dikemukakan oleh James A. Banks (1985). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan guru adalah terlebih dahulu mengetahui pengalaman siswa mengenai konsep yang akan diajarkan. Apakah konsep tersebut misalnya telah pernah dibahas pada kelas-kelas sebelumnya. Jika sudah guru haruslah mengenalkan kepada siswa konsep-konsep baru yang berhubungan dengan konsep-konsep sebelumnya dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan menolong mereka untuk menjadi pembuat keputusan yang baik (Wahab, 2008: 130).

Satu cara yang dapat ditempuh oleh guru dalam mengajarkan konsep adalah melalui yang disebut "*concept formation*." Proses mengajarkan aspek konotatif dari sebuah konsep disebut pembentukan konsep. Proses itu menuntut pengenalan konsep kepada siswa dalam jangka waktu lama dalam *setting* yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian maka siswa akan menemukan sendiri berbagai pengertian konotatif dari konsep nasionalisme misalnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap guru haruslah menciptakan kesempatan yang

besar untuk mengenalkan konsep-konsep baru kepada siswa untuk penyelidikan tentang pengertian yang berkaitan dengan konsep-konsep yang pernah dikenalkan dihubungkan dengan konsep yang ada sekarang guna mengoreksi konotasi yang salah, memperluas konotasi yang sah dan memberi siswa kesempatan untuk melihat arti tersembunyi yang berbeda dari konsep yang sama (Wahab, 2008: 131-132).

Dalam mengajarkan nasionalisme sebaiknya diusahakan agar: a) Nasionalisme diajarkan selalu dalam konteks dan tidak dalam isolasi. Bahkan sebaiknya dalam konteks yang bervariasi agar dapat mengungkapkan pengertian yang tersembunyi dari konsep yang berlain-lainan; dan b) Siswa harus senantiasa diberi kesempatan untuk sampai pada pengertian mereka sendiri tentang nasionalisme yang diajarkan sebelum dibimbing dan diarahkan oleh guru (Wahab, 2008: 132).

Nasionalisme adalah sebuah konsep. Nasionalisme adalah sebuah konsep yang sangat abstrak yang mudah diucapkan namun sebenarnya sukar dipahami dan diresapi, termasuk bagaimana dalam mengimplimentasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu sekali lagi perlu bagi guru memahami lebih jauh mengenai nasionalisme. Di sini Stoddard misalnya mengemukakan bahwa "nasionalisme adalah suatu keyakinan yang dimiliki bersama oleh sejumlah besar perseorangan, bahwa mereka merupakan suatu kebangsaan". Nasionalisme adalah faham kebangsaan. Nasionalisme adalah faham, pendirian dan keyakinan suatu bangsa di mana mereka merasa dalam satu ikatan kesatuan dan persatuan sebagai suatu bangsa, ke luar dan ke dalam. Nasionalisme dalam kaitan ini juga dapat dipahami sebagai semangat kebangsaan. (Nur, 1967: 92).

Melengkapi pemahamannya, guru juga sangat perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya nasionalisme yang oleh Nur (1969: 97-98) disebutkan: 1) Lahirnya negara kebangsaan itu sendiri; 2) Timbulnya pengertian geopolitik, yang memberikan pengertian tentang hubungan timbal balik yang erat antara faktor manusia dan faktor geografi. Dalam hal ini hubungan timbal balik yang erat antara seluruh warga-negara suatu *political unit* yang tertentu, baik luas dan batas-batasnya terhadap negara-negara lain yang mengelilinginya; 3) Timbulnya kesadaran nasional yang berupa "*le desir devivre ensemble*" (keinginan untuk hidup bersama), "*une ame, une principe spiritual, une grande solidarite*", (satu jiwa, satu pendirian rohani, suatu perasaan setia-kawan yang

agung = kehendak untuk bersatu sebagai suatu negara); 4) Timbulnya aspirasi nasional, yang dimanifestasikan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya; 5) Adanya motif nasional; 6) Adanya spirit nasional atau semangat kebangsaan; 7) Berkembangnya bahasa nasional sebagai bahasa kesatuan; 8) Adanya sistem sentralisasi dalam pemerintahan, yang diikuti dengan hak otonomi yang luas bagi daerah-daerah, dan diikuti pula oleh dekonsentrasi; 9) Perkembangan di bidang kemiliteran, yang diikuti dengan kerjasama yang erat antara untuk militer dan unsur non-militer, di bidang politik pertahanan dan keamanan negara; 10) Berkembangnya sistem pendidikan nasional secara luas; 11) Adanya hak menentukan nasib sendiri sebagai suatu negara yang merdeka, berdaulat ke luar dan ke dalam; 12) Totalitarianisme yang dijiwai oleh ideologi nasional, di mana seluruh warganegara tiada kecuali tunduk kepada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Dalam hak dan kewajibannya, yang berasal dan diatur oleh kekuasaan tertinggi itu; 13) Pemupukan kepribadian nasional (jatidiri bangsa) di kalangan bangsa-bangsa yang dimanifestasikan di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, kesenian, dan psikologi, yang kesemuanya itu adalah falsafah Negara Pancasila; dan 14) Rangsangan *audio-visual*, seperti lagu kebangsaan, bendera nasional, lambang-lambang nasional atau simbol-simbol negara, dan lain-lain.

Dalam rangka *nation-building* dan *character-building*, dan dalam rangka meneruskan perjuangan mencapai tujuan nasional maka nasionalisme sebagai aspirasi nasional, perlu dipupuk dan dihidup-suburkan. Untuk itu maka langkah-langkah yang perlu diambil serta tindakan-tindakan yang perlu dilakukan menurut Nur (1967: 110), ialah: 1) Memperhebat perjuangan merealisasi pencapaian tujuan nasional kita. Dalam pada itu senantiasa perkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita berlandaskan ideologi nasional Pancasila; 2) Pemupukan nasionalisme harus dimanifestasikan dalam segala bidang kehidupan bangsa dan negara, yakni: a) dengan memupuk rasa kesatuan dan persatuan bangsa sendiri dengan menolak chauvinisme-individualisme-totaliterisme-liberalisme; b) dengan memupuk rasa persatuan dan persahabatan serta kesetiakawanan terutama dengan bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin (internasionalisme dalam arti perikemanusiaan) dengan menolak kosmopolitisme; dan 3) Perjuangan umum nasionalisme ke luar dan ke dalam ialah secara antihetis-antagonistis menentang dan mengikis habis-imperialisme,

kolonialisme dan feodalisme dalam segala bentuk dan manifestasinya Marxisme, Leninisme/komunisme dari bumi Indonesia dalam segala bentuk dan manifestasinya.

III. SIMPULAN

Pertama, kemajuan pesat di bidang informasi dan komunikasi yang mengiringi arus deras globalisasi turut andil menggerus semangat nasionalisme Indonesia.

Kedua, korupsi yang merajalela, sikap konsumtif, bangga dengan budaya asing, hukum yang selalu dipermainkan, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan tidak patut menjadi tauladan serta kesejahteraan rakyat yang makin jauh merupakan faktor dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang merongrong nasionalisme.

Ketiga, bahwa dalam menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme bukan merupakan tanggung jawab sepenuhnya para guru sejarah melainkan menjadi tanggung jawab bersama segenap elemen bangsa.

Empat, di dunia pendidikan atau sekolah menanamkan nasionalisme dilakukan secara terus menerus dengan cara 1) terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran; 2) terintegrasi ke dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan; dan 3) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan semua urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah.

Lima, guru dapat memilih dan menentukan sendiri strategi dan penggunaan berbagai macam metode, model, teknik, atau pendekatan yang dianggap relevan, efektif dan efisien dalam menanamkan nasionalisme melalui proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity & Nationalism Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press.
- Hasan, S. Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Indonesia Isue dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung: Rizqi Press.
- Kemdiknas. 2010a. *Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat PSMP.

- Kemdiknas. 2010b. *Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Kemdiknas. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pusat Kurikulum dan Perbukuan*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan.
- Kompas Online*. 2012.
- Nur, Aminuddin. 1967. *Pengantar Studi Sedjarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: P.T. Pembimbing Masa.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025*. Jakarta.
- Rusman. 2013. *Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran: Beorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Smith, Anthony D. 1982. *Nationalism, In The Twentieth Century*. New York: New York University Press.
- Supardan, Dadang. 2015. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Azis (ed.). 2008. *Metode dan Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*. Bandung: Alfabeta Bandung.

URGENSI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH DASAR DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Barsihanor

barsihanor90@gmail.com

ABSTRAK

Mata pelajaran IPS mencoba untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Pendidikan IPS juga diharapkan mampu melatih sikap, nilai, moral dan keterampilan siswa berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Muatan materi IPS khususnya di Sekolah Dasar, dikembangkan mengacu kepada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. Hal ini dimaksudkan agar IPS SD di Indonesia mampu mendidikan warganegara menjadi warga negara yang berakhlak, kompeten, cerdas dan terampil dalam menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Posisi guru IPS SD dalam mengajarkan pendidikan karakter sangat strategis untuk membangun kepribadian siswa menjadi generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, namun juga kebaikan karakter sosial, moral, dan agama.

Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Dasar, karakter bangsa.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen PGMI Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan, sejatinya suatu upaya membentuk karakter bangsa sejak dini. Pendidikan dianggap sebagai langkah yang tepat dalam membangun karakter bangsa. Perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam kurikulum. Kurikulum yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah kurikulum tahun 1947. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula pendidikan di Indonesia, kurikulum pun berkali-kali mengalami pembaruan mulai dari kurikulum 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), dan kurikulum tahun 2006 (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang dirancang untuk memberikan peluang seluas-luasnya bagi sekolah dan tenaga pendidik untuk melakukan praktik-praktik pendidikan dalam rangka mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik, baik melalui proses pembelajaran di kelas maupun melalui program pengembangan diri (ekstrakurikuler). Kurikulum yang terbaru adalah Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan bagi sekolah-sekolah tertentu saja yang sudah siap untuk mengimplementasikannya.

Secara konseptual proses pembelajaran yang ditawarkan dalam Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP) pada dasarnya menghendaki proses pembelajaran yang sama seperti apa yang tersurat dalam Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Sehingga, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun dalam penilaian tidak lagi ditentukan oleh hasil akhir melainkan juga melalui penilaian sikap (proses).

Pada Kurikulum 2013 ini diharapkan dapat mencetak siswa-siswa yang berakhlak sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang termuat pada Bab II Pasal 3, bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Sisdiknas, 2003: 4).

Terus bergulirnya era modernisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat yang tinggal di kota maupun di desa. Secara sosiologis dan psikologis bangsa Indonesia dilanda krisis moral, tidak hanya pada tataran pimpinan pemerintahan dan birokrat semata, tetapi telah merambah dasar hingga pada anak-anak sekolah. Hal ini bisa dilihat dari tawuran pelajar, kriminal anak-anak remaja, kekerasan terhadap anak-anak, pemerkosaan, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Masalah yang sama juga sudah mulai merembet pada dunia pendidikan, seperti terjadinya dekadensi moral. Pendidikan yang ada terkesan lebih berorientasi pada transfer pengetahuan dan melalaikan penanaman nilai-nilai moral dan etika. Banyak peristiwa mengkhawatirkan terjadi di lingkungan pendidikan yang membuat dunia pendidikan semakin lumpuh. Kita tentunya sering melihat ada siswa sekolah menjadi korban kekerasan, bahkan ada siswa yang diperkosa secara bergantian kemudian dibunuh. Sekolah yang seharusnya memberikan harapan dan jalan bagi siswa untuk mencapai cita-cita malah menjadikan anak didik trauma dan stres, rasa hormat siswa terhadap guru yang berkurang, serta hilangnya sopan santun dari para peserta didik. Ini menunjukkan bangsa kita telah kehilangan jati diri dan karakternya. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu dimiliki dan ditanamkan kepada siswa. Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki fokus terutama pada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. Oleh karena itu pendidikan tidak dapat melalaikan dua tugas khas ini. Dua arah pengembangan ini diharapkan menjadi idealisme bagi para siswa agar semakin mampu mengembangkan ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan (Koesoema, 2007:114).

Karakter merupakan nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat-istiadat, dan estetika. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil (Tim Pendidikan Karakter, 2010).

Untuk membentuk karakter bangsa melalui pelaksanaan pendidikan membutuhkan waktu sebagai proses yang tidak sebentar, selain materi dan sarana/prasarana, serta hal-hal lainnya yang menunjang bagi proses pelaksanaan dan ketercapaiannya. Salah satu materi yang dibutuhkan dan tak kalah urgen dari materi lainnya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), selain Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan sebagainya. Posisi guru IPS SD dalam mengajarkan pendidikan karakter sangat strategis dalam membangun kepribadian siswa menjadi generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, namun juga kebaikan karakter sosial, moral, dan agama.

Muatan materi IPS khususnya di Sekolah Dasar, harus dikembangkan mengacu kepada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. Hal ini dimaksudkan agar IPS SD di Indonesia mampu mendidik warga negara menjadi warga negara yang berakhlak, kompeten, cerdas dan terampil dalam menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila.

II. KONSEP DASAR IPS SD

Pusat kurikulum mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai integrasi dari berbagai cabang ilmu IPS seperti Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, Hukum dan Budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu IPS seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya (Pusat Kurikulum, 2006: 5). Pada jenjang SD/MI, mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik disiapkan dan diarahkan agar mampu menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Numan Somantri (2001: 44) menyatakan bahwa Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah itu sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara, dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Ilmu pengetahuan sosial

merupakan seperangkat fakta, peristiwa, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, lingkungannya berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini, dan diantisipasi untuk masa yang akan datang.

Fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Pengembangan pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi pengembangan *social studies* di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara yang sangat plural, terdiri dari berbagai ras, bangsa, agama dan kebudayaan sehingga masyarakatnya bersifat multikultural. Di tengah kondisi masyarakat yang plural atau majemuk inilah maka diperlukan adanya perhatian khusus dalam pengembangan kajian sosial.

Pada kurikulum tahun 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP, untuk SD/MI dan SMP/MTs mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran IPS terpadu yang terdiri atas (geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi/antropologi). Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP Standar Isi 2006, tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang efektif, serta mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri atau masyarakat. Merupakan tantangan berat karena masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Ilmu Pengetahuan Sosial dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berubah dan berkembang secara terus menerus.

Materi pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar menggunakan pendekatan secara terpadu/ fusi. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa SD yang masih pada taraf berpikir abstrak. Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah dasar tidak menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial. Materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Demikian

juga halnya tema-tema sosial yang dikaji berangkat dari fenomena-fenomena serta aktivitas sosial yang terjadi di sekitar siswa.

Kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan IPS di SD meliputi kemampuan pengembangan aspek intelektualisme serta pengembangan keterampilan sosial yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rumpun mata pelajaran IPS adalah berupa keterampilan intelektual yang meliputi keterampilan dasar sebagai kemampuan yang terendah, kemudian diikuti dengan keterampilan melakukan proses, dan keterampilan tertinggi berupa keterampilan investigasi. Pengembangan pendidikan IPS tidak hanya diarahkan pada pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan aspek intelektual saja. Keterampilan sosial menjadi salah satu faktor yang dikembangkan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam pendidikan IPS.

III. PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Pendidikan merupakan sarana yang strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Sebagaimana Samsuddin juga menegaskan; Bahwa Pembentukan karakter memang seyogyanya masuk dalam kurikulum sekolah (Hambali, 2012: 13). Pembangunan karakter dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan, khususnya penanaman kebiasaan yang baik. Pembangunan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, yang kemudian meluas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan karakter bangsa harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia terhindar dari berbagai krisis. Menurut Bambang dalam bukunya Muslich, bahwa pembangunan karakter adalah bagian penting dalam pembangunan nasional. Beberapa karakter yang perlu dibangun berkaitan dengan nilai umum yang diterima masyarakat, antara lain; Kejujuran, disiplin, dan kebersihan (Muslich, 2011: 16). Karakter yang dimaksud adalah yang bersifat '*common sense*'. Sedangkan menurut Heri Gunawan, pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat (Gunawan, 2012: 28).

Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan pilar nilai-nilai dasar pendidikan karakter. Kesembilan pilar karakter dasar, antara lain: (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama; (6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; (9) toleransi, cinta damai, dan persatuan (Zubaedi, 2011:72). Menurut Kemendiknas yang dikutip oleh Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie (2013:54), mengatakan bahwa nilai-nilai dasar pendidikan karakter bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

NO	Nilai	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

IV. PERAN IPS DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Mata pelajaran IPS mencoba untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggungjawab, serta warga dunia yang cinta damai. Selain itu pendidikan IPS juga diharapkan mampu melatih sikap, nilai, moral dan keterampilan siswa berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Sedangkan konsep IPS itu meliputi: interaksi, saling ketergantungan, kesinambungan dan perubahan, keragaman atau kesamaan atau perbedaan, konflik dan konsensus, pola, tempat, kekuasaan, nilai kepercayaan, keadilan dan pemerataan kelangkaan, kekhususan, budaya, dan nasionalisme (Trianto, 2011: 173.)

Dengan mencermati uraian di atas, akan terlihat bahwa pendidikan IPS sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Proses pembelajaran IPS selayaknya dibangun sebagai sebuah proses transaksi kultural yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam IPTEK. Itu artinya peserta didik tidak hanya dituntut untuk cerdas dalam menguasai materi yang diajarkan akan tetapi peserta didik juga dituntut untuk memiliki moral dan karakter yang baik.

Kenyataan dewasa ini yang terjadi pelaksanaan pendidikan lebih berorientasi pada aspek kognitif-intelektualistik, dan mengabaikan aspek afektif, oleh karena itu perlu adanya pengarahannya kembali sebagai wahana pengembangan pendidikan karakter bangsa, sebagai proses pembangunan kecerdasan, akhlak dan kepribadian peserta didik secara utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan karakter sebenarnya sebagai upaya kembali ke hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Dijelaskan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada muatan IPS SD, di antaranya:

4.1 Kurikulum

Kurikulum IPS SD harus bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat, selain itu pembelajaran IPS harus

menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan transformatif, aktif dan partisipatif dalam perpektif nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, pembelajaran IPS harus memfokuskan perannya pada upaya mengembangkan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Ciri khas mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar adalah bersifat terpadu (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga pengorganisasian materi atau bahan pelajaran tidak hanya berorientasi pada materi semata akan tetapi disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, dalam perkembangannya muncul berbagai pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik seperti *students' centered*, *integrated approach*, *social problem based approach*, *broad field approach*, dan sebagainya (Sapriya, 2008: 6)

4.2 Pengelolaan Pembelajaran

Kemampuan guru dalam mengembangkan materi pelajaran IPS dan menentukan model, strategi, metode pembelajaran, serta sistem evaluasinya, merupakan hal yang sangat penting agar pembelajaran IPS di kelas dapat menarik, tidak membosankan, menyenangkan, dan mudah diterima oleh siswa. Untuk itu, guru IPS harus dapat mendesain kondisi (model) pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) yang mampu melibatkan siswa secara langsung, baik sebagai subjek, maupun objek pembelajaran. Lewat kegiatan pembelajaran IPS di sekolah dasar, sesuai dengan tingkat perkembangan psikologisnya, siswa diajak masuk dalam dan sekaligus menghayati situasi sosial. Harapannya, siswa terpandu dengan baik untuk dapat aktif berpengetahuan, siap menjadi manusia yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Dengan kata lain, mereka disiapkan agar mampu berfungsi dan berperan dalam menghadapi seluruh kehidupannya, dan mampu menjadi manusia yang berkarakter. Manusia yang berkarakter adalah manusia yang memiliki bobot memadai, baik ditinjau dari dimensi individual maupun sosial.

4.3 Pembiasaan

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu sesuatu yang diamalkan. Pembelajaran IPS diarahkan untuk menjadikan manusia yang berbudi luhur,

disiplin, kerja keras, mandiri, cinta tanah air, menghargai, melestarikan karya budaya sendiri, mengembangkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, iman dan taqwa, menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta, cendekia, terampil, dan semangat untuk maju. Untuk menjadikan manusia seperti yang diharapkan tersebut tentunya tidak mudah perlu proses panjang dan pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan tersebut diharapkan menjadi budaya sekolah. Sehingga tujuan dari pendidikan IPS SD dapat tercapai dengan baik.

Secara lebih jelas pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan IPS SD dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar. 1. Pembentukan Karakter Bangsa melalui Pendidikan IPS

V. SIMPULAN.

Ciri khas mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar adalah bersifat terpadu (*integrated*). Pada mata pelajaran ini pengorganisasian materi atau bahan pelajaran tidak hanya berorientasi pada materi semata akan tetapi disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik agar lebih bermakna bagi peserta didik. Membentuk karakter bangsa melalui pelaksanaan pendidikan membutuhkan waktu sebagai proses yang tidak sebentar, selain materi dan sarana/prasarana, serta hal-hal lainnya yang menunjang bagi proses pelaksanaan dan ketercapaiannya. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pembentukan karakter bangsa, hal itu dapat dilakukan melalui muatan kurikulum, pengelolaan pembelajaran dan pembiasaan. Melalui tiga langkah tersebut diharapkan terbentuknya karakter bangsa melalui Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya pada sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Trianto. 2011. *Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional 2003*.
- Tim Pendidikan Karakter, 2010. *Pendidikan Karakter di SMP*, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sapriya, dkk. 2008. *Pendidikan IPS*, Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.
- Pusat Kurikulum. 2006. *Model Pengembangan Silabus Mata Pelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta.
- Somantri, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hambali. 2012. *Jurnal El-Hikmah: Jurnal Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*, 2012, Vol. 12, Nomor 1, Januari.
- Koesoema, A. Doni. 2007. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- Nasir S., & Hand, V. M. 2006. Exploring Sociocultural Perspectives on Race, Culture, and Learning. *Review of Educational Research*.
- Salahudin, Anas. 2013. *Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Pendidikan Karakter. 2010. *Pendidikan Karakter di SMP*, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAKUMPAI DI SDN BATIK KABUPATEN BARITO KUALA

Chairil Faif Pasani, Nanik Mariani, dan Syaharuddin
syaharuddin.pips@unlam.ac.id

ABSTRAK

Upaya pembentukan karakter melalui kegiatan belajar mengajar dipicu oleh semakin masifnya perilaku destruktif, asosial, anarkhis, menipisnya kejujuran, dan rendahnya patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia saat ini. Kekayaan budaya dalam kearifan lokal memiliki fungsi strategi terhadap proses internalisasi nilai melalui proses pembelajaran. Etnis Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala memiliki kearifan lokal, bidang budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal etnis Bakumpai pada SDN Batik, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasinya, dan mengidentifikasi nilai-nilai karakter masyarakat Bakumpai menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data memakai model Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian (1). implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai di SDN Batik belum optimal, (2). regulasi pemerintah untuk menggali budaya guna memperkuat jatidiri bangsa mendukung implementasi pendidikan karakter, namun percampuran etnis dan budaya masyarakat Barito Kuala cukup menghambat implementasinya, dan (3). di SDN Batik dikembangkan nilai-nilai karakter kearifan lokal Bakumpai, yakni nilai religius, nilai peduli sosial, peduli lingkungan, dan nilai patriotisme.

Kata kunci: pendidikan karakter, kearifan lokal, bantaran sungai, dan etnis Bakumpai.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Chairil Faif Pasani** dosen PSP Matematika FKIP ULM, **Nanik Mariani** dosen PSP Bahasa Inggris FKIP ULM, dan **Syaharuddin** dosen PSP Sejarah FKIP ULM.

I. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah berat yang harus dilalui, yaitu menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh membudayanya praktek KKN, konflik, (antar etnis, agama, politisi, remaja, antar RW, dsb.) meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, dan sebagainya. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Kenyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Lickona (Pupuh Fathurrohman dkk, 2010 :86) bahwa ada 10 aspek degradasi moral yang melanda suatu negara yang merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Kesepuluh tanda tersebut adalah; meningkatnya kekerasan pada remaja, penggunaan kata-kata yang memburuk, pengaruh *peer group* (rekan kelompok) yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, kaburnya batasan moral baik-buruk, menurunnya etos kerja, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, serta adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Menurut Hidayat (2011) bahwa faktor moral (akhlak) adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Nilai-nilai moral yang ditanamkan akan membentuk karakter (akhlak mulia) yang merupakan pondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini, akan membentuk pribadi yang bermasalah dimasa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral kepada generasi muda adalah usaha yang strategis. Oleh karena itu penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun bangsa. Hal ini dipertegas oleh Siswoyo, dkk. (2011:25) bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya.

Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik (Daryanto dan Suryatri Darmiatun, 2013 :74).

Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (*fitrah-natural*) dan lingkungan (*sosialisasi atau pendidikan-natural*). Pendidikan merupakan salah satu wadah dalam menunjang pembentukan karakter tiap individu. Sekolah Dasar adalah merupakan pendidikan awal penanaman karakter anak dalam perkembangan dirinya. Meskipun sekolah memiliki prioritas untuk menentukan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa, sekolah juga mesti melihat relevansi pembentukan dan penanaman nilai itu dalam konteks kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pada dasarnya, pendidikan karakter juga ingin membantu mempersiapkan siswa agar dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan tatanan moral dan cara berperilaku yang berlaku bagi masyarakat setempat tanpa kehilangan visi global. Oleh karena itu sekolah mesti memahami kultur dan kebudayaan setempat sehingga dapat menanamkan berbagai macam kearifan lokal.

Masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagian besar dihuni oleh etnis Bakumpai sebagai etnis awal di daerah itu. Etnis Bakumpai memiliki varian budaya dan kearifan lokal yang sangat relevan digali dalam kerangka pendidikan karakter. Sebagian besar masyarakat Bakumpai menempati bantaran sungai. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memenuhinya dengan mencari ikan, bertani, berdagang dan ada ada juga yang bekerja pada sektor pelayanan publik sebagai PNS seperti guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauhmana implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai pada SDN Batik di wilayah bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala. Kedua, mendeskripsikan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal di SDN Batik. Ketiga, mengidentifikasi integrasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai di SDN Batik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi sekolah yang berada di bantaran sungai menjadi alasan pemilihan sekolah ini sebagai obyek penelitian untuk menggali sejauhmana implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai yang berupaya menggali kehidupan masyarakat kaitannya dengan upaya mempertahankan hidupnya melalui aktivitas ekonomi yang sebagian besar berada di daerah bantaran sungai, seperti bertani, mencari ikan, kerajinan yang bahan utamanya dari bantaran sungai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen pembelajaran. Wawancara dilakukan terhadap komite, kepala sekolah, dan guru. Wawancara dengan komite dan kepala sekolah SDN Batik bertujuan untuk menggali informasi tentang kebijakan sekolah kaitannya dengan pengembangan materi yang berkaitan dengan kearifan lokal. Peneliti juga menggali informasi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya integrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bakumpai dalam pembelajaran. Wawancara dengan guru bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauhmana mereka telah mengintegrasikan nilai-nilai sejarah, budaya, dan masyarakat Bakumpai dalam pembelajaran.

Pengamatan yang dilakukan sebagai upaya mengetahui kemampuan guru mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai ke dalam pembelajaran. Sedangkan analisis dokumen yakni analisis terhadap silabus, RPP, buku ajar dan LKS yang digunakan guru dalam pembelajaran.

Analisis data mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman (1994) dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan.

Keabsahan data penelitian dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang disarankan oleh Creswell (1998) diantaranya melakukan triangulasi, memperpanjang waktu penelitian, cek anggota, audit luar, dan deskripsi yang rinci dan tebal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan permasalahan implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada jenjang pendidikan dasar (SD) di wilayah bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala, akan digambarkan berdasarkan kemampuan guru

dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengembangkan materi kurikulum, termasuk sumber belajar dan media, kemampuan guru dalam mengimplementasikan melalui pendekatan, model, dan metode dalam pembelajaran dan kemampuan dalam mengevaluasi. Sumber data digali dari wawancara terhadap guru-guru, kepala sekolah, pengawas SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 3. Sumber data lainnya diperoleh dari hasil analisa dokumen guru berupa silabus dan RPP serta buku (LKS dan buku paket). Penelitian ini juga menggunakan hasil observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan guru dan observasi terhadap lingkungan kedua sekolah tersebut. Ketiga cara pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis untuk memetakan masalah pembelajaran karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai.

IV. KONDISI DAN PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAKUMPAI

Pembahasan tentang kondisi dan permasalahan pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai pada SDN di wilayah bantaran sungai kabupaten Barito Kuala didasarkan pada konsep komponen utama kurikulum, yang terdiri dari empat komponen, yaitu: (a) tujuan, (b) isi atau materi, (c) proses termasuk media dan sumber belajar dan (d) evaluasi (Sukmadinata, 2008: 102).

4.1 Merumuskan Tujuan

Suwarma Al Muchtar, (2014 : 97) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran perlu dikembangkan nilai secara sengaja dalam perencanaan. Pengembangan nilai tidak dipandang sebagai *nurturant effect*. Konsep ini menjadi tantangan ketika fakta menunjukkan sebagian besar guru, di SDN Batik tidak merencanakan dan mengembangkan nilai/karakter dalam proses pembelajaran secara sengaja.

Kemampuan guru SDN Batik Kab. Barito Kuala dalam merumuskan tujuan, berdasarkan hasil analisis RPP, tergambar bahwa guru dalam merumuskan tujuan tidak terlepas dari SK dan KD yang dapat dimaknai bahwa rumusan tujuan instruksional atau pembelajaran yang ingin dicapai tidak terlepas dari kurikulum nasional atau sangat sentralistik. Berdasarkan tujuan yang diamati pada RPP kelas II SDN Batik, menggambarkan jika jabaran tujuan sangat tergantung terhadap SK dan KD yang artinya bahwa muatan kelokalan belum

terintegrasi ke dalam pembelajaran sehingga merupakan sebuah kelemahan dan masalah bagi pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal Bakumpai.

Begitu pula tujuan pembelajaran pada RPP yang dirumuskan oleh guru SDN Batik Kelas VI, yang tidak berbeda dengan rumusan kelas II, yakni belum mencantumkan tujuan yang menggali nilai kerifan lokal etnis Bakumpai yang potensial terhadap pembentukan karakter.

Berikut ditunjukkan rumusan SK, KD dan tujuan pembelajaran kelas II dan kelas VI, sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Kelas II SDN Batik Kab. Barito Kuala

No	Standar Kompetensi (SK)	Kompetensi Dasar (KD)	Tujuan Pembelajaran
1	<p>PKn: Membiasakan hidup gotong royong; IPS: Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis; IPA: Mengetahui bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup Matematika: Melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai 500</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKn: Mengetahui pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan saling tolong menolong 2. IPS: memelihara dan koleksi benda berharga miliknya 3. IPA: <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan b. Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar 4. Matematika: <ol style="list-style-type: none"> a. membandingkan bilangan 1 sampai 500; b. mengurutkan bilangan sampai 500 	<p>Siswa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjelaskan arti rukun; 2. manfaat saling berbagi dengan teman 3. menceritakan cara memelihara dokumen pribadi 4. menjelaskan sifat benda padat 5. menjelaskan sifat benda cair 6. menentukan bilangan 1-500 <p>Siswa dapat</p>

Sumber Silabus SDN Batik (Data Diolah, 2016)

Tabel 2. SK, KD dan Tujuan Pembelajaran Kelas VI Semester 1 SDN Batik

No	Standar Kompetensi (SK)	Kompetensi Dasar (KD)	Tujuan Pembelajaran
1	Mendengarkan: Memahami Teks dan Cerita Rakyat yang Dibaca.	Mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, amanat, dari cerita rakyat yang diceritakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mampu menentukan tokoh cerita. 2. Siswa mampu menentukan watak tokoh dalam cerita. 3. Siswa mampu menentukan latar cerita. 4. Siswa mampu menentukan tema dan amanat dalam cerita. 5. Siswa mampu mengetahui cerita rakyat lingkungan tempat tinggal tempat tinggalnya.

Sumber: Silabus dan RPP Kelas VI Semester I (Data Diolah, 2016)

Paul Suparno (Zubaidi, 2011: 243) menjelaskan bahwa guru kelas harus mempersiapkan dan mengembangkan silabus, membuat RPP, dengan memasukkan nilai-nilai karakter. Hasil analisis dokumen (silabus dan RPP) guru-guru SDN Batik menunjukkan bahwa guru belum memasukkan ataupun mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang bersumber dari kearifan lokal Bakumpai sehingga berpotensi terhadap kegagalan kemampuan peserta didik dalam memahami budayanya sendiri yang berimplikasi terhadap pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*).

Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai akan berupaya mengenalkan kembali budaya peserta didik sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Kemampuan guru mengenalkan kembali budaya lokal bagi peserta didik memiliki kekuatan terhadap penanaman jati diri bangsa dan mampu membangun sikap patriotisme dan nasionalisme yang merupakan modal dalam membangun bangsa.

Adanya fakta bahwa sikap patriotisme dan nasionalisme semakin memudar ditandai dengan sikap oknum para pejabat dan pengusaha dari tingkat paling tinggi hingga paling bawah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal mining, narkoba, kejahatan cyber, dan berbagai kasus lainnya yang pada intinya tidak memperlihatkan gejala

kecintaan terhadap bangsanya. Jika hal ini terus terjadi tanpa dibarengi dengan langkah-langkah efektif, strategis, dan berkelanjutan melalui pendidikan, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan 'tenggelam' dan Indonesia hanya tinggal nama.

Melalui pendidikan karakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, akan memperkuat jati diri peserta didik sehingga mereka sangat bangga dengan bangsanya karena kekayaan budaya yang dimiliki tentu merupakan modal untuk membangun dan menjaga bangsa ini dari 'keruntuhan'.

4.2 Pengembangan Materi

Hasil analisa dokumen guru, berupa silabus dan RPP beberapa guru SDN Batik di Barito Kuala tentang kondisi pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai ke dalam materi menunjukkan masih rendah. Bahkan, tidak ditemukan satu kalimat pun dalam RPP yang menunjukkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan kearifan lokal Bakumpai dalam pembelajaran. Agus Wibowo (2012: 93) menegaskan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Berdasarkan dokumen RPP, dapat dijelaskan bahwa pengembangan materi pembelajaran oleh guru-guru SDN Batik masih 'miskin' terhadap integrasi nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai dalam memanfaatkan sumber belajar yang berasal dari lingkungan terdekat siswa (lokal), kemudian menjauh ke lingkup nasional dan selanjutnya ke tingkat global, yang dalam konsep kurikulum disebut *expanding community approach* (Kim, J. 2015).

Berikut disajikan materi yang digali dari RPP guru-guru SDN Batik Barito Kuala, sebagai berikut:

Tabel 3. Materi Kelas VI Semester 1 SDN Batik Batola

No	Kelas/ Semester	Standar Kompetensi (SK)	Kompetensi Dasar (KD)	Materi
1	VI/1	Mendengarkan: Memahami Teks dan Cerita Rakyat yang Dibaca	Mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, amanat, dari cerita rakyat yang diceritakan	Cerita Rakyat: Kisah Asal Mula Marabahan, asal Mula Sungai Barito, Kisah Banua Gusang, Asal Usul Banua Bakumpai, dan asal Mula Saka Palukan

Tabel di atas menggambarkan bahwa guru kelas VI SDN Batik telah menyentuh lokal pada kegiatan pembelajaran dengan menggali sumber belajar dari cerita rakyat etnis Bakumpai, yaitu Kisah Asal Mula Marabahan, asal Mula Sungai Barito, Kisah Banua Gusang, Asal Usul Banua Bakumpai, dan Asal Mula Saka Palukan.

Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran berlangsung, tampak bahwa guru belum optimal menggali karakter dari sebuah cerita rakyat, namun kemampuan dan kemauan guru menggunakan sumber lokal sebagai bahan pelajaran pada standar kompetensi (SK) memahami cerita rakyat patut diapresiasi.

Adapun buku paket yang digunakan guru sebagai sumber belajar untuk semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran agama dan penjasokesrek, maka 100% menggunakan buku-buku penerbit nasional. Beberapa buku sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 4. Sumber Belajar berupa Buku Paket Umum SDN Batik

No	Judul Buku	Kelas	Semester	Pengarang/Penerbit
1	Pegangan Guru: "Ilmu Pengetahuan Alam"	III	Ganjil	Arya Duta
2	Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas	III	Ganjil/Genap	Edi Warsidi dan Parika/JP Books
3	Seni Budaya dan Keterampilan	III	Ganjil/Genap	Erlangga
4	Ilmu Pengetahuan Sosial	III	Ganjil/Genap	Sunarso dan Anis Kusuma/JP Books
5	Pendidikan Kewarganegaraan	III	Ganjil/Genap	Slamet, dkk./BSE/Pusat Perbukuan Depdiknas
6	Cerdas Berhitung Matematika	III	Ganjil/Genap	Nur Fajariyah dan Defi Triatnawati
7	Sains Modern	VI	Ganjil/Genap	Nining Arini, dkk./Widya Utama
8	Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas	VI	Ganjil/Genap	Edi Warsidi dan Parika/JP Books
9	Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam	VI	Ganjil/Genap	S. Rosilawaty dan Aris Muharam/JP Books

Adapun buku-buku sumber yang digunakan oleh guru-guru SDN Batik untuk mata pelajaran muatan lokal, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 5. Sumber Belajar berupa Buku Paket Muatan Lokal SDN Batik

No	Judul Buku	Kelas	Semester	Pengarang/Penerbit
1	Proklamasi 17 Mei 1949	VI	Ganjil/Genap	H. Syamsiar Seman/Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin
2	Bahasa Indonesia Membautku Cerdas: Lancar Basa Banjar Gasas SD Kelas 6/Jilid III	VI	Ganjil/Genap	H. Syamsiar Seman/Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin
3	Kupu-Kupu Sayang: Basa Banjar Gasas SD Kelas II	II	Ganjil/Genap	H. Syamsiar Seman/Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin
4	Burung Karuang: Basa Banjar Gasas SD Kelas 3	III	Ganjil/Genap	H. Syamsiar Seman/Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin
5	Kunang-Kunang: Basa Banjar Gasas SD Kelas 1	I	Ganjil/Genap	H. Syamsiar Seman/Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin
6	Pasar Terapung: Lancar Basa Banjar Gasas SD Kelas 5	V	Ganjil/Genap	H. Syamsiar Seman/Lembaga Pendidikan Banua Banjarmasin
7	Sosiologi dan Budaya Banjar	-	-	-

Sumber: Hasil Pengamatan di SDN Batik (2016)

Beberapa buku yang digunakan oleh guru-guru SDN Batik Batola sebagai sumber belajar pada tiap kelas menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka telah menggunakan sumber lokal dalam konteks muatan materi mata pelajaran muatan lokal. Beberapa buku sumber belajar untuk mata pelajaran muatan lokal di atas menggambarkan bahwa pemahaman guru tentang "muatan lokal" bersifat parsial, yakni sejumlah materi yang disusun untuk mata pelajaran muatan lokal dengan menggali sumber belajar lokal (Banjar).

Hasil pengamatan terhadap Mardiana (52 tahun) dalam proses pembelajaran pada kelas II SDN Batik menunjukkan jika guru belum optimal

mengintegrasikan nilai-nilai lokal Bakumpai dalam pembelajaran. Beberapa nilai budaya lokal yang sarat dengan nilai budaya Bakumpai yang ditunjukkan saat proses pembelajaran dengan tema "Gotong Royong" tema mata pelajaran PKn, yakni guru memulai dengan menanyakan hal yang berkaitan dengan gotong royong.

4.3 Pengembangan Strategi Pembelajaran

Hasil analisa RPP dan pengamatan terhadap Maulida Hasanah (37 tahun) menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah *cooperative learning* tipe *STAD (Student Teams Achievement Development)* dan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Model ini cukup mampu memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerita rakyat. Model ini diawali dengan membagi kelompok antara 4-5 peserta didik, lalu guru memberikan LKS, selanjutnya peserta didik menjawab secara berkelompok, kemudian terakhir dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas.

Kaitannya dengan kearifan lokal dalam konteks proses pembelajaran, maka guru Maulida Hasanah (37 Tahun) belum optimal dalam menggali nilai dalam materi cerita rakyat tersebut, karena guru masih sangat fokus dengan tujuan pembelajaran dengan mengedepankan beberapa indikator pencapaian yang belum begitu baik menggali nilai-nilai lokal. Indikator pencapaian itu adalah: (1) Menentukan tokoh cerita; (2) Menentukan watak tokoh dalam cerita; (3) Menentukan latar cerita; (4) Menentukan tema dan amanat dalam cerita; (5) Mengetahui cerita rakyat lingkungan tempat tinggal tempat tinggalnya.

Kelima indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan, satu diantaranya merupakan hasil kreasi dari guru, yakni pada indikator kelima. Hal ini pada Tabel 3 Materi Kelas VI Semester I SDN Batik dapat dimaknai bahwa kreativitas guru Maulida Hasanah (37 tahun) cukup baik karena mampu mengintegrasikan muatan lokal dalam materi dari "Mata Pelajaran" Bahasa Indonesia melalui SK Memahami teks dan cerita rakyat yang dibacakan. Untuk lebih mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan ini, maka diperlukan model pengintegrasian pada mata pelajaran lainnya, baik pada mata pelajaran IPS, mata pelajaran IPA, mata pelajaran Matematika dan sebagainya sehingga muatan lokal yang sarat dengan nilai karakter seorang tokoh akan lebih optimal dalam proses internalisasinya bagi peserta didik pada setiap mata pelajaran apapun.

Berbeda pula dengan hasil pengamatan terhadap Mardiana (45 tahun) kaitannya dengan strategi pembelajaran yang dijalankan dan bagaimana upaya guru mengenalkan budaya Bakumpai. Mungkin karena termasuk kelas rendah (kelas 2), maka strategi pembelajaran yang dijalankan relatif sederhana dan termasuk cara-cara lama, yakni ceramah. Kita ketahui bahwa tidak satu pun metode yang paling baik, akan tetapi metode sangat ditentukan oleh kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Kelas rendah (1, 2 dan 3) tidak memiliki kemampuan berdiskusi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelas tinggi (4, 5, dan 6), karena itu ketika guru memilih metode ceramah dan tanya jawab maka menurut peneliti itu cukup bijak dan tepat, karena faktanya kelas tetap kondusif walaupun suasana gaduh dan perhatian yang tidak fokus juga ada pada waktu yang bersamaan. Tampaknya belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar sangat relevan. Kelas rendah sangat baik diberikan “bermain sambil belajar” dan kelas tinggi sangat baik dengan “belajar sampai sambil bermain”. Pendekotomian ini tentu sangat situasional, karena boleh jadi di sekolah lain kelas rendah sudah mampu belajar sambil bermain bukan bermain sambil belajar.

Selama proses pembelajaran, maka guru mencoba mengawali (proses eksplorasi) dengan bertanya,

Guru: *“Siapa yang pernah melihat atau menghadiri acara perkawinan?”*

Siswa: *“Ulun, Bu!”*

Guru: *“Apa saja yang kalian lihat saat menjelang dan saat acara perkawinan dilaksanakan?”*

Siswa: *“Ada yang mencari kayu bu, ada juga yang memasak nasi, membasuh piring, mangaut nasi, membersihkan piring”.*

Guru : *“Ya, benar anak-anak, pada saat menjelang perkawinan para tetangga dan keluarga datang untuk membantu mencari kayu untuk memasang atap serobong, kursi dan meja, memasak nasi, sayur, ikan dan lain-lain. Semua itu adalah kegiatan gotong royong.*

Dalam konsep masyarakat Bakumpai, gotong royong menjelang beberapa minggu atau beberapa hari sebelum perkawinan disebut dengan *bagawi duduk*. Istilah *bagawi duduk* juga dimiliki oleh etnis serumpun (Banjar) di Kalimantan Selatan, seperti di Hulu Sungai Utara dengan menyebut istilah *bamamula*, di Hulu Sungai Tengah dengan istilah *bapapandal*, dan di Tabalong disebut *bamula-mula*.

Bagawi duduk pada masyarakat Bakumpai sarat dengan sikap gotong royong. Mengenalkan nilai *bagawi duduk* pada peserta didik berpotensi terhadap proses internalisasi nilai-nilai gotong royong yang sangat penting dimiliki peserta didik dalam konteks kehidupan sosial.

Kemampuan guru menggali nilai lokal untuk diintegrasikan dalam pembelajaran masih belum optimal. Guru memiliki keterbatasan pengetahuan informasi tentang kearifan lokal sehingga merupakan kendala terhadap proses penanaman nilai lokal bagi peserta didik. Keterbatasan sumber belajar yang berasal dari lokal menjadi kendala bagi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Bakumpai dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran yang dilakukan Mardiana (35 tahun) pada kelas V tampak berbeda dengan kelas rendah. Dari sisi penggunaan media jauh lebih baik karena menggunakan LCD untuk menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi.

Penuturan Misdiani (Wawancara, 13 Agustus 2016), tentang strategi pembelajaran, kaitannya dengan kearifan lokal Bakumpai di SDN Batik, menjelaskan sebagai berikut:

"Kami dalam mengajar, kadang menggunakan istilah lokal untuk memberikan pemahaman kepada siswa, namun kami tidak mencantumkan hal tersebut secara khusus dalam RPP, seperti: pada kelas rendah (kelas 1), mengatakan *kait unjun* untuk menjelaskan huruf "j", *kaya burung tarabang* untuk menjelaskan angka "3", *kursi tebalik* untuk menjelaskan angka "4", *batis dua* untuk menjelaskan huruf "m", *batis tiga* untuk menjelaskan huruf "n", *urus kacang* untuk menjelaskan angka "1", *parut di depan* untuk menjelaskan huruf "b", dan *parut di belakang* untuk menjelaskan huruf "d".

Pernyataan yang sama dari Misdiani (Wawancara, 13 Agustus 2016) yang juga menjelaskan hal yang sama, namun pada mata pelajaran lain, yakni muatan lokal Baca Tulis Al Quran (BTA). Ia menjelaskan sebagai berikut:

"Saya mengajarkan huruf hijaiyah pada siswa dengan menganalogikan beberapa huruf, seperti: huruf "ba", dengan mengatakan *kayak jukung batiik satu di bawah*, begitu pula dengan "tsa", dan "taa", dengan menjelaskan *kayak jukung batik dua dan tiga*. Huruf "alif" dengan mengatakan *kayak urus kacang*. Huruf "lam" dengan mengatakan *kayak kait unjun*".

Hal sama juga diutarakan oleh Sogiannor (Wawancara, 13 Agustus 2016) ketika mengajarkan olahraga kepada peserta didik dalam rangka menanamkan semangat kerja keras, maka ia menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika saya mengajarkan beberapa jenis olahraga yang memerlukan kekuatan kaki dengan berlari kencang, saya kadang memberikan arahan dengan bahasa lokal, dengan harapan ia lebih bersemangat oleh karena menggunakan bahasa lokal dan kalimat yang sudah biasa mereka dengar, seperti: *belaju-laju bukah, kaya’ disasah asu’* (cepat-cepat lari seperti dikejar anjing).

Kalimat-kalimat seperti itu tampaknya sering menjadi semangat peserta didik ketika mereka telah mulai kehilangan semangat saat berolahraga. Kemampuan guru menggunakan istilah-istilah lokal (bahasa Bakumpai) telah mampu memberikan motivasi dalam berlatih.

4.4 Pengembangan Evaluasi

Analisa terhadap dokumen guru berupa RPP tentang kemampuannya mengembangkan evaluasi, khususnya kemampuan guru dalam mengembangkan peserta didik dalam berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) masih rendah. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam menginternalisasi nilai (budaya Bakumpai) dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.

Berikut tabel yang menggambarkan kemampuan guru dalam membuat soal evaluasi, sebagai berikut:

Tabel 6. Bentuk Evaluasi Mata Pelajaran Kelas II SDN Batik

No	Indikator Pencapaian Kompetensi	Bentuk Evaluasi
1	PKN: 1. Menjelaskan arti rukun 2. Menyebutkan manfaat saling berbagi dengan teman	
2	Matematika 1. Menentukan bilangan 1 sampai 50 2. Menentukan bilangan lebih besar 3. Menentukan bilangan lebih kecil 4. Membandingkan dua buah bilangan dengan menggunakan symbol $<$, $>$, $=$ 5. Membandingkan kumpulan benda dengan menggunakan istilah lebih dari, kurang dari 6. Menyusun bilangan dari yang terkecil ke terbesar 7. Menulis bilangan dengan benar secara urut dari 1-500 8. Menyebutkan pengertian bilangan ganjil 9. Menjelaskan perbedaan bilangan genap dan ganjil	
3	IPA 1. Mengidentifikasi bagian utama tubuh hewan di sekitar rumah....(sebutkan cth hewan di sekitar rumah.....!) 2. Mengidentifikasi bagian utama tumbuhan(sebutkan cth hewan di sekitar rumah.....!) 3. Menjelaskan sifat benda padat 4. Menjelaskan sifat benda cair	1. Jelaskan bagian tubuh hewan di sekitar rumah? 2. Jelaskan bagian tubuh tumbuhan di sekitar rumah? 3. Jelaskan sifat benda padat? 4. Jelaskan sifat benda cair?
4	IPS: 1. Menunjukkan dokumen diri dengan keluarga 2. Menceritakan peristiwa yang berkesan waktu kecil tentang diri dan keluarga melalui dokumen 3. Menceritakan cara memelihara dokumen pribadi 4. Menyampaikan pendapat tentang peristiwa yang dialami	1. Tunjukkan dokumen diri dan keluarga? 2. Ceritakan peristiwa yang berkesan waktu kecil tentang diri dan keluarga melalui dokumen! 3. Ceritakan cara memelihara dokumen pribadi! 4. Sampaikan pendapat/komentar tentang peristiwa yang dialami teman!

Tabel 7. Bentuk Evaluasi Mata Pelajaran Kelas VI Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SDN Batik

No	Standar Kompetensi (SK)	Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi	Bentuk Soal/Instrumen
1	Mendengarkan: Memahami Teks dan Cerita Rakyat yang Dibaca	Mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, amanat, dari cerita rakyat yang diceritakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tokoh cerita; 2. Menentukan watak tokoh dalam cerita; 3. Menentukan latar cerita; 4. Menentukan tema dan amanat dalam cerita; 5. Mengetahui cerita rakyat lingkungan tempat tinggal tempat tinggalnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan cerpen? 2. Apa yang dimaksud dengan intrinsik dalam sebuah cerita? 3. Sebutkan unsure intrinsik dalam sebuah cerita? 4. Berikan contoh judul cerita rakyat Bakumpai yang kamu ketahui?

Berdasarkan informasi yang digali dari RPP guru-guru kelas II dan VI SDN Batik, maka dapat disimpulkan jika guru-guru belum secara eksplisit mengintegrasikan kearifan lokal Bakumpai ke dalam bentuk evaluasi yang dibuat sehingga peserta didik tidak mengenal nilai-nilai budayanya sendiri. Kondisi ini berpotensi terhadap keterasingan peserta didik terhadap nilai budayanya sendiri dan sebaliknya sangat berpeluang terhadap pengaruh budaya global yang cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama.

Membangun jati diri bangsa dapat dimulai melalui proses pendidikan pada tingkat dasar. Pada masa ini merupakan periode emas dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Kegagalan guru dalam melakukan internalisasi nilai-nilai budaya (lokal) terhadap peserta didik, maka berpotensi terhadap kegagalan dalam pembentukan karakter sebagai modal untuk memasuki jenjang berikutnya.

Adapun analisa dokumen RPP pada bagian evaluasi terhadap guru Maulida Hasanah (37 tahun) dapat dijelaskan bahwa kemampuan guru dalam mengembangkan soal yang digali berdasarkan muatan lokal Bakumpai belum optimal. Hal itu tampak ketika guru hanya meminta peserta didik menyebutkan contoh judul cerita rakyat Bakumpai yang diketahuinya. Seharusnya, guru lebih optimal mengembangkan soal yang bertujuan agar siswa memiliki pemahaman terhadap cerita rakyat yang sarat dengan karakter. Kondisi ini merupakan

kelemahan pendidikan kaitannya dengan optimalisasi pengintegrasian kearifan lokal ke dalam mata pelajaran untuk membentuk *nation and character building*.

Dalam konteks penilaian pada Kurikulum 2013 dikenal dengan konsep penilaian otentik. Penilaian otentik dalam praksisnya berpotensi terhadap pembentukan karakter peserta didik manakala dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Herry Sudjendro (2014: 90) menjelaskan bahwa diantara tujuan penilaian otentik adalah mampu memotivasi peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks penelitian ini maka melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai melalui penilaian pada setiap pembelajaran maka akan mampu memotivasi peserta didik untuk lebih memahami budayanya dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penguatan jatidiri bangsa.

V. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER KEARIFAN LOKAL BAKUMPAI

5.1 Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai, yakni:

Pertama, lebih dari 50% peserta didik dan masyarakat Batola adalah etnis Bakumpai sehingga peluang terhadap proses transformasi budaya dalam pembelajaran di sekolah (Wawancara, Asmudiansyah, 5 Agustus 2016). Desain pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai dapat berupa nilai-nilai religius, nilai-nilai peduli sosial (gotong royong), nilai peduli lingkungan (cara-cara mengelola alam) dan nilai patriotisme.

Kedua, hingga saat ini, peserta didik masih merasakan adanya budaya Bakumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika menghadapi daur hidup (lahir, kawin, meninggal) sehingga sangat berpotensi terhadap dukungan atas implementasi pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai di sekolah (wawancara, Jali, tanggal 5 Agustus 2016).

Ketiga, visi, misi dan tujuan sekolah SDN Batik memiliki potensi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Visi SDN Batik, yakni: "Terwujudnya sekolah yang berkualitas, bersih, sehat, berbudaya dan berakhlak mulia yang dijiwai oleh iman dan taqwa". Sedangkan misinya, yakni: (1) Menanamkan iman dan

taqwa, berakhlak mulia, perilaku religius di dalam dan di luar sekolah; (2) Melaksanakan pembelajaran yang inspiratif, aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan; (3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; (4) mengembangkan budaya gemar membaca, kreatif, rapi bersih, disiplin, dan rasa ingin tahu; (5) Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, dan cinta tanah air; (6) Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah (Profil SDN Batik, 2016).

Visi, misi dan tujuan SDN Batik sangat mendukung pengembangan kurikulum pendidikan karakter, dengan beberapa indikator, seperti: menanamkan sikap gemar membaca, kreatif, rapi bersih, disiplin, dan rasa ingin tahu; kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, dan cinta tanah air. Misi ini menjadi pedoman bagi seluruh proses pembelajaran di sekolah sehingga sekolah menjadi pusat pengembangan karakter.

Pengembangan pendidikan karakter di SDN Batik juga didukung oleh kebijakan sekolah dengan cara mengembangkan budaya mutu sekolah melalui slogan yang mengandung ungkapan positif yang dipasang pada setiap sudut dinding sekolah, seperti: "rajin pangkal pandai", "kebersihan bagian dari iman", "buku jendela dunia", dsb. (Pengamatan, Agustus 2016).

Keempat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di dalamnya mengatur tentang diberikannya wewenang kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya.

Doni Kusuma (Masnur Muslich, 2011: 91): menjelaskan bahwa desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa (misalnya kegiatan kelas, sekolah dan luar sekolah, memasang tata tertib dalam kelas, dan sebagainya).

Di SDN Batik dalam implementasi pendidikan karakter didukung oleh kebijakan sekolah berupa perumusan visi, misi, program hingga berbagai hal yang mengarah pada pembentukan karakter melalui berbagai kegiatan, baik bidang seni, olahraga dan akademis lainnya. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai pranata sosial sekolah yang cukup berkontribusi terhadap proses

internalisasi nilai. Kebijakan sekolah lainnya adalah memasang kata-kata bijak pada setiap dinding sekolah yang ditempatkan pada ruang-ruang yang strategis. Kata-kata bijak itu dibuat dengan ukuran yang cukup jelas dan terang dilihat pada jarak 3-5 meter sehingga sangat efektif keterbacaan teks.

Kemampuan SDN Batik dalam membangun kultur sekolah merupakan faktor pendukung dalam implementasi pendidikan karakter. Doni Kusuma (Masnur Muslich, 2011: 91) dalam penjelasannya dapat dipahami bahwa melalui bantuan pranata sosial sekolah seperti kegiatan ekstra dan intra sekolah, seperti pramuka, PMR, paskibraka, termasuk juga kegiatan olahraga, seni dan pemasangan simbol-simbol berupa kata-kata bijak sangat strategis terhadap penanaman nilai-nilai karakter.

5.2 Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat terhadap upaya pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai, adalah sebagai berikut:

Pertama, lebih dari 50% peserta didik, tenaga pendidik dan masyarakat Batola telah bercampur antara etnis Bakumpai dengan Banjar serta suku pendatang lainnya sehingga menghambat proses internalisasi budaya Bakumpai dalam pembelajaran di sekolah (Wawancara, Asmudiansyah, 5 Agustus 2016).

Hambatan tersebut dapat diantisipasi melalui optimalisasi guru dalam menggali sumber-sumber belajar dari kearifan lokal Bakumpai. Nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai baik yang berkaitan dengan cara-cara bertani, cara-cara menangkap ikan, cara-cara melaksanakan persiapan perkawinan dan sebagainya, berpeluang terhadap proses internalisasi nilai-nilai karakter bagi peserta didik di sekolah.

Kedua, tidak tersedia sumber belajar utama seperti buku pegangan guru bermuatan budaya Bakumpai sehingga menghambat proses transformasi budaya melalui sekolah (Wawancara, Mardiana, 5 Agustus 2016).

Ketiga, kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Ujian Nasional (UN) dan prosentase kelulusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan sekolah merupakan pemicu terhadap rendahnya 'kemauan' dan 'kemampuan' sekolah (guru) untuk mengembangkan kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran. Adanya target kurikulum yang harus

diselesaikan oleh sekolah dalam suatu periode tertentu, berimplikasi terhadap absennya sejumlah materi lokal yang sarat nilai dalam materi pembelajaran.

Keempat, dampak globalisasi yang diiringi oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pandangan masyarakat Bakumpai dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh TV dan perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap kemampuan generasi penerus Bakumpai dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya. Banjar sebagai kultur dominan pada hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan mempengaruhi etnis Bakumpai untuk tetap bertahan dengan budaya leluhurnya. Kondisi ini berdampak kepada kemampuan generasi Bakumpai dalam melestarikan budayanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Asmudiansyah (54 tahun) bahwa dua anak terakhirnya pun kini tidak mengerti berbahasa Bakumpai. Informasi yang mereka dengar melalui media TV lokal dengan bahasa Banjar, komunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Banjar melalui teman-teman sebayanya di lingkungan rumah dan sekolah, membuat kedua anaknya kini tidak lagi memahami bahasa Bakumpai.

VI. NILAI-NILAI KARAKTER KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BAKUMPAI

Nilai-nilai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal masyarakat Bakumpai di daerah bantaran sungai yang akan diuraikan mengacu pada 18 Budaya dan karakter Bangsa rumusan dari Litbang Puskur Kemendiknas (2010) yang meliputi: religius, kerja keras, peduli sosial, toleransi, patriotisme, dst. Kedelapanbelas nilai pendidikan karakter rumusan Kemendiknas tersebut akan dicoba diidentifikasi pada SDN Batik. Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan pengamatan dengan subyek penelitian, maka ada beberapa nilai pendidikan karakter yang ditemukan, yaitu: (1) nilai religius; (2) nilai peduli sosial atau gotong royong; (3) peduli lingkungan; dan (4) nilai patriotisme.

6.1 Nilai Religius

Kemendiknas (2010: 9) memberikan definisi religius yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Religius juga berkaitan dengan sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai religius juga dimaknai sebagaimana definisi dari Aqib dan Sujak (2011: 7), yakni: segala pikiran,

perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu didasarkan nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agama.

Nilai religius dalam implementasi pendidikan karakter di SD Batik tampak ketika peserta didik mengawali belajarnya dengan berdoa. Berdoa merupakan manifestasi dari sifat lemahnya manusia di hadapan Tuhan. Memulai belajar dengan berdoa yang didahului dengan membaca beberapa surah menandakan bahwa peserta didik sejak dini telah ditanamkan kesadaran spiritual, yakni kesadaran akan adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar dirinya.

Dalam mengembangkan sumber belajar, maka guru memanfaatkan tempat-tempat yang memiliki nuansa religius, seperti mengunjungi makam keramat (wali), mesjid bersejarah dan beberapa situs yang memiliki nilai religius serta beberapa budaya yang sarat dengan sikap religius, seperti *bamandi-mandi* menjelang perkawinan dan *baayun mulud*.

Bamandi-mandi sehari sebelum menjelang hari H perkawinan dikenal dengan istilah *bapapai*. Budaya *bamandi-mandi* pada masyarakat Bakumpai, sebagaimana tujuannya maka memiliki nilai, yakni nilai kesadaran akan kelemahan diri sehingga memohon kepada Tuhan melalui ritual *bamandi-manadi* agar dijauhkan dari segala bencana menjelang, pada saat dan setelah perkawinan dilaksanakan (Wawancara, Asmudiansyah, 5 Agustus 2016).

6.2 Nilai Peduli Lingkungan

Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Kemendiknas, 2010). Dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai informasi yang dikemas guru dalam pembelajaran IPA dengan mengenalkan cara-cara masyarakat Bakumpai dalam hal bertani dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala mengembangkan persawahan pasang surut sehingga masa panen hanya satu kali dalam setahun. Kondisi ini memberi dampak tersendiri terhadap aktivitas para petani ketika masa tanam telah usai (Wawancara, Gusti Yamani, 5 Agustus 2016).

Petani Bakumpai mengenal musim yang secara garis besar dibagi dua macam, yakni *wayah pandang* (musim kemarau) dan *wayah danum* (musim air). *Wayah pandang* berlangsung antara bulan November hingga April, masa

pancaroba pada bulan Mei, sedangkan *Wayah danum* berlangsung antara bulan Juni hingga Oktober. Perbedaan musim ini akan mempengaruhi aktivitas pertanian yang dilakukan. Kearifan lokal Bakumpai yang sarat dengan nilai-nilai lingkungan, misalnya, bagaimana orang Bakumpai memanfaatkan rumput yang ditebas untuk dijadikan pupuk alami. Alat yang digunakan petani Bakumpai untuk memotong rumput, tidak sampai membalikan permukaan tanah yang mempengaruhi kadar keasaman (Wahyu dan Nasrullah, tt.).

Adapun jenis peralatan untuk menangkap ikan dan udang antara lain adalah *kabam (tampirai saluang)* untuk menjaring ikan saluang bahannya terbuat dari *paring (bambu)*. Kemudian, *Kabam* yakni bambu yang dibelah dua kemudian diambil bagian seratnya dan *diricih* menjadi *sebilah* lidi, selanjutnya dianyam secara tersusun. *Kabam* atau *saluang* digunakan dengan cara meletakkan umpan kemudian tutupnya diikat, selanjutnya ditambatkan pada tiang (Rochgiyanti, 2014: 21).

6.3 Nilai Peduli Sosial (gotong royong)

Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di SDN Batik melalui proses pembelajaran dilakukan dengan cara mengintegrasikan budaya lokal masyarakat Bakumpai. Hasil pengamatan terhadap Murdia Aspiyani (Wawancara, 5 Agustus 2016) menunjukkan bahwa ketika guru menyampaikan materi PKn tentang kehidupan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat, maka tampak jika guru telah berupaya memanfaatkan budaya Bakumpai sebagai sumber belajar dalam mengajarkan tema gotong royong.

Dalam Konteks Kemendiknas (2010), gotong royong dinamakan peduli sosial. Peduli sosial yakni sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Koentjaraningrat (2015: 63-67) menjelaskan bahwa gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat petani dalam masyarakat agraris. Ia selanjutnya membagi jenis-jenis gotong royong, yakni: (1) gotong royong dalam bercocok tanam; (2) gotong royong dalam aktivitas kehidupan masyarakat lainnya, seperti: saling membantu dalam memperbaiki rumah, saling membantu dalam persiapan perkawinan, sunatan, atau upacara-upacara lainnya, seperti masa kehamilan tujuh bulan, pemberian nama. (3) kerja bakti.

Gotong royong dalam masyarakat Bakumpai dapat dilihat pada kegiatan menjelang dan pelaksanaan perkawinan. Dalam konsep masyarakat Bakumpai,

gotong royong menjelang beberapa minggu atau beberapa hari sebelum perkawinan disebut dengan *duduk gawi*. Istilah *duduk gawi* juga dimiliki oleh etnis serumpun (Banjar) di Kalimantan Selatan, seperti di Hulu Sungai Utara dengan menyebut istilah *bamamula*, di Hulu Sungai Tengah dengan istilah *bapapandal*, dan di Tabalong disebut *bamula-mula*.

Duduk gawi pada masyarakat Bakumpai sarat dengan sikap gotong royong. Mengenalkan nilai *duduk gawi* pada peserta didik berpotensi terhadap proses internalisasi nilai-nilai gotong royong yang sangat penting dimiliki peserta didik dalam konteks kehidupan sosial.

6.4 Nilai-Nilai Patriotisme

Menurut Brameld (Abbas, 2014) bahwa sasaran pendidikan menghendaki adanya pewarisan nilai dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya melalui penyampaian berbagai informasi atau mentransmisikan pengetahuan kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk memperkuat integrasi bangsa.

Nilai-nilai patriotisme yang dikembangkan oleh guru SDN Batik yakni melalui penggalian sejarah lokal masyarakat Bakumpai pada periode Kolonial. Di antara tokoh yang paling penting pada periode Perang Banjar (1859-1906) adalah Panglima Wangkang. Panglima Wangkang adalah seorang tokoh Perang Banjar berdarah Dayak Bakumpai yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Banjar dari penjajah Belanda.

Patriotisme dalam konteks penelitian ini adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa (Kemendiknas, 2010).

Dalam praktiknya, guru mengenalkan tokoh ini melalui dua mata pelajaran, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tema cerita rakyat dan mata pelajaran Muatan Lokal (Wawancara, Maulidah Hasanah, 5 Agustus 2016).

Nilai-nilai patriotisme Panglima Wangkang dapat diidentifikasi dalam beberapa hal, yakni: (1) Ikut serta mempertahankan benteng Lahei dari serangan Belanda pada tahun 1860; (2) Ikut menyerang benteng-benteng Belanda di Barabai, Hampukong dan Tabalong; (3) Ikut serta dalam pertempuran Gunung Tongka (8 November 1861); (4) Memimpin laskarnya pada setiap ada operasi

atas perintah Antasari atau Surapati; (5) Mempertahankan Benteng Wangkang tanggal 27 Desember 1870, atas penyerangan Belanda di Simpang Durakhman dekat Sungai Bedandan Marabahan (Sjamsuddin, 2001: 283-318). Sikap Panglima Wangkang mencerminkan patriotisme karena ia memiliki kesetiaan, kepedulian dan penghargaan terhadap tanah airnya, yakni tanah air Banjar yang pada waktu itu dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Penghargaan yang tinggi terhadap politik bangsa (Indonesia) pada waktu itu oleh Panglima Wangkang menunjukkan sikap patriotisme yang penting ditransformasikan kepada peserta didik. Kebanggaan peserta didik terhadap Panglima Wangkang akan berimplikasi terhadap pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*).

Selain Panglima Wangkang, seorang tokoh pejuang Dayak yang ikut berjuang melawan Pemerintah Hindia Belanda hingga titik darah penghabisan (*waja sampai kaputing*), bersama-sama dengan Pangeran Antasari, yakni Temenggung Surapati. Sejak tahun 1825, ia telah menjadi pemimpin terkemuka suku Dayak Bakumpai (Hadi, 2015: 28).

Penggambaran karakter kedua tokoh tersebut melalui pementar belajaran pada jenjang pendidikan dasar memiliki arti strategis terhadap proses internalisasi nilai-nilai patriotisme bagi peserta didik. Adanya sebuah kenyataan bahwa saat ini generasi muda sangat jauh dari karakter cinta tanah air yang terindikasi dengan maraknya tawuran antarpelajar, kurang menghargai prestasi, terlibat narkoba, seks bebas dan berbagai tindak kriminal lainnya adalah sebuah cerminan kegagalan pendidikan karakter di sekolah.

VII. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan bahwa implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai Bakumpai di SDN Batik belum optimal, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian. Kedua, adanya regulasi pemerintah tentang perlunya menggali kembali budaya sebagai upaya memperkuat jatidiri bangsa merupakan faktor pendukung dalam implementasi pendidikan karakter di SDN Batik, namun percampuran etnis dan budaya dalam masyarakat Barito Kuala yang semakin luas cukup menghambat implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai. Di samping itu, minimnya sumber belajar yang berkaitan dengan budaya Bakumpai merupakan hambatan dalam pengembangan pendidikan karakter. Ketiga, ada banyak nilai-nilai karakter

yang dikembangkan dalam pembelajaran pada SDN Batik, kaitannya dengan kearifan lokal Bakumpai, yakni nilai religius, nilai peduli sosial, peduli lingkungan, dan nilai patriotisme. Keempat nilai yang ditemukan dalam proses pembelajaran memiliki arti strategis dalam pembentukan karakter bagi peserta didik di SDN Batik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Irwan. 2014. "Etnopedagogi Etnik Makasar: Studi Penelusuran Nilai-Nilai Pedagogik pada Naskah *Lontaraq* sebagai Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan IPS di Sekolah", *Disertasi*, Jurusan Pendidikan IPS SPs UPI Bandung, tidak diterbitkan.
- Al Muchtar, Suwarma. 2014. *Epsitemologi Pendidikan IPS*. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
- Aqib, Z. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa*. Bandung: Yrama Widya.
- Aqib, Zainal. dan Sujak. 2011. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. Bandung: Yrama Widya.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka.
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. Thousand Oaks. London, New Delhi: Sage Publication.
- Hadi, Rizali. 2015. *Mengungkap Peran Orang Dayak Bakumpai Memelopori Perdagangan Ke Sungai Katingan*. Banjarbaru: PADMA Publisher dan Communications.
- Kemendiknas. 2010. *Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas dan Litbang Pusat Kurikulum.
- Kemendikbud. 2015. *Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Kim, J. 2015. Research on The Impact of The Expanding Communities Approach in South Korea: Focused on Elementary Social Studies Curriculum. Diakses dari: <http://jsse.issajournal.org/index.php/jsse/article/view/3/3>
The Journal of Social Studies Education Vol 4 (2015) (25 Oktober 2015).

- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Profil Sekolah Dasar Negeri (SDN) Batik, Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, 2016.
- Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional, 2015-2019.
- Rochgiyanti, dkk. 2014. *Kearifan Lokal Orang Dayak Bakumpai Di Lahan Basah*. Banjarmasin: Aynat dan Unlam Press.
- Siswoyo, Dwi, dkk. 2011. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sudjendro, Harry dan Daryanto. 2014. *Wacana Bagi Guru SD: Siap Menyongsong Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sukmadinata, N. S. 2008. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya.
- Sjamsuddin, Helius. 2001. *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti (Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, 1859-1906)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahyu dan Nasrullah, (tt.) *Kearifan Lokal Petani Dayak Bakumpai Dalam Pengelolaan Padi di Lahan Rawa Pasang Surut Kabupaten Barito Kuala*. Tp.Ttp.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaidi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

WAWANCARA:

Asmudiansyah (54 tahun), Pekerjaan: Komite SDN Batik/Tokoh Masyarakat Desa Batik. Alamat: Desa Batik Lama, RT. II RW I.

Gusti Muhammad Yamani, (32 Tahun), Pekerjaan: PNS (Guru SDN Batik), alamat: Kelurahan Lepas, RT. 1 Kab. Barito Kuala.

Jali, (49 tahun), Pekerjaan: PNS (Kepala Sekolah SDN Batik), Alamat: Jl. Jend. Soedirman, Gang Ilham, No. 37 Marabahan.

Misdiani, (48 tahun), Pekerjaan: PNS (Guru SDN Batik), alamat: Jl. Suka Budi, Kab. Batola.

Maulidah Hasanah (31 tahun), Pekerjaan: PNS (Guru SDN Batik), alamat: Jl. Suka Budi, Kab. Batola.

Murdia Aspyani (51 thun), Pekerjaan: PNS (Guru SDN Batik), alamat: Desa Batik Kab. Batola.

Pitriani, (29 tahun), Pekerjaan: PNS (Guru Honorer SDN Batik), alamat: Desa Batik Kab. Batola.

Sogiannor (39 thun), Pekerjaan: PNS (Guru SDN Batik), alamat: Desa Batik Kab. Batola.

ISLAM DAN KEUTUHAN NASIONALISME INDONESIA

Meneladani Perilaku Mulia Sultan Tidore Zaenal Abidin Syah Dalam Berjuang dan Mempertahankan Keutuhan NKRI Dari Strategi Pecah Belah Belanda Setelah Indonesia Merdeka

Darmawijaya dan Irwan Abbas

wijayadarma20@yahoo.co.id & irwanabbas@gmail.com

ABSTRAK

Pada awal abad ke-20, Belanda melancarkan politik sekularisasi atas kaum pribumi Indonesia secara sistematis. Hasil kajian memperlihatkan, bahwa politik sekularisasi itu telah menyebabkan generasi muda Indonesia mengalami polarisasi secara ideologi. Diantara mereka ada yang meyakini bahwa ideologi sekuler akan mampu membawa Indonesia bisa meraih kemajuan. Diantara mereka ada yang tetap menemukan jawabannya di dalam Islam. Islam adalah agama yang benar, sempurna dan paripurna yang selalu bisa memberikan solusi yang tepat atas setiap permasalahan manusia. Dalam hal ini, keputusan Sultan Zainal Abidin Syah dalam menyatukan Kesultanan Tidore sebagai bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dapat dilihat sebagai aktualisasi nilai-nilai Islam yang berinduk pada Logika Tauhid yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan, dari pada hidup berpecah belah sebagai bangsa. Logika Tauhid yang dimiliki oleh Sultan Zainal Abidin Syah telah mampu membuat dirinya merasa ringan dalam mengorbankan kepentingan Kesultanan Tidore demi memberikan jalan bagi langgengnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan kolonial Belanda.

Kata Kunci: Nasionalisme Indonesia, Sultan Zainal Abidin Syah, keutuhan NKRI.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Darmawijaya** dan **Irwan Abbas** Dosen Program Studi Ilmu Sejarah FIB Universitas Khairun Ternate.

I. PENDAHULUAN

Nasionalisme Indonesia modern lahir sebagai efek dari strategi Belanda dalam melemahkan dan melumpuhkan Islam di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, nasionalisme sebagai salah satu fenomena gerakan politik modern baru muncul pada awal abad ke-20. Kesadaran nasionalisme itu muncul sangat berkaitan erat dengan kesadaran intelektual generasi muda Indonesia dalam melihat perkembangan Indonesia yang sementara dijajah oleh Belanda. Lahirnya kesadaran intelektual di kalangan generasi muda Indonesia pada waktu itu adalah sebagai akibat dari semakin banyaknya generasi muda yang berpikir kritis atas realitas kaum pribumi Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda.¹

Lahirnya generasi muda Indonesia yang kritis atas keberadaan Belanda di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh Belanda. Sebenarnya, Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah berpikir bagaimana mendirikan sekolah untuk anak-anak kaum pribumi Indonesia. Namun karena keadaan yang mendesak Pemerintah Hindia Belanda melakukan demikian, maka dengan terpaksa Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler untuk anak-anak kaum pribumi Indonesia.

Sekolah sekuler adalah sekolah yang memisahkan secara tegas antara pelajaran agama dengan pelajaran sains (ilmu-ilmu keduniawian). Sekolah sekuler memiliki akar sejarah yang begitu jauh dalam sejarah peradaban Barat. Munculnya sekolah sekuler di dalam peradaban Barat sangat berkaitan erat dengan tidak logisnya Logika Trinitas sebagai logika induk agama Kristen, sehingga logika Trinitas tidak bisa dijadikan panduan yang logis bagi orang Barat dalam meraih kemajuan.²

Tujuan utama dari penerapan sekulerisasi ini adalah untuk melemahkan dan menyingkirkan Islam dari kaum pribumi Indonesia. Politik sekulerisasi ini diberikan pada anak-anak kaum pribumi abangan melalui penanaman "logika sekuler" secara sistematis, yang diberikan lewat sekolah-sekolah sekuler yang didirikan oleh Belanda. Output (hasil) yang diinginkan Belanda dari kebijakan sekulerisasi ini adalah *"lahirnya generasi baru Indonesia yang sekuler, yang sangat mengagung-agungkan Barat sebagai simbol kemajuan peradaban, dan melecehkan Islam sebagai agama, yang sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Jika kaum pribumi Indonesia ingin maju seperti*

majunya peradaban Barat, maka sekulerismelah satu-satunya jalan, sebagaimana yang ditempuh oleh peradaban Barat. Islam sebagai agama tidak layak dijadikan sebagai pijakan dasar dalam meraih peradaban yang lebih maju. Jadi, Islam harus ditinggalkan dan diabaikan, karena Islam itu adalah sebuah agama, dan agama itu adalah simbol keterbelakangan manusia. Urusan peradaban adalah urusan manusia yang berpikir, bukan urusan agama. Urusan agama adalah mengatur ibadah-ibadah ritual, bagi manusia yang membutuhkannya. Jadi agama hanyalah ibadah-ibadah ritual yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, bagi manusia-manusia yang membutuhkan saja."

Secara pemikiran, Belanda sangat sukses dengan kebijakan sekulerisasinya. Hal itu terbukti dengan lahirnya generasi baru Indonesia yang begitu meyakini kebenaran sekulerisme, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara agama dan ilmu pengetahuan. Generasi sekuler Indonesia sangat berpengaruh, sehingga setelah Indonesia merdeka, sistem sekolah sekuler dijadikan sebagai sistem sekolah resmi di Indonesia.

Ditinjau dari sudut kajian sejarah peradaban, keberadaan sistem pendidikan sekuler yang memisahkan secara tajam antara pengetahuan agama dan pengetahuan dunia yang berbasis sains hanya ditemukan di dalam khasanah peradaban Barat, namun tidak ditemukan di dalam khasanah peradaban Islam. Di dalam sejarah peradaban Barat, sekulerisme merupakan jalan terbaik yang ditempuh oleh orang-orang Barat atas kebuntuan yang dialami oleh logika Trinitas sebagai logika resmi agama Kristen.

Di dalam peradaban Islam, tidak mengenal yang namanya sistem pendidikan sekuler. Tidak ada dikotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan dunia yang berbasis sains. Keduanya satu kesatuan. Islam tidak pernah mempertentangkan antara urusan agama dan urusan dunia. Di dalam Islam, agama adalah panduan dasar untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia, dan akan berlanjut di akhirat. Agar bisa bahagia di dunia, maka setiap umat Islam diwajibkan menguasai ilmu pengetahuan, karena ilmu itu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan juga merupakan penyebab kebahagiaan di alam akhirat. Di dalam Islam, agama itu adalah ilmu dan ilmu adalah agama itu sendiri. Mempelajarinya sebuah kewajiban, baik untuk kehidupan dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Di dalam Islam sudah ditegaskan, bahwa orang yang malas belajar untuk menuntut ilmu, maka akan menderita dan terhina, baik di

dunia, maupun di akhirat. Logika Tauhid adalah induk dari ajaran Islam sekaligus induk dari semua ilmu yang akan membantu manusia untuk meraih kebahagiaan. Logika tauhid yang menjadi induk dari ajaran Islam adalah logika yang membenarkan, bahwa Tiada **Ilah** (Tuhan) yang berhak disembah dengan benar, kecuali Allah ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya.³

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian pada bagian pendahuluan di atas, tulisan ini merumuskan beberapa pertanyaan yang akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini. Ada pun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa logika Tauhid dianggap urgen sebagai sumber inspirasi jihad bagi kaum pribumi dalam berperang melawan Kolonial Belanda di Indonesia?
2. Seberapa pentingnya peranan logika Tauhid bagi Sultan Tidore ke-35, Sultan Zainal Abidin Syah sehingga ia secara sukarela menggabungkan wilayah Kesultanan Tidore menjadi bagian atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), padahal Sri Sultan diberikan kesempatan oleh PBB untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
3. Apa akibat yang dimunculkan bagi nasionalisme Indonesia dan Belanda atas keputusan yang diambil oleh Sultan Zainal Abidin Syah yang secara sukarela menggabungkan wilayah Kesultanan Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

III. LANDASAN TEORI

Di dalam studi ini digunakan tiga teori untuk mengupas dan menguraikan fakta-fakta sejarah yang ada. Tiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3.1 Logika Kolonial

Logika Kolonial akan membantu penulis untuk lebih mudah menguraikan mengapa perilaku-perilaku Belanda yang telah menyebabkan kaum pribumi menjadi teraniaya dan tersakiti atas perilaku-perilakunya itu. Perilaku-perilaku Belanda telah melahirkan jeritan tangis dan deraian air mata

kaum pribumi. Perilaku-perilaku Belanda telah melahirkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum pribumi. Padahal Belanda itu adalah tamu yang tidak diundang oleh kaum pribumi. Mereka datang ke Indonesia dengan kemauan sendiri. Namun kedatangan mereka justru mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum pribumi, lantaran perilakunya yang menindas dan menyakiti kaum pribumi. Belanda datang dari jauh, yaitu dari benua Eropa sana. Belanda datang membawa perilaku-perilaku yang menjajah dan menindas kaum pribumi. Perilaku menjajah dan menindas inilah yang disebut dengan perilaku yang lahir dari logika Kolonial, yaitu logika penjajahan dan penindasan, sebuah logika yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan secara universal.

3.2 Logika Sekuler

Logika Sekuler adalah logika berpikir yang dikembangkan oleh para ilmuwan Barat setelah hidup sengsara dan menderita dibawah hegemoni agama Kristen yang berinduk pada Logika Trinitas, sebuah logika yang sangat sulit untuk dipahami dengan hati dan pikiran yang sehat. Logika Sekuler akan membantu penulis untuk memahami logika berpikir peradaban Barat yang memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan dunia, yang kemudian dijadikan sarana bagi Belanda dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari pikiran kaum pribumi Indonesia. Sekulerisasi agama sebagai pengalaman Barat yang begitu pahit dijadikan sebagai sebuah strategi politik Belanda dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari pikiran kaum pribumi. Melalui logika Sekuler ini, maka kita akan lebih mudah dalam memahami, mengapa setelah diterapkannya politik Sekulerisasi Islam di Indonesia Belanda muncul generasi muda Indonesia yang begitu berani dalam melecehkan dan mengabaikan Islam sebagai panduan dasar kehidupan. Padahal di dalam Islam yang berinduk pada logika Tauhid, tidak mengenal istilah logika Sekuler.

3.3 Logika Tauhid

Logika Tauhid adalah sebuah logika berpikir yang meyakini, bahwa yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya adalah Allah, Subhana Wata'ala. Manusia adalah bagian dari ciptaan Allah. Menurut logika Tauhid, manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Dalam rangka membantu manusia menjadi makhluk yang bahagia dan sejahtera di muka bumi bersama makhluk-makhluk yang

lainnya, maka Allah menurunkan aturan dasar bagi manusia. Aturan dasar itulah yang disebut dengan syariat Islam. Apabila sumber syariat Islam itu masih asli dan murni, maka Syariat Islam itu akan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia di muka bumi. Syariat Islam sebagai panduan dasar bagi manusia dalam mengelola bumi ini agar dengan syariat Islam itu manusia bisa mengasah potensi positifnya dengan baik dan bisa pula mengatasi kelemahan-kelemahan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Syariat Islam itu sangat sesuai dengan hati dan pikiran manusia yang sehat, apabila syariat Islam itu mampu dipahami dengan baik dan benar. Realitas sejarah membuktikan bahwa ketika syariat Islam dipahami dengan baik dan benar, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk perilaku keseharian, maka syariat Islam akan melahirkan perilaku-perilaku yang mulia, termasuk dalam masalah perang (jihad) pun dalam rangka menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan dan perilaku rela berkorban, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sri Sultan Zainal Abidin Syah dalam menggabungkan wilayah Kesultanan Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Logika Tauhid: Sumber Inspirasi Jihad Utama bagi Kaum Peribumi Indonesia dalam Berperang Melawan Perilaku Kolonial Belanda Sebelum Abad ke-20.

Islam adalah agama yang dibangun di atas logika Tauhid, yaitu logika yang menyatakan, bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Islam sebagai agama tauhid sangat mengutuk segala bentuk ketidakadilan, karena ketidakadilan itu adalah salah satu sumber pokok yang menyebabkan manusia menjadi tersakiti karenanya. Islam mencintai yang namanya persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu adalah suatu kebaikan yang utama. Atas dasar itu, logika Tauhid Islam menjadi inspirasi utama dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, termasuk perilaku kolonial yang diterapkan Belanda di Indonesia. Logika Tauhid telah menjadi inspirasi utama dalam berbagai perlawanan jihad kaum pribumi Indonesia dalam berperang melawan Belanda yang ingin melanggengkan kolonialismenya di Indonesia. Perlawanan itu telah berjalan selama ratusan tahun dan belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan berhenti. Belanda selalu merasa terancam

dengan istilah “jihad” yang digunakan oleh kaum pribumi dalam setiap perlawanan kepada Belanda. Kaum pribumi menyebut orang Belanda dengan istilah “Kafir Londo” --- “Kafir Belanda”.

Istilah “Jihad” melawan “Kafir Londo” mulai ramai dibicarakan oleh kaum pribumi ketika Belanda semakin meningkatkan perilaku kolonial mereka pada kaum pribumi Indonesia. Abad ke-17, ketika Belanda sudah membangun kekuatan dibawah VOC, istilah “jihad” semakin ramai dibicarakan dalam menyikapi perilaku VOC yang ingin menaklukkan berbagai Kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Dalam proses penaklukan, VOC menggunakan dua cara, yaitu penaklukan langsung melalui jalur militer dan penaklukan dengan cara politik pecah belah, terori belah bambu, dan *divide et invera*.

Perilaku kolonial sangat tampak pada ekspedisi-ekspedisi militer yang digunakan oleh Belanda dalam menaklukkan berbagai kesultanan yang ada di Nusantara. Kesultanan Tidore, yang akan menjadi pembahasan inti dari studi ini adalah salah satu kesultanan yang berhasil ditaklukkan Belanda. Belanda sudah mulai menaklukkan Kesultanan Tidore jauh sebelum pecahnya gerakan jihad yang dilancarkan Sultan Nuku terhadap Belanda pada akhir abad ke-17. Sultan Nuku merupakan satu-satunya sultan di Nusantara yang berhasil memerdekakan Kesultannya dari perilaku kolonial Belanda. Sultan Nuku tidak hanya berhasil memerdekakan Kesultanan Tidore dari kolonialisme Belanda, namun Sultan Nuku juga mampu membawa Kesultanan Tidore berhasil meraih masa keemasannya, yang mana wilayah kekuasaannya sampai di wilayah Papua. Sultan Nuku berhasil mengawal kemerdekaan Kesultanan Tidore hingga akhir hayatnya. Setelah Sultan Nuku wafat pada tahun, maka Kesultanan Tidore berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Wilayah Kesultanan Tidore menjadi bagian dari wilayah Belanda.

Bernard van Vlekke mencatat, bahwa ayat-ayat “jihad” memang sudah ramai dibahas oleh kaum pribumi Indonesia setelah jatuhnya Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram ke tangan Belanda.⁴ Dalam sejarah Kesultanan Banten, dikenal seorang ilmuwan sufi sekaligus mujahid Islam dalam berperang melawan “Kafir Londo”. Sosok yang dimaksud adalah Syekh Yusul Al Makassar, seorang ulama sufi asal Kesultanan Makassar. Syekh Yusuf meninggalkan Kesultanan Makassar, karena Syekh Yusuf tidak suka tinggal di Makassar, karena orang-orang Makassar sangat kuat ego primordialnya, sehingga Syekh Yusuf

merasa tidak dihargai dan akhirnya berlayar menuju Banten. Di Banten, Syekh Yusuf berjihad bersama Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan Belanda. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, maka Syekh Yusuf sendiri yang memimpin "jihad" secara bergerilya dalam melakukan perlawanan pada Belanda. Dalam perkembangannya, Syekh Yusuf dapat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Colombo lalu ke Capé Town, Afrika Selatan.⁵

Gerakan "jihad" terus berlangsung hingga Aceh berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada awal abad ke-20. Dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20, bumi Nusantara begitu kaya dengan perlawanan "jihad" terhadap Belanda. Belanda dilawan oleh kaum pribumi, bukan karena Belandanya, namun karena Belanda mempraktekkan perilaku kolonial di bumi Nusantara. Gerakan "jihad" itu terus menerus muncul dalam realitas sejarah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan atas "Kafir Londo", yang telah menjajah di Indonesia. Inilah gambaran betapa pentingnya keberadaan "jihad" sebagai solusi bagi umat Islam dalam menyikapi perilaku-perilaku kolonial yang menindas.

4.2 Snouck Hurgronje: Ilmuan yang Paling Berjasa dalam Membantu Belanda Guna Melumpuhkan Kekuatan Jihad Islam di Bumi Nusantara.

Di tengah-tengah kebingungan Belanda itu, maka hadirilah sosok Snouck Hurgronje,⁶ seorang ilmuan yang begitu fasih dalam berbahasa Arab. menguasai masalah-masalah ke-Islaman dan realitas umat Islam Indonesia. Snouck Hurgronje adalah alumni Universitas Leiden. Ia mendalami studi ke-Islaman di Universitas Leiden dibawah bimbingan para ilmuan Leiden yang berinduk pada "Modernis Leiden", yaitu para ilmuan Leiden yang menganggap bahwa agama hanyalah sekedar kesadaran etis yang ada pada setiap manusia dan memandang bahwa dunia Barat memiliki superioritas terhadap dunia Timur. Snouck Hurgronje cukup tertarik dengan studi ke-Islaman yang ia lakukan, sehingga ia meninggalkan tujuan semulanya untuk menjadi pendeta. Ia meniti karir sebagai seorang ilmuan yang mendalami studi ke-Islaman dengan menggunakan logika Modernis Leiden sebagai turunan dari logika Sekuler Barat dalam memahami masalah-masalah ke-Islaman. Dalam upaya mendalami studi ke-Islaman, Snouck Hurgronje sampai menyamakan jatinya dirinya sebagai seorang "Modernis Leiden" dengan berpura-pura menjadi seorang muslim. Abdul Gafar adalah yang digunakan oleh Snouck Hurgronje sewaktu berpura-pura menjadi seorang muslim.⁷

Setelah mendalami studi-studi ke-Islaman dan didukung oleh data-data atas realitas umat Islam Indonesia, maka Snouck Hurgronje berhasil merumuskan sebuah rumus kebijakan bagi Belanda dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari pikiran kaum pribumi. Rumus yang diberikan oleh Snouck Hurgronje ini merupakan rumus yang sangat luar biasa, karena rumus itu memang terbukti berhasil melemahkan dan menyingkirkan Islam dari pikiran kaum pribumi Indonesia. Rumus yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje ini memiliki dampak negatif yang dahsyat bagi kaum pribumi di belakang hari. Setelah Indonesia merdeka, rumus tersebut dijadikan rumus resmi dalam membangun cara berpikir generasi muda Indonesia saat ini.

4.3 Sekulerisasi Islam: Rumus Snouck Hurgronje dalam Melemahkan dan Menyingkirkan Islam dari Kaum Pribumi Indonesia.

Sekulerisasi Islam itulah rumus yang diberikan oleh Snouck Hurgronje pada Belanda dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari pikiran kaum pribumi. Snouck Hurgronje menegaskan kepada Belanda, bahwa menghadapi kekuatan Islam tanpa pemetaan yang baik, maka akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Islam tidak akan pernah bisa dilumpuhkan secara militer, karena selagi ayat jihad di dalam Al Quran dan hadits belum dihapus, maka selama itu pula, jihad sebagai solusi bagi umat Islam dalam menegakkan "rasa keadilan" dan "rasa kemanusiaan" mereka yang terusik oleh perilaku kolonial Belanda yang menindas. Snouck Hurgronje juga menegaskan, bahwa tidak semua orang Islam suka berjihad, karena pada umumnya, orang Islam belum paham agamanya secara baik dan benar. Umat Islam ikut berjihad, karena mengikuti fawwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama dan para pemimpin mereka yang memahami ajaran Islam dengan baik. Atas dasar itu, sekulerisasi Islam merupakan sarana yang paling efektif dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari kaum pribumi. Sistem Pendidikan Sekuler adalah sarana yang paling efektif yang bisa digunakan oleh Belanda dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari kaum pribumi. Berikan sistem pendidikan sekuler pada anak-anak kaum pribumi yang belum memahami agama Islam dengan baik. Bentuk pikiran mereka itu dengan logika Sekuler, yaitu logika berpikir yang memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan dunia. Logika Sekuler adalah logika berpikir yang lahir dari rahim peradaban Barat pada abad ke-15, setelah para ilmuwan berjuang habis-habisan menentang hegemoni

agama Kristen yang berinduk pada logika Trinitas. Para ilmuan menentang habis-habisan logika Trinitas, karena logika Trinitas tidak bisa dijadikan panduan dasar bagi hati dan pikiran para ilmuan Barat dalam mengembangkan peradaban. Kasus seperti ini tidak ditemukan dalam sejarah peradaban Islam. Logika Tauhid yang menjadi induk dari ajaran Islam justru diberikan pada orang-orang yang berhati dan berakal sehat agar mereka bisa mengembangkan peradaban yang sehat di muka bumi ini. Realitas sejarah sudah membuktikan, bahwa Islam yang berinduk pada logika Tauhid memang berhasil membangun peradaban yang agung di masa lalu.

Upaya Sekulerisasi Islam dilakukan secara sistematis diantaranya melalui lembaga lembaga pendidikan. Cara lainnya, mengalihkan anggaran militer yang disiapkan untuk menyerang umat Islam secara militer menjadi anggaran untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan sekuler. Hal lainnya, mencari anak-anak pribumi yang berasal dari keluarga terpandang dan terhormat (keluarga priyayi) yang belum memahami agama Islam dengan baik, lalu masukkan mereka ke dalam lembaga-lembaga pendidikan sekuler yang didirikan itu. Didik dan bina mereka dengan Logika Sekuler secara sistematis, maka dengan sendirinya, mereka itu akan menjadi generasi baru Indonesia yang sekuler yang akan menjadi bagian dari Belanda dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam dari kaum pribumi. Generasi baru yang sekuler ini akan berterima kasih pada Belanda yang telah memberikan mereka sebuah pengetahuan yang begitu maju secara pemikiran dan mereka akan menjadikan peradaban Barat sebagai contoh yang harus mereka tiru demi meraih kemajuan negerinya. Rumus Snouck Hurgronje ini mengalami kesuksesan yang luar biasa dari segi pemikiran. Program Sekulerisasi Islam yang dijalankan secara sistematis melalui lembaga-lembaga pendidikan sekuler yang didirikan oleh Belanda meraih kesuksesan yang luar biasa. Program Sekulerisasi melalui sarana pendidikan memang sangat efektif dalam melahirkan generasi baru Indonesia yang sekuler. Mereka itu para intelektual muda Indonesia yang pada umumnya adalah lulusan dari perguruan tinggi sekuler yang didirikan oleh Belanda. STOVIA adalah salah satu perguruan tinggi yang paling bergengsi pada awal abad ke-20. Para perintis organisasi Budi Utoma adalah para mahasiswa STOVIA, semuanya adalah generasi baru sekuler Indonesia. Mereka meyakini bahwa Islam adalah simbol kemunduran, dan sekulerisme adalah

simbol kemajuan. Tinggalkan Islam dan ambillah sekulerisme sebagai panduan dalam meraih kemajuan. Soekarno adalah bapak sekulerisme Indonesia yang memiliki pengaruh yang begitu kuat di mata kaum pribumi. Pengaruh Soekarno masih bisa dirasakan sampai saat ini. Dalam konteks Indonesia kontemporer, PDIP yang didirikan oleh anak Soekarno, Megawati Soekarnoputri, merupakan miniatur dari pikiran-pikiran Soekarno dalam menyikapi masalah-masalah yang berhubungan dengan agama Islam. PDIP merupakan satu partai yang begitu anti pada syariat Islam.

Rupanya program sekulerisasi Snouck Hurgronje berhasil melahirkan generasi baru Indonesia yang sekuler, yaitu generasi baru Indonesia yang menganggap remeh Islam sebagai agama, namun tidak semua, generasi baru Indonesia yang sekuler ini mau berterimakasih pada Belanda sebagai Bapak Asuhnya dalam logika Sekuler. Sebagian dari mereka justru tampil menjadi "anak-anak bandel" yang menentang "bapak asuhnya" sendiri. "Anak-anak bandel" ini menggunakan logika Sekuler sebagai jurus yang sama dalam menyerang Belanda sebagai "Bapak Asuhnya". Soekarno merupakan "anak bandel" yang paling berpengaruh dalam menentang Belanda sebagai "bapak asuhnya". "Indonesia Menggugat" merupakan judul buku yang ditulis oleh Soekarno sebagai "anak bandel" dalam menyerang Belanda sebagai "bapak asuhnya".

4.4 Islam Memberikan Solusi pada Kaum Pribumi Indonesia dalam Menjawab Strategi Sekulerisasi yang Dirancang oleh Snouck Hurgronje.

Islam adalah agama yang benar, sempurna dan paripurna. Pada waktu Belanda menyerang Islam dengan strategi militer, maka Islam memberikan solusi "jihad" pada kaum pribumi dalam membalas strategi militer yang digunakan oleh Belanda dalam menancapkan kuku kolonialismenya di Indonesia. Setelah, Belanda merasa putus asa dalam menggunakan strategi militer dalam menaklukkan Islam di Indonesia dan kemudian menggunakan strategi sekulerisme dalam melemahkan dan menyingkirkan Islam di Indonesia, Islam pun mampu memberikan respons yang seimbang, malah Islam justru memberikan solusi yang jauh lebih terukur secara intelektual dalam melayani strategi sekulerisme yang diprogramkan Belanda itu.

Islam sebagai agama yang berinduk pada Logika Tauhid mampu melahirkan gerakan intelektual di kalangan kaum pribumi Indonesia. H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim, dan Muh. Natsir adalah tiga tokoh intelektual Islam

dari kalangan kaum pribumi yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Mereka menolak penjajah Belanda dengan menggunakan logika Tauhid sebagai logika berpikirnya. Sebenarnya, mereka ini adalah anak-anak yang diprogram oleh Belanda untuk menjadi generasi sekuler, namun setelah mereka mencoba memahami Islam dengan baik dan benar, maka terbukalah kedok kerancuan logika Sekuler yang diprogramkan Belanda itu. Mereka mengetahui, bahwa logika Sekuler mengandung kerancuan sebagai logika berpikir, karena logika Sekuler memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan dunia. Setelah mereka memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, barulah mereka menyadari, bahwa logika Tauhid yang menjadi induk dari ajaran Islam adalah logika berpikir yang jauh dari kerancuan. Logika Tauhid adalah logika berpikir yang benar, sempurna dan paripurna, yang akan memberikan dua surga sekaligus kepada manusia, apabila mau belajar memahami dan mempraktekkannya dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi pergerakan, logika Tauhid adalah logika yang merdeka dan memerdekakan. Logika Tauhid adalah logika keadilan dan anti pada penindasan. Di dalam logika Tauhid, aspek kemaslahatan sangat diperhatikan. Seorang manusia yang memiliki logika Tauhid yang baik dan benar, maka perilakunya akan mencerminkan perilaku yang akan membawa pada kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Perilaku buang hajat yang begitu sederhana tetap mendapat perhatian dari Islam. Rasulullah sudah memberikan panduan yang jelas dalam melakukan buang hajat, agar perilaku buang hajat itu bisa mencerminkan logika Tauhid sebagai logika yang berkeadilan yang mampu menjaga aspek kemaslahatan diri dan lingkungan dari setiap perilaku. Melalui sebuah haditsnya, Rasulullah memberikan panduan: "Jangan buang air di lubang binatang, di jalan tempat orang yang lewat, di tempat orang berteduh, di sumber air, di tempat permandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir kearah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci." (H.R. Muslim dan Tirmidzi).⁸

Hadits di atas mencerminkan sekali, bahwa Islam dengan logika Tauhidnya sangat mempertimbangkan aspek keadilan dari setiap perilaku. Keadilan itu adalah salah satu inti dari ajaran Islam. Apabila itu ditegakkan dengan baik dan benar, maka akan lahir "rasa keadilan" di dalam diri dan lingkungan di mana saja seorang muslim berada. "Rasa keadilan" inilah yang sudah diinjak-injak oleh Belanda sejak ia datang pada tahun 1596. Jadi sangat wajarlah Islam

sebagai agama yang dibangun di atas logika Tauhid yang lurus akan selalu menjadi nilai yang tidak akan pernah berkompromi dengan Belanda yang selalu menunjukkan perilaku yang menindas sebagai Kolonial.

4.5 Generasi Sekuler dan Generasi Islam Sama-Sama Berjuang Meraih Kemerdekaan Indonesia

Menurut logika berpikir, kaum pribumi sudah terpecah menjadi dua, yaitu logika Sekuler dan logika Tauhid. Namun, kedua generasi baru Indonesia ini, baik yang berasal dari logika sekuler, maupun yang berasal dari logika Tauhid sama-sama berjuang dengan logikanya masing-masing. Mereka ingin mendirikan Indonesia baru yang merdeka yang terbebas dari penjajahan Belanda. Kemerdekaan Indonesia adalah tujuan bersama mereka.

Dalam proses mewujudkan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, generasi sekuler dan generasi Islam berhasil membangun sebuah *MoU* yang dijadikan panduan dasar dalam mengisi Indonesia Baru yang sementara diperjuangkan kemerdekaannya. Pancasila Islami⁹ yang tertuang di dalam Piagam Jakarta¹⁰ merupakan *MoU* dari dua generasi ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua generasi ini berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno sebagai pemimpin utama generasi sekuler Indonesia melakukan pengkhianatan. Soekarno berhasil merubah Pancasila Islami sebagai *MoU* bersama antara generasi sekuler dengan generasi Islam menjadi Pancasila Sekuler, sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Secara filosofi, lahirnya Pancasila Sekuler adalah merupakan kematian bagi logika Tauhid dalam konteks kenegaraan. Indonesia baru dibangun sepenuhnya dengan logika sekuler. Pendidikan sekuler ala Belanda dijadikan sistem pendidikan resmi di Indonesia.

Dalam waktu yang bersamaan, Belanda masih ingin menikmati Indonesia yang indah ini. Sayang sekali untuk ditinggalkan. Demikianlah perilaku kolonial yang selalu ingin menikmati kesenangan, walaupun kesenangan yang dinikmati itu adalah sebuah penderitaan bagi orang lain. Namun mereka tidak memperdulikannya. Kesenangan itu hanya milik mereka, orang lain, silakan hidup menderita. Dengan logika kolonial seperti ini, maka Belanda dengan segala cara berusaha kembali untuk menjajah Indonesia. H.J. van Mook adalah orang Belanda yang ditugaskan untuk bisa meraih tujuan ini. Dalam suasana genting seperti ini, ulama dan intelektual Islam yang sudah ditipu oleh generasi

sekuler binaan Belanda, dengan menjadikan sekulerisme sebagai panduan dasar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, tetap mampu berpikir dan bertindak positif. Hati mereka memang kecewa dengan dirubahnya Pancasila Islami yang ada di dalam *MoU* bersama yang bernama Piagam Jakarta, namun melayani Belanda sebagai perancang Sekulerisme di Indonesia adalah merupakan suatu hal yang sangat utama. Soekarno pun memberikan penjelasan, bahwa Pembukaan dan UUD 1945 yang dirumuskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah Dasar Negara Indonesia yang bersifat darurat dan sementara, yang hanya dijadikan sebagai salah satu syarat sah bagi berdirinya sebuah negara yang merdeka. Apabila Belanda sudah diusir dari Indonesia dan kondisi negara sudah stabil, maka para ulama, intelektual dan pemimpin Islam akan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan secara baik-baik bagaimana kedudukan Islam di dalam negara Indonesia. Para ulama, intelektual dan pemimpin Islam cukup mampu menerima alasan itu, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam berjuang dan mengawal keutuhan Nasionalisme Indonesia yang ingin dirusak oleh Belanda. Logika Tauhid yang ada di dalam diri mereka telah mampu membuat mereka memaafkan kesalahan Soekarno yang telah mengusik "Rasa Keadilan" umat Islam yang ingin hidup di atas syariat Islam. Mereka pun bersedia bekerjasama kembali dengan generasi sekuler Indonesia dalam mengusir Belanda sebagai perancang sekulerisme yang ingin menjajah Indonesia kembali. Memaafkan generasi sekuler dan berjuang bersama dengan generasi sekuler yang telah melukai "rasa keadilan" Islam sebagai logika perjuangan yang paling tua di Indonesia, maka para ulama, intelektual dan pemimpin Islam telah berhasil memotong Logika Belanda untuk berkuasa kembali dengan cara memecah belah "Rasa Nasionalisme Indonesia."

Istilah "jihad" dimunculkan lagi sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda. Para ulama, intelektual dan pemimpin Islam rela berkorban demi membela kemerdekaan Indonesia dari usaha Belanda yang ingin menggerogotinya. Revolusi kemerdekaan dikumandangkan di seluruh wilayah Indonesia. Para pemimpin sekuler cukup menikmati bagaimana ampuhnya seruan "jihad" dalam mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Islam kembali menjadi agen pemersatu yang paling kuat dalam menentang kehadiran Belanda di Indonesia. Teuku Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama Aceh yang kharismatik mengatakan

kepada Soekarno, bahwa berjihad melawan Belanda adalah suatu hal yang biasa bagi rakyat Aceh. Berjihad melawan Belanda merupakan pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh orang Aceh sejak dulu. Soekarno tidak usah khawatir dengan komitmen orang Aceh dalam menentang kehadiran Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Teuku Muhammad Daud Beureueh hanya memberikan satu syarat saja, dan itu adalah jabaran dari logika Tauhid, yang menjadi logika perjuangan orang Aceh. Syarat yang satu adalah apabila Indonesia meraih kemerdekaan penuh, maka beri kesempatan pada orang Aceh untuk menjalankan Syariat Islam, aturan dasar yang diyakini oleh orang Islam yang bisa memberikan kebahagiaan hidup di dunia, dan di akhirat.

Itulah sedikit data tentang bagaimana komitmen para ulama, intelektual dan pemimpin Islam dalam berkorban menjaga keutuhan Nasionalisme Indonesia. Pengorbanan mereka itu adalah cerminan dari logika Tauhid yang begitu cinta pada keadilan dan kemanusiaan, yang begitu cinta pada persatuan dan kesatuan sebagai simbol Nasionalisme Indonesia. Keadilan dan kemanusiaan, kesatuan dan persatuan merupakan beberapa nilai-nilai dasar yang hidup di dalam diri orang-orang yang berpegang kuat pada logika Tauhid.

Para ulama, intelektual dan pemimpin Islam kembali berjuang bersama-sama dengan generasi sekuler Indonesia dalam membela kemerdekaan Indonesia dari usaha Belanda yang ingin memecahbelah Nasionalisme Indonesia. Mereka berpikir, apabila Nasionalisme Indonesia bisa dipecah oleh Belanda, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945 terancam melemah dan tinggal namanya saja. Berjuang dan mengawal keutuhan Nasionalisme Indonesia adalah sebuah harga mati bagi kaum pribumi Indonesia jika tidak mau lagi dijajah oleh Belanda, sang kolonial dari Eropa. Para ulama, intelektual dan pemimpin Islam telah menyadari, bahwa berjuang dan mengawal Nasionalisme Indonesia yang sudah diperjuangkan selama ratusan tahun adalah sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Semua elemen Islam ikut ambil bagian dalam upaya berjuang dan membela keutuhan Nasionalisme Indonesia itu.

Dalam konteks berjuang dan membela keutuhan Nasionalisme Indonesia dari upaya Belanda yang ingin memecahbelah Nasionalisme Indonesia tersebut, peran Sultan Zainal Abidin Syah sebagai seorang Sultan yang hidup di atas logika Tauhid memiliki makna yang begitu besar didalamnya.

Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-35 adalah seorang pemimpin Islam yang begitu intelektual. Intelektualitas yang dipandu dengan logika Tauhid membuat Sang Sultan mampu merasa ringan dalam mengambil kebijakan yang begitu strategis di saat yang tepat. Kebijakan yang begitu strategis dan tepat itu adalah kebijakan Sultan Zainal Abidin Syah yang menyatukan wilayah Kesultanan Tidore yang membentang dari pulau Tidore hingga ke Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru berdiri pada tahun 1945. Pilihan ini adalah pilihan sadar dari Sang Sultan, karena di dalam dirinya telah tertanam logika Tauhid, sebuah logika berpikir yang begitu mencintai keadilan, persatuan dan kesatuan dan sangat membenci yang namanya penindasan dan perpecahan. Logika Tauhid telah membuat Sang Sultan menolak bergabung dengan Kerajaan Belanda dan menolak pula menjadi negara yang merdeka yang berdiri sendiri. "rasa keadilan", "rasa persatuan dan kesatuan", "rasa senasib dan sepenanggungan" yang terbangun di atas logika Tauhid telah membuat Sang Sultan memilih dengan mantap untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4.6 Mengenal Sultan Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-35. Ia dilahirkan di lingkungan istana Kesultanan Tidore pada 5 Agustus 1912. Ia adalah putra sulung dari pasangan Dano Husain bin Pangeran Sangaji bin Pangeran Abubakar bin Sultan Ahmad Syaifuddin Alting (Sultan Tidore ke-32, 1857-1865). Ibunya bernama Dano Salma binti Dano Yusup. Sultan Zainal Abidin memiliki empat saudara, tiga laki-laki dan seorang perempuan. Mereka itu adalah Dano Amiruddin, Dano Kawiyuddin, Dano Idris, dan Boki Ibrahim. Di kalangan saudara-saudaranya, Sultan Zainal Abidinlah yang banyak mengenyam pendidikan Barat, karena ia memiliki kemampuan intelektual yang cukup lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain.¹¹

Secara referensi, sosok Sultan Zainal Abidin Syah masih kurang kajian-kajian ilmiah yang menulis tentang dirinya. Kehadiran artikel ini adalah salah satu usaha untuk menjelaskan betapa besarnya makna kehadirannya sebagai sosok yang begitu cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui referensi yang cukup terbatas, penulis mencoba memberikan gambaran bagaimana peran yang dimainkan oleh Sultan Zainal Abidin Syah ini dalam

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang ingin dirusak oleh Belanda, yang masih terlena dengan keindahan bumi Indonesia.

Sikap yang diambil oleh Sultan Zainal Abidin Syah ini tentu mendapatkan inspirasi dari nilai-nilai Islam yang begitu cinta pada keadilan dan persatuan. Dalam sejarah Kesultanan Tidore, langkah yang diambil oleh Sultan Zainal Abidin Syah ini bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Sultan Nuku merupakan salah satu Sultan Tidore yang begitu kuat dalam menjaga harga diri Kesultanan Tidore dari perilaku penjajah Belanda. Dalam sejarah Kesultanan Tidore, Sultan Nuku berhasil memerdekakan Kesultanan Tidore dari Belanda, dan juga sekaligus berhasil mengawal kemerdekaan Kesultanan Tidore hingga akhir hayatnya. Sultan Nuku tidak hanya merdeka dari pengaruh Belanda, namun Sultan Nuku juga berhasil membawa Kesultanan Tidore meraih masa keemasannya. Pada masa keemasannya, wilayah Kesultanan Tidore sampai ke wilayah Papua. Inilah yang menjadi salah satu dasar historis, bahwa wilayah Papua sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Tidore. Dengan demikian, posisi Kesultanan Tidore sangat menentukan posisi Papua. Jika Kesultanan Tidore memutuskan untuk bergabung dengan Belanda, maka secara historis, Papua akan terikat dengan sendirinya, begitu pun sebaliknya. Mengapa demikian, karena Papua masih merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Tidore yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu. Pada posisi inilah kedudukan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Sultan Tidore sangat strategis dalam percaturan politik antara Indonesia dan Belanda. Siapakah yang berhasil membujuk Sultan Tidore, Belanda atau Indonesia? Atau Sultan Tidore punya pilihan bebas sendiri berdasarkan mentalitas yang ia miliki, sehingga ia memutuskan untuk mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta? Menariknya lagi, ada pilihan lain, yaitu Sultan Tidore diberikan kesempatan untuk menjadi negara merdeka bersama Papua, namun Sultan Zainal Abidin Syah lebih memilih menjadi bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta.

Pilihan Sultan Zainal Abidin Syah adalah mencerminkan mentalitasnya sebagai seorang ahli tauhid, yang anti pada penjajahan dan cinta pada keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sultan Nuku pada akhir abad ke-18. Sebagai seorang ahli tauhid, walaupun Sultan Zainal Abidin Syah adalah seorang sultan yang dibesarkan di dalam istana, namun itu semua tidak

membuat Sultan Zainal Abidin Syah tampil sebagai seorang yang feodal. Sultan Zainal Abidin Syah mampu menjadi seorang pribadi yang berjiwa keadilan yang mampu merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya. Logika Tauhid mampu membantu Sultan Zainal Abidin Syah menjadi sultan yang begitu dekat dengan rakyat. Ia bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang derajat dan status sosialnya. Ia adalah seorang yang berjiwa merdeka dan punya kepekaan sosial yang cukup tinggi, karena itu ia sangat disenangi oleh masyarakat yang ada di sekitarnya.¹² Pemimpin seperti inilah yang diinginkan oleh logika Tauhid, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin di dalam sejarah peradaban Islam.

4.7 Riwayat Pendidikan Sultan Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin memulai pendidikan formalnya di *Holland Inlander School (HIS)*. Ia masuk *HIS* pada 1920. *HIS* adalah sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda khusus untuk anak-anak bangsawan, pegawai negeri, orang Eropa, keturunan Arab dan Cina, termasuk anak-anak pribumi yang memiliki kekayaan yang mumpuni. Pada 1927, Zainal Abidin lulus dari *HIS* dan melanjutkan studi di *MULO* Batavia (Jakarta) sampai selesai pada 1930. Kemudian ia melanjutkan studinya di *Opleiding School voor Inlandesche Ambtenaar (OSPIA)* Makassar. Pada 1934, ia berhasil menyelesaikan studinya di *OSPIA* Makassar dan kembali ke Tidore dengan membawa titel sebagai pamong. Ia langsung ditugaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *ambtenaar* (pegawai pemerintah) yang diperbantukan di *Hoofd Pleat Bestuur (HPB)* Ternate.¹³

Pada September 1935, Zainal Abidin dipindahkan dari Ternate ke Manokwari. Di Manokwari, ia diangkat sebagai *Hulp Bestuur Assissten* (Asisten Kepala Pemerintahan) Distrik Momi Manokwari. Pada 1937, ia dipindahkan lagi dari Monokowari ke Sorong sebagai *Bestuur Assissten*. Pada 1940, ia dipindahkan kembali ke Manokwari sebagai *Hulp Bestuur Assissten*. Ditempatkannya Zainal Abidin di berbagai tempat di Papua adalah bagian dari strategi Pemerintah Hindia Belanda untuk meredam gejolak anti Belanda di tanah Papua.¹⁴ Pada akhir 1940, ia dikembalikan ke Ternate dengan jabatan sebagai *Ambtenar Pembantu Assissten Residen* (Pegawai Asisten Kepala Daerah). Jabatan ini dipegangnya hingga 1942, ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang.¹⁵

Setelah Jepang menguasai Maluku Utara dari Hindia Belanda, Jepang mengangkat Zainal Abidin sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja Tidore

yang berkedudukan di Soa-Sio. Pada 1944, Zainal Abidin diangkat oleh Jepang sebagai Kepala Kehakiman di Ternate. Pada 1945, Zainal Abidin ditahan oleh Jepang, karena ia dicurigai telah membocorkan rahasia militer Jepang serta menjadi mata-mata Sekutu. Zainal Abidin kemudian diasingkan ke Jailolo dan kemudian dijadikan sebagai tenaga *romusha*.¹⁶ Ketika tentara Sekutu berhasil mengambil alih wilayah Maluku Utara dari pendudukan tentara Jepang pada 1945, Zainal Abidin pun dibebaskan dari penahanannya. Ia dibawa ke Ternate, selanjutnya diangkat sebagai *jogugu* di Tidore.¹⁷

4.8 Perilaku Mulia Sultan Zainal Abidin Syah dalam Berjuang dan Mengawal serta Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada bulan Juni 1945, gerakan sekulerisme muda Indonesia dan gerakan Islam Indonesia berhasil bersatu dalam satu wadah yang bernama BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Melalui perdebatan yang begitu sengit antara kubu sekuler dan kubu Islam, orang-orang Indonesia yang ada di dalam BPUPKI berhasil merumuskan sebuah konsep Indonesia baru yang merdeka. Piagam Jakarta, yang penulis sebut dengan istilah Pancasila Islami dijadikan sebagai *MoU* (pijakan bersama) dalam rangka membangun Indonesia baru yang akan dimerdekakan itu. Konsep itu berhasil bertahan hingga diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sehari setelah Indonesia merdeka, konsep Piagam Jakarta (Pancasila Islami) itu dimentahkan lagi oleh Soekarno melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Melalui sidang PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta (Pancasila Islami) berhasil dirubah menjadi Pembukaan UUD 1945, atau penulis sebut dengan istilah Pancasila Sekuler. Secara ideologi politik, ini menandakan, bahwa kelompok sekuler Indonesia sejalan dengan tuannya, yaitu Belanda. Kaum sekuler Indonesia suka sekali bermain akal-akalan dalam ranah politik. Melalui politik akal-akalan itu, kaum sekuler Indonesia berusaha memimpin Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Melalui politik akal-akalan, kaum sekuler dibawah pimpinan Soekarno segera bergerilya mencari dukungan pada para ulama dan intelektual Islam Indonesia untuk melawan Belanda yang ingin menikmati keindahan Indonesia yang terlalu sayang untuk ditinggalkan. Istilah "Jihad" dihidupkan kembali di kalangan umat Islam dalam rangka menggali spirit perlawanan terhadap Belanda yang ingin

kembali menjajah Indonesia. Istilah “Jihad” ini betul-betul terbukti ampuh dalam memberikan inspirasi perjuangan pada umat Islam Indonesia dalam menentang penjajahan.

Pertempuran Surabaya yang diperingati sebagai hari pahlawan nasional yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, dengan semangat “jihad” dan diiringi kalimat “Allahu Akbar”, umat Islam di Jawa Timur mampu membunuh pimpinan pasukan Sekutu di Surabaya. Padahal umat Islam di Jawa Timur pada waktu itu hanya bermodalkan senjata apa adanya. Modal yang paling kuat mereka adalah logika Tauhid, yaitu logika yang menyatakan tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini, kecuali Allah Ta’ala. Suatu logika yang menyatakan, bahwa berperang melawan orang kafir yang akan merusak harga diri umat Islam adalah perang mulia dan wajib dijalankan sampai tegaknya keadilan di muka bumi ini.

Belanda sebagai pihak yang sudah kecanduan dengan bumi Indonesia yang indah ini berusaha melakukan segala usaha yang bisa dilakukan agar Belanda tetap bisa berkuasa dalam rangka menikmati bumi Indonesia yang indah ini bersama kaki tangannya. Dalam upaya merealisasikan tujuan itu, maka Pemerintah Belanda menunjuk Gubernur Jenderal H.J. Van Mook sebagai pelaksana lapangan di Indonesia. Sesuai dengan arahan Pemerintah Belanda Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akan bekerja keras dalam mengembalikan Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan Belanda. Merasa tidak sanggup mengambil alih secara militer, maka Van Mook memulai upaya kolonisasinya dengan menggunakan taktik intelektual. Van Mook berupaya memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Melalui konsep Negara RIS, maka peluang Belanda akan terbuka kembali untuk berkuasa di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan idenya itu, maka pada 20 Juli 1946, Van Mook berhasil mengadakan Konferensi Malino. Konferensi ini berlanjut di Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Dalam konferensi ini, Van Mook secara terang-terangan meminta agar wilayah Papua dipisahkan dari konsep Negara RIS yang akan dibentuknya. Van Mook berusaha agar Papua berada langsung di bawah Kerajaan Belanda.¹⁸ Konferensi Pangkal Pinang berlanjut di Bali pada 18 Desember 1946.

Pada Konferensi Bali, Van Mook melantik Zainal Abidin Syah sebagai Sultan Tidore, yang sebelumnya ia telah menjabat sebagai *jogugu* di Tidore. Dalam Konferensi Bali, Van Mook berhasil membentuk Negara Indonesia Timur

(NIT). Selain itu, Van Mook tetap bersikeras agar wilayah Papua tidak dimasukkan ke dalam wilayah NIT sebagai bagian dari Negara RIS. Sikap Van Mook ini mengundang reaksi keras dari Zainal Abidin sebagai Sultan Tidore. Sultan menyatakan bahwa secara historis, Papua adalah bagian Kesultanan Tidore, karena itu Papua harus menjadi bagian dari RIS. Sikap Zainal Abidin ini didukung pula oleh E. Katoppo, wakil dari Minahasa, yang menegaskan bahwa wilayah Papua tidak bisa dilepaskan dari wilayah RIS, karena Papua adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda.¹

Perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah dalam mempertahankan wilayah Papua sebagai bagian dari Negara RIS tidaklah sia-sia, karena ia berhasil memotong logika Van Mook yang ingin memisahkan wilayah Papua dari konsep Indonesia. Atas perjuangan Zainal Abidin, maka lahirlah ayat tambahan pada pasal 15 Hukum Ketatanegaraan NIT. Dalam pasal 15 ayat 13 ditegaskan bahwa "Daerah Maluku Utara terdiri dari daerah Swapraja Ternate, Tidore, dan Bacan yang sama-sama terikat dalam suatu federasi", ditambah sisipan "termasuk Irian Barat" sesudah kata Tidore."²⁰

Menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda yang berlangsung pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pemerintah Belanda secara intern melakukan upaya pemisahan wilayah Papua dari Kesultanan Tidore. Upaya itu ditandai dengan dikeluarkannya sebuah nota atas nama Wali Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, De Wall (Penasehat Pemerintah Belanda urusan perundang-undangan organik). De Wall mengusulkan agar Sultan Tidore diberi peran dalam kabinet NIT, dengan harapan bisa mempermudah usaha Belanda dalam memisahkan wilayah Papua dari Kesultanan Tidore. Namun usaha itu juga mengalami kegagalan, karena Sultan Zainal Abidin Syah adalah seorang Sultan yang sangat mencintai Indonesia. Belanda tetap tidak berputus asa dalam upaya memisahkan wilayah Papua dari Indonesia. Gagal dengan cara terang-terangan, Belanda pun menggunakan cara halus, yaitu dengan membujuk Sultan Zainal Abidin Syah melalui jabatan. Atas dasar itu, Belanda mengusulkan agar Sultan Zainal Abidin Syah diberi jabatan strategis di dalam kabinet NIT. Dengan memberikan kedudukan strategis itu, Belanda berharap Sultan Zainal Abidin Syah bisa lebih lunak dalam bekerjasama dengan Belanda guna memisahkan wilayah Papua dari wilayah Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, maka pada Februari 1949, Belanda mengundang Sultan Zainal Abidin Syah bersama para *bobatonya* untuk datang di Papua. Sesampainya di Papua, Sultan dibujuk oleh Belanda untuk menandatangani sebuah perjanjian yang isinya telah disusun oleh Pemerintah Belanda di Den Haag melalui Wali Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia dengan maksud agar Sultan menyerahkan wilayah Papua kepada Kerajaan Belanda. Namun Belanda tidak berhasil membujuk sultan untuk menandatangani perjanjian itu. Sultan Zainal Abidin Syah tetap berpendirian teguh bahwa wilayah Papua merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Tidore, sehingga wilayah Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.²¹

Pihak Belanda memang tidak berhasil membujuk Sultan untuk menyerahkan wilayah Papua menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, namun hal itu tidak membuat pihak Belanda patah semangat untuk mencari cara lain untuk menjadikan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Hal itu terlihat jelas pada Perjanjian KMB, dimana pihak Belanda tetap bersikeras menjadikan wilayah Papua sebagai wilayah koloninya. Pada awal 1950, Belanda mengangkat S.I.J. Van Wanderburg menjadi Gubernur *Nederlandesce Nieuw Guinea*, nama baru yang diberikan Belanda atas wilayah Papua. Gubernur ini berkedudukan di Jayapura dan dibantu oleh tiga residen, yang ditempatkan di Jayapura, Monokowari, dan Merauke.²²

Pasca terjadinya Perjanjian KMB, Pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam dalam upaya menyatukan Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah Papua dibahas secara bersama dengan Belanda di New York, namun Pemerintah Republik Indonesia gagal dalam perundingan ini. Setelah gagal dalam perundingan di New York, maka pengaruh Zainal Abidin Syah selaku Sultan Tidore yang memiliki kekuasaan secara historis terhadap Papua merupakan satu-satunya ujung tombak Pemerintah Republik Indonesia dalam merangkul Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertarungan kepentingan antara Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dalam merangkul Papua telah mengundang perhatian PBB. Lagi-lagi Sultan Zainal Abidin Syah merupakan titik kunci dalam menentukan kepada siapa wilayah Papua diberikan. Sultan Zainal Abidin Syah selaku tokoh yang nasionalis dan religius dapat dilihat ketika Sultan diberi kebebasan memilih oleh PBB pada tahun 1952. Pada tahun itu, PBB berhasil

memprakarsai sebuah perundingan di Malino Makassar yang membahas masalah wilayah Tidore dan Papua dalam kepentingan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Di dalam perundingan itu, Sultan Zainal Abidin Syah diberikan hak penuh oleh PBB untuk menentukan nasib wilayah Papua. PBB memberikan tiga opsi kepada Sultan Zainal Abidin Syah. Tiga opsi itu adalah sebagai berikut:

1. Papua bersama Tidore menjadi negara merdeka;
2. Papua bersama Tidore berdaulat di bawah Kerajaan Belanda;
3. Papua dan Tidore bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²³

Jika dikaji secara ekonomi, maka pilihan pertama jauh lebih menguntungkan Kesultanan Tidore, karena Tidore berpeluang menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri dan diakui oleh dunia internasional. Namun, Sultan Zainal Abidin Syah tidak melakukan itu. Sultan Zainal Abidin Syah lebih memilih opsi yang ketiga, yaitu menyatukan wilayah Tidore dan Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan ini cukup merugikan Tidore sebagai sebuah kesultanan yang begitu tua dan berpengaruh dalam kancah politik di Timur Indonesia. Kesempatan untuk membangun Tidore yang merdeka cukup berpeluang, tapi inilah bukti nyata dari keberpihakan Sultan Zainal Abidin Syah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan Sultan Zainal Abidin Syah untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat mengejutkan Belanda. Van Mook selaku perwakilan Belanda berharap sultan memilih opsi kedua, atau setidaknya tidaknya opsi yang pertama, di mana Tidore dan Papua menjadi negara merdeka. Dengan memilih opsi pertama, maka Belanda melalui tokoh-tokoh Papua yang radikal dengan mudah memisahkan Papua dari Kesultanan Tidore.²⁴

Dengan adanya pilihan tegas dari Sultan Zainal Abidin Syah untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Presiden Soekarno mendapat legitimasi secara internasional melalui PBB bahwa wilayah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditarik dari sejarah Kesultanan Tidore. Sebagai tindak lanjut dari pilihan tegas Sultan Zainal Abidin Syah ini, maka pada 1956 Sultan Zainal Abidin Syah diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat (Papua) yang berpusat di Soa Sio Tidore. Selaku Gubernur Provinsi Perjuangan Irian

Barat, Sultan Zainal Abidin Syah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, karena secara adat, Sultan Zainal Abidin Syah juga memiliki gelar sebagai Sultan Papua III.²⁵

Sultan Zainal Abidin Syah rela menjadi bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun itulah buah dari logika Tauhid yang ada di dalam diri Sultan Zainal Abidin Syah. Logika Tauhid telah mampu membantu Sultan Zainal Abidin Syah merasa ringan dalam mengorbankan kepentingan Kesultanan Tidore demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam logika Tauhid, perilaku rela berkorban itu bukanlah suatu hal yang baru. Dalam konteks ke-Indonesiaan, itu sudah diperlihatkan oleh Teuku Muhammad Daud Beureueh, selaku ulama kharismatik di Aceh, sudah diperlihatkan oleh Jendral Soedirman selaku sesepuh militer di Indonesia, sudah diperlihatkan oleh Syarifuddin Prawiranegara dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), sudah diperlihatkan oleh ulama-ulama NU dari Jawa Timur dalam berjihad di Surabaya yang telah berhasil menewaskan Jenderal Mallaby, pemimpin tentara Sekutu di Indonesia, sudah diperlihatkan oleh para aktivis Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang menentang keberadaan Negara NIT. Para aktivis Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengatakan NIT sebagai Negara Ikut Tuan. Para aktivis Muhammadiyah Sulawesi Selatan harus rela membayar komitmen mereka itu dengan genangan darah lewat operasi yang dilakukan oleh pasukan Westerling yang sengaja diturunkan Belanda untuk menumpas orang-orang Sulawesi Selatan yang masih berkomitmen dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),²⁶ Agus Salim adalah intelektual muslim yang menguasai tujuh bahasa dunia rela berkorban menjalani hidup yang sederhana. Muh. Natsir, seorang intelektual muslim yang rela hidup sederhana dengan mengenakan jas yang masih ada tambalnya, padahal jabatannya adalah seorang menteri negara, Buya Hamka yang telah siap menjadi imam shalat mayit atas jenazah Soekarno, seorang tokoh sekuler yang telah menahan dan memenjarakan Buya Hamka di era kekuasaannya.²⁷ Jika mau dirunut ke belakang, apalagi, jika kita ingin menggantinya dalam ranah sejarah peradaban yang lebih luas, maka kita akan menemukan perilaku-perilaku rela berkorban yang begitu mulia. Apalagi jika kita menjadikan realitas kehidupan Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wasallam* dengan para sahabatnya sebagai referensi utamanya, maka kita akan menemukan begitu banyak perilaku-perilaku

mulia dalam berkorban demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan, demi tegaknya persatuan dan kesatuan. Itu semua hanya bisa dipahami dengan logika Tauhid, bukan dengan logika lainnya, termasuk logika Sekuler yang lahir dari rahim peradaban Barat. Logika Tauhid adalah logika yang secara sadar mampu membantu manusia merasa lebih ringan dalam melakukan perilaku-perilaku mulia di dalam hidupnya. Perilaku-perilaku mulia itu lahir sebagai bentuk kesadaran mereka yang paling tinggi, bahwa mereka adalah makhluk yang hanya mentauhidkan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Mereka meyakini, bahwa hanya dengan mentauhidkan Allah semata-mata, kebahagiaan hakiki itu bisa lahir dalam arti yang sebenarnya. Mereka menyadari betul, bahwa kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya tidak dapat lahir dari yang lain, kecuali dengan mentauhidkan Allah dengan betul dalam mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini.

V. SIMPULAN

Perilaku mulia yang dicontohkan oleh Sultan Zainal Abidin Syah yang rela menggabungkan wilayah Kesultanan Tidore yang membentang dari Tidore hingga Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan hingga Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah perilaku yang hanya bisa dipahami dengan logika Tauhid, sebuah logika berpikir yang mengajarkan rela berkorban demi keadilan dan kemanusiaan dan sebuah logika berpikir yang mengajarkan betapa indahnya persatuan dan kesatuan. Kolonialisme dalam berbagai bentuknya dan perpecahan dalam berbagai bentuknya sangat dikutuk oleh logika Tauhid.

Logika Tauhid lebih mengedepankan rela berkorban demi keadilan, kemanusiaan, kesatuan dan persatuan. Mengapa demikian, karena kolonialisme dan perpecahan hanya akan membuat manusia hidup dalam penderitaan, sedangkan perilaku rela berkorban dalam menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, kesatuan dan persatuan adalah perilaku mulia yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Sultan Zainal Abidin Syah sudah mencontohkan perilaku yang mulia itu. Sebagai Sultan Tidore ke-35, Sultan Zainal Abidin Syah punya kesempatan secara sah dibawah perlindungan PBB untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka, atau

menjad bagian dari negara Kerajaan Belanda, namun logika Tauhid yang tertanam kuat di dalam dirinya telah membuat Sultan Zainal Abidin Syah mampu memilih secara sadar, tanpa paksaan untuk rela berkorban demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pilihan itu, maka Sultan Zainal Abidin Syah sudah berhasil memotong logika Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Logika Tauhid adalah logika berpikir yang cinta pada pengorbanan dalam kebaikan dan anti pada keserakahan dan keburukan. Itulah yang terlihat dalam realitas sejarah, yang dimulai sejak Nabi Adam *Alaihissalam* hingga saat ini. Semoga kita pun bisa meneladani logika Tauhid ini dalam berperilaku agar nikmat kemerdekaan ini bisa kita nikmati bersama sebagai rakyat Indonesia dalam kerangka yang lebih adil dan lebih manusiawi, yang sejak 71 tahun kemerdekaan Indonesia masih hidup dalam penderitaan, kemiskinan dan kebodohan. Logika Tauhid adalah logika yang membahagiakan, logika yang menyejahterakan sekaligus logika yang memajukan manusia. Namun hanya berlaku bagi yang mau saja, tidak bagi yang lain. *Wallahu 'Alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman. 2009. "Sultan Tidore: Zainal Abidin Syah (1912-1967), Sosok Pemimpin dan Pejuang Pembebasan Irian Barat", dalam *Jurnal Ilmiah Tekstual* Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate, Vol. 7, No. 13, Oktober.
- Abu Hamid. 1990. "Syaikh Yusuf Tajul Khalwati: Suatu Kajian Antropologi Agama", Makassar: Disertasi Program Pascasarjana Unhas.
- Asyumardi Azra. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan.
- Bernard H.M. Vlekke. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Darmawijaya. 2006. *Sejarah Muhammadiyah di Makassar*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Darmawijaya. 2007. *Nikmatnya Tasawuf: Mengupas Kisah Sukses Ulama Tasawuf dalam Islamisasi Nusantara*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Darmawijaya. 2010. *Kesultanan Islam Nusantara*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Darmawijaya. 2011. "Asal-usul Sekulerisme di Indonesia; Sebuah Analisis Berdasarkan Teori Diffusi Kebudayaan", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

- dan Humaniora Vol. 29 No. 1, April 2011*, Jember: Forum Komunikasi Ilmiah Dosen FKIP Universitas Jember dan Lembaga Pusat Pengkajian Pendidikan Sosial dan Ekonomi.
- Darmawijaya. 2014. *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia Sebelum Era Kemerdekaan*, Ternate: Anni Publisihing & Kalika.
- Darmawijaya. 2016. *Sultan-Sultan Legendaris dalam Sejarah Maluku Utara*, Ternate: Anni Publishing & Kalika.
- Darmawijaya. 2016. "Laa ilaaha ilallaah Ideologi Perubahan Holistik (Studi Kasus Perubahan Keperibadian Umar bin Khattab dari Pribadi Jahiliyah menjadi Peribadi Ilahiyah)." Dalam *Jurnal Humano Vol. 7 No. 1*. Ternate: LPPM Unkhair.
- Endang Saifuddin Anshari. 1997. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945; Sebuah Konsesus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hartono Ahmad Jaiz. 1999. *Di Bawah Bayang-Bayang Soekarno Soeharto Tragedi Politik Islam Indonesia dari Orde lama hingga Orde Baru*. Jakarta: Darul Falah.
- Irza Arnyta Djafaar. 2005. *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal: Biografi Politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Syah*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Iwan Muraji. 2009. "Perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah dalam Pembebasan Irian Barat 1946-1967", Ternate: Skripsi Prodiil Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate. Tidak diterbitkan.
- Lathiful Khuluq. 2002. *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam: Biografi C. Snouck Hurgronje*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Adnan Amal. 2010. *Kepulauan Rempah-Rempah*, Jakarta: Gramedia.
- M. Solihin. 2007. *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga Modern*, Bandung: Pustaka Setia.
- m.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2009/12/21/2135/haram-buang-air-sembarangan.html.
- Qosim Nursheha Dzulhadi. 2013. *Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia*, Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Raghib As Sirjani. 2011. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Robert van Niel. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sholihan. 2008. *Modernitas, Postmodernitas & Agama*, Semarang: Walisongo Press.
- Tim Redaksi Era Muslim. t.t. "Snouck Hurgronje, Siapa Dikau", dalam *Era Muslim*, "The Untold History: Konspirasi Penggelapan Sejarah di Indonesia (Pra Islam hingga abad ke-19)," *Edisi Koleksi 9*. Jakarta: PT. Era Muslim Global Media.
- Tim Redaksi. 2015. "Menghidupkan kembali Keteladanan Pendiri Bangsa" dalam *Integrito Vol. 43/VII/Maret April*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Footnotes)

¹ Fakta ini membuktikan, bahwa pendidikan sangat berperan penting di dalam membangun kesadaran kritis manusia. Melalui proses pendidikan, maka manusia akan mulai bertanya tentang siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mulai bersikap kritis atas realitas yang mengitarinya. Mereka pun mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dan kemudian memperjuangkan jawaban yang mereka temukan itu. Jika kita ingin merubah suatu keadaan, maka rubahlah dulu cara berpikinya dan pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam merubah pola pikir itu. Dalam rangka memperkaya wawasan tentang lahirnya generasi baru sekuler Indonesia, lihat: Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009).

² Untuk memahami asal-usul sekulerisme lebih jauh lihat: Darmawijaya, *Asal-usul Sekulerisme di Indonesia; Sebuah Analisis Berdasarkan Teori Diffusi Kebudayaan*, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora*, (Jember: Forum Komunikasi Ilmiah Dosen FKIP Universitas Jember dan Lembaga Pusat Pengkajian Pendidikan Sosial dan Ekonomi, Vol. 29 No. 1, April 2011). M. Solihin, *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik hingga Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 244. Sholihan, *Modernitas, Postmodernitas & Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 3. Qosim Nursheha Dzulhadi, *Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013).

³ *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, karya Raghib As Sirjani adalah karya ilmiah yang sangat bagus untuk dibaca agar kita bisa memahami, bahwa Islam dan para ilmuwan Islam telah berhasil membangun peradaban yang begitu agung di masa lalu terhadap peradaban dunia. Buku ini bisa dijadikan rujukan sejarah untuk membantah teori sekulerisme yang menyatakan, bahwa agama harus dipisahkan dari negara, jika negara ingin meraih kemajuan

dalam bidang peradaban. Buku yang ditulis oleh ilmuwan Mesir ini merupakan bukti sejarah yang bisa dijadikan rujukan, bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara agama dan ilmu. Buku setebal 862 halaman ini sangat layak untuk dibaca, karena kaya dengan data tentang keagungan peradaban Islam di masa lalu. Lihat: Raghieb As Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011).

⁴ Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 203 dan dikutip pula oleh Luthfi Assyaukanie dalam kata pengantar buku yang sama.

⁵ *Ibid.* Kajian yang lebih luas tentang Syekh Yusuf Al Makassar sebagai ulama sekaligus pemimpin Jihad atas “Kafir Londo” bisa dilihat pula pada: Asyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994). Abu Hamid, Syaikh Yusuf Tajul Khalwati: *Suatu Kajian Antropologi Agama*, (Makassar: Disertasi, 1990). Darmawijaya, *Nikmatnya Tasawuf: Mengupas Kisah Sukses Ulama Tasawuf dalam Islamisasi Nusantara*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), dan Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010).

⁶ Nama lengkapnya adalah Christian Snouck Hurgronje lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda. Ia merupakan anak keempat dari Pendeta J.J. Snouck Hurgronje dan Anna Maria. Pada usia 17 tahun, Snouck kuliah di Fakultas Teologi di Universitas Leiden. Setelah lulus dari Fakultas Teologi, Snouck melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Leiden untuk mempelajari bahasa dan sastra Arab. Di samping itu, Snouck juga mengembangkan dirinya sebagai seorang ilmuwan Barat (professor) yang mendalami study ke-Islaman dibawah bimbingan “modernis Leiden”. Aliran ini menganggap bahwa agama hanyalah sekedar kesadaran etis yang ada pada setiap manusia dan memandang bahwa dunia Barat memiliki superioritas terhadap dunia Timur. Dari sinilah, Snouck meninggalkan tujuannya semula untuk menjadi pendeta dan beralih untuk mendalami study ke-Islaman. Dalam sejarah Indonesia, Snouck lebih dikenal sebagai “arsitek pelumpuhan Islam”. Lathiful Khuluq, *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam: Biografi C. Snouck Hurgronje*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 12. “Snouck Hurgronje, Siapa Dikau”, dalam Era Muslim, “The Untold History: Konspirasi Penggelapan Sejarah di Indonesia (Pra Islam hingga abad ke-19), Edisi Koleksi 9. (Jakarta: Era Muslim Global Media, tanpa tahun).

⁷ “Snouck Hurgronje, Siapa Dikau”,..... *Ibid.* Baca juga: Hartono Ahmad Jaiz. *Di Bawah Bayang-Bayang Soekarno Soeharto Tragedi Politik Islam Indonesia dari Orde lama hingga Orde Baru* (Jakarta: Darul Falah, 1999). hlm. 5-13.

⁸ m.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2009/12/21/2135/haram-buang-air-sembarangan.html.

⁹ Istilah Pancasila Islami adalah sebuah istilah baru yang penulis munculkan dalam melihat fenomena antara Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta dan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua naskah penting ini tetap menggunakan istilah Pancasila, dalam artian Lima Dasar, namun Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945, walaupun kedua-duanya, sama-sama bernama Pancasila, namun Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta sebagai Pancasila Islami, karena Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta mengandung kalimat perintah yang berkekuatan hukum secara kenegaraan untuk memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengelola kehidupan mereka sesuai dengan syariat Islam, sebuah syariat yang diyakini dan telah terbukti di dalam sejarah mampu memberikan tatanan kehidupan yang bahagia, sejahtera dan berkemajuan bagi umat Islam. Dalam Teori Penciptaan, syariat Islam adalah aturan dasar yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan manusia juga diberi jabatan sebagai pemimpin atas semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka manusia harus mematuhi aturan dasar itu, karena aturan dasar itu dibuat oleh Allah, Sang Maha Pencipta, sudah sesuai dengan kelemahan dan kelebihan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Jika manusia mau bahagia dan sukses menjalani hidup sekaligus dengan jabatanan kepemimpinannya di muka bumi, maka manusia harus memahami aturan dasar itu dan kemudian dijadikan pedoman dasar dalam mengelola bumi yang satu ini. Jika manusia enggan menggunakan aturan dasar yang diberikan oleh Allah, sebagai Sang Maha Pencipta, dan kemudian membuat aturan dasar sendiri, maka aturan dasar yang dibuat secara bebas oleh manusia itu akan berpotensi besar membuat manusia gagal menjalani hidup dan menjalankan tugas kepemimpinan di muka bumi. Hal itu bisa terjadi karena kemampuan manusia untuk berpikir sehat sangat terbatas, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi seorang manusia untuk bias membuat aturan yang betul-betul positif, yang bisa menjamin manusia hidup bahagia, sejahtera dan maju selama hidup di bumi. Jadi sebaik aturan dasar adalah aturan dasar yang dirumuskan oleh Allah, Sang Maha Pencipta, karena Dia-lah yang lebih tahu, kelebihan dan kelemahan manusia sebagai makhluknya dan Dia-lah yang lebih tahu tentang langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, karena semuanya adalah ciptaan Allah itu sendiri. Dalam hal ini syariat Islam dipahami sebagai aturan dasar yang diciptakan oleh Allah, Sang Pencipta Manusia dan alam yang mengitarinya agar manusia bias menggunakan aturan dasar itu untuk meraih kehidupan yang bahagia, sejahtera dan maju selama di bumi. Kemudian mengapa Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan sebagai Pancasila Sekuler? Jawabannya adalah karena sila pertama dalam sila itu tidak mencerminkan sebuah rumusan hukum atas pelaksanaan syariat Islam sebagai aturan dasar bagi manusia yang diyakini oleh umat Islam. Sila pertama dalam Pancasila Sekuler lebih dimaknai sebagai agama dalam arti ibadah ritual yang dimiliki semua agama yang ada di Indonesia. Hal itu tegaskan kembali dalam UUD 1945 dalam pasal 29, yang menyatakan,

bahwa agama hanya dipahami dalam konteks sebuah keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual, seperti beribadah ke gereja bagi orang Kristen, beribadah ke Pura bagi orang Hindu, dan beribadah ke masjid bagi orang Islam. Penulis melihat, pemaknaan agama dalam konteks Pancasila Sekuler hanya dipahami sebatas ibadah ritual semata dan pemaknaan ini memang sejalan dengan logika Sekuler yang memisahkan urusan agama dan urusan dunia secara tajam. Di dalam logika Sekuler, urusan agama hanya dipahami sebatas ibadah ritual semata, yang menjadi hak setiap individu, namun dalam urusan dunia, logika Sekuler tidak lagi berbicara agama, karena urusan dunia diserahkan kepada para ilmuwan atau para saintis, yang hidup dengan menggunakan metode ilmiah. Di sinilah letak perbedaan Islam sebagai agama dengan berbagai agama lainnya di dunia. Di dalam sejarah Islam, tidak mengenal yang namanya istilah sekuler. Istilah “sekuler” muncul dalam sejarah peradaban Barat dan sangat berkaitan erat dengan logika Trinitas sebagai induk logika Kristen. Di dalam sejarah peradaban Islam, syariat Islam yang berinduk pada logika Tauhid mampu memberikan hidup yang bahagia, sejahtera dan maju bagi manusia, sehingga umat Islam tidak perlu lagi sibuk mencari logika-logika lainnya, seperti sekulerisme, komunisme, postmodernisme dan lain sebagainya. Umat Islam sudah memiliki syariat Islam yang berinduk pada logika Tauhid sebagai panduan dasar mereka untuk meraih kehidupan yang bahagia, sejahtera dan maju. Syariat Islam yang berinduk pada logika Tauhid, bukanlah aturan dasar yang kaku dan ekstrim, namun sangat fleksibel untuk dikembangkan untuk menjadi aturan yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan umat manusia yang semakin berkembang. Kata mengembangkan lebih bermakna berpegang teguh pada aturan dasar yang ada, dan kemudian dikembangkan sesuai dengan aturan dasar yang ada untuk kehidupan yang lebih bahagia, lebih sejahtera dan lebih maju. Sebagai referensi untuk membuktikan, bahwa syariat Islam yang berinduk pada logika Tauhid mampu memberikan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi manusia, lihat: Darmawijaya, “Laa ilaaha ilallah Ideologi Perubahan Holistik (Studi Kasus Perubahan Keperibadian Umar bin Khattab dari Peribadi Jahiliyah menjadi Peribadi Ilahiyah).” Dalam *Jurnal Humano Vol. 7 No. 1*. (Ternate: LPPM Unkhair, 2016).

¹⁰ Kajian tentang Piagam Jakarta sebagai MoU bersama antara generasi Sekuler dan generasi Islam Indonesia sudah dibahas oleh Endang Saifuddin Anshari. Hasil kajiannya sudah terbitkan oleh Gema Insani Pres. Endang Saifuddin Anshari menjelaskan, bahwa Piagam Jakarta sebagai MoU bersama diperoleh dengan susah payah melalui diskusi yang dilakukan oleh generasi sekuler dan generasi Islam Indonesia di dalam sidang BPUPKI. Endang Saifuddin Anshari juga menjelaskan proses perubahan Piagam Jakarta oleh Soekarno melalui sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Endang Saifuddin Anshari juga menjelaskan betapa kecewanya para ulama, intelektual dan pemimpin Islam atas adanya perubahan Piagam Jakarta yang dilakukan oleh Soekarno, pemimpin generasi sekuler Indonesia yang sangat berpengaruh. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: Sebuah Konsesus Nasional tentang*

Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Lihat pula: Darmawijaya, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia Sebelum Era Kemerdekaan*, (Ternate: Anni Publisihing & Kalika, 2014), hlm. 325-342.

¹¹ Abd Rahman, *Sultan Tidore: Zainal Abidin Syah (1912-1967), Sosok Pemimpin dan Pejuang Pembebasan Irian Barat*, dalam *Jurnal Ilmiah Tekstual Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate*, Vol. 7, No. 13, Oktober 2009, hlm. 36. Iwan Muraji, "Perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah dalam Pembebasan Irian Barat 1946-1967", (Ternate: Skripsi Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate, 2009), hlm. 29. Darmawijaya, *Sultan-Sultan Legendaris dalam Sejarah Maluku Utara*, (Ternate: Anni Publishing & Kalika, dalam proses penerbitan), pada bab bagian akhir.

¹² Abd Rahman, *Loc. Cit.*, hlm. 36.

¹³ Iwan Muraji, *Op. Cit.*, hlm. 32

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 42 dan Irza Arnyta Djafaar. 2005, *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal: Biografi Politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Syah*, (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2005), hlm. 116.

²⁰ Iwan Muraji, *Op. Cit.*, hlm. 43.

²¹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 43. M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah*, (Jakarta: Gramedia, 2010). hlm. 483.

²² *Ibid.*, hlm. 44. Lihat juga: Iwan Muraji, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²³ Iwan Muraji, *Op. Cit.*, hlm. 47. Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²⁴ Iwan Muraji, *Op. Cit.*, hlm. 48.

²⁵ Sultan Papua I adalah Sultan Ibnu Mansur dan Sultan Papua II adalah Sultan Nuku.

Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 38.

²⁶ Darmawijaya, *Sejarah Muhammadiyah di Makassar*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2006).

²⁷ Selengkapnya baca: "Menghidupkan kembali Keteladanan Pendiri Bangsa" dalam *Integrito* Vol. 43/VII/Maret-April. *Keteladanan Pendiri Bangsa*. (Jakarta: KPK, 2015). hlm. 10-22.

IMPLANTATION OF RESPECT AND COURTESY THROUGH FAMILY EDUCATION ON EARLY CHILDHOOD STAGE

Darmiyati

darmiyati.fkip@gmail.com

ABSTRACT

Education is a shared responsibility between families, schools and communities, parents are the first and foremost educators in educating and guiding their children, so as to develop optimally. In addition, parents are also responsible for educating their children and sets a great example in our daily lives, resulting in a child's morality is expected to grow and develop into a child who has a character that is reliable and useful for the country. An attitude of respect and courtesy is one of the pillars of character that must be owned by the child, because the child's respect and manners appreciated and liked existence as social beings. The key for children based on the attitude and behavior of example given by parents. Activities that can be given to younger children in the family, among others through habituation conducted every day both in respect for the elderly, speak good words and said nothing rude and behave rude. Things to consider the family in educating their children, among others: do not reproach her, do not make fun of children, to instill the values of honesty, giving attitude of understanding, and instilling values of justice to children.

Keywords: family education, respectful and civil, early childhood.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, October 8th 2016

** PGPSD Lecturer Lambung Mangkurat University.

I. PRELIMINARY

Education is a shared responsibility among families, schools and communities, while the parents have not been fully able to carry out the process of education to early childhood, it is because in general parents does not have a program to guide and educate their children. Therefore we need cooperation between school and family at home where the children lives, with the hope there will be same perspective in educating and guiding children.

The education process on going today commonly refers to cognitive aspects, while other aspects, especially aspects of attitude is still not fully implemented consistently, so that the results merely proficient in intellectual. Ideally education does not only produce students who are good in intellectual but also have a noble character. Armed with noble character children is expected to develop and grow into a good person so when the adulthood reach, they already got character that is reliable and can be useful for the country.

Family has responsibility and important role in upholding children's education both at home, at school and in the community. Therefore, parents as first and foremost educators in their children's education, should be aware of what activities that can be made as a learning resource or an appropriate reference in educating and guiding their children, so they can develop optimally. With this basis, the family can collaborate with teachers so that each can determine the growth and development of children.

Family education is not only related to father and biological mother, but a guardian or an adult in the environment continues to be responsible in educating their children, in order to produce children who noble, and can provide an example for children especially those related with respect and courtesy. An attitude of respect and courtesy is the ancestral culture of our predecessors, who today is almost forgotten by most people. Politeness upholds the values of mutual respect between individuals or groups, in this case the young to respect the elderly, and also the young and old who appreciate and respect their peers. This is in accordance with the opinion of Asmani, which states that the respect and courtesy is one of the pillars of character that comes from the great value of human universal, Suyanto (Asmani, 2011: 51). Characters are very close relationship with, a person's personality both with regard to nature, habits and behaviors related to their daily lives.

Character education needs to be instilled from early childhood, because at this age children are in the golden age of intellectual development (Golden Age). This is a very sensitive period, where at the moment the maturation in terms of physical and psychic ready to receive a stimulus that is given by the environment in laying the first foundation for the formation of character, where families can grow and develop the values of good thing and behave based on these values in order to be a habit into adulthood.

But in reality there is still fight between students, schools and even in universities that occurred in various areas lately. It shows one of the signs that educational programs in schools needs to be reevaluated, where education is still considered not successful in establishing the character of the nation as a whole. Primary school curriculum which lay religious education, moral education of Pancasila, religion and moral values in early childhood, as well as the role of the guidance given by the teacher in the school is still not entirely resulting students who have a noble character. Based on the observations of writers, there are still some children do not respect the teacher, even dared to strike of teachers, as well as at home there are children who lack politeness, as against the elderly when given advice, speak rudely to parents, hurt others feeling, as well as watch TV programs that do not provide an example of good manners.

Reduced politeness on some children became one of the causes less formation of the character of children especially in instilling the values of respect and courtesy, this yet to be established politeness, will have a negative impact on the development of the personality and culture of Indonesia is known as a nation that upholds moral values in civilized life, both within the family, school and community. Based on this thought the author considers it important to implement the approach in instilling character in early childhood as a guide for the family in instilling the values of respect and manners, so children can becoming smart, tough and good-hearted.

II. FORMULATION OF THE PROBLEM

What efforts can be done by the family in instilling the value of respectful character and civil, in early childhood?

III. LITERATURE

Values Respect and Courtesy in Early Childhood

Early childhood education is to provide guidance that was shown to children from birth to age 6 years. Provided through the educational stimulus to help the growth and development of body and spirit so that children can have a readiness to enter higher education. Early childhood education has a very important role in determining the growth of the child because it will become the child's personality very first early foundation in instilling positive behavioral habituation, the values of faith, discipline, as well as the development of basic skills and knowledge. Early childhood education is the education given before children enroll in primary school. Maimunah more pointedly stated that according to Article 28 of the Law on National Education System No. 20/2003, paragraph 1, stated that included in early childhood is children who fall into the age range of 0-6 years. According to the study of science clump PAUD and PAUD implementation in some countries, it implemented since 0-8 years (Maimunah, 2010: 17).

Early childhood education focuses on the direction of growth and development in order to become an independent person, and being able to socialize with other people, a higher curiosity in instilling values of character in life. This is in accordance with the opinion Mulyasa (2012: 46) indicates that the power of imagination creativity, innovation and proactivity of PAUD graduates differ with children who are not through early childhood education.

Character education is a system of cultivation of character values in students, which includes; awareness, understanding, caring, and commitment to implement these values, both against the Almighty God, ourselves, environment, society and the nation as a whole so that becoming the perfect man according to his nature (Mulyasa, 2012: 69). More pointedly that character education is education that develops character values among students so that they have the value and character as the character himself, applying these values in life itself, as a member of society and religious citizens, nationalist, productive, and creative. Judiani (Zubaedi, 2011: 17-18).

To achieve all it needs to be respectful and civil values which constitute one of the pillars of character education. Explicitly Suyanto said nine pillars of character that comes from the noble values of universal human include: (1) the love of God and all His creation, (2) independence and responsibility, (3) honesty

and trust, (4) respectful and polite, (5) benefactors, like mutual help and mutual assistance or cooperation, (6) confident and hardworking, (7) leadership and justice, (8) kind and humble, and (9) of tolerance, peace, and unity, (Asmani, 2011: 51).

Respect and courtesy is one of the pillars of character that must be owned by a person, because it serves to bind cooperation in a peaceful and happy life. Mannered nature of the values of positive behavior and actions are realized through the way they dress, talk, and treat others with good behaviours. Respect and courtesy is a most important things in everyday life, because by being polite, a child can be appreciated and liked its existence as social beings wherever they are. Instilling the value of manners to children is indispensable since early childhood in everyday social life, either with family or people who are nearby. Due to the attitude of the politeness child can be acceptable and preferably existence as social beings, in conjunction with others have the norms and ethics. Because manners is the beginning of the formation of character. (Megawangi, [http://ihforg.tripod.com/pustaka MaknaHakikiHormatdan Santun.htm](http://ihforg.tripod.com/pustaka_MaknaHakikiHormatdan_Santun.htm)).

Respect is a tribute to something good whether to yourself or others and also to the environment. Respect means appreciate and reverence to others, whether parents, teachers, fellow members of the family. In partnership with parents, respectful behavior showed by obeying them. Being obedient is filial obligations of children. Devoted to parents is one of the glorious good deeds. http://www.academia.edu/10349772/Pengertian_Hormat_Dan_Patuh_Kepada_Guru_Dan_Orang_Tua.

Respect and courtesy should be applied in accordance with the guidance of the environment in which we are located, such as in a home environment, either inside or outside the home that is realized by means of: respect for parents, behave well, talk to the meek, to tell the truth, do not do anything that can hurt the feelings of parents such as lying and did not hear his advice. Respect and courtesy given by children can realize opportunities for children to be someone who has noble character). This noble character will be realized through a way to familiarize and practice in their everyday lives.

IV. ROLE OF FAMILIES IN INSTILLING VALUES RESPECT AND COURTESY

The family is the first and primary educators for children. The success key for children are based on the attitude, behavior and role models provided by parents, children learn to develop all aspects of his personality. Any education obtained by children, whether heard, seen, and felt henceforth be implemented in society at large. More pointedly Fadillah, Khonda stated that example is the element most essential to change behavior towards one's children and even adults psychologically has the ability to absorb information and influence from the outside with the calculation of the effect of the eye as much as 84%, the ears 11%, while the factor 50% through eye or exemplary means what he saw and witnessed emulated through the ear in the form of advice, taushiyah, advice, opinion, effectively changing behavior just as much as 11% (Fadillah, Khonda. 2014: 167).

The parents, in this case families, should be able to create an atmosphere that educate the children so that children can grow and develop into human with morality as expected in the national education goals. This is in accordance with the opinion of Anis stating that: family environment is the first and main media which directly / indirectly affect the behavior in the development of students. Because the child's family began to learn the rules and norms of society where parents are being used as modeled figure (Anis, 2009: 51).

Averaly more pointedly suggested that 70% of children falling into evil pit comes from a dysfunctional family life, and therefore to improve the state of society needs improvement in family education (Umar, 2008: 170). Educating family environment is to provide opportunities for children to cultivate all its potential. Through the affections of his family, both parents, brother and other family members. Because every seen activities will be replicated both word and deed that grow in the child's personality. Providing examples of good behavior needs to be demonstrated, in children without the example and role model would be difficult to implement orders of children from their parents.

Good environment is unlikely to materialize by itself. In order to form a good environment must be pursued by members of the public and there is the role of the State in managing the system of people's better life (Azzet, 2011: 51). Early Character education is expected later children will be implemented and have a good personality attitude for the benefit of themselves, society, nation and

country. Parents as a good educator should know and understand the basic character of Early Childhood. More specifically Fadillah and Khorida stated that this base character in children include the provision of kindness, imitative, playful and high curiosity. For more details will be described in the basic character.

Goodness provision. Children basically already have a stock of kindness given by Allah SWT, the environment can support in developing the potential that already exists on the child will grow and develop properly if the environmen supports and vice versa. By getting children through the things that are good, in hope that child potential grows and develops in him a positive character (Fadillah and Khorida, 2014: 82).

Imitative. Children prefer to imitate the movement and behavior of his father and mother, or people in the vicinity. What is seen and felt by the child is always in the follow. Although the child is still not able to distinguish and understand what is good and bad. Usually children do something after seeing things that are fun and interesting then he imitates it. In this context we have to give and show a positive attitude to children. Through words and actions that should be tailored to the child's condition. This is so that the child can mimic the words and deeds of our positive rather than negative otherwise. On this basis was the importance of character education in providing good example, especially for PAUD education.

Love to Play. Play activities is something that is preferred by children and adults, where the game is adapted to the age of development. In the context of the play character education should be integrated with learning activities. Make children happy and taking into account the learning objectives that have been planned. With the hopes of children not to be lazy, tired and bored in participating in various learning activities. Whether provided at home or in school.

Curiosity is high. Early childhood has character in high curiosity, on the basis that children like to ask the people around him. Both parents and other family members. Families should serve what is desired by the child when he asks something. With the attention given so the existing basic character further grow and develop positively.

All basic characters that exist in the early childhood is an overview of ways that since little, children have the potential for good character. Moreover, a variety of basic characters were developed with the best way possible, surely the child will have a good character in the later period. Parents are the first and main

teacher for children. The key for children with parents, children learn to develop all aspects of his personality. Whatever the child receives, whether heard, seen, and felt a child's education received further applied in the context of broader life.

V. IMPLICATIONS OF CHARACTER EDUCATION (VALUES RESPECT AND COURTESY)

During the early ages (Golden Age) is also the child is experiencing growth and rapid developments, in which the child is still negatively affected from the surrounding environment and ultimately facilitate parents in educating will be coaching and guidance in adding character values in children by implanting the value of respect and courtesy. Respect and courtesy is one important element in every person and forms the basis to socialize in their daily lives, with the child's politeness can be received in respect, and enjoyable, wherever they are, and bring the benefit of both himself and others.

Families can generally be interpreted as a small social group generally consists of father, mother, and child. Family plays an important role especially in the socialization for the purpose of socialization is the interaction within the family teaches self-control, values and social role (Triyanto, 2014: 71-72). Activities that can be given in early childhood in the family, among others is through habituation. Habituation is something that is practiced, therefore, the description of the conditioning has always been a series about the need to do habituation every day.

The essence of habituation is a repetition, entering of the house saying Assalamualaikum, at home honoring parents, good behavior, speak gently, telling the truth, not to do anything that could hurt the feelings such as lying, to hear his advice, loving family members speak a good word, do not say rude, to say thank you when given something, utter words please if you want to ask something to the people in the surrounding areas and maintain harmonious relations with the entire family.

Courtesy given when speaking, how to dress, treat others, express themselves wherever and whenever, imitate the behavior of parents everyday. If the child since childhood accustomed to behave courteously will be easier to socialize with others, observe, understand and adjust to and respect for others, as well as being a civilized people put themselves under any circumstances. In a coaching attitude, habituation is such a very effective method used because it

will train good habits to children early. Parents are able to educate and teach children early about the personality and good moral character.

There are several things that need to be considered by the family in educating and guiding their children included: (1) If a child heckled too much, he'll get used to blame, (2) if the child lives in fear, he always get anxious in his life, (3) if a child is raised the banter, he would be shy (not dare to hang), (4) if the child is surrounded with envy, she will not be satisfied with whatever they had, (5) if the child is raised with the understanding he would grow up to be patient, (7) if the child is always given encouragement, she will grow up to be confident, (8) if the child is praised, he will get used to respect others, (9) if a child is accepted in his environment, he will learn to love, (10) if a child is raised in honesty, he would get used to seeing the truth, (11) if the child cuddled without bias, he will be great in the values of justice, (12) If a child is raised in a sense he would control himself and trust others, and (13) if the child grow in hospitality, he would see that the world is really beautiful (Sudarman, 2010: 186-187).

VI. CONCLUSION

Education is a shared responsibility between families, schools and communities, where the family has an important role in instilling the values of respect and manners in children by providing exemplary and showing habituation of deeds, attitudes and behavior of parents in everyday life, so that the child can grow optimally. Planting of character values in early childhood will grow and develop into a person which able to socialize with other people who invested through respectful and civil values which is one of foundation characters. Basic character in children include the provision of kindness, imitative, playful, and curious high. This basic character is a picture that from an early age children already have the potential of good character.

VII. SUGGESTION

Based on the conclusions above, families or parents are advised to give implantation on the character since early childhood by providing guidance and role models, habituation respect and courtesy and good behavior so that children

are able to socialize in their environment and have the character of a reliable useful for the homeland and nation.

Children should respect their parents with good-spoken, polite and show a positive attitude towards the environment to maintain the harmony of the whole family.

REFERENCES

- Anis, Muh. 2009. *Suskes mendidik anak perspektif Al Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Banguntapan Yogyakarta: Diva Press.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. 2011. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Danim, Sudarman. 2011. *Pengantar Kependidikan Landasan, Teori, dan 234 Metaphora Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fadillah & Khorida. 2014. *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- <http://ihf-org.tripod.com/pustaka/MaknaHakikiHormatdanSantun.htm>. Diunduh tanggal 25 September 2016.
- http://www.academia.edu/10349772/Pengertian_Hormat_Dan_Patuh_Kepada_Guru_Dan_Orang_Tua. Diunduh tanggal 25 September 2016.
- Maimunah, Hasan. 2010. *Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Diva Press.
- Mulyasa. 2012. *Manajemen PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Zubaed. 2011. *Desain Pendidikan Karakter, Konsep Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME DENGAN MENGENALI POTENSI LAUT DAN PESISIR INDONESIA

Deasy Arisanty

deasyarisanty@unlam.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan pesisir. Kekayaan laut Indonesia terdapat di wilayah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan delta. Wilayah pesisir Indonesia merupakan kawasan yang potensial untuk pertambangan dan pertanian. Kekayaan yang tinggi tersebut tentunya menjadi potensi sekaligus menjadi ancaman bagi Negara Indonesia. Kekayaan laut tersebut menjadi potensi apabila dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi masalah karena akan banyak kepentingan berbagai macam pihak dalam pemanfaatannya termasuk pihak asing. Pemanfaatan berlebihan juga ternyata menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan. Pengetahuan mengenai potensi laut dan pesisir Indonesia dapat menumbuhkan rasa nasionalisme untuk mencintai laut dan pesisir Indonesia, dan menjaga keberadaan laut dan pesisir Indonesia baik dari pihak asing maupun dari kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: potensi, laut, kepesisiran, nasionalisme

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautnya sekitar 3,273,810 km², jumlah pulau 13,466 buah dan panjang garis pantai 99,000 km. Artinya adalah sekitar dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (Suparmi dan Sahri, 2009). Wilayah perairan Indonesia tersebut menyimpan banyak kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Potensi laut di Indonesia dalam pemanfaatannya dapat dikelola oleh negara yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982, pasal 2 menjelaskan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial. Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Artinya adalah Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah laut kedaulatannya. Indonesia mempunyai hak untuk mengelola wilayah laut dan perairan di dalam wilayah kedaulatannya.

Pemanfaatan sumber daya laut Indonesia merupakan hak mutlak Indonesia sebagai negara maritim. Berdasarkan UU No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan menjelaskan bahwa pengelolaan ruang laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut. Artinya adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola potensi yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan masyarakat, begitu juga dengan ruang laut. Meski pun kenyataannya adalah banyak penduduk miskin bermukim pada kawasan pesisir.

Ancaman dari pihak luar yang menginginkan untuk mengambil sumber daya laut Indonesia banyak terjadi, misalnya adalah *illegal fishing*. Pada tahun

2014 telah terjadi pencurian ikan dilaut yang telah menyebabkan kerugian yang besar yaitu sekitar Rp 101 triliun. Kerugian sebesar itu seharusnya sudah dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia (Republika online, 2016). Ancaman lainnya terhadap wilayah pesisir dan laut adalah kerusakan yang terjadi akibat pemanfaatan yang berlebihan, misalnya pada wilayah terumbu karang. Berdasarkan hasil penelitian dari Kusumastuti (2004), terumbu karang yang ada di perairan Bontang Kuala dalam kondisi rusak sampai dengan sedang. Kerusakan pada wilayah terumbu karang pada wilayah terumbu karang di Bontang Kuala disebabkan oleh manusia dan alam. Faktor manusia adalah penangkapan ikan menggunakan bom, belat, bubu, dan pengambilan karang untuk bahan bangunan. Kondisi ini karena rendahnya pendidikan dan kemiskinan masyarakat di sekitar wilayah Bontang Kuala.

Tingginya potensi laut dan pesisir wilayah Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan keadaan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang belum dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengenali potensi laut dan pesisir Indonesia sudah seharusnya mulai ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan, dan menjaganya, bukan pihak asing yang memanfaatkan sumber daya Indonesia.

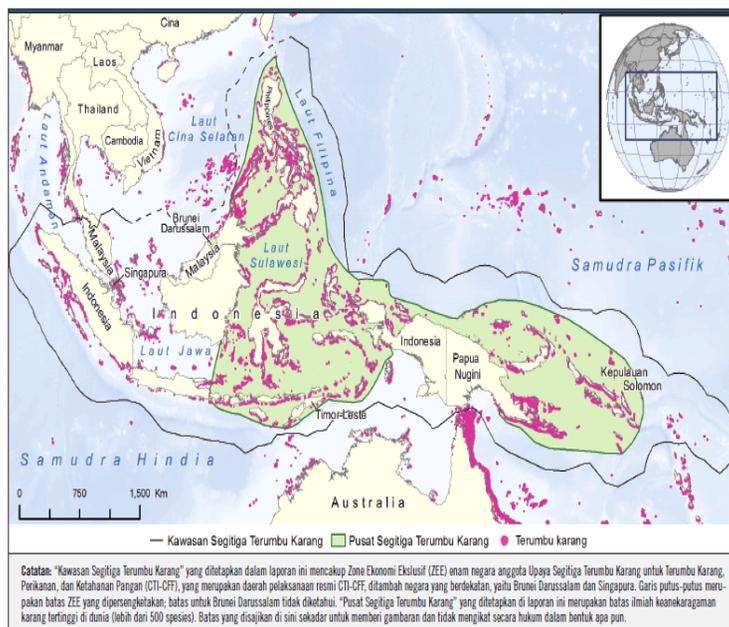
II. POTENSI LAUT DAN KEPESISIRAN INDONESIA

2.1 Potensi Terumbu Karang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi terumbu karang yang tinggi karena secara ekologis terumbu karang hanya dapat tumbuh di wilayah tropis. Sekitar 14 % wilayah terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah segitiga terumbu karang dunia (Burke, dkk, 2012). Persebaran terumbu karang di Indonesia adalah pada wilayah Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, Samudera Hindia pada bagian selatan Jawa dan bagian barat Sumatera (Burke, dkk, 2012). Keanekaragaman terumbu karang di Indonesia cukup tinggi karena sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya terumbu karang yaitu air yang jernih, dangkal, dan sinar matahari (Arini, 2013).

Manfaat terumbu karang bagi kehidupan manusia adalah sebagai sumber pangan dan mata pencaharian, sebagai tempat pariwisata, pengobatan penyakit, perlindungan garis pantai (Burke, dkk, 2012). Terumbu karang juga

merupakan tempat hidup dari berbagai macam makhluk laut sehingga keberadaan terumbu karang menjadi sangat penting dalam menjaga keanekaragaman biota laut.



Gambar 1. Peta Kawasan Segitiga Terumbu Karang (Burke, dkk, 2012)

Terumbu karang merupakan ekosistem yang paling produktif dan paling kaya di dunia yang dalam kondisi terancam. Beberapa ancaman yang terjadi pada ekosistem terumbu karang diantaranya adalah penangkapan berlebihan, pembangunan wilayah pesisir, dan pencemaran. Penangkapan yang berlebihan ternyata dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Ancaman ini ternyata merupakan ancaman terbesar pada ekosistem terumbu karang. Pembangunan wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran dan sedimen yang masuk di perairan. Kondisi air yang keruh dapat berakibat pada kerusakan terumbu karang. Pencemaran pada perairan dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang (Burke, dkk, 2012).

2.2 Potensi Mangrove

Mangrove merupakan satu potensi wilayah kepesisiran Indonesia. Mangrove merupakan ekosistem yang dapat berkembang pada kondisi air yang tergenang, kadar garam yang tinggi, dan kondisi tanah yang kurang stabil. Mangrove di Indonesia dapat berkembang pada lingkungan yang bervariasi apabila dibandingkan dengan negara lain. Mangrove dapat berkembang pada ketinggian 1-2 meter pada pantai yang tergenang, hingga pada ketinggian 30 meter (di daerah Sulawesi Selatan) (Sosia, 2014). Sebaran mangrove di Indonesia terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta sebaran mangrove di Indonesia (dikutip dari Noor, dkk, *Wetlands International Indonesia Programme, 2006*)

Jenis mangrove di Indonesia adalah 202 jenis tumbuhan mangrove, terdiri atas 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanag, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Berdasarkan data dari 43 jenis tersebut diantaranya terdapat 33 jenis pohon dan mempunyai jenis perdu yang ditemukan sebagai mangrove sejati, sedangkan jenis lain disebut mangrove ikutan (Sosia, dkk, 2014).

Ekosistem tempat tumbuhnya mangrove dapat dibagi menjadi 4, yaitu mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau dan mangrove daratan. Mangrove terbuka adalah mangrove yang langsung berhadapan dengan laut terbuka, yang didominasi oleh *A. alba*, *S. alba*, *Avicennia marina* dan *Rhizophora mucronata*. Mangrove tengah adalah mangrove yang terletak di belakang

mangrove terbuka. Mangrove payau adalah mangrove yang terletak di sepanjang sungai berair tawar hingga payau. Mangrove darat tumbuh pada zona perairan payau atau hampir tawar (Noor, dkk, 2006).

Fungsi dari ekosistem terumbu karang adalah sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber pangan, pelindung pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, kontribusi sebagai pengendali iklim global. Areal mangrove yang strategis perlu dijaga untuk keberlangsungan hidup ekonomi dan sosial. Adanya tekanan penduduk menyebabkan keberadaan hutan mangrove menjadi faktor utama permasalahan pada lingkungan mangrove. Pembukaan lahan untuk perikanan dan pertanian menyebabkan perubahan pada lingkungan mangrove (Sosia, dkk, 2014).

Rencana Tata Guna Lahan Hutan (TGHK) membagi lahan menjadi 4 bagian yaitu areal konservasi dan perlindungan alam, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konversi. Meskipun telah ada dasar pembagian dalam status lahan, kenyataannya adalah masih ada konflik dalam pemanfaatan lahan atau hak penguasaan lahan. Lahan mangrove yang penting dalam usaha menjaga kelestarian lahan mangrove maka sudah seharusnya lahan mangrove dijadikan sebagai sabuk hijau (Sosia, 2014).

2.3 Potensi Padang Lamun

Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh tanaman lamun. Ekosistem padang lamun di Indonesia terdapat pada daerah pasang surut bawah dan pasang surut atas. Pola zonasi padang lamun di Indonesia terdapat pada dua posisi yang penting yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem padang lamun menjadi kawasan penyangga dan kawasan penahan sedimen yang berasal dari daratan bersamaan dengan mangrove dan terumbu karang. Selain itu kawasan padang lamun menjadi penting untuk berbagai biota laut dan menjadi tempat mencari makan untuk penyu hijau, dugong, ikan, dan gastropoda (Poedjirahajoe, dkk, 2013; Harpiansyah, dkk, 2014).

Fungsi padang lamun secara ekonomi adalah mampu menunjang perekonomian lokal dan nasional. Padang lamun menyimpan banyak sumberdaya perikanan yang mempunyai nilai ekonomis seperti udang, ikan baronang, dan berbagai jenis kerang. Dengan demikian, menjaga

keberlangsungan padang lamun dapat menjadi keberlangsungan ekologis dan ekonomis (Poedjirahajoe, dkk, 2013).

Lamun dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan perairan yang jernih dan kecerahan yang tinggi serta didukung oleh kecepatan arus yang rendah. Selain itu, perkembangannya didukung oleh temperatur yang hangat seperti di daerah tropis. Suhu yang normal mendukung terjadinya pertumbuhan, proses fotosintesis, reproduksi dan laju respirasi lamun. Pertumbuhan lamun juga memerlukan pH optimum yaitu 7 (Harpiansyah, 2014).

Keberadaan padang lamun yang mempunyai fungsi secara ekologis dan ekonomis tentunya perlu dijaga kelestariannya. Perubahan lingkungan seperti kekeruhan, kenaikan atau penurunan pH dan kenaikan atau penurunan suhu air laut dapat menyebabkan kerusakan padang lamun. Sumber utama penyebab kerusakan lamun berasal dari daratan yaitu dari aktivitas manusia. Oleh karena itu mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kelestarian padang lamun.

2.4 Potensi Delta

Delta merupakan bentuk lahan fluviomarine yang dipengaruhi oleh proses dari sungai dan dari laut. Sumberdaya pada wilayah delta adalah tanah yang subur, gas, minyak bumi, dan air yang melimpah (Mathers and Zalasiewicz, 1999; Arisanty, 2013; Arisanty, 2016). Potensi tanah yang subur diperoleh dari sedimen yang diangkut oleh sungai dan diendapkan pada bagian delta. Potensi gas dan minyak berasal dari hasil pengendapan tumbuhan dan hewan pada wilayah delta. Potensi air yang melimpah berasal dari air sungai dan air tanah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arisanty (2013) bagian pesisir Kalimantan bagian selatan telah berkembang Delta Barito. Delta Barito merupakan delta yang dibentuk oleh Sungai Barito. Berbagai macam potensi terdapat pada delta ini yaitu tanah yang subur, sumber daya air yang melimpah, dan adanya indikasi terdapat sumberdaya gas. Sumberdaya tanah yang subur dihasilkan oleh pengendapan sedimen Sungai Barito. Material baru yang diendapkan secara terus menerus menghasilkan tanah yang subur. Tanah yang subur menyebabkan wilayah Delta Barito menjadi lahan pertanian dan lumbung padi untuk wilayah Kalimantan Selatan. Sumber daya air berasal dari air permukaan yaitu air sungai. Air sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Selain itu, di beberapa lokasi di Delta Barito telah dibuat

sumur bor sebagai sumber air bersih yang berasal dari air tanah. Sumber daya gas dapat diperoleh dari hasil pengendapan tumbuhan pada daerah cekungan.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Tim Muara Kakap (2005) di Delta Kapuas Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa material pada Delta Kapuas terdiri atas lumpur, lempung, debu, pasir, dan gambut. Karakteristik dari Delta Kapuas menyebabkan delta ini diklasifikasikan sebagai pantai berlumpur untuk mangrove-rhizophora dan pantai berlumpur untuk mangrove-nipah. Tanah yang subur dan berlumpur menyebabkan wilayah delta ini sangat potensial untuk tempat tumbuhnya mangrove.

Beberapa delta di Indonesia telah diteliti, seperti Delta Mahakam, Delta Bodri, Delta Cimanuk, Delta Ciliwung, dan sebagainya. Setiap delta mempunyai karakteristik dan potensi masing-masing tergantung pada proses yang bekerja pada delta tersebut. Potensi yang ada pada delta ini merupakan sumber daya alam yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, pengenalan terhadap sumber daya alam pada wilayah delta menjadi sangat penting.

III. PERMASALAHAN PEMANFAATAN LAUT DAN KEPESISIRAN

Wilayah laut dan pesisir selain mempunyai potensi yang tinggi tetapi juga rentan terhadap kerusakan. Permasalahan dalam pengelolaan menyebabkan kerentanan terhadap kerusakan juga akan semakin tinggi. Menurut Baransano dan Mangimbulude (2011), kerusakan wilayah laut dan pesisir disebabkan oleh adanya tekanan penduduk terhadap wilayah laut dan pesisir karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan penduduk yang tinggi, kemiskinan, konsumsi yang berlebihan, penyebaran sumberdaya yang tidak merata, kelembagaan dan kegagalan sistem dalam menilai ekosistem alam.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan terjadi tekanan penduduk dan eksploitasi terhadap sumber daya. Menurut O'Connor (2004), permasalahan tekanan penduduk dan kemiskinan di wilayah pesisir disebabkan oleh rendahnya pendapatan penduduk, rendahnya tingkat kesejahteraan, investasi yang terbatas, rendahnya lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak terdistribusi dengan baik. Permasalahan ini banyak terjadi di kota-kota besar di wilayah pesisir misalnya di Jakarta.

Penduduk yang berlebihan, banyaknya pengangguran dan kemiskinan telah menyebabkan tekanan penduduk yang pada akhirnya terjadi kerusakan lingkungan.

Kelembagaan yang lemah dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir menjadikan kawasan pesisir menjadi sangat rentan terhadap kerusakan. Berdasarkan hasil pemaparan oleh Lakitan (2012), wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan wilayah Indonesia menjadi sulit untuk diawasi dan dikontrol. Kekuatan pertahanan wilayah laut masih terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan diantaranya adalah *illegal fishing* oleh pihak asing. Konservasi wilayah laut dan pesisir telah dilaksanakan oleh Yayasan Karang Lestari dalam kegiatan restorasi karang di Pemuteran, pantai utara Bali dan pengelola taman wisata laut di Gili Trawangan, Lombok. Adanya pihak swasta ini ternyata telah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Keberhasilan dari pihak swasta ini tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Penelitian Bachri, dkk (2016) di Kabupaten Kotabaru menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah pesisir di wilayah ini didominasi oleh keluarga sejahtera I. Penghasilan yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, padahal mereka tinggal di wilayah yang kaya akan sumberdaya tambang dan perkebunan. Pengetahuan dan pendidikan penduduk yang rendah menyebabkan mereka hanya mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang rendah. Masyarakat juga lebih cenderung untuk menjual lahan mereka kepada perusahaan daripada memanfaatkan untuk keperluan hidup mereka. Pemahaman akan arti pentingnya kepemilikan atas sumberdaya alam menyebabkan kemiskinan masih terus terjadi. Masyarakat cenderung menjual lahan mereka kepada perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan uang yang cepat. Dengan demikian, mereka tidak memiliki lahan lagi untuk keberlangsungan hidup mereka.

IV. PENTINGNYA NILAI NASIONALISME

Mengenal potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah sudah seharusnya menjadi modal bangsa dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Kekayaan alam yang

melimpah sudah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti yang terdapat pada UUD 1945.

Beberapa hal yang penting dalam menumbuhkan nasionalisme terhadap wilayah pesisir dan pantai Indonesia adalah:

1. Pemahaman mengenai kekayaan laut dan pesisir Indonesia sejak dari dini, mulai dari sekolah dasar. Adanya materi di sekolah dasar mengenai potensi laut dan pesisir Indonesia dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mengenal kekayaan alam Indonesia, jangan sampai bangsa asing lebih mengetahui kekayaan Indonesia dibandingkan dengan generasi muda. Pengenalan mengenai laut dan pesisir Indonesia sudah seharusnya diintegrasikan ke dalam kurikulum, sehingga menjadi bagian dalam pembelajaran di sekolah.
2. Pemahaman mengenai kedaulatan batas laut Indonesia menjadi sangat penting sehingga berbagai kasus seperti *illegal fishing* tidak terjadi. Dengan demikian, kekayaan Indonesia tidak dinikmati oleh pihak asing dan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
3. Pemahaman mengenai geospasial sebaran wilayah Indonesia yang memiliki potensi wilayah laut dan pesisir yang tinggi, sehingga pengelolaan wilayah menjadi berguna dan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Wilayah-wilayah yang paling strategis untuk dikembangkan akan menjadi prioritas utama.
4. Memperbaiki kelembagaan dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Kelembagaan yang kurang baik menyebabkan wilayah laut dan pesisir menjadi rentan kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Kedaulatan suatu negara adalah mengelola wilayahnya sendiri untuk kemakmuran rakyatnya, maka Indonesia sudah seharusnya berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri untuk kemakmuran rakyat.

V. SIMPULAN

Potensi dan sumber daya pesisir dan laut merupakan modal dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sumber daya pesisir dan laut di Indonesia di antaranya terdapat di wilayah terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Sumber daya tersebut perlu dijaga baik keberlangsungan secara ekologis maupun secara ekonomis. Memahami wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis

merupakan suatu upaya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kedaulatan dalam menjaga dan memanfaatkan alam Indonesia merupakan hak dan kewajiban Indonesia tanpa atau dengan sedikit campur tangan dari pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D.R.D. 2013. Potensi Terumbu Karang Indonesia "Tantangan dan Upaya Konservasinya" *INFO BPK Manado. Vol 3 No 2*.
- Arisanty, D. 2013. Morphodynamic of Barito Delta Southern Kalimantan. *Dissertation*. Gadjah Mada University. Yogyakarta Indonesia.
- Arisanty, D. 2016. Pemanfaatan Delta Barito sebagai Lahan Pertanian Rawa Potensial dengan Sistem Banjar. *Prosiding seminar Nasional II Pengelolaan Pesisir dan DAS*.
- Bachri, AA., Udiansyah, Nasruddin, & Arisanty, D. 2016. Coastal Community Welfare of Mining Areain Kotabaru Regency, South Kalimantan Province. *Journal of Environmental Science and Engineering B5*
- Baransano, H.K., Mangimbulude, J. C. 2011. Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia. *Jurnal Biologi Papua. Volume 3 No 1, pp 39-45*.
- Burke, L., Reyntar, K., Spalding, M., Perry, A. 2012. *Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*. Diterjemahkan oleh Yayasan Terangi. World Resources Institute.
- Harpiansyah, Pratomo, A., Yandri, F. 2014. *Struktur Komunitas Padang Lamun di Perairan Desa Pengudang Kabupaten Bintan*. Jurusan Ilmu kelautan. Fakultas Ilmu kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau.
- Kusumastuti, A. 2004. Kajian Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Terumbu Karang di Perairan Bontang Kuala dan Alternatif Penanggulangannya. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lakitan, B. 2012. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berbasis Iptek untuk Kemakmuran Bangsa Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berbasis Iptek untuk Kemakmuran Bangsa. *Seminar Nasional Kelautan VIII, Universitas Hang Tuah Surabaya*.

- Mathers, S., Zalasiewicz, J., 1999. Sedimentary Architecture of the Red River Delta, Vietnam. *Journal of Coastal Research*, Vol. 15, No. 2, pp 314-325.
- Noor, Y.R., Khazali, M., *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. Wetlands International.
- O'Connor, K., 2004. Understanding and Managing Coastal Economic Development. *National Coastal Symposium, Griffith University*.
- Poedjirahajoe, E., Mahayani, Ni P. D., Sidharta, B. R., Salamuddin, M. 2013. Tutupan Lamun dan Kondisi Ekosistemnya di Kawasan Pesisir. Madasanger, Jelenga, dan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 36-46.
- Republika online. 2016. Ancaman untuk Laut Indonesia. (<http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/05/03/o6lig7-ancaman-untuk-laut-indonesia>, akses 29 September 2016).
- Sosia, P., Yudasakti, Rahmadhani, T., Nainggolan, M. 2014. Mangroves Siak dan Kepulauan Meranti. *Environmental & Regulatory Compliance Division Safety, Health & Environment Department*.
- Suparmi, A., Sahri. 2009. Mengenal Potensi Rumput Laut: Kajian Pemanfaatan Sumberdaya Rumput Laut dari Aspek Industri dan Kesehatan. *Sultan Agung, Volume XLIV No 118*.
- Tim Muara Kakap. 2005. *Eksplorasi Prospektif Gas Biogenik Kelautan Perairan Muara Kakap dan Sekitarnya—Kalimantan Barat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Jakarta.
- UU No 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- UU No 32 tahun 2014 Tentang Kelautan.
- United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982.

INTEGRASI SILA-SILA PANCASILA DALAM MENDIDIK ANAK MELALUI NILAI-NILAI AGAMA DAN SOSIAL

Desy Anindia Rosyida dan Abdul Hafiz

anindiarosyida@yahoo.co.id, abdulhafiz_haji@yahoo.com

ABSTRACT

Pancasila became ideology, philosophy, outlook of the nation Indonesia. The precepts contained in Pancasila is a mirror of national life that covers all aspects of society. In addition, the precepts of Pancasila can also be used to educate children is through religious and social values. The first precept is about education monotheism to the child, the second principle teaches the child to have a caring attitude to all created by God both living creatures (humans, animals, and plants) as well as being nonliving (mountains, oceans, etc.), please the third contains about social education and live peacefully wherever the child is located, fourth principle to teach the child to freedom of expression according to the rules that will foster self-confidence in children, and the five precepts teach our children about setting aside some owned/savers and love helpfulness to others.

Keywords: integration, precept Pancasila, educate, value religion, social values.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Desy Anindia Rosyida** dan **Abdul Hafiz** dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

I. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan landasan ideologi, falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Pancasila berasal dari dua kata yaitu *panca* dan *sila*. *Panca* artinya lima dan *sila* artinya dasar. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Sansekerta yakni Pancasila.

Lima sila atau dasar dalam Pancasila merupakan hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945, yaitu yang berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lima sila dalam Pancasila tersebut mencakup aspek kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain sebagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, ke lima sila Pancasila dapat diintegrasikan dalam mendidik anak.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diajarkan di sekolah, pada umumnya berisi tentang bagaimana hubungan manusia terhadap Sang Pencipta (*Hablumminallah*) serta hubungan manusia dengan manusia yang lain (*Hablumminannaas*). Kedua hubungan tersebut erat kaitannya dengan pendidikan yang paling mendasar yang diajarkan orangtua terhadap anak, sebelum anak tersebut masuk pada bangku sekolah.

Mendidik anak harus dilakukan kedua belah pihak, yaitu orangtua dan guru. Guru sebagai pendidik anak di sekolah dan orangtua adalah pendidik anak di rumah. Kedua pendidik ini harus saling kerja sama untuk menyelaraskan dalam pendidikan anak. Mendidik bukanlah hal yang mudah, namun juga bukanlah hal yang sulit. Karena bisa dipelajari dengan terlebih dahulu melihat kondisi si anak dan lingkungan sekitar anak.

Pendidikan dasar bagi anak adalah keluarga. Karena anak terlahir di dunia dan dia tumbuh dalam keluarga. Keluarga merupakan dasar pembentukan karakter anak. Sekolah yang utama dan pertama bagi anak adalah seorang ibu. Namun, bapak juga mempunyai peran penting dalam mendidik anak. Bapak sebagai kepala sekolah, ibu sebagai gurunya, dan si anak sebagai murid. Harus ada keselarasan antara bapak dan ibu dalam mendidik anak. Agar anak dapat menerima dengan baik pendidikan yang awal dan utama serta dapat membentuk anak yang berakhlakul karimah atau akhlak yang terpuji.

Mendidik anak harus dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan anak, agar anak tidak merasa bahwa nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini oleh kedua orangtua sebagai sebuah paksaan. Nilai-nilai tersebut juga mengandung unsur pembentukan karakter yang baik pada anak, antara lain melalui nilai agama dan sosial. Kedua nilai tersebut wajib ditanamkan pada anak sejak dini untuk bekal berlangsungnya kehidupan si anak.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berinisiatif melakukan kajian deskriptif analitis tentang: "Integrasi Sila-Sila Pancasila dalam Mendidik Anak melalui Nilai-Nilai Agama dan Sosial" yang diharapkan menjadi rujukan terutama bagi orangtua dalam mendidik anak dan guru dalam mendidik murid agar terbentuk generasi yang cerdas akal, peka terhadap lingkungan serta berakhlak terpuji.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pancasila, Nilai Agama dan Nilai Sosial

2.1.1 Pancasila

Terdapat tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat mempertahankan *status-quo* kekuasaannya. Rezim orde baru juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya dilakukan indoktrinasi secara paksa melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam setiap organisasi (asas tunggal). Penghapusan ini memberi peluang bagi adopsi asas-

asas ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama (*religious-based ideology*). Pancasila cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik.

Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi dapat menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethno-nationalism* (Azyumardi Azra, 2007).

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui tiga tahapan, yaitu:

- 1) Sidang I BPUPKI (Badan Persiapan Umum Panitia Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila (tanggal 1 Juni 1945). Berisi 5 dasar negara, yaitu:
 - a) Kebangsaan Indonesia
 - b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
 - c) Mufakat atau demokrasi
 - d) Kesejahteraan sosial
 - e) Ketuhanan
- 2) Panitia kecil/Panitia Sembilan (Pancasila dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945). Isi pancasila dalam Piagam Jakarta:
 - a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
 - b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c) Persatuan Indonesia
 - d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e) Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
- 3) Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Pancasila dalam pembukaan UUD tahun 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) yang berbunyi:
 - a) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c) Persatuan Indonesia

- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.1.2 Nilai Agama dan Nilai Sosial

Pengertian nilai menurut Spranger adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Menurut pandangan Spranger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai kesejarahan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, namun *Spranger* mengakui akan kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif. Sementara itu, kekuatan nilai-nilai kebudayaan merupakan roh objektif. Kekuatan individual atau roh subjektif didudukkan dalam posisi primer karena nilai-nilai kebudayaan hanya akan berkembang dan bertahan apabila didukung dan dihayati oleh individu.

Penerimaan nilai oleh manusia tidak dilakukan secara pasif melainkan secara kreatif dan aktif. Dalam proses manusia menerima nilai ini terjadi hubungan dialektis antara roh objektif dengan roh subjektif. Artinya, roh objektif akan berkembang jika didukung oleh roh subjektif, sebaliknya roh objektif akan berkembang dengan berpedoman kepada roh objektif yang diposisikan sebagai cita-cita yang harus dicapai. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya.

Menurut Horrocks, pengertian nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Nilai ialah standar konseptual yang relatif stabil, dimana secara eksplisit maupun implisit membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologi.

1) Nilai Agama

Menurut Emile Durkheim definisi agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan

hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat.

- Menurut Drikarya definisi agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya.
- Menurut Moenawar Chalil definisi agama adalah perlibatan yang merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuannya.
- Menurut Hendro Puspito definisi agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan.
- Menurut Jappy Pelokild definisi agama adalah percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukumnya.

Nilai agama sangat diperlukan sebagai dasar mendidik anak. Karena penanaman nilai agama yang baik sejak dini pada anak akan mempengaruhi perkembangan *Spiritual Quotient* (kecerdasan spiritual) yang baik pula. Selain itu, juga sangat berpengaruh pada terbentuknya karakter yang baik.

2) Nilai Sosial

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.

Ciri nilai sosial diantaranya sebagai berikut:

- Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat.
- Disebarkan diantara warga masyarakat (bukan bawaan lahir).
- Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar).
- Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia.
- Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain.
- Dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial.
- Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat.

- Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai.

Berdasarkan ciri-cirinya, nilai sosial dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging (*internalized value*).

a) Nilai dominan

Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. Banyak orang yang menganut nilai tersebut. Contoh, sebagian besar anggota masyarakat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang, seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut. Contoh, orang Indonesia pada umumnya berusaha pulang kampung (mudik) di hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran atau Natal. *Prestise* atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai tersebut. Contoh, memiliki mobil dengan merek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau *prestise* tersendiri.

b) Nilai mendarah daging (*internalized value*)

Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi (bawah sadar). Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil. Umumnya bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa sangat bersalah. Contoh, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Menurut Notonegoro, nilai sosial terbagi 3, yaitu:

- Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi fisik/ jasmani seseorang.

- Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang mendukung aktivitas seseorang.
- Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/psikis seseorang.

2.2 Integrasi Sila-Sila Pancasila, Nilai Agama dan Nilai Sosial dalam Mendidik Anak

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu:

a) Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Sila pertama, yakni "Ketuhanan yang Maha Esa" mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antarsesama manusia Indonesia, antarbangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain sebagai berikut:

Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Mahasempurna.

- Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan semua perintah-Nya, dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya.
- Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
- Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

b) Sila Kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab"

Sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan

sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan agama, suku ras, dan keturunan.

Dengan demikian, pada sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai sebagai berikut:

Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.

- Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
- Mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain.

c) Sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Makna “Persatuan Indonesia” dalam sila ketiga Pancasila adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, antara lain sebagai berikut:

- Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- Pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

Setiap orang Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat

tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, antara lain sebagai berikut:

- Kedaulatan negara ada ditangan rakyat.
- Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia selaku negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia Indonesia, baik selaku pribadi, selaku anggota masyarakat, maupun selaku warga negara menjadi aman, tenteram, dan sejahtera.

Upaya untuk mencapai ke arah itu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima, antara lain sebagai berikut:

- Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
- Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain.

- Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual.

Kandungan-kandungan sila-sila Pancasila sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yaitu masyarakat Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan ideologi bangsa. Selain makna-makna yang terkandung di atas, sila-sila Pancasila juga erat kaitannya dalam mendidik anak terutama melalui nilai agama dan nilai sosial. Hubungan sila-sila Pancasila dalam mendidik anak melalui nilai agama dan sosial sebagai berikut:

1) Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Salah satu pondasi pendidikan tauhid dimulai dari penanaman nilai-nilai tauhid kepada sang anak, dan salah satu kunci keberhasilan pendidikan anak adalah tepatnya metode yang diberikan saat mengenalkan sang anak kepada penciptanya, Allah SWT, selain itu, teladan dari orang tua juga berperan penting mengantarkan anak menjadi anak yang sholeh. Pendidikan tauhid tidaklah mudah, terutama di zaman ini yang semakin tidak kondusif. Orang-orang semakin mengutamakan tontonan ketimbang tuntunan.

Dalam sila pertama ini yaitu perintah untuk mengakui dan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah SWT terdapat dalam QS. Al-Ikhlash Ayat 1 yaitu:

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa"

Masa usia dini merupakan masa keemasan (*golden age*) bagi perkembangan intelektual seorang manusia. Masa usia dini merupakan fase dasar untuk tumbuhnya kemandirian, belajar untuk berpartisipasi, kreatif, imajinatif dan mampu berinteraksi. Bahkan, separuh dari semua potensi intelektual sudah terjadi pada umur empat tahun. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga adalah madrasah yang pertama dan utama bagi perkembangan seorang anak, sebab keluarga merupakan wahana yang pertama untuk seorang anak dalam memperoleh keyakinan agama, nilai, moral, pengetahuan dan keterampilan, yang dapat dijadikan patokan bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Perlu diketahui, fase kanak-kanak merupakan tempat yang subur bagi pembinaan dan pendidikan. Pada umumnya masa kanak-kanak ini berlangsung cukup lama. Seorang pendidik dalam hal ini orang tua, bisa memanfaatkan waktu yang cukup untuk menanamkan segala sesuatu dalam jiwa anak, apa saja yang orang tua kehendaki. Toh, jika masa kanak-kanak ini dibangun dengan pondasi tauhid, maka dengan ijin Allah ta'ala kelak anak akan tumbuh menjadi generasi bertauhid yang kokoh. Orang tua hendaknya memanfaatkan masa ini sebaik-baiknya.

Indonesia mengakui agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Seorang tidak selalu tumbuh dalam lingkungan keyakinan seperti yang diinginkan. Sehingga orangtua berperan penting untuk menanamkan sikap saling menghormati antar keyakinan yang berbeda. Tidak boleh membedakan-bedakan sesama teman dalam hubungan sesama manusia.

2) Sila Kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab"

Menanamkan sikap peduli terhadap anak atas semua ciptaan Allah di muka bumi ini. Seorang anak senantiasa untuk mencintai dan peka terhadap lingkungannya serta lingkungan lain yang memerlukan bantuan.

Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang berbunyi tentang kemanusiaan dan kepedulian. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat yang merupakan suatu keniscayaan bagi mereka. Tingkat kecerdasan, kemampuan, dan status sosial manusia menurut Al-Qur'an berbeda-beda. Firman Allah QS. Az-Zuhuf: 32 "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmatmu? Kami yang membagi antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain atas beberapa tingkat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat tuhanmu lebih baik, baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Menanamkan kepekaan dan peduli terhadap sesuatu hal, baik yang pernah dialami si anak sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Peduli tidak hanya kepada semua makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan), tapi juga kepada makhluk yang tak bergerak (gunung, lautan) dengan menjaga kelestarian berlangsungnya kehidupan mereka.

3) Sila Ketiga "Persatuan Indonesia"

Setiap orang tidak bisa hidup tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sering kali hubungan manusia dengan manusia yang lain kurang harmonis. Tapi hal tersebut bisa diatasi dengan menanamkan hidup rukun dan saling menghargai terhadap sesama.

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-13 menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama mukmin, dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kukuhnya persatuan umat Islam, yaitu:

- a. Menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada yang lain.
- b. Menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain.
- c. Menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain.

Seorang anak diajarkan untuk berinteraksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan mengikut sertakan anak dalam berbagai kegiatan yang ada di lingkungannya berdasarkan kemampuan anak. Tujuannya agar saling mengenal antara anak dan lingkungan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan mewujudkan persatuan demi kebaikan bersama.

4) Sila Keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"

Orang tua akan selalu melakukan dialog kepada anak dan anak berhak mengeluarkan semua yang dirasakannya. Orang tua memberikan kebebasan anak untuk mengungkapkan semua perasaan anak. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan sikap percaya diri pada anak. Karena dengan berani mengungkapkan perasaan yang dialami anak kepada orangtua, akan menumbuhkan psikologis yang baik pada perkembangan pada tahap selanjutnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah suatu kedekatan harmonis antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa nyaman dan kepada orang tua agar selalu mendengarkan segala apa yang diungkapkan. Ini akan mempengaruhi motivasi tersendiri bagi anak.

Surah Ali Imran ayat 159 menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah, yaitu yang berbunyi:

فَمَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

5) Sila Kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Orangtua pada era modern saat ini harus cerdas dalam membagi waktu dan materi terhadap anak, jangan sampai anak menjadi korban kecanggihan sebuah teknologi. Anak akan peka terhadap lingkungan ketika mereka berinteraksi langsung terhadap lingkungan tersebut. Mengajari anak untuk menyisihkan sebagian uang mereka kemudian ditabung dan sebagian dari uang yang ditabung bisa digunakan untuk berbuat kebaikan kepada yang lebih memerlukan, yaitu bisa melalui sedekah, infaq, maupun membantu teman dalam kesulitan. Dengan demikian, akan tertanam pada jiwa anak sikap hemat dan menggunakan sesuatu untuk kebaikan orang lain.

Seperti dalam surat Ali Imran ayat 180 yang berbunyi:

١٨٠ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ
لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الثَّغِيمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.

III. SIMPULAN

Pancasila menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan cermin kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, sila-sila Pancasila dapat digunakan pula untuk mendidik anak yaitu melalui nilai agama dan nilai sosial. *Sila pertama* berisi tentang pendidikan tauhid kepada anak, *sila kedua* mengajarkan anak agar memiliki sikap peduli kepada semua yang diciptakan Allah baik itu makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan) maupun makhluk tak hidup (gunung, lautan, dan lain-lain), *sila ketiga* berisi tentang pendidikan sosial dan hidup rukun di mana saja anak tersebut berada, *sila keempat* mengajarkan kepada anak untuk bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan sehingga akan memupuk rasa percaya diri pada anak, dan *sila kelima* mengajarkan kepada anak tentang menyisihkan sebagian yang dimiliki/hemat serta suka menolong terhadap sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2007. *Keberagaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Makalah Semiloka Nasional Keragaman 13-14 Agustus 2007.
- Daryono, M. et al. 2008. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rajasa, Hatta. 2009. *Karakter Bangsa Sebagai Modal Sosial Untuk Menghadapi Tantangan Pembangunan Global*. Jakarta: Setneg.
- Supriya. 2005. *Perspektif Pakar terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa (Disertasi)*. Bandung: SPs UPI.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009–2014. 2016. *Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Triyanto. 2010. *Inovasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Surakarta: UNS Press.

Udin S.Winataputra. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Bandung: UPI.

MEA DAN REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

Entin Jumantini
jumantinie04@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah suatu tantangan baru yang menyedot perhatian bangsa Indonesia. Dengan diberlakukannya MEA masyarakat harus berperan aktif dan lebih kreatif. Sikap optimis atau pesimis tidak pada tempatnya lagi diperdebatkan karena persaingan sedang berlangsung dan harus dihadapi. Sumber daya menjadi pilar utama untuk menghadapi situasi demikian yang membutuhkan karakter kuat sebab dalam menghadapi tantangan MEA tidak cukup orang pintar dan kreatif saja, namun dibutuhkan kejujuran, disiplin, kegigihan, semangat tinggi, optimisme, percaya diri, dan tanggung jawab. Revitalisasi pendidikan karakter sebagai upaya meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dapat dimulai dengan membenahi pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum pendidikan. Nilai-nilai karakter tersebut ditanamkan melalui proses internalisasi sebagai solusi revitalisasi nilai-nilai moral, budaya dan karakter bangsa kita yang mengalami degradasi.

Kata Kunci: MEA, pendidikan karakter.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Kuningan.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dan karakter merupakan masalah vital dan selayaknya diberikan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia. Pentingnya hal tersebut karena pendidikan dan karakter merupakan penentu kelangsungan bangsa Indonesia. Pendidikan membentuk karakter suatu bangsa, sehingga apabila pendidikan kurang baik, maka di masa datang negara tersebut akan menerima akibatnya yaitu kebobrokan moral anak bangsa. Karakter merupakan suatu sikap atau keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Sedangkan pendidikan karakter merupakan sebuah sistem dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan satuan pendidikan untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter baik.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era modernisasi karena kualitas karakter bangsa ikut menentukan kemajuan suatu bangsa. Peradaban suatu bangsa akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Faktor moral (akhlak) hal utama yang harus dibangun agar masyarakat tertib, aman dan sejahtera. Dengan demikian karakter bangsa merupakan harga mati karena perilaku menyimpang hanya dapat diberantas dengan mengubah pola pikir dan karakter. Oleh karena itu seharusnya bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang kuat sehingga tetap mencerminkan kepribadian bangsa yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Dalam kaitanantisipasi menghadapi MEA, pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampil sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas kreativitas sebagai ungkapan dan kebebasan kepada generasi muda untuk melakukan percobaan dan menemukan sesuatu (UNESCO,1996: 94).

Pendidikan diharapkan mempunyai *outcome* berupa *life skill* yang menjadi bagian konsep dasar pendidikan nasional. *Life skill* merupakan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam menjalankan proses kehidupan, sehingga terampil dalam menjaga kelangsungan hidup dan tantangan masa depan.

II. PEMBAHASAN

Pendidikan karakter yang mencakup pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral dan watak yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memberikan keputusan-keputusan baik, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kemendiknas, 2011). Pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam kurikulum bukan hanya sekedar menanamkan mana yang benar atau salah tetapi berusaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya.

Menurut Gedhe (2011: 23) menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam kurikulum akan efektif apabila dalam pelaksanaannya ada keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Penekanan pada aspek kognitif diperlukan, agar peserta didik dapat membuat pertimbangan moral (*value analysis*) dan mendiskusikan alasan-alasan tentang kedudukan nilai-nilai yang terkait dengan karakter melalui proses berpikir logis.

Keseimbangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor dapat diwujudkan ke dalam semua perangkat pembelajaran baik yang tercantum dalam teks kurikulum formal maupun yang tersembunyi di balik pola interaksi interpersonal di lingkungan sekolah. Kemendiknas (2011: 5) menjelaskan bahwa keseimbangan antara pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau *loving good* (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) adalah prasyarat bagi keberhasilan pendidikan karakter, karena hanya dengan keseimbangan tersebut dapat diwujudkan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Pendidikan karakter dapat terlaksana dengan baik apabila lembaga pendidikan dapat membenahi kondisi dan mutunya yang berhubungan langsung dengan fungsi dan peran lembaga pendidikan itu sendiri. Herbert Spenser menjelaskan bahwa "*education has for its object the formation of character*" pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter (Arsyad, 2011: 10). Selain itu, terlaksananya pendidikan karakter memerlukan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi dan disertai dengan strategi yang tepat sehingga pendidikan karakter dapat berjalan efektif.

Strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap kurikulum sebagai bentuk revitalisasi sebagai berikut; 1) Guru dapat menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya (*student active learning, contextual learning, inquiry-based learning, integrated learning*), 2) Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang mampu memberikan rasa aman, penghargaan tanpa ancaman, dan memberikan semangat, 3) Guru memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, loving the good, and acting the good*, 4) Guru dapat menerapkan metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum dengan melibatkan sembilan aspek kecerdasan (Muslich, 2011: 33).

Menurut Lickona (1993), tujuan pendidikan karakter adalah: (1) mengembangkan kemampuan sosial anak didik, baik secara etika dan akademis dengan memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan, (2) membantu anak didik mengembangkan karakter baik yang meliputi aspek mengetahui (*knowing*), peduli (*caring*), hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), keadilan (*fairness*), dan kasih sayang (*compassion*). Sedangkan menurut Kusuma (2011) tujuan pendidikan karakter adalah: (1) menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang baik sehingga menjadi kepribadian yang khas, (2) mengoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan, (3) membangun koneksi yang harmonis antara keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter.

Sesuai dengan fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi bertujuan membina dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berbudaya dan sekaligus menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi negaranya.

Akhirnya, revitalisasi pendidikan karakter dapat berhasil dengan baik apabila semua komponen pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan perbaikan kualitas SDM meliputi perbaikan dan peningkatan terhadap karakter bangsa yang bermoral, beretika, dan berbudaya. Apabila komponen pendidikan tersebut terutama pendidik tidak memiliki kesadaran tinggi dan kompetensi yang handal untuk melaksanakan revitalisasi tersebut, maka pendidikan karakter yang saat ini merupakan langkah strategis bagi pemerintah di bidang pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki moral bangsa hanya akan menjadi sekedar wacana tanpa ada hasilnya.

III. SIMPULAN

Keberhasilan revitalisasi pendidikan karakter perlu adanya dukungan dan kerjasama oleh semua pihak terutama guru sebagai pelaku dari perubahan yang memiliki peranan utama sebagai pendidik karakter. Krisis karakter yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini adalah belum berkembangnya karakter karena adanya acuan perilaku baik yang kurang baik menjadi kurang jelas. Dalam kondisi seperti ini karakter seringkali hanya sebatas wacana, dan dalam perkembangan selanjutnya cenderung terjadi krisis yang semakin lama semakin mengkhawatirkan.

Karakter tidak dapat diinterpretasi sebagai jumlah dari sifat-sifat, melainkan karakter adalah kepribadian. *"The essence of education is to recognize truth. All branches of learning are like rivers. The spiritual learning is the like ocean. All rivers go and merge into the ocean. When they merge in the ocean, the rivers lose their individually completely"* (Sathya, 2002: 83). Karakter harus dilihat sebagai sifat-sifat menyeluruh dari sebuah kepribadian, yang mewarnai seluruh perilaku seseorang.

Menurut Gaffar (2010) pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Dalam definisi tersebut ada tiga ide pikiran penting, yaitu : (1) proses

transformasi nilai-nilai, (2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, (3) menjadi satu dalam perilaku.

Pendidikan karakter harus disokong oleh segenap elemen bangsa, baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pada dasarnya karakter itu dibentuk dari peneladanan (*modelling*) dan pembiasaan (*habituation*), jadi bagaimana mungkin pendidikan karakter bisa berperan secara optimal jika belum ada sinergi antara lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar, 2011. *Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Makalah disajikan pada ACIS ke-11.
- Ghede, Raka, 2011. *Pendidikan Membangun Karakter*. Bandung.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta.
- Lickona, Thomas. 2013. *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusamedia.
- Muslich, Masnur, 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UNESCO. 1996. *Learning: Treasure Within*. New York: UNESCO Publishing.

MEMBANGUN NASIONALISME MELALUI MUATAN SEJARAH LOKAL

Ersis Warmansyah Abbas

ersis_wa@yahoo.com

ABSTRAK

Berbagai keluhan tentang perilaku sebagian generasi muda membawa kepada pertanyaan: Bagaimana nilai-nilai nasionalisme diinternalisasikan di kalangan generasi muda Indonesia? Dalam pada itu, satu diantara penguatan nasionalisme diharapkan melalui pendidikan, khususnya melalui pembelajaran sejarah nasional Indonesia yang tidak mengabaikan muatan sejarah lokal. Di Kalimantan Selatan, sejarah masyarakat Banjar (*Urang Banjar*) sesungguhnya adalah aplikasi nasionalisme berbasis Islam. Ketika bangsa-bangsa penjajah datang ke Tanah Banjar perlawanan tiada henti dilakukan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, *Urang Banjar* melakukan perlawanan sengit tiada henti dengan memproklamkan kesetiaan kebangsaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Mei 1949. Nilai-nilai Nasionalisme Islamis *Urang Banjar* dalam kerangka nasionalisme Indonesia adalah modal hebat bagi generasi muda dalam nasionalisme Indonesia.

Kata Kunci: *Urang Banjar*, Islam, dan nasionalisme.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan* Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen Pprogram Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3: mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Apabila lebih disederhanakan, tujuan pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat diartikan agar generasi (muda) Indonesia menjadi negara yang baik (*good citizen*).

Menjadikan generasi (muda/peserta didik) sebagai warganegara yang baik difasilitasi secara konseptual aplikatif melalui kurikulum. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Dalam katup kurikulum tersebut, tujuan pendidikan adalah: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara"

Dalam pemahaman demikian, bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk, mempersiapkan generasi muda agar menjadi warganegara yang baik tentulah tidak lepas dari *local wisdom* yang dalam kaitan bahasan makalah ini diartikan sebagai muatan sejarah lokal. Muatan sejarah lokal (Kalimantan Selatan) dalam praktik pendidikan, khususnya pembelajaran sejarah, belum mendapat tempat yang sewajarnya. Kendala utamanya, guru belum mengembangkan materi ajar dengan muatan sejarah lokal sehingga nilai-nilai nasionalisme kurang dipahami yang mengakibatkan tidak dapat diinternalisasikan dalam kerangka membangun nasionalisme; nasionalisme yang tidak mengabaikan nilai-nilai lokal.

Muatan sejarah lokal Kalimantan Selatan, khususnya Proklamasi 17 Mei 1949, merupakan "pernyataan" kesetiaan masyarakat Kalimantan Selatan (*Urang Banjar*) kepada Republik Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan kebanggaan nasionalisme berbasis lokalitas.

II. PEMBAHASAN

2.1 *Lintasan Historis Urang Banjar*

Provinsi Kalimantan Selatan disebut juga Tanah Banjar. Sekalipun pengertian Tanah Banjar tidak persis sama dengan wilayah Kalimantan Selatan dalam pengertian administratif Republik Indonesia, Tanah Banjar didiami *Urang Banjar*. *Urang Banjar* dalam bahasa Indonesia adalah suku Banjar atau etnik Banjar. Dalam tulisan ini *Urang Banjar* menunjuk suku Banjar.

Hal tersebut perlu ditandaskan, sebab Provinsi Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya didiami *Urang Banjar*. Di daerah pegunungan Meratus didiami suku Dayak, seperti Dayak Bukit dan Dayak Manyan. Dalam pada itu, *Urang Banjar madam* ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, pulau Jawa, pulau Sumatera, Malaysia. Dengan demikian, ada *Urang Banjar* yang bermukim di Tanah Banjar ada yang merantau (*madam*). Penyebutan *Urang Banjar* sekaligus sebagai identifikasi beragama Islam. Sekalipun demikian, suku Bakumpai yang beragama Islam dan berdiam di wilayah Kalimantan Selatan bukanlah disebut *Urang Banjar*. Lagi pula, berbagai suku-suku Nusantara kini menetap di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah Indonesia yang beragama.

Menurut Alfani Daud (1997: 2-3):

"Dapat diduga, suku Banjar, dibandingkan dengan suku bangsa Dayak umpamanya, bukanlah penduduk asli daerah ini. Dengan memperhatikan bahasa yang mereka kembangkan, yaitu bahasa Banjar, yang dapat dianggap satu dialek belaka dari bahasa Melayu, yang umumnya dikembangkan sukubangsa-sukubangsa yang mendiami Sumatera dan tanah Semenanjung Melayu (sekarang Malaysia Barat) sampai saat ini, dapat diperkirakan cikal bakal nenek moyang suku bangsa Banjar berintikan suku bangsa Melayu yang berimigran ke daerah ini ..."

Islam sebagai identitas *Urang Banjar* sejalan dengan terbentuknya masyarakat dan kebudayaan Banjar. Kesultanan Banjar kelanjutan dari kerajaan Nagara Daha penerus kerajaan Nagara Dipa. Kerajaan Nagara Dipa berpusat di Margasari dan kerajaan Nagara Daha di Amuntai. Ketika kerajaan Nagara Daha dipimpin oleh Raden Tumenggung, sebagai pemangku kerajaan, terjadi perselisihan dengan keponakannya, Pangeran Samudera, pewaris tahta kerajaan Nagara Daha. Perselisihan tersebut mengakibatkan Pangeran Samudera melarikan diri ke daerah Kuin, Banjarmasin sekarang, dan diangkat sebagai pemimpin oleh masyarakat Melayu yang dipimpin Patih Masih.

Pangeran Samudera dibantu oleh Patih Masih menggalang kekuatan untuk merebut kembali tahta kerajaan Nagara Daha. Menyadari kekurangan pasukan untuk melawan Raden Tumenggung, Pangeran Samudera dan Patih Masih meminta bantuan kepada kerajaan Demak di pulau Jawa. Kerajaan Demak bersedia membantu dengan syarat Pangeran Samudera dan pengikutnya memeluk Islam (Saleh: 34). Pangeran Samudera bersedia memenuhi syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirim pasukan dipimpin Khatib Dayan.

Pertempuran antara pasukan Raden Tumenggung dan Pangeran Samudera dimenangkan oleh Pangeran Samudera dan menjadi awal berdirinya Kesultanan Banjar dengan agama resmi, yaitu agama Islam. Pangeran Samudera diangkat menjadi sultan dengan nama Sultan Suriansyah. Peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin, 26 September 1526.

Kesultanan Banjar menjalin hubungan lebih erat dengan kerajaan Demak dalam menghadapi rongrongan dari para penguasa pedalaman dan menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Agama Islam sebagai agama resmi Kesultanan Banjar menjadi identitas *Urang Banjar*. Dalam ungkapan yang hidup dalam masyarakat Banjar: *Banjar adalah Islam dan Islam adalah Banjar*.

Sepanjang sejarah Kesultanan Banjar, sejak berdiri 26 September 1526 sampai dibubarkan Pemerintah Hindia Belanda 18 Juni 1860, bahkan sampai sekarang, proses Islamisasi *Urang Banjar* terus berlangsung sampai sekarang. Penerapan ajaran Islam semakin keras ketika K.H. Muhammad Arsyad al-Banjary pulang dari Mekah dan menjadikan Martapura, sebagai pusat syiar Islam. Penerapan hukum Islam semakin mendapat tempat ketika Sultan Adam Al Wasik Billah (1825-1857) menjadi sultan (Pemprov Kalsel, 2005: 49). Sultan Adam adalah murid K.H. Muhammad Arsyad al-Banjary yang dalam memberlakukan hukum Islam di Kesultanan Banjar dengan menerapkan Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).

Masa suram Kesultanan Banjar bermula dari kedatangan VOC ke Banjarmasin untuk berdagang. VOC yang pada awalnya membantu Kesultanan Banjar untuk mendapatkan upeti dari Kerajaan Kutai dan Pasir (Kalimantan Timur), memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah melalui perjanjian pada tahun 1660 yang diperbaharui tahun 1661. Setelah itu, VOC ikut campur dalam politik Kesultanan Banjar.

Pada tahun 1761 Sultan Tamjid wafat dan digantikan oleh Pangeran Natadilaga sebagai pemangku kerajaan karena putra-putranya masih kecil-kecil. Setelah dewasa, putra-putra Sultan Tamjid menuntut tahta, tetapi tidak dikabulkan Pangeran Natadilaga. Ketika Pangeran Abdullah terbunuh, Pangeran Amir, saudara Pangeran Abdullah, melarikan diri ke Pagatan untuk menyiapkan pasukan dan pada tahun 1786 menyerang Pangeran Natadilaga. Untuk menghadapi perlawanan Pangeran Amir, Pangeran Natadilaga meminta bantuan VOC dan VOC berhasil menangkap Pangeran Amir dan dibuang ke Sailan (Sri Lanka).

Sebagai imbalannya, VOC memaksakan kontrak yang ditandatangani Pangeran Natadilaga tahun 1787, yang isinya Pangeran Natadilaga memberikan seluruh wilayah Kerajaan Banjar, Bulungan dan Kutai di Kalimantan Timur kepada VOC. Setelah kontrak tersebut, VOC membuka perkebunan dan tambang batu bara. Hal tersebut menyadarkan Pangeran Natadilaga yang kemudian menyabot berbagai usaha VOC. Pada awalnya, Pangeran Natadilaga menekan produksi lada dan pada tahun 1793 memusnahkan perkebunan tersebut.

Pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dan semua asetnya diambil alih Kerajaan Belanda. Kesultanan Banjar akhirnya menjadi beban finansial bagi pemerintah Hindia Belanda, apalagi ketika Pangeran Natadilaga menjalin persekutuan dengan Inggris. Setelah Pangeran Natadilaga wafat yang menjadi sultan adalah Sultan Sulaiman yang membuat kontrak dengan Inggris pada tahun 1811 dimana Inggris menempatkan Residen Alexander Hare di Banjarmasin. Perjanjian dengan Inggris dimaksudkan untuk mendepak pengaruh VOC yang semakin kuat di Kesultanan Banjar.

Perjanjian dengan Inggris berakhir ketika pemerintahan Hindia Belanda kembali 'memperhatikan' Kesultanan Banjar. Pada tahun 1817 pemerintahan Hindia Belanda memaksakan penandatanganan kontrak yang diperbaharui tahun 1826 kepada Sultan Adam dimana Kesultanan Banjar dilarang mengadakan kontak politik dengan negara lain tanpa izin Pemerintah Hindia Belanda dan wilayah Kesultanan Banjar hanya sekitar Martapura, Kesultanan Banjar tidak diizinkan mempunyai kekuatan militer, sebab masalah ketertiban dan keamanan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda.

Perselisihan antara Kesultanan Banjar dan pemerintah Hindia Belanda memuncak tahun 1857 ketika Sultan Adam bermaksud mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya, tetapi Belanda menolak dan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Puncaknya, pada 11 Juni 1860, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan dekrit penghapusan Kesultanan Banjar, dan wilayah Kesultanan Banjar dijadikan *Residentie Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*.

Terlepas dari masalah perselisihan antara keluarga Kesultanan Banjar, perlawanan rakyat terhadap Belanda semakin sengit. Pangeran Hidayatullah melakukan perlawanan sampai akhirnya ditangkap pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 dan dibuang ke Cianjur. Setelah Pangeran Hidayatullah ditangkap, Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai wafat tahun 1862. Perlawanan rakyat Banjar baru bisa ditumpas pada tahun 1905, sebab setelah Pangeran Antasari wafat tahun 1862, perang terus dilanjutkan dan menjadi perang terlama dalam sejarah Belanda di Indonesia. Perang tersebut dikenal dengan Perang Banjar atau *De Bandjermasinsche Krijg* (1859-1905).

Sekalipun pemerintah Hindia Belanda menganggap perlawanan rakyat berakhir pada tahun 1905, perlawanan rakyat terus berlanjut sekalipun secara sporadis. Hal tersebut berlanjut sampai pascaproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (Abbas, 2000), dalam perang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berakhirnya aksi militer Belanda I dengan perjanjian Renville, 17 Januari 1948, sangat menyakitkan para pejuang Kalimantan Selatan. Para pejuang Kalimantan Selatan menolak gagasan Dewan Banjar dan Negara Banjar. Upaya Van Mook mendirikan negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), direspon para pejuang dengan mengkonsolidasi kekuatan yang berakibat terjadinya pertempuran di hampir seluruh daerah di Kalimantan Selatan dan para pejuang, memproklamkan kesetiaan dengan membentuk pemerintahan tentara untuk mempertahankan Kalimantan Selatan sebagai wilayah Republik Indonesia (Rosasi, 1994: 241).

Teks Proklamasi 17 Mei 1949:

PROKLAMASI

Merdeka

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari "ALRI" melingkupi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.

Tetap Merdeka !

Kandangan, 17 Mei IV REP.

Atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan Gubernur Tentara

HASSAN BASRY

Dari paparan tersebut, dalam lintasan historis *Urang Banjar*, ada dua prinsip penting *Urang Banjar*, yaitu: menegakkan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam dan menjadi bagian Republik Indonesia secara utuh. Bagi *Urang Banjar*, Islam dan Indonesia merupakan sesuatu yang final. Jargon *Banjar adalah Islam, Islam adalah Banjar* lebih sempurna manakala menjadi: *Banjar adalah Islam, Islam adalah Banjar, Banjar adalah Indonesia dan Indonesia adalah Banjar*.

2.2 Nilai-Nilai Nasionalisme Urang Banjar

Terbentuknya masyarakat dan kebudayaan Banjar dengan identitas utama Islam sebagai "persentuhan" dengan syiar Islam yang diapungkan Kerajaan Demak tentulah memuat nilai "persatuan:" dari hal berbeda. Dalam analisis konsep Bhinneka Tunggal Ika, terbentuknya masyarakat dan kebudayaan Banjar adalah aplikasi Bhinneka Tunggal Ika, *diversirty in unity*. Hal tersebut, manakala kita gunakan istilah Benedict Anderson (1993), *Imagined Communties*, konsep keberadaan *Urang Banjar* merupakan refleksi kesatuan dan persatuan tanpa perlu mengedepankan keberbedaan.

Hal tersebut, yang dalam kerangka nasionalisme dan patriotisme, ketika bangsa penjajah ---Belanda, Portugis, Inggris--- datang ke Nusantara, termasuk ke Tanah Banjar, *Urang Banjar* bahu-membahu melawan. Perlawanan bukan saja dilakukan dengan persekutuan antar kerajaan, tetapi juga antara orang per orang dimana misalnya para pejuang dari Jawa dan Bugis bergabung melawan Belanda. Pangeran Antasari mengobarkan perang jihad selama 105 tahun di Tanah Banjar. Peperangan yang sangat lama dalam bandingan kobaran perang dengan daerah-daerah lain.

Ketika Proklamasi RI baru seumur jagung, Belanda “membonceng” Sekutu menyalurkan nafsu menjajahnya dengan menduduki wilayah RI. Melalui Perundingan Linggarjati yang ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani kedua negara pada 25 Maret 1947, Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera dan Madura, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949, Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, dan dalam RIS, Indonesia tergabung dalam *Commonwealth* Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

Dalam kerangka RIS, HJ van Mook berkampanye ke berbagai daerah Indonesia untuk membentuk negara-negara bagian —ada yang mengistilahkan negara boneka— yang kemudian tergabung dalam RIS. Artinya, RI hanyalah berwilayah Yogyakarta. Bagaimana respons rakyat dan pejuang Kalimantan Selatan? Para pejuang di Kalimantan Selatan tidak sudi masuk kerangka berpikir HJ van Mook (Belanda). Untuk itulah, melalui serangkaian rapat, diproklamirkan “Proklamasi 17 Mei 1949” oleh Hassan Basry. Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan protes sekaligus pembangkangan terhadap pembentukan Negara-negara RIS. Hanya rakyat dan pejuang Kalimantan Selatan yang begitu tegas dan keras menyatakan sebagai bagian integral RI. Untuk keberlangsungan RI tidak ada tawar-menawar. Sungguh sangat nasionalistik dan patriotik.

Kalau sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, *Urang Banjar* melawan penjajah, terutama VOC/Belanda tiada henti, hal lebih keras dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam Proklamasi 17 Mei 1949, *Urang Banjar* tanpa tedeng aling menyatakan bahwa Tanah Banjar adalah bagian dari Republik Indonesia. Tidak ada tawar-menawar untuk Republik Indonesia.

Kalau kita narasikan dengan pemahaman saat ini, para pejuang Kalimantan Selatan, ketika RI baru berdiri dan “dicabik-cabik” Belanda melalui konsep RIS yang kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan kembali ke RI Proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan Selatan merupakan pemegang saham kuat RI. Rakyat dan pejuang Kalimantan Selatan adalah pejuang NKRI.

Logika tersebut akan menghantar pemahaman, para pemegang kebijakan RI hendaklah lebih memperhatikan Kalimantan Selatan sebagai aplikasi kesadaran, tidak melupakan sejarah. Untuk itu, mari Proklamasi 17 Mei 1949 lebih dimaknai dengan pemahaman, pemerintah RI hendaknya jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah). Kesadaran tersebut yang selayaknya menjadi pegangan pemerintah RI.

III. SIMPULAN

Masyarakat dan kebudayaan Banjar merupakan aplikasi Bhinneka Tungga Ika dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak terbentuknya masyarakat Banjar (*Urang Banjar*) membawa potensi nasionalisme yang semula berorientasi *Urang Banjar* setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi nasionalisme Indonesia. *Urang Banjar* dengan Proklamasi 17 Mei 1949 menegaskan bahwa *Urang Banjar* adalah Indonesia itu sendiri. Artinya, *Urang Banjar* pemilik saham Indonesia yang sekaligus pendukung setia.

Nilai-nilai nasionalisme *Urang Banjar* hendaklah ditanamkan kepada generasi bangsa untuk diinternalisasikan guna memperkuat nasionalisme Indonesia melalui jalur pendidikan. Generasi yang kuat adalah generasi yang di “darahnya” mengalir nasionalisme untuk membangun dirinya dan bangsanya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W. 2013. "Masyarakat dan Kebudayaan Banjar sebagai Sumber Pembelajaran IPS: Transformasi Nilai-Nilai Budaya Banjar Melalui Ajaran dan Metode Guru Sekumpul". *Disertasi*, Jurusan Pendidikan IPS SPs UPI Bandung, tidak diterbitkan.
- Abbas, E. W. 2000. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Banjar Dalam Revolusi Fisik 1945-1949*. Banjarbaru: Lembaga Pengkajian Kebudayaan dan Pembangunan Kalimantan Selatan.
- Anderson, Benedict R.O. 1993. *Kominitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud, A. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gafuri, A. dkk. 1990. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin: Pemprov Kalsel.
- Hasan, H.S. 2010. *Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Litbang Puskur Kemdiknas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2005. *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Banjarmasin: Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Rosasi, E. 1994. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Saleh, I. 2007. *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua.

PEMBINAAN BAHASA DAERAH DAN BAHASA INDONESIA DALAM RANGKA NASIONALISME INDONESIA

Fatchul Mu'in

muin_sihyar@yahoo.com

ABSTRACT

A language is basically a means of communication. It is a part of components of culture. In one perspective, a culture is expressed in a language. Cultural values expressed in the language can be adopted and adapted for building nation characters. Language education and development can be one of the efforts for building our nationalism.

Keywords: language and nationalism.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENGANTAR

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki warga negara Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia [1].

Bahasa merupakan satu dari unsur-unsur budaya. Untuk itu, bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya; dan budaya juga tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Budaya itu sendiri adalah sesuatu yang sebagiannya diformulasikan dalam bentuk bahasa. Budaya adalah pedoman bagi masyarakat yang memilikinya. Ia mengajarkan manusia berperilaku, termasuk berperilaku dalam berbahasa. Sebagian tata cara berperilaku itu dapat diungkapkan dengan bahasa. Jadi, di sini terdapat kesulitan untuk membedakan atau memisahkan bahasa dari budaya atau budaya dari bahasa [2].

II. PEMBINAAN BAHASA DALAM KELUARGA

Dikatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Oleh karena itu dalam membangun karakter bangsa dapat dimulai dengan membangun pengetahuan bahasa dan budaya. Dalam membangun pengetahuan bahasa dan budaya, peranan keluarga sangat besar. Mengacu pada gagasan Bacillus Bernstein, guru besar Sosiologi Pendidikan Universitas London, bahwa ada dua tipe keluarga : "*person-oriented family dan position-oriented family*" [3].

Keluarga sangat berpengaruh dalam proses belajar bahasa si anak. Dia akan dapat berbahasa secara baik, dalam arti, dapat menggunakan tutur lengkap bila keluarganya memiliki tipe "*person-oriented family*", yakni keluarga yang segala permasalahan dibicarakan dan didiskusikan bersama anggota-anggota keluarga. Gagasan atau pemikiran masing-masing anggota keluarga sangat dihargai [4]. Keluarga yang demikian itu memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka dan diskusi kecil tentang berbagai masalah yang ada

di sekelilingnya. Anak pun tidak merasa takut menceritakan berbagai pengalaman yang dialaminya. Dan, sementara si anak bercerita, orang tua membimbing anaknya dalam menggunakan bahasa sehingga tanpa disadari si anak memiliki kemampuan berbahasa yang baik, dengan tutur lengkap [5].

Keluarga hendaknya menghindari pola komunikasi berdasar pada "*position-oriented family*", yakni keluarga yang penentuan segala keputusan tergantung pada status formal dari setiap anggota keluarga itu [6]. Keluarga yang demikian itu cenderung mengakibatkan perkembangan kemampuan berbahasa si anak akan terhambat, karena ia tidak bisa bebas mengutarakan pendapat atau gagasannya. Lebih-lebih, bila orang tuanya sangat berlaku keras atau kejam terhadap anak-anaknya, maka hal ini akan berdampak kurang baik bagi si anak; dia akan cenderung merasa *minder* bila akan berbicara baik dengan orang tuanya, gurunya, maupun dengan sesama temannya. Sebagai akibatnya, dia hanya mampu menghasilkan tutur ringkas saja. Pada waktu menginjak usia sekolah, dia terasa sulit mengutarakan gagasannya bahasa yang jelas dan dengan tutur lengkap, kurang atau tidak memiliki keberanian yang memadai untuk berbicara sehingga dia akan mau membuka mulutnya bilamana keadaan memaksa untuk itu. Dan, sangat mungkin bahwa tuturannya hanya ala kadarnya atau seperlunya [7].

Bahasa daerah maupun bahasa nasional merupakan sarana penting untuk membangun karakter bangsa. Umumnya, anak-anak bangsa Indonesia memperoleh kemampuan berbahasa mereka dengan bahasa daerah. Sejak kecil mereka diperdengarkan tuturan-tuturan dalam bahasa daerah, sehingga tanpa disadari, pada usia 5 atau 6 tahun, mereka telah memiliki kemampuan berbahasa daerah. Pada usia itu, mereka hanya mampu berbahasa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, namun belum mampu berbahasa sesuai dengan budaya yang melekat pada bahasa itu. Pembinaan bahasa daerah berikut dengan budayanya perlu dilakukan secara terus menerus sebagai upaya untuk mewujudkan anak bangsa yang berkarakter.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia telah terbukti ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam perkembangannya, Bahasa Indonesia telah mengalami distorsi akibat gempuran budaya asing. Dengan demikian, upaya untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa

persatuan, perlu diimbangi dengan pembinaan Bahasa Indonesia secara terus menerus bagi semua komponen bangsa.

Pembinaan bahasa Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab para pakar bahasa yang berkecimpung dalam bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga tanggung jawab semua putra dan putri Indonesia yang cinta tanah air, bangsa, dan bahasa. Dengan perkataan lain, pembinaan bahasa Indonesia itu kewajiban kita semua, bangsa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia bisa dimulai dari keluarga. Keluarga, terutama para kaum ibu, sangat mungkin untuk memberikan bimbingan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

III. PENGGUNAAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAERAH

Penggunaan bahasa terjadi dalam ranah sosial yang bermacam-macam. Ranah keluarga, misalnya, memiliki kekhususan tersendiri. Penggunaan bahasa dalam keluarga dalam perbincangan santai atau ranah jual-beli, misalnya, di lokasi pasar, khususnya pasar tradisional, akan berbeda dengan penggunaan bahasa pada ranah-ranah yang lain: misalnya, dan pemerintahan, sekolah, tempat ibadah. Perbedaan-perbedaan yang akan muncul antara lain dalam hal ragam bahasa, sikap atau perilaku penutur, faktor-faktor sosial-budaya yang melatarbelakangi penggunaan bahasa [8]. Bahasa daerah pada umumnya menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu bagi kebanyakan anak bangsa Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan, identitas daerah, dan alat penghubung dalam keluarga dan masyarakat daerah [9].

Bahasa Ibu adalah bahasa dimana ayah ibunya sangat fasih dan baik dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan baik verbal maupun non verbal melalui suatu bahasa. Tanpa bahasa ibu yang baik, fitrah keimanan, fitrah belajar dan fitrah bakat sulit untuk tumbuh. Beberapa orang menganggap bahasa ibu kurang penting. Bahkan banyak yang lebih memilih mengajarkan anak-anaknya bahasa asing sejak bayi. Padahal penguasaan bahasa ibu sangat penting bagi perkembangan jiwa, kesehatan fisik, relasi sosial pada tahap usia selanjutnya. Hasil riset membuktikan bahwa, anak yang belajar bahasa asing sejak dini umumnya mengalami gejala bingung bahasa dan mental *block*, yaitu kegagalan mengekspresikan gagasan dan pikiran, yang berakibat pada kejiwaan dan relasi sosial yang buruk.

Sejak dalam kandungan anak, kedua orangtua harus sudah menentukan bahasa ibu apa yang pertama harus dikuasai anak dalam 6 tahun awal hidupnya. Karena sebelum usia 7 tahun, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan identitas diri. Misalkan orangtuanya Jawa, bahasa ibu yang dipelajari anak adalah bahasa Jawa dan Indonesia. Bahasa ibu tersebut harus tuntas dipelajari anak, sehingga anak bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan tepat, baik secara lisan maupun tulisan, saat anak tersebut memasuki usia sekolah. Bila nanti saat usia sekolah (10 tahun ke atas) anak hendak kenalkan beberapa bahasa asing lain, sudah tidak menjadi masalah lagi, karena pondasi berbahasa ibunya sudah kuat. Sebelum anak berusia 10 tahun hendaklah semua aturan dan rutinitas dibangun dengan suasana yang positif dan menyenangkan, sehingga membentuk pola dan sistem yang kuat di otaknya. Bila aturan dikenalkan dengan cara yang menyenangkan, rutin dan kontinyu, anak akan terbiasa dan dengan senang hati menjalankan aturan dan kebiasaan/rutinitas tersebut. Pengalaman berbahasa pada 5-6 tahun pertama dalam kehidupan anak 85% otomatis akan digunakannya saat dia dewasa nanti. Oleh karena itu saat kita berbahasa dengan anak, sejak janin, hendaklah menggunakan tata bahasa yang lengkap (SPOK) dan benar. Bukan bahasa yang sepotong-sepotong, seperti....bem bem untuk mobil, num untuk minum, mamam untuk makan, dll [10].

Tidak banyak yang tahu bahwa 21 Februari telah ditetapkan oleh UNESCO per 17 November 1999 sebagai Hari Internasional Bahasa Ibu. Di Indonesia gaung Hari Bahasa Ibu tak terdengar, padahal sebagian besar anak bangsa ini mengenal bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Sesungguhnya ini peringatan bagi setiap pemangku kepentingan budaya sebab pelajaran bahasa daerah terpinggirkan dari kurikulum sekolah dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu sudah digantikan dengan bahasa Indonesia dengan logat kedaerahan. Anak-anak sejak dini dibiasakan berbahasa Indonesia karena, bila nanti merantau, itulah yang diperlukan selain bahasa asing. Bukan bahasa daerah. Berikutnya berbahasa Indonesia menjadi bagian dari gaya hidup. Berbahasa daerah dianggap anakronis, ketinggalan zaman, bahkan keliru zaman. Keadaan itu diperburuk oleh kian langkanya buku baru atau media cetak berbahasa daerah. Perlu diperhatikan, bahwa *Bahasa Daerah adalah pintu utama memasuki ruang-*

ruang budaya etnik. Banyak kearifan lokal dan nilai luhur tradisional yang hanya tepat ditransformasikan lewat bahasa ibu [11].

Bagaimana karakter bangsa dibentuk melalui Bahasa Daerah? Bahasa Jawa dan penggunaannya menunjukkan perilaku berbahasa sebagai penutur yang berbudaya. Mari kita ikuti ulasan berikut. Dalam masyarakat bahasa (*speech community*) dapat dipastikan terdapat aturan berbahasa yang disepakati oleh para anggotanya. Dalam pandangan Clifford Geertz aturan berbahasa itu diistilahkan sebagai *Linguistic Etiquette*. Dalam bahasa Indonesia istilah itu dikenal dengan *etika berbahasa*. Dalam masyarakat bahasa Jawa, misalnya, terdapat istilah tingkat tutur (*speech levels*), yaitu *sistem kode penyampai rasa kesopanan yang di dalamnya terdapat unsur kosa kata tertentu, aturan sintaksis tertentu, aturan morfologi tertentu dan juga fonologi tertentu [12].*

Tingkat tutur dalam bahasa Jawa yang umum adalah (1) *Ngoko*, (2) *Krama Madya*, dan (3) *Krama Inggil*. Masing-masing tingkat tutur itu memiliki kosa kata sendiri. Dengan demikian, dalam bahasa Jawa terdapat kosa kata untuk tingkat tutur *ngoko*, kosa kata untuk tingkat tutur *krama madya*, dan kosa kata untuk tingkat tutur *krama inggil*. Soepomo Pudjosoedarmo menambahkan bahwa kosa kata bahasa Jawa tidak hanya terbatas pada kosa kata *ngoko*, *madya*, dan *krama*, tetapi juga meliputi *krama inggil*, *krama andap*, dan *krama desa*. Kata-kata *Ngoko* memancarkan arti tanpa sopan santun; *Krama Madya* memancarkan arti sopan (konotasi hormat) tetapi tingkat kesopannya agak setengah-setengah saja; *Krama Inggil* dan *Krama Andap* memancarkan konotasi hormat yang sangat tinggi; dan *Krama Desa* memancarkan konotasi hormat, tetapi di samping itu, ia menunjukkan juga bahwa pemakainya kurang mengetahui bentuk *krama* yang benar-benar standar [13].

Menurut Geertz, satu etiket orang Jawa adalah *andap asor*, yakni: merendahkan diri sendiri dengan sopan dan merupakan kelakuan yang benar yang harus ditunjukkan kepada setiap orang yang kira-kira sederajat atau lebih tinggi. Selalu ada semacam kegelisahan bilamana dua orang Jawa bertemu untuk pertama kalinya, karena masing-masing menentukan tingkatan pihak lainnya agar masing-masing dapat menggunakan bentuk linguistis yang tepat dan menerapkan pola *andap asor* yang tepat pula. Masing-masing penutur berusaha (bersaing) untuk menempatkan dirinya pada posisi yang paling rendah. Namun, persaingan ini sebenarnya hanya bersifat pura-pura. Yang bersangkutan

berpura-pura merendahkan, namun sebenarnya ia bermaksud agar dirinya ditempatkan pada posisi yang tinggi (sesuai dengan posisi yang disandangnya). Mereka biasanya memakai tingkat tutur *krama* antara satu dengan yang lainnya, dan mereka tidak memakai tingkat tutur *ngoko*. Penggunaan tingkat tutur *krama* ini dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat melakukan sikap *andap asor* dan pada saat yang bersamaan dia menghormati orang yang tua umurnya, menghargai orang yang baru saja dikenal atau belum dikenal. Tingkat tutur *Krama Madya* dan *Krama Inggil* juga digunakan untuk menghormati orang-orang yang berkedudukan atau berstatus lebih tinggi. Kedudukan atau status ditentukan oleh banyak hal, misalnya: kekayaan, keturunan, pendidikan, pekerjaan, usia, keluarga dan kebangsaan. Untuk menyapa seseorang yang lebih rendah status sosialnya atau seseorang yang lebih muda dari dirinya sendiri atau seseorang yang telah menjadi kawan akrab, penutur dapat menggunakan tingkat tutur *ngoko*. Dalam kaitan ini, Geertz mencontohkan kalimat yang dalam bahasa Indonesia berarti "Dari mana anda?". Bila kalimat itu dinyatakan dalam tutur *ngoko* akan berbunyi "*Kowe mau saka endi?*" dan dalam tingkat tutur *krama* "*Panjenengan wau saking tindak pundi?*" [14].

Penggunaan bahasa daerah dengan baik mengimplikasikan perilaku budaya yang baik pula bagi penuturnya. Perilaku budaya yang demikian akan bermanfaat untuk membangun nasionalisme. Dengan demikian, perlu pembinaan dan pemertahanan bahasa daerah agar terhindar dari fenomena distorsi dan punahnya bahasa daerah.

IV. PENGGUNAAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Anjuran untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sudah sering kita dengar, tetapi belum tentu pemahaman dan penafsiran kita sama terhadap makna ungkapan itu [15]. Seperti yang pernah disampaikan oleh Durdje Durasid [16], bahwa berbahasa yang baik adalah berbahasa yang mengandung nilai rasa, yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya; sedangkan berbahasa yang benar adalah berbahasa yang secara cermat mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang berlaku.

Pembinaan dan pengembangan bahasa merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Kedudukan

bahasa Indonesia kini semakin mantap sebagai wahana komunikasi, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan formal. Bahasa Indonesia merupakan alat pertama dan utama untuk membangun arus pemikiran yang jelas dan teliti. Bahasa Indonesia merupakan alat pokok fundamental dalam proses pendidikan. Begitupun halnya dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang juga digunakan sebagai wahana komunikasi yang memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing [17].

Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan meliputi usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tetap dan efisien dalam komunikasi.

Bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda itu terus mengalami perkembangan dan kini semakin mantap. Kemakinmantapan bahasa Indonesia itu tidak lain karena para pakar bahasa kita berupaya terus menerus untuk menyempurnakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Maka dari itu, agar bahasa kita, bahasa Indonesia, tetap terbina maka selain para guru, khususnya guru bahasa, dan para pakar bahasa, keluarga pun harus juga memikul tanggung jawab untuk membina bahasa Indonesia [18].

Kepentingan praktis, telah diambil sikap bahwa pembinaan terutama ditujukan kepada penuturnya, yaitu masyarakat pemakai bahasa Indonesia, dan pengembangan bahasa dalam segala aspeknya. Usaha pembinaan bahasa berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyebaran bahasa Indonesia ke khalayak sasaran dengan berbagai cara seperti usaha penyuluhan, penataran, dan pendemonstrasian. Jika dipandang dari segi khalayak sebagai sasaran pembinaan tersebut, khalayak tersebut dapat terdiri atas berbagai golongan, baik golongan penutur asli, maupun golongan bukan penutur asli, orang yang masih bersekolah, ataupun orang yang sudah tidak bersekolah lagi, khalayak guru pada semua jenis dan semua jenjang pendidikan, khalayak orang yang berada di komunikasi media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, dan televisi, serta khalayak di bidang industri, perniagaan, penerbit, perpustakaan, dan pada lingkungan sastrawan [19].

Pembinaan Bahasa Indonesia dimaksudkan, antara lain, untuk menimbulkan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia. Sikap positif ini menjadi titik tolak bagi penuturnya untuk mengkaji dan menggunakannya secara baik dan benar. Juga, sikap positif ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari

sikap menjunjung bahasa nasional. Kita menjunjung bahasa nasional kita karena kita menyadari akan fungsi bahasa nasional sebagai lambang jati diri bangsa. Tentulah bahasa Indonesia memiliki jati dirinya sendiri pula sehingga serasi dengan lambang jatidiri bangsa kita yang lainnya. Bahasa Indonesia akan memiliki identitasnya sendiri kalau kita sebagai pemakai membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia itu bersih dari unsur-unsur bahasa lain [20].

Persinggungan budaya lokal, nasional, dan budaya-budaya asing adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tumbuh kembangnya budaya lokal dan nasional akan menghadapi dilema yang amat besar jika pengaruh budaya asing tidak segera disaring melalui gerakan peduli budaya. Kepedulian terhadap budaya sendiri akan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai kelokalan yang dapat menyaring hadirnya pengaruh budaya asing yang bisa membawa dampak terhadap dangkalnya pemahaman kita terhadap nilai-nilai keindonesiaan secara menyeluruh [21].

V. SIMPULAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Bangsa Indonesia terbangun dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar-golongan. Bahasa daerah atau bahasa ibu merupakan bahasa yang mewadahi nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal ini terbukti ampuh untuk membangun karakter bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbukti ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan demikian, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia perlu dipertahankan, dibina, dan dikembangkan untuk sarana membangun karakter bangsa. Masyarakat Indonesia dipersatukan dalam kesatuan tujuan untuk membentuk Negara Indonesia, suatu negara yang ber-*Bhineka Tunggal Ika*, walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu, dalam tujuan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, adil, dan makmur.

SUMBER RUJUKAN

- [1] Hasan, Said Hamid, dkk. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Depdiknas.
- [2], [5], [7], [15], [18] Fatchul Mu'in, 2009. *Maung kai Budaya*. Banjarbaru: Scripta Cendekia.
- [3], [4], [6] Trudgill, Peter. 1974. *Sociolinguistics: An Introduction*. Middlesex, England: Penguin Books.
- [9] http://www.academia.edu/11759391/Apa_kedudukan_dan_Fungsi_Bahasa_Indonesia.
- [10] <https://www.facebook.com/notes/rumah-parenting/membangun-karakter-lewat-bahasa-ibu/10153815573101287/>.
- [11] <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2015/02/28/bahasa-ibu-apa-perlunya/>
- [12] Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. New York: The Free Press.
- [13] Poedjosoedarmo, Soepomo. 1979. *Tingkat Tutur Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- [16] Durasid, Durdje. 1990. *Pengembangan Materi Penelitian dalam Bidang Bahasa*. Banjarmasin: Puslit Unlam.
- [17], [19], [20] <http://ikesuryaning.blogspot.co.id/2014/04/makalah-pembinaan-bahasa-indonesia.html>.
- [21] https://www.academia.edu/12837366/PENGEMBANGAN_PENDIDIKAN_BUDAYA_DAN_KARAKTER_BANGSA_MELALUI_TRANSDISIPLINARITAS.

NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM SETTING PENDIDIKAN INKLUSIF

Hamsi Mansur

hamsi.mansur@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang "Nilai-nilai Kebangsaan Dalam *Setting* Pendidikan Inklusif. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sedikitnya terdapat tiga pokok masalah: 1) Pemahaman dan perlakuan, 2) Kebijakan, 3) Akomodasi. Ketiga hal tersebut dihubungkan dengan penerapan nilai-nilai kebangsaan di Sekolah Inklusif. Bagian nilai kebangsaan adalah karakter masyarakat, yaitu: 1) Menghargai keberagaman, 2) Gotong royong, 3) Persaudaraan, 4) Kebebasan, dan 5) Pengabdian. Nilai-nilai kebangsaan yang penulis rekomendasikan dalam *setting* pendidikan inklusif yaitu: 1) Setiap orang merasa diterima. Artinya semua masyarakat sekolah mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orangtua siswa merupakan bagian dari masyarakat sekolah. Hal tersebut sesuai dengan karakter masyarakat kita yang sangat menghargai keberagaman. 2) Setiap guru dan murid saling membantu. Nilai ini merupakan nilai persaudaraan dan pengabdian pada masyarakat secara umum. 3) Guru menjalin kerjasama dengan orangtua/wali. Dibutuhkan komunikasi yang intensif tentang perkembangan anak di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan nilai kebebasan dan gotong royong pada masyarakat, 4) Memberikan harapan yang tinggi untuk semua siswa. Dalam pembelajaran semua siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus didorong untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran mereka. 5) Sekolah berusaha untuk meminimalkan praktek diskriminatif. 6) Staf berusaha untuk menghapus semua hambatan untuk belajar dan partisipasi di sekolah. Guru menyusun program pembelajaran individual bagi siswa yang berkebutuhan khusus di kelas.

Kata Kunci: Nilai kebangsaan dan pendidikan inklusif.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Secara bebas, inklusifitas dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga di dalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan difabilitas.

Lebih jauh, prinsip-prinsip inklusifitas sesungguhnya telah muncul dalam tatanan masyarakat. Semangat dan nilai-nilai *Bhineka Tunggal Ika, kegotong royongan, kebebasan, tenggang rasa*, serta *toleransi* sebagaimana yang tumbuh dan diajarkan oleh leluhur masyarakat Banjar sesungguhnya dapat diartikan sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang membawa kepada pemahaman mendasar akan masyarakat inklusif. Bukan hanya itu, fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah negara besar yang multi budaya, multi agama serta multi keberagaman yang lain sesungguhnya merupakan sebuah media yang subur atas tumbuh dan berkembangnya inklusifitas. Dengan demikian, tidaklah bisa dikatakan bahwa inklusif merupakan sebuah nilai baru yang dipaksakan untuk masuk dan diadopsi oleh tatanan masyarakat kita, namun sebaliknya, justru merupakan nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam tatanan sosial bangsa Indonesia.

Jika kita menengok ke belakang, terjadinya serangkaian konflik antar masyarakat dengan latar belakang suku/budaya yang berbeda, konflik antar umat beragama, penolakan terhadap salah satu kelompok etnis asing yang intinya adalah terjadinya sebuah proses dimana sebuah kelompok ditolak keberadaannya oleh kelompok lain yang lebih besar, sebenarnya fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah bukti bahwa tidaklah mudah untuk menuju kepada sebuah masyarakat yang inklusif, dan masyarakat kita sejatinya telah memulainya. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa salah satu kelompok yang tidak cukup terepresentasikan secara adil dalam pergerakan menuju sebuah masyarakat inklusif adalah masyarakat berkebutuhan khusus. Kita punya banyak tokoh agama yang berbicara tentang pluralisme, banyak pula tokoh budaya yang berbicara

tentang *multy culturalism*, serta aktivis perempuan yang gencar menyuarakan tentang *gender sensitive* serta *gender mainstream*, yang sesungguhnya apa yang mereka perjuangkan adalah untuk terwujudnya sebuah inklusifitas yang termasuk didalamnya adalah juga keadilan sosial. Namun demikian, sangat sedikit representasi *anak berkebutuhan khusus* yang bicara tentang perspektif difabilitas. Padahal sesungguhnya, kelompok yang paling berkepentingan terhadap terwujudnya sebuah masyarakat yang inklusif adalah kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Berawal dari sebuah logika berpikir bahwa dorongan menuju sebuah masyarakat inklusif ini muncul atas kenyataan terjadinya sebuah penolakan sosial (*social exclusion*) atas sekelompok masyarakat atau lebih, maka beberapa bentuk masalah sosial terhadap anak berkebutuhan khusus setidaknya dapat terlihat dalam beberapa ranah di bawah ini:

1. Ranah pemahaman dan perlakuan.

Anak berkebutuhan khusus sering kali dipahami sebagai kelompok yang tidak normal, tidak utuh, yang bahkan secara populer diistilahkan sebagai yang cacat, dan tidak sesederhana itu, difabilitas yang dialami oleh seseorang bahkan sering kali diikuti dengan pelabelan, anggapan serta pemahaman yang tidak rasional seperti anggapan bahwa itu merupakan sebuah dosa turunan, kutukan, atau bahkan akibat dari aib keluarga. Hal tersebut kemudian berakibat pada berbagai bentuk penerimaan yang salah seperti rasa malu, penolakan atas keberadaan anak berkebutuhan khusus, perlindungan yang berlebihan serta berbagai sikap yang secara sosial merugikan anak berkebutuhan khusus mulai dari tingkat keluarga sampai dengan masyarakat yang lebih luas.

2. Ranah kebijakan.

Undang-undang yang secara ekplisit mengatur perlindungan atas hak anak berkebutuhan khusus adalah Undang-undang No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang di dalamnya hanya mengatur setidaknya empat hak pokok saja yaitu hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, serta kesejahteraan sosial. Terlepas dari bagaimana ke empat hak tersebut diatur penyelenggaraan dan pemenuhannya bagi anak berkebutuhan khusus, tapi dengan hanya dicantumkannya empat hak tersebut, penulis yakin bahwa secara konstitusional, anak berkebutuhan khusus belum mempunyai cukup payung hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Sebut saja hak atas akses peradilan yang saat ini masih menjadi masalah besar

bagi anak berkebutuhan khusus dengan dianggapnya kelompok anak berkebutuhan khusus tertentu (anak berkebutuhan khusus netra, anak berkebutuhan khusus rungu dan anak berkebutuhan khusus grahita) sebagai kelompok yang tidak cakap hukum.

3. Ranah akomodasi dalam rangka mendukung partisipasi masyarakat berkebutuhan khusus.

Ini dapat berupa adaptasi, modifikasi, maupun berbagai bentuk langkah afirmasi yang diarahkan untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa anak berkebutuhan khusus setidaknya telah terlupakan kebutuhan mereka pada ranah ini. Ketika jalan-jalan, tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, terminal, alat transportasi, perkantoran, serta sarana publik lainnya dibangun, yang terbayang hanyalah pengguna yang berkaki dua, bertangan dua, berpenglihatan, berpendengaran serta cakap secara mental. Keberadaan anak berkebutuhan khusus pun tidak terbaca yang pada akhirnya, fasilitas publik yang kita punyai pun tidak dapat mengakomodasi akses seluas-luasnya yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus.

Dari ketiga ranah di atas, tampak jelas bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus masih belum dapat menjadi bagian yang inklusif dari lingkaran masyarakat. Keberadaan anak berkebutuhan khusus masih terlihat sebagai kelompok yang belum dipertimbangkan dalam konteks pembangunan dan pengembangan masyarakat secara luas yang dapat diartikan bahwa inklusifitas anak berkebutuhan khusus dalam masyarakat masih belum sepenuhnya terjadi. Meskipun, tidak juga dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah bentuk kesengajaan, dalam artian bahwa sangat dimungkinkan bahwa akar dari semua permasalahan di atas adalah masalah pemahaman, tetapi setidaknya itulah yang terjadi dan mesti dikenali sebagai modal dalam merumuskan kerangka masyarakat yang inklusif itu sendiri.

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada budaya sebagai alat dalam pengembangan pendidikan inklusif, termasuk alat promosi proses menuju inklusif. Mengingat nilai-nilai kebangsaan yang cukup luas, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai karakter masyarakat sekolah inklusif.

II. PEMBAHASAN

2.1 Nilai-nilai Kebangsaan dan Pendidikan Inklusif.

Nilai-nilai kebangsaan suatu masyarakat yang telah berkembang minimal memiliki lima sikap /karakter yang harus di kedepankan dalam hidup bermasyarakat di manapun mereka berada (Daud, 32: 1997). Kelima karakter yang dimaksud, yaitu: 1) sangat menghargai keberagaman: Bisa dikatakan, masyarakat yang sejati pasti taat menjalankan ajaran agamanya. Masyarakat kita juga sangat inklusif terhadap perbedaan, baik interen beragama maupun antar umat beragama. 2) Gotong royong; Tradisi gotong-royong adalah ciri khas yang selalu tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Ada ungkapan cukup terkenal yang menjadi pegangan hidup masyarakat terutama urang Banjar; *Gawi Sabumi Sampai Manuntung* (kerja bersama sampai tuntas) atau *Waja Sampai Kaputing* (kerja bersama dari awal sampai akhir) atau *Kayuh Baimbai* (dayung secara serempak). Maksudnya dalam melakukan pekerjaan sampai selesai dengan bergotong-royong secara bersama-sama, rambate rata hayu, singsingkan lengan baju, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. 3) Masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak bisa hidup tanpa berkelompok dan bergerombolan (rasa persaudaraan). Kebiasaan ini terbawa-bawa sampai mereka pergi merantau. Konon, perantau dari Banjar atau daerah lainnya pasti membangun rumah besar di daerah perantauannya karena memang sengaja untuk disediakan bagi keluarga yang datang. Tidak hanya keluarga yang sedarah dan masih dekat, asal Banjar saja sudah cukup bisa menjadi tiket masuk bertamu pada rumah orang Banjar di perantauan, 4) Kebebasan; Sejak kecil anak-anak kita sudah dilatih dan dididik orang tuanya untuk bebas memilih jalan hidupnya masing-masing agar cepat mandiri. Hal ini terkait erat dengan budaya bagaimana secepat mungkin melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan segera bebas, mandiri dan merdeka. 5) Pengabdian; Lihatlah masyarakat Indonesia yang berada di mana-mana, mereka tidak pernah merasa bahwa pengabdian harus dilakukan di tanah kelahirannya sendiri. Semua bumi ini adalah bumi Allah. Di manapun mereka berada pengabdian mutlak harus dilakukan dengan sepenuh hati. Memang ada sebagian orang yang berasal dari daerah tertentu di negeri ini sering kali berkeluh kesah ketika ditugaskan keluar dari daerahnya dan mengupayakan berbagai cara hanya untuk bisa kembali bertugas ke daerah sendiri. Orang Banjar tidaklah demikian. Mereka akan menganggap daerah

rantauannya sama artinya dengan daerahnya sendiri. Mereka tidak mau diskriminatif.

Pendidikan inklusif secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya atau kebangsaan. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mentransfernya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Tujuan pendidikan adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer nilai-nilai kebangsaan itu sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya, dan juga kita sebagai masyarakat mencita-citakan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik kedepannya, maka sudah dengan sendirinya pendidikan kitapun harus lebih baik lagi. Nilai-nilai kebangsaan atau kebudayaan sebagai hasil budi manusia, dalam hal berbagai bentuk dan manifestasinya, dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kultural dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern.

Manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya selalu berupaya untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dengan sifatnya yang kreatif dan dinamis manusia terus berevolusi meningkatkan kualitas hidup yang semakin terus maju, ketika alamiah yang mengendalikan manusia dengan sifatnya yang tidak *idle curiosity* (rasa keingintahuan yang terus berkembang) makin lama daya rasa, cipta dan karsanya telah dapat mengubah alam menjadi sesuatu yang berguna, maka alamiah yang dikendalikan oleh manusia.

Kegiatan budaya sebagai alat penting dalam pendidikan inklusif serta alat untuk menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi anak dan orang dewasa dalam masyarakat secara keseluruhan (Smith, 2006: 66). Secara khusus penulis akan memfokuskan pada pentingnya kegiatan budaya untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi dan membangun masyarakat yang inklusif secara formal maupun nonformal serta seting lainnya yang relevan. Seting pendidikan inklusif mencakup semua anggota masyarakat tanpa memandang usia, fungsi indera, fisik atau kognitif, latar belakang budaya dan pengalaman. Pendidikan inklusif adalah system pendidikan yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta

didiknya tanpa diskriminasi. Artinya apapun kondisi anak mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara holistik.

2.2 Penerapan Nilai-nilai Kebangsaan di Sekolah Inklusif.

Berdasarkan karakter yang tertuang dalam nilai-nilai kebangsaan, maka penulis merekomendasikan tentang nilai-nilai kebangsaan yang merupakan “ruh” pelaksanaan pendidikan inklusif dalam sebuah sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang di terima. Artinya semua masyarakat sekolah mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orangtua siswa. Mereka semua harus saling mengerti dan memahami. Tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif sesama masyarakat sekolah. Hal ini sangat sesuai dengan karakter suku Banjar yang sangat menghargai keberagaman.
- b. Setiap guru dan murid saling membantu. Guru dan murid saling menghargai dan membantu satu sama lainnya. Bekerjasama adalah salah satu kunci pokok dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Karena dengan bekerjasama, secara tidak langsung guru dan siswa akan membangun hubungan emosional yang baik.
- c. Guru menjalin kerjasama dengan orangtua/wali. Guru adalah ujung tombak pelaksana pendidikan. Sedangkan orangtua adalah orang yang paling memahami perkembangan anaknya. Olehnya itu dibutuhkan komunikasi yang intensif tentang perkembangan anak di sekolah.
- d. Memberikan harapan yang tinggi untuk semua siswa. Kepala Sekolah dan guru yakin bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka dari itu, kepala sekolah dan guru wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap peserta didiknya. Dalam pembelajaran semua siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus didorong untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran mereka. Setiap siswa di sekolah ini juga dinilai berdasarkan kemampuannya, terkhusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Guru juga mencegah siswa pada umumnya melabeling rekannya yang berkebutuhan khusus.
- e. Sekolah berusaha untuk meminimalkan praktek diskriminatif. Sekolah harus berusaha keras memerangi sikap diskriminasi dalam segala hal, utamanya yang sering terjadi adalah siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa pada umumnya. Salah satu langkah yang dilakukan guru adalah memberikan pemahaman tentang

kebersamaan adalah pesan moral pada setiap akhir pelajaran. Selain itu, bila terdapat murid yang saling mengejek perbedaan diantara mereka, maka murid yang berada di sekitarnya akan melaporkan kepada guru. Hal ini cukup ampuh dalam meminimalisir sikap diskriminasi yang kemungkinan besar terjadi di sekolah inklusi.

- f. Staf berusaha untuk menghapus semua hambatan untuk belajar dan partisipasi di sekolah. Guru menyusun program pembelajaran individual bagi siswa yang berkebutuhan khusus di kelas. Selain itu, guru juga yakin bahwa bukan hanya siswa yang berkebutuhan khusus saja yang akan menemui hambatan ketika pelajaran berlangsung, tetapi terdapat kemungkinan siswa lain juga akan mengalaminya. Meskipun dalam hal perencanaan pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus tidak dilibatkan dalam hal tersebut.

III. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan nilai-nilai kebangsaan pada sekolah inklusi terfokus pada membangun rasa penerimaan terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Sikap penerimaan menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tetapi penerimaan bukan karena keterpaksaan. Sekolah mengadopsi budaya lokal Banjar yang mengedepankan budaya saling menghargai dan menghormati semua orang. Maka dari itu, dengan sekolah inklusi diharapkan nilai-nilai kebangsaan ini melekat pada diri siswa semenjak dini. Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjorten (2003) menjelaskan:

“Nilai penting yang melandasi suatu sekolah inklusif adalah penerimaan, pemilikan, dan asumsi lain yang mendasari sekolah inklusif adalah, bahwa mengajar yang baik adalah mengajar yang penuh gairah, yang mendorong agar setiap anak dapat belajar, memberikan lingkungan yang sesuai, dorongan, dan aktivitas yang bermakna”.

Inklusivitas dalam hal nilai-nilai kebangsaan menjadi sebuah landasan dalam mengembang pendidikan inklusi. Karena bila budaya inklusi di sekolah telah tercipta, maka sikap-sikap diskriminasi dilingkungan sosial dengan sendirinya akan berkurang (Sunanto, 2004: 89). Guru, siswa, dan orangtua dapat saling memberikan masukan demi pengembangan sekolah. Perlu dipahami bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses jangka panjang, olehnya itu budaya inklusi yang telah tercipta dan perlu dilestarikan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, M. 2003. *Landasan Pendidikan Inklusif dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan LPTK. Makalah disajikan dalam Pelatihan Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen Jurusan PLB yang Diselenggarakan oleh Ditjen Dikti*. Yogyakarta, 26 Agustus 2002.
- Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjorten. 2003. *Pendidikan Kebutuhan Khusus- Sebuah Pengantar*, Program Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2000. *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar (Sebuah Tinjauan Teologis)*. Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Direktorat Pembinaan SLB, (2009). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Kebijakan pemerintah Dalam Pendidikan Inklusi*, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Mendiknas. 2010. *Permendiknas No 70 Tahun 2009*, Jakarta: Direktorat Jenderal Mendiknas.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981. *Adat-Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Smith, J. D. 2006. *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua* Bandung: Nuansa.
- Sumanto Dj, et All. 2004. *Pendidikan Yang Terbuka Bagi Semua*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam UNESCO Jakarta Office.
- Sunardi. 2002. *Pendidikan Inklusif: Prakondisi dan Implikasi Manajerialnya*, Makalah Temu Ilmiah Nasional Jurusan PLB, Bandung Agustus 2002.

PENDIDIKAN DAN KESADARAN NASIONALISME

Heri Susanto

herisusanto@unlam.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan dalam pengertian paling sederhana merupakan proses transfer budaya. Pendidikan dalam fakta sejarah telah membawa banyak perubahan, bukan hanya perubahan pada diri individu terdidik akan tetapi juga perubahan bangsa dan negara. Peran penting pendidikan terletak dari kemampuannya untuk membawa bangsa terjajah pada suatu kesadaran baru dalam memperjuangkan nasib bersama dan memahami kepentingan-kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Perkembangan pendidikan di Nusantara dapat dikatakan mengalami titik balik dengan adanya kebijakan Politik Etis. Melalui kebijakan pendidikan Politik Etis, orang-orang bumiputra harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat, sehingga Pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Secara tidak langsung, pengaruh Politik Etis terutama bidang pendidikan yaitu memberikan dampak positif bagi muncul kaum terdidik dan pergerakan di Indonesia. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam membuka wawasan dan memperkaya pemikiran para tokoh pendiri bangsa dalam memperjuangkan nasib bangsa. Dengan demikian bahwa pendidikan mempunyai keterkaitan yang sangat besar dengan Nasionalisme Indonesia.

Kata kunci: pendidikan, kesadaran dan nasionalisme.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Pengetahuan merupakan kekuatan yang mengubah kehidupan manusia. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia dimulai dari ditemukan dan dipahaminya pengetahuan baru oleh masyarakat. Dalam proses penyebaran pengetahuan dari individu ke masyarakat sebenarnya telah terjadi proses pendidikan.

Bila ditinjau dari sudut pandang tersebut, sejarah pendidikan telah dimulai dari masa sebelum manusia mengenal tulisan. Pendidikan dalam pengertian paling sederhana merupakan proses transfer budaya, yang didalamnya juga meliputi sistem pengetahuan, bahasa, religi, mata pencaharian dan lain sebagainya. Akan tetapi pendidikan pada masa awal memiliki beberapa perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan masa selanjutnya. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Bersifat sangat praktis, artinya hanya pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan hidup yang akan diajarkan.
2. Bersifat imitatif, artinya pendidikan yang diberikan hanya meniru apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dan sangat sedikit sekali mengalami modifikasi.
3. Bersifat statis, perubahan yang terjadi pada masa ini biasanya berlangsung sangat lambat. Pengetahuan yang diturunkan hanya bersumber dari pengetahuan orang tua atau generasi sebelumnya. Bahkan terdapat kecenderungan untuk takut mengubah kebiasaan yang ada karena adanya hukum adat.

Karena tujuan utama dari pendidikan pada masa ini adalah mempersiapkan anak untuk bertahan hidup, maka masyarakat pada masa ini juga belum mempunyai konsep sistematis tentang pendidikan. Sebagian besar pengetahuan yang diajarkan berhubungan dengan bagaimana menaklukkan tantangan dari alam.

Pada masa-masa selanjutnya pendidikan berkembang lebih kompleks, seiring berkembangnya pengetahuan maka pendidikan yang dilakukan juga semakin berkembang. Pengaruh kebudayaan luar juga berperan penting dalam perkembangan pengetahuan dan perkembangan pendidikan. Pada bagian

selanjutnya akan diuraikan bagaimana perkembangan pendidikan dari masa klasik sampai dengan era moderen.

Pendidikan dalam fakta sejarah telah membawa banyak perubahan, bukan hanya perubahan pada diri individu terdidik akan tetapi juga perubahan bangsa dan negara. Sebagai gambaran bisa kita lihat bagaimana lahirnya identitas kebangsaan negara-negara di Asia yang sangat dipengaruhi oleh insan-insan terdidik. Pendidikan bagi kebanyakan bangsa di Asia merupakan faktor penting yang melahirkan identitas kebangsaan. Peran penting pendidikan terletak dari kemampuannya untuk membawa bangsa terjajah pada suatu kesadaran baru dalam memperjuangkan nasib bersama dan memahami kepentingan-kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Tidak dipungkiri lagi bahwa membangun pendidikan pada hakekatnya merupakan proses memperkuat identitas kebangsaan yang seutuhnya.

II. NASIONALISME INDONESIA

Nasionalisme tiap bangsa di dunia tercipta melalui proses yang berbeda-beda, sehingga pada saat nasionalisme tersebut menampilkan wujudnya juga mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda. Nasionalisme Indonesia terbentuk dengan cara yang unik, berbeda dengan nasionalisme Eropa atau nasionalisme bangsa lain di Asia yang kebanyakan terbentuk dari adanya persamaan ras, suku, nenek moyang, atau hal lain yang melahirkan nuansa monokultural. Nasionalisme Indonesia justru terlahir di tengah keberagaman ras, suku, nenek moyang dan nuansa multikultural, dijelaskan oleh Elson (2008:101) bahwa sifat nasionalisme Indonesia yang bertahan lama, yakni karena kemampuannya menggugah pengabdian kepada satu bangsa sambil menampung toleransi multikultural berikut kepentingan daerah dan suku.

Lombard (2008: 1) dalam tinjauannya menyebutkan; sungguh tak ada satu pun tempat di dunia ini –kecuali mungkin Asia Tengah– yang, seperti halnya Nusantara, menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan besar dunia, berdampingan atau lebur menjadi satu. Realita geografik, kultural dan etnikal, Nusantara ini dihuni oleh ratusan suku dengan budaya yang beragam serta kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Fakta ini mendorong para perintis kemerdekaan dalam era idealisasi perjuangan menganut paham bahwa *bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah, nasib, tujuan*

dan cita-cita yang sama. Rumusan inilah yang menyatukan seluruh suku bangsa di Indonesia ini menjadi satu bangsa. Dan rumusan ini pulalah yang secara empiris berhasil menjadi pemicu untuk mencapai Indonesia merdeka (Soemitro, 1994: 32).

Lebih lanjut Yudi Latif (2011: 358) memaparkan; Bangsa Indonesia tidak seperti kebanyakan bangsa yang mengambil namanya dari kelompok etnik terdahulu: England dari Angles, Finland dari Finns, France dari Franks, Rusia dari Rus, Vietnam dari Viet, Thailand dari Thai, Malaysia dari Melayu, dan lain sebagainya. Ditinjau dari sudut ini, kesadaran kebangsaan Indonesia jelas bukanlah suatu perpanjangan dari kesadaran etno-kultural.

Fakta tersebut menjelaskan bahwa secara sadar Indonesia adalah negara yang disepakati akan melindungi dan menempatkan setiap suku, ras dan etnis yang terdapat didalamnya secara sejajar, tidak memihak etnis tertentu. Sikap nasionalisme yang dikembangkan para pendiri bangsa tersebut tentu saja diantaranya didasari oleh adanya persepsi positif terhadap keberagaman budaya bangsa. Para pendiri bangsa menyadari bahwa keberagaman yang ada telah menjadi kekuatan dalam perjuangan, terlebih pada masa revolusi. Kecenderungan berpikir seperti bukanlah sebuah pemikiran sederhana, para tokoh pendiri bangsa merupakan tokoh-tokoh terpelajar yang memahami ke-Indonesiaan dengan sangat baik.

III. NASIONALISME INDONESIA DAN PERAN KAUM TERPELAJAR

Kaum terpelajar dalam sejarah nasionalisme Indonesia dapat diibaratkan seperti lokomotif yang membawa bangsa Indonesia menuju cita-cita perjuangan. Pendidikan telah menciptakan banyak kemungkinan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun demikian pendidikan di Nusantara pada masa sebelum kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan panjang yang diwarnai berbagai corak dan budaya. Perkembangan pendidikan di Nusantara dapat dikatakan mengalami titik balik dengan adanya kebijakan Politik Etis.

Politik Etis di Indonesia muncul karena dipengaruhi oleh seorang Belanda bernama Van Deventer. Ia mengatakan bahwa Belanda sekarang telah maju dan disegani di dunia Eropa, sehingga tidak boleh begitu saja melupakan jasa dari penduduk penjajahannya yaitu Indonesia. Selain itu juga, ada beberapa

faktor yang menjadi latar belakang munculnya Politik Etis yaitu Perekonomian Liberal yang meluas, administrasi yang makin mencakup, dan merosotnya kesejahteraan bumiputra. Oleh karena Belanda merasa mempunyai hutang budi dan harus membalas budi bangsa Indonesia, maka Van Deventer mengusulkan cara baru yang disebut Politik Etis, yaitu usaha untuk mengangkat tingkat kehidupan bangsa Indonesia sebagai balas jasa. Politik Etis tersebut yaitu membangun irigasi di daerah-daerah pertanian/perkebunan, menyelenggarakan Emigrasi di daerah yang sudah dirasa padat dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984: 14).

Faktor lain yang mendahului kemunculan Politik Etis adalah, kemunculan partai liberal di Belanda akibat *aufklarung* pada abad ke-18 di Eropa, dan telah mendominasi kehidupan ketatanegaraan dan politik praktis di Belanda pada pertengahan abad ke-19 sampai dasawarsa kedua abad ke-20. Paham Liberalisme ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Hindia-Belanda seperti yang terjadi pada 1855, yaitu adanya instruksi kepada gubernur jenderal agar mengambil tindakan memperbaiki dan memperluas pendidikan bagi penduduk golongan Eropa dan ilmu pengetahuan mereka. Khusus bagi penduduk bumiputra, ditentukan agar di tiap kabupaten didirikan sekolah para remaja bumiputra. Pada 1867, dalam pemerintahan Hindia Belanda dibentuk suatu departemen tersendiri yang mengurus masalah pendidikan, agama dan kerajinan yang disebut *Departement Van Onderwijs En Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Kepentingan Kehormatan). Tujuannya adalah agar penduduk Bumiputra, Cina dan golongan lainnya berkesempatan memperoleh pendidikan Barat sebagai dasar pendidikan sampai pendidikan tinggi. Melalui kebijakan pendidikan Politik Etis, orang-orang Bumiputra harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat, sehingga Pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Pemerintah Belanda mendasarkan kebijakannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut: a) Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputra. Bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. b) Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Rifa'i, 2011: 75-76).

Menurut Nasution (2011: 20) beberapa ciri umum politik pendidikan Belanda, yaitu sebagai berikut :

1. Grudualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
2. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi.
3. Kontrol sentral yang kuat.
4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor terpenting dalam perkembangan pendidikan.
5. Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda.

Secara tidak langsung, pengaruh Politik Etis terutama bidang pendidikan yaitu memberikan dampak positif bagi muncul kaum terdidik dan pergerakan di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia memunculkan beberapa tokoh seperti Raden Tirtoadisoeryo yang mendirikan Sarekat Islam, organisasi Budi Utomo yang memiliki kepedulian terhadap para pelajar dan intelektual, organisasi Muhammadiyah yang mencanangkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan dan menghindari gerakan politik. Melalui organisasi pendidikan pertama kali yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Taman Siswa, pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan yang diorientasikan pada manusia sejati, manusia merdeka, berkaitan dengan soal budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis, menghitung, dan lain sebagainya (Muhammad Rifa'l, 2011).

Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan Barat. Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya, yakni, menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, dengan pendidikan model Barat akan diharapkan muncul kaum Bumiputera

yang berbudaya Barat, sehingga tersisih dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Pendidikan zaman Belanda membedakan antara pendidikan untuk orang pribumi. Demikian pula bahasa yang digunakan berbeda. Namun perlu dicatat, betapapun juga pendidikan Barat (Belanda) memiliki peran yang penting dalam melahirkan pejuang-pejuang yang akhirnya berhasil melahirkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah tahun 1900 muncul kelompok yang dinamakan "priyayi baru". Kebanyakan mereka adalah orang muda dari kalangan pangreh praja yang telah memanfaatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan Barat lanjutan (Miert, 2003: 3). Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang menarik sekaligus pola baru dalam perjalanan sejarah Nusantara. Kondisi ini membawa keuntungan bagi pembentukan nasionalisme Indonesia, meskipun dalam hal yang sama bagi sebagian analis merupakan sebuah keanehan karena para priyayi baru tersebut menunjukkan identitas budaya yang kadang mendua. Pada satu sisi, karena pengaruh pendidikan Barat, pergaulan yang luas dan berbagai faktor psikologis mereka menunjukkan cara hidup seperti orang Barat, misalnya dalam berpakaian. Akan tetapi dari sisi pemikiran, mereka memiliki gagasan yang sangat jelas tentang cita-cita kebangsaan. Kesadaran kebangsaan yang mereka miliki secara langsung maupun tidak adalah pengaruh pendidikan Barat yang mereka jalani, meskipun bila kita analisis nilai-nilai moral dan etika yang mereka tunjukkan sangat menunjukkan ciri ke-Indonesiaan.

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam membuka wawasan dan memperkaya pemikiran para tokoh pendiri bangsa dalam memperjuangkan nasib bangsa. Kekuatan pendidikan adalah perannya dalam mengubah paradigma seseorang menjadi lebih terbuka, matang dan realistis. Dapat dipahami mengapa pendidikan memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah bangsa, sehingga membangun pendidikan yang baik pada hakekatnya adalah sebuah investasi masa depan bagi bangsa tersebut.

IV. SIMPULAN

Pendidikan tak diragukan lagi pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Membangun pendidikan yang bermutu merupakan keharusan bukan pilihan, terlebih jika bangsa Indonesia ingin mewujudkan cita kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Pendidikan di masa reformasi juga belum bisa sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam proses pendidikan, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari memperjuangkan hak-hak siswa. Meskipun demikian kita juga dapat melihat bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk terus memperbaiki pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Elson, R.E. 2008. *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Peripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu bagian I: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miert, Hans Van. 2003. *Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme Indonesia dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: KITLV.
- Nasution. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Soemitro. 1994. "Tantangan dan Peluang Wawasan Kebangsaan", dalam *Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia*. Jakarta: LPSP dan Gramedia Widiasarana Indonesia.

NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Herry Porda Nugroho Putro
pordabanjar@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan kondisi Bangsa Indonesia yang terkesan kehilangan jati diri bangsa. Pendidikan sejarah selalu dipermasalahkan sebagai pendidikan untuk kepentingan politik, sehingga pendidikan sejarah kurang mendapatkan alokasi waktu dalam setiap jenjang pendidikan. Nilai-nilai kebangsaan sebagai jati diri bangsa dapat dibangun melalui pemahaman yang benar dan jernih tentang perjalanan sejarah bangsanya. Mata pelajaran sejarah yang terkesan rentetan peristiwa, pada dasarnya memiliki peran fundamental terhadap kepribadian dan kebangsaan siswa. Pada setiap peristiwa sejarah dalam pokok bahasan mengandung nilai-nilai. Pembelajaran sejarah dapat menggali nilai-nilai dari setiap peristiwa sejarah pada mata pelajaran melalui pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Metode yang dikembangkan dalam pembelajaran sejarah adalah metode yang bertumpu pada keterampilan berpikir dan pengembangan intelektual, siswa belajar sesuai kaidah keilmuan sejarah.

Kata kunci: nilai-nilai, kebangsaan, pembelajaran sejarah, keterampilan intelektual, jati diri.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen PSP Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini karakter bangsa Indonesia terusik dengan berbagai peristiwa yang kurang nyaman, peristiwa tersebut menyangkut berbagai aspek dari politik, sosial, budaya, ekonomi, hingga agama. Lingkup peristiwa hampir terjadi di berbagai daerah dan kalangan. Terhadap berbagai peristiwa tersebut perlu dilakukan refleksi tentang karakter yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga terjadi revitalisasi dan reaktualisasi karakter bangsa dalam kehidupan.

Beberapa peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini menyadarkan kita tentang arti penting jati diri bangsa, rasa kebangsaan, kebersamaan, dan saling mencintai sebagai bangsa, sebagai wujud nasionalisme. Peristiwa demi peristiwa seakan memperlihatkan tergerusnya nasionalisme, dapat menimbulkan rasa kurang nyaman dan membahayakan kelangsungan bangsa.

Sejarah Indonesia telah menggambarkan pasang surut kekuatan dari nasionalisme dalam menghadapi krisis multi dimensional, dan telah memperlihatkan pula kerapuhan bila nasionalisme tergerus yang dapat menimbulkan kondisi kekeruhan dalam berbagai kehidupan.

Era informasi dan perkembangan iptek yang pesat perlu disikapi secara tegas dan bijaksana, karena dampak yang ditimbulkan. Satu sisi pergerakan informasi dan iptek harus diikuti agar tidak tertinggal, satu sisi terdapat muatan-muatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Pendidikan dituntut untuk menjawab permasalahan bangsa, terutama pendidikan yang berhubungan dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa, serta pendidikan secara holistik. Hal ini terkait dengan hakekat pendidikan sebagai institusi pembangunan karakter dan pewarisan nilai-nilai.

Peran pendidikan dalam membangun karakter kebangsaan perlu dilakukan revitalisasi secara sinergis, dengan dimotori pembelajaran agama, sejarah, dan PKn. Untuk itu diperlukan formula atau desain pembelajaran yang dapat mengintegrasikan dan mengaktualisasikan aspek nasionalisme.

Pembelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai terkesan membosankan, karena terjadi pengulangan dan hapalan. Metode yang digunakan terkesan abstrak kurang menyentuh kehidupan siswa. Alokasi waktu yang disediakan terbatas, kurang sesuai dengan beban standar kompetensi. Peristiwa yang menjadi pokok studi tidak dekat dengan siswa, sehingga siswa kurang merasakan manfaatnya.

II. NASIONALISME DAN KARAKTER SEBUAH REFLEKSI

Membicarakan nasionalisme pada era kini terasa sesuatu yang membosankan, sesuatu yang dianggap usang. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi dan pembahasan yang dapat mengarah pada bentuk fundamental nasionalisme bagi suatu bangsa. Kondisi sosial-politik akhir-akhir ini menjadi indikator perlunya revitalisasi dan reaktualisasi nasionalisme dalam berbagai aspek kehidupan.

Nasionalisme bila dicermati dari beberapa pendapat merupakan paham kebangsaan, konotasinya adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme tumbuh berdasarkan perjalanan sejarah dan persamaan nasib untuk membentuk suatu negara. Renan (1965: 135-140) mengatakan "*A nation ... a spiritual principle, ... A nation is a great solidarity, created by the sentiment of the sacrifices which have been made and of those which one is disposed to make one in the future.*" Soedjatmoko (1984) mengatakan bahwa nasionalisme adalah pernyataan kemauan suatu bangsa untuk menegaskan kembali identitasnya. Bangsa muncul sebagai hasil dari proses sejarah, semua bangsa mempunyai sejarah yang terjadi sebelumnya, komunitas awal bersejarah merupakan komponen penting dalam pembentukan bangsa (Grosby, 2009). Anderson (1999: 7) melihat bahwa suatu bangsa adalah *imajiner*, para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak tahu dan tidak kenal dengan sebagian besar anggota lain, tetapi setiap individu bangsa tersebut memiliki bayangan tentang kebersamaan mereka. Ditegaskan oleh Arnold Toynbee (Perry, 1982: 63) bahwa nasionalisme berhubungan dengan tindakan dan cara berpikir individu sebagaimana keseluruhan masyarakatnya.

Nasionalisme bangsa Indonesia yang tumbuh sejak awal abad 20 dalam bentuk perlawanan menghadapi kolonial dan mempertahankan kemerdekaan, dituntut terus berlanjut hingga kini (Kartodirdjo, 2002 dalam Herry, 2006). Aspek *Kontinuitas* terlihat dahsyatnya perjuangan bangsa Indonesia pada saat mencapai kemerdekaan. Hal ini merupakan kekuatan raksasa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan (Simatupang, 1981 dalam Herry, 2006).

Francis Fukuyama (Saul, 2008: 454) menegaskan arti penting memperkuat negara bangsa agar dapat menghadapi masyarakat yang kompleks. Kekuasaan diperlukan untuk menegakkan aturan hukum secara dosmetik.

Berangkat dari beberapa pemikiran di atas indikator nasionalisme yang perlu diteguhkan kembali adalah rasa memiliki, cinta tanah air, solidaritas, tanggung jawab, rela berkorban, dan pantang menyerah. Semua indikator tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah. Sejarah lokal di berbagai daerah yang mewarnai perjuangan dalam kehidupan mencerminkan perjuangan untuk maju dan sejahtera, merupakan wujud nasionalisme.

Rakyat Kalimantan Selatan misalnya bila dilihat dari perjalanan sejarahnya mengalami pasang surut perjuangan untuk mencapai kesejahteraan, sama seperti yang dihadapi daerah-daerah lain di Indonesia. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan bila dicermati merupakan benang merah yang saling berhubungan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Revitalisasi melalui sumber-sumber sejarah yang berupa artefak, arsip, dan tokoh-tokoh pejuang dapat memperlihatkan indikator nasionalisme. Museum Lambung Mangkurat, Balai Arkeologi, Depo Arsip Daerah menyimpan bukti perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan.

Bondan (1953: 65) menulis kisah Demang Lehman pahlawan perang Banjar sebelum naik ke atas tiang gantungan yang berseru: "*Dangar, dangar barataan! Banua Bandjar lamun kahada lakas dipalas lawan banju mata 'darah' marikit dipingkuti kompeni wolanda.*" Idwar Saleh menggambarkan dalam lukisan Perang Banjar kegigihan masyarakat Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Pangeran Antasari melawan penjajah Belanda dengan semboyan *haram manyarah*. Helius Sjamsuddin (2002) menggambarkan perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan bersama-sama dengan masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu memberikan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Wajidi (2007) menggambarkan nasionalisme dari masyarakat Kalimantan Selatan sejak tahun 1901 sampai 1942, di mana masyarakat Kalimantan Selatan berjuang dengan gigih lewat berbagai organisasi pergerakan di daerah dan berkolaborasi dengan organisasi pergerakan di daerah-daerah lain.

Gambaran singkat perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan tersebut merupakan indikator semangat nasionalisme yang hidup dan berkembang. Nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam perjuangan tersebut terus bergulir mengikuti perkembangan jaman.

Nilai-nilai nasionalisme selain dapat dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia di pusat maupun di daerah-daerah, juga dapat dilihat dari

kebudayaan yang berkembang di berbagai daerah. Hal ini dapat menjadi rasa kebanggaan akan kebesaran dan keindahan, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya. Masing-masing daerah mulai Aceh hingga Papua memiliki kekhasan budaya yang dapat memupuk rasa nasionalisme (kebanggaan, kebersamaan).

Lingkungan, flora, dan fauna serta sumber daya alam yang kaya dapat memupuk jiwa nasionalisme. Bangsa-bangsa Barat sejak abad ke-15 tertarik dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia, mereka berusaha dengan segala cara agar dapat menguasai sumber daya alam. Bangsa Indonesia dituntut untuk terus berjuang mempertahankan dan mengelola lingkungan, agar tidak dikuasai oleh bangsa asing.

Pendidikan karakter dekat dalam keluarga, keluarga adalah pusat pengembangan nilai-nilai, internalisasi dan pewarisan nilai-nilai dalam keluarga mendukung tumbuhnya karakter. Sekolah merupakan operasional pendidikan karakter dari keluarga. Ragam individu dan teman dalam multi interaksi di sekolah berpengaruh terhadap perkembangan karakter siswa. Sekolah selain sebagai *transfer of knowledge*, juga berperan penting terhadap kepribadian bangsa (Azra, 2000). Menurut Nasution (1999) sekolah adalah suatu lembaga tempat pewarisan nilai-nilai dan jati diri bangsa.

III. PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMUPUK NASIONALISME

Pendidikan merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam memelihara dan mewariskan kebudayaan pada masyarakat pendukungnya. Pewarisan nilai diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan (Adiwikarta, 1988). Nilai-nilai dalam budaya masyarakat diwariskan dengan tujuan agar setiap individu menjadi bagian dan dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakatnya.

Individu secara berkelanjutan mengenyam pendidikan, serta beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak terputus sebagai sosialisasi (Khleif, 1971). Pendidikan juga mempersiapkan manusia dalam perkembangan zaman, seperti saat ini yang ditandai dengan percepatan IPTEK dan informasi (Micklethwait, 2000 dalam Herry, 2006). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dapat menimbulkan anomali dan

menggoncangkan masyarakat. Pendidikan sebagai fundamental untuk pengembangan keterampilan dan keperibadian, sehingga masyarakat siap pada abad ke-21 (Kennedy, 2002 dalam Herry). Umar Tirtarahardja (2005) mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran sebagai proses transformasi budaya, siswa melalui institusi pendidikan belajar tentang kebudayaan yang ada di masyarakatnya maupun kebudayaan dalam konteks berpikir ilmiah. Pendidikan juga sebagai proses pembentukan pribadi agar individu yang belum dewasa dapat menjadi dewasa di bawah bimbingan individu dewasa, sehingga dapat menjadi mandiri dan belajar untuk dirinya sendiri. Pendidikan merupakan proses penyiapan warga negara untuk menjadi warga negara yang baik, tahu akan kewajiban dan hak. Perkembangan peserta didik sejalan dengan tujuan nasional sesuai dengan falsafah atau ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Pendidikan 2003 bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara dan warga masyarakat yang memiliki kepribadian nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berangkat dari beberapa pengertian pendidikan, nasionalisme merupakan komponen strategis yang menjadi tujuan pendidikan. Pada institusi sekolah semua mata pelajaran merupakan kesatuan untuk mempersiapkan peserta didik sehingga memiliki rasa cinta pada tanah air, dan memiliki kepribadian nasional. Subtansi mata pelajaran memperkenalkan pada hakekat keilmuan untuk berpikir kritis dan mengembangkan rasa ingin tahu, siswa diperkenalkan dan diajak menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan segala aspek kehidupan, sehingga tumbuh rasa memiliki, tanggung jawab, dan kegigihan. Pada gilirannya siswa dapat memahami jati dirinya sebagai bangsa. Distribusi nilai-nilai utama dalam mata pelajaran di SMP telah dijabarkan oleh Kemdiknas (2013) sebagai berikut:

Mata Pelajaran	Nilai Utama
1. Pendidikan Agama	Religius, jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan social, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, peduli
2. PKn	Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keragaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
3. Bahasa Indonesia	Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, nasionalis
4. IPS	Nasionalis, menghargai keberagaman, Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, peduli social dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur, kerja keras
5. IPA	ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, cinta ilmu
6. Bahasa Inggris	Menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerjasama, patuh pada aturan social
7. Seni Budaya	Menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis
8. Penjasorkes	Bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain
9. TIK/Keterampilan	Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain
10. Muatan Lokal	Menghargai keberagaman, menghargai karya orang lain, nasionalis, peduli

IV. PEMBELAJARAN SEJARAH

4.1 Materi Sejarah

Sejak reformasi digulirkan, materi sejarah untuk sekolah mengalami rehabilitasi, terutama yang berhubungan dengan legitimasi dan dominasi Orde Baru. Materi sejarah sepertinya mengarah pada penjernihan sejarah (padahal pada materi sejarah terdapat subyektivitas). Meskipun demikian materi sejarah di sekolah bertujuan untuk membangun kesadaran sejarah siswa, periodisasi materi sejarah penting, arah dimulai pada sejarah nasional bergerak pada sejarah dunia. Sebagaimana Edi S. (2007) mengatakan bahwa materi sejarah harus dapat memperkenalkan dan menggugah siswa atas keberadaan bangsanya, tumbuh rasa memiliki sebagai bangsa, memiliki kepribadian dan jati diri (bangsa). Selanjutnya diarahkan pada materi sejarah dunia sebagai bukti bahwa bangsanya tidak dapat hidup sendiri, penting hidup bersama antar bangsa.

Sejarah yang menjadi konsumsi siswa di sekolah bukan hanya merupakan kegiatan intelektual atau akademis, namun terdapat sisi politik, yaitu memperkuat identitas bangsa. Hal ini terlihat materi sejarah pada setiap perubahan kurikulum, setelah reformasi mata pelajaran sejarah mendapat sorotan, materi sejarah perlu pelurusan, selain penjernihan peranan penguasa Orde Baru, juga masalah penjernihan peristiwa kudeta yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965. Muncullah berbagai versi sejarah, terutama periode perang kemerdekaan hingga Orde Baru. Munculnya versi ini karena adanya penonjolan dari peran penguasa Orde Baru. Terhadap berbagai versi ini, kembali pada hakekat dari belajar sejarah, yaitu penumbuhan kesadaran sejarah, dan penumbuhan rasa kebangsaan sebagai bangsa, apapun bentuk peristiwanya dari perjalanan bangsanya, siswa harus diajak memahami dan berpikir (*historical thinking*) tentang baik buruk bangsanya, sehingga yang buruk tidak terulang lagi, yang baik nilai-nilainya terus berlanjut.

Siswa perlu diberi gambaran, bahwa bagaimana Bangsa Indonesia selalu dianggap buruk dalam perjalanan sejarahnya, tulisan-tulisan Belanda misalnya selalu menempatkan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang statis tidak berkembang. Hal ini terlihat dari tulisan Van Leur (1940), yang menggambarkan peran penting Belanda di Indonesia, tidak terlihat peranan dari Orang Indonesia dalam tulisannya. Demikian juga Schrieke (1957) yang melihat Orang Indonesia sebagai obyek kekuasaan Belanda. Bahkan istilah penjajahan Belanda selama 350 tahun perlu mendapat pengkajian kembali, karena beberapa peristiwa di wilayah Indonesia terus melakukan perlawanan dan Belanda mengalami kesulitan. Untuk itu perlu memikirkan ulang historiografi Indonesia (Nordholt, Bambang P., Ratna S., (2008), khususnya buku ajar di sekolah.

Materi sejarah lokal tentang Prasejarah dapat untuk membangun karakter bangsa melalui, nilai-nilai yang terlihat adalah peduli lingkungan, kreatif, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, mandiri, komunikatif, toleransi, hormat, gotong royong, peduli sosial, dan religius (Jati, S. S. P, 2014: 83).

Bahan sejarah di sekolah perlu dikaitkan antara keberadaan bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa lain. Sorotan diarahkan pada arti penting materi sejarah (penulisan sejarah) dalam perspektif lokal dan global. Hal ini telah dikembangkan oleh Azyumardi Azra pada tahun 1994 tentang jaringan

ulama Nusantara dan Timur Tengah, serta tulisan Denis Lombard tahun 2001 tentang Jawa sebagai silang budaya. Nilai-nilai kebangsaan akan semakin jelas terlihat bila aspek peran Indonesia dalam khasanah global juga menjadi materi pelajaran sejarah.

Arah global dalam materi pelajaran sejarah ditekankan oleh Zuhdi, S (2014) dapat mengembangkan takwa dan akhlak mulia, mandiri kreatif, dan demokratis. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam konteks ini salah satunya dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang pantang menyerah, dan menyuarakan kondisi Indonesia di Negeri Belanda.

Pisani, E (2014) menggambarkan Indonesia sebagai *Exploring the Improbable Nation*, dikatakan oleh Pisani (2014: 2) "*Indonesia has been working on that 'etc' ever since. Many countries have struggled to find a raison d'etre that goes beyond lines drawn on a map by former colonist. But few have had to mash together as many elements as Indonesia. Modern Indonesia runs around the girdle of the Earth,...*"

Oostindie, G (2016) menulis sejarah tentang Indonesia tahun 1945-1950 dengan fokus studi pada serdadu-serdadu Belanda di Indonesia. Tulisan ini menarik bila dapat menjadi bahan materi pelajaran sejarah berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan, karena para serdadu Belanda yang dikirim ke Indonesia merasa menyesal dan sedih harus berhadapan dengan para pejuang Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Buku ini menarik dan dapat menggugah rasa kebangsaan, para serdadu Belanda yang sekarang veteran perang Belanda merasa telah melakukan kejahatan perang. Mereka waktu itu tidak tahu bila akan dikirim ke Indonesia sebuah negara yang sudah merdeka. Pengiriman 220.000 serdadu untuk bertempur dan kalah, selanjutnya pengiriman itu adalah tindakan yang salah, mereka merasa malu.

4.2 Pembelajaran Sejarah

Joko S (2013: 16) pembelajaran sejarah perlu memperhatikan langkah-langkah strategis peningkatan akademis guru melalui pendalaman materi kurikulum, mengembangkan kemampuan didaktik metodik, meningkatkan keterampilan guru dalam mengadopsi perkembangan ipteks, menyiapkan bahan ajar yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan tetapi juga aspek sikap, dan pengadaan media audio visual yang lebih representatif. Hal ini menunjukkan sejarah adalah pengetahuan tentang peristiwa perjuangan bangsa pada masa

lampau, sumber pelajaran penerapan berbagai nilai. Fungsi didaktik pengetahuan sejarah agar generasi yang akan datang dapat mengambil nilai-nilai dari pembelajaran dan pengalaman pendahulu-pendahulunya untuk tauladan dan model (Kartodirdjo, S, 2002).

Mata pelajaran yang dekat dengan pembangunan karakter bangsa adalah mata pelajaran sejarah. Posisi mata pelajaran sejarah pada setiap jenjang pendidikan terlihat dipinggirkan, porsi waktu tidak sesuai dengan standar kompetensi. Subtansi materi banyak dikurangi, sehingga kurang keterkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Kaitan global dalam bentuk sejarah dunia juga dikurangi, padahal perkembangan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yang terjadi dibelahan dunia yang lain.

Sartono Kartodirdjo (2002 dalam Putro, H. P. N., 2006) mengatakan bahwa pembelajaran sejarah merupakan pendidikan intelektual (*intellectual training*), dan pendidikan moral bangsa bertanggung jawab kepada masa depan bangsa. Pembelajaran (*instruction*) dan pendidikan intelektual (*intellectual training*) pada pembelajaran sejarah bukan hanya memberikan gambaran masa lampau, melainkan memberikan latihan berpikir kritis, menarik kesimpulan, menarik makna dan nilai dari peristiwa sejarah yang dipelajari. Latihan berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah dengan pendekatan analitis, melalui pertanyaan "mengapa" (*why*) dan "bagaimana" (*how*) berbeda dengan bentuk pertanyaan "siapa" (*who*), "apa" (*what*), "di mana" (*where*), dan "kapan" (*when*).

Pembelajaran sejarah yang dapat mendukung pengembangan nilai-nilai kebangsaan harus berpusat pada siswa dan kooperatif, seperti: (1) *picture study*, (2) *Document study*, (3) *questioning*, (4) *text book study*, (5) *simulation and drama*, (6) *note-making*, dan (7) *map study* (Garvey dan Krug, 1977 dalam Putro, H. P. N., 2006).

Pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dapat dilakukan dengan meminjam pandangan Gunning (1978: 34 dalam Putro, H. P. N., 2006) dengan keterampilan intelektual berupa *translation*, *interpretation*, *Application*, *extrapolation* (permainan, simulasi, dan diskusi), *evaluation*, *analysis* (menganalisa peristiwa sejarah ke dalam bagian-bagian), dan *synthesis* (menggabungkan bagian-bagian). Nilai-nilai kebangsaan dapat ditumbuhkan melalui pengembangan empati pada diri siswa, kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan melalui drama, permainan, simulasi, dan eksperimen (Herry, P. N. P., 2006).

Wineburg (2001: 63-173 dalam Putro, H. P. N., 2006) mengatakan bahwa siswa perlu diajak membaca teks-teks sejarah, sehingga siswa tumbuh kemampuan berpikir. Teks sejarah tersebut berupa biografi atau dokumen sebagai sumber sejarah.

V. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

Karakter bangsa dapat dibangun dalam diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini berkaitan dengan aktualisasi yang dilakukan siswa untuk pembentukan karakter terutama keterampilan. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah beragam, antara lain: olah raga, kesenian, Pramuka, karya ilmiah, kelompok pecinta alam, dan Palang Merah.

Semua bentuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Pramuka merupakan kegiatan yang dekat hubungannya dalam pembangunan karakter bangsa. Setiap hari Jum'at semua siswa di seluruh wilayah Indonesia menggunakan seragam Pramuka, tetapi tujuan dari Pramuka kurang terlihat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu revitalisasi dari kegiatan Pramuka.

Arti penting kegiatan Pramuka dapat dilihat dari pengertian sebagai kegiatan yang menyenangkan di alam terbuka agar supaya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta menjadi warga negara Indonesia yang ber-Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sasaran dari kependidikan kepramukaan diuraikan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1980) adalah: kuat keyakinan beragama, tinggi mental dan moralnya, berjiwa Pancasila, sehat dan kuat jasmani, cerdas dan trampil, berjiwa kepemimpinan dan patriot, dan berkesadaran nasional.

Gerakan Kepramukaan telah disesuaikan menurut usia mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Kemerosotan Gerakan Pramuka dikarenakan persepsi dikalangan pelajar bahwa Gerakan Pramuka kurang sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang menantang dan penjelajahan sesuai dengan perkembangan siswa. Siswa perlu ditumbuhkan kebanggaannya sebagai anggota Gerakan Pramuka. Salah satu aspek penting untuk mengembangkan kembali Gerakan Pramuka adalah keterlibatan aktif dari para pimpinan dan tokoh masyarakat.

VI. SIMPULAN

Nilai-nilai kebangsaan dapat dibangun dengan sentuhan pendidikan, karena pendidikan pada hakekatnya adalah mempersiapkan generasi muda bangsa untuk masa depan bangsa. Semua mata pelajaran di sekolah mengandung karakter bangsa sesuai dengan perkembangan keilmuan, untuk itu substansi pada semua mata pelajaran harus bermakna bagi kehidupan siswa, model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran yang bertumpu pada karakter siswa. Model pembelajaran tersebut bermuara pada teori belajar dan filsafat konstruktivisme.

Mata pelajaran yang dekat dengan pembangunan karakter bangsa adalah mata pelajaran sejarah, karena mengandung substansi untuk memahami jati diri bangsa. Untuk itu model pembelajaran yang dikembangkan bukan model pembelajaran yang membosankan, bertumpu pada guru, melainkan model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa, diawali dengan pemahaman hingga melakukan inkuiri.

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter bangsa. Gerakan Pramuka memiliki kedekatan untuk membangun karakter bangsa, karena cirinya adalah membangun kepribadian siswa untuk dirinya sendiri dan untuk bangsa. Siswa dalam Gerakan Pramuka diharapkan cerdas, trampil, mencintai tanah air, dan patriot bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, S. 1988. *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta: Depdikbud.
- Anderson, B. 1999. *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. 2000. "Pembangunan Karakter Bangsa: Pendekatan Budaya, Pendidikan, dan Agama".
- Bondan, A.H.K. 1953. *Suluh Sejarah Kalimantan*. Fajar: Banjarmasin.
- Edi S. 2007. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Rajawali.

- Grosby, S. 2009. *Sejarah Nasionalisme Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Heliuss Sjamsuddin. 2002. *Pegustian dan Temenggung. Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti. Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jati, S. S. P. 2013. Prasejarah Indonesia: Tinjauan Kronologi dan Morfologi. *Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya*. Tahun Ketujuh, Nomor 2, Desember 2013. ISSN 1979-9993. Malang: Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UNM.
- Kartodirdjo, S. 2002. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kemdiknas. 2013. *Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemdiknas.
- Khleif, S.B. 1971. The School as a Small Society. Wax, M.L., Diamond, S., Gearing, F.O. (ed). *Anthropological Perspectives on Education*. London: Basic Book, Inc.
- Kohn, H. 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta : Jembatan.
- Kwarnas. 1980. *Bahan Kursus Pembina Pramuka Mahir*. Jakarta: Cibubur.
- Nasution, A. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nordholt, H. S., Bambang P., Ratna S. 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Oostinde, G. 2016. *Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah*. Jakarta: Obor.
- Perry, M. 1982. *Arnold Toynbee and The Crisis of The West*. Washington: University Press of America, Inc.
- Pisani, E. 2014. *Indonesia Etc. Exploring the Improbable Nation*. Jakarta: Lontar.
- Putro, H. P. N. 2006. Model Pembelajaran Sejarah untuk Meningkatkan Kesadaran Sejarah Melalui Pendekatan Inkuiri (Studi Pembelajaran pada Siswa SMP Negeri di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan). *Disertasi*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Renan, E. 1965. Dalam Kohn, H. *Nationalism, Its Meaning and History*. Florida: R.E. Krieger & Coy.

- Saifuddin, A. F., Karim, M. *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia.
- Sartono Kartodirdjo. 2002. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Saul, J.R. 2008. *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayono, J. 2013. *Pembelajaran Sejarah di Sekolah: Dari Pragmatis ke Idealis*. Tahun Ketujuh, Nomor 1, Juni 2013. ISSN 1979-9993. Malang: Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UNM.
- Soedjatmoko. 1992. "Antara Filsafat dan Kesadaran Sejarah" dalam William H. Frederick dan Soeri Soeroto (1982) *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta : LP3ES.
- Umar Tirtarahardja. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wajidi. 2007. *Pergerakan Nasional di Kalimantan Selatan 1901-1941*. Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar.
- Zuhdi, S. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu.

PEMBELAJARAN SEJARAH UNTUK PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Hieronymus Purwanta
purwantah@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini Indonesia dilanda oleh arus egoisme, sektarianisme dan kosmopolitanisme. Akibatnya penanaman nasionalisme melalui pendidikan menjadi kurang mampu dilakukan dengan optimal. Satu mata pelajaran yang secara eksplisit bertugas menanamkan nasionalisme, yaitu sejarah, juga kurang mampu menunaikan tugas dengan optimal. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah mengapa pelajaran sejarah tidak mampu bekerja optimal? Dari penelusuran terhadap buku teks pelajaran sejarah untuk Kurikulum 2013 dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dua permasalahan utama yang menjadi kendala pelajaran sejarah di SMA adalah materi dan proses pembelajarannya. Materi pelajaran sejarah lebih menonjolkan keunggulan bangsa asing dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Akar permasalahannya adalah terdapatnya unsur neo-kolonialisme dan kepentingan kelompok penguasa yang mempengaruhi konstruksi materi pelajaran sejarah. Di pihak lain, proses pembelajaran sejarah terkendala oleh kapabilitas guru dan metode yang diterapkan.

Kata Kunci: nasionalisme, pembelajaran sejarah, kapabilitas guru.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen di Program Studi Sejarah Universitas Sanata Dharma.

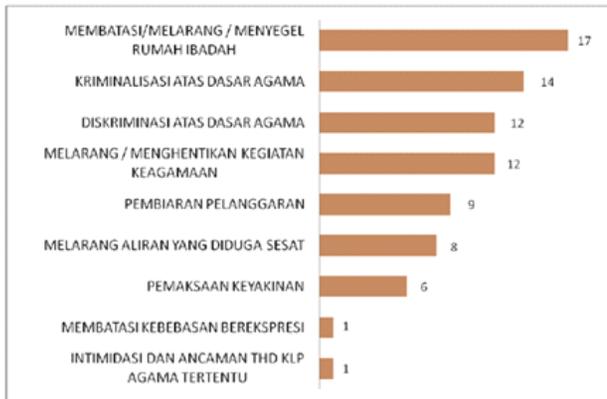
I. PENDAHULUAN

Ketika orang memperbincangkan nasionalisme, permasalahan pertama yang muncul adalah apakah topik itu tetap relevan di era egoisme, sektarianisme dan globalisme ini? Di tingkat nasional, hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita betapa dewasa ini berbagai lapisan masyarakat mengutamakan kepentingan pribadi dan bersedia mengorbankan kepentingan saudara, tetangga bahkan bangsanya. Nilai-nilai persaudaraan dan gotong royong yang pernah dihidupi oleh masyarakat masa lalu, sekarang ini tinggal kenangan dan digantikan oleh nilai-nilai persaingan yang menonjolkan menang–kalah. Sejak kecil anak dididik di sekolah dengan sistem ranking. Mereka dibiasakan untuk belajar keras dengan motivasi demi mengalahkan teman-teman sekelasnya dan menjadi juara. Nilai-nilai inti seperti ketertarikan (*curiosity*), mempertanyakan (*questioning*) dan *mesu budi* (asketisme intelektual) yang seharusnya menjadi roh bagi anak dalam petualangan akademik mereka justru terlupakan untuk ditanamkan dan dibiasakan dalam diri para siswa.

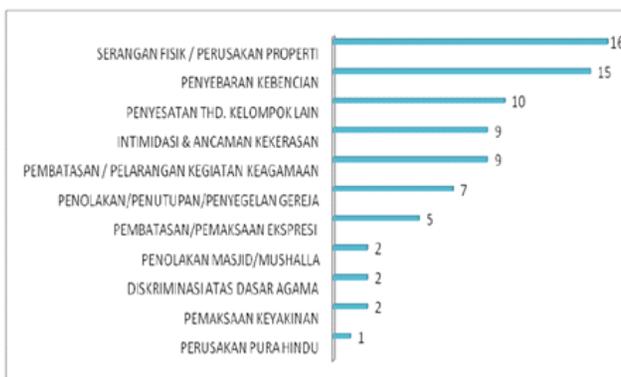
Dengan menghidupi nilai persaingan, ketika tumbuh menjadi dewasa, anak akan terbiasa dan bahkan semakin canggih dalam merancang dan menjalankan trik-trik mengalahkan teman, saudara dan tetangganya untuk meraih berbagai keinginan. *Issue* atau berita *hoax*, ujaran kebencian atau *hate speeches*, penyebarluasan kesalahan/aib orang lain yang sudah begitu akut melanda dunia media sosial Indonesia, merupakan manifestasi dari keinginan untuk memenangkan persaingan antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lainnya. Terlepas dari langkah kepolisian yang menempatkan hal-hal itu sebagai tindak kriminal, semakin intensifnya persaingan dan semakin canggihnya teknik untuk mengalahkan pesaing tanpa sadar akan menghilangkan rasa kepedulian terhadap penderitaan orang lain (*compassion*) yang menjadi dasar bagi tumbuhnya nasionalisme.

Selain kesuksesan dunia pendidikan dalam menanamkan nilai persaingan, permasalahan yang tidak kalah menarik dewasa ini adalah semakin berkembangnya sektarianisme, terutama berbasis sekte agama. Pada Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (LKBB) yang disusun oleh the Wahid Institute dijelaskan bahwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara; sementara 78 peristiwa

melibatkan 89 aktor non-negara.¹ Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara antara lain membatasi/melarang/menyegel rumah ibadah, kriminalisasi atas dasar agama, diskriminasi atas dasar agama, melarang/menghentikan kegiatan keagamaan, pembiaran pelanggaran, melarang aliran yang diduga sesat, pemaksaan keyakinan, melakukan ancaman dan intimidasi terhadap kelompok agama tertentu. Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut²:



Di pihak lain, pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut³:



Berkembangnya sektarianisme berbasis sekte agama sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Dalam kajian *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* ditemukan bahwa kurikulum pendidikan agama mengandung muatan dogma yang terlalu besar. Di pihak lain muatan untuk refleksi dan semangat menghargai perbedaan serta kegiatan yang memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa berbeda agama terlalu minim atau sangat terbatas.⁴

Kekuatan ketiga yang membanjiri Indonesia adalah kosmopolitanisme yang diwacanakan oleh para pendukung globalisasi melalui berbagai institusi multi nasional. Mereka mendiskreditkan berbagai karakteristik yang bersifat lokal dan nasional dan mempromosikan berbagai hal yang bersifat global, seperti perdagangan bebas dunia, bahasa internasional, dan standar serta sertifikasi internasional. Wacana itu mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengidealkan kebudayaan asing (*xenocentric*). Paling tidak ada dua kebudayaan yang akhir-akhir ini ditempatkan sebagai tipe ideal, yaitu Arab dan Barat. Gagasan untuk membangun kekhalifahan, bercelana di atas tumit bagi laki-laki dan berjilbab bagi wanita semakin populer pada era reformasi ini sebagai manifestasi idealisasi kebudayaan Arab. Di pihak lain, demokrasi, mengenakan jas pada acara resmi dan celana jeans menjadi ciri khas pengikut kebudayaan Barat.

Xenocentrisme merupakan penanda semakin renggangnya ikatan batiniah antara masyarakat dengan tanah air, bangsa dan negaranya. Jakarta Post melaporkan bahwa bagi generasi muda, Indonesia dipahami sekedar aspek geografis, yaitu tempat lahir dan tumbuh.⁵ Mereka merasa tidak memiliki ikatan historis dengan para pendiri bangsa, apalagi terpanggil untuk ikut terlibat dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

II. SEJARAH SEBAGAI PENGEMBANG ATAU PENGHANCUR NILAI KEBANGSAAN

Dari berbagai permasalahan kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia, masihkah kita berani memimpikan berkembangnya pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan? Pelajaran Sejarah yang secara eksplisit mencantumkan tujuan untuk "*Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta*

tanah air, melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa" saja kurang berhasil, untuk tidak mengatakan gagal, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, apalagi pelajaran lain yang tanggung jawabnya hanya implisit. Paling tidak ada dua masalah yang menghalangi mata pelajaran sejarah dewasa ini dalam menunaikan tugasnya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri siswa, yaitu materi pelajaran dan metode pembelajaran. Untuk memudahkan peninjauan terhadap kedua masalah tersebut, kajian akan difokuskan pada pelajaran sejarah SMA.

2.1 Materi pelajaran

Pada kurikulum terbaru, 2013, skop temporal materi mata pelajaran sejarah mencakup periode yang sangat panjang, yaitu dari zaman pra aksara sampai era kontemporer (pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Dari sudut pandang skope spasial, materi mencakup dimensi politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi. Materi itu dicetak dalam bentuk buku paket yang terdiri dari lima jilid, dengan rincian 2 jilid untuk kelas 10, 2 jilid untuk kelas 11 dan 1 jilid untuk kelas 12.

Materi untuk kelas 10 semester 1 secara kronologis mencakup dari terbentuknya kepulauan Indonesia sampai dengan Kerajaan Kota Kapur. Secara garis besar, uraian dapat dikelompokkan menjadi dua periode besar, yaitu pra aksara dan masa klasik. Permasalahan yang paling menonjol adalah bahwa materi tidak menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masing-masing periode. Sebagai contoh, untuk periode pra aksara, tidak diuraikan dengan mendalam sistem kehidupan masa itu, seperti sistem pengetahuan, teknologi, sosial dan sebagainya. Buku teks pelajaran sejarah justru sibuk menguraikan tentang para ilmuwan dan temuannya terkait sejarah Indonesia pra aksara seperti potongan sebagai berikut⁶:



Sumber: Phillip V. Tobias,
Palaontologische Zeitschrift,
December 1983, Volume 57.

Gambar 1.6 Von Koeningswald.

Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Schemulling tahun 1864, dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Semenjak dilaporkan Schemulling situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Eugene Dubois juga pernah datang ke Sangiran, akan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Heindrich Ralph von Koeningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar dua km di barat laut kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi Situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koeningswald, Situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil *Homo erectus* secara sporadis dan berkesinambungan. *Homo erectus* adalah takson paling penting dalam sejarah manusia, sebelum masuk pada tahapan manusia *Homo sapiens*, manusia modern.

Bahkan pada bagian akhir dikemukakan tentang perdebatan istilah *Pithecanthropus erectus* atau *Homo erectus*.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa sumbangsih uraian tentang jasa dan kinerja para arkeolog dan paleoanthropolog dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan? Apabila kerja akademik yang hendak ditonjolkan, tentu arkeolog dan palaentolog yang dimunculkan adalah orang Indonesia, sehingga terjadi ikatan batiniah dengan para siswa. Akan tetapi, pada buku teks pelajaran sejarah itu, tokoh dan jasa arkeolog yang dibahas sebagian besar adalah bukan orang Indonesia alias orang asing. Bahkan foto ilmuwan yang ditampilkan pun dipilih arkeolog asing, yaitu Koeningswald, Dubois dan Darwin. Pertanyaan nakal yang muncul adalah apakah penulis bermaksud menyampaikan pesan bahwa para ilmuwan asing itu memiliki peran besar terhadap sejarah Indonesia masa pra aksara? Apakah kehebatan dan jasa besar ilmuwan asing itu lah yang harus dipelajari, dikagumi dan ditiru para siswa? Dari sudut pandang ini, Indonesia oleh penulis ditempatkan sekedar sebagai tempat (geografis) terjadinya petualangan arkeologis tokoh-tokoh asing.

Pada pokok bahasan selanjutnya (bab 2), materi pelajaran sejarah lebih mengerikan lagi, karena Indonesia tidak hanya ditempatkan sebagai lokasi berkiprahnya bangsa asing, tetapi diposisikan sebagai objek penerima pengaruh bangsa India. Agar lebih jelas, dikutipkan materi itu sebagai berikut:

Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut Hindunisasi. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat (teori) tersebut dijelaskan pada uraian berikut:

Pertama, sering disebut dengan teori Ksatria. Dalam kaitan ini R.C. Majundar berpendapat, bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya...

Kedua, teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Pada mulanya para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik.

Ketiga, teori Brahmana. Teori tersebut sesuai dengan pendapat J.C. van Leur bahwa Hindunisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat van Leur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan.⁷

Tidak seorangpun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, tetapi dengan menuliskan penjelasan seperti itu justru merendahkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Alih-alih menanamkan nilai-nilai kebangsaan, uraian itu akan menjadikan siswa rendah diri dan mengkodratkan mereka sebagai pengikut kebudayaan asing.

Pada bab III (Kelas 10 Semester 2) dibahas tentang Islamisasi di Indonesia dan silang budaya di Nusantara yang mencakup a. kedatangan Islam di Nusantara; b. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau; c. Islam masuk istana raja; d. jaringan keilmuan di Nusantara; akulturasi dan perkembangan budaya Islam; dan e. proses integrasi Nusantara. Seperti juga saat menjelaskan periode sebelumnya, uraian bab III juga didominasi oleh penjelasan historis yang menempatkan masyarakat Indonesia sebagai objek. Permasalahan lain yang tidak kalah menarik adalah penyembunyian fenomena historis, yaitu diaspora etnik Hadrami. Dengan tidak disebutnya etnik Hadrami itu, generasi muda akan sama sekali tidak memahami genetika historis dari para habib, syekh dan tokoh-tokoh etnik Hadrami yang terkenal dewasa ini, seperti Ali Alatas, Fuad Bawazier, Najwa Shihab dan Ibrahim Sjarief Assegaf suaminya maupun Habib Riziek dan Abu Bakar Baasyir.

Hadramis have been present in the Indian Ocean, both on the western littoral, in the Red Sea region and eastern Africa, and further east, in India, Singapore and Indonesia, for centuries. Hadramis have made their mark in more ways than one. It is unfortunate that Osama bin Laden, whose family emigrated from Wadi Duan in western Hadramawt to Jeddah in the early 20th century, is probably the best known. Abu Bakar Bashir, spiritual leader of the Indonesian radical Islamic organisation Jemaa Islamia (and currently languishing in an Indonesian jail) is also a Hadrami. But so too are successful merchant families such as the Alsagoffs, original owners of Singapore's famous Raffles Hotel, the Bugshans of Saudi Arabia, and Tanzania's Bakhresa family.

Politicians and rulers such as Sultan Hassanal Bolkiah of Brunei and Mari Alkatiri, first prime minister of independent East Timor also trace their roots back to Hadramawt, as do religious leaders such as Ahmed bin Sumayt, chief cadi of Zanzibar in the early 20th century, and his distant cousin, Syed Isa Semait, recently deceased mufti of Singapore. Indeed, from northern Borneo to Lake Victoria, Kozhikode to Maputo, Islamic religious leadership has almost invariably been the preserve of Hadramis and their descendant.⁸

Pengkodratan bangsa Indonesia sebagai objek bangsa asing terus berlanjut pada materi pelajaran sejarah untuk siswa kelas 11. Seperti pada materi sebelumnya, masyarakat Indonesia digambarkan sebagai tidak memiliki tata nilai unggul yang mampu menyamai bahkan menandingi pengaruh bangsa

asing. Pada materi Kelas 11 lebih ngeri lagi, karena bangsa Indonesia digambarkan sebagai masyarakat yang tidak berdaya ketika dieksploatasikan oleh bangsa Barat. Untuk meyakinkan keunggulan bangsa Barat, pada bab I diuraikan perkembangan sejarah Eropa. Diantara berbagai fenomena historis yang dibahas, permasalahan yang paling mengesankan adalah penjelasan tentang Politik Etis sebagai determinan dari munculnya nasionalisme Indonesia:

... Adanya Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu "kemajuan". Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.

Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu.

...Pengaruh pendidikan Barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektual bumiputra yang memunculkan kesadaran, bahwa rakyat bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual bumiputra itu disebut "priyayi baru" yang sebagian besar adalah guru dan jurnalis di kota-kota. Pendidikan dan pers itu pula menjadi untuk menyalurkan ide-ide dan pemikiran yang ingin membawa kemajuan, dan pembebasan bangsa dari segala bentuk penindasan dari kolonialisme Belanda. Mereka tidak memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau apa pun karena mereka adalah bumiputra. Pengalaman yang mereka peroleh di sekolah dan dalam kehidupan setelah lulus sangatlah berbeda dengan generasi orang tua mereka. Para kaum muda terpelajar inilah yang kemudian membentuk kesadaran "nasional" sebagai bumiputra di Hindia, dan bergerak bersama "bangsa-bangsa" lain dalam garis waktu yang tidak terhingga menuju modernitas, suatu dunia yang memberi makna baru bagi kaum pelajar terdidik saat itu.⁹

Pada buku siswa kelas XI semester 2, uraian sejarah mencakup periode dari pendudukan Jepang sampai dengan kembalinya RIS menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Hal yang menarik adalah penempatan Jepang pada posisi sama dengan Barat, yang dalam pandangan Derrida disebut sebagai *superior term* (Derrida, 1997: 12). Hal itu terlihat antara lain penyebutan Jepang sebagai "Saudara tua", seperti pada Bab IV sub bab A yang diberi judul "Menganalisis Awal Pemerintahan "Saudara Tua".

Catatan khusus perlu diberikan untuk uraian bab IV, yaitu terkait dengan kebenaran sejarah. Penulis menguraikan:

Pada pidato sidang BPUPKI, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno.

Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11.00 WIB, Sukarno menyampaikan pidato pentingnya.¹⁰

Paling tidak ada dua pernyataan yang kebenarannya perlu dipertanyakan. Pertama adalah kalimat terakhir pada alinea pertama, yaitu "*Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno*". Pernyataan itu bertentangan atau dalam istilah Ankersmit (1983: 64) sebagai tidak koheren dengan kalimat ke dua dari alinea ke dua, yaitu "*Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara*". Dari ketidak-koherenan dua kalimat itu, salah satunya pasti tidak benar.

Permasalahan ke dua adalah pernyataan buku teks bahwa "*Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945*". Pernyataan bahwa "Soekarno mendapatkan kesempatan berbicara dua kali" sungguh unik, karena tidak ada atau paling sedikit belum pernah

menemukan sumber yang menyatakan hal itu. Dari sudut pandang ini, pernyataan itu perlu diuji kebenarannya, untuk tidak mengatakannya sebagai salah.

Pada bab VI, yang diberi judul “Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI, materi pelajaran sejarah membahas “Perkembangan dan Tantangan Awal Kemerdekaan” dalam sub bab A; “Perjuangan Bangsa: Antara Perang dan Damai” dalam sub bab B; dan “Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi” dalam sub bab C. Dari istilah yang digunakan untuk judul sub bab, seperti menempatkan kata “Perang” lebih dahulu dari pada “Damai” pada sub bab B, serta “Nilai-nilai Kejuangan” pada sub bab C, terlihat keberpihakan pelajaran sejarah pada militer. Keberpihakan itu semakin jelas ketika membahas tanggapan Indonesia terhadap kedatangan tentara Sekutu dan NICA.

Materi pembelajaran sejarah untuk siswa kelas 12 mencakup perjalanan bangsa Indonesia dari tahun 1948 sampai dengan 2014, yaitu dari perjuangan mempertahankan integrasi bangsa sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara substansial tidak banyak berbeda dengan materi pelajaran sejarah yang lain, yaitu mendiskreditkan periode pemerintahan Presiden Soekarno sebagai masa berlakunya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Meski tidak vulgar pada penjelasan periode revolusi kemerdekaan, keberpihakan materi pelajaran sejarah pada militer, terutama Angkatan Darat, masih terasa. Pemihakan itu antara lain pada pembahasan peristiwa 17 Oktober 1952:

Pada saat itu ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan Parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI-AD untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan militer. Setelah itu pimpinan TNI menuntut Presiden membubarkan Parlemen. Namun Presiden menolak tuntutan ini, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan dari jabatannya.¹¹

Dari kutipan di atas, motivasi Angkatan Darat untuk menjadikan Angkatan Darat sebagai kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan politik disembunyikan. Begitu pula dengan kesengajaan materi pelajaran sejarah untuk tidak menjelaskan peran Angkatan Darat pada demonstrasi dan perusakan gedung parlemen, serta Bergeraknya kendaraan lapis baja, tank dan 4 buah

meriam yang mengarah ke istana.¹² Para siswa tidak diarahkan untuk memahami ambisi Angkatan Darat untuk terlibat dalam perpolitikan nasional sebagai perilaku menyimpang dalam sistem demokrasi.

2.2 Pembelajaran

Tidak kalah kompleks dari materi, pembelajaran sejarah menghadapi berbagai permasalahan yang kronis. Permasalahan pertama kapasitas guru sejarah yang semakin lama semakin menurun. Ada banyak penyebab dapat dikemukakan untuk menjelaskan penurunan kemampuan guru. Penelitian Murni di Palembang menemukan realitas bahwa terdapat guru-guru sejarah yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah.¹³ Dengan kata lain, guru yang berpendidikan non sejarah, dengan berbagai alasan praktis, dipaksa untuk mengajar sejarah. Kasus itu terjadi di hampir semua daerah, terutama di sekolah sekolah swasta. Sekitar 49% guru yang mengajar sejarah di SMP tidak berlatar pendidikan sejarah. Prosentase itu mengecil pada tingkat SMA.¹⁴ Dari keberadaan guru sejarah yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah, akan sulit diharapkan memiliki kapasitas yang memadai. Mereka akan melaksanakan pembelajaran sejarah sekedar untuk menunaikan tugas, tanpa memiliki kesenangan atau kecintaan terhadap sejarah. Akibatnya dapat diperkirakan, bahwa kapasitas guru yang demikian akan sangat sulit untuk mampu menghasilkan siswa yang tertarik pada pendidikan sejarah.

Permasalahan kedua adalah tentang metode pembelajaran sejarah. Pada umumnya, guru menggunakan *teacher centered approach* dan metode ceramah atau *chalk and talk* karena dipandang paling efisien, baik ditinjau dari aspek persiapan maupun pelaksanaan. Guru tidak perlu menyiapkan banyak hal untuk menerapkan metode ceramah, yaitu hanya menghapalkan bahan ajar yang terdapat di buku teks dan akan dibahas di kelas. Bagi yang telah bertahun mengajar, secara kognitif guru telah menguasainya dengan mendalam, sehingga hampir tidak perlu menyiapkan diri.

Pada saat pelaksanaan, metode ceramah juga sangat efisien, karena guru menjadi satu-satunya pemeran utama. Guru dengan kokoh mengendalikan situasi kelas, sehingga dapat menentukan kapan akan berbicara, kapan mengadakan tanya-jawab dan kapan pelajaran akan diakhiri. Sebaliknya, kegiatan siswa terbatas pada duduk, diam dan mencatat. Dengan demikian,

guru dengan mudah melakukan pengelolaan kelas dalam rangka menjaga suasana tenang selama proses pembelajaran.

Seperti telah disinggung di depan, bahwa efisiensi yang sangat tinggi pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru tidak dapat diikuti dengan efektifitas yang sama tinggi. Rendahnya efektifitas, selain disebabkan oleh metode pembelajaran juga dikarenakan guru kurang menguasai keterampilan presentasi, penggunaan alat bantu mengajar dan media pembelajaran. Akibatnya kegiatan siswa yang notabene masih remaja menjadi sangat terbatas, yaitu hanya untuk duduk, diam dan mencatat, sehingga mereka cepat bosan.¹⁵ Pada tingkat selanjutnya, hilangnya fokus perhatian siswa akan menjadikan daya serap terhadap materi pembelajaran merosot. Dari sudut pandang ini, merupakan fenomena yang wajar apabila prestasi akademik siswa pada mata pelajaran sejarah relatif rendah. Apalagi tidak ada stimulus yang cukup kuat untuk membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sejarah. Kritik pedas disampaikan oleh Hamid Hasan sebagai berikut:

Alih-alih memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dikemukakan di atas, suatu kenyataan yang menyedihkan bahkan dunia pendidikan sejarah dianggap sebagai sesuatu yang suram, tak bermakna, penuh dengan beban hafalan yang tak mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis, tak berkaitan dengan realita kehidupan, tidak membangkitkan rasa ingin tahu dan kemampuan memenuhi rasa ingin tahu tersebut (*study skills*) serta mengembangkan kebangsaan positif.¹⁶

III. MENEMUKAN AKAR MASALAH UNTUK MEMULAI LEMBARAN BARU

3.1 Materi

Dari dua permasalahan yang telah dibahas, terlihat bahwa sungguh sangat sulit bagi mata pelajaran sejarah untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penggal kebenaran dan penanam nilai-nilai kebangsaan. Dari sudut pandang materi, penempatan masyarakat Indonesia sebagai objek dari kekuatan asing lebih merupakan wacana penulis buku teks pelajaran sejarah dari pada realitas objektif. Pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa mereka mengkodratkan masyarakat Indonesia sebagai objek? Meminjam pandangan White, pengkodratkan itu dapat dikategorikan sebagai usaha menggunakan

sejarah menjadi senjata ideologis untuk melipatgandakan penindasan terhadap kelompok yang sudah dikalahkan dengan jalan merampas masa lalu mereka dan akibat lainnya adalah hilangnya identitas mereka.¹⁷ Rekonstruksi sejarah yang menempatkan Indonesia sebagai tergantung pada pengaruh asing akan menjadikan masyarakat merasa bahwa uraian sejarah adalah bukan tentang mereka dan pada tingkat selanjutnya melahirkan masyarakat tanpa sejarah.¹⁸ Kondisi materi sejarah seperti itu menerbangkan ingatan kepada Presiden Soekarno yang pada masa akhir pemerintahannya sering meneriakkan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan model baru yang tidak hanya menggunakan perangkat moneter dan keuangan internasional, tetapi juga dengan menginfuskan kebenaran-kebenaran kaum penjajah di dalam pikiran masyarakat terjajah.¹⁹

Permasalahan lain yang tidak kalah pelik adalah adanya kekuatan kelompok kepentingan di tingkat nasional yang menggunakan materi pelajaran sejarah sebagai alat untuk mendominasi. Kelompok kepentingan itu adalah militer, terutama Angkatan Darat. Salah satu tonggak utama penggunaan sejarah untuk kepentingan mereka adalah Seminar Angkatan Darat 1972 yang hasilnya antara lain menginstruksikan kepada militer untuk mengedarkan sejarah versi militer kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Penyebaran dilakukan melalui memoar, film, museum, monumen, dan buku teks pelajaran sejarah. Sasaran penyebaran terutama adalah generasi muda, agar mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh Generasi 1945.²⁰ Khusus untuk memasukkan kepentingan militer pada buku teks pelajaran sejarah, proses yang dilalui adalah sebagai berikut:

...Pada tahun 1974, Menteri Pendidikan mengangkat Nugroho dan anggota staf yang lain sebagai kepala tim riset untuk buku sejarah bagi sekolah menengah. Staf Pusat Sejarah ABRI juga membantu menyiapkan buku teks sejarah untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dari tahun 1975/1976 dan untuk pendidikan tinggi dari tahun 1970-1974. Pusat Sejarah ABRI juga berperan serta dalam evaluasi buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan dalam merancang kurikulum sejarah untuk sekolah.²¹

Adanya unsur neo kolonialisme dan militerisme dalam materi sejarah Indonesia yang terdapat pada buku teks menjadikannya tidak mungkin untuk digunakan dalam pembelajaran sejarah yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Dari sudut pandang ini, guru sejarah

harus menjadi tokoh yang mampu memilah dan memilih materi. Meminjam pandangan Habermas, guru harus mampu melakukan pengujian kebenaran materi pembelajaran sejarah melalui diskusi kritis, sehingga materi pelajaran sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral.

3.2 Pembelajaran

Secara teknis, pendekatan dan metode pembelajaran sejarah telah banyak dikaji dan ditulis. Apabila selama ini pelajaran sejarah masih membosankan bagi siswa, tentu akar permasalahannya terletak pada jiwa dari sang guru. Dalam konteks pembelajaran untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah apakah sang guru berjiwa nasionalis? Apabila guru tidak menghidupi nilai-nilai kebangsaan dalam kesehariannya, mustahil untuk dapat menanamkan nilai-nilai itu pada diri para siswanya. Apabila sang guru egois atau sektarianis, maka para siswanya akan tumbuh menjadi manusia egois atau sektarianis pula. Dengan menggunakan analogi warna, Bung Karno pada pidatonya untuk Taman Siswa mengatakan "Guru yang sifat hakikatnya hijau akan 'beranak' hijau, guru yang sifat hakikatnya hitam akan 'beranak' hitam, guru merah akan 'beranak' merah".²²

Poin penting ke dua adalah bahwa tujuan utama pembelajaran sejarah tidak diletakkan pada penguasaan kompetensi akademik, tetapi pada kompetensi afektif, yaitu menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Peran guru adalah sebagai konektor bagi generasi muda masa kini agar terhubung dengan para pelaku sejarah. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sejarah harus mampu menghubungkan peserta didik dengan pelaku sejarah, sehingga antar keduanya terjadi dialog reflektif. Hasil dialog itu adalah bahwa peserta didik mampu menangkap pesan-pesan tentang tata nilai yang dihidupi dan perjuangan yang dilakukan oleh para pelaku sejarah untuk mewujudkannya, sehingga generasi muda sekarang menjadi memahami siapa diri mereka dan kemana hidup harus diarahkan. Meminjam pandangan Michelet, pelajaran sejarah harus mampu berperan menjadi media linguistik bagi generasi masa lampau untuk menyuarakan berbagai hal yang sesungguhnya mereka maksudkan dan inginkan.²³ Di pihak lain, bagi para siswa sebagai keturunan para pelaku sejarah, menjadi menyadari dan terinspirasi untuk melanjutkan dan mengadaptasi nilai-nilai kebangsaan masa lalu ke dalam kehidupan keseharian masa kini, demi terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi anak cucunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susanto Zuhdi. 2015. *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Hasan, S. Hamid. 1999. "Kurikulum dan Buku Teks Sejarah" dalam Jurnal Pendidikan Sejarah *Historia* edisi I No. 1. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, FPIPS.
- Lestariningsih, Amurwani Dwi, Restu Gunawan, Sardiman AM, Mestika Zed, Wahdini Purba, Wasino, dan Agus Mulyana. 2014. *Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- McGregor, Katharine E. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Murni. 2006. *Model Pembelajaran Holistik Dalam Pengembangan Ketrampilan Berpikir Kesejarahan: Suatu Penelitian dan Pengembangan Terhadap Peningkatan Ketrampilan Berpikir Kesejarahan Mahasiswa Pendidikan Sejarah di Kota Palembang*. Disertasi. PIPS. Bandung: SPs UPI. Tidak diterbitkan.
- Nordholt, Henk Schulte. *De-colonising Indonesian Historiography*. Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies public lecture series "Focus Asia", 25-27 May, 2004 at Lund University, Sweden.
- Pradanasari, Yuliant Angga. *Penerapan Model Cooperative Learning tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kelas X A SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013*. Skripsi. Tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/14237/2/2%20BAB%20I.pdf> pada 2 September 2016.
- Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih. 2014. *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih. 2014. *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Smith, Linda Tuhiwai. 2008. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books Ltd.
- Soekarno.1964. "Menjadi Guru di Masa Kebangunan" yang terdapat pada *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Suhadi, Mohamad Yusuf, Marthen Tahun, Budi Asyhari, dan Sudarto. 2014. *Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013, dan Ruang Publik Sekolah*. (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Sutrisna, Slamet. 2003. *Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- The Wahid Institute. 2014. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (LKBB)*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Walker, Iain. *The Hadramis of the Indian Ocean: a diaspora and its networks*. Oxford Diasporas Programme (ODP), 2011. Diakses dari <https://www.compas.ox.ac.uk/2011/the-hadramis-of-the-indian-ocean-a-diaspora-and-its-networks/> pada 2 September 2016.
- White, Hayden. "The Historical Event". *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, 19(2), 9-34, 2008. doi:10.1215/10407391-2008-002.

(Footnotes)

- ¹ The Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (LKBB)*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2014), p. 21.
- ² *Ibid.*, p. 22.
- ³ *Ibid.*, p. 24.
- ⁴ Suhadi, Mohamad Yusuf, Marthen Tahun, Budi Asyhari, dan Sudarto, *Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013, dan Ruang Publik Sekolah*. (Yogyakarta: program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,

2014), pp. 33-39.

⁵ Jakarta Post, 16 Agustus 2002.

⁶ Amurwani Dwi L., Restu Gunawan, Sardiman AM, Mestika Zed, Wahdini Purba, Wasino, dan Agus Mulyana, *Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1*. (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), p. 20

⁷ *Ibid.*, pp. 78-80.

⁸ Iain Walker, *The Hadramis of the Indian Ocean: a diaspora and its networks*. Oxford Diasporas Programme (ODP), 2011. Diakses dari <https://www.compas.ox.ac.uk/2011/the-hadramis-of-the-indian-ocean-a-diaspora-and-its-networks/> pada 2 September 2016.

⁹ Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih, *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), pp. 146-147.

¹⁰ Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih, *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), pp. 60-61

¹¹ Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susanto Zuhdi, *Sejarah Indonesia. Untuk SMA/MA Kelas XII*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), p. 56.

¹² Peristiwa itu oleh banyak pihak disebut sebagai kudeta. Lihat Slamet Sutrisna, *Kontroversi dan rekonstruksi sejarah*. (Yogyakarta: Media pressindo, 2003), p. 13

¹³ Murni. *Model Pembelajaran Holistik Dalam Pengembangan Ketrampilan Berpikir Kesejarahan: Suatu Penelitian dan Pengembangan Terhadap Peningkatan Ketrampilan Berpikir Kesejarahan Mahasiswa Pendidikan Sejarah di Kota Palembang*. Disertasi. PIPS. (Bandung: SPs UPI, 2006). Tidak diterbitkan.

¹⁴ Hamid Hasan, S., "Kurikulum dan Buku Teks Sejarah" dalam Jurnal Pendidikan Sejarah. *Historia* edisi I No. 1. (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, FPIPS, 1999), p. 73.

¹⁵ Yuliant Angga Pradanasari, *Penerapan Model Cooperative Learning tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kelas X A SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013*. Skripsi. Tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). Diunduh dari <http://eprints.uny.ac.id/14237/2/2%20BAB%20I.pdf> pada 2 September 2016.

¹⁶ Hamid Hasan, *Problematika Pendidikan Sejarah*. (Bandung: Jurusan

Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). Diunduh dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/194403101967101-SAID_HAMID_HASAN/Makalah/Beberapa_Problematik_Dalam_Pendidikan_Sejarah.pdf pada 2 September 2016.

- ¹⁷ Hayden White, "The Historical Event". *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, 19(2), 9-34, 2008. doi:10.1215/10407391-2008-002.
- ¹⁸ Henk Schulte Nordholt, *De-colonising Indonesian Historiography*. Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian Studies public lecture series "Focus Asia", 25-27 May, 2004 at Lund University, Sweden.
- ¹⁹ Linda Tuhiwai Smith, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. (London: Zed Books Ltd, 2008).
- ²⁰ Katharine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2008), p. 249.
- ²¹ *Ibid.*, p. 271-271
- ²² Soekarno, "Menjadi Guru di Masa Kebangunan" yang terdapat pada *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid I. (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964).
- ²³ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. (New York: Verso. 1991), p. 198.

MEMBANGUN NILAI-NILAI NASIONALISME MELALUI PARADIGMA PENDIDIKAN INKLUSI

Imam Yuwono

imam.plb@unlam.ac.id

ABSTRACT

Nowdays, the world of education in Indonesia undergo additional enrichment by the implementation of inclusive education paradigm. This Additional enrichment got strenghten by ministry of education and Culture's regulation number 70 of 2009 that become the regulation for inclusive education practice of education in Indonesia. The birth of inclusive education paradigm implicated to the practice of education in Indonesia, where special needs children learn together in the regular class together with the other kids. The problem that will arise is wheter the teachers and the school's community are ready to excute inclusive education. Additional enrichment in education through inclusive education is a strategic step, in the center of young generation of this nation, that start to leave Nationalism values. Foreign culture that enter through Technology Information growth couldn't be stopped anymore, The Bhineka Tunggal Ika's unity faded. Inclusive education paradigm that recognise diversity and cherished individual differences, respect children's right without discrimination, expand justice and kind behaviors while learning. Expected to develop student's Nationalism values and integrate this nation in the diversity of people. According to those things so in this journal will be described, wheter the inclusive education compatible with Bhineka Tunggal Ika philosophy, wheter the inclusive education concept could grow student's Nationalism and how those values could be developed within learning in inclusive class.

Keywords: nationalism Values, Inclusive Education Paradigm.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Luar Biasa FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia mengalami tambahan pengayaan dengan diperkenalkannya inklusi dalam pendidikan (pendidikan inklusif). Pengayaan tersebut berdampak pada perubahan paradigma dalam pendidikan. Perubahan paradigma tersebut merupakan proses peningkatan mutu pendidikan. Implikasi penting dari perubahan paradigma tersebut adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme peserta didik yang ditandai dengan adanya nilai keadilan, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan individu, menjunjung tinggi hak-hak orang lain dengan berperilaku tidak diskriminasi.

Paradigma baru pendidikan inklusif mengandung konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pendidikan, yaitu sekolah yang terbuka dan ramah. Implementasi pendidikan inklusif sebagai sikap tidak diskriminatif. Pengakuan dan penghargaan terhadap individu anak, fasilitas belajar dan lingkungan memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak, guru bekerja dalam sebuah tim dan adanya keterlibatan orang tua/masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah/kelas.

Berdasarkan pemikiran di atas, makalah membahas bagaimana konsep pendidikan inklusif itu selaras dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami peserta didik, apakah tujuan pendidikan inklusif mengembangkan nilai-nilai nasionalisme, bagaimana nilai-nilai nasionalisme ditanamkan melalui proses pembelajaran di kelas pendidikan inklusif.

II. RUMUSAN MASALAH

Inklusi adalah proses dalam kebhinekaan. Artinya, harus dilihat sebagai pencarian yang tidak pernah berakhir untuk menemukan cara yang lebih baik menanggapi keragaman, tentang belajar bagaimana hidup dengan perbedaan (suku, ras, agama, bahasa, tingkat intelegensi, kepribadian) dan, bagaimana belajar dari perbedaan. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan budaya, memerlukan falsafah Bhinneka Tunggal Ika untuk persatuan bangsa.

Tujuan pendidikan inklusif berkaitan bagaimana nilai-nilai nasionalisme seperti menghargai perbedaan, menjunjung tinggi hak orang lain, berkeadilan, tidak mendiskriminasi sesama warga negara harus dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Akibatnya, pelaku pendidikan dituntut untuk merencanakan dan

melaksanakan praktik pembelajaran yang menggamit nilai tersebut. Inklusi adalah tentang kehadiran, partisipasi dan prestasi dari semua siswa tanpa diskriminasi. Inklusi melibatkan penekanan khusus pada kelompok-kelompok pelajar yang mungkin beresiko dimarginalisasi, pengecualian atau kurang berprestasi. Hal ini menunjukkan tanggung jawab moral guru dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling 'beresiko' dipantau secara hati-hati, dan jika perlu, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kehadiran, partisipasi dan prestasi mereka dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, yang pada gilirannya semua anak mendapatkan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan nilai-nilai nasionalisme.

Paradigma pendidikan inklusif menerapkan pembelajaran yang ramah anak, pembelajaran yang bermutu, pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya masyarakat. Mutu sekolah tidak hanya diarahkan pada ranah kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, baik pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Pembelajaran di kelas inklusif diarahkan untuk saling menghormati perbedaan setiap individu, menghilangkan sikap diskriminasi, semua anak berhak atas pendidikan yang bermakna.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah konsep pendidikan inklusif selaras dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika? (2) Apakah tujuan pendidikan inklusif dapat mengembangkan nilai-nilai nasionalisme? (3) Bagaimana menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui proses pembelajaran di kelas Inklusif?

III. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Pendidikan Inklusif dan Bhinneka Tunggal Ika

Falsafah Bhinneka Tunggal Ika dalam idiologi Negara Indonesia memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda suku, ras, agama, bahasa daerah sebagai Bangsa Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai yang mendalam bahwa bangsa Indonesia harus menghargai perbedaan individu dan tidak diskriminasi. Nilai penting yang melandasi suatu sekolah inklusif adalah menghargai bahwa individu itu berbeda satu sama lain, sehingga prinsip penerimaan, pemilikan, dan tidak diskriminasi terhadap seseorang. Pendidikan inklusif merupakan idiologi atau cita-cita yang ingin kita raih. Sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa pendidikan inklusif itu sebagai

ideologi dan cita-cita, dan bukan sebagai model, maka akan terjadi keragaman dalam implementasinya, antara negara yang satu dengan yang lainnya, antara daerah yang satu dengan yang lainnya atau bahkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya.

Menurut Skjorten pendidikan inklusif adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa kecuali. Inklusi berasumsi bahwa hidup dan belajar bersama adalah suatu cara yang lebih baik, yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, bukan hanya anak-anak yang diberi label sebagai yang memiliki suatu perbedaan. Pendidikan inklusif melibatkan perubahan dan modifikasi isi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan suatu visi bersama yang meliputi semua anak yang berada pada rentangan usia yang sama dan suatu keyakinan bahwa inklusi adalah tanggung jawab sistem regular yang mendidik semua. Pendidikan inklusif berkenaan dengan aktivitas memberikan respon yang sesuai kepada spektrum yang luas dari kebutuhan belajar baik dalam setting pendidikan formal maupun nonformal.

Pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler. Guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Hal ini merupakan gagasan mulia dimana anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan yang sama seperti anak normal yang berada di sekolah reguler pada umumnya.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keragaman siswa. Pendidikan inklusif bertujuan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, dari pada suatu problem. Definisi Pendidikan Inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara (terutama dari Selatan) pada tahun 1998.

Definisi ini kemudian diadopsi dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan hampir tidak mengalami perubahan. Definisi Seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan Pendidikan Inklusif: (1) lebih luas daripada pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal, (2) mengakui bahwa semua anak dapat belajar, (3) memungkinkan struktur system dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua (anak), (4) mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, (kecacatan, status HIV/AIDS) (5) merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. (6) merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Konsep praktik inklusif didasarkan pada keyakinan bahwa siswa penyandang disabilitas terintegrasi ke dalam komunitas belajar, biasanya di kelas pendidikan umum didasarkan pada kemampuan, tidak pada kecacatan mereka. Praktek inklusif memiliki tiga dimensi: (1) *Integrasi fisik*: Menempatkan siswa di kelas yang sama seperti rekan-rekan non disabled harus menjadi prioritas yang kuat, dan menghapus mereka dari pengaturan yang harus dilakukan hanya bila benar-benar diperlukan. (2) *Integrasi sosial*: Hubungan harus dipupuk antara siswa penyandang cacat dan teman sekelas mereka dan rekan-rekan maupun orang dewasa. (3) *Integrasi instruksional*: Sebagian besar siswa harus diajarkan dalam kurikulum yang sama digunakan untuk siswa tanpa cacat dan membantu untuk sukses dengan menyesuaikan bagaimana belajar mengajar dirancang (yaitu, dengan akomodasi) dan diukur.

3.2. Pendidikan Inklusif dan Nilai-Nilai Nasionalisme

Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai warga negara Indonesia yang berbeda satu sama lain, kekuatan perbedaan mampu menjadi satu kesatuan ketika warga pembelajar menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan inklusif ditandai dengan siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler. Dengan demikian kehadiran pendidikan inklusif berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus, hubungan dan mempersiapkan kehidupan yang layak dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

Menurut Skjorten (2006) tujuan pendidikan inklusif adalah mengurangi kekhawatiran dan membangun, menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan

serta membangun sikap memahami dan menghargai. Sasaran pendidikan inklusif tidak hanya anak-anak yang luar biasa atau anak berkebutuhan khusus saja namun juga termasuk sejumlah besar anak yang terdaftar di sekolah.

Tujuan pendidikan inklusif ini berarti *pertama*, menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas menciptakan dan menjaga komunitas yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme, yang dibuktikan dengan cara: menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan, menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, intelektual, bahasa dan kondisi lainnya. *Kedua*, memupuk rasa nasionalisme, dengan cara berperilaku adil, yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama dan terbaik bagi semua anak dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan, memiliki kecerdasan tinggi, yang secara fisik dan psikologis memperoleh hambatan dan kesulitan baik yang permanen maupun sementara, dan mereka yang terpisahkan dan termarginalkan.

Tujuan pendidikan inklusif yang tercantum dalam pernyataan Salamanca meliputi: (1) agar semua anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya, (2) semua sekolah memiliki persepsi bahwa perbedaan itu normal adanya, sehingga sekolah perlu mengakomodasi semua anak, (3) anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, (4) meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan diselenggarakan secara inklusi, (5) merubah paradigma pengajaran yang terpusat pada guru menjadi pengajaran yang terpusat pada diri anak, (6) penyelenggaraan kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan kebalikannya, (7) sekolah mampu memberikan manfaat untuk semua anak tanpa diskriminasi, oleh karena itu anak membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan, (8) dengan mengimplementasikan pendidikan inklusif, sekurang-kurangnya kita tidak perlu membangun infrastruktur baru guna menyekolahkan anak berkebutuhan khusus.

3.3. Menanamkan Nilai Nasionalisme Di Kelas Inklusif

Nilai-nilai nasionalisme yang bisa dikembangkan melalui pendidikan di kelas inklusif diantaranya adalah nilai keadilan, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan individu, menjunjung tinggi hak-hak orang lain dengan berperilaku tidak diskriminasi. Strategi pembelajarannya dengan memenuhi keberagaman kebutuhan anak. Artinya bagaimana pembelajaran itu diarahkan agar semua anak dapat belajar optimal. Perubahan paradigma mengajar yang berpusat pada disiplin ilmu, yang seluruhnya difokuskan pada pengajaran menurut logika dan isi disiplin ilmu itu, paradigma mengajar guru sebagai satu-satunya sumber belajar, seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan bergeser menjadi pendidikan yang terpusat pada siswa.

Pembelajaran di kelas inklusif menurut Johnsen (2005), prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusif menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru reguler maupun pendidik khusus. Hal ini maksudnya menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Pergeseran besar lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas yang sama, dari berpusat pada kurikulum menjadi berpusat pada anak dan perubahan-perubahan lainnya. Skjorten (2006) mengemukakan tentang perlunya adaptasi kurikulum, perubahan pendidikan yang potensial kerjasama lintas sektoral dan adaptasi lingkungan. Sedangkan Stainback dalam Sunardi (2009) menggambarkan sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, menyediakan program yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang diberikan guru. Agar anak berhasil, selain itu sekolah merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Pendapat diatas menegaskan dalam setting pendidikan inklusif di tataran kelas bahwa pendidikan inklusif menuntut adanya pendidikan/ pembelajaran yang berpusat pada anak, pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keragaman dan menghargai perbedaan. Pendidikan inklusif juga menuntut penerapan kurikulum yang fleksibel. Pendidikan inklusif juga berarti mendorong guru sebagai fasilitator

dan melakukan proses pembelajaran dan pengajaran yang komunikatif dan interaktif, mendorong adanya kerjasama tim guru (*team work*). Pendidikan inklusif memungkinkan penyesuaian-penyesuaian bahan pelajaran, evaluasi, alat, dan penataan lingkungan belajar anak. Pendidikan inklusif berarti mendorong orang tua untuk terlibat secara proaktif dan bermakna dalam proses perencanaan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran bagi anak. Dengan pengertian bahwa kelas inklusif akan dapat memenuhi kebutuhan individu setiap anak di dalamnya, salah satu contoh anak berkebutuhan khusus misalnya anak berbakat.

Strategi pembelajaran yang paling banyak dipakai dalam pendidikan inklusif, yaitu pembelajaran kooperatif. Penggunaan model pembelajaran ini mereka anggap kurang memberikan tantangan yang sesuai bagi anak berbakat dan hanya menempatkan anak berkemampuan lebih daripada yang lain dalam posisi sebagai tutor teman-teman sebayanya. Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusif adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual setiap murid.

Menurut Sapon-Shevin dalam Sunardi profil pembelajaran di sekolah inklusif. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya.

Pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas yang memang heterogen dan penuh dengan perbedaan-perbedaan individual memerlukan perubahan kurikulum secara mendasar. Guru di kelas inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, atau materi ajar ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, dan berfikir kritis, pemecahan masalah, dan asesmen secara autentik. Pendidikan inklusif berarti menuntut penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Kelas yang inklusif berarti pembelajaran tidak lagi berpusat pada kurikulum melainkan berpusat pada anak, dengan konsekuensi berarti adanya fleksibilitas kurikulum dan penerapan layanan program individual atau pendekatan proses kelompok dalam implementasi kurikulum yang multilevel dan multimodalitas tersebut.

Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus diganti dengan model murid-murid bekerja sama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif sekarang jelas, semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk bekerja sama dan saling belajar dari yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian Sapon Shevin, ada lima profil pembelajaran di kelas inklusif antara lain sebagai berikut: (1) pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, dimana guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas dimana anak ditampung secara penuh dengan menekankan saling menghargai perbedaan, (2) mengajar kelas heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar, (3) pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif, (4) pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi, karena aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengajaran tim, kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak, (5) pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

Penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model antara lain kelas reguler (inklusif penuh) yaitu anak berkebutuhan khusus bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler belajar dengan menggunakan kurikulum yang sama, kelas reguler dengan *cluster* yaitu anak berkebutuhan khusus bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, kelas reguler dengan *pull out* yaitu anak berkebutuhan khusus bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out* yaitu anak berkebutuhan khusus bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler

ke ruang belajar lain dengan guru pembimbing khusus, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian yaitu anak yang berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler, kelas khusus penuh yaitu anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berada dalam kelas reguler setiap saat. Setiap sekolah atau kelas inklusif dapat memilih model mana yang diterapkan terutama tergantung kepada jumlah anak yang mengalami kebutuhan khusus, ketersediaan tenaga pengajar dan sarana prasarana yang tersedia. Sementara itu mutu lulusan dipengaruhi oleh proses belajar-mengajar dan mutu belajar-mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain diantaranya input siswa, kurikulum, tenaga pengajar, sarana-prasarana, dana, manajemen dan lingkungan. Oleh karena itu kelas inklusif merupakan salah satu bentuk pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan luar biasa agar bisa memperoleh kesempatan pendidikan dengan anak normal lainnya karena tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merupakan bagian integral dari masyarakat. Keberhasilan utama dari pendidikan inklusif yaitu apabila ada kepedulian dari semua pihak serta adanya kerjasama dari semua pihak.

Kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain adalah salah satu kunci sukses untuk praktek inklusif. Berikut contohnya: (1) *Pertemuan dengan guru pendidikan khusus*: Anda akan sering bertemu dengan guru pendidikan khusus, baik secara formal dan informal. Seorang pendidik khusus dapat menghubungi anda untuk melihat apa yang dilakukan siswa di kelas anda, atau anda dapat menghubungi seorang pendidik khusus untuk meminta ide-ide baru untuk menanggapi perilaku siswa. Anda dan pendidik khusus dapat berbagi tanggung jawab untuk bertemu dengan orang tua selama *open house* atau konferensi orang tua. (2) *Asisten mengajar*: Tergantung pada program dan layanan lokal, Anda mungkin asisten mengajar dengan guru pendidikan khusus atau layanan terkait profesional seperti ahli patologi wicara/ bahasa. Dalam asisten mengajar, anda berbagi tanggung jawab mengajar dengan kedua pendidik dan bekerja dengan semua siswa. (3) *Bekerja dengan para profesional*: Jika di kelas Anda terdapat siswa dengan cacat yang signifikan atau beberapa siswa yang membutuhkan dukungan (bukan asisten mengajar), Anda dapat berkolaborasi

dengan seorang para profesional. Anda akan mengarahkan pekerjaan individu yang di kelas Anda untuk memastikan bahwa dukungan siswa disediakan dengan tepat. (4) *Rapat tim*: Berbagai tim sekolah mendukung praktik inklusif. Tingkat kelas atau tim departemen sekolah menengah atau tinggi Anda kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya mendiskusikan siswa penyandang disabilitas dan pemecahan masalah untuk mengatasi kebutuhan mereka. Anda juga dapat menjadi bagian dari sebuah tim yang mencoba untuk mengatasi masalah belajar dan perilaku siswa sebelum pertimbangan tentang perlunya pendidikan khusus. Jika seorang siswa di kelas Anda sedang dikaji untuk menentukan apakah pendidikan khusus yang diperlukan, Anda akan menjadi bagian dari tim itu. (5) *Berinteraksi dengan orang tua*: Mungkin bagian yang paling penting dari berkolaborasi atas nama siswa penyandang disabilitas adalah bekerja dengan orang tua. Anda dapat berkomunikasi dengan orang tua melalui buku penghubung dan melalui e-mail; kadang-kadang bertemu dengan mereka karena mereka mengungkapkan keprihatinan tentang anak-anak mereka; berunding dengan mereka di pertemuan tim formal; dan bekerja dengan mereka karena mereka secara sukarela di sekolah, membantu dengan kunjungan lapangan, dan berpartisipasi dalam kegiatan dan inisiatif sekolah lainnya.

IV. SIMPULAN

Konsep pendidikan inklusif selaras dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suka, bangsa, ras, bahasa dan agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pemersatu bangsa. Konsep keanekaragaman dalam pendidikan inklusif disebut dengan pendidikan tanpa diskriminasi, artinya dalam menyelenggarakan pendidikan tidak membedakan peserta didik, menghargai keragaman/perbedaan menjadi salah satu pilar utama dalam pendidikan inklusif. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan inklusif selaras dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme peserta didik yang ditandai dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan satu sama lain, membangun sikap memahami dan menghargai teman di kelas, menerima keanekaragaman, menghargai perbedaan kondisi fisik suku, ras dan agama. Berperilaku adil dalam pembelajaran.

Nilai-nilai nasionalisme seperti nilai keadilan, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan individu, menjunjung tinggi hak-hak orang lain dengan berperilaku tidak diskriminasi dapat dikembangkan melalui pembelajaran di kelas inklusif, antara lain: (1) menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, dimana guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas dan anak ditampung secara penuh dengan menekankan saling menghargai perbedaan (2) pembelajaran kooperatif dengan tutor teman sebaya, dimana siswa saling bekerja sama satu sama lain saling berfungsi (3) sekolah menampung semua murid di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru (4) pembelajaran terpusat pada siswa dan menguntungkan bagi semua siswa (5) mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas yang sama, dari berpusat pada kurikulum menjadi berpusat pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- B.H, Johnsen. 2007. *Kurikulum Untuk Pluraritas Kebutuhan Belajar Individu*. Bandung: Pascasarjana UPI.
- Daniel P. Hallahan. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- Marilyn Friend dan William D. Bursuck. 2012. *Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers*. USA: Pearson Education, Inc.
- Skjorten. 2007. *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Shopan Shepin dalam Sunardi. 2005. *Managing Special Education*. Boston: Open University Pers.
- World Conference On Special Needs Education: Access And Quality. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca: UNESCO & Ministry Of Education And Science, Spain.

STRATEGI PEMBINAAN NILAI-NILAI NASIONALISME PADA SISWA DI SMA NEGERI 7 BANJARMASIN

Irni Cahyani

irnicahyani08091987@gmail.com

ABSTRAK

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Kata Kunci: strategi pembinaan, nilai nasionalisme, siswa.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI.

I. PENDAHULUAN

Secara umum nasionalisme atau rasa kebangsaan adalah rasa cinta warga bangsa dalam bentuk kesediaan untuk menjaga dan mempertahankan negara (Kadi, 2008: 63). Istilah ini sesungguhnya ciptaan elite semata, karena bagi rakyat kecil dari dahulu sampai kapanpun hanya tahu bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Bagi mereka, soal kepedulian terhadap negara sesungguhnya karena dipaksa oleh negara dengan peraturan-peraturan yang bila dilanggarnya akan terkena sanksi. Sedangkan menurut Sultan Hamengku Buwono X (2008: 85), nasionalisme sering dikonotasikan dengan aspek-aspek emosional, kolektif, dan idola, serta sarat memori historis. Nasionalisme selalu melibatkan dimensi emosi atau rasa, seperti seperasaan, sepenanggungan, seperantauan, dan senasib. Faktor memori historis adalah faktor kecenderungan yang dibangun untuk menumbuhkan perasaan "bersatu" dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu. Menurut Suardi (2007: 24), nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan atau warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Selain itu, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional (dalam wikipedia). Nasionalisme telah menjadi pemicu kebangkitan kembali dari budaya yang telah memberikan identitas sebagai anggota dari suatu masyarakat-bangsa (Tilaar, 2007: 28). Jadi dapat disimpulkan, bahwa nasionalisme adalah rasa ingin mempertahankan negara, baik dari internal maupun eksternal.

Menurut Sekartaji, salah satu upaya dalam membina nasionalisme di sekolah adalah dengan membiasakan kegiatan upacara bendera untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Di tengah perkembangan zaman yang semakin serba modern dan menggerus nilai-nilai budaya bangsa, nampaknya kegiatan upacara bendera masih relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membentuk karakter pribadi siswa yang tangguh, disiplin, dan bertanggungjawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan upacara bendera adalah bagian dari pembinaan mental, fisik, dan disiplin yang harus terus dilakukan dalam

kehidupan sekolah. Sekolah sebagai wahana "*transfer of value*" harus dapat menciptakan nilai-nilai positif. Hal tersebut bisa dilakukan dengan penciptaan suasana kegiatan belajar mengajar yang serba tertib, tertib di kelas, tertib di lapangan, dan di lingkungan sekolah, serta tertib pengaturan dan penggunaan waktu/tertib waktu (dalam blogspot.com).

Ada berbagai cara pendidik dalam membina nasionalisme. Salah satunya dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri. Kegiatan ini merupakan kegiatan di luar jam pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui layanan Bimbingan Konseling (BK) dan kegiatan ekstrakurikuler. Layanan BK dapat dioptimalkan, komunikasi yang interaktif antara guru, siswa, orangtua siswa, sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari pengaruh buruk lingkungan. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat menyalurkan minat, bakat, kemandirian, kemampuan bermasyarakat, beragama, dan memecahkan masalah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Strategi Pembinaan Nilai-nilai Nasionalisme Siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin

Penulis melakukan observasi di SMA Negeri 7 Banjarmasin terletak di Jalan Dharma Praja V No. 47 Banjarmasin. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, terlihat bahwa tingkat nasionalismenya baik, meskipun ada beberapa siswa yang tingkat nasionalismenya masih belum cukup baik. Pembinaan nilai-nilai nasionalisme itu sendiri dilaksanakan sekolah seperti siswa dididik untuk patuh terhadap peraturan, baik dari sekolah maupun pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku. Peduli terhadap teman-temannya, suka menolong teman yang sedang mendapat kesusahan. Untuk membuktikan hasil observasi, berikutnya penulis melakukan wawancara terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Penulis memulai wawancara dengan bertanya: "Menurut Bapak, bagaimana nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin?"

- Bapak Muhammad Tus'a, S. Pd. (Guru Pendidikan Kewarganegaraan) mengatakan bahwa:

“Sangat baik, mereka dengan kesadaran yang tinggi mengikuti/ menjalankan nasionalisme tersebut.”

Dari wawancara itu, dapat disimpulkan bahwa Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 7 Banjarmasin menyatakan bahwa nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah baik.

Selanjutnya penulis bertanya: “Bagaimana peran sekolah dalam membina nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan bahwa:
“Sekolah membina siswa nilai-nilai nasionalisme bekerjasama dengan para guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi, dan yang lainnya untuk menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, baik di sekolah maupun di masyarakat.”

Berikutnya penulis bertanya: “Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam membina nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan:
“Guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, menanamkan nilai nasionalisme tersebut. Kepala sekolah memberikan contoh teladan untuk semua. Semua siswa dilatih untuk disiplin, bertanggungjawab, serta peduli terhadap teman-temannya, serta masyarakat di sekitarnya.”

Berikutnya penulis bertanya: “Bagaimana proses pembinaan nilai-nilai nasionalisme siswa dengan kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas (ekstrakurikuler)?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan:
“Di dalam kelas; siswa dididik untuk patuh terhadap peraturan, baik dari sekolah maupun pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku. Peduli terhadap teman-temannya, suka menolong kawan yang sedang mendapat kesusahan. Di luar kelas; siswa bisa kreatif untuk menjalankan nilai-nilai nasionalisme tersebut kepada orang lain.”

Selanjutnya penulis bertanya: “Bagaimana respon siswa terhadap pembinaan nilai-nilai nasionalisme siswa dengan kegiatan di dalam kelas, maupun di luar kelas (ekstrakurikuler)?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan:

“Sangat baik, karena mereka merasa nilai-nilai nasionalisme inilah yang salah satunya bisa mengantarkan bangsa dan negara ini bisa maju seperti bangsa-bangsa maju lainnya.”

Penulis selanjutnya bertanya: “Siapa pihak yang berperan dalam membina nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin? Bagaimana perannya dalam membina nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan bahwa:
“Kepala Sekolah, guru-guru, serta tata laksana sekolah yang ada. Semua sektor ini bekerjasama saling bahu-membahu untuk menanamkan nilai-nilai tersebut.”

Berikutnya penulis bertanya: “Apa saja kesulitan dalam penyelenggaraan pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan bahwa:
“Masih ada sebagian kecil siswa yang belum menjalankan nilai nasionalisme di sekolah.”

Penulis kemudian bertanya: “Menurut Bapak, sikap apa yang dituntut secara mendasar dalam diri seorang pendidik (guru) untuk melaksanakan pembinaan nilai-nilai nasionalisme di sekolah?”

- Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. mengatakan:
“Disiplin, menjadi contoh teladan, bertanggungjawab, ikhlas dalam bekerja, peduli terhadap sesama, cinta dan toleransi terhadap orang lain.”

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 7 Banjarmasin yaitu Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. Beliau menjawab nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah baik, meskipun ada sebagian kecil siswa yang belum menjalankan nilai nasionalisme di sekolah. Adapun kegiatan pembinaan nilai-nilai nasionalisme siswa di dalam kelas seperti siswa dididik untuk patuh terhadap peraturan, baik dari sekolah, maupun pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peduli terhadap teman-temannya, suka menolong kawan yang sedang mendapat kesusahan. Sedangkan di luar kelas seperti siswa bisa berkreasi untuk menjalankan nilai-nilai nasionalisme tersebut kepada orang lain. Respon siswa terhadap pembinaan nilai-nilai nasionalisme tersebut adalah

baik. Sikap yang dituntut secara mendasar dalam pembinaan nilai-nilai nasionalisme menurut guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 7 Banjarmasin (Bapak Muhammad Tus'a, S. Pd.) tersebut adalah disiplin, memberi contoh teladan, bertanggungjawab, ikhlas dalam bekerja, peduli terhadap sesama, cinta dan toleransi terhadap orang lain.

2.2 Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme Siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin

Implementasi nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin dari hasil observasi penulis, dapat dilihat dari siswa mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dengan khidmat. Juga diperingatkan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Peringatan Pendidikan Nasional, Hari Pahlawan, dan lain-lain. Serta sebagian besar siswa sudah mentaati peraturan sekolah. Para siswa juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, Pramuka, Kelompok Studi Islam, Kelompok Ilmiah Remaja, Paduan Suara, dan lain-lain. Selain dari hasil observasi tersebut, penulis juga melakukan wawancara mengenai implementasi nilai-nilai nasionalisme siswa.

Penulis bertanya: "Menurut Bapak, apakah nilai-nilai nasionalisme yang ada pada siswa sudah terimplementasi dengan baik?"

- Bapak Muhammad Tus'a, S. Pd. mengatakan bahwa:
"Sudah, dapat dilihat dari siswa yang sebagian besar sudah disiplin, bertanggungjawab, rasa memiliki yang dalam terhadap sekolah, peduli terhadap sesama, dan mampu bekerjasama dengan orang lain."

Berikutnya penulis bertanya: "Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme siswa di lingkungan sekolah?"

- Bapak Muhammad Tus'a, S. Pd. mengatakan:
"Masih ada sebagian kecil siswa yang belum menjalankan nilai nasionalisme di sekolah, misalnya ada siswa yang datang terlambat atau tidak disiplin."

Selanjutnya penulis bertanya: "Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pengimplementasian nilai-nilai nasionalisme siswa di lingkungan sekolah?"

- Bapak Muhammad Tus'a, S. Pd. mengatakan:

“Sekolah langsung melakukan tindakan dan pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Tus’a, S. Pd. Beliau mengatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme siswa sudah terimplementasi dengan baik. Kendala dalam pengimplementasian nilai-nilai nasionalisme siswa menurut Bapak Muhammad Tus’a, S.Pd. adalah masih ada sebagian kecil siswa yang belum menjalankan nilai nasionalisme di sekolah, misalnya ada siswa yang datang terlambat atau tidak disiplin, maka sekolah langsung melakukan tindakan dan pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan.

Selain wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan, penulis juga mewawancarai beberapa orang siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin untuk mengetahui implementasi nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap nasionalisme, penulis bertanya: “Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan nasionalisme?”

- Farah Putri Firdausa (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.”
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan: “Menurut saya, nasionalisme adalah rasa cinta tanah air.”
- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Menurut saya nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air kita, Indonesia.”
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Yang dimaksud dengan nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme

juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.”

- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Bersifat adil dan makmur.”
- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Mempertahankan dan mencintai sesuatu untuk mencapai tujuan bersama dan kepentingan nasional.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sudah memahami makna nasionalisme.

Berikutnya penulis bertanya: “Menurut Anda, bagaimana contoh perbuatan yang mencerminkan nasionalisme?”

- Farah Putri Firdausi (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Menggunakan produk dalam negeri, berusaha untuk memajukan Indonesia dengan menyumbangkan prestasi, bangga dengan bangsa Indonesia dan peduli terhadap masalah yang dihadapinya.”
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar Indonesia, serta belajar PKN di sekolah.”
- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Menghormati dan menghargai jasa pahlawan, mengikuti upacara, merayakan hari besar seperti hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan lain-lain.
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
“Gotong royong di lingkungan masyarakat, saling membantu antar sesama tetangga, menaati peraturan sekolah, saling menghormati antar masyarakat maupun teman, menggunakan produk dalam negeri, berpartisipasi dalam acara yang memajukan bangsa, berusaha dengan menyumbangkan prestasi.”

- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari kemerdekaan lainnya."
- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Memakai produk dalam negeri, menghormati terhadap orang yang berbeda suku dan agama, mengibarkan bendera Indonesia di rumah saat ada HUT RI."

Kemudian, penulis bertanya: "Menurut Anda, bagaimana cara menunjukkan rasa nasionalisme Anda di sekolah?"

- Farah Putri Firdausi (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Mematuhi dan menaati peraturan sekolah, memiliki sikap rela menolong, disiplin, berani, bertanggungjawab."
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Dengan cara belajar giat setiap hari berfungsi menjadi orang yang berguna di masa depan untuk bangsa dan negara. Serta mengikuti segala tata tertib di sekolah, maupun di lingkungan sekitar guna menghindari kenakalan remaja seperti tawuran, merokok, dan sebagainya."
- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Dengan mengikuti organisasi dan olimpiade, menjadi anggota paskibraka."
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Dengan cara menaati peraturan sekolah seperti berpakaian secara lengkap yang telah ditentukan sekolah, tidak berandalan (berpakaian), mengikuti upacara, mengikuti kegiatan belajar dengan tertib, tidak bolos sekolah, berprestasi di sekolah."
- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:

"Mengikuti upacara dengan serius, mewujudkan rasa cinta tanah air, menyatukan warga sekolah untuk tujuan yang sama."

- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Rajin belajar, buang sampah pada tempatnya, tidak menyontek, suka membantu teman yang kesulitan."

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para siswa tersebut sudah mengerti mengenai nasionalisme.

Berikutnya penulis bertanya: "Menurut Anda, bagaimana tingkat nasionalisme di sekolah Anda?"

- Farah Putri Firdausa (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Cukup meningkat."
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Menurut saya, tingkat nasionalisme di SMA Negeri 7 tinggi, karena kami selalu mengadakan upacara di hari Senin, serta di hari besar Indonesia."
- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Sangat tinggi, karena kami sering mengadakan perayaan untuk hari pahlawan, dan lain-lain."
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Masih kurang, karena masih banyaknya siswa yang belum sadar terhadap rasa nasionalisme, masih banyak siswa yang melanggar aturan-aturan sekolah yang harusnya ditaati oleh para siswa. Akan tetapi, masih banyak siswa yang melanggar aturan di sekolah mereka sendiri."
- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Cukup baik, dengan upacara yang dilaksanakan tiap hari Senin."
- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Kurang masih karena masih adanya murid yang kurang menerapkannya dan hanya menganggap bahwa hal itu cuma sepele."

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa selain ada siswa yang sudah baik rasa nasionalismenya, tetapi masih ada beberapa siswa yang rasa nasionalismenya masih kurang.

Kemudian penulis bertanya: "Menurut Anda, siapa pihak yang paling berperan dalam membina nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin?"

- Farah Putri Firdausa (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Tentunya guru di sekolah."
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Pihak yang berperan adalah kepala sekolah, guru, dan staf tata laksana sekolah."
- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Semua orang di sekolah berperan penting untuk membina nasionalisme."
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Kepala sekolah dan guru-guru yang berhubungan dengan pelajaran nasionalisme. Contohnya: Guru PKN ataupun Guru IPS."
- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Guru dan beberapa murid di sekolah."
- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan."

Berikutnya penulis bertanya: "Apakah Anda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Jika iya, kegiatan ekstrakurikuler apa yang Anda ikuti?"

- Farah Putri Firdausa (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Iya, saya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yaitu KSI (Kelompok Studi Islam)."
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:

"Iya, pramuka."

- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Iya, yaitu pramuka dan paduan suara."
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Ekstrakurikuler KIR (Karya Ilmiah Remaja)."
- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Iya, basket dan pramuka."
- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Ya, ekstrakurikuler bola basket dan pramuka."

Berikutnya penulis bertanya: "Menurut Anda, apakah kegiatan yang Anda ikuti tersebut dapat membentuk sikap nasionalisme?"

- Farah Putri Firdausa (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Iya, saling mengajarkan satu sama lain."
- Sela Apsari (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Iya, karena di dalam pramuka, kami diajarkan sejarah, serta sikap cinta tanah air."
- Syarifah Nur Maulidah (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Iya, karena kegiatan tersebut mengajarkan kita untuk mengetahui sejarah, moral, dan etika, dan cinta tanah air."
- Muhammad Rifki Putera Pratama (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:
"Ya, itu membentuk sikap nasionalisme karena ada tuntutan disiplin, tuntutan mengerjakan, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh sikap dari nasionalisme."
- Kenno Boni Martua Sinaga (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:

“Ada, pramuka contohnya yaitu menunjukkan keteladanan dan penegakan kepada bendera merah putih.”

- Muhammad Phasya Alfian (Siswa Kelas XI MIPA 2 SMA Negeri 7 Banjarmasin) mengatakan:

“Ya, karena menjunjung dan membina kita untuk mentaati aturan dan pembelaan negara.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa mayoritas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan bagi mereka kegiatan tersebut dapat membina nasionalisme pada diri mereka.

2.3 Strategi Pembinaan Nilai-nilai Nasionalisme pada Siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat nasionalisme siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah terbina dengan baik. Semua guru di SMA Negeri 7 Banjarmasin merupakan pihak yang berperan dalam pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Hal itu dilakukan guru SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan cara menanamkan nilai nasionalisme tersebut, memberikan contoh teladan untuk semua warga sekolah, dan melatih siswa untuk berdisiplin, bertanggungjawab, serta peduli terhadap teman-temannya, serta masyarakat di sekitarnya.

Pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin seperti siswa dididik untuk patuh terhadap peraturan, baik dari sekolah, maupun pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku. Mengajarkan siswa untuk peduli terhadap teman-temannya, dan suka menolong kawan yang sedang mendapat kesusahan. Selain itu, kegiatan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional.

Strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, KSI (Kelompok Studi Islam), KIR (Karya Ilmiah Remaja), Paskibra, dan ekstrakurikuler lainnya yang ada di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

Dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara bahwa strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah baik. Meskipun terkadang ada kendala, tapi dapat diatasi pihak sekolah dengan baik.

2.4 Implementasi Nilai-nilai Nasionalisme pada Siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah terimplementasi dengan baik. Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 7 Banjarmasin, Bapak Muhammad Tus'a, S. Pd. mengatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme yang ada pada siswa sudah terimplementasi dengan baik, seperti siswa sudah banyak disiplin, bertanggungjawab, rasa memiliki yang dalam terhadap sekolah, peduli terhadap sesama, dan mampu bekerjasama dengan orang lain."

Beberapa kendala dalam mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin, seperti masih ada sebagian kecil siswa yang belum menjalankan nilai nasionalisme di sekolah, misalnya ada siswa yang datang terlambat atau tidak disiplin. Maka, sekolah langsung melakukan tindakan dan pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara penulis terhadap siswa, menunjukkan respon yang baik. Mereka sudah mengerti makna nasionalisme dan mengerti cara berperilaku yang nasionalisme. Mayoritas siswa tersebut menyimpulkan nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga berarti rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal, maupun eksternal.

Siswa juga memberikan contoh perilaku nasionalisme seperti gotong royong di lingkungan masyarakat, saling membantu antar sesama tetangga, menaati peraturan sekolah, saling menghormati antar masyarakat maupun teman, menggunakan produk dalam negeri, berpartisipasi dalam acara yang memajukan bangsa, dan berusaha dengan menyumbangkan prestasi.

Para siswa juga aktif dalam mengikuti kegiatan yang berisi pembinaan nilai-nilai nasionalisme, seperti mereka setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional mengikuti upacara dengan khidmat. Selain itu, mayoritas dari mereka sudah disiplin dan menaati peraturan sekolah. Mereka juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kelompok Studi Islam (KSI), Pramuka, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dapat disimpulkan

bahwa nilai-nilai nasionalisme pada siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah terimplementasi dengan baik.

III. SIMPULAN

Rasa nasionalisme siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah tinggi dan terbina dengan baik, karena pembinaan nilai-nilai nasionalisme oleh pihak sekolah. Guru sangat berperan dalam membina nasionalisme siswa, dengan memberi teladan yang baik bagi siswa, ikhlas dalam bekerja, menerapkan disiplin, dan menjadi pribadi yang bertanggungjawab. Strategi pembinaan nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 7 Banjarmasin dilakukan dengan cara, siswa dididik untuk patuh terhadap peraturan, baik dari sekolah maupun pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku, siswa diajarkan untuk peduli kepada teman-temannya, dan siswa diajarkan untuk suka menolong kawan yang mendapat kesusahan.

Nilai-nilai nasionalisme pada mayoritas siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin sudah terimplementasi dengan baik, meskipun ada beberapa kendala, tetapi masih bisa diatasi pihak sekolah. Respon siswa juga kebanyakan sudah baik, dilihat dari pengetahuan siswa tentang nasionalisme, siswa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dengan khidmat, dan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kelompok Studi Islam (KSI), dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buwono X, Sultan Hamengku. 2008. *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kadi, Saurip. 2008. *Mengutamakan Rakyat Wawancara Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi oleh Liem Siok Lan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sekartaji, Sely Setyawati. 2011. *Penanaman Rasa Nasionalisme: Menumbuhkan Rasa Nasionalisme* (<http://penanamanrasanasionalisme.blogspot.com/2011/11/penanaman-rasa-nasionalisme>). Diakses 25 September 2016.
- Suardi, Abu Bakar, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Yulistira.

Tilaar, Henry Alexis Rudolf. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

www.wikipedia.com. Diakses 25 September 2016.

STRATEGI PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKOLAH DASAR MELALUI PEMODELAN SEKOLAH SEBAGAI LABORATORIUM RELIGIUS, DEMOKRATIS DAN SOSIAL

Jamil

azmie.yc@gmail.com

ABSTRAK

Menjelang Indonesia merdeka, para pendiri negara telah merumuskan nilai-nilai dasar pedoman penyelenggaraan negara dan falsafah kehidupan bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh luntur, baik karena faktor internal maupun karena pengaruh global. Pendidikan agen pewarisan nilai-nilai Pancasila sekaligus agen perubahan. Untuk itu diperlukan revitalisasi pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dari indoktrinatif dan teoritis ke arah demokratis dan berorientasi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran dan penataan suasana sekolah (PSS): 1) merevitalisasi visi, misi dan strategi pedagogis pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila, 2) membudayakan nilai-nilai Pancasila kepada siswa SD melalui aktivitas belajar mengajar PKn dan mapel lainnya, 3) penataan suasana sekolah yang kondusif untuk mengaktualisasikan serta membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan SD dan 4) menciptakan iklim/suasana sekolah agar dapat menjadi sarana pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila antara lain melalui praktik belajar kewarganegaraan, organisasi kepramukaan, organisasi kesiswaan, piket kelas, UKS, dan petugas upacara bendera sehingga sekolah menjadi *"laboratorium untuk berpraktek secara religious, belajar berdemokrasi dan peduli terhadap lingkungan sosialnya"*.

Kata Kunci: nilai dasar, pewarisan nilai dan pembudayaan nilai.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen dan Ketua Konsentrasi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman

I. TINJAUAN FILOSOFIS

Setiap kelompok apalagi bangsa memiliki *geist* (jiwa) yang membuat kelompok atau bangsa itu hidup. Jiwa bangsa itu selanjutnya disebut *grundnorm*. Dalam istilah F.C. Savigny (1779-1861) disebut *Volk geist*, Hans Kelsen (1973) memberikan istilah *Grundnorm*, Hans Nawiasky (1940) menyebutnya *Staatsfundamentalnorm* dan Notonagoro (1984) menyebutnya pokok kaidah fundamental negara atau asas kerohanian negara. Karena jiwa bangsa atau *grundnorm* tersebut merupakan aksioma adanya kelompok atau bangsa maka bila *grundnorm* tersebut hilang maka bangsa pun akan lenyap. *Grundnorm* muncul dengan sendirinya akan tetapi perlu dirumuskan secara formal agar setiap anggota kelompok (bangsa) menyadari keberadaan dan kepentingannya, sehingga *grundnorm* itu dipelihara. Menjelang Indonesia merdeka, para pendiri negara (*the founding fathers*) menyadari hal tersebut lalu bersepakat merumuskan nilai-nilai dasar yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan negara serta falsafah kehidupan warga negaranya. Kesepakatan tersebut terwujud dalam bentuk Dasar Negara yang diberi nama Pancasila (Darmodiharjo 1980: 21), karena terdiri dari lima sila yang merupakan sari pati nilai yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya. Oleh karena itu lima dasar tersebut tidak lain merupakan perwujudan Kepribadian Bangsa yang dapat membedakan dirinya dari bangsa lain. Rancangan Dasar Negara tersebut akhirnya dituangkan dalam naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Setelah *grundnorm* telah dirumuskan, maka pada generasi penerus kelompok tersebut (terlebih pelajar) perlu disebarluaskan, disosialisasikan dan dibudayakan agar mereka tetap memiliki jiwa/ruh kelompok (bangsa) sehingga kelompok (bangsa) itu tetap hidup dan berkembang sesuai dengan watak dasar nilai luhur kepribadiannya. Teori daluarsa menyatakan bahwa sesuatu yang baik bisa hilang bila dibiarkan atau dilupakan dan sesuatu yang salah bisa benar bila terus menerus dilakukan. Oleh karena itu *grundnorm* bangsa Indonesia tidak boleh daluarsa karena dilupakan yang akan mengakibatkan matinya negara kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 sebagai *Declaration of Independence* bangsa Indonesia (Zaini, 1974) memuat dan merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila.

Pancasila teramat penting bagi bangsa Indonesia, karena kedudukannya sebagai dasar negara dan fungsinya sebagai dasar pemersatu bangsa. Pancasila dalam Pembukaan ini merupakan mutiara bangsa, Koesnardi, (1983: 101) menyebutnya "falsafah yang merupakan perwujudan keinginan rakyat", yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan dalam dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia, hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen nasional baik secara politis maupun yuridis untuk mempertahankan Pancasila. Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, ada kecenderungan terjadinya desintegrasi bangsa serta lunturnya jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa (Pancasila) baik karena faktor internal maupun karena pengaruh global. Gejala ini tidak boleh dibiarkan dengan menyerahkan hanya pada mekanisme politis dan realitas sosial. Pendidikan harus tampil ke depan mengemban misinya sebagai agen konservasi atau pewarisan nilai di samping sebagai agen inovasi atau perubahan. Usaha ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan bukan sebagai usaha maupun sebagai hasil sampingan.

Mencermati situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka patutlah kita menata dan merevitalisasi kembali model pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang selama ini berjalan. Dari pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan teoritis menuju ke arah pembudayaan yang lebih demokratis dan lebih berorientasi pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, melalui perubahan visi, misi dan strategi pedagogis yang sesuai untuk pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila.

II. TINJAUAN EMPIRIK

Keluarga dipandang sebagai institusi penting dalam membina nilai moral anak, karena insan antara orang tua dengan anak dalam keluarga sangat dekat sehingga memungkinkan terjadinya pewarisan nilai yang intensif dalam setiap aktivitasnya, baik melalui sikap, perbuatan maupun pemikiran. Namun, karena kesibukan ayah dan ibu bekerja di luar rumah menyebabkan kualitas dan kuantitas peran keluarga dalam membina anak telah tergeser. Pergeseran tersebut mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas komunikasi di antara anggota keluarga yang dampaknya akan mengurangi makna keluarga dalam pendidikan nilai anak di rumah. Hasil penelitian Lickona (1991: 33) mengemukakan bahwa orang tua sekarang rata-rata hanya memiliki waktu dua

menit dalam sehari untuk melakukan dialog yang bermakna dengan anak-anaknya (*that parents an average of two minutes a day in "meaningful dialogue" with their children*).

Dalam rangkuman buku "*what is the human prospect?*", Heilbroner (1974: 15) menyatakan bahwa "Banyak kegelisahan dan kegetiran generasi pertengahan abad yang akan datang terjadi akibat ketidakcakapan menyampaikan nilai pada remaja. Kejadian ini lebih banyak terjadi pada pendidikan moral melebihi transmisi nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya, proses kejadiannya dihambat oleh lemahnya struktur keluarga, padahal ketika keluarga bersatu, di sana akan menjadi ajang kesepakatan rasa yang baik terhadap keragu-raguan sudut pandang nilai dan moral."

Bila keluarga melemah perannya dalam pendidikan nilai, maka anak akan menerima dan menginternalisasi nilai dari luar. Sebagai makhluk sosial, anak pasti punya teman, dan pergaulan dengan teman akan menambah perbendaharaan informasi yang akhirnya akan mempengaruhi berbagai jenis kepercayaan yang dimilikinya. Kumpulan kepercayaan yang dimiliki anak akan membentuk sikap yang dapat mendorong untuk memilih dan menolak sesuatu. Sikap-sikap yang mengkrystal pada diri anak akan menjadi nilai, dan nilai tersebut akan berpengaruh pada prilakunya. Informasi, sikap dan kebiasaan teman sangat kuat pengaruhnya, karena diantara mereka relatif lebih terbuka, dan intensitas pergaulannya relatif sering, baik di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang nasihat orang tua ditolak karena alasan bertentangan dengan aturan yang disampaikan temannya. Kelompok sebaya tentu mempunyai aturan main sendiri, dan anak cenderung menyesuaikan aturan main tersebut dengan harapan agar diterima oleh kelompoknya. Bagaimana bila nilai yang disampaikan oleh teman sebaya tersebut negatif? Tentu akan membiaskan internalisasi nilai-nilai luhur yang seharusnya mereka miliki.

Tokoh politik, selebritis, para pejabat publik merupakan salah satu bagian masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Mereka tidak jarang menawarkan variasi nilai yang berbeda, bahkan tidak jarang perilaku yang diperlihatkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa. Persoalan ini tentu akan menambah bingungnya bagi nilai anak. Sementara orang dewasa sering hanya menambah jumlah nilai yang sudah ada pada anak-anak, baik yang didapatnya dari sekolah, tokoh politik, tokoh agama, selebritis,

buku bacaan, radio, televisi, film, koran, majalah, maupun anak-anak lainnya. Padahal diantara petuah yang disampaikan, sering terjadi pertentangan dalam pertimbangan moral anak.

Menurut Rath, (1977: 20), bahwa “masalahnya hampir tidak ada seorang pun yang memandang pentingnya membantu anak untuk menghilangkan kebingungan yang ada pada pikiran atau kepala mereka. Hampir tidak ada seorang pun yang memandang penting membantu anak memecahkan dan menyelesaikan pemikiran yang memusingkan tersebut”.

Informasi yang diterima anak semakin meningkat ketika alat-alat komunikasi potensi diperkenalkan ke dalam ritualitas kehidupan keluarga. Pertama kali telepon, lalu disusul dengan radio dan setelah perang dunia ke dua datanglah televisi. Mereka yang menangani pemrograman mulai mengembangkan sesuatu yang dianggap menarik dan menyenangkan anak-anak. Media ini menyediakan variasi pandangan hidup pada anak yang tidak pernah ditemuinya di keluarga, sehingga membiasakan mereka untuk melihat dan menyimak pandangan hidup yang seharusnya mereka warisi. Sekarang, media menyuguhkan persoalan pornografi, seksualitas, horor, kekerasan serta kriminal secara terbuka, termasuk adegan-adegan immoral yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nampaknya berpendidikan tinggi. Cohen (1972: 16) dengan tegas menyatakan “media ini telah lama sebagai agen kejahatan moral”. Sudah tentu anak akan memungut sejumlah gagasan atau kerancuan nilai dari semua ini. Sangat mungkin bahwa kontribusi terbesar media-media tadi akan membiasakan pemahaman yang tengah tumbuh pada anak-anak seputar mana betul dan mana yang salah, mana yang asli mana yang palsu, mana yang bagus dan mana yang jelek, mana yang adil dan mana yang timpang. Keith Tester (2003: 14) menegaskan bahwa media “bukan hanya menghancurkan nilai budaya, tetapi nilai moral masyarakat mengalami kerusakan parah”.

Ketika anak memasuki masa remaja, banyak orang tua yang menganggap mereka masih membutuhkan perlindungan dan arahan secara ketat, sementara remaja sendiri mengalami beberapa pemahaman secara biologis, psikologis, pemikiran maupun moralitas. Oleh karena itu, sering terjadi konflik di antara remaja dengan orang tua. Konflik itu diperluas dengan kebutuhannya untuk mencari jati diri menjelang tahap kedewasaan. Sementara itu orang tua sering memperlakukan mereka sebagai anak-anak yang

membutuhkan bimbingan dan arahan secara ketat, sementara pada sisi lain, mereka dituntut mandiri dan dewasa.

Dalam bidang moral, "remaja mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Persoalan-persoalan kekerasan, kriminalitas, tawuran, seks bebas, hamil di luar nikah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan minum minuman keras merupakan realitas terjadi pada kehidupan sebagai siswa sekarang ini. Semakin hari telah menyentuh anak-anak Sekolah Dasar. Mereka ada yang terlibat narkoba, mengisap lem, tindakan kekerasan antar teman, seksualitas, bahkan sampai pada terjadinya pembunuhan. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan terutama pemerintah dan otoritas pendidikan.

III. TINJAUAN AKADEMIK

Aspek moralitas seseorang terdiri dari pengetahuan, sikap dan perilaku moral. Seseorang akan dipandang moralnya matang bila seluruh aspek moral yakni pengetahuan, pertimbangan, sikap dan perilaku yang matang. Sekolah merupakan lembaga yang bertugas membina dan mengembangkan kematangan moral peserta didik, baik dalam pembinaan kaidah moral, sikap moral, perilaku moral maupun pertimbangan moralnya.

Dengan pesatnya kemajuan iptek, beban materi pendidikan di sekolah semakin meningkat, karena terjadinya ledakan dan akumulasi informasi. Hal ini dapat berakibat porsi sekolah untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai moral siswa semakin mengecil. Sebelum meluasnya perkembangan iptek, kemungkinan menitiipkan pendidikan nilai moral pada berbagai mata pelajaran sangat mungkin, namun sekarang apalagi kedepan, guru bidang studi selalu dihadapkan pada pilihan menyelesaikan materi program studinya, atau mengkorelasikan serta mengintegrasikan bahan studi dengan pendidikan nilai. Dapat diduga, bila pilihan ini diserahkan kepada otonomi guru bidang studi, tentu kekhawatiran muncul mereka akan mendahulukan tugas pada bidang studinya. Padahal menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fungsi dan tujuan pendidikan tersebut penuh dengan makna nilai-nilai moral.

Banyak kejadian yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang patut menjadi perhatian serius sebagai bahan perenungan dalam memperbaiki pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah selama ini dalam upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah, sering kita temukan perkelahian antar siswa baik secara perorangan maupun massal yang terjadi hanya karena masalah sepele. Terjadi perusakan sarana dan prasarana sekolah karena dirinya atau temannya tidak naik kelas atau tidak dipilih menjadi ketua kelompok perhimpunan/perkumpulan atau kalah dalam pertandingan atau perlombaan antar kelas maupun antar sekolah. Perilaku kenakalan di kalangan pelajar ini bahkan sampai pada perilaku yang membahayakan, seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang.

Sementara itu, di luar sekolah, masyarakat pun melihat tindakan-tindakan yang tidak etis, seperti pemilihan kepala daerah berubah menjadi kerusuhan, pembakaran kantor, rumah warga, dan mobil dinas dll. Terjadi pula perkelahian antar kampung karena perbedaan keyakinan, perbedaan suku, dan perbedaan pandangan. Padahal kita telah melahirkan pemerintahan yang demokratis melalui pemilihan umum yang demokratis pula. Kita telah memasuki jaman reformasi yang seharusnya mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan tersebut menjadi persoalan serius yang harus kita tangani bersama.

Bila ditelusuri penyebab di bidang pendidikan kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak mulia siswa. Bahkan mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kepribadian siswa/murid kurang menyentuh latihan pengalaman serta kurang menyentuh kehidupan siswa dan masyarakat, sehingga terkesan orientasi pendidikan (termasuk PMP masa lalu) terkesan indoktrinatif, otoriter dan teoritik.

Pada acara peringatan 61 tahun lahirnya Pancasila 1 Juni 2006 di JCC, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politik yang diberi judul "Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila". Presiden mengajak masyarakat Indonesia untuk menjawab

pertanyaan fundamental: "Mengapa kita harus kembali membicarakan Pancasila?". Penegasan ini mengajak kita kepada bangsa Indonesia untuk meletakkan Pancasila dalam konteks makna sejati reformasi yang kita lakukan dewasa ini. Hal-hal yang baik, tepat dan relevan dan justru merupakan jati diri dan konsensus dasar berbangsa harus terus dilanjutkan. Sementara sesuatu yang tidak sesuai dan tidak tepat lagi pada zamannya harus bersama-sama dilakukan perubahan dan pembaharuan. Reformasi hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan, *continuity and changes*. Untuk meyakinkan atas pertanyaan kritis dan fundamental di atas, Presiden menegaskan, "*marilah Indonesia kita jadikan ladang yang teduh bagi bertemunya anak bangsa yang penuh dengan perbedaan, untuk kita bangun konsensus, melangkah bersama dalam kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi*".

Mencermati situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka patutlah kita menata dan merevitalisasi kembali model pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang selama ini berjalan. Pendidikan dan pembudayaan ini dimulai dengan mengubah pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan teoritis menuju ke arah pembudayaan yang lebih demokratis dan lebih berorientasi pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui perubahan visi, misi dan strategi pedagogis yang sesuai untuk pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila.

Dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, hampir semua orang sepakat bahwa masalah utama bermuara pada problematika nilai-moral. Dan bila diidentifikasi maka masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas pewarisan nilai-nilai Pancasila dari satu generasi pada generasi berikutnya.
2. Rendahnya tingkat adopsi dan adaptasi nilai-nilai Pancasila oleh generasi penerus.
3. Banyaknya nilai baru dari luar yang diadopsi masyarakat tanpa filter filosofi bangsa.
4. Sekarang, semakin tidak jelas muara nilai-nilai luhur yang menjadi rujukan kehidupan bangsa.
5. Semakin meningkatnya pelanggaran norma-norma moral yang berakibat pada kerugian harta benda, kehormatan bahkan jiwa.

Persoalan-persoalan di atas bermuara pada kegagalan pendidikan nilai, yaitu rendahnya tingkat pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada bangsa, khususnya di dunia pendidikan persekolahan. Berkaitan dengan hal tersebut perlunya tindak lanjut secara menyeluruh dan berkesinambungan diselenggarakan pembudayaan nilai-nilai Pancasila (PNP) dimulai di Sekolah Dasar. Kegiatan yang pernah dilaksanakan di daerah *piloting* (16 sekolah Dasar di Balikpapan Kaltim) dengan tujuan utamanya adalah mensosialisasikan, menyampaikan, mengaktualisasikan serta membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran serta penataan suasana sekolah yang mendukung. Sedangkan secara khusus bertujuan:

1. Merevitalisasi visi, misi dan strategi pedagogis pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila.
2. Membudayakan nilai-nilai Pancasila kepada siswa Sekolah Dasar melalui aktivitas belajar mengajar PKn.
3. Penataan suasana sekolah yang kondusif untuk mengaktualisasikan serta membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan SD.
4. Menciptakan iklim/suasana sekolah agar dapat menjadi sarana pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila antara lain melalui praktik belajar kewarganegaraan, organisasi kepramukaan, organisasi kesiswaan, piket kelas, UKS, dan petugas upacara bendera sehingga sekolah dapat menjadi "*laboratorium untuk berpraktek secara religious, belajar berdemokrasi dan peduli terhadap lingkungan sosialnya*".

Program ini (PNP) bukan merupakan sesuatu yang baru, aneh atau sulit, melainkan mengembalikan kebiasaan pada jati diri bangsa, sesuatu yang seharusnya normal kembali sebagai individu, warga masyarakat dan bangsa yang beradab. Secara *umum* program ini diperuntukkan bagi seluruh pemangku kepentingan di jajaran dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Program ini juga menyentuh pengelola sekolah dan pengelola pembelajaran di kelas secara bertahap melalui kegiatan pelatihan bagi guru di tingkat provinsi maupun di berbagai daerah.

Kalimantan Timur pada tahun 2007 menjadi salah satu daerah *piloting* nasional untuk PNP dilaksanakan sesuai dengan panduan dan prosedur akademik dan administratif dan terus ditindak lanjuti hingga sekarang (2016) oleh sekolah-sekolah yang dulunya rintisan menjadi sekolah gugus (inti) dan

diintegrasikan dengan berbagai program pemodelan dan pembiasaan perilaku insan yang religius, demokratis dan peduli sesama warga sekolah serta lingkungan sekitar. Sasaran utama kegiatan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila ini adalah siswa-siswa Sekolah Dasar. Sementara guru dan kepala sekolah serta merupakan sasaran instrumen penting agar Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila terlaksana dengan baik di sekolah. Rincian sasaran sebagai berikut:

1. Siswa merupakan sasaran pembudayaan nilai-nilai Pancasila serta sekaligus sebagai subyek yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui aktivitas pembelajaran PKn maupun dalam lingkup persekolahan.
2. Guru merupakan sasaran inovasi model Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui Mata pelajaran PKn SD, sekaligus penataan suasana kelas yang kondusif agar nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam lingkungan kelas dan sekolahnya secara umum oleh siswa.
3. Kepala Sekolah merupakan sasaran inovasi penataan suasana lingkungan sekolah agar kondusif bagi pembudayaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolahnya.
4. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada guru bidang studi dan sasaran lainnya untuk merealisasikan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di setiap gugus dan sekolah baik melalui mata pelajaran PKn maupun melalui penataan suasana sekolah yang mendukung.

IV. MODEL PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKOLAH

4.1 Melalui Kegiatan Pembelajaran

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila di 25 SD di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dapat telah dilaksanakan melalui:

1. Pelaksanaan mata pelajaran seperti tatap muka biasa dengan mempertegas nilai-nilai Pancasila yang harus dicapainya. Dengan cara ini jelas sekali sebuah kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mencapai nilai-nilai Pancasila, baik melalui ceramah, pemodelan maupun diskusi kelas. Pada kegiatan ini bisa dilakukan oleh masing-masing mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn, Agama, IPS, dan IPA, Penjaskes, Keterampilan serta Matematika bila hal itu memungkinkan cocok dengan topik yang dibahas.

2. Melalui pemecahan masalah berupa kasus, konflik moral, dilema moral atau isu-isu yang kontroversial yang ada di lingkungan siswa. Masalah-masalah tersebut menjadi stimulasi yang harus dipecahkan siswa yang solusinya akhirnya bermuara pada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pemecahan kasus, dilema dan konflik moral ini bisa merupakan kegiatan tersendiri sebuah mata pelajaran atau mengintegrasikan kegiatan tersebut dengan berbagai mata pelajaran, karena dalam tugas ini ada kegiatan membacanya, kegiatan pemecahan masalah, membicarakan kasus lingkungan, serta berbagai hal yang mungkin berhubungan dengan berbagai mata pelajaran. Pemberian tugas pemecahan masalah ini dapat dilakukan di kelas pada sebuah proses belajar mengajar (PBM).
3. Melalui pemberian tugas Praktik Belajar Kewarganegaraan (PBK). Tugas ini merupakan kegiatan proyek jangka panjang yaitu kegiatan proyek yang kelas dalam sebuah semester yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu PBK sebaiknya merupakan tugas yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, guru, sekolah dan lingkungan. Meskipun PBK melibatkan seluruh unsur penanggung jawab pendidikan, namun kegiatan itu sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran.

4.2 Melalui kegiatan sekolah

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sekolah dimaksudkan adalah upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik melalui berbagai kegiatan yang telah terbiasa ada di sekolah di luar pelajaran ko-kurikuler serta kegiatan-kegiatan lain yang mungkin diciptakan untuk kepentingan itu. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan pada:

1. Kegiatan ekstra kurikuler rutin, seperti pramuka, palang merah remaja, upacara bendera dan lain-lain.
2. Kegiatan ekstra kurikuler yang mungkin dilakukan, seperti kegiatan dokter kecil, polisi cilik, pesantren kilat, teater, kelompok pecinta alam, koperasi, kelompok debat publik, majalah sekolah dan kegiatan ekstra lain yang memungkinkan dapat dijadikan sarana pembudayaan nilai-nilai luhur peserta didik.
3. Simbolisasi nilai-nilai Pancasila, seperti pemasangan foto dan gambar-gambar yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai warga negara, seperti: foto presiden dan wakil presiden,

bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, naskah urutan sila-sila Pancasila, teks proklamasi, foto para pahlawan dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya menampilkan berbagai macam motto, kata mutiara, atau ungkapan-ungkapan kalimat yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti rajin pangkal pandai, orang sabar dicintai Tuhan dll.

4. Kegiatan sekolah yang bernuansa nilai-nilai Pancasila. Seperti dalam pembelajaran atau kegiatan sekolah diawali dengan do'a diakhiri dengan do'a, masuk kelas dengan antri dan tertib dengan mengucapkan salam, menjenguk teman dan orang tua yang sakit, menyantuni orang miskin, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, merawat taman dan kebun sekolah, ceramah keagamaan oleh pimpinan sekolah, guru atau di antara siswa sendiri, serta kegiatan lain yang memungkinkan tertanamnya nilai-nilai luhur Pancasila.
5. Kebijakan yang mendukung pembudayaan nilai-nilai Pancasila seperti mewajibkan setiap warga sekolah untuk tepat waktu, guru hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, memberikan penilaian pada aktivitas siswa sehari-hari yang masuk pada penilaian kelas atau rapor, memberikan penghargaan pada siswa yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, membuat kebijakan untuk memfasilitasi sekolah untuk mengekspresikan kreativitas siswa seperti majalah dinding, kerjasama dengan surat kabar terbitan lokal/nasional, pentas semester, pentas awal dan akhir tahun yang melibatkan orang tua siswa dan lingkungan, mengadakan lomba individual atau kelompok yang mencerminkan pengalaman sila Pancasila. Tak kalah pentingnya pimpinan sekolah memprogramkan kegiatan-kegiatan tersebut secara tertulis dalam program semester dan tahunan sekolah, yang melibatkan seluruh guru serta orang tua siswa.
6. Kerjasama dengan orang tua siswa dan lingkungan dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara: 1) Mengkomunikasikan pada orang tua bahwa PNP perlu mendapatkan dukungan orang tua dan pembiasaan di rumah, 2) meningkatkan sarana komunikasi sekolah dengan orang tua secara formal dan informal dalam membina moralitas siswa, baik melalui pertemuan rutin maupun melalui pelayanan konseling, 3) membawa narasumber di luar sekolah untuk mengisi acara sekolah seperti untuk ceramah keagamaan, menghadirkan polisi dalam sosialisasi aturan lalu lintas atau pemberantasan narkoba, menghadirkan dokter untuk penyuluhan kesehatan dan pembinaan

dokter kecil, menghadirkan tokoh tani untuk merawat taman dan kebun sekolah yang melibatkan siswa, menghadirkan TNI untuk menjelaskan fungsi warga negara, kalau mungkin sampai mengajarkan pendidikan pendahuluan bela negara yang layak untuk siswa sekolah dasar, 4) Memanfaatkan fasilitas lingkungan di luar sekolah untuk pengalaman nilai-nilai Pancasila, seperti fasilitas keagamaan, kantor kelurahan dan RW/RT, industri di sekitar sekolah, jalan raya di sekitar sekolah, sungai dan gunung, serta sebagai hal yang memungkinkan siswa memiliki tanggung jawab langsung terhadap negara dan bangsa secara luas.

Sebagai bahan kajian lanjutan dari hasil Pembudayaan Nilai Pancasila (PNP) yang diselenggarakan di Sekolah Dasar antara lain, yaitu:

1. Diperolehnya konsep revitalisasi visi, misi, dan strategi pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila.
2. Tertatanya iklim/suasana sekolah yang kondusif agar dapat menjadi sarana pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila melalui kegiatan intra kurikuler mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta melalui berbagai kegiatan sekolah, seperti; kepramukaan, UKS, piket kelas/sekolah, upacara bendera, kegiatan keagamaan, baris berbaris, berkemah serta kegiatan sekolah lainnya.
3. Meningkatnya ketersediaan fasilitas sarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila.
4. Meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan pendidikan di seluruh jajaran dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pengelola sekolah dan pengelola kelas dalam mendukung keterlaksanaan pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila.
5. Tersusunnya program kegiatan sekolah/kelas yang mendukung keterlaksanaan pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila antara lain penerapan tata tertib sekolah, piket sekolah/kelas, UKS, dan kegiatan lainnya.
6. Tersusunnya panduan pelaksanaan program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila di sekolah.
7. Tersusunnya materi dan metode pelaksanaan pendidikan dan pemberdayaan nilai Pancasila dalam berbagai mata pelajaran secara terpadu maupun dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan secara khusus.

V. SIMPULAN

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila di 25 SD di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui: 1) Pelaksanaan mata pelajaran seperti tatap muka biasa dengan mempertegas nilai-nilai Pancasila pada masing-masing mata pelajaran terutama mata pelajaran PKn, Agama, IPS, dan IPA, Penjaskes, Keterampilan serta Matematika bila hal itu memungkinkan cocok dengan topik. 2) Melalui pemecahan masalah berupa kasus, konflik moral, dilema moral atau isu-isu yang kontroversial yang ada dilingkungan siswa, 3) Melalui pemberian tugas Praktik Belajar kewarganegaraan (PBK) dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, guru, sekolah dan lingkungan.

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sekolah bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik melalui berbagai kegiatan yang telah terbiasa ada di sekolah di luar pelajaran ko-kurikuler serta kegiatan-kegiatan lain yang mungkin diciptakan untuk kepentingan itu.

Kebijakan yang mendukung pembudayaan nilai-nilai Pancasila seperti mewajibkan setiap warga sekolah untuk tepat waktu, guru hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, memberikan penilaian pada aktivitas siswa sehari-hari. Kerjasama dengan orang tua siswa dan lingkungan dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila baik sebagai fasilitator penunjang program maupun sebagai narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmuller, C.E. 1996. *The Future of Democracy and Education for Democracy*. Calabsas: Center for Education (CCE).
- Bartens, K. 2000. *Etika*. (Cet. Ke-5). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bloch, Eric. 1986. *Scientific and Technnology Literacy, Need and the Challenge*. Baltimore, MD.
- Boediono, dkk. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbangda Depdiknas.
- Bodenheimer, Edgar. 1962. *Jurisprudence the Philosophy and Methode aof the Law*. Massachusutts: Harvard University Press.
- Calne, Donald, B. 2004. *Batas Nalar*. Terjemahan Cuk Ananta. Jakarta: Gramedia.

- CCE, 1996. *Foundation of Democracy: Authority, Privacy, Responsibility and Justice*, Calabasas.
- CCE, 1998. *We the People ... Project Citizen*, Calabasas.
- Center for Civic Education (CICED). 1999. *Concluding Remarks: Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung.
- Dasim, Budimansyah. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo.
- Dewey, John. 1910. *How We Think*. Boston: D.C Health and Co.
- Djwandono, Sri Eti Wiryani. 2004. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Djojonegoro, W. 1996. *Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fronidzi, Risieri. 2001. *Pengantar Filsafat Etika*. Terjemahan Cuk Nanta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandal, J.E. dan Finn, E.S. 1992. *Education for Democracy*, Calabasas: CCE.
- Hadiwardoyo, Purwa. 1990. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kama, A. Hakam. 2000. *Pendidikan Nilai*. Bandung: Value Press.
- _____. 2005. *Nilai Sosial Budaya dalam Pendidikan Umum*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1993. *Pancasila dan/dalam UUD 1945*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bina Cipta.
- Kusuma, A. Doni. *Pendidikan Karakter*. Kompas Cyber Media.
- Lickona, Thomas. 1992. *Education for Character, How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Batam Books.
- Notonegoro. 1984. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Cetakan ke VI. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Somantri, Muhammad, N. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sumaatmadja, Nursyid. 2002. *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*. Bandung: Alfabeta.

MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN MEMBINA KARAKTER BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Lyta Permatasari

Lytapermatasari2@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dan pembinaan karakter bangsa memiliki andil yang besar untuk memajukan peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan Sumber Daya Manusia yang berilmu, berwawasan dan berkarakter. Pembentukan, pendidikan dan pembinaan karakter bangsa sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa:

1. Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa.
2. Karakter berperan sebagai kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing.
3. Karakter harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat.

Dalam hal pembinaan karakter bangsa akan mengerucut pada tiga tujuan besar :

- Untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa.
- Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen Program Studi Sistem Informasi STMIK Indonesia Banjarmasin.

- Untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat juga mencintai lingkungan.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah dari raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana dan terstruktur untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan karakter merupakan sifat khusus atau moral dari perorangan maupun individu. Pendidikan karakter bangsa adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan jati diri bangsa sehingga terinternalisasi didalam diri peserta didik yang mendorong dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku yang baik. Pembinaan karakter bangsa adalah upaya sistematis suatu negara berkebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan karakter bangsa dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara.

II. TUJUAN DARI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YAITU :

1. Untuk menanamkan dan membentuk sifat atau karakter yang diperoleh dari cobaan, pengorbanan, pengalaman hidup, serta nilai yang ditanamkan sehingga dapat membentuk nilai intrinsik yang akan menjadi sikap dan perilaku peserta didik.

2. Nilai-nilai yang ditanamkan berupa sikap dan tingkah laku tersebut diberikan secara terus-menerus sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan tersebut akan menjadi karakter khusus bagi individu atau kelompok.
3. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam perjalanan perilaku seseorang. Pendidikan yang menekankan pada karakter lah yang mampu menjadikan seseorang mempunyai karakter yang baik.
4. Pendidikan tidak hanya sekedar menghasilkan manusia-manusia yang cerdas, namun juga manusia-manusia yang berkarakter baik.
5. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk menjawab permasalahan bangsa saat ini. Karena pendidikan karakter mampu memajukan peradaban bangsa agar bisa menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan SDM yang berilmu dan berkarakter.

Peran pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa sangat penting, untuk itu perlu adanya bimbingan dan binaan khusus bagi setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembinaan karakter bangsa adalah:

1. Meningkatkan dan mengokohkan semangat religioisitas bangsa.
2. Menambah kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjamin terlaksananya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Memantapkan wawasan, rasa dan semangat kebangsaan.
5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum.
6. Mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
7. Mengembangkan nilai dan kompetensi karakter pribadi dan bangsa.
8. Meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan hasil yang hendak dicapai dalam pembinaan karakter bangsa adalah terciptanya masyarakat yang bersikap dan bertingkah laku secara santun berdasar Pancasila. Diharapkan agar perilaku warga negara baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya mengacu pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara rinci dapat digambarkan bahwa pembinaan karakter bangsa tersebut untuk dapat menghasilkan warganegara yang memiliki:

- (1)Keimanan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing, dan dapat bersikap secara tepat dan baik dalam menghadapi pluralitas agama yang terdapat di Indonesia.
- (2)Sikap dan tingkah laku yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan mendudukan hak asasi manusia secara proporsional sesuai dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
- (3)Semangat kebangsaan yang tinggi, sehingga selalu menjunjung tinggi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan pribadi dan golongan selalu diselaraskan dengan kepentingan negara-bangsa.
- (4)Pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menerapkan demokrasi yang bersendi pada prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- (5)Sikap, perilaku dan kemampuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (6)Kesadaran untuk mengembangkan nilai dan kompetensi universal karakter warganegara.

III. STRATEGI PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA

Ada 3 pilar utama untuk mewujudkan Karakter Bangsa, yaitu:

- Aspek pada Tataran Individu
Nilai kehidupan diwujudkan dalam perilaku, diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Pendidikan karakter bangsa dimulai dengan pendidikan karakter individu.
- Aspek pada Tataran Masyarakat
Masyarakat adalah komunitas yang secara integral memiliki nilai yang sama, dan akan committed menerapkan nilai yang mereka anggap baik. Komunitas bisa terbentuk karena kepentingan, profesi atau tujuan bersama contohnya PGRI, PMR atau Partai Politik.
- Aspek pada Tataran Bangsa
Bangsa terdiri dari sekumpulan bangsa, masyarakat. Pada komunitas, baik orang atau bangsa, terjadi kontrak sosial atau perasaan kebersamaan untuk mendukung nilai-nilai luhur yang ada. Pada tataran bangsa, nilai-nilai luhur tersebut telah berhasil dirumuskan

menjadi dasar negara Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut adalah: Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Martabat Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Adil.

IV. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KARAKTER BANGSA

Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran dan batas-batas suatu negara yang disebabkan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat menimbulkan dampak terhadap penyebaran pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam suatu bangsa yang sulit dikendalikan. Pada gilirannya hal ini akan dapat mengancam jati diri bangsa. Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga membawa dampak terhadap terkikisnya budaya lokal di zona negara-negara Asia Tenggara. Dampak tersebut berwujud adanya ekspansi budaya dari negara-negara maju yang menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan upaya pencegahan melalui program kerja sama kebudayaan, namun melalui teknologi informasi yang dikembangkan, pengaruh negara lain dapat saja masuk. Perkembangan regional Asia atau lebih khusus ASEAN dapat membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan sesuai agar masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta generasi muda tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia.

Perkembangan politik di dalam negeri dalam era reformasi telah menunjukkan arah terbentuknya demokrasi yang baik. Selain itu telah

direalisasikan adanya kebijakan desentralisasi kewenangan melalui kebijakan otonomi daerah. Namun, sampai saat ini, pemahaman dan implementasi konsep demokrasi dan otonomi serta pentingnya peran pemimpin nasional masih belum memadai. Sifat kedaerahan yang kental dapat mengganggu proses demokrasi dan bahkan mengganggu persatuan nasional. Harus diakui bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia sejak lebih dari enam puluh tahun merdeka. Pembangunan fisik dimulai dari zaman orde lama, orde baru, orde reformasi hingga pasca reformasi terasa sangat pesat, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung pembangunan yang mencapai tingkat kemajuan cukup berarti.

Kemajuan di bidang fisik harus diimbangi dengan pembangunan nonfisik, termasuk membina karakter dan jati diri bangsa agar menjadi bangsa yang kukuh dan memiliki pendirian yang teguh. Sejak zaman sebelum merdeka hingga zaman pasca reformasi saat ini perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan karakter terus mendapat perhatian tinggi. Pada awal kemerdekaan pembangunan pendidikan menekankan pentingnya jati diri bangsa sebagai salah satu tema pokok pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Lama, *Nation and Character Building* merupakan pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Pada zaman Orde Baru, pembinaan karakter bangsa dilakukan melalui mekanisme penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada zaman Reformasi, sejumlah elemen kemasyarakatan menaruh perhatian terhadap pembinaan karakter bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan.

V. REVITALISASI PEMBINAAN KARAKTER KEBANGSAAN

Untuk meneruskan perjuangan pemuda pejuang di masa lalu, pemuda masa kini memiliki kewajiban moral untuk ikut meneruskan tradisi positif ini di era kemerdekaan. Konkritnya, pemuda harus bisa menjadi tumpuan bagi terciptanya kemakmuran, kemajuan, serta kemandirian Indonesia. Menjadi dinamisator pembangunan agar bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi, sehingga sejajar bahkan unggul dari bangsa-bangsa lain. Ironisnya, kenyataan yang ada tidaklah demikian. Para pemuda Indonesia saat ini seolah tidak berdaya menghadapi gempuran arus globalisasi yang dihiasi ekspansi tradisi bangsa asing. Meskipun tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa semua budaya

asing memberikan dampak negatif bagi generasi muda, namun jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya, sehingga akan terjebak dalam kolonialisme kontemporer, tergantung dan mudah dikendalikan bangsa lain.

Kekhawatiran ini hampir menjadi kenyataan ketika melihat realitas pemuda masa kini yang pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya nasionalnya menurun drastis. Mereka seakan lebih bangga mengidentifikasi diri kepada bangsa lain yang lebih maju ilmu pengetahuan dan teknologinya. Supaya realitas memprihatinkan ini segera berakhir, pemuda harus tampil di barisan terdepan dalam upaya menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman hilangnya identitas nasional. Inilah perjuangan berat yang menuntut komitmen utuh dari segenap pemuda Indonesia. Agar perjuangan ini berhasil, setidaknya ada peran yang harus dijalankan oleh para pemuda yaitu :

a) *Character Builder* (Pembangun Karakter)

Tergerusnya karakter positif —seperti ulet, pantang menyerah, jujur, dan kreatif— yang dibarengi tumbuhnya karakter negatif seperti malas, koruptif, dan konsumtif di kalangan masyarakat Indonesia, menuntut pemuda untuk meresponnya dengan cepat dan cerdas. Mereka harus menjadi pioner yang memperlihatkan kesetiaan untuk memegang teguh kearifan lokal seperti yang dicontohkan pemuda generasi terdahulu.

b) *Character Enabler* (Pemberdaya Karakter)

Pembangunan karakter bangsa tentunya tidak cukup jika tidak dilakukan pemberdayaan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, pemuda harus memiliki tekad untuk mejadi *role model* dari pengembangan karakter bangsa yang positif.

c) *Character Engineer* (Perekayasa Karakter)

Peran ini menuntut generasi muda untuk terus melakukan pembelajaran. Pasalnya, pengembangan karakter positif bangsa menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman.

VI. KARAKTER YANG DIHARAPKAN

Secara psikologis karakter individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Olah

hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan. Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila pada masing-masing bagian tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.
- b) Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif.
- c) Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika antara lain bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih.
- d) Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan mempunyai etos kerja yang baik.

VII. SIMPULAN

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai dan beragam suku dan bangsa, agama, budaya dan bahasa. Jika kita sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa ingin mempertahankan Indonesia tetap sebagai NKRI yang utuh kita harus menjaga persatuan dan kesatuan serta membudayakan dan menjaga kredibilitas karakter bangsa dari arus globalisasi yang mendunia dan tanpa kenal batas. Mempertahankan jati diri dan karakter bangsa merupakan cerminan sikap yang menjadi identitas bangsa yang dapat melahirkan manusia berkarakter baik, memajukan peradaban bangsa dengan SDM yang berilmu dan berkarakter.

Mengingat penting dan luasnya cakupan pembinaan karakter bangsa dalam rangka menjaga identitas bangsa dari kegoyahan arus globalisasi, serta menjadikan masyarakat berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan komitmen dan dukungan dari lembaga penyelenggara negara, dunia usaha dan industri, masyarakat, media massa dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun program kerja dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar terjadi sinergi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, H.S. 2010. *Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Litbang Puskur Kemdiknas.

https://www.kompasiana.com/lytapermatasari/menyiapkan-aparatur-sipil-negara-yang-produktif-di-kabbanjar_

<https://www.kompasiana.com/lytapermatasari/kunci-sukses-pns-berpola-pikir-positif-mengayomi-dan-peka-terhadap-kepentingan-umum>

<http://makalahcyber.blogspot.com/2013/01/ccontoh-makalah-kewarganegaraan.html>

Mori, A. 2007. *A Theoretical Framework for Educational Game Development. Educational Technology Research & Development: Game Object Model Version II*.

Nunut. 2011. Pembentukan karakter bangsa dengan pancasila. <http://nunutwaone/2011/5/makalah-pembentukan-karakter-bangsa-pancasila.html>. 16 mei 2011.

syahnakri. 2009. Renungan Kebangsaan Dan Pancasila. <http://syahnakri.blogspot.com/2009/11/renungan-kebangsaan-dan-pancasila.html>.

DINAMIKA DEMOKRASI DALAM KERANGKA NASIONALISME DI INDONESIA TAHUN 1945-2010

Mansyur

mansyur_daeng@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan nilai demokrasi dalam kerangka nasionalisme di Indonesia diwarnai penerapan tiga model demokrasi, yaitu Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Setiap fase memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap fase demokrasi. Selain tiga model demokrasi tersebut, demokrasi yang berkembang di Indonesia juga menerapkan dua aliran demokrasi, yaitu Demokrasi Konstitusional dan Demokrasi yang berdasarkan Komunisme. Dari perkembangan demokrasi ini, paling tidak bisa menggambarkan bagaimana hubungan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai nasionalisme di Indonesia. Proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlansungnya proses transisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan pada rezim Soeharto dengan Demokrasi Pancasila-nya dan pada masa Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin-nya. Babak baru pelaksanaan demokrasi muncul di era reformasi mulai dari presiden transisi Habibie tahun 1998, ke pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Kata kunci: dinamika, demokrasi, nasionalisme, Indonesia.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat

I. PENDAHULUAN

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pasang surut pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Demikian juga dengan perkembangan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka nasionalisme di Indonesia di mana pernah diterapkan tiga model demokrasi, yaitu Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Setiap fase tentunya memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap fase demokrasi (Budiarjo, 1996).

Selain tiga model demokrasi tersebut, demokrasi yang berkembang di Indonesia juga menerapkan dua aliran demokrasi, yaitu Demokrasi Konstitusional dan Demokrasi yang berdasarkan Komunisme. Aliran Demokrasi Konstitusional yang dimaksud yakni demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechstaat*) yang tunduk pada *Rule of Law*.

Contohnya, Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru dan Demokrasi ala Orde Reformasi. Sedangkan demokrasi yang berdasarkan atas komunisme, dalam arti mencita-citakan pemerintahan yang tidak dibatasi kekuasaannya (*machstaat*) dan lebih bersifat totaliter. Contohnya, Demokrasi Terpimpin di era Orde Lama (Hashemi, 2011).

Dari perspektif sejarah, embrio demokrasi di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan 1945. Pada awalnya dipelopori oleh organisasi-organisasi modern pada masa pergerakan nasional sebagai wacana penyadaran. Organisasi modern tersebut, misalnya Budi Utomo (BU), Sarekat Islam dan Perserikatan Nasional Indonesia. Dalam organisasi Budi Utomo yang didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908, anggotanya belajar berdemokrasi dengan mengenalkan dan menyalurkan ide, gagasan dan harapan adanya integrasi nasional. Dalam organisasi ini pulalah muncul benih-benih rasa nasionalisme dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia merdeka (Kartodirdjo, 1975).

Menjelang surutnya BU, muncul organisasi modern yang lebih egaliter, yaitu Sarekat Islam (SI) yang didirikan tahun 1911 di Solo yang berjuang di bidang politik guna menentukan nasib bangsanya sendiri. Gerakan nasionalis makin meningkat tahun 1927 dengan munculnya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang merintis Kongres Pemuda Indonesia ke-II hingga lahirnya Sumpah Pemuda. Dalam forum ini, kaum muda dari berbagai daerah menghilangkan semangat

kedaerahan dan memunculkan rasa nasionalisme dan serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi Indonesia (ibid).

Dinamika ini memperlihatkan bagaimana perkembangan nilai-nilai nasionalisme seiring perkembangan paham demokrasi yang dianut organisasi pemuda menjelang kemerdekaan tahun 1945. Jadi, kaitan demokrasi dan nasionalisme lebih bersifat *simbiosis*, di satu sisi perkembangan demokrasi di Indonesia secara tidak langsung menambah rasa nasionalis anak bangsa. Sementara di sisi lain dengan rasa nasionalisme yang tinggi, makin memudahkan berkembangnya demokrasi yang prinsip dasarnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dinamika yang berkembang di Indonesia setelah merdeka pun memperlihatkan bahwa aliran demokrasi konstitusional yang dianut juga makin memudahkan berkembangnya benih-benih nasionalisme. Hal ini diwujudkan dengan memakai model demokrasi tertentu yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemajuan Negara (ibid).

Demokrasi secara kelembaga sudah dipraktekkan di Indonesia sejak tahun 1945-1950 dengan model Demokrasi Kerakyatan, lalu model Demokrasi Parlementer (1950-1957), model Demokrasi Terpimpin (1960- 1965), model Demokrasi Pancasila (1966-1998) serta model Demokrasi Orde Reformasi (1998-sekarang). Sebagai suatu bagian dari sistem politik, demokrasi sering dipengaruhi oleh partai politik dan pandangan politik presiden yang berkuasa.

Berdasarkan permasalahan ini dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana perkembangan nilai-nilai demokrasi dalam lintasan sejarah Indonesia, tahun 1945 sampai sekarang?, (2). Bagaimana aspek positif dan negatif model demokrasi yang diterapkan di Indonesia mulai masa kemerdekaan hingga sekarang? Pertanyaan ini akan dijawab dalam pembahasan berikut.

II. PERKEMBANGAN DEMOKRASI

2.1 Demokrasi Kerakyatan Pada Masa Revolusi (Tahun 1945-1950)

Periode panjang pergerakan nasional yang didominasi oleh munculnya organisasi modern digantikan periode revolusi nasional. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan merupakan kisah sentral sejarah Indonesia.

Semua usaha untuk mencari identitas, semangat persatuan guna menghadapi kekuasaan kolonial, dan untuk membangun sebuah tatanan sosial yang adil akhirnya membuahkan hasil dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Natsir, 2005).

Sisi negatif dari perkembangan demokrasi pada awal kelahiran negeri ini, bahwa demokrasi sudah menunjukkan tabiatnya yang keliru, jauh dari gotong royong dan menimbulkan konflik. Pada 16 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat X oleh Wapres M. Hatta ketika Presiden Soekarno berada di luar kota. Maklumat tersebut memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di samping membentuk Badan Pekerja untuk menjalankan tugas KNIP sehari-hari. Selanjutnya, pada 3 November 1945 dikeluarkan pula Maklumat Wapres yang mengizinkan dibentuknya partai-partai yang menandai Indonesia sebagai negara dengan sistem multi partai. Pada masa revolusi 1945-1950 banyak kendala yang dihadapi bangsa Indonesia, misalnya perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dengan kekuatan diplomasi, antara kekuatan Islam dalam kekuatan sekuler dan masalah lainnya. Di awal revolusi tidak satu pun perbedaan di antara bangsa Indonesia yang terpecahkan (Mahfud, 1998).

Sedangkan sisi positif demokrasi di era revolusi 1945-1950 ini, adalah aplikasi demokrasi dalam mewujudkan nasionalisme. Semua permasalahan bangsa dapat diselesaikan kelompok-kelompok kekuatan itu duduk satu meja untuk memperoleh satu kata sepakat dan mufakat bahwa tujuan pertama bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Memang, pelaksanaan demokrasi di awal kemerdekaan Indonesia bisa dinilai masih belum berhasil memantapkan nilai-nilai demokrasi. Walaupun demikian, landasan demokrasi ala Indonesia sudah ada, yakni dengan model Demokrasi Kerakyatan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan oleh para pemimpin negara. Nilai demokrasi ini menjadi warna tersendiri walaupun Indonesia pada masa awal kemerdekaan menjadi laboratorium politik (Firmanzah, 2008) dimana nilai demokrasi belum sepenuhnya diterapkan.

2.2 Demokrasi Parleментар (Tahun 1950-1960)

Setelah Indonesia merdeka, kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Warisan yang ditinggalkan pemerintahan kolonial berupa kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan tradisi otoriter merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan para pemimpin nasional Indonesia.

Aspek positif dari perkembangan model Demokrasi Parlementer ini adalah pada periode tahun 1950-an muncul kaum nasionalis perkotaan dari partai sekuler dan partai-partai Islam yang memegang kendali pemerintahan. Ada sesuatu kesepakatan umum bahwa kedua kelompok inilah yang akan menciptakan kehidupan sebuah negara demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta para menteri yang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap kabinet terbentuk berdasarkan koalisi pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Perkembangan ini cukup bagus walaupun di sisi lain koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintahan. Partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu berperan sebagai oposisi konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Susanto, 2003).

Aspek negatif dari aplikasi nilai demokrasi di masa Demokrasi Parlementer ini, umumnya kabinet dalam masa pra pemilu tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan dalam untuk melaksanakan programnya. Pemilu tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah perpecahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak dapat dihindarkan. Faktor-faktor tersebut mendorong presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir (Karim, 1983).

Mengingat kondisi yang harus dihadapi pemerintah Indonesia pada kurun waktu 1950-1959, maka tidak mengherankan bahwa pelaksanaan demokrasi mengalami kegagalan karena dasar untuk dapat membangun demokrasi hampir tidak dapat ditemukan. Mereka yang tahu politik hanya sekelompok kecil masyarakat perkotaan. Para politisi Jakarta, meskipun mencita-citakan sebuah negara demokrasi, kebanyakan adalah kaum elite yang menganggap diri mereka sebagai pengikut suatu budaya kota yang istimewa. Mereka bersikap paternalistik terhadap orang-orang yang kurang beruntung yakni masyarakat pedesaan. Tanggung jawab mereka terhadap struktur demokrasi

parlementer yang merakyat adalah sangat kecil. Bangunan indah sebuah Demokrasi Parlementer hampir tidak dapat berdiri dengan kokoh (ibid).

2.3 Demokrasi Terpimpin (Tahun 1960-1965)

Terjadinya krisis tahun 1957 dan pengalaman jatuh bangunnya pemerintahan, mengakibatkan diambilnya langkah-langkah menuju suatu pemerintahan yang oleh Presiden Soekarno dinamakan model Demokrasi Terpimpin. Aspek negatif dari pelaksanaan demokrasi dengan nama Demokrasi Terpimpin ini, merupakan suatu sistem yang didominasi oleh kepribadian Soekarno yang prakarsa untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin diambil bersama-sama dengan pimpinan ABRI. Pada masa ini pemerintah lebih condong ke haluan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi partai besar pemenang pemilu saat itu.

Terdapat beberapa penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945, misalnya partai-partai politik dikebiri dan Pemilu ditiadakan. Kekuatan-kekuatan politik yang ada berusaha berpaling kepada pribadi Soekarno untuk mendapatkan legitimasi, bimbingan atau perlindungan. Pada tahun 1960, presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPRGR, padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak berwenang membubarkan DPR (Maarif, 1996).

Ciri demokrasi ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik berkembang pengaruh komunisme dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur politik. Dekrit Presiden 5 juli merupakan usaha jalan keluar dari kesamaan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi presiden untuk bertahan selama lima tahun. Akan tetapi MPRS NO.III/1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Soekarno juga membubarkan DPR di tahun 1960, padahal dalam UUD 1945 secara eksplisit bahwa presiden tidak punya wewenang berbuat demikian. DPR berperan sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin *trias politica*. Selain itu di bidang eksekutif misalnya presiden punya wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan UU No.19/1964, dan legislatif berdasarkan peraturan presiden No.14/ 1960, berarti DPR tidak mencapai manfaat (Hisyam, 2003).

Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai demokrasi yaitu

absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan *chek and balance* dari legislatif terhadap eksekutif. Melalui demokrasi terpimpin Soekarno berusaha menjaga keseimbangan politik yang merupakan kompromi antara kepentingan kepentingan yang tidak dapat dirujuk kembali dan memuaskan semua pihak. Meskipun Soekarno memiliki pandangan tentang masa depan bangsanya, tetapi ia tidak mampu merumuskan sehingga bisa diterima oleh pimpinan nasional lainnya. Janji dari demokrasi terpimpin pada akhirnya tidak dapat terealisasi. Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965 telah mengakhiri periode Demokrasi Terpimpin dan membuka peluang bagi dilaksanakannya Demokrasi Pancasila (*ibid*; Alfian, 1992).

Walaupun demikian, ada aspek positif dari pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yakni prinsip dasar demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pemimpin satu kekuasaan sentral yang sepuh, tetus dan mengayomi. Sedangkan pidato Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1959 dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" mengatakan prinsip dasar demokrasi terpimpin adalah tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tiap orang berhak mendapatkan penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu, sebagai pelajaran dalam berdemokrasi. Walaupun dianggap gagal, tetapi di sisi lain Demokrasi Terpimpin berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia (*ibid*; Susastro, 2005).

2.4 Demokrasi Pancasila (Tahun 1966-1998)

Pada tahun 1966 pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru (Orba) bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan Orde Baru hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan menyingkapkan rezim lama. Sisi positif dari aplikasi demokrasi di masa ini adalah upaya Soeharto yang kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali azas negara

hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka mencapai hal tersebut, lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi (Budiardjo, 1996).

Landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan MPRS. Usaha untuk meluruskan kembali penyelenggaraan pada Demokrasi Terpimpin, dengan mengadakan tindakan untuk korektif. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup di batalkan menjadi jabatan efektif lima tahun sekali. ABRI diberi landasan konstitusional. Selain itu pers diberi kebebasan menyampaikan pendapat, dan partai politik bergerak untuk menyusun kekuatan, menjelang pemilu 1979 (*ibid*; Sulastomo, 2008). Selain itu, tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum.

Pada masa Orde Baru ini, muncul istilah Demokrasi Pancasila yang dianggap ideal. Secara umum dapat dijelaskan bahwa watak Demokrasi Pancasila sama dengan demokrasi pada umumnya. Pada Demokrasi Pancasila memandang kedaulatan begitu pula partisipasi politik, perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan politik adalah sama. Namun "Demokrasi Pancasila" dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi, yang ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik dan pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik serta monolitisasi ideologi negara (Fatah, 2000).

Oleh karena itu muncul sisi negatif dari pelaksanaan demokrasi di masa Orde Baru ini yakni nilai demokrasi juga belum ditegaskan dalam Demokrasi Pancasila ala Soeharto atau diistilahkan *demokrasi semu*. Sekitar tiga sampai empat tahun setelah berdirinya Orde Baru menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari cita-citanya semula. Kekuatan-kekuatan sosial-politik yang bebas dan benar-benar memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mampu

nyai komitmen sebagai kontrol sosial. Kekuatan sosial politik yang diikuti-sertakan dalam pemilu dibatasi. Mereka tidak lebih dari suatu perhiasan dan mempunyai arti seremonial untuk dipertontonkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia telah benar-benar berdemokrasi, padahal yang sebenarnya adalah kekuasaan yang otoriter. Partai-partai politik dilarang berperan sebagai oposisi maupun kontrol sosial. Bahkan secara resmi oposisi ditiadakan dengan adanya suatu "konsensus nasional". Pemerintahan Soeharto juga tidak memberikan *check and balances* sebagai prasyarat dari negara demokrasi (Suryawinata, 1998).

Pada masa Orde Baru, budaya feodalistik dan paternalistik tumbuh sangat subur. Kedua sikap ini menganggap pemimpin paling tahu dan paling benar sedangkan rakyat hanya patuh dengan sang pemimpin. Mental paternalistik mengakibatkan Soeharto tidak boleh dikritik. Para menteri selalu minta petunjuk dan pengarahan dari presiden. Sikap mental seperti ini telah melahirkan stratifikasi sosial, pelapisan sosial dan pelapisan budaya yang pada akhirnya memberikan berbagai fasilitas khusus, sedangkan rakyat lapisan bawah tidak mempunyai peranan sama sekali. Berbagai tekanan yang diterima rakyat dan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang tidak pernah tercapai, mengakibatkan pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan dan akhirnya mengalami keruntuhan (*ibid*; Makka, 2008).

3.5 Demokrasi Dalam Orde Reformasi (Tahun 1998-2010)

Melalui gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat Indonesia berjuang menumbangkan rezim Soeharto. Pemerintahan soeharto digantikan pemerintahan transisi Presiden Habibie yang didukung sepenuhnya oleh TNI. Lembaga-lembaga di luar presiden dan TNI tidak mempunyai arti apa-apa. Reformasi menuntut rakyat Indonesia mengoreksi pelaksanaan demokrasi, karena selama Soeharto berkuasa model demokrasi yang dipraktekkan adalah *demokrasi semu*. Orde Baru juga meninggalkan warisan krisis nasional yang meliputi krisis ekonomi, sosial dan politik. Tugas utama pemerintahan Habibie yakni bekerja keras agar harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) terbeli oleh rakyat dan memberantas KKN tanpa pandang bulu. Kemudian mengembalikan hak-hak rakyat guna memperoleh kembali hak-hak azasinya (Eko, 2003).

Aspek positif dari pelaksanaan demokrasi di masa ini adalah pemerintahan "Orde Reformasi" Habibie mencoba mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikembali oleh pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan

Habibie menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan *kebebasan pers* dan *kebebasan berbicara*. Keduanya dapat berfungsi sebagai *check and balances* serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Membangun kembali Indonesia yang demokratis dapat dilakukan melalui sistem keparataian yang sehat dan pemilu yang transparan. Sistem pemilu multipartai dan UU politik yang demokratis menunjukkan kesungguhan pemerintahan Habibie. Asalkan kebebasan demokratis seperti kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan mimbar tetap dijalankan maka munculnya pemerintahan yang KKN dapat dihindari (Hidayat, 2007).

Dalam perkembangannya Demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan Presiden Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat signifikan sekali dampaknya, di mana aspirasi-aspirasi rakyat dapat bebas diutarakan dan disampaikan ke pemerintahan pusat. Hal ini terbukti dari setiap warga negara bebas berpendapat dan kebebasan pers dalam mengawal pemerintahan yang terbuka sehingga menghindarkan pemerintahan dari KKN. Mungkin dalam prakteknya masih ada praktik-praktik KKN di kalangan pemerintahan, namun setidaknya rakyat tidak mudah dibohongi lagi dan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat Indonesia untuk membangun demokrasi lebih baik. Satu hal yang membuat Indonesia dianggap negara demokrasi oleh dunia internasional walaupun negara ini masih jauh dikatakan lebih baik dari negara maju lainnya adalah Pemilihan Langsung Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Tim, 2001; Yuda, 2010).

Runtuhnya Orde Baru membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia yaitu tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi merupakan fase krusial, karena menentukan arah dan tujuan negara. Bisa saja terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan mengantar Indonesia kembali memasuki masa otoriter seperti pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Sukses atau gagalnya transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci yakni komposisi elite politik, desain institusi politik, kultur perubahan sikap terhadap politik dikalangan elit/non elit serta peran *civil society* (masyarakat madani). Keempat faktor itu jalan secara sinergis dan berkelanjutan sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi (Winarno, 2007).

Demokrasi yang baru tumbuh di Indonesia adalah pengolahan yang efektif dibidang ekonomi, selain di bidang pemerintahan. Dengan demikian nilai nilai demokrasi, muncul di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Jika demokrasi yang baru tumbuh dapat mengelola pembangunan ekonomi secara efektif, maka mereka juga dapat menata rumah tangga politik mereka dengan baik. Tapi ketegangan yang secara timbul akibat pertumbuhan ekonomi bisa jadi menggerogoti stabilitas demokrasi dalam jangka panjang. Solusinya, bisa saja dengan memilih desain demokrasi internasional seperti desain struktural dan kultural yang dapat mengantarkan pada demokrasi yang ideal.

III. SIMPULAN

Dari pembahasan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari embrionya hingga masa kemerdekaan dan orde reformasi, dapat disimpulkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih tersendat-sendat. Ada dua aliran demokrasi yang muncul yaitu Demokrasi Konstitusional dan Demokrasi yang berdasarkan Komunisme. Model demokrasi yang diterapkan yaitu Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlansungnya proses trasisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan pada rezim Soeharto dengan Demokrasi Pancasila-nya dan pada masa Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya. Babak baru pelaksanaan demokrasi muncul di era reformasi mulai dari presiden transisi Hibibie tahun 1998, ke pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Memang secara empirik demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia belum dapat terwujud secara ideal. Karena itu demokrasi adalah pekerjaan rumah dan agenda berat bagi pemerintah mulai awal kemerdekaan 1945 hingga saat ini.

Walaupun demikian, dari perkembangan demokrasi ini, paling tidak bisa menggambarkan bagaimana hubungan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai nasionalisme di Indonesia. Demokrasi di Indonesia beberapa dekade terakhir merupakan proses yang kompleks karena melibatkan dua tahap. Pertama, adalah tahap persiapan yang ditandai dengan pergulatan unsur penegak demokrasi dan nasionalisme dibangun dan dikembangkan. Kedua, tahap konsolidasi, dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktek demokrasi dan nilai-nilainya menjadi bagian yang mapan dari budaya politik. Dinamika

demokrasi ini secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam warga negara Indonesia mulai masa embrio, saat ini dan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (ed). 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Sutoro. 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*. Jakarta: APMD Press.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hashemi, N. 2011. *Islam, Sekulerisme dan Demokrasi Liberal*. Jakarta: Gramedia.
- Hidayat, Lalu Misbah. 2007. *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono, et.al. 1975. *Sejarah nasional Indonesia: Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*. Jakarta: Depdikbud.
- Karim, Muhammad Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*. Jakarta: Rajawali.
- Mahfud M.D, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Makka, A. Makmur. 2008. *Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru: 12 Jam Sebelum Presiden Soeharto Mundur*. Jakarta: Republika.
- Natsir, Nanat Fatah. 2005. Demokrasi Pasca Pemilu 2004 di Indonesia. *Jurnal Wacana Indonesia, Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia*, Vol.1, No. I, Mei 2005.

- Soesastro, Hadi (ed) et.al. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sadi, Haliadi. 2003. "Kearifan Dari Spermonde", dalam A. Budi Susanto (ed), *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulastomo. 2008. *Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoir* Jakarta: Kompas.
- Sunawinata. 1998. Sarbini, *Revolusi 1998*, Jakarta: Yayasan Kerakyatan.
- Tim Komnas HAM. 2001. Transitional Justice, Menentukan Kualitas Demokrasi Indonesia di Masa Depan. *Jurnal Dinamika HAM.*, Vol. 2, No. 1, April 2001.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi: Studi Tentang Kombinasi Sistem Presidensial dan Multipartai di Indonesia Era Pemerintahan SBY*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

KONTRIBUSI PENDIDIKAN OLAHRAGA BERBASIS NILAI-NILAI WAWASAN NUSANTARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Ma'ruful Kahri

maruful_kahri@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

1.1 Rasional

Satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya, cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Suatu bangsa yang telah bernegara dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, cita-cita, serta kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan JPOK FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

tersebut. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mampu membangun dalam seluruh aspek kehidupannya, di antaranya adalah nasionalisme, sumber daya manusia dan kedisiplinan. Hal tersebut dapat diapresiasi melalui dunia olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional. Prestasi yang diraih dalam dunia olahraga tersebut, tentu akan mampu membangkitkan kebanggaan dan rasa nasionalisme sebagai suatu bangsa. Olahraga merupakan unsur penting dalam cikal bakal nasionalisme bangsa, karena melalui olahraga segala perbedaan dapat ditepis. Olahraga juga merupakan kegiatan positif sebagai pemersatu bangsa yang menghindari pertentangan sosial dan mempersempit perselisihan. Itu semua dapat dicapai tentunya jika pelaku olahraga menjunjung nilai-nilai positif yang terkandung dalam berolahraga seperti disiplin, pantang menyerah, dan sportivitas dalam bertanding.

Masyarakat pencinta olahraga di Indonesia dalam melakukan kegiatan olahraga, mereka yakin setelah melakukan kegiatan tersebut akan dapat berpengaruh terhadap daya tahan fisik, dan kepribadiannya. Berolahraga hingga sekarang ini sudah cukup untuk memberikan kehidupan yang sehat dan nyaman bila telah melakukannya. Karena otot-otot menjadi kuat, jantung menjadi sehat, tekanan darah menjadi normal, berat badan menjadi seimbang yang kesemuanya ini membuat tubuh menjadi nyaman.

Olahraga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam kehidupan karena memiliki daya tarik untuk mengembangkan berbagai kemampuan, menumbuhkan harapan, memberikan pengalaman yang mengembangkan, meningkatkan kesegaran jasmani dengan mengikuti sertakan sistem otot-otot dan belajar yang dihasilkan dari ikut sertanya dalam kegiatan olahraga. Olahraga apabila dilakukan secara baik dan teratur, maka dapat mendorong, membangkitkan, membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang yang tinggi. Juga ditanamkan sikap mental yang baik, seperti kejujuran, keberanian, semangat juang, sportivitas dan kerjasama antar sesama. Nilai-

nilai positif olahraga tersebut tentu bila diimplementasikan dengan pemahaman wawasan nusantara, akan semakin memperkokoh tali persaudaraan antara sesama anak bangsa, dapat bekerjasama membangun negeri dan menjaganya dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

II. PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia telah mendorong ambuknya pemerintahan Orde Baru, serta meningkatkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat yang mengancam terjadinya disintegrasi teritorial maupun disintegrasi sosial. Sehingga mau tidak mau bangsa Indonesia kini dituntut untuk mengkaji ulang nilai-nilai, paradigma maupun sistem dan strategi yang selama ini telah dibakukan sebagai suatu kebenaran. Keinginan bersama untuk membangun suatu "Indonesia Baru" yang lebih mampu memenuhi aspirasi rakyatnya serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah harus diimbangi dengan upaya membangun rasa kebangsaan, sistem sosial, politik dan ekonomi untuk mengisi kemerdekaan tersebut.

Dalam membangun *national security*, bangsa Indonesia telah mengembangkan tiga doktrin utama yang dapat dikatakan mewarnai budaya strategis Indonesia. Ketiga doktrin ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*), Wawasan Nusantara, dan doktrin Ketahanan Nasional. Ketiga doktrin ini merupakan upaya mengatasi atau mensiasati berbagai kelemahan yang dimiliki. *Sishankamrata* adalah doktrin yang lahir di era revolusi, yang mengharuskan seluruh rakyat Indonesia untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengisi kemerdekaan itu sendiri.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan dituntut untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

wilayah. Pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinnekaannya dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Prof. Dr. Wan Usman mengartikan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara, juga merupakan wujud dari kesatuan bangsa Indonesia dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sifat dan ciri-ciri Wawasan Nusantara disebutkan sebagai "manunggal" dan "utuh menyeluruh" di bidang wilayah, bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, psikologi, dan keseimbangan.

Konsepsi Wawasan Nusantara terdiri dari tiga unsur dasar yang meliputi wadah (*contour* atau organisasi), isi, dan tata laku. *Wadah* kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budayanya. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang hendak diwujudkan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut maka bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Tata laku yang terdiri atas tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, dan tata laku lahiriah yaitu mencerminkan dalam setiap tindakan, perbuatan dan perilaku dari setiap bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan

kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air sehingga menumbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional, termasuk dalam bidang olahraga.

Wawasan Nusantara, mengandung amanat kesatuan baik politik, ekonomi, sosial-budaya dan kesatuan Hankam. Harus dipahami, tanpa ada keempat kesatuan itu tidaklah mungkin diwujudkan persatuan, dan tanpa ada persatuan tidak akan terjadi perbaikan nasib, kualitas hidup maupun kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam mewujudkan keempat kesatuan itu diperlukan tiga hal yang harus tertanam di hati sanubari setiap warga bangsa, yaitu rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Wawasan Nusantara merupakan satu motivasi dasar tentang kesatuan dan persatuan yang menjadi prasyarat agar cita-cita Pancasila terwujud.

Cara pandang dan visi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara NKRI. Karena itu implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Jika dihubungkan antara Wawasan Nusantara dengan olahraga maka sangat berkaitan, yaitu bagaimana nilai-nilai olahraga seperti nilai sportivitas, nilai juang dan berprestasi dalam wadah wawasan nusantara dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

2.2 Implementasi Nilai-Nilai Olahraga dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Manusia hidup pada dasarnya memerlukan olahraga, agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Olahraga yang teratur mampu mengembangkan kondisi tubuh kembali dalam keadaan segar setelah melakukan aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Definisi olahraga menurut Toho Cholik M sebagai berikut: Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan potensi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan

Pancasila. Apabila olahraga dilakukan secara baik dan teratur akan dicapai tingkat kesehatan dan kebugaran jasmani yang tinggi. Juga ditanamkan sikap mental yang baik, seperti kejujuran semangat juang sportivitas dan kerja sama antar sesama.

Santoso dan kawan-kawan mendefinisikan olahraga adalah serangkaian raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka olahraga dibagi menjadi: (1) Olahraga prestasi tekanannya pada bidang prestasi, (2) Olahraga rekreasi tekanannya pada rekreasi, (3) Olahraga kesehatan tekanannya pada pencapaian kesehatan, dan (4) Olahraga pendidikan tekanannya pada tujuan pendidikan.

Intensitas olahraga itu sendiri akan sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan manfaat bagi derajat kesehatan dinamis akan sangat tergantung pada intensitas pelaksanaannya. Aktivitas-aktivitas olahraga dan tujuan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Olahraga pendidikan adalah proses pembinaan menekankan penguasaan keterampilan dan ketangkasan berolahraga nilai-nilai pendidikan melalui pembekalan pengalaman yang lengkap sehingga yang terjadi ialah proses sosialisasi melalui dan ke dalam olahraga.
2. Olahraga kesehatan adalah jenis kegiatan olahraga yang lebih menitikberatkan kepada upaya pencapaian tujuan kesehatan dan fitness yang mencakup ke dalam konsep melalui kegiatan olahraga.
3. Olahraga rekreatif adalah jenis kegiatan olahraga yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat rekreatif atau manfaat dari aspek jasmaniah dan sosial psikologis.
4. Olahraga rehabilitasi adalah jenis kegiatan olahraga atau latihan jasmani yang menakanankan tujuan bersifat terapi atau aspek psikis dan perilaku.
5. Olahraga kompetitif adalah jenis kegiatan olahraga yang menitikberatkan peragaan performa dan pencapaian prestasi maksimal yang lazim dikelola oleh organisasi olahraga.

Wilkerson dan Dodder yang dikutip oleh Harsuki, menjelaskan fungsi dan tujuan olahraga sebagai berikut:

1. Pelepasan emosi, olahraga adalah satu cara untuk menyatakan emosi dan mengendorkan ketegangan.

2. Menunjukkan identitas, olahraga memberikan kesempatan untuk dikenal dan untuk menunjukkan kualitas diri.
3. Kontrol sosial, olahraga memberikan cara untuk mengontrol orang dalam suatu masyarakat bila ada penyimpangan perilaku.
4. Sosialisasi, olahraga berperan sebagai salah satu cara untuk terjadinya kontak sosial sesama penggemar olahraga.
5. Agen perubahan, olahraga menghasilkan perubahan sosial, pula perilaku baru dan menjadi suatu faktor yang mengubah jalan sejarah.
6. Semangat kolektif, olahraga menciptakan semangat kebersamaan yang membuat orang bersatu untuk mencapai tujuan bersama.
7. Sukses, olahraga memberikan perasaan berhasil, baik sebagai pemain maupun sebagai penonton, bila seorang pemain, regu, memperoleh sukses.

Menurut Bennet yang dikutip oleh Harsuki olahraga adalah aktivitas jasmani yang dilembagakan yang peraturannya ditetapkan bukan oleh pelakunya atau secara eksternal dan sebelumnya melakukan aktivitas tersebut yang mencakup, atletik, *games*, permainan, senam, dan aktivitas-aktivitas perorangan. Jadi yang dimaksud olahraga adalah aktivitas fisik yang teratur berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan potensi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Dalam kaitannya implementasi Wawasan Nusantara dengan nilai-nilai olahraga dalam mempertahankan keutuhan NKRI, dapat dipaparkan analisis sebagai berikut:

1) Olahraga dan Masyarakat

Olahraga merupakan bagian yang tersebar dalam kehidupan sosial. Olahraga berhubungan dengan kehidupan keluarga, pendidikan, politik, ekonomi dan agama. *Sport is a microcosm of society*, olahraga merupakan dunia kecil suatu masyarakat, bahkan lebih dari sekedar cerminan masyarakat. Kehidupan suatu masyarakat dapat dikenali dari bagaimana olahraga dikelola, jenis-jenis permainan yang dimainkan, perlakuan terhadap yang menang dan yang kalah,

dan penegakkan peraturan. Sebaliknya, olahraga pada suatu masyarakat dapat dilihat dari nilai-nilai yang dianut, sistem ekonomi, perlakuan terhadap kelompok minoritas dan struktur politik masyarakat tersebut. Seperti institusi sosial lainnya, olahraga juga memiliki beberapa fungsi sosial dalam masyarakat, yaitu: a) Pelepasan emosional, dengan cara yang dapat diterima secara sosial, b) Penegasan identitas, yaitu mengembangkan identitas diri, c) Kontrol sosial, yaitu membangun keselarasan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat di prediksi, d) Sosialisasi, membentuk nilai-nilai bersama dan perilaku yang dapat diterima, e) Agen perubahan, melalui interaksi sosial, asimilasi dan mobilitas, f) Kesadaran kolektif, menegakkan pola perilaku yang tepat, g) Kesuksesan, cara meraih sukses melalui partisipasi maupun menyaksikan.

2) Kekuatan Olahraga

Olahraga dan pendidikan jasmani memainkan peranan yang penting pada tingkat individu, masyarakat, nasional maupun global. Bagi individu, olahraga meningkatkan kemampuan personal, kesehatan dan pengetahuan-diri seseorang. Pada tingkat nasional, olahraga dan pendidikan jasmani memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan sosial, meningkatkan kesehatan masyarakat dan menyatukan komunitas yang berbeda-beda. Pada tingkat global, jika dilakukan dengan konsisten, olahraga dan pendidikan jasmani dapat memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap pembangunan, kesehatan masyarakat, perdamaian dan lingkungan hidup. Akses ke dan partisipasi dalam olahraga dan pendidikan jasmani memberikan kesempatan untuk merasakan inklusi sosial dan moral bagi penduduk yang termarginalisasi oleh hambatan sosial, kultural maupun sistem kepercayaan yang disebabkan oleh gender, cacat atau bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Olahraga dan pendidikan jasmani dapat melambangkan sebuah area untuk mengalami kesetaraan, kebebasan dan sarana pemberdayaan. Kebebasan dan kontrol atas tubuh sendiri yang dialami dalam melakukan olahraga sangat bernilai terutama bagi perempuan remaja dan dewasa, penyandang cacat, penduduk yang tinggal di wilayah konflik dan penduduk yang sedang dalam pemulihan dari trauma.

3) Olahraga dan Pembangunan

Pembangunan yang efektif harus berkesinambungan dan berpusat pada manusia. Pembangunan yang berkesinambungan mensyaratkan bahwa kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa kompromi harus memenuhi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan pembangunan manusia mensyaratkan bahwa pilihan-pilihan manusia semakin luas, memberikan seluruh anggota masyarakat peluang yang semakin luas dan kondisi-kondisi untuk hidup lama dan kehidupan yang sejahtera. Program-program olahraga yang terancang baik dapat membantu memenuhi tujuan-pembangunan manusia yang berkesinambungan, dengan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial, dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Olahraga merupakan katalisator dalam pembangunan ekonomi. Termasuk dalam sektor olahraga adalah pabrik peralatan olahraga, pembangunan infrastruktur dan event olahraga, penonton, sponsor dan media massa. Unsur-unsur ekonomi olahraga tersebut saling berhubungan, baik dalam memberikan kontribusi maupun mengambil manfaat dari pembangunan olahraga. Pembangunan melalui olahraga memperoleh manfaat terutama dari kemitraan integral melalui pendekatan olahraga untuk pembangunan yang melibatkan semua sektor dalam pembangunan masyarakat termasuk pemerintah, organisasi olahraga, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah dan dunia olahraga harus terlibat lebih dalam pada kegiatan pembangunan berbasis olahraga untuk memastikan bahwa elemen masyarakat sipil menjadi kekuatan yang aktif dan komitmen dalam kemitraan global untuk pembangunan.

2.3 Rencana Aksi dalam Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian

Olahraga memiliki kekuatan pada dimensinya yang beragam dan daya tarik yang luas untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan perdamaian. Rencana Aksi merupakan strategi untuk lebih mengintegrasikan olahraga kedalam agenda pembangunan; menggabungkan olahraga dalam program-program kesehatan, pendidikan, pembangunan dan perdamaian; memanfaatkan olahraga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi dalam olahraga telah diakui sebagai hak asasi manusia, dan "olahraga untuk semua" harus menjadi dasar bagi pemanfaatan

yang sistematis dalam olahraga untuk pembangunan dan perdamaian. Para *stakeholder* dituntut untuk menetapkan hubungan yang jelas antara kesempatan untuk berpartisipasi dalam olahraga dan pencapaian tujuan pembangunan dan tujuan yang lebih luas dalam pembangunan berkesinambungan dan perdamaian. Para *stakeholder* juga dituntut untuk menjawab tantangan-tantangan untuk mengintegrasikan olahraga untuk pembangunan dan perdamaian dalam agenda pembangunan pada semua tingkatan.

1) Kerangka kerja bersama bagi olahraga untuk pembangunan dan perdamaian

Tantangan: Tujuan pembangunan yang disepakati bersama memberikan agenda bersama bagi para *stakeholder* untuk bekerja bersama dan memberikan kontribusi menuju kerangka kerja yang lebih maju.

Aksi: Meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk menciptakan visi bersama mengenai peran olahraga dalam rangka pembangunan dan perdamaian, membentuk jaringan kerja keilmuan, menetapkan prioritas dan selanjutnya meningkatkan kesadaran. Membangun dan mempromosikan inisiatif olahraga untuk pembangunan dan perdamaian yang patut dicontoh dimana pengarusutamaan dan replikasi akan memberikan manfaat yang paling besar bagi pencapaian tujuan pembangunan.

2) Pengembangan kebijakan

Tantangan: Strategi olahraga untuk pembangunan dan perdamaian perlu dimasukkan secara eksplisit dalam rencana dan kebijakan pembangunan nasional dan sebaliknya, dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara seluruh *stakeholder*.

Aksi: Mempromosikan dan mendukung integrasi dan pengarusutamaan yang sistematis mengenai olahraga untuk pembangunan dan perdamaian sebagai instrumen dalam rencana dan kebijakan pembangunan.

Mempromosikan prinsip "olahraga untuk semua" dan mengembangkan kebijakan olahraga yang inklusif. Memperkuat dan berinvestasi pada olahraga dan pendidikan jasmani dan mengintegrasikan olahraga, aktivitas fisik dan bermain dalam kebijakan kesehatan publik dan kebijakan-kebijakan lain yang relevan.

3) Mobilisasi sumber daya

Tantangan: Untuk meningkatkan inisiatif olahraga untuk pembangunan dan perdamaian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan membutuhkan mobilisasi sumber daya dan kemitraan yang kreatif.

Aksi: Meningkatkan koordinasi untuk mempromosikan mekanisme pendanaan yang inovatif dan rencana para *stakeholder* pada semua tingkatan, termasuk keterlibatan organisasi olahraga, masyarakat sipil, para atlet dan sektor swasta.

4) Tantangan dan Aksi

Tantangan: Pengarusutamaan olahraga untuk pembangunan dan perdamaian dalam program dan kebijakan nasional membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang komprehensif.

Aksi: Mengembangkan dan mempromosikan perangkat evaluasi dan pengawasan bersama, indikator dan tanda berdasarkan standar yang disepakati bersama.

Untuk memaksimalkan pengaruh positif olahraga, maka:

- a) Pemerintah didorong untuk: mengimplementasikan prinsip “olahraga untuk semua” melalui legislasi dan kebijakan yang inklusif dan koheren, termasuk langkah-langkah untuk mempromosikan partisipasi orang-orang dengan keterbatasan; melibatkan seluruh *stakeholder* dalam koordinasi dan implementasi; membentuk sektor olahraga yang dapat terus berjalan dikelola oleh profesional dan ahli yang terlatih dalam olahraga untuk pembangunan dan perdamaian; memperkuat dan berinvestasi dalam olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah dan sistem pendidikan; menciptakan sistem pendukung yang efektif untuk program pencegahan pengaruh negatif dalam olahraga; dan mengintegrasikan olahraga, aktivitas fisik dan bermain dalam kebijakan kesehatan publik dan kebijakan lain yang relevan sebagai prioritas nasional.
- b) Pemerintah didorong untuk menginvestasikan pembangunan olahraga dan infrastruktur, termasuk institusi olahraga dasar, area bermain, relawan yang terampil dan persediaan dana untuk membantu para inisiatif lokal.

- c) Pemerintah dan organisasi nasional didorong untuk mendukung atlet-atlet muda berbakat agar menyadari potensi mereka dan melindungi mereka dari eksploitasi. Atlet-atlet yang bertanding di tingkat internasional dapat membantu memperkuat persatuan nasional, mempromosikan dialog lintas budaya, memberi inspirasi pada generasi yang lebih muda agar bisa melampaui dan menciptakan rasa kebanggaan nasional.
- d) Pemerintah didorong agar terlibat dalam inisiatif dan kemitraan internasional untuk memajukan olahraga untuk pembangunan dan perdamaian.
- e) Pemerintah didorong agar memulai program olahraga untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwei tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

Olahraga merupakan sarana yang sangat bernilai dalam upaya memperkuat persatuan dan solidaritas nasional antar wilayah dan kelompok masyarakat. Olahraga juga dapat memberikan kontribusi dalam membina perdamaian dan pencegahan konflik. Peran vital kemitraan dengan organisasi olahraga, sektor swasta dan organisasi lain dapat dilaksanakan agar manfaat olahraga sebagai alat pembangunan dan perdamaian menjadi lebih baik.

3.2 Saran

Pertama, Wawasan Nusantara harus menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan NKRI.

Kedua, Wawasan Nusantara perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam upaya menghadapi berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Ketiga, semua warga negara Indonesia pecinta olahraga khususnya atlet olahraga diharuskan kembali pada falsafah nasionalisme olahraga. Hal ini dimaksudkan agar semangat heroik, juang, sportivitas, kegigihan dan rela berkorban adalah demi kemajuan bangsa serta negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng, Abdulkadir. 1992. *Azas-azas dan Landasan Pendidikan Jasmani*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- Giriwiry, Santoso. 2000. *Pembinaan Kesehatan melalui Olahraga Kesehatan*. Jakarta: Satria Nusantara.
- Harsuki. 2003. *Perkembangan Olahraga Terkini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan. 2000. *Ilmu Keolahragaan dan Rencana Pengembangannya*. Jakarta: Dekdiknas.
- Santoso, dkk. 2005. *Motivasi dan Olahraga*. Bandung: ITB.
- S. Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Toho Cholik M. 2002. *Gagasan-Gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: UNESA Press.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Melisa Prawitasari
melisa.prawita@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia adalah negara multikultural dengan beragam suku, agama, adat istiadat, tradisi, dan ras. Keberagaman tersebut merupakan keunikan atau kekayaan kita sebagai bangsa, namun sekaligus dapat menjadi ancaman bagi kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut dapat menimbulkan gesekan sehingga mudah terjadi konflik. Upaya meminimalisir bahkan menghilangkan konflik dalam masyarakat multikultural di Indonesia sebenarnya bisa dilakukan apabila Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Kata Kunci: Pancasila, masyarakat, dan multikultural.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah dirumuskan oleh para pendiri Negara Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada Bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara, pandangan hidup Bangsa, ideologi negara, dan sebagai kepribadian bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dalam hal suku bangsa, ras/etnis, adat-istiadat, bahasa hingga agama yang memang sangat rawan terhadap konflik. Untuk itu pelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Perkembangan dan Perumusan Pancasila

Terminologi Pancasila bukan menjadi kata yang asing bagi bangsa Indonesia, walaupun Pancasila baru diresmikan menjadi ideologi negara pada 18 Agustus 1945. Menurut Darmodihardjo (1982: 11) perkembangan Pancasila pada dasarnya dibagi menjadi dua tahap. Pertama, tahap perkembangan sebagai

nilai yang mampu menggerakkan perjuangan bangsa dari zaman ke zaman. Hal ini sekaligus mewarnai sikap bangsa dalam berbagai bentuk dan ragam realisasinya. Dalam perkembangan ini Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua perkembangan Pancasila setelah memiliki sikap formal, yaitu semenjak disahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti asas (Abdullah, 1993: 1). Istilah ini sudah dikenal sejak dahulu dan dijadikan sebagai acuan moral atau etika dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Pada awalnya istilah ini dikemukakan oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Istilah ini kemudian juga dipakai Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Dalam kitab ini terdapat istilah *Pancasila Krama* yang mempunyai arti Lima Dasar Tingkah Laku atau Perintah Dasar Kesusilaan yang Lima, meliputi:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan (*ahimsa*)
2. Tidak boleh mencuri (*asteya*)
3. Tidak boleh berjiwa dengki (*indriya nigraha*)
4. Tidak boleh berbohong (*armswanda*)
5. Tidak boleh mabuk minum minuman keras (*dama*)

Selain itu, dalam kitab ini juga terdapat semboyan *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua* yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bantu atau sifatnya namun pada hakikatnya satu juga, yang kemudian menjadi motto lambang negara Indonesia (Soekarno, 2005; Marsudi, 2001). Inilah yang menjadi latar belakang pernyataan presiden Soekarno bahwa dia bukan pencipta Pancasila melainkan hanya menggali mutiara-mutiara sila tersebut dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Banyak para ahli hukum dan kewarganegaraan yang menyetujui pernyataan di atas, beberapa di antaranya adalah Subandi Al-Marsudi (2001: 1-2) yang menyatakan bahwa sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kehidupan manusia yang mendiami Bumi Nusantara masa itu telah menunjukkan ciri-ciri, sikap, dan tingkah laku yang mencerminkan penjiwaan atas sila-sila Pancasila, seperti adanya kepercayaan manusia terhadap kekuatan gaib baik berupa pemujaan roh-roh halus yang bercirikan animisme dan dinamisme, maupun kehidupan manusia Indonesia yang penuh toleransi dan

suasana damai, tolong-menolong/gotong royong, bermusyawarah demi terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan yang diungkapkan dengan istilah *gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertarahardjo* atau yang kini populer dengan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal senada juga dinyatakan oleh Soekarno (2005: 1) bahwa melalui pendekatan historis sesungguhnya Pancasila dan unsur-unsurnya diamalkan sebagai asas-asas didalam adat-istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan/agama bangsa Indonesia. Abdullah (1993: 1) juga mengakui bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai yang digali dari kebudayaan Indonesia.

Kehadiran Pancasila dalam dunia modern tidak terlepas dari peran Soekarno yang diangkat dalam pidato 1 Juni 1945 dihadapan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) yang dirasa dapat membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat Indonesia merdeka. Kahin (1995:155) melihat bahwa gagasan yang diutarakan Soekarno dalam pidato ini menyajikan filsafat sosial yang matang dari para pemimpin nasionalis Indonesia yang paling berpengaruh. Gagasan ini juga sangat berarti dalam mempengaruhi jalan pemikiran sosial orang Indonesia selama perjuangan revolusioner yang segera mulai, suatu pengaruh yang sampai sekarang masih punya arti sangat penting.

BPUPKI didirikan sebagai realisasi janji politik pemerintahan Jepang dan sekaligus memberi jawaban atas pertanyaan tentang dasar negara Indonesia. Badan ini didirikan pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh KRT.Radjiman Widyodiningrat dengan anggota 60 orang. BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama (29 Mei–1 Juni 1945). Dalam sidang ini pidato usulan dasar negara disampaikan oleh tiga orang. Pertama oleh M. Yamin pada 29 Mei 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yaitu;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada hari kedua persidangan yaitu tanggal 30 Mei 1945 pembicara datang dari kelompok Islam yang terdiri dari Ki Bagoes Hadikoesoemo dan KH.

Wachid Hasyim yang mengusulkan dasar negara Islam, namun tanpa menyampaikan suatu perumusan.

Pada hari ketiga 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan pandangan mengenai dasar negara kebangsaan yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik, yaitu jika hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan dan corak masyarakat Indonesia maka harus membentuk negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam bidang apapun. Soepomo juga mengemukakan pendapatnya tentang hubungan negara dan agama, ia membedakan antara negara Islam dengan negara yang berdasar atas cita-cita luhur agama Islam. Ia menyatakan bahwa mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan, tetapi berarti mendirikan negara yang akan mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar yaitu golongan Islam. Dalam kaitan ini tidak dijumpai adanya perumusan dasar negara oleh Soepomo, kecuali dalam buku karangan Nugroho Notosusanto yang mengutip dari buku karangan Moh. Yamin. Terdapat lima rumusan dasar negara usulan Soepomo sebagai berikut :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Pada hari keempat, 31 Mei 1945, Soekarno menyampaikan susunan dasar negara yang diberi nama Pancasila yaitu terdiri dari:

1. Kebangsaan-nasionalisme
2. Perikemanusiaan-internasionalisme
3. Mufakat-demokrasi
4. Keadilan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Soekarno kelima sila ini dapat diringkas menjadi Tri sila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Bila disederhanakan lagi menjadi Eka Sila yaitu gotong royong (Soekarno, 2005; Marsudi, 2001).

Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan 10-16 Juli 1945, dalam sidang ini sangat dipengaruhi oleh tiga ideologi yaitu ideologi kebangsaan, ideologi Islam dan ideologi barat modern sekuler. Ideologi kebangsaan tampak dalam pandangan-pandangan yang mempertahankan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan kelompok Islam tetap berkehendak agar agama Islam menjadi dasar negara. Kelompok ideologi barat modern sekuler menghendaki adanya pemisahan urusan negara dan urusan agama (Soekarno, 2005: 42). Untuk mengatasi permasalahan ini maka dibentuklah Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.a. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, KH. Wachid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Haji Agus Salim yang menghasilkan "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, berisi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Namun, rancangan ini diubah dengan pertimbangan adanya keberatan pihak lain yang tidak beragama Islam, tidak tepat dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa Indonesia ditetapkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja dari rakyat Indonesia, dan untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia (Soekarno, 2005: 56). Akhirnya tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara dengan menghilangkan tujuh kalimat dibelakang sila pertama.

2.2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi berasal dari bahasa Yunani *idein*, yang berarti melihat atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan dan buah pikiran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Dalam arti praktis ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Penerapan ideologi dalam kehidupan

kenegaraan disebut politik. Sedangkan dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara (Marsudi, 2001: 58).

Setiap bangsa pasti memiliki ideologi nasional yang mencerminkan kepribadian para pendukungnya. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena ia merupakan konsensus yang disepakati oleh mayoritas warga negara Indonesia melalui perwakilan mereka dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada 1945. Selain itu Pancasila juga merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai ideologi yang telah disepakati maka Pancasila selalu diperjuangkan agar tetap bertahan dan memiliki arti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Alfian (dalam Marsudi, 2001) kekuatan ideologi tergantung pada tiga kualitas yang ada pada ideologi itu sendiri yaitu;

1. Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung didalam ideologi tersebut secara riil berakar dalam dan atau hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
2. Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya.
3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Dalam perjalanan sejarah sejak disahkan pada 18 Agustus 1945 Pancasila telah melalui berbagai tantangan politik dan berhasil membuktikan diri sebagai ideologi yang kuat. Kemampuan ini tidak terlepas dari tiga kualitas ideologi tersebut di atas.

Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang dan karena itu sifatnya harus terbuka

dan fleksibel sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini bukan berarti bahwa nilai-nilai dasarnya yang berubah tetapi nilai-nilai tersebut dikembangkan dan dihayati sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dibedakan menjadi tiga yaitu;

1. Nilai dasar, ialah nilai yang bersifat sangat abstrak, umum, terikat waktu dan tempat dengan kandungan kebenarannya seperti suatu aksioma. Nilai dasar ditetapkan oleh para pendiri negara, dan pada dasarnya nilai tidak akan berubah sepanjang jaman. Hal itu bisa tercapai justru oleh karena sifatnya yang amat abstrak, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu atau tempat.
2. Nilai instrumental, ialah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk waktu dan kondisi tertentu. Sifat ini lebih kontekstual, dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai-nilai dasar.
3. Nilai praksis, ialah interaksi antar nilai instrumental dengan situasi pada tempat dan situasi tertentu. Nilai praksis merupakan arena pertarungan antara idealisme dengan realitas (Marsudi, 2001:75-67).

2.3 Relevansi Pancasila dalam Menghadapi Permasalahan Masyarakat Multikultural di Indonesia

Masyarakat multikultural menurut C.W. Watson (1998) dalam bukunya *Multiculturalism*, membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Pada hakikatnya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya (*culture*) yang berbeda-beda. Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial dan politiknya. Oleh karena

itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut.

Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.

Keragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia adalah letak kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki nilai tambah di mata dunia. Namun, di sisi lain realitas keanekaragaman Indonesia berpotensi besar menimbulkan konflik sosial berbau SARA (suku, agama, ras, dan adat). Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keragaman suku bangsa diperlukan guna mencegah terjadinya perpecahan yang mengganggu kesatuan bangsa. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat, seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Pada masa perjuangan kemerdekaan Pancasila dirumuskan dalam rangka mengakomodir keanekaragaman yang ada untuk membentuk negara kesatuan.

Berikut permasalahan faktual yang sering terjadi pada masyarakat multikultural di Indonesia akibat terpinggirkannya nilai-nilai Pancasila dari diri masyarakat tersebut:

- Adanya isu & konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan): desentralisasi dan otonomi daerah mendorong penguatan sentimen kederahan sehingga muncul *local nasionalism*, ego kedaerahan dan primordialisme sempit, hal ini sebagai indikasi menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, & paham negara. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok dan antar daerah terjadi di mana-mana. Seperti munculnya gerakan separatis di sejumlah daerah, seperti GAM, RMS, OPM, kerusuhan di Ambon, Maluku, dan lain-lain.

- Pelanggaran HAM
- Terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) : Adanya tindak pidana korupsi disebabkan karena lemahnya moral individu, di samping itu lemahnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional. Praktik penegakan hukum dan peradilan yang timpang dengan rasa keadilan masyarakat sebagai wujud terkikisnya nilai Pancasila yang berperan sebagai modal sosial bangsa. Contohnya vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak ditingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus kecil seperti pencurian ayam, bahkan sering kali korban penganiayaan yang dihakimi oleh massa. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan sebagai salah satu nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
- Pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas yang semakin meningkat.
- Semakin derasnya arus globalisasi yang menggerus nilai jati diri dan identitas nasional. Masyarakat menjadi individualistik, mudah terbius dengan kenikmatan hedonisme, serta mudahnya terpengaruh oleh paham-paham baru dari barat seperti liberalisme, kapitalisme, hingga munculnya terorisme.

Dari berbagai permasalahan di atas sebenarnya Pancasila mampu menjadi filter terhadap hal-hal faktual tersebut, berikut penjelasannya:

- Pancasila dan Permasalahan SARA: Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai

keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan "Persatuan Indonesia". Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang penghormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para *founding fathers* negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain.

- Pancasila dan Permasalahan HAM: hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia. Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat dilacak dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih rinci dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah

hak-hak warga negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden. Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia. Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal. Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain: (1) Hak untuk hidup, (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan, (3) Keturunan, (4) Hak mengembangkan diri, (5) Hak keadilan, (6) Hak kemerdekaan, (7) Hak atas kebebasan informasi, (8) Hak keamanan, (9) Hak kesejahteraan, (10) Kewajiban menghormati hak orang lain, (11) dan kewajiban membela negara, (12) Hak perlindungan dan pemajuan.

- Pancasila dan Krisis Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karena terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antar golongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor tidak hanya ekonomi. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain yang juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh para penyelenggara negara. Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta konstitusi UUD 1945, dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila antara lain: mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi, Mencerminkan hakikat kemusiaan, yang memiliki unsur jiwa-raga, sebagai makhluk individu-sosial, sebagai makhluk Tuhan-pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan,

kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu. Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945, pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa (1) Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (3) Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh; (4) Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. SIMPULAN

Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata gesekan/konflik sebagai bagian dari multikulturisme tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan. Masyarakat yang mendiami setiap pulau memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Banyaknya etnis suku bangsa di Indonesia karena itu merupakan hal wajar. Menerima kenyataan perbedaan inilah yang perlu dipahami bersama. Karena itu, usaha memerlakukan dan membentuk keseragaman bukanlah hal yang dapat dibenarkan.

Semua perbedaan haruslah diikat oleh kesatuan sebagai bangsa yang satu bangsa Indonesia. Diperlukan adanya pengimplementasian yang nyata dari nilai-nilai pancasila serta semangat *Bhineka Tunggal Ika* yang sering dimaknai sebagai 'berbeda-beda tetapi tetap satu juga' untuk memberi ruang semua perbedaan itu serta menghilangkan konflik/gesekan dari adanya keberagaman tersebut serta kesadaran untuk satu sebagai bangsa Indonesia tetap menjadi muara segala perbedaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R.1993. *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darmodiharjo, D. 1982. *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*. Jakarta: Aries Lima.
- Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma: Yogyakarta.
- Kahin, G Mc.1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo: UNS Press
- Marsudi, S. A. 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Hum., Rukiyati, dkk. 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Saksono, Ign Gatut. 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Cipta Media Jaya.
- Soekarno, B. 2005. *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*. Solo: UNS Press.
- <http://akhmadardiansyahyunus.blogspot.co.id/2012/10/multikultural-indonesia.html> (diakses pada tanggal 10 September 2016).

IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN DAN KEBANGSAAN MELALUI *SOCIAL SKILL* MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS FKIP UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Melly Agustina Permatasari

mellyap@unlam.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi nilai pendidikan dan kebangsaan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS angkatan 2014 yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan IPS dan Pendidikan Karakter dan mata kuliah Keterampilan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai pendidikan melalui keterampilan sosial, seperti: nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat melalui keterampilan dasar berinteraksi, keterampilan komunikasi, keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), keterampilan menyelesaikan masalah, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi atau menerima kritik, dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Nilai kebangsaan diimplementasikan dalam keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), keterampilan menyelesaikan masalah, menjalin hubungan dengan orang lain.

Kata kunci: nilai pendidikan, kebangsaan, *social skill*.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik, demi terciptanya manusia sempurna yang berkarakter atau manusia yang insan kamil (Wibowo, 2012: 18). Saat ini pendidikan nasional berupaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang bukan hanya produktif melainkan juga berperilaku baik. Sehingga manusia tidak hanya dibekali dengan kemampuan dalam menguasai bidang-bidang keahlian dan keterampilan dalam IPTEK tetapi juga dibekali dengan berbagai nilai dan sikap sebagai panduan bagi perilakunya. Berbagai tata nilai yang menjadi pedoman bagi kelakuan manusia tersebut bersumber dari pendidikan karakter. Hal ini menunjukkan pentingnya penanaman nilai melalui pendidikan.

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya dapat dilihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, menghormati orang lain peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab dan sebagainya. Pendidikan karakter ini akan mengatur berbagai perilaku manusia dalam berbagai bidang kehidupan sosial manusia yang berpengaruh pada sikap mental setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa. Tenaga pendidik perguruan tinggi secara profesional memiliki fungsi sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih sehingga dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Hal tersebut menjadi pintu masuk bagi pendidikan karakter untuk dapat diimplemetasikan di tingkat perguruan tinggi (Hasanah, 2013: 187).

Ada banyak cara dan bahan yang dapat dikreasikan untuk mendidik, memupuk dan mengembangkan, serta membentuk nilai karakter pada diri mahasiswa. Nilai pendidikan karakter dapat diberikan secara terintegrasi (termuat) dalam mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum, yaitu mata kuliah keterampilan sosial. Melalui keterampilan sosial dapat dilihat bagaimana

mahasiswa mengimplementasikan nilai melalui berbagai keterampilan sosial (*Social Skill*).

Mahasiswa seharusnya mampu mengimplementasikan nilai pendidikan melalui keterampilan sosial, seperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab yang diimplementasikan dalam keterampilan keterampilan dasar berinteraksi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), keterampilan menyelesaikan masalah, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi atau menerima kritik, dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi nilai pendidikan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi nilai pendidikan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa mengenai nilai pendidikan dan keterampilan sosial, serta cara mengimplementasi nilai pendidikan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Bagi dosen diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa melalui *social skill* mahasiswa sehingga dosen dapat membantu mahasiswa dalam mendidik, memupuk dan mengembangkan, serta membentuk nilai dan *social skill* pada diri mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nilai Pendidikan dan Kebangsaan

Fakry Gaffar dalam Kesuma, dkk (2011: 5) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan “sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu”. Definisi tersebut memuat tiga ide pikiran penting yaitu: (1) proses transformasi nilai-nilai, (2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan (3) menjadi satu dalam perilaku.

Likchona (1992) dalam Elmubarok (2009: 110) menekankan pentingnya karakter yang baik yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral.

Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Individu yang berkarakter baik dan tangguh adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasi. Sehingga pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun lebih dari itu, yakni bagaimana dapat membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, mempunyai *skill* yang mumpuni, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Hasanah, 2013: 187-188).

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional. Seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Ke-18 nilai dalam pendidikan karakter yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat atau Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung Jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

Nilai semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

2.2 Keterampilan Sosial (*Sosial Skill*)

Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelompok. Tim *Broad-Based Education* menafsirkan keterampilan sosial sebagai keterampilan berkomunikasi dengan empati dan keterampilan bekerja sama. Dalam berkomunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya ada keinginan yang menimbulkan kesan baik untuk menumbuhkan keharmonisan maupun kesinambungan hubungan, serta solusi terhadap suatu permasalahan. Jarolimek mengemukakan bahwa keterampilan sosial meliputi: (1) *Living and working together; taking turns; respecting the rights of other; being socially sensitive* (2) *Learning self-control and self-direction*, dan (3) *Sharing ideas and experience with others*. (Hidup dan bekerja sama, bergiliran, respek dan sensitif terhadap hak orang lain, belajar mengontrol diri dan tahu diri, berbagai ide dan pengalaman dengan orang lain) (Maryani, 2011: 18-19).

Keterampilan-keterampilan sosial meliputi: (1) Kemampuan berkomunikasi, (2) Menjalin hubungan dengan orang lain, (3) Menghargai diri sendiri dan orang lain, (4) Mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, (5) Memberi atau menerima umpan balik (*feedback*), (6) Memberi atau menerima kritik, dan (7) Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku (Thalib, 2010).

Keterampilan sosial dikelompokkan atas empat bagian, sebagai berikut:

- 1) Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal dan menjalin hubungan akrab, ada kontak mata, berbagi informasi;
- 2) Keterampilan komunikasi: mengemukakan pendapat, mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara (tidak membentak), meyakinkan orang untuk dapat mengemukakan pendapat;
- 3) Keterampilan membangun kelompok (bekerja sama): mengakomodasi pendapat orang, bekerja sama, saling menolong, saling memperhatikan, saling menghargai;

- 4) Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, memikirkan orang lain, empati (Maryani, 2011: 20).

Keterampilan sosial dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu: (1) Keterampilan dasar berinteraksi, (2) Keterampilan berkomunikasi, (3) Keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), (4) Keterampilan menyelesaikan masalah, (5) Menjalin hubungan dengan orang lain, (6) Menghargai diri sendiri dan orang lain, (7) Memberi atau menerima kritik, dan (8) Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Di mana dalam penelitian ini akan digambarkan implementasi nilai pendidikan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat dengan membuat kualifikasi dan persentase.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa program studi Pendidikan IPS Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Sedangkan sampel penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS angkatan 2014 yang sudah menempuh mata kuliah Pendidikan IPS dan Pendidikan Karakter dan mata kuliah Keterampilan Sosial.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi nilai pendidikan dan kebangsaan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase.

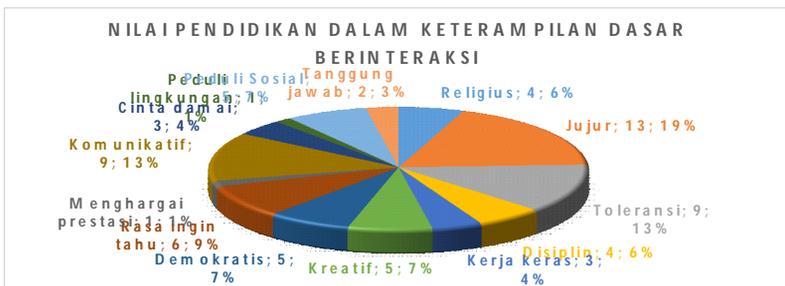
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi nilai pendidikan melalui *social skill*

Implementasi nilai pendidikan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS. Beberapa nilai pendidikan yang dapat dibangun melalui keterampilan sosial (*social skill*), sebagai berikut :

4.1.1 Keterampilan Dasar Berinteraksi

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam keterampilan dasar berinteraksi yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

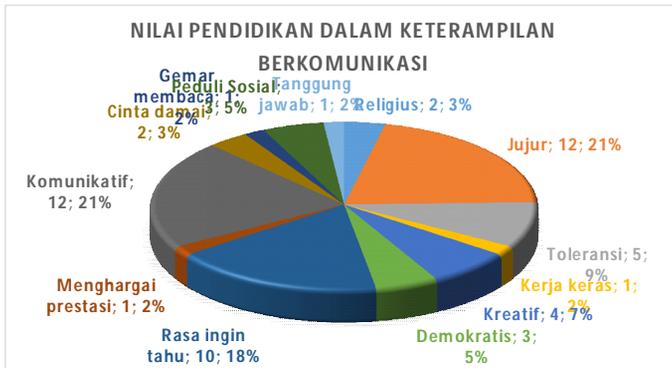


Gambar 1. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Keterampilan Dasar Berinteraksi

Beberapa nilai pendidikan dalam keterampilan dasar berinteraksi tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat berinteraksi dengan orang lain; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.2 Keterampilan Berkomunikasi

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam keterampilan berkomunikasi yaitu religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab.

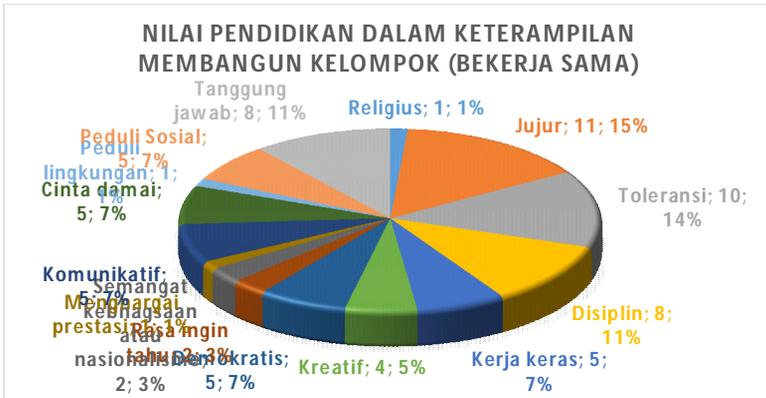


Gambar 2. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Keterampilan Berkomunikasi.

Beberapa nilai pendidikan dalam keterampilan berkomunikasi tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat berkomunikasi dengan orang lain; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, gemar membaca buku tentang komunikasi efektif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.3 Keterampilan Membangun Kelompok (Bekerja Sama)

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam keterampilan membangun kelompok (kerja sama) yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

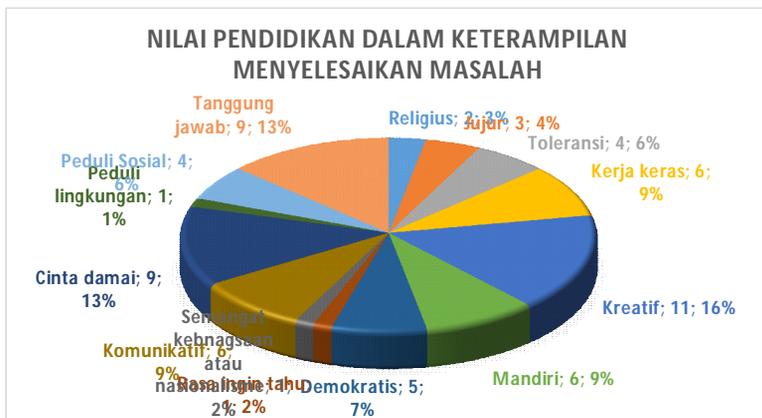


Gambar 3. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Keterampilan Membangun Kelompok (Kerja Sama).

Beberapa nilai pendidikan dalam keterampilan membangun kelompok (kerja sama) tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat membangun kelompok (kerja sama) dengan orang lain; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, menghargai prestasi orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.4 Keterampilan Menyelesaikan Masalah

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam keterampilan menyelesaikan masalah yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.



Gambar 4. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Keterampilan Menyelesaikan Masalah

Beberapa nilai pendidikan dalam keterampilan menyelesaikan masalah tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat menyelesaikan masalah baik masalah pribadi, masalah dengan orang lain, masalah sosial, dan sebagainya; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.5 Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam menjalin hubungan dengan orang lain yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

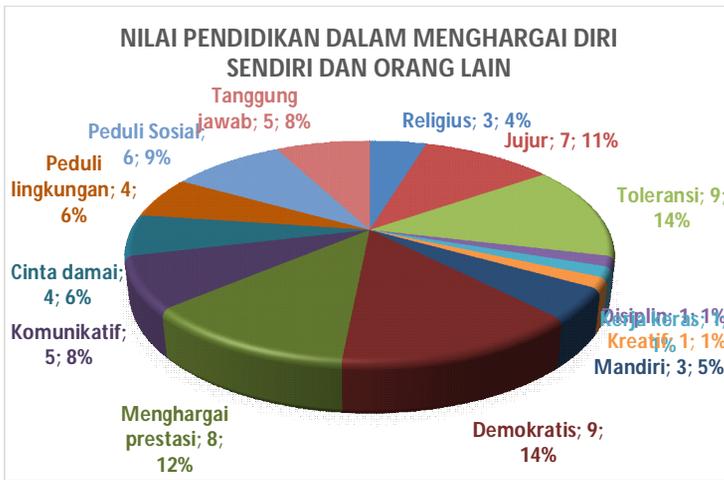


Gambar 5. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Menjalिन Hubungan Dengan Orang Lain

Beberapa nilai pendidikan dalam menjalin hubungan dengan orang lain tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat menjalin hubungan dengan orang lain; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.6 Menghargai Diri Sendiri dan Orang Lain

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam menghargai diri sendiri dan orang lain yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

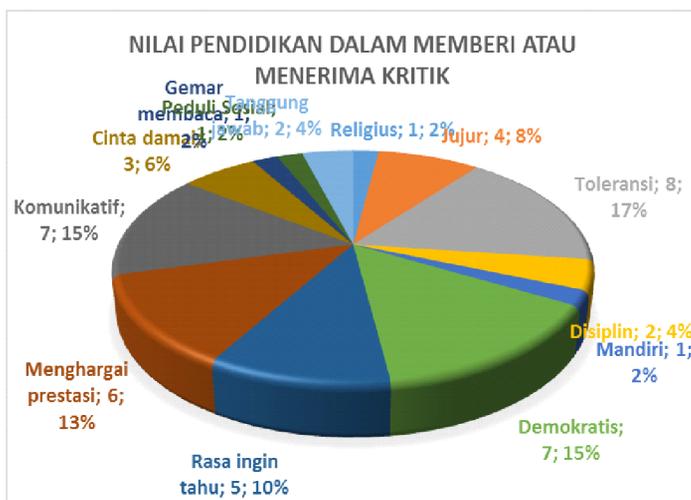


Gambar 6. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Menghargai Diri Sendiri dan Orang Lain.

Beberapa nilai pendidikan dalam menghargai diri sendiri dan orang lain tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat menghargai diri sendiri dan orang lain; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, menghargai prestasi orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.7 Memberi atau Menerima Kritik

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam memberi atau menerima kritik yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab.

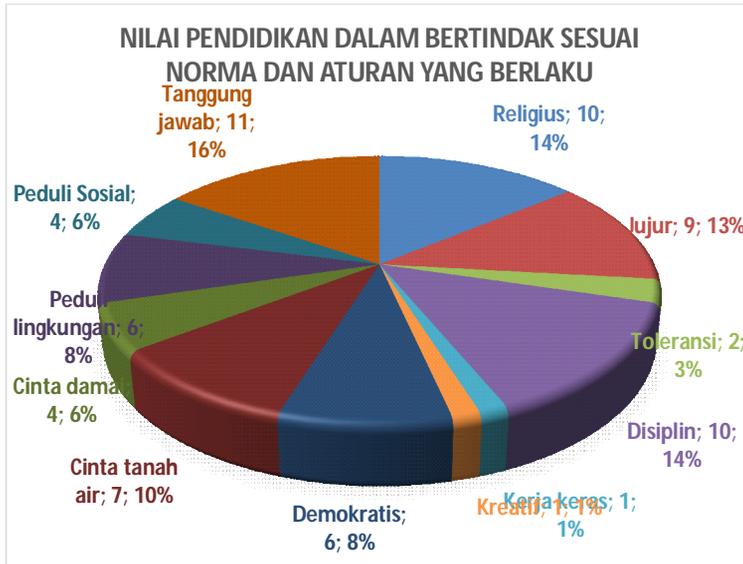


Gambar 7. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Memberi atau Menerima Kritik.

Beberapa nilai pendidikan dalam memberi atau menerima kritik tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat memberi kritik kepada orang lain atau menerima kritik dari orang lain; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik, cinta damai, gemar membaca tentang cara mengkritik yang baik, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.1.8 Bertindak Sesuai Norma dan Aturan yang Berlaku

Nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan mahasiswa dalam bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.



Gambar 8. Implementasi Nilai Pendidikan Melalui Bertindak Sesuai Norma dan Aturan yang Berlaku

Beberapa nilai pendidikan dalam bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku; mahasiswa bersikap religius, berkata dengan jujur, toleransi terhadap orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca tentang cara norma dan aturan, peduli sosial, dan penuh tanggung jawab.

4.2 Implementasi Nilai Kebangsaan Melalui *Social Skill*

Implementasi nilai pendidikan melalui *social skill* mahasiswa program studi Pendidikan IPS dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Implementasi Nilai Kebangsaan Melalui Keterampilan Sosial

Pada nilai kebangsaan tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa telah menerapkan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat melakukan keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), keterampilan menyelesaikan masalah, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Mahasiswa dalam membangun kelompok (bekerja sama) lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, mahasiswa lebih mendahulukan menyelesaikan masalah bersama daripada masalah pribadi. Selanjutnya dalam menjalin hubungan dengan orang lain, mahasiswa lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai pendidikan dan kebangsaan melalui keterampilan sosial, seperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah

air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab yang diimplementasikan dalam keterampilan dasar berinteraksi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), keterampilan menyelesaikan masalah, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, memberi atau menerima kritik, dan bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Sedangkan nilai kebangsaan diimplementasikan dalam keterampilan membangun kelompok (bekerja sama), keterampilan menyelesaikan masalah, dan menjalin hubungan dengan orang lain.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa diharapkan lebih meningkatkan dan mengembangkan keterampilan sosialnya dan mengimplementasikan nilai pendidikan dan kebangsaan dalam keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari.
- b. Dosen dapat membantu mahasiswa dalam memupuk dan mengembangkan, serta membentuk nilai pendidikan dan kebangsaan serta *social skill* pada diri mahasiswa.
- c. Untuk Program Studi Pendidikan IPS sebagai masukan dalam perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menanamkan nilai pendidikan dan kebangsaan melalui perkuliahan dan mengintegrasikannya dalam kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional.
- Elmubarok, Zaim. 2009. *Membumikan Pendidikan Nilai. Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Bandung: Alfabeta.

- Hasanah. 2013. *Implementasi Nilai-nilai Karakter Inti di Perguruan Tinggi*. pdf. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 2.
- Kesuma, Dharma dkk. 2011. *Pendidikan Karakter, Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Rosda Karya.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter, Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Maryani, Enok. 2011. *Pengembangan Program Pembelajaran IPS untuk Peningkatan Keterampilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Syamsul Bachri. 2010. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

KAJIAN TENTANG PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL TINGKAT SEKOLAH DASAR

Mohammad Yamin

moh_yamin@unlam.ac.id

ABSTRACT

This study aims: (1) to provide an suitability overview of local content that has been applied in the basic education level of elementary school and or SD/MI (2) to explore the potential areas that need to be considered in developing the local content curriculum in Banjar regency. This study uses survey research with quantitative and qualitative approach using a questionnaire as a data collection instrument. The study population is SD/MI in Banjar regency. Through analysis of the area potency of the area, the stratification is based on the potency of each region. Furthermore, the samples are based on every region of the specified level of primary, proportionately. From each sample, participants include research include local content teachers and parents of each class. The study's findings indicate that local content is reflected in the curriculum document and it is also based on the opinions of teachers and parents where the potential areas that need to be considered in the curriculum SD/MI are culture and local art, arts, natural resources, culture, local clothes, local food, sasirangan cloth, madihin, Japin banjar dance, agriculture, fishing, crafts, and craft of arguci. The local culture for SD/MI covers royal history, reading with Arabic Malay writing, the culture of Banjarese, local art, customs, music panting, maulid habsyi, and Baksa Kipas dance. The skill lesson of SD/MI include floral jasmine, wickering, skill of food processing and typical cake of Banjar, making rengge, memayat kain or fabric, making bags of beads, cooking, embroidery, woven handicrafts of aji stone, arguci craft, carving, culinary, embroidering, painting and calligraphy, dance, sewing. The art lesson of SD/MI include Banjarese dances, panting music and terbang, tambourine/maulid habsyi, local songs, dance, music, and Islamic art.

Keywords: curriculum, local content, and learning.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal 2013 menyatakan bahwa muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan (Remolda, 2009).

Muatan lokal merupakan mata pelajaran sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal (Mulyasa, 2007).

Kebijakan nasional yang berkaitan dengan dimasukkannya muatan lokal dalam standar isi dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas berbagai daerah yang beragam kondisi geografis, sumber daya alam, dan masyarakatnya (sumber daya manusianya) dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Menyikapi kondisi tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyatakan sangat tegas bahwa satuan pendidikan perlu memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik tentang kekhasan yang ada di lingkungannya melalui pembelajaran muatan lokal. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. Muatan lokal merupakan mata pelajaran sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan.

Kurikulum muatan lokal harus memenuhi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut, misalnya, kebutuhan untuk: (1) melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; (2) meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah; (3) meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat); dan (4) meningkatkan kemampuan berwirausaha.
2. Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Banjar sebagai satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang kaya potensi daerahnya mencakup adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dan lain-lain) yang sesuai dengan visi Kabupaten Banjar yaitu, "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera, Mandiri, dan Islami" kemudian menjadi menarik untuk dibahas secara lebih mendalam. Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Sejahtera;

kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai, (2) Mandiri; kemampuan dan ketahanan masyarakat untuk memenuhi setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya, (3) Islami; bersifat keislaman (akhlak), untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat madani, dan (4) Mandiri; Mandiri dalam Nuansa Kehidupan Islami, mengandung arti kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar yang terpenuhi kehidupan material dan spiritual dan berbudaya serta terwujudnya masyarakat madani “Negeri yang baik dan diampuni Tuhan” (Bappeda Kabupaten Banjar, 2013). Berbagai potensi daerah di Kabupaten Banjar harus selalu dijaga dan dilestarikan untuk menangkal derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang berdampak negatif bagi generasi muda Banjar.

Artikel ini selanjutnya membahas tentang potensi daerah tersebut dalam konteks ikut menjaga nilai-nilai kebangsaan yang dilihat dari perspektif pendidikan. Artikel ini lahir dari sebuah hasil penelitian di Kabupaten Banjar dengan tujuan memberikan gambaran kesesuaian muatan lokal yang sudah diterapkan di jenjang pendidikan dasar tingkat SD/MI dan menggali berbagai potensi daerah yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal, terutama di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan kurikulum bermuatan lokal dengan semangat Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang dilakukan dalam dua tahap (Arikunto, 2009). Tahap pertama akan dilakukan pengumpulan data sekunder berupa potensi daerah dari BPS dan data kurikulum muatan lokal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dilakukan untuk menstratifikasi wilayah berdasarkan potensi wilayah bersangkutan. Tahap pengumpulan data primer melalui penyebaran angket pada sampel penelitian untuk menggali gambaran muatan lokal yang diterapkan di sekolah dan menggali potensi daerah yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum muatan lokal. Sampel penelitian ini adalah SD/MI di Kabupaten Banjar dan kemudian dilakukan analisis potensi wilayah dilakukan stratifikasi berdasarkan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Dari setiap sampel diambil

responden penelitian meliputi guru muatan lokal dan orang tua/wali setiap kelas (Moleong, 2002). Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan muatan lokal yang sudah diterapkan di jenjang pendidikan dasar tingkat SD/MI dan berbagai potensi daerah yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Banjar.

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Muatan Lokal SD/MI di Kabupaten Banjar mulai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2002. Pelaksanaan bertahap dimaksudkan untuk memudahkan proses sosialisasi dan pelaksanaan penilaian dalam implementasinya sekaligus memberikan kesempatan untuk melengkapi berbagai bahan sumber dan kajian yang berkenaan dengan keberadaan kurikulum ini. Tahun pelajaran 2004/2005 kurikulum muatan lokal sudah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

Pengembangan kurikulum menyesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian yang ada sehingga dalam pelaksanaannya selalu ditinjau dan diselaraskan dengan tuntutan dan perkembangan kondisi daerah di Kabupaten Banjar. Pembinaan dan pengembangannya dapat meliputi kesesuaian isi, bahan pengajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan KBM. Program pengajaran pada kurikulum muatan lokal merupakan susunan Mata Pelajaran, alokasi waktu, dan penyebaran di setiap kelas dan satuan pendidikan. Muatan lokal pada kurikulum sebelumnya secara umum terbagi dalam 5 kelompok, yaitu:

1. Bahasa Banjar

Mata pelajaran Bahasa Banjar lebih difungsikan pada pengembangan kemampuan berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan dan kemampuan bernalar serta membina keutuhan budaya.

2. Budaya Daerah

Mata pelajaran Budaya Daerah meliputi permainan rakyat, seni vokal, seni tari, seni musik, seni sastra, seni teater dan etika budaya. Mata pelajaran Budaya Daerah berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai

budaya yang tumbuh berkembang di daerah yang lebih memiliki kekhasan serta mengandung kekayaan nilai-nilai.

3. Keterampilan

Mata pelajaran keterampilan meliputi unsur-unsur peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan tangan, makanan khas dan tata busana. Mata pelajaran keterampilan ini berorientasi produktif sehingga lebih menekankan kepada bekal siswa untuk mampu berkarya dan mandiri dalam usaha.

4. Sejarah Banjar

Mata pelajaran Sejarah Banjar yang mencakup pengetahuan tentang proses perkembangan masyarakat Banjar.

5. Nuansa Islami

Mata pelajaran Nuansa Islami meliputi membaca dan menulis Al Qur'an, Ilmu Tajwid, Kaligrafi dan Baca Tulis Arab Melayu. Dinamakan Nuansa Islami karena mata pelajaran ini memiliki khas memperkuat keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Pengajarannya lebih menekankan kepada pengamalan dan internalisasi nilai-nilai/pembiasaan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diperkaya dengan pengetahuan dan pengertian sederhana, dilanjutkan dengan praktik dan selanjutnya pendalaman dan perluasan sesuai dengan yang disyaratkan dalam GBPP yang ada.

Ketika konteks muatan lokal tersebut berkaitan dengan nuansa Islami, sejarah Banjar, budaya daerah, dan bahasa Banjar, kita semua setuju bahwa hal-hal demikian sangat mendukung tujuan pembangunan bangsa yang berkeadaban. Semangat kebangsaan selalu mengakomodasi segala sesuatu lokalitas agar bisa dirajut dan disatukan dalam bingkai jiwa kebangsaan yang menghargai perbedaan. Budaya daerah, sejarah Banjar dan lain sejenisnya sesungguhnya merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari sebuah pembangunan bangsa. Perjalanan sebuah bangsa kemudian tidak bisa dilepaskan dari sesuatu yang bersifat lokalitas. Keberagaman daerah dimana budaya lokal yang ada di Kabupaten Banjar sesungguhnya menjadi potret nasional bahwa sesungguhnya tidak akan ada Indonesia tanpa adanya kekayaan budaya yang ada di daerah (Anshoriy dan Pembayun, 2008).

Kurikulum Muatan Lokal Daerah Kabupaten Banjar yang sedang dilaksanakan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Susunan Kurikulum Muatan Lokal SD/MI dan SMP/MTs

Mata Pelajaran	Satuan Pendidikan dan Kelas					
	SD / MI					
	I	II	III	IV	V	VI
1. Bahasa Banjar	0	0	0	1	1	1
2. Budaya Daerah	0	0	2	1	1	1
3. Keterampilan	0	0	0	0	2	2
4. Sejarah Lokal	0	0	0	1	1	1
5. Nuansa Islami	2	2	2	2	2	2
JUMLAH	2	2	3	4	7	7

(Sumber: Diknas Pendidikan, 2013)

Adapun unsur-unsur pokok pelajaran setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan SD/MI secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Deskripsi Kurikulum Muatan Lokal SD/MI dan SMP/MTs

Mata Pelajaran	Unsur-unsur Pokok Bahasan	Satuan Pendidikan/Kelas					
		SD/MI					
		I	II	III	IV	V	VI
Bahasa Banjar	- Kebahasaan	-	-	-	X	X	X
	- Pemahaman	-	-	-	X	X	X
	- Penggunaan	-	-	-	X	X	X
Budaya Daerah	- Permainan Rakyat	-	-	X	X	X	X
	- Seni Vokal	-	-	X	X	X	X
	- Seni Sastra	-	-	X	X	X	X
	- Seni Musik	-	-	-	X	X	X
	- Etika dan Budaya	-	-	-	X	X	X
	- Seni Tari	-	-	-	-	X	X
	- Seni Teater	-	-	-	-	-	X
Keterampilan	- Peternakan	-	-	-	-	X	X
	- Perikanan	-	-	-	-	X	X
	- Perkebunan	-	-	-	-	X	X
	- Kerajinan Tangan	-	-	-	-	X	X
	- Makanan Khas	-	-	-	-	X	X
	- Tata Busana	-	-	-	-	X	X
Sejarah Lokal	- Cikal bakal Kerajaan Banjar	-	-	-	X	-	-
	- Masuknya Belanda ke Kerajaan Banjar	-	-	-	-	X	-
	- Perlawanan Terhadap Belanda	-	-	-	-	X	-
	- Mengenal Tokoh-tokoh Ulama di Kalsel	-	-	-	-	-	X
Nuansa Islami	- Baca Tulis Al Qur'an	X	X	X	X	X	X
	- Ilmu Tajwid	-	-	X	X	X	X
	- Kaligrafi	-	-	X	X	X	X
	- Baca Tulis Arab Melayu	-	-	-	-	X	X
		-	-	X	X	X	X

(Sumber: Diknas Pendidikan, 2013)

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Banjar mulai tahun 2002 sampai sekarang ini masih banyak menemui kendala di antaranya: (1) Pemahaman kebijakan, dimana provinsi mengeluarkan No 3 tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an No. 6 tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah dan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah. Perda tersebut menyebabkan sekolah-sekolah cenderung menekankan muatan lokal bernuansa Islam, (2) budaya sekolah yang cenderung meremehkan muatan lokal yang tidak dijadikan standar kelulusan seperti mata pelajaran lain sehingga kurang diperhatikan, (3) kendala guru, sebagian besar guru tidak berlatarbelakang

guru muatan lokal dan ini menyebabkan kurangnya bekal pengetahuan muatan lokal dan keterampilan di Kabupaten Banjar sehingga jarang diterapkan di sekolah atau diterapkan tetapi sebatas pengetahuan umum sehingga kurang mendalam atau beberapa guru bukan asli suku Banjar sehingga ada perbedaan dalam dialek bahasa maupun pendalaman materinya, (4) kendala dalam metodologi pelaksanaan, selama ini guru harus belajar menguasai pengetahuan dan keterampilan sendiri, pencarian bahan sendiri, peningkatan efektivitas sumber, perbaikan metode pembelajaran termasuk peningkatan pemberian variasi tugas, (5) kendala evaluasi guru muatan lokal, kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap profesionalisme guru muatan lokal kesulitan melakukan evaluasi terhadap materi muatan lokal yang diajarkan, (6) kendala sarana dan prasarana penunjang muatan lokal terutama kesenian dan keterampilan, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Banjar kaya dengan sumber daya alam dan budaya, tetapi keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan guru kesulitan membelajarkannya atau siswa kesulitan memahami apa yang disampaikan, (7) kendala kerjasama, kurang kerjasama antara sekolah dengan berbagai pihak terkait dengan muatan lokal seperti seniman/budayawan, produsen/pengrajin produk lokal Banjar, dan pengusaha pemasaran produk lokal Banjar, (8) lingkungan, pengaruh negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sebagian masyarakat Banjar kurang memperhatikan budayanya sendiri, bahkan siswa kurang tertarik terhadap budaya maupun keterampilan lokal.

Namun terlepas dari itu, apa yang sudah tergambar tersebut kemudian menjadi modal utama untuk secara terus menerus menghidupkan pelajaran-pelajaran lokal di sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran lokalitas. Kesadaran-kesadaran lokalitas tersebut kemudian dapat menjadi payung bagi kekuatan untuk menyemangati pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan sebagai jalan memupuk kebersamaan di tengah perbedaan secara nasional. Apa yang sudah dijalankan walaupun belum begitu maksimal dan optimal pelaksanaannya tentu memerlukan rumusan pemikiran secara lebih serius demi ikut bersama memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan peradaban secara nasional (Panjaitan dkk, 2014).

IV. KURIKULUM MUATAN LOKAL SD/MI

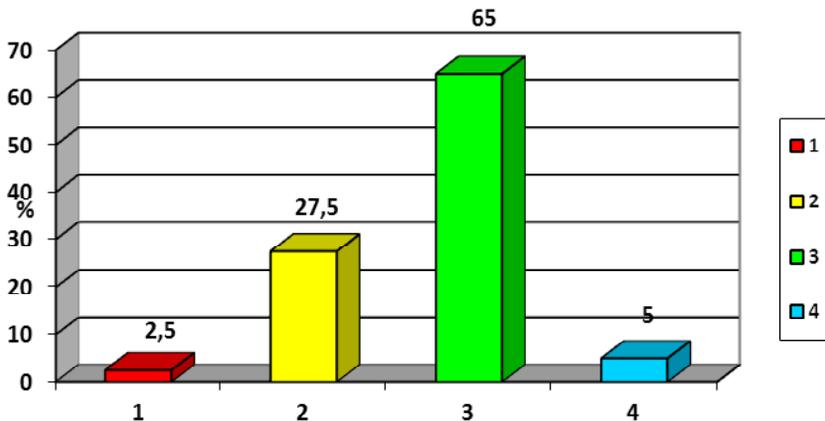
4.1 Guru

a. Muatan Lokal

Tabel 3. Muatan Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Guru	F	%
1	Tidak Setuju	1	2,5
2	Kurang Setuju	11	27,5
3	Setuju	26	65
4	Sangat Setuju	2	5
	JUMLAH	40	100

Berikut ini presentase muatan lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 1 :



Gambar 1. Muatan Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

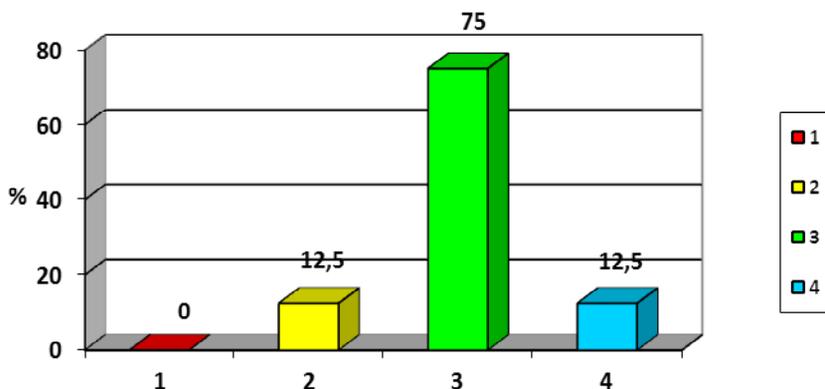
Gambar 1 memperlihatkan bahwa pendapat guru tentang muatan lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "65%" dan kurang setuju "27,5%" sedangkan yang berpendapat sangat setuju "5%" dan tidak setuju "2,5%". Pada prinsipnya, guru setuju adanya muatan lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI.

b. Potensi Daerah

Tabel 4. Potensi Daerah dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Guru	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	5	12,5
3	Setuju	30	75
4	Sangat Setuju	5	12,5
	JUMLAH	40	100

Berikut ini presentase potensi daerah dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 2:



Gambar 2. Potensi Daerah dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 2 memperlihatkan bahwa pendapat guru tentang potensi daerah dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "75%" dan sangat setuju "12,5%" walaupun ternyata masih ada "12,5%" yang berpendapat kurang setuju. Pada prinsipnya, guru setuju ada potensi daerah dalam kurikulum muatan lokal SD/MI. Potensi lokal dianggap penting untuk dikenal siswa karena diharapkan kelak dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada tanpa bergantung dengan orang lain.

Potensi daerah yang perlu diperkenalkan yaitu:

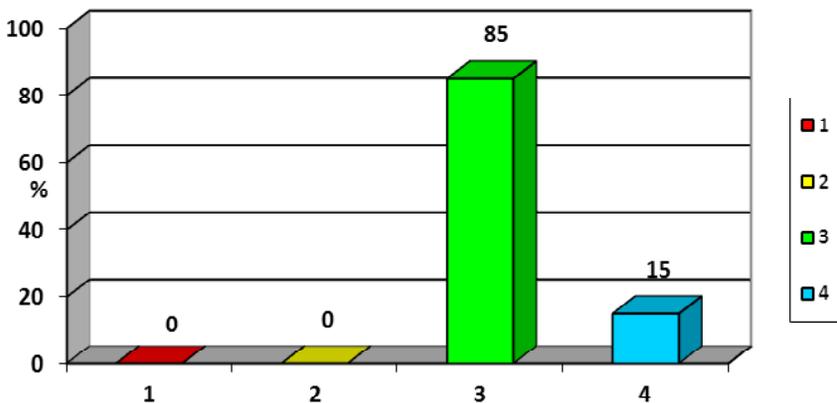
- 1) Budaya dan kesenian daerah
- 2) Baca tulis huruf Al-Qur'an
- 3) Bahasa daerah
- 4) Bidang perikanan
- 5) Pakaian daerah, makanan daerah
- 6) Kain sasirangan, madihin, tari japin Banjar
- 7) Pertanian, perikanan, kerajinan

c. Budaya Lokal

Tabel 5. Budaya Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Guru	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	34	85
4	Sangat Setuju	6	15
	JUMLAH	40	100

Berikut ini presentase budaya lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 3:



Gambar 3. Budaya Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 3 memperlihatkan bahwa pendapat guru tentang budaya lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "85%" dan sangat setuju "15%". Pada prinsipnya, guru setuju ada budaya lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI. Budaya lokal sangat penting untuk dipahami siswa agar siswa memahami berbagai budaya lokal daerah Banjar sehingga kelak memiliki kesadaran bertanggung jawab dalam melestarikannya.

Budaya lokal yang perlu diperkenalkan yaitu:

- 1) Sejarah kerajaan Banjar
- 2) Bahasa Daerah
- 3) Sinoman Hadrah
- 4) Tarian, lagu Banjar, cerita Banjar
- 5) Musik panting

Budaya lokal yang perlu diprioritaskan untuk diperkenalkan yaitu:

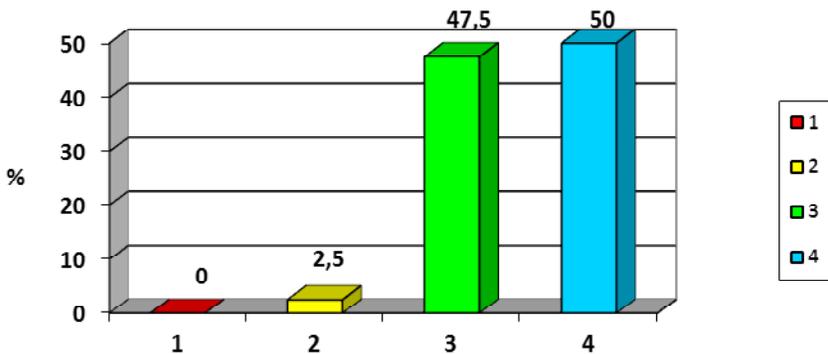
- 1) Sejarah kerajaan Banjar
- 2) Bacaan dengan tulisan Arab Melayu
- 3) Kesenian daerah
- 4) Musik tradisional
- 5) Tarian, bahasa, budaya JNKM

d. Keterampilan

Tabel 6. Keterampilan dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Guru	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	2,5
3	Setuju	19	47,5
4	Sangat Setuju	20	50
	JUMLAH	40	100

Berikut ini presentase keterampilan dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 4:



Gambar 4. Keterampilan dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 4 memperlihatkan bahwa pendapat guru tentang keterampilan dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada sangat setuju "50%" dan setuju "47,5%" walaupun ternyata masih ada "2,5%" yang berpendapat kurang setuju. Pada prinsipnya, guru sangat setuju ada keterampilan dalam kurikulum muatan lokal SD/MI. Keterampilan ini perlu dilestarikan sebagai kerajinan khas melalui pelajaran keterampilan dan sumber kekayaan kabupaten Banjar.

Pelajaran keterampilan yang perlu diajarkan yaitu:

- 1) Membuat sasirangan
- 2) Anyam-anyaman
- 3) Keterampilan mengelola barang bekas
- 4) Menganyam, membuat rengge/ lunta, membuat wadai kelepon
- 5) Menjahit, memasak, menari
- 6) Membuat manik-manik, membuat sasirangan, membuat anyaman
- 7) Menyulam, memasak, kolase

Pelajaran keterampilan yang perlu diprioritaskan yaitu:

- 1) Anyaman kerajinan tangan, batu aji.
- 2) Keterampilan mengolah bahan makanan dan kue khas banjar.

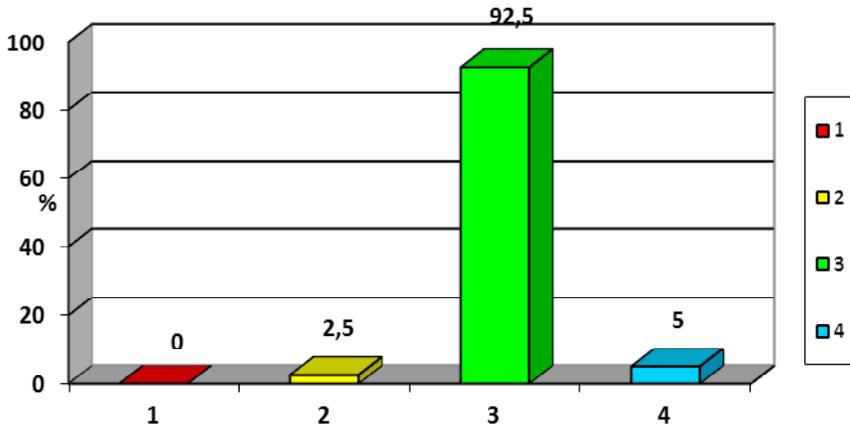
3) Membuat rengge/lunta.

e. Kesenian

Tabel 7. Kesenian dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Guru	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	2,5
3	Setuju	37	92,5
4	Sangat Setuju	2	5
	JUMLAH	40	100

Berikut ini presentase kesenian dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 5:



Gambar 5. Kesenian dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 5 memperlihatkan bahwa pendapat guru tentang kesenian dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "92,5%" dan sangat setuju "5%". walaupun ternyata masih ada "2,5%" yang berpendapat kurang setuju. Pada prinsipnya, guru setuju ada kesenian dalam kurikulum muatan lokal SD/MI. Kesenian di zaman sekarang ini merupakan satu aset untuk menarik dunia pariwisata sebagai satu sumber perekonomian masyarakat yang menguntungkan.

Pelajaran kesenian yang perlu diajarkan yaitu:

- 1) Menyanyi lagu Banjar, musik panting
- 2) Kesenian musik panting, madihin
- 3) Menari tari Banjar dan menyanyi lagu-lagu daerah
- 4) Rebana, lagu daerah, tarian daerah

Pelajaran kesenian yang perlu diprioritaskan yaitu:

- 1) Tari-tarian Banjar
- 2) Musik panting dan terbang
- 3) Rebana/maulid habsyi, lagu daerah

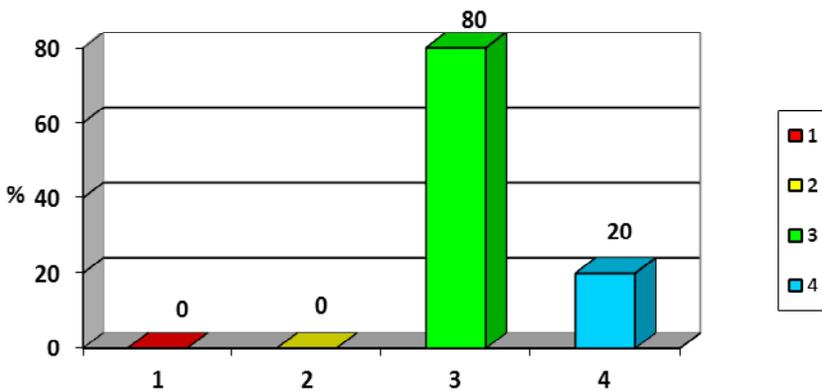
4.2 Orang Tua

a. Muatan Lokal

Tabel 8. Muatan Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Orang Tua	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	8	80
4	Sangat Setuju	2	20

Berikut ini presentase muatan lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 6:



Gambar 6. Muatan Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

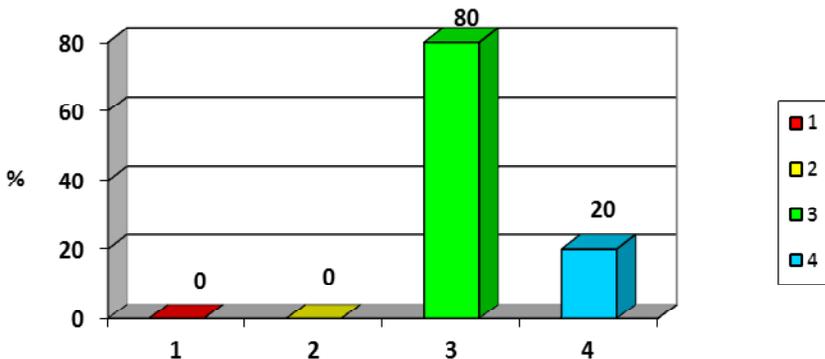
Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa pendapat orang tua tentang muatan lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "80%" dan sangat setuju "20%". Pada prinsipnya, orang tua setuju ada muatan lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI.

b. Potensi Daerah

Tabel 10. Budaya Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Orang Tua	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	7	70
4	Sangat Setuju	3	30
	JUMLAH	10	100

Berikut ini presentase potensi daerah dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 7:



Gambar 7. Potensi Daerah dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 7 memperlihatkan bahwa pendapat orang tua tentang potensi daerah dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "80%" dan sangat setuju "20%". Pada prinsipnya, orang tua setuju ada potensi daerah dalam kurikulum muatan lokal SD/MI.

Potensi daerah yang perlu diperkenalkan sebagai berikut:

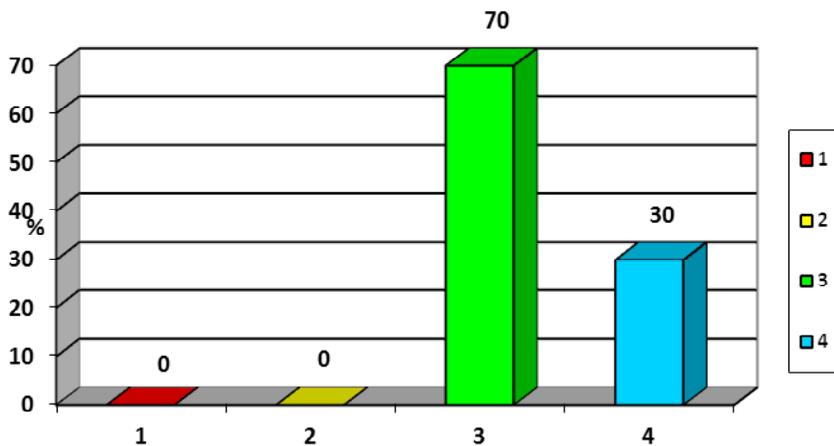
- 1) Kerajinan arguci
- 2) Bahasa daerah
- 3) Pasar Terapung, wisata budaya
- 4) Budaya daerah
- 5) Kesenian

c. Budaya Lokal

Tabel 10. Budaya Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Orang Tua	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	7	70
4	Sangat Setuju	3	30
	JUMLAH	10	100

Berikut ini presentase budaya lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 8:



Gambar 8. Budaya Lokal dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 8 memperlihatkan bahwa pendapat orang tua tentang budaya lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "70%" dan sangat setuju "30%". Pada prinsipnya, orang tua setuju ada budaya lokal dalam kurikulum muatan lokal SD/MI.

Budaya lokal yang perlu diperkenalkan yaitu:

- 1) Musik panting, kesenian madihin, maulid habsyi
- 2) Adat istiadat
- 3) Tarian
- 4) Kesenian

Budaya lokal yang perlu diprioritaskan untuk diperkenalkan yaitu:

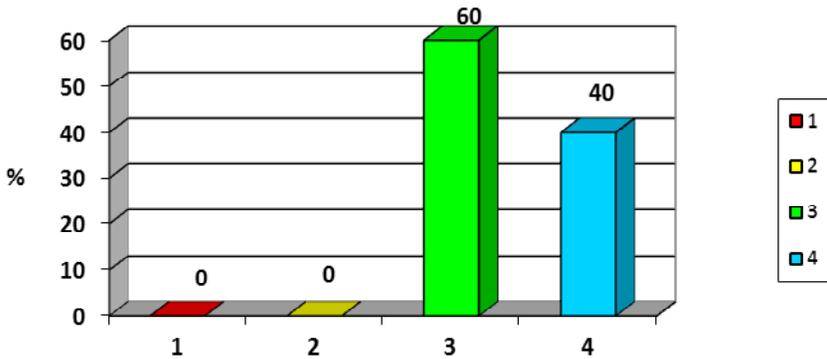
- 1) Musik panting, maulid habsyi
- 2) Adat yang mencerminkan agamis
- 3) Tarian baksa kipas
- 4) Budaya batamat Al-Qur'an
- 5) Kesenian

d. Keterampilan

Tabel 11. Keterampilan dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Orang Tua	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	0	0
3	Setuju	6	60
4	Sangat Setuju	4	40
	JUMLAH	10	100

Berikut ini presentase keterampilan dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 9:



Gambar 9. Keterampilan dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 9 memperlihatkan bahwa pendapat orang tua tentang keterampilan dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "60%" dan sangat setuju "40%". Pada prinsipnya, orang tua setuju ada keterampilan dalam kurikulum muatan lokal SD/MI.

Pelajaran keterampilan yang perlu diajarkan yaitu:

- 1) Kerajinan arguci dan kain sasirangan
- 2) Seni lukis
- 3) Seni ukir
- 4) Seni tari
- 5) Memasak

Pelajaran keterampilan yang perlu diprioritaskan yaitu:

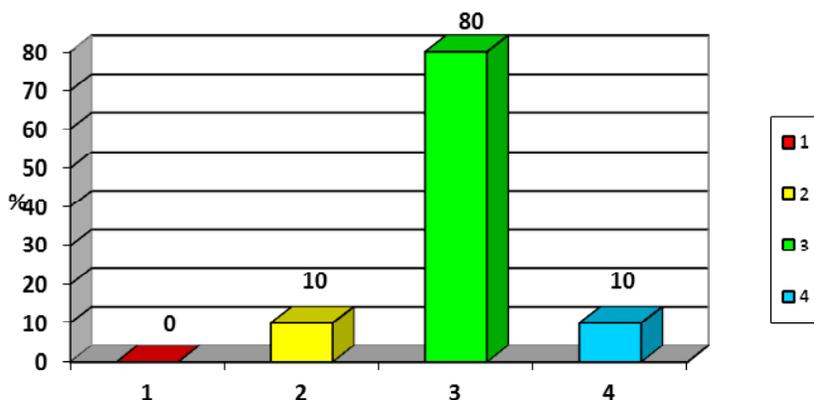
- 1) Kerajinan arguci
- 2) Seni ukir
- 3) Tata boga
- 4) Menyulam
- 5) Seni tari

e. Kesenian

Tabel 12. Kesenian dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

No	Pendapat Orang Tua	F	%
1	Tidak Setuju	0	0
2	Kurang Setuju	1	10
3	Setuju	8	80
4	Sangat Setuju	1	10
	JUMLAH	10	100

Berikut ini presentase kesenian dalam kurikulum muatan lokal SD/MI yang dapat dilihat pada gambar 10:



Gambar 10. Kesenian dalam Kurikulum Muatan Lokal SD/MI

Gambar 10 memperlihatkan bahwa pendapat orang tua tentang kesenian dalam kurikulum muatan lokal SD/MI lebih dominan kepada setuju "80%" sedangkan sangat setuju "10%" dan kurang setuju "10%". Pada prinsipnya, orang tua setuju ada kesenian dalam kurikulum muatan lokal SD/MI.

Pelajaran kesenian yang perlu diajarkan yaitu:

- 1) Tari daerah, kaligrafi, habsyi, hadrah
- 2) Seni musik islam

Pelajaran kesenian yang perlu diprioritaskan yaitu:

- 1) Seni terbang
- 2) Lagu-lagu daerah
- 3) Seni tari

Selanjutnya, apa yang sudah tergambar pada narasi di atas menjadi sebuah potensi kekayaan tersendiri dalam rangka merawat kekayaan lokalitas dalam rangka menjaga keberagaman yang ada. Tatkala berbicara tentang potensi daerah yang kemudian perlu diperkenalkan di sekolah, sebut saja budaya dan kesenian daerah, baca tulis Al-Qur'an, pakaian daerah, madihin dan lain seterusnya, ini sudah sangat jelas menggambarkan bahwa kekuatan lokal menjadi perekat luar biasa dalam rangka memajukan pembangunan nasional yang mendukung terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan dimana salah satunya adalah jiwa nasionalisme sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal sebagaimana yang ditemukan di Kabupaten Banjar (Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia, 2011). Lagu-lagu daerah, kaligrafi dan lain seterusnya menjadi indikator dalam konteks pembangunan kebangsaan untuk semakin menguatkan nasionalisme dalam rangka menjaga negara kesatuan republik Indonesia (Nasionalisme Kaum Pinggiran, 2004).

V. SIMPULAN

Berdasar pada temuan dan pembahasan, menjadi diperlukan untuk pengembangan kurikulum di tingkat SD/MI dalam rangka memperkuat kearifan lokal demi mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ini selanjutnya berkenaan dengan pada aspek budaya dan kesenian daerah, kesenian, sumber daya alam, budaya, pakaian daerah, makanan daerah, kain sasirangan, madihin, tari jopin Banjar, pertanian, perikanan, kerajinan, kerajinan arguci. Budaya lokal terkait dengan sejarah kerajaan banjar, bacaan dengan tulisan arab melayu, budaya bahasa Banjar, kesenian daerah, adat istiadat, musik panting, maulid habsyi, tarian baksa kipas. Sementara keterampilan mencakup merangkai bunga melati, anyam-anyaman, keterampilan mengolah bahan makanan dan kue khas Banjar, membuat rengge/ lunta, memayat kain, membuat tas dari manik-manik,

memasak, menyulam, anyaman kerajinan tangan batu aji, kerajinan arguci, seni ukir, tata boga, menyulam, seni lukis dan kaligrafi, seni tari, menjahit. Pelajaran kesenian meliputi tari-tarian Banjar, musik panting dan terbang, rebana/ maulid habsyi, lagu daerah, seni tari, seni musik, dan kesenian Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoriy, Nasruddin dan Pembayun. 2008. *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan: Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Arikunto, S. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ju Lan, Thung dan M. Azzan Mannan (ed). 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI Press.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salataholy, Fahmi dan Rio Perlu (ed). 2004. *Nasionalisme Kaum Pinggiran: Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Panjaitan, Putra Ade, dkk. 2014. *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Pemerintah Kabupaten Banjar. 2013. *Selayang Pandang Kabupaten Banjar*.
- Remolda, Remolda. 2009. *Kurikulum Berbasis Potensi Daerah*. The Education Development Center Indonesia (EDC), Jakarta. www.theedc.com.

SEJARAH, KESADARAN SEJARAH DAN PUPUSNYA IDENTITAS NASIONAL

Mohammad Zaenal Arifin Anis

mzarifinanis@unlam.ac.id

I. PENGANTAR

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa nilai-nilai kepahlawanan harus dilestarikan dan disebarluaskan. Tema ini, tampaknya masih dianggap penting. Keraguan ini beralasan karena orang muda kita banyak yang sudah tidak tertarik dengan pembelajaran sejarah yang tentunya bertalian erat dengan dampak mengikisnya identitas nasional. Kenapa tidak tertarik dalam pembelajaran sejarah? Jawaban yang klasik adalah pembelajaran sejarah dianggap tidak menarik dan membosankan. Realitas ini membuat pembelajaran sejarah dianggap kurang bermakna dalam kehidupan sehari-hari yang tengah berada di tengah kehidupan masyarakat yang cenderung materialistik-konsumtif-hedonistik.

Padahal tujuan pembelajaran sejarah pada tataran SMA adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan rasa ingin tahu, inspirasi dan aspirasi, mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas dan mengkomunikasikan informasi, dan tentunya mengembangkan semangat kebangsaan.¹

Jika dicermati maka pembelajaran sejarah diarahkan agar siswa dapat menangkap dan menanamkan nilai serta mentransformasikan pesan di balik

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

realitas sejarah. Artinya, proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi yang lebih substansi, adalah membantu membangun *personality* (kepribadian), baik person maupun kelompok, sehingga mampu merespon dan beradaptasi dengan perkembangan sosio kebangsaan yang semakin kompleks serta serta gempuran global yang semakin menggebu.

Realitas kehidupan bangsa kita pada kekinian sangat jauh seperti yang diasakan oleh para pendiri bangsa. Padahal semangat kepahlawanan secara faktual telah dibuktikan oleh seluruh lapisan masyarakat dimulai dari merencanakan, mengaksikan, dan mempertahankan dengan penuh dedikasi tanpa memperhitungkan nyawa dan kepentingan materi demi terbentuknya bangsa ini seakan-akan menjadi sia-sia.

Reformasi politik 1998 yang bertujuan memperbaiki tatanan pemerintah disambut rasa kesenangan yang berlebihan memunculkan luka sosial di berbagai lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Luka sosial akhirnya menjadi aksesoris kehidupan bangsa kita. Tampak sekali fenomena kekrisisan satu dan merembet kepada krisis-krisis yang lain termasuk luka nasionalisme atau dalam konsep sejarah disebut *regularity* menjadi tontotan yang gamblang. Mungkin akan muncul tudingan dari sebagian masyarakat, bahwa pembelajaran sejarah dianggap gagal. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan sebagai guru yang mengajarkan sejarah.

Semangat kebangsaan, jiwa kepahlawanan, rela berkorban, saling bergotong royong di kalangan masyarakat kita mulai menurun. Kita seperti telah kehilangan karakter yang selama beratus-ratus tahun bahkan berabad-abad kita bangun. Pada momen kali ini menjadi menarik kembali untuk mencoba kembali menelaah mengapa nilai-nilai kepahlawanan harus dipertahankan, diwariskan, dan dipelajari untuk masa depan bangsa kita.

II. SEJARAH DAN KESADARAN SEJARAH

Pandangan awam terkadang menganggap sejarah dan kesadaran sejarah mempunyai arti yang sama. Pertama yang mesti saya dahulukan, bahwa sejarah menurut para ahli adalah ilmu atau sains. Tengok saja pendapat Walsh² yang menyatakan, sejarah digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang studinya

dilakukan melalui metode. Sebagai ilmu sejarah memiliki filsafat ilmu tersendiri, permasalahan sendiri dan tentunya mempunyai metode.

Definisi sejarah menurut Sutherland, sejarah mengandung dua arti, pertama adalah narasi kronologi yang dieksekusi untuk disusun, kedua meliputi elemen-elemen masa lalu yang dipilih dan diberi peran untuk menjelaskan dunia kekinian.³ Sejarah adalah rekonstruksi masa lampau yang mempunyai makna sosial, begitulah hemat Kuntowijoyo.⁴ Djoko Suryo satu angkatan dengan Kuntowijoyo menyatakan, bahwa sejarah mengkaji tentang perubahan, masa lampau, kecenderungan, siklus, muasal perubahan, termasuk kemungkinan yang akan terjadi masa yang akan datang termasuk membangun prediksi.⁵

Pandangan para pakar di atas tentang definisi sejarah dewasa ini semakin komprehensif. Sejarah adalah sebuah ilmu tidak kurang tidak lebih. Definisi sejarah diartikan bukan saja sekadar peristiwa yang telah berlalu melainkan lingkaran peristiwa yang terentang dalam lilitan benang-benang gagasan. Gagasan merupakan dasar dari semua tindakan kemudian menjadikan peristiwa yang dianggap penting. Ide atau gagasan merupakan motor untuk memotivasi dalam mencapai apa yang digagaskan, dipikirkan, sesuai dengan jiwa zaman. Dapat dikatakan, bahwa peristiwa memberikan informasi tentang keberlangsungan generasi ke generasi, kemerosotan moral, dampak dari konflik politik, kreativitas dalam membangun perdamaian, seni, pahlawan-pahlawan nasional, lokal, perdagangan, teknologi, seni dan lain sebagainya. Dalam sisi ini, kita melihat, bahwa sejarah tidak berhenti kepada masa lampau, melainkan ada dialog antar masa. Sejarah sebagai ilmu secara sistematis mengkaji dinamika masyarakat di masa lampau, memberikan penilaian pada masa sekarang, yang hasilnya dijadikan pijakan untuk masa yang akan datang. Djoko Suryo menyebutnya dengan sebutan sejarah visionaris.

Sejarah dalam paradigma ilmu termasuk dalam kategori paradigma interpretasi. Didasari oleh hermeneutika untuk memahami apa yang tersirat dari ucapan dan tata laku manusia. Memahami yang tersurat di kalangan ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya sejarah dikenal dengan sebutan *verstehen* atau *understanding* untuk menjelaskan atau eksplanasinya. *Verstehen* sendiri diartikan sebagai upaya untuk meletakkan "diri" dari yang "lain".⁶ Dalam bahasa lain mengerti makna dari dalam. Jadi *verstehen* sebagai sangat diperlukan untuk oleh sejarawan untuk menjelaskan gejala sejarah, yaitu

perbuatan, peristiwa, apa yang dipikir dalam benak, diucap, dan tentunya tokoh-tokoh sejarah.

Narasi di atas menginformasikan, peristiwa masa lampau yang dikaji oleh sejarah merupakan sebuah simbol yang dicari nilai dari suatu peristiwa. Ini berarti sejarah harus memahami semua peristiwa dengan cara *verstehen*. Jadi wajar sekali pandangan para ahli menyatakan, bahwa sejarah selalu aktual.

Sejarah sebagai ilmu hemat Kuntowijoyo memiliki dua kegunaan, yaitu intrinsik dan ekstrinsik.⁷ Intrinsik bertalian dengan ilmu sejarah sendiri, sedangkan ekstrinsik bertalian dengan fungsi pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, ilmu bantu, rujukan dan bukti. Guna sejarah secara ekstrinsik menurut Sartono Kartodirdjo, berurusan dengan pengetahuan sejarah dan tentunya akan memunculkan kesadaran sejarah atau kesadaran diri yang secara esensial bagi pembentukan kepribadian bangsa yang erat dengan *nation building*.⁸ Pandangan ini mengisyaratkan, secara tersurat maupun tersirat menekankan agar generasi muda yang akan datang dapat mengambil nilai dari generasi sebelumnya. Katakan saja, bagaimana beragamnya etnis di Nusantara dengan kesadaran sejarahnya ingin bersatu dan membentuk bangsa baru yaitu bangsa Indonesia. Pada sisi ini juga kita menyatakan, bahwa tujuan pembelajaran sejarah pada dasarnya untuk mengembangkan diri sendiri, sehingga bangsa kita tahu apa arti menjadi menjadi bangsa Indonesia. Tanpa kesadaran sejarah para politikus generasi sekarang tidak tahu kenapa Pancasila menjadi ideologi negara kita.

Persoalan lain muncul bagaimana guru bidang sejarah mengajar pembelajaran sejarah. Tidak berlebihan jika guru sejarah dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dengan cara diperkuat dalam berpikir sejarahnya. Berpikir sejarah pada dasarnya adalah menggunakan sejarah sebagai sarana berpikir kontekstual, begitulah hemat Wineburg.⁹ Seixas menambahkan elemen-elemen berpikir sejarah, yaitu: (1) signifikansi berurusan dengan tokoh, gagasan, peristiwa yang dianggap penting dan mengapa penting, (2) epistemologi dan bukti yang berdekatan dengan metode sejarah, reliabilitas bukti dan bagai bisa terjadi perbedaan tafsiran, (3) kontinuitas dan perubahan dimensi waktu dan ruang tidak dapat dipisahkan, (4) berkembang dan runtuh bertalian dengan apa dan mengapa, (5) empati dan keputusan bagian dari memahami fenomena sejarah (6) agensi sejarah, fenomena sejarah selalu digerakkan oleh pelaku sejarah.¹⁰ Pandangan Wineburg,

Seixas dan para pakar lainnya mengisyaratkan, tidak tepat bila ada anggapan, bahwa sejarah adalah persoalan masa lalu yang tidak penting untuk dikaji. Dalam konteks ini berpikir sejarah harus diiringi berpikir kritis, kreatif, menganalisis, interpretasi, penggunaan konsep sejarah, menentukan kausalitas sejarah, menyusun kesimpulan.¹¹ Ini berarti berpikir sejarah bertalian dengan keterampilan intelektual dan keterampilan habitual. Pembelajaran sejarah mampu membangun beragam keterampilan baik bersifat kognitif maupun efektif, sehingga akan memunculkan kesadaran sejarah.

III. DARI KEGALAUAN IDENTITAS KE NASIONALISME

Apa dan bagaimana kepahlawanan nasional sering dibahas dan ditulis. Menjadi menarik adalah mendiskusikan dan menjawab pertanyaan kenapa nilai kepahlawanan, harus dipelajari dan disebarluaskan. Judul tulisan ini sudah menjawab pertanyaan itu, yaitu jika memiliki kesadaran maka kita akan selalu sadar tentang para pelaku sejarah sebagai pahlawan yang telah berjuang dan membangun bangsa ini.

Jika tidak memiliki kesadaran mengapa kita tidak akan pernah tahu kenapa bangsa ini ada, sehingga kita akan kehilangan identitas dan kita menjadi bangsa yang sakit. Kondisi ini mungkin sedang terjadi, sehingga kita merasa menjadi galau tentang identitas. Hidup bukan hanya meratapi kegagalan kegalauan dan kepesimisan, melainkan berdoa dan berjuang. Minoritas kreatif diperlukan untuk bangkit dan membangun kembali peradaban bangsa ini.

Reformasi di Indonesia dalam kacamata akademis memunculkan desentralisasi dan reformasi politik telah membuka pertanyaan tentang keidentitasan. Orde Baru yang sentralistik menapsirkan identitas adalah aspek kebudayaan yang primordial melalui proses sosial dan politik, dan sebagian besar proses itu menurut Thufail terjadi dalam ranah pendidikan dilanggengkan.¹²

Identitas dan primordial dua konsep yang berbeda. Identitas adalah kepribadian seseorang yang menjadikan simbol jati dirinya, dibangun melalui proses enkulturasi (pendidikan), sedangkan identitas nasional adalah kepribadian nasional yang tentunya diwarnai oleh Pancasila. Artinya Identitas tidak langsung menjadi melainkan melalui sebuah proses sejarah yang panjang.

Mendiskusikan kesadaran sejarah dalam konteks pembangunan identitas bangsa yang didalam termasuk mempelajari nilai-nilai kepahlawanan. Nilai-kepahlawanan adanya ketika secara kontekstual kita mengembalikannya lagi pada era kolonialisme. Kolonialisme awalnya direspon oleh kekuatan etnosentik yang tentunya melahirkan para heroetnik dengan ikatan primordialismnya. Respon ini merupakan kesadaran untuk melawan pengingkaran (negasi) yang tentunya mendahului aksi kolektif.

Aksi kolektif dengan kecerdasan, ketika sebutan inlander yang secara psikis bangsa kita menjadi inferior menjadi depresi relatif dengan sebutan itu. Kecerdasan melakukan aksi ditandai dengan membangun simbol dalam wujud identitas kolektif, yaitu munculnya organisasi kepemudaan dan diteruskan munculnya sumpah pemuda, 2 Oktober 1928.

Nilai dari Sumpah Pemuda pada dasarnya merupakan nasionalisme untuk melawan kolonialisme. Prinsip nasionalisme menurut Sartono Kartodirdjo, antara lain: (1) kesatuan (*unity*); (2) kebebasan (*liberty*); (3) kesamaan (*equality*); (4) kepribadian; dan (5) prestasi.¹³ Prinsip-prinsip ini harus dioperasionalkan melalui media negara bangsa.

Kesatuan sosial dalam konteks ini nasionalisme tidak mungkin dibangun dan dipertahankan tanpa dukungan ideologi. Ideologi Pancasila diciptakan sebagai landasan solidaritas. Dalam mempertahankan Pancasila maka banyak pahlawan dari segala lapisan berperan sebagai agen perubahan menghiasi dinamika sejarah. Pengalaman sejarah yang membangun keberagaman primordialisme menjadi sebuah kesatuan politik yang kita sebut dengan negara nasional. Sejarah nasional yang hanya dapat memberikan informasi tentang terbentuknya sebuah identitas baru, yaitu identitas nasional.

Nasionalisme tidak pernah final, sebab permasalahan-permasalahan sesuai dengan jiwa zaman akan selalu muncul. Maka sejarah pun tidak akan pernah final, ia harus selalu aktual menjawab persoalan dalam ruang dan waktu untuk merenda masa depan. Setidaknya kenapa kita harus menghargai para pahlawan pada dasarnya mereka sudah menjadi Pancasila sebagai sebuah etos bangsa.

IV. SIMPULAN

Tidak menghargai, mempelajari, menyebarluaskan nilai kepahlawanan erat dengan kesadaran sejarah sangat minim atau memang tidak ada. Kesadaran sejarah menginformasikan, kepada kita bagaimana nilai dari pahlawan yang sudah merefleksikan dalam hidupnya Pancasila sebagai sebuah etos bangsa.

Kesadaran sejarah selalu aktual minimal dalam dunia pendidikan melalui pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah alangkah baik didasari oleh filsafat konstruktivisme dan guru menerapkan berpikir sejarah.

Kesadaran sejarah dalam pendidikan harus dipupuk dan dipelajari karena urusan adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Jika tidak menghargai para pahlawan bisa jadi mereka tidak Pancasilais dan buat apa mereka menjadi warga negara Indonesia. Kesadaran sejarah adalah menghargai nilai kepahlawanan. Dalam sisi lain, memberikan informasi, bahwa negara, bangsa ini adalah milik kita bukan milik yang tidak pernah sadar akan sejarah.

KEPUSTAKAAN

- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kuntowijoyo. 1995. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nordholt, Henk Schulte, et.al., 2008. *Perspektif baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Ramstedt Martin dan F. Ibnu Thufail (eds.). 2011. *Kegalauan Identitas*. Jakarta: Grasindo.
- Peter, Seixas dan Perk, Carla. 2014. "The Teaching Historical Thinking", In A. Sears & I. Wrigt (Eds.), *Challenges and Prospects for Canadian Social Studies*. Vancouver: Pasific Educational Press.
- Suryo, Djoko. 2008. *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Modern*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dan Jurusan Sejarah FIB UGM.
- Wineburg. Sam. 2006. *Berpikir Historis*, terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor.

(Endnotes)

- ¹ Hamid Hasan, *Pendidikan Sejarah Indonesia Isu, Ide dan Pembelajarannya* (Bandung: Rizqi, 2012), h. 7.
- ² W.H. Walsh, *Philosophis of History: An Introduction* (London: Hutsinson, 1970), h. 38.
- ³ Heather Surherland, "Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah" dalam Henk Shulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Buku Obor, 2008), h. 24.
- ⁴ Kontowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 20.
- ⁵ Djoko Suryo, *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Modern* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi nasional dan Jurusan Sejarah FIB, 2009), h. 25.
- ⁶ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 4.
- ⁷ Kuntowijoyo, 1995, *Op.cit.*, h.24.
- ⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), h.51.
- ⁹ Sam Wineburg, *Beroikur Historis. Terjemahan Masri Maris* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 17.
- ¹⁰ Seixas, Peter & PERK, Carla, "Teaching Historical Thinking" In A. Sears I. Wright (Eds.) *Challenges and Prospect for Canadian Social Studies* (Vancouver: Pasifik Educational Press, 2014), hh. 111-114.
- ¹¹ Said Hamid Hasan, "The Development of History Thinking and Skill in The Teaching of History the Senior School Curriculum in Indonesia". *Historia International Journal of History Education. Vol. XI, No. 2 Desember 2010* (Bandung: UPI), h. 3.
- ¹² Lihat Martin Ramstedt, F. Ibnu Thufail (eds.), *Kegalauan Identitas* (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 4.
- ¹³ Sartono Kartodirdjo, 1993, *Op. Cit.*, h. 16.

PERAN KOPERASI DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Monry FNG Ratumbusang, Sitti Khadijah, dan Maulana Rizky

lihgt_4_avatar@yahoo.com

ABSTRAK

Koperasi dihadapkan secara langsung dalam persaingan global, maka untuk menjamin koperasi dapat bersaing diperlukan usaha yang maksimal dengan strategi yang jitu. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Ini membuktikan bahwa koperasi sesuai amanat UUD 1945 pasal 33, karena koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Senada dengan sila ke-5 berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memiliki Lambang Padi dan kapas. Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi yang menyatakan bahwa kesejahteraan anggota koperasi harus merata adil keseluruhannya. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: koperasi, UUD 1945, Pancasila, pembangunan ekonomi.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Monry FNG Ratumbusang** Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lambung Mangkurat, **Sitti Khadijah** Dosen Akademi Kebidanan Sari Mulia, dan **Maulana Rizki** Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini semua negara di belahan dunia berbondong-bondong melakukan perubahan besar untuk kemajuan negara masing-masing. Diantaranya dengan melakukan perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini mempunyai tujuan untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi intervensi negara-negara dalam bidang perdagangan khususnya dan bidang perekonomian pada umumnya. Semua negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas ini adalah negara yang siap menerima konsekuensi untuk dapat meningkatkan pembangunan ekonominya, sebab hal ini sangat erat kaitannya dalam perebutan pangsa pasar. Di bidang ekonomi bangsa kita harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di kawasan ASEAN. Ini jelas menjadi tantangan tersendiri, mengingat masih banyaknya persoalan perekonomian dan daya dukungnya yang masih belum siap. Sangatlah penting bagi Indonesia dalam era globalisasi ini mengembangkan koperasi Indonesia untuk dapat masuk ke dalam perdagangan bebas.

Dalam menghadapi era globalisasi sangat ditegaskan akan adanya kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian pada pihak lain karena ekonomi pun mempunyai peran menyejahterakan rakyat banyak. Ketika koperasi dihadapkan secara langsung dalam persaingan global, maka untuk menjamin koperasi dapat bersaing diperlukan usaha yang maksimal dengan strategi yang jitu. Koperasi memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai potensi *external economies* yang timbul di sekitar kegiatan ekonomi para anggotanya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh koperasi dapat dipergunakan sebagai modal utama koperasi untuk bersaing dalam perdagangan bebas, potensi tersebut akan membentuk keunggulan kompetensi secara alamiah.

Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi usaha yang turut mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga koperasi di Indonesia sejak awal memang diperuntukkan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia dan berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya

terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Keberadaan koperasi dapat menjadi tumpuan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha yang dikelola sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Itulah sebabnya koperasi mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia

II. KOPERASI DAN UUD 1945 PASAL 33

Koperasi sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 adalah soko guru perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja.

Pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan definisi koperasi yaitu sebagai suatu lembaga usaha bersama di antara para anggotanya. Bekerja sama atau berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya ini adalah ciri utama dari koperasi. Mengingat bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama yang bersifat kekeluargaan dan suka-rela (Wijaya, 2010 : 3).

Pasal 33 UUD 1945 ayat 4 menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka koperasi harus mempunyai tujuan, koperasi bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama secara adil dan merata. Hal ini dipertegas oleh Kartasapoetra, dkk (1993: 9) yang menyatakan bahwa tujuan koperasi bukan untuk mengejar keuntungan tetapi yang utama ialah

memberikan jasa-jasa anggotanya supaya bersemangat dan bergairah dalam bekerja sehingga peningkatan pendapatan dapat tercapai.

III. KOPERASI DAN SILA KE-5 PANCASILA

Sila ke-5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki lambang padi dan kapas. Pada umumnya nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digali oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil (Wreksosuharjo, 2001: 35). Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual, lahir dan batin.

Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi yang menyatakan bahwa kesejahteraan anggota koperasi harus merata adil keseluruhannya.

IV. PERAN KOPERASI DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan

ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Pelaksanaan koperasi memerlukan tindakan secara nyata yang dilakukan oleh setiap anggota dan tindakan-tindakan tersebut harus mencerminkan asas koperasi yaitu sikap kekeluargaan dan gotong royong antar anggota dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut diperkuat Subandi, (2013: 21) membagi asas koperasi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Landasan idiil yaitu landasan yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi yang merupakan pandangan hidup dan cita-cita yang ingin dicapai. (2) Landasan struktural yaitu suatu landasan yang berdasarkan aturan-aturan atau tata tertib yang sudah disepakati bersama dan menjadi cita-cita moral yang didasarkan pada falsafah bangsa. (3) Asas koperasi yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota dalam melaksanakan kegiatan koperasi yang dilakukan dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

V. SIMPULAN

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Oleh karena itu, koperasi sebagai soko guru

perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 harus tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasapoetra, dkk. 1993. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Agus, dkk. 2010. *Kewirausahaan Koperasi: Studi Kasus Koperasi Karyawan Universitas Surabaya*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: ANDI.

NILAI-NILAI DALAM SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Azmi
azmi.yc@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan nilai merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya membentuk watak atau karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan nilai pada dasarnya dapat diimplementasikan pada setiap mata pelajaran, tidak terkecuali sejarah. Sejarah yang mempelajari masa lalu seyogyanya dapat memberikan gambaran bagi kehidupan di sekarang dan akan datang. Sejarah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah pada dasarnya dapat berkontribusi dalam upaya mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai peristiwa. Peristiwa sejarah dapat dijadikan bahan untuk mengajarkan nilai-nilai yang disebutkan oleh Pusat Kurikulum. Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang sangat panjang sebagaimana yang dijabarkan dalam Sejarah Banjar. Sejarah lokal Kalimantan Selatan dapat dijadikan alternatif bahan pendidikan nilai yang dapat mencakup nilai-nilai secara komprehensif. Studi pustaka digunakan dalam tulisan ini sebagai upaya menggali berbagai literatur yang relevan. Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada periodisasi sejarah lokal Kalimantan Selatan dan nilai-nilai yang terkandung dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah.

Kata kunci: nilai, sejarah lokal, Kalimantan Selatan.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen Konsentrasi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional seyogyanya dapat membentuk karakter peserta didik dengan mengajarkan nilai dalam setiap mata pelajaran. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat (Adisusilo, 2014: 56). Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan (Mulyana, 2011: 11).

Menurut Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (2010: 9-10), setidaknya ada 18 nilai dalam pembelajaran yang dapat ditanamkan kepada peserta didik antara lain jujur, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sejarah merupakan mata pelajaran yang mampu memberikan gambaran kepada peserta didik tentang berbagai peristiwa di masa lampau. Setiap peristiwa sejarah mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mempelajari sejarah dapat memberikan peserta didik gambaran tentang keadaan di masa lalu yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk menghadapi berbagai tantangan di masa akan datang, baik sejarah yang berada dalam ruang lingkup nasional maupun lokal.

II. SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN

Secara harfiah, sejarah diartikan dengan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dapat diartikan sebagai kejadian di masa lampau yang memiliki keunikan tersendiri yang berhubungan dengan manusia. Istilah sejarah dalam bahasa Inggris adalah *history* yang berasal dari kata *historia* dalam bahasa Yunani yang berarti informasi atau penelitian yang ditujukan untuk memperoleh kebenaran. Menurut Kochhar (2008: 3-5), sejarah adalah sebuah ilmu yang membahas tentang manusia dalam lingkup ruang dan waktu yang merupakan dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan masa depan dengan menjelaskan masa kini. Adapun Helius Sjamsuddin (2012: 6) mengemukakan bahwa bahwa sejarah adalah penelitian tentang masa lalu yang berhubungan dengan manusia atau dengan kata lain masyarakat manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah

adalah sebuah ilmu yang membahas tentang manusia dalam lingkup ruang dan waktu yang berhubungan dengan masyarakat manusia.

Sejarah lokal dapat diartikan dengan suatu peristiwa di masa lampau yang terjadi dalam ruang lingkup suatu tertentu. Menurut Priyadi (2012: 2), terdapat tiga unsur pengertian sejarah lokal yang membedakan dengan sejarah nasional pada umumnya, yaitu (1) unit administratif politis, (2) unit kesatuan etnis kultural, dan (3) unit administratif sebagai kesatuan etniskultural. *Pertama*, ruang sejarah lokal dapat diterima apabila berhubungan dengan sejarah politik yang menyangkut dengan wilayah lokal, seperti provinsi, *keresidenan*, kabupaten, *kawedanan*, kecamatan dan kelurahan. *Kedua*, ruang sejarah lokal dapat diterima apabila berhubungan dengan suatu peristiwa yang berkaitan dengan identitas suatu etniskultural, seperti kerajaan yang dibangun dalam ruang lingkup suatu etnis. *Ketiga*, ruang lingkup sejarah lokal dapat diterima apabila berhubungan dengan unit administratif sebagai kumpulan etnis kultural, seperti suatu wilayah yang dibentuk dengan kesepakatan sejumlah etnis kultural yang mendiami daerah tersebut.

Pembagian periode sejarah lokal Kalimantan Selatan didasarkan pada pembagian pembahasan di dalam buku berjudul Sejarah Banjar yang dibagi dalam enam periode, yaitu masa pra sejarah, masa kuno (Hindu), masa klasik/ Islam (1500-1900), masa perintis kemerdekaan (1901-1942), masa pendudukan Jepang (1942-1945), dan masa perang kemerdekaan atau revolusi fisik (1945-1949). Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan para sejarawan lokal yang diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 2003. Pengumpulan tulisan tersebut dikepalai oleh Muhammad Suriansyah Ideham yang merupakan peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun daftar materi yang dipelajari di setiap periode dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Periodisasi Sejarah Lokal Kalimantan Selatan

Periode	Materi Pokok
Pra Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> • Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana • Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut • Masa bercocok tanam • Masa perundagian
Kuno (Hindu)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuknya agama Hindu di Kalimantan Selatan • Kerajaan kuno antara lain Nan Sarunai, Negara Dipa, dan Negara Daha
Klasik/Islam (1500-1900)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebarnya agama Islam dan terbentuknya Kerajaan Banjar • Keadaan politik, ekonomi dan sosial Kerajaan Banjar • Perang Banjar (1859-1905)
Perintis Kemerdekaan (1901-1942)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan • Kondisi kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan • Keadaan organisasi pergerakan pada tahun 1928-1942 di Kalimantan Selatan
Pendudukan Jepang (1942-1945)	<ul style="list-style-type: none"> • Akhir Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan • Pemerintahan Pendudukan Jepang • Kondisi kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan
Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik (1945-1949)	<ul style="list-style-type: none"> • Reaksi rakyat Kalimantan Selatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 • Tumbuh dan berkembangnya Badan-badan Kelaskaran dan ALRI DIVISI IV Pertahanan Kalimantan • Perjuangan Gerilya dan terbentuknya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI • Kedaulatan dan perjuangan ALRI DIVISI IV Pertahanan Kalimantan diakui Pemerintah RI

Sumber: Sejarah Banjar, 2003

Pembahasan tentang pra sejarah di daerah Kalimantan Selatan sangatlah terbatas. Sumber belajar yang digunakan dalam pembahasan materi ini adalah Sejarah Banjar karya M. Suriansyah Ideham, dkk didampingi dengan Borneo Menyikap Gua Prasejarah karya Luc-Henri Fage, dkk, Sedjarah Kebudayaan Indonesia karya Soekmono dan Sejarah Nasional Indonesia I karya Sartono Kartodirdjo, dkk.

Pembahasan tentang masa Kuno (Hindu) seputar masuknya agama Hindu di Kalimantan Selatan yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Hindu, antara lain Nan Sarunai, Negara Dipa dan Negara Daha. Pada pembahasan ini sumber yang dijadikan rujukan utama adalah Sejarah Banjar. Adapun sumber pendamping adalah Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam karya Akhmad Gazali Usman, Hikayat Banjar karya J.J. Ras, dan Sejarah Nasional Indonesia II karya Sartono Kartodirdjo.

Pembahasan tentang masa klasik/Islam dibagi dalam tiga bagian, yaitu (1) tersebarnya agama Islam dan terbentuknya Kerajaan Banjar, (2) keadaan politik, ekonomi dan sosial Kerajaan Banjar, dan (3) Perang Banjar (1859-1905). Pembahasan pada bagian pertama dan kedua bersumber dari buku karangan Akhmad Gazali Usman berjudul "Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam". Tulisan ini merupakan rangkuman dan interpretasi penulis dari berbagai historiografi tradisional Kalimantan Selatan yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan berdirinya Kerajaan Banjar, antara lain Tuter Candi, Hikayat Banjar dan Silsilah Raja-Raja Banjar dan Kotawaringin. Adapun bagian ketiga tentang perang Banjar menggunakan sumber belajar dari buku Sejarah Indonesia III dan buku berjudul "Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-19" buah karya Ita Syamtasyiah Ahyat.

Pembahasan tentang masa perintis kemerdekaan diarahkan pada masa berlangsungnya pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan. Pada materi ini, pembahasan juga diarahkan pada kondisi masyarakat pada masa pendudukan Hindia Belanda pasca runtuhnya Kerajaan Banjar. Selain itu, seiring dengan pembahasan juga diarahkan pada keadaan organisasi di Kalimantan Selatan pada 1928-1942 paska terjadinya Sumpah Pemuda di Jawa. Sumber belajar utama dalam pembahasan ini adalah buku karya Prof. Alex A. Koroh dari Program Studi Pendidikan Sejarah berjudul Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Kalimantan Selatan (1901-1956). Adapun sumber pendamping dalam pembahasan ini adalah Sejarah Banjar dan buku berjudul Antara Dayak dan Belanda Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942 karya J. Thomas Lindblad.

Pembahasan tentang pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan berkisar pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan dan keadaan masyarakat pada masa tersebut. Pembahasan diawali dengan materi tentang akhir

pemerintahan Hindia Belanda, dilanjutkan dengan pergantian pemerintahan Jepang yang masuk ke Kalimantan Selatan dan kemudian ditutup dengan pembahasan tentang kondisi masyarakat Kalimantan Selatan pada masa pendudukan Jepang. Sumber bacaan dalam pembahasan ini adalah Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Kalimantan Selatan (1901-1956) karya Prof. Alex A. Koroh. Selain itu, Sejarah Banjar juga digunakan sebagai sumber bacaan pendukung dalam pembahasan materi ini.

Pembahasan tentang perang kemerdekaan atau revolusi fisik berbicara seputar kemerdekaan Republik Indonesia dan perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan pada masa revolusi fisik. Pembahasan pada pertemuan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) reaksi rakyat Kalimantan Selatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, (2) perkembangan badan-badan kelaskaran dan ALRI DIVISI IV Pertahanan Kalimantan, dan (3) perjuangan gerilya dan terbentuknya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Sumber bacaan utama dalam pembahasan materi ini adalah Sejarah Banjar. Adapun sumber bacaan pendukung adalah Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949) karya Ahmad Gafuri, Kisah Gerilya Kalimantan Periode 1945-1949 Kodam X/Lambung Mangkurat karya Hasan Basry dan Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik karya Wajidi.

III. NILAI DALAM PENDIDIKAN

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyebutkan bahwa *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak/ karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa....."*.

Pembentukan karakter erat hubungannya dengan pendidikan nilai. Dikutip dari Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2010, disebutkan bahwa terdapat setidaknya 18 nilai karakter yang dapat

diajarkan kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung sebagaimana yang dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

No	Nilai	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas
8	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Pedulih Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Pedulih Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, 2010: 9-10

Berpijak pada tabel dua di atas, dapat dikatakan bahwa setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah setidaknya memiliki beberapa nilai yang dapat dipetik dari setiap mata pelajaran, tidak terkecuali pembelajaran sejarah. Sejarah sebagai mata pelajaran yang mengupas kehidupan di masa lalu seyogyanya dapat menjadi sebuah refleksi bagi kehidupan masyarakat di masa sekarang dan akan datang. Dengan kata lain, sejarah sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat menjadi wahana dalam mengajarkan nilai-nilai yang disebutkan sesuai dengan amanah undang-undang.

IV. NILAI-NILAI DALAM SEJARAH LOKAL KALIMANTAN SELATAN

Sejarah lokal Kalimantan Selatan meliputi periodisasi masa prasejarah sampai dengan masa revolusi fisik berdasarkan Sejarah Banjar. Nilai-nilai yang terkandung dalam periodisasi sejarah tersebut secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3 Rangkuman Nilai dalam Sejarah Lokal Kalimantan Selatan

Periode	Nilai Karakter
Pra Sejarah	Religius, Disiplin, Toleransi, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Peduli Lingkungan, dan Tanggung-jawab
Kuno (Hindu)	Religius, Disiplin, Jujur, Toleransi, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Komunikatif, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung-jawab
Klasik/Islam (1500-1900)	Religius, Disiplin, Toleransi, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Komunikatif, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung-jawab
Perintis Kemerdekaan (1901-1942)	Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Demokratis, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Komunikatif, Gemar Membaca, dan Tanggung-jawab
Pendudukan Jepang (1942-1945)	Jujur, Disiplin, Kerja Keras, Semangat Kebangsaan, Menghargai Prestasi, dan Tanggung-jawab
Perang Kemerdekaan atau Revolusi Fisik (1945-1949)	Jujur, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Peduli Sosial, dan Tanggung-jawab

Berdasarkan tabel tiga di atas, setiap periode dalam sejarah lokal Kalimantan Selatan dapat dijadikan sebagai wahana dalam mengajarkan nilai-nilai yang dijabarkan oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional.

Sejarah seyogyanya diajarkan untuk memberikan pemahaman tentang masa lalu yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kehidupan di masa yang akan datang,

Peristiwa prasejarah secara umum dapat memberikan gambaran bagaimana kerjasama masyarakat di masa lalu dalam usahanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Pembagian kerja yang jelas antara satu kelompok untuk berburu dan kelompok lain untuk meramu makanan memberikan gambaran bahwa adanya nilai disiplin di dalam satu komunitas. Perkembangan kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Budha dapat menjadi contoh bagaimana toleransi antara pribumi dan pendatang. Raja pertama Negara Dipa yang merupakan pendatang dari luar dapat mendirikan sebuah kerajaan di daerah asing. Di sisi lain, suku Dayak yang merupakan penduduk pribumi juga tidak pernah disebutkan melakukan perlawanan terhadap para pendatang.

Kehidupan masyarakat di masa Islam yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Banjar dapat dijadikan sebuah pelajaran yang mampu memberikan gambaran betapa merasuknya sifat religius ke dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan. Tak bisa dipungkiri, Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat Banjar. Menengok masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan dapat memberikan deskripsi betapa tingginya semangat kebangsaan dan cinta tanah air masyarakat Kalimantan Selatan terhadap Indonesia. Kesetiaan terhadap Indonesia ditandai dengan dibacakannya proklamasi bergabungnya Kalimantan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

V. SIMPULAN

Sejarah pada dasarnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengajarkan nilai-nilai pendidikan yang disebutkan oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Sejarah lokal Kalimantan Selatan secara umum dapat menjadi alternatif bahan pendidikan nilai yang komprehensif guna memenuhi amanah alinea keempat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesuksesan pendidikan nilai terletak pada kesigapan para aktor pendidikan selama ini selalu memberikan sumbangsuhnya dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama para guru dan *stakeholder* yang terkait. Semoga, ke depannya sejarah dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan dapat membentuk

karakter masyarakat Indonesia yang kreatif, inovatif dan cinta tanah air dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. 2014. *Pembelajaran Nilai-Karakter, Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ideham, M. S., dkk. 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kochhar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah*. Terj. H. Purwanta dan Yovita Hardiwati. Jakarta: Grasindo.
- Mulyana, R. 2011. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Priyadi, S. 2012. *Sejarah Lokal: Konsep, Metode dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BUILD STUDENTS CHARACTER ON PHYSICS LEARNING THROUGH INTEGRATED BRAIN BASED LEARNING

Muhammad Ichsan Nurjana and Ikhwan Khairu Sadiqin

ksikhwan@gmail.com

ABSTRACT

The advancement of science in Indonesia has not been matched by the development of students' character. Teaching science, especially physics, the teacher are more focused to develop student's scientific attitude and tend to ignore of character development. The core of the problem is based on research is because of this decade learning process focused only on intellectual quotient (IQ) and tend to ignore the emotional quotient (EQ) of students. Therefore, it is important to optimize the balance of performance right brain and left brain in interaction with the learning environment. Integrated brain based learning is a concrete solution to accommodate the potential of IQ and EQ so that it built positive relationships and can develop empathy for others. Through the activities of learning to live together included learning to know, learning to do, and learning to be can build students' character.

Keywords: character building, brain based learning, physics instruction.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, October 8th 2016

** **Muhammad Ichsan Nurjana** Teacher of SMKN 2 Simpang Empat 2 and **Ikhwan Khairu Sadiqin** Student of Science Education Department of Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University.

I. INTRODUCTION

Competitiveness of a nation in the global era is determined by the character of people. Nations with strong character be superior and has the ability to become the nation's dignity and respected the world (Sugiyono et al, 2014). Agree with Trilling & Hood (1999) and Wen (2003) that the determinants of national competitiveness in the global era is of science, technology, and human resources. Quality human resources that the government hopes is the generation that has integrity attitude competencies (character), skills and knowledge (Nuh, 2015).

The advancement of science in Indonesia has not been matched by the development of national character (Tafsir, 2012). Indonesia has reached the threshold of concern. Everyday exhibited an atmosphere of violence occurring in the family, community, and ironically also occurred in schools. Behavior of learners cheating, violence against classmates, fighting between youth groups, up to corruption by state officials (Sugiyono et al, 2014).

This fact is evidence that the process of education has not been able to build a strong character. The education sector is a crucial role in shaping the character of the nation. Ki Hajar Dewantara (2013) argued that education is a process of acculturation that an attempt give the good values to a new generation in the community are not only maintenance but also with the intent to promote and develop culture towards good character. According to Tafsir (2012) effective place to enchant the nation's character is a school.

Based on research on the evaluation of the curriculum by Mohammed & Saparahayuningsih (2016), the character of Indonesian students still weak. Learning science, especially physics, students are more focused to develop a scientific attitude and tend to ignore the formation of character. This is because the scientific approach the curriculum has not been so able to accommodate the development of student character. Scientific learning approach was only able to develop scientific attitudes of students, while other sorts of attitudes were very less embedded into the students' self. Students are trained to work focused scientific knowledge to enrich and gain advantage for themselves. Not yet accustomed to working in a social group to reach an understanding with a sense of responsibility and empathy with others. So teachers are must able to integrate learning strategies that can support the development of student character.

The core of the problem is based on research is because of this decade study focused only to build intelligence quotient (IQ) and tend to ignore the emotional intelligence (EQ) students (Sadiqin & Samsuni, 2016). EQ included in performance while the right brain IQ included in the performance of the left hemisphere (De Porter, 1999). Both of intelligence is complementary, balanced performance between IQ and EQ is the key to student success (Goleman, 1995). Students who only optimize the left brain tend to only focus on her success. Slowly make students morally degenerate.

The solution to overcome the problem of degenerate character of students is to integrate learning methods to accommodate accommodate both hemispheres optimally complemented by encouraging the social spirit. Cooperation activity to reach the same goal in a social group can boost sense of tolerance, such as the *gotong royong* in the Indonesian culture (Pheaney et al, 2015). It can develop empathy for each individual so that the students can involved to build the character. The analysis is supported by the research findings of Mohammed & Saparahayuningsih (2016), the application of the integrated scientific instructional models was able to instill the values of attitudes and characters contained in the content of social studies to the student.

The most concrete action to realize the solution is to integrate the brain-based learning by providing the opportunity to work in a social group. Brain based learning is learning process to optimize all functions of the brain, based on the various disciplines of science research and practice in learning process (Jensen, 2011). Characteristics of brain based learning enchant performance both of hemisfer brain in learning, students can better to the role of emotions, patterns, meanings, environment, body rhythms and attitudes, stress, trauma, ratings, music, movement, gender, and enrichment in social interaction.

Referring to the results of previous studies brain based learning is an appropriate strategy to develop students' character. Results of research Erten & Inches (2011). Akyürek & Afacan (2013) Brain based learning can improve the students' character. Sadiqin & Samsuni (2015) reported that brain based learning can train students to use the performance of the right brain associated realm of emotions in interaction with the learning environment. The results that learning process can enchant the character of students, both of intrapersonal (such as curiosity and honest) and interpersonal (such as cooperation and responsibility).

Based on the above background, the authors propose an idea that is to develop the character of students through the study of brain-based learning. There are three subjects which will be the writer suggested that:

1. What is character building?
2. What is brain-based learning?
3. How to build students' character with brain-based learning?

II. CHARACTER BUILDING

According KBBI character is a psychological traits, morals or manners that distinguish one person to others. Characters associated with something that is inherent in every individual. Characters are the values of human behavior associated with the god, ourselves, our fellow human beings, the environment, and nationality, embodied in the thoughts, attitudes, feelings, words and actions based on religious norms, laws, manners, culture and customs (Zaenul, 2012). Character is a set of values that lead to a system, which underlies the thinking, attitudes, and behavior displayed (Muslich, 2011). Almost the same meaning with personality (Kesuma & CEPI, 2011). It can be concluded that character building is an attempt to cultivating the virtues of someone that really becomes a habit.

According KBBI, education is the process of changing attitudes and code of conduct of a person or group of people of mature business man through teaching and training efforts; process, method, works to educate. Character education is a process of transformation of the values of life to it is grown in one's personality to become one in the behavior of the person's life (Kesuma, 2011). There are three important things about character education, (1) the process of transformation of values, (2) is grown in personality, and (3) is integrated in the behavior. Character education is an active effort to form habits (*habit*) so that the nature of the learners will be engraved early, in order to make decisions well and wisely and put it into practice in daily life (Zaenul, 2012). Product of character building based Indonesian curriculum includes: religious, honesty, tolerance, discipline, hard work, creative, independent, democratic, curiosity, the spirit of nationalism, patriotism, respect for the achievements, friends /communicative, love peace, likes to read, care for the environment, social care, and responsibility (Kemendiknas, 2010).

III. BRAIN BASED LEARNING

Brain-based learning is the learning that is aligned with the way the brain that are designed by nature to learn. Brain-based learning is an approach to learning that is more parallel to how the brain learns best naturally based on the disciplines of neuroscience, biology, psychology, understanding of the relationship between learning and brain are now delivering to the role of emotions, patterns, meanings, environment, the rhythm of the body and posture, stress, trauma, ratings, music, movement, gender, and enrichment. (Jensen, 2011). Brain-based learning is an effective and enjoyable learning by maximizing the brain's ability to process, store and recall information (Willis, 2011).

Based on the expert opinion of the above it can be concluded brain based learning is learning how to optimize all functions of the brain based on different disciplines in science learning. Stages of learning by using brain-based learning approach that disclosed Jensen (2011) includes a pre-exposure, preparation, initiation and acquisition, elaboration, incubation and memorizing, verification, celebration and integration.

One of the four principles of brain-based learning is most likely to encourage the development of character is the Social and Emotional Learning. Jensen (1996) argues that it is not enough just to fill students' brains with facts. Teachers should also help children to develop the skills to manage their emotions, resolve conflicts non-violence and make responsible decisions so as to create a harmonious learning environment. The harmony of the learning environment is a characteristic that an individual has a good character.

IV. CHARACTER BUILDING THROUGH PHYSICS LEARNING WITH BRAIN BASED LEARNING

The learning process is structured to optimize the potential of students on the right brain. Brain-based learning is used as the basis for learning is an approach that is able to accommodate more right-brain abilities related to emotional and social relationships.

Strategies using brain-based learning approach that combined with model think pair share. This is caused by a combination of two of these strategies can improve student attention by giving students the opportunity to interact with information, others and the learning environment (Willis, 2011). The discussion activity partner or

think-pair-share is able to support the activities of co-operation between social so it can build social relationships. Think pair share based on constructivist theory. The learning process of science are based on principles of constructivist able to be a part of character education attainment (Wilujeng, 2016).

In general, the learning objectives in physics learning besides develop scientific attitude and characters. The curriculum requires that students have the characters, the second competency. Characters most likely trained in the learning of physics is cooperation, responsibility, and honesty.

Learning activities based on research of Sadiqin & Samsuni (2016). The learning activities that first began with the pre-exposure in the form of giving apperception the preliminary activities for curious students. Apperception is contextual questions of everyday life. Based on these questions students are invited to play games and organize students into groups of 3-4 students who have been determined. The formation of the group an initial attempt to train cooperation and responsibility.

Main activities shows the preparation, elaboration, initiation and acquisitions, incubation, verification and checking of confidence (Jensen, 2011). Main activities begins with the preparation stage, the teacher explains the material prerequisites as an introduction in solving learning problems. This activity encourages appreciation potential of right brain.

Elaboration phase organize students to form groups in pairs. Activity of elaboration encourage students to foster honest character, responsibility and cooperation. Students are expected to cooperate with friends to express their idea and result of task about learning problems through a small discussion. This activity encourages potential in the field of empathy for the right brain is responsible for the task of learning together (Sadiqin & Samsuni, 2016).



Figure 1. Student interaction with a group of friends

to express their thoughts on the issue through a small discussion group then passed a class discussion. Asking students to appreciate friends who are presenting a way to listen carefully. When students are accustomed to interacting with a friend or a teacher then empathy can arise.

Impact if students continues to be trained are accustomed to work together and understand the feelings on personality of other student. Students come to know why you should be kind to others because he was feeling. In accordance with Bilgin (2006) who found that when the direct involvement of students' hands together on learning activities that emphasize cooperation, the more successful the students have a positive attitude. This action is in accordance with the principle of four pillars of education. Pillars of education include learning to live together implies the development of knowledge (of learning to know) and action (learning to do) about self and others; appreciation of the diversity of the human race, and the interdependence between peoples; empathy and caring; respect for other people, cultures and value systems; ability to resolve conflicts through dialogue; and the ability to work towards the same goal. Pillar learning to be able to interpret how to learn to become a man through the acquisition of knowledge, skills and values that are conducive to the development of character and intellectual (Zhao, 2005).

Social interaction activities in accordance with the constructivist theory Vygotsky who emphasized the importance of sociocultural in the learning process (Suparno, 1997). The success of the learning activity is strongly influenced by a person's participation in social and cultural practices that there are good teachers, friends, or community. Through communications with people who understand, people who do not understand will be motivated to understand and be able to develop their potential (Sadiqin et al, 2016). Students who have a strong character will affect nearby friend's character as well. In line with the findings Wishmath (2015) reported that passive students be helped by his comrades because when you're not able to resolve the problem, students will be able to listen to the insight that his/her freinds.

Initiation and acquisition stages contain the activities of teachers to guide students in discussing all the answers to questions in the matter through class discussion (Sadiqin & Samsuni, 2016). The incubation stage and inserting memory of the teacher calls one group of volunteers to present the results of its work. Stage verification and checking of confidence form of praise on students who managed to answer many questions correctly, and check back student understanding.

Verification stage enchant students' honest character. Because at this stage of the observations presented to the whole class of people. Then it can be searched compatibility through verification by friends group, other groups and teachers. These activities minimize the chance of false data so that students write an honest attitude can be formed.



Figure 2. Student verification to the front of the class

The end of the learning activity is celebration. This stage teachers with students celebrating success in learning. The benefit is that the students together feel the sweet victory of teamwork (Sadiqin & Samsuni, 2016). This is encourage students' cooperation, responsibility and honesty, very important to make character be habit for students.

The teacher asks the students greet with friends near their seats, which is a peer learning group in the brain based learning (Sadiqin & Samsuni, 2016). Teacher gives simple gift in the form of gifts which contains a reward, motivational messages according to the personality of each student as well as the predicate value for learning to students called sequentially by absent. Reinforcement in accordance with Aqib & Sujak (2011), covers all of the characters emotions and habits themselves. Thus it is necessary that the three components of good moral knowing, moral feeling, and moral action.

In general, the stages in the brain based learning approach train students' activite by drawing positive attention students and foster relationships between individuals in learning activities. The teacher always gives interesting examples of student attention followed by a brief explanation in the early stages and then the students proved through direct learning experience, discussions and

presentations. After that teachers verify student understanding and continues to provide reinforcement.

Activities are very supportive of the growth of the characters. Similarly as stated Harlen (1992) to develop the character of the students there are three main aspect. The aspect is show examples, provide reinforcement with praise and approval, and provides an opportunity to develop an attitude. These findings are supported by previous studies by Tufekci & Demirel (2009), Jagdeep (2013), Akyürek & Afacan (2013), Damayanti & Sukestiyarno (2014), Saparina et al (2015) stated that the approach of brain-based learning can be a positive influence on students' character.

V. CONCLUSION

First, character building is an attempt to cultivate the virtues of someone that really becomes a habit. Second, brain based learning is learning how to optimize all functions of the brain based on the various disciplines of science in students' learning activities. Third, the process of learning physics to do character building can be applied through brain based learning.

REFERENCES

- Akyurek & Afacan. 2013. Effects of Brain-Based Learning Approach on Students' Motivation and Attitudes Levels in Science Class. *Mevlana International Journal of Education (MIJE)*. Vol. 3(1), pp. 104-119.
- Aqib, Z dan Sujak. 2011. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. Bandung: Yrama Widya.
- Bilgin, I. 2006. The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight grade students science process skills and attitudes toward science. *Journal of Baltic Science Education*, Vol. 1(9), 27-37.
- Damayanti, T & Sukestiyarno, Y, L. 2014. Meningkatkan Karakter dan Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Brain-Based Learning Berbantuan Sirkuit Matematika. *Jurnal Kreano*, Vol. 5 (1) pp 82-90.
- De Potter, B dan Hernacki, M. 1999. *Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Kaifa.

- Erten, H dan Inci, N. 2011. *The Effect Of Brain Based Learning On Academic Success, Attitude And Retrieval Of Information In Science And Technology Classes*. Paper presented at the Annual Meeting of the 9th ESERA Conference, Lyon.
- Goleman, D. 1995. *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Harlen, W. 1992. *The Teaching Science*. London: David Fulton Publishers.
- Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum & Perbukuan.
- Kesuma, D, dan Cepi, T. 2011. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Rosda.
- Ki Hadjar Dewantara, 2013. *Buku I, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka Cetakan Kelima*. Yogyakarta: UST-Press.
- Jagdeep, K. 2013. Effectiveness of Brain Based learning Strategies on Enhancement of Life Skills among primary school students with internal and external Locus of Control. *International Journal of Advancements in Research & Technology, Vol. 2 (6)*, pp 128-143.
- Jensen, E. 1996. Brain Compatible Learning. *International Alliance for learning Vol. 3 (2)*.
- Jensen, E. 2011. *Brain Based Learning, Pembelajaran Berbasis Otak*. Jakarta: Indeks.
- Muhamad, B., & Saparahayuningsih, S. 2016. An Attitude and Character Instructional Development Based on Curriculum 2013 in Elementary School. *Creative Education, 7*, pp 269-277.
- Muslich, M . 2011. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuh, M. 2015. *Sains Pembelajaran dan Penilaian Sains Sesuai Kurikulum 2013*. Keynote speaker at Seminar Nasional Pendidikan Sains, Pascasarjana Unesa, Surabaya.
- Pheaney, C., Malihah, E., Supriatna, M & Kartadinata, S. 2015. Pasar Budaya UPI, An Inovation in Teacher Training Education Based on Local Wisdom For Unity Diversity. *The Proceedings of International Seminar on Ethnopedagogy. Eds Abbas, W.A., Syaharuddin., Irhasyuarna, Y. pp 27-33*. FKIP UNLAM Press.

- Sadiqin, I. K & Samsuni. 2016. *Penerapan Brain Based Learning untuk Membentuk Pengetahuan dan Sikap Ilmiah Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Banjarmasin pada Materi Ikatan Kimia*. Paper presented at Seminar Nasional Pendidikan Fisika. Universitas Lambung Mangkurat.
- Sadiqin, I, K., Santoso, U, T & Sholahuddin, A. 2016. Problem Solving-Based Learning Tools to Improve The Science Problem Solving Skills of Junior High School Students. *The 4th Proceedings International Conference On Educational Research and Innovation*. Eds Suyanto, S., Nayono, S, E., Hidayah, R., Purnastuti, L., Sugito, Prodjosantoso, A, K., Pierewan, A, C., Margana., Arovah, N, I., dan Nuryanto, A. 3 (15), 65-74.
- Saparina, R., Santosa, S & Maridi. 2015. Pengaruh Model Brain Based Learning Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri Colomadu Tahun Pelajaran 2012/2013. *Bio-Pedagogi*, Vol. 4 (1), Pp 59-65.
- Sugiyono., Sutopo, S., & Nuryanto. 2014. *Pendidikan Beretika dan Berbudaya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suparno. 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tafsir, A. 2012. *Filsafat Pendidikan Islami*. Bandung: Rosdakarya.
- Tüfekçi, S & Demirel, M. 2009. The effect of brain based learning on achievement, retention, attitude and learning process. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 1 (1), pp, 1782-1791.
- Trilling, B. & Hood, P. 1999. Learning, Technology, and Education Reform in the Knowledge Age or "We're Wired, Webbed, and Windowed, Now What"? *Educational Technology*. p. 5-18.
- Wen, S. 2003. *Future of Education*. Batam: Lucky Publishers.
- Willis, Judy. 2011. *Metode Pengajaran dan Pembelajaran Berbasis kemampuan Otak*. Yogyakarta: Mitra Media.
- Wilujeng, I. 2016. *Implementasi Pembelajaran Sains dengan Pendidikan Karakter Berbasis Keterampilan Abad XXI*. Paper presented at Seminar Nasional Pendidikan Fisika. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

- Wismath, Shelly, L., Orr , D. 2015. Collaborative Learning in Problem Solving, A Case Study in Metacognitive Learning. *The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 6 (3), 1-19.
- Zaenul, A. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Zhao, Z.N. 2005. *Four 'Pillars of Learning' for the Reorientation and Reorganization of Curriculum, Reflections and Discussions*.

REVITALISASI NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN BAGI PELAJAR DI KOTA BANJARMASIN

Mutiani

mutiani@unlam.ac.id

ABSTRACT

There are various definitions express the meaning of the epic. In the other meaning of heroism limited to the properties of heroism contains in the deepest meaning of the practice everyday. It is Called patriotism or what we called nationalism. Although nationalism only an abstract nationalism, it was then creates individual characteristics of quality. In relation to culture, love and appreciate the history of Indonesia will be developing nation required media from which to embed it to the younger generation in this case is a student. One of the best step is to revitalize the values of heroism, especially local hero who often escape our attention. Many of the judge is limited to cultural creativity, taste, and intention alone. However, culture is an overall pattern of life (culture is complex, abstract, and spacious. Many aspects of culture help determine communicative behavior. The elements of the socio-cultural spread and include many human social activities).

Keywords: value epic, characteristic of the nation, culture and youths.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat

I. PENDAHULUAN

"Hiduplah Indonesia Raya" merupakan sebuah petikan dari syair lagu kebangsaan kita yakni Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Begitu susahnya Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang hakiki baik secara *de facto* maupun *de jure*. Menginjak akhir 1920-an, gagasan Indonesia sebagai cita-cita untuk dicapai" mengusir Belanda, dan memerdekakan tanah air menjadi determinasi dikalangan aktivis politik (Elson, 2009: 96). Jauh sebelum itu semua perjuangan rakyat Indonesia secara fisik sudah terjadi sejak awal abad XVII. Walaupun perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan, akan tetapi apa yang diperjuangkan tetap atas nama kebebasan untuk menjalani kehidupan tanpa adanya penjajahan. Perjalanan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memang tidak semudah yang dibayangkan. Malaysia mendapatkan kemerdekaan mereka dengan pemberian, maka Indonesia bisa berbangga telah merebut kemerdekaan dengan tumpah darah putra-putri bangsa.

Kejenuhan yang melanda bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertindas makin terasa ketika bermunculan elite politik dari kaum intelektual. Hal ini ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi lokal maupun nasional diberbagai daerah. Pergerakan rakyat Indonesia bukanlah bikinan kaum "penghasut" (Soekarno, 2010: 67). Hal ini kemudian merangsang perubahan pada pola perjuangan Indonesia secara eksplisit. Dikatakan bahwa awal perjuangan Indonesia adalah "otot fisik" kemudian menjadi "otak rasional" diawal abad XIX.

Kata "pahlawan" berasal dari bahasa Sanskerta *phala-wan* yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (*phala*) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama ([http. Wikipedia.com/diakses](http://Wikipedia.com/diakses) tanggal 09 September 2016). Pahlawan terbagi menjadi beberapa bagian: pahlawan pergerakan nasional, lokal, nasional, revolusi hingga tanpa tanda jasa (guru). Dalam tatanan negara kita, untuk menjadi pahlawan nasional diperlukan setidaknya baik moral maupun hukum (Adam, 2009: 70). Bertentangan dengan hal tersebut, kriteria dari kepahlawanan seharusnya tidak dilihat dari batasan jasa terhadap negeri saja. Masih banyak pahlawan lokal yang memiliki nilai-nilai moral dan pantas menjadi panutan kita semua.

Kalimantan Selatan memiliki torehan sejarah yang panjang. Diawali dengan perselisihan perebutan kekuasaan antar anggota keluarga kerajaan

hingga penghapusan status Kesultanan Banjar oleh Belanda tanggal 11 Juni 1860 dan mengganti statusnya menjadi daerah keresidenan. Pergolakan yang terjadi di tanah Borneo memunculkan pahlawan-pahlawan daerah. Beberapa diantaranya adalah Demang Lehman, Sultan Muhammad Seman, Pangeran Antasari, Hasan Basri, dan lain-lain. Banyak diantara kita menyepelekan perjuangan mereka. Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan persepsi tentang nilai kepahlawanan yang selama ini dipahami. Pemahaman yang terbatas pada hal-hal heroik inilah yang harus diperbaiki.

Generasi muda penerus bangsa mempunyai beban terbesar terletak pada pelajar. Pelajar memiliki kognitif sesuai dengan perkembangan pendidikan yang mereka jalani. Guna menciptakan generasi berkualitas, pemanfaatan media belajar harus dimaksimalkan. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan. Di samping itu, keluarga dan lingkungan memiliki peran yang serupa. Penafsiran makna yang tepat untuk kata kepahlawanan sangat membantu negara ini menciptakan masyarakat yang cinta akan tanah air. Kesetiaan dalam berbangsa dan bernegara akan membuat kita memaknai betapa pentingnya peran seorang pahlawan. Tidak peduli apakah pahlawan tersebut dari kalangan rakyat jelata, militer, maupun dari kaum bangsawan.

II. DEFINISI NASIONALISME

Nasionalisme secara etimologi berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa dipusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. pernyataan ini agak kabur. Kita perlu melangkah lebih jauh dan menetapkan sasaran utamanya, tempat nasionalisme berupaya mempertinggi derajat bangsa (<http://yudhim.blogspot.com/2016/01/nasionalisme.html>, diakses, 16 September 2016). Sasaran umum ini ada tiga otonomi nasional, kesatuan nasional dan identitas nasional. Kerja nasionalisme: suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu "bangsa" yang aktual dan potensial. Inilah definisi kerja yang didasarkan pada unsur umum dari ideal

nasionalis yang mempunyai gaya sendiri, sehingga berkarakter induktif. Definisi ini mengikat ideologi pada gerakan yang berorientasi sasaran, karena sebagai ideologi, nasionalisme menetapkan jenis-jenis tindakan tertentu. Konsep inti ideologilah yang menetapkan sasaran gerakan, sehingga membedakannya dengan jenis gerakan lainnya.

Di Indonesia, nasionalisme muncul secara perlahan. Konkret dimulai pada sejak Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I itu merupakan perkumpulan pemuda yang bersifat etnis yang mulai melebur kedalam gerakan nasional yang lebih luas. Manifestasi politik yang dilaksanakan pada Kongres Pemuda II tahun 1928 muncullah sumpah pemuda yang merupakan perekat wacana kebangsaan Indonesia. Selain itu, kongres tersebut juga menghasilkan sebuah organisasi Indonesia Muda (*Jong Indonesia*) (Tilaar, 2007: 173). Organisasi ini diharapkan mampu melakukan propaganda dan mempersiapkan perwujudan kemerdekaan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

III. KAJIAN MENGENAI KALIMANTAN SELATAN DALAM PERSPEKTIF KESEJARAHAN DAN BUDAYA

Kalimantan Selatan beribukotakan Banjarmasin adalah sebuah provinsi yang berada di pulau Borneo (Kalimantan). Sebuah kota yang memiliki lika-liku dalam menorehkan sejarahnya di kancah nasional. Intrik keluarga kesultanan mengenai perebutan kekuasaan mewarnai perkembangannya. Banjarmasin menjadi kancah dari bentuk perlawanan Indonesia yang lazim (Ricklefs, 2008: 308). Pasca dihapuskannya Kesultanan Banjar Secara sepihak ditahun 1860 membuat pergolakan-pergolakan di tanah Borneo.

Satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yakni 28 April 1859, pecahnya Perang Banjar, pasukan Antasari dengan 300 prajurit menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron. Serangan di Marabahan, Gunung Jabuk dan Tabanio, dipimpin Demang Lehman, H. Buyasin dan Kyai Langlang. Serangan di Pulau Petak, Pulau Telo dan disepanjang Sungai Barito, dipimpin Tumenggung Surapati dan Pambakal Sulil. *Sweeping* di Banua Lima, dipimpin Tumenggung Jalil, Pambakal Gafur, Duwahap, Dulahat dan Penghulu Abdul Gani serta serangan terhadap Kapal Cipanas di Martapura.

Perang Banjar hanya satu dari sekian pemberontakan atau perlawanan masyarakat Banjar pada era kolonialisme. Pemberontakan itulah yang memacu munculnya pahlawan-pahlawan daerah. Berdasarkan dengan periodisasi masing-masing, hingga saat ini mereka memiliki sebutan yang berbeda-beda (Bondan, 1953: 71). Pasca dihapuskannya Kesultanan Banjar 11 Juni 1860, oleh Belanda dengan proklamasi yang ditandatangani Residen Surakarta FN. Nieuwenhuijzen yang kemudian merangkap sebagai Komisararis Pemerintah Belanda untuk Daerah *Afdeeling* Kalimantan Selatan-Timur. Wilayah tersebut adalah wilayah administratif pemerintahan yang dikenal dengan sebutan "*Residentie Zuider En Ooster Afdeeling Van Borneo (Residentie Z & O Afdeeling Van Borneo)*". Isi dari desentralisasi resmi diperkenalkan kedalam pemerintahan sejak tahun 1903 melalui UU Desentralisasi seluruh wilayah Hindia Belanda (Koroh, 2010: 71).

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi mengalami kemajuan yang cukup pesat diberbagai aspek (ekonomi, teknologi, kebudayaan modern, dll.). Perkembangan yang dominan dari pada wilayah lain di Borneo menyebabkan perbedaan yang signifikan. Sejak abad pertengahan, di Kalimantan Selatan terjadi proses akulturasi budaya. Akulturasi tersebut tidak terbatas pada agama Hindu, Islam, Kristen semata. Akulturasi secara umum berimbas kepada kekayaan budaya Banjar nantinya. Dalam konteks problematika globalisasi akulturasi inilah yang menjadi bumerang dalam tiap permasalahan budaya asli Banjar. Oleh karena, dalam keaslian budaya Banjar terdapat mitologi-mitologi religius yang menjadi simbol budaya suatu daerah.

Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan (atau biasa disebut *sub-kultur*), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya sub-kultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, esthetik, agama, pekerjaan, pandangan politik dan gender. Sebuah persepsi kebudayaan dalam perspektif Kalimantan Selatan adalah bagian dari kekayaan kultural dari bangsa Indonesia.

IV. PENDIDIKAN KARAKTER DAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

Filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia berkaitan dengan badan dan ruh. Dalam pandangan Islam ditegaskan bahwa badan dan ruh bagian dari substansi alam. Dalam adalah makhluk keduanya yang diciptakan oleh Allah

(Jalaludin dan Abdullah, 2009: 130). Dalam konteks kekinian, program utama dalam pendidikan modern adalah pembinaan terhadap manusia agar menjadi manusia yang ideal. Manusia adalah makhluk yang sudah berabad-abad menghuni bumi ini. Sebelum terjadi pendidikan diluar dirinya, manusia cenderung berusaha mengerti berusaha mengerti dan mencari hakikat kepribadian siapa diri mereka.

Dalam prosesnya, peran efektif pendidikan terhadap pembinaan kepribadian manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan didukung oleh faktor pembawaan manusia sejak lahir. Dalam konteks pemahaman nilai-nilai budaya, media terbaik adalah pendidikan yang memegang peran tersebut. Pendidikan mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai (Langgulung, 1986: 38-41). Nilai-nilai tersebut akan meningkatkan potensi yang ada pada diri manusia.

John Locke memiliki gabungan pandangan tentang potensi manusia. Pandangan tersebut adalah naturalism dan empirisme. Secara kodrati manusia memiliki potensi yang disebut bakat. Agar potensi tersebut bertumbuh kembang baik, maka perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan dan bimbingan dari pendidikan (Langgulung, 1986: 192). Oleh karena itu, negara kita memerlukan sebuah media pendidikan berbasis karakter guna merevitalisasi nilai kepahlawanan di kalangan pelajar. Hal tersebut dimaksudkan bisa meningkatkan kualitas individu agar lebih baik.

Secara substantif karakter terdiri atas 3 (tiga) *operatives values, values in action*, atau tiga unjuk perilaku yang satu sama lain saling berkaitan, yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior*. Karakter yang baik atau *good karakter* terdiri atas proses *psikologis knowing the good, desiring the good, and doing the good habit of the mind, habit of the heart, and habit of action* (Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional_Grand Design Pendidikan Karakter.html/dikti.go.id (diakses tanggal 02 September 2016).

Ketiga substansi dan proses psikologis tersebut bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral individu. Dengan kata lain, karakter kita maknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik, yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, oleh raga, dan olah rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti,

pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Sebuah rangkaian pemahaman dimana nilai-nilai secara khusus dipertajam agar anak-anak bisa mengaplikasikannya kedalam kehidupan masing-masing. Perubahan paradigma pelajar mengenai kepahlawan selayaknya bisa diperbaiki melalui pendidikan karakter. Komitmen pada pendidikan karakter, yakni dengan melalui pendidikan karakter secara sungguh-sungguh kita tumbuhkan peserta didik menjadi pribadi utuh yang menginternalisasi kebajikan (tahu dan mau), dan terbiasa mewujudkan kebajikan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia memiliki lika-liku perjuangan hidup sebelum merdeka. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya" demikian sebuah kalimat yang sering diucapkan oleh Soekarno. Kalimat ini dimaksudkan agar kita memahami, dan meneladani sikap, sifat, dan semangat pahlawan yang rela berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pahlawan adalah seorang sosok yang gagah berani dan memiliki pengorbanan dan keteladanan yang luar biasa dibandingkan rakyat biasa. Dalam dimensi sosial, nilai adalah norma-norma, standar perilaku atau prinsip-prinsip yang mengarahkan atau membimbing perilaku seseorang. Para pahlawan dan pejuang bangsa telah berhasil mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, sudah barang tentu dibimbing oleh nilai-nilai tertentu, yaitu nasionalisme, patriotisme dan kewarganegaraan.

Nilai nasionalisme dapat digambarkan sebagai suatu semangat atau rasa memiliki sebuah bangsa. Penjabaran dari nilai ini adalah adanya kesediaan untuk berkorban demi tegaknya bangsa. Nilai Patriotisme dapat diartikan sebagai suatu semangat atau rasa rela hati menyerahkan harta benda bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Nilai Kewarganegaraan yakni memandang bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagai seorang warga negara. Menjadi warga negara, berarti mempunyai hak sosial dan ikut serta dalam proses kehidupan sosial. Sebagai nilai-nilai dasar perjuangan, hal ini harus terus dipertahankan oleh generasi muda.

V. PERJUANGAN PAHLAWAN DAN NASIONALISME PELAJAR

Setiap perjuangan dalam suatu wilayah selalu memunculkan sosok pahlawan. Perjuangan tidak hanya tersorot pada batasan wilayah nasional saja. Akan tetapi, daerah juga melakukan hal serupa dalam tiap perjuangan. Baku tembak, tumpahan darah sejatinya mewarnai tiap perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan. Kondisi yang memaksakan terjadinya kekerasan adalah bagian dari sisi heroik sebuah negara. Bangsa dan negara yang memiliki kisah panjang sebelum menghirup kemerdekaan hendaknya memori ini tidak pernah luput dari pandangan kita.

Mengingat jasa pahlawan-pahlawan, negara membuat perayaan baik secara nasional maupun seremonial saja. Upacara bendera adalah bagian dari konkret penghargaan kepada pahlawan. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman akan makna nilai kepahlawanan. Buaihan globalisasi menyebabkan terjadinya degradasi wawasan kebangsaan bagi pelajar. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan, kemanakah semangat '45 yang sering dijelaskan kepada pelajar oleh guru-guru di sekolah.

Nilai kepahlawanan sejatinya bersifat abstrak. Seseorang tidak bisa menjabarkan secara jelas karena memang sesungguhnya tidak ada jawaban benar ataupun salah. Adapun indikator tingkat pemahaman pelajar adalah bagaimana mereka bisa menyikapi nilai kepahlawanan itu sendiri. Acuh tak acuh merupakan sifat dominan yang mereka tunjukkan. Pengetahuan mereka akan kepahlawanan hanya pada pahlawan nasional. Begitu banyak pahlawan daerah mereka hampir tidak mengetahuinya. Dalih kurangnya fasilitas pengetahuan akan hal tersebut menjadi alasan utama. Dalam ranah pendidikan pelajar menyatakan bahwa guru sebagai komponen utama tidak memahami dengan baik makna kepahlawanan itu sendiri.

Pelajar hendaknya menyadari bahwa tantangan sesungguhnya muncul dalam bentuk nonmiliter, seperti: ideologi, ekonomi, sosial-budaya. Walaupun dalam bentuk nyata kita juga menghadapi problematika gerakan separatis, terorisme, hingga pelanggaran perbatasan oleh negara tetangga. Keamanan nasional tidak lagi bisa menjadi doktrin yang menjadi alasan negara untuk menjadi dominan karena keamanan negara juga menyangkut aspek kebangsaan, kemasyarakatan, dan individu. Dalam konteks kebangsaan, keamanan nasional diamanatkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan

makmur. Dalam konteks kemasyarakatan dan individu keamanan harus bisa dirasakan sampai ke tingkat individu, serta pada kemudahan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok (pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) (Karim, 2010: 87-94).

Perjuangan pahlawan yang diiringi dengan pengorbanan, keberanian, tanggung jawab, semangat pantang menyerah merupakan sebuah keteladanan yang patut untuk ditiru. Dalam konteks kekinian pelajar tidak perlu lagi mengangkat senjata untuk membela negara tercinta. Bukan berarti pasca perang kemerdekaan hal itu serta merta hilang di kehidupan kita. Perubahan situasi dan kondisi sosial di Indonesia menuntut kita untuk bersaing melawan “masalah-masalah” untuk mempertahankan keutuhan Bhinneka Tunggal Ika.

Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang.

Dari cara berpakaian banyak remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tidak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi anak muda internet sudah menjadi santapan mereka sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka.

Pengaruh di atas jika dibiarkan, maka kita dapat memprediksi bagaimana generasi muda nantinya. Moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan

anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut negatif globalisasi lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu:

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri.
2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya.
3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
4. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.

Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menjadi filter kehidupan generasi muda khususnya pelajar terhadap pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa. Dengan demikian kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa.

VI. PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI BASIS PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA

John Stuart Mill (filosof Inggris, 1806-1873 M) menjabarkan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memang mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin dan kelangsungan kehidupan

bangsa yang bersangkutan (UU. No. Tahun 1989 tentang SPN 1992: 23). Tujuan pendidikan tidak hanya terbatas sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan sosial budaya, tapi juga sebagai sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi berikutnya.

Pendidikan diharapkan bisa menghasilkan manusia yang layak dan berkemampuan, yaitu: pengembangan karakter yang matang, mendirikan hubungan etik, kecintaan dari keluarga, dan warganegara yang baik (*International Education Foundation*, 2000). Pendidikan karakter secara istilah selalu dikaitkan dengan konteks kebangsaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter sudah diajarkan oleh keluarga. Keluarga adalah muara dari penanaman nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut kemudian dikembangkan dalam ranah pendidikan di sekolah.

Sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sudah dilakukan dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter sebagaimana disebut di atas. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Lembaga pendidikan atau sekolah yang telah melaksanakan pendidikan karakter secara berhasil dengan model yang mereka kembangkan sendiri-sendiri. Mereka inilah yang menjadi *best practices* dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Namun, hal itu tentu saja belum cukup, karena berlangsung secara sporadis atau parsial dan pengaruhnya secara nasional tidak begitu besar. Oleh karena itu perlu ada gerakan nasional pendidikan karakter yang diprogramkan secara sistemik dan terintegrasi.

Di era globalisasi pemuda tidak menghadapi bangsa kolonial ataupun kaum feodal yang menindas mereka. Akan tetapi, lebih dari itu semua tantangan yang lebih berat ada di pundak generasi muda yakni menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara yang merdeka. Secara konseptual karakteristik nasionalisme di Indonesia adalah *nasionalisme kolektif* (Elson: 2009: 101). Hal ini secara implisit menandakan bahwa untuk merangsang nasionalisme pada generasi muda “kita” diperlukan contoh nyata dalam pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan karakter adalah salah satu cara terbaik dalam memperbaiki nilai-nilai kehidupan generasi muda. Kebijakan sendiri diperlukan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Metode-metode pengajaran yang cocok dengan basis nilai-nilai kehidupan kiranya mampu mengembalikan kearifan yang sekarang mulai pudar. Berdasarkan situs Koran Kompas dalam tajuk rencananya mengungkap temuan menarik soal karakter generasi muda. Generasi muda Indonesia bersikap *apolitis*, *pragmatis*, dan *optimistis*. Penurunan kepedulian generasi pemuda terhadap aspek kebangsaan hingga ranah politik merupakan momok bersama (<http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/11/10244662/Pendidikan.Karakter.Integra> (diakses tanggal 20 September 2016)).

Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Oleh karena itu muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi *moral reasoning*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* (Lickona:1991: 101-109).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, diyakini bahwa nilai dan karakter yang secara legal-formal dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan hidup pada saat ini dan di masa mendatang akan datang. Karena itu pengembangan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa yang diperoleh melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, akan mendorong mereka menjadi anggota masyarakat, anak bangsa, dan warga negara yang memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

VII. SIMPULAN

Generasi muda atau secara khusus pelajar merupakan tumpuan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Harapan demi harapan demi untuk menciptakan generasi yang lebih baik selalu ada pada mereka. Permasalahan klasik yang sering muncul pada generasi muda adalah masalah pengikisan rasa cinta kebangsaan atau nasionalisme. Perayaan hari besar kebangsaan dilaksanakan hanya sebatas simbolik saja. Tidak terdapat penghayatan yang mendalam sebagai bahan introspeksi diri kemudian hari. Globalisasi adalah bagian dari pengikisan nasionalisme tersebut, membuat globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Secara umum dampak positif dari globalisme yakni dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Sedangkan satu dampak negatif yakni munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. Adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Pelajar memang jelas meninggalkan nilai-nilai kepahlawanan yang dulu sangat diagung-agungkan. Revitalisasi nilai-nilai kepahlawanan di kalangan pelajar menjadi mutlak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, pahlawan adalah bagian terpenting pada peristiwa sejarah.

Dalam melaksanakan revitalisasi, pengetahuan akan pahlawan saja tidak cukup diperlukan sebuah langkah nyata yakni memulai prosedur pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Sebuah pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kehidupan akan membuat pelajar mengerti makna nasionalisme, nilai kepahlawanan secara menyeluruh. Secara substantif *character* terdiri atas 3 (tiga) *operatives values, values in action*, atau tiga unjuk prilaku yang satu sama lain saling berkaitan, yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior*. Ketiga substansi dan proses psikologis tersebut bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral individu. Dengan kata lain, karakter kita maknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata

berprilaku baik, yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, oleh raga, dan olah rasa dan karsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku Dan Peristiwa*. Jakarta: Kompas.
- Alex, A. Koroh. 2010. *Lintasan Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Selatan 1901- 1957: Struktur, Isi, dan semangat*. Banjarbaru: Scripta Cendikia.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Fadjar.
- Elson. RE. 2009. *The Idea Of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- H. A. R. Tilaar. 2007. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irawan, Alexander, dkk. 2001. *Nasionalisme Etnisitas*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Jalaludin dan Abdullah Ldi. 2009. *Filsafat Pendidikan:Manusia,Filsafat, dan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Karim, Mulyawan. 2010. *Rindu Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Kartodirjo, Sartono, dkk.1995. *Negara dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nasution, S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Nawawi, Ramli, dkk.1980/1981. *Sejarah Pendidikan Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.
- Putro, Herry Porda Nugroho. *Lokalitas dan Karakter Dalam Pendidikan* (Makalah: Tidak diterbitkan). Seminar Pendidikan Nasional (25 April 2011).
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2000*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sage, A Lizuardi. 1996. *Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam*. Jakarta: Citra Media.
- Soekarno. 2010. *Indonesia Menggugat*. Ed. Staff Ahli Fraksi PDI Perjuangan.
- Syed Sajjad Husain & Syed Ali Asharaf. 1986. *Krisis Pendidikan Islam, Alih Bahasa, dan Penyunting Rahmani Astuti*. Bandung: Risalah, Cet. Pertama.

Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Lengkap Ilmiah Populer*. Gita Media Press.

MEDIA CYBER:

[http. Wikipedia.com](http://Wikipedia.com)/diakses tanggal 09 September 2016.

<http://yudhim.blogspot.com/2016/01/nasionalisme.html>, diakses, 16 September 2016.

<http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/11/10244662/Pendidikan.Karakter.Integra> (diakses tanggal 20 September 2016).

PENERAPAN PRINSIP KESANTUNAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Noor Cahaya

chylngstk@gmail.com

ABSTRAK

Komunikasi merupakan salah satu fungsi umum dari bahasa. Berkomunikasi secara tepat, informasi akan tersampaikan dengan lancar. Keberlangsungan sebuah komunikasi berkaitan erat dengan cara penyampaiannya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat ditunjang oleh keefektifan informasi dan perilaku santun dalam berbahasa. Kesantunan berkaitan dengan bahasa dan realitas sosial. Strategi yang digunakan dalam kesantunan meliputi kesantunan positif dan negatif. Dua strategi tersebut digunakan untuk memperlancar komunikasi agar lebih efektif. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari kegiatan berkomunikasi yang hanya akan mengancam mitra tutur. Pada pembelajaran di sekolah, kesantunan berbahasa sangat penting untuk menghindarkan dari sifat otoriter guru yang hanya akan menghambat kreativitas berpikir peserta didik. Selain itu, kesantunan berbahasa akan memberikan aplikasi nilai yang akan membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Peserta didik akan belajar untuk bersikap santun dalam berkomunikasi, khususnya di dalam kelas ketika proses belajar-mengajar berlangsung. Dengan demikian, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan bermakna, pada guru dan peserta didiknya.

Kata kunci: prinsip kesantunan dan efektivitas pembelajaran.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi PBSI FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Berbicara merupakan suatu keterampilan dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Berbicara memiliki kedudukan yang penting karena tidak terlepas dari fungsi manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang melakukan percakapan dalam membentuk interaksi antarpersonal dalam pemeliharaan hubungan sosial di masyarakat. Ismari (1995: 2) menyamakan kegiatan bicara dengan percakapan, yakni sebagai suatu aktivitas yang diatur oleh kaidah-kaidah, norma-norma, dan konvensi-konvensi yang dipelajari sebagai bagian dari proses pemerolehan kompetensi berbahasa. Budaya berkomunikasi menuntut setiap orang untuk memperhatikan kesantunan. Kesantunan terkait dengan penerapan maksim. Maksim merupakan ketentuan yang mengatur percakapan. Penutur dan petutur diharapkan dapat bertutur dengan baik sesuai dengan pemahaman terhadap penerapan prinsip kesantunan.

Penerapan prinsip kesantunan pada proses belajar-mengajar perlu memperhatikan aspek-aspek peristiwa tutur yang sedang terjadi. Leech (1993: 19) mengemukakan mengenai aspek-aspek dari peristiwa tutur yang meliputi 1) penutur dan petutur, 2) konteks tuturan, 3) tujuan tuturan, 4) tuturan sebagai bentuk tindak atau aktivitas, dan 5) tuturan sebagai produk tindak. Kelima aspek-aspek ini secara simultan membentuk peristiwa tutur.

Penelitian terhadap penggunaan bahasa guru dan peserta didik merupakan hal yang penting. Ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran terhadap interaksi kebahasaan yang berlangsung dalam proses belajar-mengajar di kelas. Interaksi kebahasaan berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas proses belajar-mengajar. Apabila penggunaan bahasa tidak dikuasai dengan baik, akibatnya proses belajar-mengajar akan terhambat. Informasi yang disampaikan oleh guru tidak dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.

Pada interaksi di kelas, bahasa yang digunakan guru berkaitan dengan pola penguasaan. Guru yang lebih dominan dapat menyebabkan terjadinya kekakuan dalam interaksi. Peserta didik dikondisikan untuk tidak diberi kesempatan berlatih dan kreatif dalam penggunaan bahasanya. Tuturan peserta didik pada bentuk ini lebih banyak yang bersifat langsung, sopan, lebih berhati-hati dalam penggunaan tuturan, dan kalimatnya pendek-pendek. Sementara itu, idealnya suatu interaksi yang terjadi di kelas adalah adanya sikap saling

menghargai terhadap pendapat dan pemberian kesempatan dalam berkreaitivitas. Umumnya, bentuk interaksi yang ideal ini seimbang antara guru dan peserta didik, bahkan ada kemungkinan peserta didik yang lebih mendominasi dalam keaktifan, sementara itu, guru hanya sebagai pendamping dan pengarah kepada pembelajaran yang lebih mandiri. Interaksi seperti ini sangat baik diterapkan pada kegiatan di kelas. Tutaran pada bentuk interaksi seperti ini tidak berbeda jauh dengan tuturan pada interaksi yang didominasi guru. Membedakan hanyalah adanya penghargaan pendapat dan kreativitas kerja peserta didik tanpa tekanan mental yang menjatuhkan motivasinya.

Makalah ini membahas penerapan prinsip kesantunan dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penerapan prinsip kesantunan ini meliputi strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendidik maupun calon pendidik dalam berkomunikasi dengan peserta didik agar memperhatikan kesantunan. Dengan demikian, kesantunan akan menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan penuh kekeluargaan, bukan suasana otoriter yang semakin mematikan daya kreativitas berpikir peserta didik.

II. TINDAK TUTUR

Tindak tutur dapat dinyatakan sebagai segala tindak yang kita lakukan melalui berbicara, segala yang kita lakukan ketika kita berbicara (Ismari, 1995: 76). Akan tetapi, definisi ini terlalu luas untuk sebagian tujuan. Bahasa digunakan untuk membangun jembatan pemahaman dan solidaritas, untuk menyatukan kekuatan-kekuatan politik, untuk menyatakan argumentasi, untuk menyampaikan informasi kepada sesama, untuk menghibur, untuk memberikan kritik dan saran, singkatnya untuk berkomunikasi.

Pengertian yang lebih sempit mengenai tindak tutur dapat dinyatakan sebagai satuan terkecil dari komunikasi bahasa yang memiliki fungsi dengan memperlihatkan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya bergantung pada kemampuan penutur dalam menghasilkan suatu kalimat dengan kondisi tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Richards (Suyono, 1990: 5) yang berpendapat mengenai tindak tutur sebagai *the things we actually do when we speak* "sesuatu yang benar-benar kita lakukan ketika bertutur" atau *the minimal unit of speaking which can be said to have function* "satuan terkecil

dari unit tuturan yang dapat dikatakan memiliki fungsi". Pendapat yang mirip juga ditemukan pada pernyataan Arifin dan Rani (2000: 136) yang menganggap tindak tutur sebagai produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan satuan terkecil dari komunikasi bahasa. Chaer dan Agustina (1995: 64) lebih mengkhususkan tindak tutur sebagai gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

Pada umumnya seorang guru melakukan tindak tutur dalam membentuk wacana kelas yang komunikatif. Searle mengklasifikasikan tindak tutur yang didasarkan pada maksud penutur ketika berbicara. Tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle sebagai berikut:

2.1 Tindak Representatif

Tindak representatif merupakan tindak bahasa yang menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu sebagaimana adanya, misalnya tindak menyatakan, tindak menunjukkan, dan tindak menjelaskan (Suyitno, 2002: 104). Levinson seperti yang dikutip Arifin dan Rani (2000: 211) memberikan pengertian terhadap tindak representatif sebagai tindak tutur untuk menyampaikan proposisi yang benar. Termasuk dalam tindak ini adalah tindak memberi informasi, memberi izin, keluhan, permintaan ketegasan maksud tuturan, dan lainnya. Pengertian itu ditambahkan lagi oleh Searle (Syamsuddin, et. al., 1998: 97) yang mengemukakan tindak tutur representatif sebagai tindak yang berfungsi menetapkan atau menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu terjadi dengan apa adanya, contohnya pemberian pernyataan, saran, pelaporan, pengeluhan, dan sebagainya. Ketiga pernyataan di atas dipertegas oleh Bach dan Hamish yang dikutip Arifin dan Rani (2000: 211) bahwa tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang biasanya disampaikan dan dimaksudkan untuk memperoleh respons tertentu. Respons ini merupakan suatu tindakan dalam memberikan balasan terhadap apa yang diinginkan penutur.

2.2 Tindak Komisif

Berbeda dengan tindak tutur representatif, tindak tutur komisif dalam pandangan Searle (Arifin dan Rani, 2000: 139) dianggap sebagai tindak tutur yang memiliki fungsi untuk mendorong penutur melakukan sesuatu. Termasuk dalam tindak komisif itu sendiri adalah bersumpah, berjanji, dan mengajukan usulan. Jumadi (2006: 71) ikut menambahkan pendapatnya terhadap tindak

tutur komisif sebagai salah satu jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk membuat dirinya sendiri berkomitmen dalam melakukan tindakan tertentu di masa yang akan datang.

2.3 Tindak Direktif

Tindak tutur berikutnya adalah tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang mengekspresikan maksud dalam bentuk perintah atau permintaan untuk menghasilkan efek melalui suatu tindakan pada mitra tuturnya. Levinson dalam buku *Prinsip-Prinsip Analisis Wacana* yang ditulis Arifin dan Rani (2000: 206), mengemukakan tindak tutur direktif sebagai tindak tutur yang bermaksud untuk menghasilkan efek melalui suatu tindakan oleh pendengar. Tidak berbeda jauh dengan Searle yang juga dikutip oleh Arifin dan Rani (2000: 206) mengemukakan tindak tutur direktif sebagai tindak tutur yang mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu. Pendapat tersebut dipertegas kembali oleh Bach dan Harmish (Arifin dan Rani, 2000: 206) yang mengartikan tindak tutur direktif sebagai tindak tutur yang mengekspresikan maksud penutur agar mitra tuturnya melakukan suatu tindakan.

2.4 Tindak Ekspresif

Selain tindak tutur representatif, komisif, dan direktif, juga terdapat tindak tutur ekspresif. Searle (Arifin dan Rani, 2000: 139) mengemukakan bahwa tindak ekspresif adalah tindak tutur yang berkaitan dengan perasaan dan sikap. Tindak tutur ini berupa tindakan meminta maaf, humor, memuji, basa-basi, berterima kasih, dan sebagainya. Tindak ekspresif ini memiliki fungsi untuk mengekspresikan sikap psikologis pembicara terhadap pendengar sehubungan dengan keadaan tertentu.

2.5 Tindak Deklaratif

Tindak tutur yang terakhir yang dikelompokkan Searle (Arifin dan Rani, 2000:139) adalah tindak tutur deklaratif. Tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang menghubungkan isi proposisi dengan realitas yang sebenarnya. Tindak tutur ini dapat dilihat pada tindak menghukum, menetapkan, memecat, dan memberi nama. Oleh Suyono (1990: 7) tindak deklaratif dinyatakan sebagai tindak tutur yang berfungsi untuk memantapkan atau membenarkan sesuatu tindak tutur sebelumnya. Tindak tutur ini dinyatakan dengan setuju, tidak setuju, benar, dan lain-lain.

III. PRINSIP KESANTUNAN

Proses bertutur merupakan tindak sosial dan kultural yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kesantunan. Kesantunan selalu dipandang sebagai sebuah fenomena yang berkaitan dengan bahasa dan realitas sosial. Budaya Asia lebih menekankan kepada rasa hormat, budaya Eropa cenderung menekankan kepada penjagaan jarak, sedangkan budaya Amerika menekankan kepada persahabatan. Oleh karena itu, para ahli pragmatik memasukkan kesantunan sebagai salah satu parameter pragmatik.

Kaidah kesantunan lebih mempertimbangkan permasalahan sosial. Jika pendengar memperhatikan bahwa penutur tampak tidak mengikuti prinsip kerja sama, mereka akan berusaha mencari penjelasan yang terdapat dalam kaidah kesantunan: jika penutur tidak jelas, kemungkinan ia sedang berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang menjengkelkan.

Teori kesantunan Brown dan Levinson (Ismari, 1993: 10) menyajikan realisasi tindak tutur yang memengaruhi bentuk interaksi percakapan. Mereka mengawalinya dengan premis bahwa untuk berbagai tindak tutur, ketika dua pembicara sedang berinteraksi, bermacam-macam tipe tantangan ditujukan baik untuk 'face' (muka) penutur maupun 'face' (muka) petutur. Seperti yang dikutip Eelen (2006: 5), Brown dan Levinson memandang kadar dan jenis kesantunan yang berlaku pada tindak tutur tertentu ditentukan oleh 'bobot' jenis kesantunan yang diperhitungkan oleh para penutur dari tiga variabel sosial: P (perbedaan kekuasaan), D (perbedaan jarak), dan R (peringkat atau ranking). Mereka mengaitkan kesantunan dengan penghindaran konflik. Hal ini didasarkan pada tindakan penyelamatan muka (*saving face-act*) dengan penghindaran tindakan mengancam muka (*threatening face-act*). Tema sentral yang digunakan adalah *rasionalitas* dan *muka*.

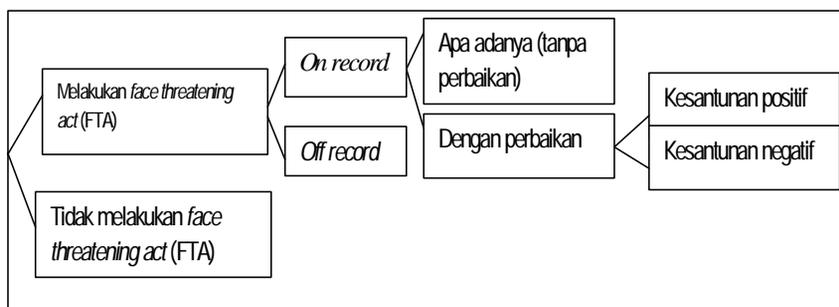
Jumadi (2005: 52) menjelaskannya sebagai berikut:

Rasionalitas adalah alasan atau logika, sedangkan *muka* adalah keinginan yang terdiri atas dua jenis, yakni muka negatif yang merupakan keinginan bahwa tindakan seseorang untuk tidak dihalangi oleh orang lain; dan muka positif adalah harapan seseorang yang diinginkan oleh orang lain.

Teori kesantunan Brown dan Levinson menyatakan bahwa sebagian besar tindak tutur selalu mengancam keinginan muka penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, kesantunan terlibat dalam upaya memperbaiki ancaman muka. Dengan demikian, dibedakan tiga strategi utama seperti yang dikutip Eelen (2006: 4).

[...] tiga strategi utama untuk melakukan tindak tutur: *kesantunan positif* (ekspresi solidaritas, dengan memperhatikan muka positif pendengar), *kesantunan negatif* (ekspresi pemaksaan dengan memperhatikan keinginan muka negatif pendengar), dan *kesantunan off-record* (penghindaran pemaksaan tertentu, misalnya memberikan isyarat sebagai pengganti pengajuan permohonan langsung).

Pada umumnya penutur memilih strategi khusus dalam penyusunan kontribusi komunikatif. Ketika penutur berada dalam situasi saat tindak mengancam muka, sebaiknya yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan yang mengarah pada pohon keputusan. Dengan demikian, penutur akan memilih alat linguistik yang tepat untuk digunakan dalam mencapai strategi pilihan. Alat-alat linguistik yang berbeda berkaitan dengan pemilihan strategi tertentu. Misalnya untuk sebuah permohonan, perintah langsung dianggap sebagai strategi yang tidak sopan (*Berikan gula itu!*); sedangkan mendahului permohonan tersebut dengan sebuah pujian merupakan strategi kesantunan yang positif (*Manis sekali penampilanmu hari ini, apakah sedikit gula yang semanis dirimu dapat saya minta?*); penggunaan strategi konvensional tak langsung merupakan strategi kesantunan yang negatif (*Dapatkah kamu memberi saya gula?*); pemberian isyarat dianggap memenuhi syarat sebagai strategi yang sopan (*Teh ini dapat diberi sedikit gula lagi*); sedangkan meminum teh yang terasa hambar tanpa memberikan komentar apa pun merupakan cara yang tepat untuk tidak melakukan tindak mengancam muka (FTA).



IV. STRATEGI KESANTUNAN POSITIF

Strategi kesantunan positif merupakan tindak penyelamatan muka dengan memperhatikan ekspresi solidaritas mitra tuturnya. Strategi ini lebih menekankan pada hubungan kedekatan antara penutur dan tutur.

Strategi kesantunan positif tidak terlalu banyak digunakan dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Strategi kesantunan positif digunakan untuk membangun ekspresi solidaritas antara guru dan peserta didik saat proses belajar-mengajar berlangsung dalam interaksi kebahasaan. Perhatikan kutipan (1) berikut:

- (1) PD: Nabi Sulaiman diberi raja jin air kehidupan yang dapat membuatnya abadi. Akan tetapi, raja jin ragu untuk meminumnya. Ia kemudian memanggil binatang-binatang untuk berembuk, airnya itu diminum atau tidak? Semua binatang menyuruh meminumnya. Tapi, ada seekor binatang yang dianggap bijaksana yang tidak datang sehingga tidak dapat dimintai pendapatnya. Jadi Nabi Sulaiman memerintahkan kudanya menjemput. Tapi, landak tidak segera pergi bersama kuda. Karena itu, Nabi Sulaiman marah dan meminta anjing untuk menjemput landak. Karena landak takut anjing akan memfitnahnya maka ia pun segera pergi menghadap Nabi Sulaiman dan minta maaf. Nabi Sulaiman pun memaafkan kemudian Nabi Sulaiman meminta pendapat landak terhadap air kehidupan. Menurut landak, air kehidupan akan membuatnya kekal abadi, tetapi di sisi lain Nabi Sulaiman akan kehilangan orang-orang yang disayanginya. Mendengar seperti itu akhirnya air kehidupan itu pun tidak jadi diminum

Nabi Sulaiman. Karena kehidupan seperti itu tidaklah ada gunanya. Tamat.

Guru: Ya. Bagus ya ceritanya. (a)

Tepuk tangan buat teman kita! (b)

Kutipan (1) merupakan contoh penggunaan strategi kesantunan positif. Strategi ini diawali dengan tuturan (a) yang berisikan tindak ekspresif. Tindak yang menggambarkan ekspresi kepuasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik (menceritakan kembali isi hikayat). Kemudian, guru menggunakan strategi positif pada tuturan (b) dalam bentuk tindak direktif yang berisikan perintah kepada peserta didik lainnya untuk menghargai hasil kerja temannya. Bentuk yang digunakan dalam strategi ini adalah tuturan langsung yang digunakan melalui penekanan pada ekspresi solidaritas kelompok yang ditandai dengan penggunaan *teman kita*.

Selain penggunaan ekspresi solidaritas kelompok yang ditandai dengan *teman kita*, juga terdapat tuturan yang hanya ditandai dengan *kita*. Penggunaan *teman kita* memiliki nilai yang lebih santun daripada *kita*. Penandaan seperti ini juga termasuk penggunaan strategi kesantunan positif. Hal ini dapat dilihat pada contoh kutipan (2) berikut:

(2) Guru: Hari ini *kita* akan bersama-sama memeriksa hasil ulangan kalian kemarin.
Bagikan ya! (guru meminta seorang peserta didik untuk membagikan hasil ulangan).

Penggunaan penanda *kita* sebagai penanda ekspresi solidaritas pada kutipan (2) dilakukan oleh guru sebagai penciptaan wujud kebersamaan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun motivasi kepada peserta didik agar terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa harus takut salah karena dikerjakan bersama-sama. Kutipan (2) berisikan tindak direktif yang digunakan guru untuk memerintah peserta didik memulai mengerjakan sesuatu bersama-sama. Tindak direktif ini disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan dalam bentuk tuturan langsung dari guru kepada peserta didik.

Strategi kesantunan positif untuk membangun motivasi peserta didik juga ditemukan dalam penggunaan tuturan yang ditandai dengan *Ayo*. Penanda ini merupakan ajakan secara langsung baik dari guru maupun kepada peserta didik. Berikut kutipan yang menyajikan strategi kesantunan positif:

(3) Guru : *Ayo* Dan, menculik tadi apa artinya?

(4) Guru : Nomor tiga, Reza.

PD : *Ayo* Reza!

Kutipan (3) merupakan strategi kesantunan positif dari guru kepada peserta didik dalam bentuk tindak direktif yang ditandai *ayo*. Dalam hal ini, guru memberikan dorongan semangat (motivasi) terhadap peserta didik untuk membangun solidaritas kedekatan. Dengan demikian peserta didik menjadi lebih diperhatikan dan merasa diberi semangat. Sama halnya dengan kutipan (4). Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh peserta didik kepada peserta didik yang dimaksudkan. Peserta didik memberikan dorongan motivasi kepada temannya.

Strategi kesantunan positif yang ditandai dengan penggunaan kata-kata tertentu dapat menjadi penanda ekspresi solidaritas. Akan tetapi, ada pula digunakan tuturan dalam bentuk pujian untuk mengawali pemberian perintah. Tindak ekspresif ini diterapkan guru untuk memberikan penghargaan (penguatan positif) terhadap peserta didik tanpa menggunakan penanda identitas kelompok seperti pada contoh kutipan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan (5) berikut:

(5) PD : (peserta didik menuliskan kalimatnya di papan tulis)

Guru : *Iya, bagus. Kata yang berimbuhannya digarisbawahi dan maknanya juga ya!*

Kutipan (5) merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat ekspresi dalam bentuk penguatan positif (penghargaan). Guru menggunakan kata *bagus* untuk mengekspresikan perasaannya terhadap hasil kerja yang dibuat salah satu peserta didik (menuliskan kalimat yang berisikan kata berimbuhan disertai maknanya). Penguatan diberikan oleh guru sebagai pujian sebelum mengawali tindak permintaan guru kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu (menggarisbawahi kata berimbuhan dan maknanya). Dalam hal ini, guru

memperhatikan ekspresi solidaritas dari pujian yang dibuatnya kepada peserta didik.

Membangun tindak tutur dengan strategi kesantunan positif sangat penting. Peserta didik akan merasa aman dan tidak terintimidasi dalam tekanan. Ekspresi solidaritas yang dibangun dalam strategi kesantunan positif akan menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar.

V. STRATEGI KESANTUNAN NEGATIF

Strategi kesantunan negatif merupakan cara penyelamatan muka yang digunakan selama proses belajar-mengajar berlangsung. Strategi ini memiliki ekspresi berupa pemaksaan dengan memperhatikan muka negatif pendengarnya. Tuturan yang digunakan pada strategi kesantunan negatif adalah langsung dengan menggunakan penandanya masing-masing.

Tindak tutur yang sebagian besar banyak mengancam muka petutur adalah tindak direktif. Tindak direktif berfungsi untuk membuat petutur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Tindak direktif ditandai dengan tuturan yang berisikan perintah, permintaan (permohonan), membatasi tuturan, penegasan, dan pemberian motivasi. Pengancaman muka terhadap peserta tutur ini sebagian diselamatkan melalui strategi kesantunan negatif. Sementara itu, sebagiannya lagi dibiarkan apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya penggunaan strategi kesantunan negatif dalam tindak direktif. Strategi kesantunan negatif dalam tindak direktif berupa kalimat perintah yang berisikan permintaan untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan. Bentuk strategi kesantunan negatif dari guru ditandai dengan penggunaan penanda *coba* dan *tolong*. Penggunaan kata ini bersifat untuk memperhalus permintaan kepada lawan bicara.

Di bawah ini disajikan kutipan yang berisikan contoh penggunaan strategi kesantunan negatif untuk memperhalus permintaan:

- (6) Guru : Iya. Jadi karena landak takut difitnah yang macam macam oleh anjing maka ia pun pergi menghadap baginda Sulaiman ya. Lalu, setelah landak datang apakah nasihatnya diikuti baginda Sulaiman? Mengapa?

Sekarang *coba* Reza! (a)

(7) Guru : Satu orang satu ya!

Ya, sekarang mari kita bahas bersama.

Coba tolong dibaca wacananya! (b)

Strategi kesantunan negatif melalui penghalusan dalam tindak direktif dapat diperhatikan pada kutipan (6) dan (7). Penghalusan perintah untuk permintaan ditandai dengan *coba* dan *coba tolong*. *Coba tolong* merupakan penanda yang lebih halus daripada *coba*. Semakin halus tuturan yang digunakan berarti semakin santun.

Kutipan (6) berisikan tindak direktif langsung yang terlihat pada tuturan (a). Guru memerintahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah dikemukakannya dengan menggunakan penanda *coba*. Tuturan dengan penanda ini bukan hanya untuk memperhalus permintaan, namun juga dapat digunakan untuk mendorong motivasi peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Sama halnya dengan kutipan (7) yang juga berisikan tindak direktif guru yang ditandai dengan *coba tolong*.

Penyelamatan terhadap ancaman muka dengan perbaikan melalui strategi kesantunan negatif masih kurang dilakukan oleh guru. Guru dalam mengajar lebih banyak membiarkan tuturan yang mengancam muka tanpa perbaikan. Penggunaan tindak tutur direktif dilakukan secara langsung kepada peserta didik. Berikut kutipan yang berisikan tindak tutur direktif yang mengancam muka, namun tidak dilakukan penyelamatan melalui strategi kesantunan:

(8) Guru : Hari ini kita akan bersama-sama memeriksa hasil ulangan kalian kemarin.

Bagikan ya! (guru meminta seorang peserta didik untuk membagikan hasil ulangan)

(9) Guru : *Buka buku halaman 26!*

Kutipan (8) dan (9) merupakan contoh tuturan yang berisikan tindak direktif. Tindak direktif digunakan oleh guru untuk memerintahkan peserta didik secara langsung untuk direspons secara nonverbal. Tuturan (8) berisikan perintah dalam bentuk permintaan guru kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu, yakni membagikan buku. Tuturan ini direspons oleh peserta didik secara

nonverbal dengan membagikan buku yang diacu oleh guru. Sama halnya dengan tuturan (9) yang juga merupakan tuturan yang berisikan perintah dalam bentuk permintaan kepada peserta didik untuk membuka buku sesuai dengan halaman yang telah ditentukan. Peserta didik tidak merespons permintaan guru secara verbal karena perintah yang diberikan guru telah jelas.

Tindak pengancaman terhadap muka ini tergantung pada kekuasaan. Dalam hal ini, guru memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru memiliki wewenang untuk memperbaiki ancaman terhadap muka atau tidak. Berbeda halnya dengan peserta didik. Peserta didik dihadapkan pada posisi untuk bersikap santun terhadap guru. Apabila peserta didik tidak mencermatinya, ia akan dihadapkan pada ancaman muka guru. Guru tidak akan melakukan kerja sama yang baik dengan peserta didik. Berikut kutipan yang berisikan ketidaksantunan peserta didik yang berakibat pada pengabaian:

- (10) Guru : Ada enam kelompok ya!
(guru menyebutkan nama-nama anggota kelompok)
- PD : *Ulang Bu!* (a)
- PD : Bu, kelompok satu balabihan. (b)
- Guru : Tidak apa-apa, sisanya. (c)
Minggu depan sudah jadi ya!

Kutipan (10) merupakan contoh pengabaian guru terhadap tindak tutur peserta didik. Hal ini ditandai dengan tuturan (a) yang berisi permintaan peserta didik agar guru mengulang informasi yang diberikan. Akan tetapi, guru tidak memperhatikan tuturan tersebut. Ia lebih memperhatikan tuturan (b) yang mengacu pada pemberian informasi yang kemudian diterima oleh guru melalui tuturan (c). Dengan kata lain, guru melakukan penolakan terhadap perintah yang diberikan oleh peserta didik.

Selain penggunaan tindak direktif, juga ditemukan tindak representatif pada proses belajar-mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Tindak representatif (asertif) berfungsi untuk menyampaikan proposisi yang benar. Yang termasuk dalam tindak representatif ini adalah pemberian atau penjelasan informasi, dan pemberian ketegasan maksud. Dalam penggunaannya tindak representatif dapat menyebabkan ancaman terhadap muka lawan bicara. Oleh karena itu, guru

menggunakan strategi kesantunan negatif dalam tindak representatifnya. Ini disebabkan guru melakukan transfer ilmu pengetahuan yang disajikan secara jelas, bukan dalam isyarat tertentu yang berisikan tuturan implisit maupun tuturan yang berisikan pujian yang berlebihan.

Berikut disajikan strategi kesantunan negatif dalam penggunaan tindak representatif:

- (11) PD : Setiap hari ada *ja* yang membersihkan.
Guru : Ya dibersihkan. (a)
Itu cermin kepribadian kita. Hati-hati ya, kalau-kalau ada tamu atau teman kalian, "Aduh, sebentar mau pipis", padahal tidak mau pipis beneran ya. Jadi, hati-hati, ada inspeksi mendadak. Hati-hati ya! Itu salah satu indikator pemilik rumah. (b)
PD : Kalau WC-nya bersih, kamarnya kotor *pang* Bu? (c)
Guru : Tidak mungkin. Itu kan yang kamu proses, dicampur, *dimixer*. Jika kamu mengeluarkannya setiap hari berarti kamu sehat ya.

Kutipan (11) merupakan contoh tindak representatif dalam bentuk pemberian ketegasan maksud dan pemberian informasi. Tuturan (a) berisikan pemberian ketegasan maksud untuk membersihkan WC. Sama halnya dengan tuturan (b) yang berisikan ketegasan, namun disajikan dalam bentuk penjelasan informasi kepada peserta didik akan pentingnya kebersihan WC. Guru menggunakan strategi kesantunan negatif dalam memberikan penjelasan terhadap pentingnya kebersihan WC. Guru memanfaatkan ekspresi pemaksaan melalui penekanan pada kata *hati-hati* agar peserta didik lebih memperhatikan pentingnya penjelasan yang diberikan mengenai kebersihan WC. Ternyata penekanan informasi yang diberikan guru mendapat respons balik dari peserta didik dalam bentuk pertanyaan pada tuturan (c). Hal ini pun kembali ditanggapi oleh guru dengan penekanan pada *tidak mungkin*. Penekanan ini kemudian diikuti dengan penjelasan kembali melalui ekspresi pemaksaan dengan memperhatikan muka negatif peserta didik melalui kesantunan negatif.

Strategi kesantunan negatif tidak ditemukan pada tindak ekspresif, komisif, dan deklaratif. Tindak ekspresif lebih banyak digunakan pada kesantunan

positif. Sementara itu, tindak komisif dan deklaratif sebagian besar tidak menimbulkan ancaman terhadap muka. Sebagian kecil tuturan pada tindak komisif dan deklaratif yang mengancam muka dibiarkan tanpa perbaikan oleh guru.

VI. SIMPULAN

Budaya berkomunikasi menuntut setiap orang untuk memperhatikan kesantunan. Proses bertutur merupakan tindak sosial dan kultural yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kesantunan. Kesantunan selalu dipandang sebagai sebuah fenomena yang berkaitan dengan bahasa dan realitas sosial.

Prinsip kesantunan meliputi penerapan strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif. Strategi kesantunan positif merupakan tindak penyelamatan muka dengan memperhatikan ekspresi solidaritas mitra tuturnya. Strategi ini lebih menekankan pada hubungan kedekatan antara penutur dan petutur. Sedangkan strategi kesantunan negatif merupakan cara penyelamatan muka yang digunakan selama proses belajar-mengajar berlangsung. Strategi ini memiliki ekspresi berupa pemaksaan dengan memperhatikan muka negatif pendengarnya. Tuturan yang digunakan pada strategi kesantunan negatif adalah langsung dengan menggunakan penandanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul dan Rani, Abdul. 2000. *Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Chaer, Abdul dan Agustina, L. 1995. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eelen, Gino. 2001. *Kritik Teori Kesantunan*. Terjemahan oleh Jumadi dan Rianto, Slamet. 2006. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ismari. 1995. *Tentang Percakapan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jumadi. 2005. *Representasi Kekuasaan dalam Wacana Kelas*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Leech, Geoffrey. 1983. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan oleh Oka, M.D.D. 1993. Jakarta: UI Press.

Suyono. 1990. *Pragmatik: Dasar-Dasar dan Pengajaran*. Malang: YA3.
Syamsuddin; Sulistyaningsih, Lilis St; dan Cahyani, Isah. 1998. *Studi Wacana Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

IMPLIKASI TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP UMUR PERNIKAHAN WANITA DI KALIMANTAN SELATAN (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012)

Norma Yuni Kartika, Muhajir Darwin, Sukamdi, Ellyn Normelani, dan
Rosalina Kumalawati

norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The education effects the human behaviour, so they leave the traditional customs, includes the early marriage. This research has aim to find out the implication of the education to the age of first marriage woman in South Kalimantan. This survey using cross sectional design. The data is seconder data. That is the data of the Indonesian demographic and health survey 2012 for South Kalimantan. The education of the research is about the women's education of 15-49 years in 3 levels, (a) low (elementary School); (b) middle (junior high school); (c) high (senior high school/university). The population is about the women of 15-49 years that 1015, those are 925 married, 34 widowed, 51 women divorced, and 1 is no longer living together/separated. The 526 have the age of first marriage under 18 years and 489 have the marriageable age above 18 years. The data analysis had been test using logistic regretion analysis on software SPSS version 15. Based on the result using logistic regretion analysis shows that there is a correlation of the education level and the age of first marriage woman, and the score is OR 3,5 and P 0,000. That means that the low education risks 3,5 times the age of first marriage under 18 than higher education. The coefisien score predicts that the low education causes the woman has the age of first marriage woman under 18 about 17,3 percent and 82,7 percent caused by others factors. Keywords: implication, education, age of first marriage, woman.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Norma Yuni Kartika** Kandidat Doktor Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, **Muhajir Darwin** Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, **Sukamdi** Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, **Ellyn Normelani** dan **Rosalina Kumalawati** Dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan berpengaruh terhadap perilaku manusia, sehingga manusia bersedia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisional secara bertahap termasuk kebiasaan perkawinan pada usia muda. Pernyataan yang cukup ekstrim, Duza dan Baldwin (1977) menyatakan bahwa perubahan dari kebuta-aksaraan secara masal menjadikan penduduk dapat membaca dan menulis, di negara-negara yang sedang berkembang mengakibatkan perubahan yang lebih menyolok dibandingkan dengan perubahan yang diharapkan terutama dalam kaitannya dengan usia perkawinan (Indonesia, 1980 dalam Kasto, 1988).

Menurut hasil penelitian-penelitian di Indonesia seperti misalnya oleh Singarimbun dan Manning (1974), Abdurachman (1974), Dixon (1971), Potts dan Selman (1979), Asari (1987), Soeradji dan Hatmadji (1982), Mc Donald (1983), Rahim (1985), Wirosuhardjo (1987), Abdurahman (1987), Malhotra (1997), Sukamdi dkk, (1997), Choe *et al.* (2001), Nurwati (2003), UNICEF (2005), Rafidah (2009); USAID (2009), Sanjaya DeSilva (2011), Sugiri Syarief (2011), PSKK UGM kerjasama dengan PLAN Indonesia (2011), BKKBN (2011), Indrayani dan Sjafii (2012), Chris Sakellariou (2013), Utina dkk kerjasama dengan BKKBN dengan IPADI (2014) juga mendukung hipotesis yang dikemukakan oleh Bogue, Yaukey dan Thorsen, dan Smith, yaitu bahwa pendidikan merupakan faktor yang cukup dominan dalam menentukan usia kawin seorang gadis.

Hasil kajian BPS dan UNICEF (2016) menunjukkan bahwa anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Menurut Sukamdi dkk (1995) faktor-faktor yang menunjang usaha peningkatan usia kawin di Indonesia antara lain semakin majunya pendidikan, baik formal maupun nonformal, pengaruh media massa yang semakin maju, pengaruh dari tokoh masyarakat yang telah menerima pembaharuan, pemahaman program kependudukan pada masyarakat luas, dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Convention on the Right of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Kepres No. 36 Tahun 1990, bahwa usia perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. CRS secara

universal menetapkan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Menurut kajian UNICEF (2005) bahwa pernikahan di bawah 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi dan diskriminasi. Berlangsungnya perkawinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kebiasaan yang dijumpai dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan faktor dan kebiasaan yang diikuti warga masyarakat tertentu.

Wanita dengan pendidikan yang rendah dan ekspose pada media massa yang terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas pada kesehatan reproduksi dan perawatan kesehatan bayi/anak. Usia perkawinan pertama yang rendah beresiko pada kehamilan muda dan melahirkan usia muda. Anak-anak yang lahir dari ibu-ibu muda sangat mungkin akan mengalami tingkat morbiditas yang lebih tinggi dan kematian bayi dan kematian pada usia balita (Choe *et. al*, 2001). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pendidikan terhadap usia perkawinan pertama wanita di Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Tulisan ini merupakan jenis survei dengan menggunakan rancangan *cross sectional*. Rancangan *cross sectional* adalah rancangan penelitian yang mengamati hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak atau dalam satu saat periode waktu tertentu. Dari rancangan ini peneliti hanya melihat frekuensi dan karakter serta faktor paparan yang diamati oleh peneliti dalam satu populasi pada saat tertentu (Gordis, 2004). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Menurut Gray (2009) dalam Effendi dan Tukiran (2012) analisis data sekunder adalah rangkaian kerja analisis yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan atau untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya (*original presented*).

Pengambilan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dikarenakan data yang akan diteliti ada di sana khususnya yang

berkaitan dengan tingkat pendidikan yang berkaitan dengan usia perkawinan pertama wanita di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup:

1. Tingkat pendidikan yaitu jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan wanita berusia 15-49 tahun, dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: (a) tidak tamat SD/tamat SD; (b) tamat SMP; (c) tamat SMA/Perguruan Tinggi.
2. Usia Perkawinan Pertama yaitu usia pertama wanita 15-49 tahun menikah/hidup bersama.

Berbeda dengan SDKI sebelumnya yang hanya mencakup wanita pernah kawin berusia 15-49 tahun, SDKI 2012 juga mencakup wanita belum kawin berusia 15-49 tahun. Perbedaan lainnya adalah pada SDKI sebelumnya wanita yang jadi responden hanya wanita yang berada dalam ikatan perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan, SDKI 2012 mencakup wanita yang hidup bersama. Lokasi yang dianalisis dalam tulisan ini hanya mengambil 1 provinsi dari 33 provinsi yang menjadi lokasi penelitian SDKI 2012, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan.

Instrumen tulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 sebagai sumber data utama dan sumber data tambahannya berupa studi dokumen, antara lain buku-buku yang berkaitan dengan usia perkawinan pertama, jurnal kependudukan, peraturan perundangan bidang kependudukan dan perkawinan baik tingkat UUD, UU maupun inpres yang berkaitan dengan usia perkawinan pertama, laporan dan data dari BPS dan kajian-kajian usia perkawinan pertama, terakhir *software* pengolah yaitu SPSS versi 15.

Populasi dalam tulisan ini mengacu pada populasi SDKI 2012 yaitu semua wanita 15-49 tahun, masih dalam ikatan perkawinan/hidup bersama atau sudah pernah menikah/hidup bersama, masih subur dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah sampel dalam tulisan ini adalah 1.015 wanita usia 15-49 tahun, dengan besar sampel terdiri dari 925 wanita menikah, 34 janda, 51 wanita bercerai dan 1 wanita yang sudah tidak lagi hidup bersama. Dari semua responden, terdapat 526 wanita yang usia perkawinan pertama/ usia hidup bersamanya di bawah usia 18 tahun dan 489 wanita usia perkawinan pertama/usia hidup bersamanya diatas usia 18 tahun. Nomor pertanyaan pada kuesioner yang digunakan seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Variabel	Kode Pertanyaan	Skala Ukur
Variabel Terikat Usia Perkawinan Pertama	V501/V511	0 = UPI di bawah 18 tahun 1 = UPI di atas 18 tahun
Variabel Bebas Pendidikan Responden	V106	0 = tidak tamat SD/Tamat SD (Rendah) 1 = Tamat SMP (Sedang) 2 = Tamat SMA/PT (Tinggi)

Sumber : data SDKI 2012

Keterangan : UPI = Usia Perkawinan Pertama

Metode kuantitatif yang digunakan untuk menjawab tujuan tulisan ini menggunakan uji statistik analisis multivariat adalah regresi logistik. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Software Statistical Package Social Science* (SPSS) dengan memanfaatkan program SPSS 15.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Univariat (Deskripsi Responden)

Distribusi frekuensi antara tingkat pendidikan responden dengan usia perkawinan pertama wanita yang menikah di bawah 18 tahun dan di atas 18 tahun disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden

Variabel	Usia Perkawinan Pertama Wanita dibawah 18 Tahun		Usia Perkawinan Pertama Wanita diatas 18 Tahun	
	n	%	N	%
Tingkat Pendidikan Responden				
Rendah	316	60,08	144	29,45
Sedang	203	38,59	260	53,17
Tinggi	7	1,33	85	17,38
Jumlah	526	100	489	100

Sumber : Hasil olah statistik SPSS 15 oleh penulis menggunakan data SDKI 2012

Distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden dengan usia perkawinan pertama berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa yang wanita menikah di bawah 18 tahun didominasi oleh tingkat pendidikan rendah 60,08 persen dan persentasenya menurun drastis pada tingkat pendidikan tinggi. Persentase tertinggi pendidikan wanita yang menikah di atas 18 tahun adalah tingkat pendidikan sedang 53,17 persen, rendah SD 29,45 persen dan tinggi 17,38 persen.

3.2 Analisis Bivariat (Analisis *Chi Square*)

Ada tidaknya perbedaan antara variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan uji statistik *Chi Square* (X^2) pada tingkat kemaknaan $X^2_{tabel} < 0,05$. Uji statistik *Chi Square* dengan variabel bebas tingkat pendidikan wanita usia 15-49 tahun memenuhi persyaratan yaitu nilai frekuensi harapan lebih besar dari 5.

Hipotesis uji *chi square* :

Ho = tidak ada perbedaan antara 2 variabel

Ha = ada perbedaan antara 2 variabel

Dasar pengambilan keputusan :

a. Berdasarkan perbandingan *chi square* hitung dengan *chi square* tabel

Jika $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, maka Ho diterima

Jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$, maka Ho ditolak

b. Berdasarkan probabilitas

Jika probabilitas $> \alpha$, maka Ho diterima

Jika probabilitas $< \alpha$, maka Ho ditolak

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi *Chi Square*

No	Variabel	Usia Perkawinan Pertama		Nilai X^2_{hitung}	Df	Nilai X^2_{Tabel}	Nilai Sig.
		Usia Perkawinan Pertama Wanita dibawah 18 Tahun	Usia Perkawinan Pertama Wanita diatas 18 Tahun				
1.	Pendidikan Rendah Sedang Tinggi	316 203 7	144 260 85	136,293	2	5,99	0,000*

Sumber : Hasil olah statistik SPSS 15 oleh penulis menggunakan data SDKI 2012

Keterangan: *: signifikan 0,05.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 diperoleh angka *Chi Square* (X^2_{hitung}) lebih besar dari angka *Chi Square* tabel (X^2_{tabel}) pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai *Chi Square* hasil perhitungan lebih kecil daripada harga kritik ($X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$, maka Ho ditolak). Ini berarti tingkat pendidikan mempunyai perbedaan yang bermakna dengan usia perkawinan pertama.

3.3 Analisis Multivariat (Analisis Regresi Logistik)

Untuk melihat hubungan antara variabel bebas (tingkat pendidikan) dengan variabel terikat (usia perkawinan pertama) menggunakan analisis multivariat. Dalam analisis ini, semua variabel bebas dibuat variabel *dummy*. Uji yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$. Koefisien determinasi (R^2) untuk menunjukkan seberapa jauh variabel bebas dapat memprediksi variabel terikat, semakin besar nilai R^2 semakin baik variabel bebas memprediksi variabel terikat. Syarat untuk analisis multivariat adalah hanya variabel yang bermakna dari analisis bivariat yang akan dianalisis.

Tabel 4. Hasil analisis Regresi Logistik

Variabel	Model 1 OR
Tingkat Pendidikan Responden	3,5* (2,804-4,387)
B	1,255
Nilai Signifikan (P)	0,000*
R^2	0,173

Sumber : Hasil olah statistik SPSS 15 oleh penulis menggunakan data SDKI 2012

Keterangan :

OR : Odds Ratio

P : Nilai Signifikan

R^2 : Koefisien Determinasi

* : Signifikan 0,05

Analisis model 1 dibangun untuk mengetahui variabel yang diprediksi mempengaruhi usia perkawinan pertama dengan cara memasukan variabel tingkat pendidikan ke dalam model. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia perkawinan pertama, dengan nilai OR 3,5 dan nilai P sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang rendah beresiko 3,5 kali wanita menikah pertama di bawah usia 18 tahun dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nilai koefisien memprediksi pendidikan yang rendah menyebabkan wanita menikah pertama di bawah usia 18 tahun sebesar 17,3 persen, sedang 82,7 persen disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam tulisan ini.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa persentase wanita yang usia perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang usia perkawinan pertamanya diatas 18 tahun dari jumlah responden 1.015 wanita masing-masing adalah 51,82 persen berbanding 48,18 persen. Usia perkawinan pertama wanita di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan olah data SDKI 2012 mayoritas di bawah usia 18 tahun dipengaruhi oleh multi faktor, salah satunya tingkat pendidikan wanita.

Tingkat pendidikan wanita 15-49 tahun dengan usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan persentase dari tertinggi sampai terendah yaitu pada klasifikasi rendah 38,59 persen, sedang 38,59 persen dan tinggi 1,33 persen. Tingkat pendidikan wanita 15-49 tahun dengan usia perkawinan pertama di atas 18 tahun urut dari yang tertinggi pada klasifikasi sedang sebesar 53,17 persen, rendah SD 29,45 persen dan tinggi 17,38 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pendidikan, khususnya untuk pendidikan sekolah menengah atas, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah

Hasil penelitian ini didukung dengan data BPS (2013) bahwa rata-rata lama sekolah (*Means Year School/MYS*) penduduk Kalimantan Selatan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 8,4 tahun sedangkan perempuan 7,66 tahun. Artinya penduduk perempuan usia 15 tahun keatas hanya mampu menempuh pendidikan sampai dengan Kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP.

Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk perempuan yang hanya tamat SD dan putus sekolah di tingkat SMP atau tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, meski ada Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang wajib belajar sembilan tahun, yang artinya penduduk diharapkan minimal tamat SLTP.

Angka melek huruf 15 tahun ke atas penduduk perempuan di Kalimantan Selatan 95,53 persen tahun 2013. Diharapkan dengan adanya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Instruksi Presiden

Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dapat menekan angka putus sekolah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan memberantas buta aksara.

Sejalan dengan penelitian UNICEF (2005) tingkat pendidikan dipandang sebagai kunci untuk mencegah perkawinan anak. USAID (2009) dalam kajiannya menemukan pada beberapa kasus, perkawinan usia dini berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita yang rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Anak wanita diharapkan untuk meninggalkan sekolah dan mulai bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga mereka.

Peningkatan pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pembangunan di Kalimantan Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik dilihat dari sudut pandang penduduk sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat ditenggarai salah satunya dengan tingginya tingkat pendidikan penduduknya. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan dan tersedianya fasilitas pendidikan yang cukup memadai sampai tingkat sekolah menengah. Pendidikan merupakan satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Apabila pendidikan rendah maka akan mengalami berbagai problem dan kendala, di antaranya dari hasil olah data SDKI 2012 menyebabkan rendahnya usia perkawinan pertama wanita, yang bisa menjadi kendala dalam memperoleh pekerjaan atau bahkan menjadi hambatan perkembangan bangsa atau suatu wilayah. Semakin tinggi jenjang pendidikan suatu masyarakat maka biasanya akan semakin baik pula kualitas hidup manusianya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa kajian sebelumnya. *Choe et. al.* (2001) pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi anak-anak. Anak-anak berhak dan berkewajiban untuk mengenyam pendidikan. Di Indonesia dan Nepal menyebutkan bahwa satu faktor yang menyebabkan menurunnya perkawinan dini adalah pendidikan baik untuk laki-laki dan wanita di kedua negara. Dalam penelitian Rahim (1985) menyatakan bahwa pendidikan dianggap sebagai faktor yang penting untuk menunda adanya perkawinan usia anak.

Menurut hasil penelitian, mereka yang menikah pada usia 16 tahun ke atas, di mana yang berpendidikan lebih tinggi cenderung menunda usia kawin kepada usia yang lebih dewasa. Hal ini juga sejalan dengan Nurwati (2003), adanya hubungan positif antara pendidikan dengan usia kawin pertama wanita, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula usia kawin pertamanya.

Menurut hasil penelitian Malhotra (1997) di pedesaan dan perkotaan di Jawa diperoleh hasil bahwa pendidikan dapat menunda menikah di usia muda untuk laki-laki maupun perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singarimbun dan Maning (1974) di Mojolama Yogyakarta bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan merespon berbeda tentang perkawinan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan. Menurut Hanum (1997), yang melakukan penelitian di Bengkulu Utara salah satu faktor yang berkaitan dengan tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses terhadap pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh keluarga yang kurang mampu. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasto (1982) di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pendidikan mempunyai peranan penting yang mempengaruhi perkawinan, semakin tinggi tingkat pendidikan, pergaulan semakin bebas, usia kawin semakin tinggi dan pemilihan jodoh makin ditentukan sendiri.

Pendidikan yang rendah berimplikasi pada usia perkawinan pertama wanita di bawah 18 tahun. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Tingkat pendidikan formal berpengaruh terhadap pengetahuan wanita, meskipun pengetahuan itu relatif sifatnya karena dalam kenyataan wanita juga memperoleh akses pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, yang di dalamnya termasuk usia ideal menikah, kesuburan, usia ideal untuk hamil, kehamilan atau pengetahuan mengenai peraturan pembatasan usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain dari pendidikan formal.

Tingkat pendidikan wanita dipengaruhi juga oleh sarana ekonomi. Ketidakmampuan ekonomi rumah tangga mengakibatkan kerentanan anak, khususnya anak perempuan, untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Ketidakmampuan ekonomi mendorong anak putus sekolah, beberapa anak bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga dan anak yang tidak bekerja

membantu pekerjaan domestik rumah. Apabila ada yang melamar, untuk mengurangi beban tanggungan ekonomi tidak ada pilihan lain selain menerima lamaran tersebut (Singarimbun dan Palmore, 1991; Rafidah, 2009; Suryaningrum, 2009; Gordon B. Dahl, 2010; Winarti, 2010; Ferianto, 2012; Fajriyah, 2012).

V. SIMPULAN

Tingkat pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan usia perkawinan pertama wanita, sehingga bisa mencegah perkawinan anak. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan wanita, semakin tinggi usia perkawinan pertamanya, dan memungkinkan untuk membuka kesempatan bagi wanita berpartisipasi dalam pasar kerja guna memasuki kehidupan yang sejahtera.

VI. PENGHARGAAN

Penelitian ini adalah bagian disertasi yang sedang dikerjakan oleh Norma Yuni Kartika. Ucapan terima kasih dan salam hormat kami sampaikan kepada para pembimbing disertasi yaitu Prof. Dr. Muhajir Darwin selaku promotor, dosen Fakultas ISIPOL UGM dan Dr. Sukamdi, M.Sc selaku ko-promotor, dosen Fakultas Geografi UGM. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Edeng Halim. 1987. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pada Pola Perkawinan di Jawa Barat*. Paper Pertemuan Ilmiah Faktor-faktor Sosial, Budaya, dalam Kaitannya Dengan Pola Perkawinan. Bandung, Lembaga Penelitian UNPAD, 18 Juli 1987.
- Asari, Yahya S. 1987. *Perkawinan dan Fertilitas di Tiga Daerah di Jawa Barat*. Makalah Pertemuan Ilmiah Kependudukan tentang Pola Perkawinan di Beberapa Daerah di Jawa Barat. Bandung: Pusat Studi Kependudukan, Lembaga Penelitian UNPAD.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kalimantan Selatan Dalam Angka 2013*. Banjarmasin .
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Kesehatan. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta.

- Badan Pusat Statistik dan UNICEF. 2016. *Kamajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BKKBN. 2011. *Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan: Mengapa...?*. Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan-BKKBN. Seri I No. 6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011.
- Choe, M.K, Shyam Thapa and Sulistinah Irawati Achmad. 2001. *Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal*. East-West Center Working Papers. Population Series, No.108-15.
- Convention on the Right of the Child (CRC)* atau Konverensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Kepres No. 36 Tahun 1990.
- Dixon, Rutg B. 1971. "Explaining cross culture variation in age at marriage and proportions never marrying", *Population Studies*, 25 (2) : 215-233.
- Effendi, Sofian dan Tukiran (Eds). 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Fajriyah, Ikhliah Muzayyanah Dini. 2012. *Mitos Sial dan Malu dalam Praktik Budaya Merarik: Hilangnya Otoritas Perempuan Menentukan Pasangan Hidup*. Makalah Konferensi Perempuan dan Pemiskinan, Yogyakarta, 1-4 Desember 2012. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Halaman 375-399.
- Ferianto, Kusno. 2012. Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Pernikahan Usia Muda di Desa Ngepon Kecamatan Jatirogo. *Journal Stikesnu*, 28 Mei 2013.
- Hanum, Sri Handayani. 1997. *Perkawinan Usia Belia*. Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada.
- Indrayani, Euis dan Sjafii, Achmad. 2012. *Dampak Pendidikan Bagi Usia Pernikahan Dini dan Kemiskinan Keluarga*. Gemari Edisi 143/Tahun XIII/Desember 2012.
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

- Kasto. 1982. *Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa*. Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM.
- McDonald, Peter F. 1983. Pedoman Analisis Data Sensus Indonesia 1971-1980. *Perkawinan*. Canberra. Halaman 189-207.
- Malhotra, A. 1991. Gender and The Minning of Marriage : Rural-Urban Differences in Java. *Journal Marriage and Family*. Volume 59, Nomor 2, Halaman 434-450.
- Nurwati, N. 2003. Review: Hasil Studi Tentang Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Jawa Barat*, Volume 5, Nomor. 2. Halaman 59-67.
- PSKK UGM dan PLAN Indonesia. 2011. *Perkawinan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK UGM dan Plan Indonesia
- Rafidah, dkk. 2009. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, Volume 25, Nomor. 2. Halaman 51-59.
- Sanjaya DeSilva. 2011. *Woman, Schooling, and Marriage in Rural Philippines*. Working Paper No. 701. Desember 2011.
- Sukamdi, dkk. 1995. Tingkat, Pola dan Determinan Usia Kawin Wanita dan Pria. *Journal Populasi* Volume 6 Nomor 2. Halaman 55-77.
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012.
- Suryaningrum, 2009; Suryaningsih, Muktiani Asrie. 2009. *Analisis Status Ekonomi Sebagai Salah Satu Faktor Resiko Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Remaja Puteri di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul*. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Singarimbun, M. dan Palmore, James A. 1991. *Pola Perkawinan, Pemakaian Alat Kontrasepsi dan Fertilitas*. BKKBN dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Singarimbun, M. and Manning, C. 1974. *Marriage and divorce in Mojolama*. Indonesia Volume 17. Halaman 67-82.
- _____. 1988. *Perbedaan Usia Perkawinan Pertama Berdasarkan Faktor Sosial-Ekonomi dan Daerah*. Kerjasama BPS dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Maret 1988.

- _____. 1988. *Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa: Suatu Studi Kasus di Desa Harjobinangun Yogyakarta*. Seri Laporan No. 28. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Soeradji, Budi dan Sri Harjati Hatmadji. 1982. *Perbedaan Umur Perkawinan Antar Daerah*. Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNICEF. 2005. "Early Marriage", *A Harmful Traditional Practice*. A Statistical Exploration. The United Nations Children's Fund (UNICEF).
- USAID. 2009. Fact Sheet on Youth Reproductive Health Policy. *Early Marriage and Youth Reproductive Health*. Task Order I. November 2009.
- _____. 2009. *Addressing Early Marriage in Uganda*. Maret 2009.
- Winarti, Sri. 2010. *Study Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan tentang Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Provinsi Kalimantan Selatan*. Laporan Hasil Kegiatan Magang. Banjarmasin: BKKBN.
- Wirosuhardjo, Kartomo. 1987. "Kebijakan kependudukan di Indonesia menjelang Pelita V dalam kaitannya dengan pola perkawinan", makalah Pertemuan Ilmiah Pola Perkawinan, Bandung; Lembaga Penelitian UNPAD, 18 Juli 1987.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN OLAHRAGA

Nurdiansyah

nurdiansyah60521@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan adalah investasi masa depan. Melalui pendidikan maka mental dan cita-cita luhur dapat terbangun. Hal tersebut seiring dengan pepatah dalam dunia olahraga, "*Men Sana in Corpora Sanno*" yaitu di dalam tubuh yang kuat akan terdapat jiwa yang sehat pula. Falsafah tersebut menggambarkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup baik secara batiniah dan kualitas kerja jasmaniah, pencapaian sehat bugar sangat dibutuhkan. Dalam situasi tersebut, olahraga merupakan media pendidikan yang seharusnya dan selayaknya menjadi pilar keselarasan serta keseimbangan hidup sehat dan harmonis. Olahraga merupakan pilar penting karena jiwa *fairplay*, sportivitas, kerjasama dan nasionalisme dapat dibangun melalui olahraga. Melalui aktivitas olahraga kita banyak mendapatkan hal-hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasi kepada faktor fisik belaka, olahraga juga dapat melatih sikap dan mental akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam implementasi warga negara yang patuh akan peraturan.

Mengimplementasikan pendidikan kebangsaan pada mahasiswa memerlukan strategi khusus. Selain karena mahasiswa merupakan insan

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan JPOK FKIP Unlam

akademis yang kritis, pendidikan kebangsaan mempunyai empat pilar yang menjadi pondasi negara Indonesia meliputi 1) Pilar Pancasila, 2) Pilar Undang-Undang Dasar 1945, 3) Pilar Bhinneka Tunggal Ika, 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar tersebut akan diimplementasikan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan paling sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2001), manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Karena manusia dibekali pikiran, manusia juga didefinisikan sebagai makhluk hidup yang dilengkapi dengan pikiran, yang bisa menggunakan dan memberdayakan pikirannya. Sementara, Vashdev (2012) menyebutkan manusia adalah makhluk kebiasaan. Disebut demikian, karena sistem kepercayaan (*belief system*), nilai (*value*), aturan (*rules*) atau sifat yang ada dalam diri manusia, semuanya terbentuk dari pengalaman atau kebiasaan mereka di masa lalu. Sebagai peserta didik di perguruan tinggi, mahasiswa telah memiliki pengalaman dan kebiasaan yang beragam. Kondisi tersebut membentuk karakter mereka.

Menciptakan serta mempertahankan kedaulatan negara ialah dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme merupakan sifat yang berpengaruh dalam mewujudkan rasa cinta pada negara seperti nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan dan nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan.

Pengaruh nasionalisme akan mempengaruhi pentingnya nilai-nilai olahraga seperti nilai antusias, sportivitas, tanggung jawab, peduli, jujur, *fair play*, disiplin, kerjasama, akan lengkap apabila dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan seperti nilai kekeluargaan, nilai ketaatan hukum dan nilai demokrasi, dengan implementasi nilai olahraga dan nilai kebangsaan diharapkan dapat menumbuhkan dan mewujudkan cita-cita diri sendiri, bangsa dan negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Tujuan

- a. Melatih sikap dan mental akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam implementasi warga negara yang patuh akan peraturan.
- b. Menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara melalui sikap nasionalisme.
- c. Mewujudkan nilai-nilai pendidikan kebangsaan agar tergapai cita-cita dalam ruang lingkup pendidikan olahraga.

1.3 Manfaat

- a. Terciptanya generasi muda yang taat akan peraturan dan melatih disiplin menjalankan nilai-nilai pendidikan kebangsaan dalam pendidikan olahraga.
- b. Partisipan akan mendapatkan rasa cinta pada tanah air dengan begitu negara akan menjadi kokoh dan aman.

II. PEMBAHASAN

2.1 Isi 4 Pilar Kebangsaan

1. Pilar Pancasila

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *ūīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun sebagai berikut:

1. Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 *Preamble* (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu

mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan *common denominator* dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan.

2. Pilar Undang-Undang Dasar 1945

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

Jika diperhatikan, tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 mencakup 3 hal, antara lain :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dari poin-poin diatas kita dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa.

Sedangkan jika berdasarkan susunan Pembukaan UUD 1945, maka dapat dibedakan empat macam tujuan sebagaimana terkandung dalam empat alinea dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

- Alinea I, untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.
- Alinea II, untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.
- Alinea III, untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh warga Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Alinea IV, untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

3. Pilar Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup dalam masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit itu bagi mengantisipasi adanya keaneka-ragaman petunjuk yang dipeluk oleh kaum Majapahit pada waktu tersebut. Meskipun mereka berbeda petunjuk tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.2 Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebagian atau semua elemen tersebut.

Bentuk-bentuk Nasionalisme sebagai berikut:

1. Nasionalisme kewarganegaraan (atau *nasionalisme sipil*) adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul *Du Contract Sociale* (atau dalam Bahasa Indonesia "Menegenai Kontrak Sosial").
2. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya

“sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan dimana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok.

3. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan. Perasaan nasionalistik yang kuat diberi keutamaan lebih untuk mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘*national state*’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri.
4. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

2.3 Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Keabngsaan Dalam Pendidikan Olahraga

Nilai-nilai pendidikan olahraga yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan, diantaranya:

1) Nilai Persatuan

Nilai persatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja tetapi juga individual. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara sesama pemain, pelatih, pengurus dan juga pendukungnya. Tanpa ditunjang adanya persatuan mustahil suatu individu atau tim dapat melakukan atau bahkan memenangkan pertandingan dengan baik.

2) Nilai kerjasama dan kekompakan

Aspek kerjasama sangat penting dalam sebuah olahraga, terutama olahraga yang dilakukan secara berkelompok. Kerjasama dan kekompakan mutlak dilakukan jika sebuah tim menginginkan kemenangan dalam suatu permainan. Bagaimanapun tingginya *skill* individual yang dimiliki para pemain

serta bagusnya pelatih maupun *official* yang ada, jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang kuat maka akan sia-sia saja. Kerjasama dalam hal ini bukan hanya *intern* di antara para atlet saja tetapi semua pihak yang bertanggungjawab terhadap tim, termasuk pelatih dan seluruh *official* di dalamnya.

3) Nilai persahabatan

Meskipun dalam sebuah kompetisi antar kelompok masing-masing tim saling berhadapan, bersaing secara sengit dan berusaha mengalahkan satu sama lain, namun begitu permainan usai atau di luar acara permainan, masing-masing individu atau kelompok tetap harus menganggap lawannya sebagai sahabat. Jangan sampai beberapa insiden yang terjadi di dalam pertandingan dibawa-bawa keluar, yang justru memperuncing masalah. Para pemain sepatutnya dapat memilah-milah antara urusan pribadi dengan urusan kemanusiaan. Ketika bermain, setiap atlet dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dapat mengalahkan lawannya, berjuang sekuat-kuatnya. Namun ketika pertandingan selesai, terlepas kalah atau menang setiap atlet tetap harus memperlakukan lawannya secara terhormat dan manusiawi, sehingga tidak boleh menghina atau merendharkannya.

4) Nilai penghargaan atau saling menghormati persamaan

Penghormatan di antara masing-masing individu maupun tim dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta ketulusan satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban bersama. Meskipun di antara mereka terdapat berbagai perbedaan, mulai dari latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan lain-lain, namun tetap harus dipandang sama dan dihormati sebagaimana layaknya.

5) Nilai sportivitas

Aspek sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam dunia olahraga. Dengan sportivitas dimaksudkan bahwa individu atau kelompok bersikap kesatria, *gentle*, dan jujur dalam permainan. Dalam pengertian ini pemain berlaku *fair* dan terbuka, tidak melakukan kecurangan maupun tipu daya tertentu terhadap lawan-lawannya. Sportivitas lebih menunjukkan adanya sikap tanggung jawab seorang atlet. Sikap sportif yang menjunjung tinggi kejujuran menjadi tolok ukur, sekaligus asas kompetisi yang sehat dan bermutu. Sportivitas lebih menunjukkan adanya sikap tanggungjawab seorang atlet.

6) Nilai *fair play*

Nilai *fair play* ditandai dengan sikap obyektif yang terbuka dan tidak memihak. Dalam olahraga, sikap *fair play* mengacu pada permainan yang bersih, tidak curang atau dikotori tipu muslihat, baik yang berasal dari para atlet sendiri maupun wasit dalam pertandingan. Karena itu, mutu dari suatu olahraga dapat dikatakan baik kalau dilakukan secara *fair*, di mana semua pihak melakukannya dengan cara jujur dan adil.

7) Nilai ketekunan dan kerja keras

Hal ini terlihat bagaimana para atlet dan seluruh tim sejak awal, dalam jangka waktu tertentu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun secara rutin berlatih menempa diri, mempersiapkan pertandingan yang dihadapi. Sampai pada gilirannya mereka membuktikan kemampuannya, yang berakhir dengan kekalahan maupun kemenangan. Cerminan dari kerja keras dan ketekunan tersebut benar-benar ada ketika mereka menjalani proses demi proses yang melelahkan. Proses ini jelas membutuhkan kesabaran dalam menahan diri, maupun keseriusan dalam berlatih. Ini merupakan bagian dari perjuangan.

8) Nilai solidaritas

Solidaritas mencerminkan sikap kebersamaan, berbagi perasaan satu sama lain baik senang maupun susah atas sesuatu obyek masalah atau kejadian. Dalam olahraga, nilai solidaritas perlu ditanamkan secara kuat, baik dalam lingkup internal tim maupun antar tim dengan pendukungnya. Kuatnya solidaritas menunjukkan adanya keterikatan emosional di antara mereka, sekaligus menjadi sumber pendorong semangat yang membangun. Karena itu, solidaritas perlu diarahkan ke tujuan-tujuan yang positif.

9) Nilai tanggung jawab

Aspek tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban individu atau kelompok atas tugas-tugasnya. Rasa tanggung jawab, mencerminkan sikap amanah dan berani mengambil prakarsa ataupun resiko atas setiap tugas yang diemban, baik yang berakhir dengan keberhasilan maupun kegagalan. Sikap tanggung jawab adalah bagian dari mentalitas positif yang selayaknya dimiliki setiap individu. Rasa tanggungjawab merupakan lawan dari sikap pengecut dan sikap lepas tangan yang terdapat pada kebanyakan orang. Dalam bidang

olahraga kurangnya rasa tanggung jawab, yang ditandai dengan saling lempar kesalahan, seringkali melemahkan sebuah tim dan bahkan dapat menghancurkannya.

10) Nilai keberanian

Nilai keberanian menunjukkan rasa percaya diri untuk bertindak melakukan sesuatu. Sikap ini dilandasi keyakinan akan kemampuan diri, dalam berkompetisi dengan pihak lawan. Karena salah satu unsur kegiatan olahraga adalah adanya kompetisi, maka seorang atlet harus selalu siap untuk maju bertanding memperagakan kemampuannya. Keberanian dalam kaitan ini bukan jenis keberanian yang tanpa perhitungan, namun keberanian yang diperhitungkan dengan cermat. Seorang atlet tidak boleh menghindari kenyataan bahwa keunggulan mereka hanya bisa dinilai setelah melalui proses kompetisi yang *fair*.

11) Nilai integritas

Nilai integritas menunjukkan ciri-ciri yang merangkum sifat-sifat unggul dalam diri individu atau kelompok secara keseluruhan. Nilai integritas ini, sama dengan nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya di atas, yang selayaknya ditegakkan semua insan olahraga yang terkait, mulai dari atlet, wasit, pelatih, pengurus, maupun pendukungnya. Integritas tidaklah semata-mata monopoli milik pemain saja, tetapi juga unsur-unsur lainnya. Dalam bidang olahraga integritas ditunjukkan dengan sikap maupun perilaku positif yang mencerminkan segi-segi kebaikan. Karena itu, sekali lagi integritas lebih bermakna penghayatan dan penerapan nilai-nilai baik secara totalitas.

Berbagai nilai positif dalam olahraga yang kiranya patut dikembangkan dan ditransformasikan dalam konteks kehidupan kebangsaan adalah seperti: Persamaan, persahabatan, integritas, keberanian, tanggung jawab, kekompakan, kerjasama, penghargaan atau saling menghormati, keberanian, perjuangan, kerja keras, solidaritas, sportivitas, *fair play*, kompetisi, kejujuran, keadilan, dan lain-lain.

Beberapa nilai yang dijelaskan di atas, sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Nilai-nilai yang satu memiliki sifat komplementer terhadap yang lain, yang dalam prakteknya saling menunjang. Terlepas dari adanya beberapa kekurangan di sana sini, dalam bidang keolahragaan kita dewasa ini, namun hal tersebut tidak mereduksi pentingnya kandungan nilai-nilai luhur itu sebagai sumber inspirasi untuk ditransformasikan dalam kehidupan kebangsaan.

Semangat kebangsaan adalah penggerak nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa dan menjadi ruh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup warga negara Indonesia yang mempunyai lima sila yang sudah disebutkan di awal.

Kelima sila Pancasila ini melahirkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, yang meliputi:

1. Nilai religiositas, yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengajak semua komponen bangsa untuk beragama dan berkeyakinan secara berkebudayaan.
2. Nilai kekeluargaan, mengandung nilai-nilai kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal usul, agama-keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang.
3. Nilai keselarasan, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia.
4. Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat.
5. Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dari UUD 1945, antara lain:

1. Nilai demokrasi, yakni mengandung makna bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
2. Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

3. Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara umum nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI, antara lain:

1. Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dari realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan sebagai pemisah.
2. Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk: agama, suku, budaya, politik dan sebagainya.
3. Nilai kemandirian, membangun negara dan bangsa di atas prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia (*national interests*).

Adapun nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, antara lain:

1. Nilai toleransi, sikap mau memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda (keyakinan, suku, bahasa, politik dan lain-lain) untuk hidup berdampingan secara damai.
2. Nilai keadilan, yaitu sikap seimbang antara mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
3. Nilai gotong royong, sebagai sikap dan tindakan untuk bekerja sama dengan orang maupun kelompok warga bangsa yang lain dalam urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan bersama, kemasyarakatan dan negara.

Satu usaha yang perlu dilakukan adalah melalui sumber “nilai”, berupa reaktualisasi kembali nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini, secara khusus kita dapat melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang selama ini berlaku dalam bidang olahraga. Sebagaimana dijelaskan di atas, nilai-nilai yang terkandung dalam bidang olahraga amat bersesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan. Karena bidang olahraga yang merupakan representasi dari dunia atau lingkungan yang lebih besar di sekitarnya, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa nilai-nilai dalam olahraga dapat diimplementasikan dalam kehidupan kebangsaan.

Dengan mengambil nilai persatuan, kita dapat mewujudkan keterikatan yang kuat dengan berbagai komponen bangsa yang lain. Rasa persatuan perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sebab dengan adanya persatuan segala persoalan bangsa lebih mudah dihadapi secara bersama. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak mampu menjaga persatuan maka otomatis akan kehilangan kekuatan. Apa yang terjadi jika masing-masing unsur bangsa ini lepas sendiri-sendiri, terpecah belah mengikuti keinginan dan hasrat masing-masing. Sudah tentu mereka akan lemah dan mudah dikuasai. Belakangan, sangat dirasakan bagaimana hilangnya rasa persatuan ini menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan dan jati diri. Ibarat orang bermain olahraga, kehidupan bangsa adalah mirip satu tim yang perlu dibina dengan kokoh jika berhadapan dengan bangsa lain.

Dalam bidang olahraga, kita bisa mengambil nilai kesatuan dalam bentuk solidaritas yang kita berikan, ketika misalnya, Tim Nasional (Timnas) olahraga Indonesia bermain dengan negara lain. Ada perasaan atau keterikatan emosional yang sama dan mendalam di antara kita untuk memberikan dukungan agar Timnas kita menang dalam pertandingan. Sebagai contoh, bagaimana perasaan kita secara otomatis bersatu, atau “berbagi nilai” dan “identitas”, ketika timnas bulu tangkis atau sepak bola berhadapan dengan negara lain.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai olahraga sesungguhnya memiliki dimensi positif yang sangat bermanfaat yang dapat diterapkan dalam usaha memperkokoh keutuhan bangsa. Dalam banyak hal nilai-nilai yang terkandung dalam bidang olahraga secara umum memiliki kesejajaran dengan usaha-usaha pengembangan bangsa. Ada banyak segi positif yang dapat diambil dan ditransformasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun terdapat perbedaan tataran antara bidang keolahragaan dan segi kebangsaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedua bidang tersebut memiliki kedudukan yang saling menjang.

Sebagai sesuatu yang bersifat normatif, nilai-nilai tersebut tentu saja merupakan “modal sosial” yang memerlukan manipulasi kreatif, penjabaran,

serta bentuk penerapan yang lebih konkrit. Usaha semacam itu sangat diperlukan, mengingat munculnya berbagai tantangan era globalisasi yang dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan bangsa. Di tengah kehidupan modern yang berubah dengan cepat, yang ditandai dengan munculnya pergeseran nilai-nilai baru dan arus kehidupan yang makin mengglobal yang cenderung meminggirkan identitas-identitas setempat, maka tidak salah kiranya jika mengambil kembali segi-segi terbaik, dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk dijadikan panduan dalam kehidupan bersama.

3.1 Saran-saran

Perlunya bangsa Indonesia mengimplementasi nilai-nilai olahraga ke dalam kehidupan berbangsa yang diharapkan mampu memperkokoh keutuhan NKRI. Langkah ini merupakan satu bentuk kesadaran yang perlu ditampilkan agar kita tidak terjebak dalam arus utama kehidupan yang dengan cepat menggerogoti sendi-sendi persatuan. Kuatnya arus budaya material yang dibarengi dengan berkembangnya mentalitas individualis yang makin menonjol sekarang ini, secara mendasar telah memudahkan solidaritas dan ikatan-ikatan emosional, bahkan pada gilirannya mendangkalkan visi kita sebagai satu bangsa. Implementasi nilai pendidikan kebangsaan dan pendidikan olahraga akan terlaksana dengan baik apabila semua partisipan mendukung dan mematuhi peraturan yang berlaku pada sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Komarudin., 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setijo, Pandji., 2010. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Widiasmara Indonesia.
- Bung Karno., 2001. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Gunung Agung.
- Smith, Anthony D., 2003. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Donth, Frank., 2005. *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KARAKTER DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANJAR

Rabiatul Adawiah, Sarbaini, dan Dian Agus Rochliyadi

suroto@unlam.ac.id

ABSTRAK

Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah-natural) dan lingkungan (sosialisasi atau pendidikan-natural). Pendidikan wadah pembentukan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan nilai-nilai karakter di sekolah piloting pendidikan berkarakter menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengembangan nilai-nilai karakter di sekolah dilakukan melalui: 1) mengintegrasikan melalui pembelajaran; 2) Melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan rutin, kegiatan terprogram, dan kegiatan spontan. Dalam upaya pengembangan nilai-nilai karakter, sekolah melengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti pembangunan musala yang dilengkapi dengan tempat wudhu, pembuatan bak sampah, wastapel, kebun sekolah, taman di depan kelas dan pemasangan kata-kata bijak di dinding kelas. Dari hasil penelitian disarankan: 1) pengembangan pendidikan karakter hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, dan melibatkan semua unsur di sekolah dan orang tua siswa, 2) melihat hasil yang sudah dicapai, pengembangan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan di SDN piloting perlu diadopsi oleh satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kondisi dan karakteristik dimana sekolah tersebut berada.

Kata kunci: nilai karakter, siswa, sekolah dasar.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Rabiatul Adawiah, Sarbaini, dan Dian Agus Rochliyadi** Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Persoalan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam berbagai pihak karena banyaknya persoalan di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, kehidupan yang konsumtif dan meningkatnya kriminalitas. Persoalan lainnya yang menimpa generasi muda adalah tawuran antar pelajar, membolos, menyontek, sering terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, pornografi, pembangkangan, narkoba dan miras. Herien Puspitasari (Disertasi Doktor IPB) mempublikasikan hasil penelitiannya di Kompas Cyber Media 18/05/2006, mengatakan bahwa dari 667 responden SMK dan SMA di Bogor tidak kurang dari 10 persen responden sudah melakukan hubungan seks bebas (Zubaidah, 2013). Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Warung Internet Indonesia, Irwin Day sebagaimana dikutip Zubaidah (2013) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa 90% anak usia 8-16 tahun telah membuka situs porno di internet. Rata-rata anak usia 11 tahun membuka situs porno untuk pertama kalinya, bahkan banyak di antara mereka yang membuka situs porno di sela-sela mengerjakan pekerjaan rumah.

Memperhatikan hal tersebut, pemerintah mengambil inisiatif memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain (Kumisar, 2011). Menurut Marzuki (2012) karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Menurut Imam Ghazali (Zubaidah, 2013) karakter adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Wynne (Megawangi, 2004: 80-81) mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter. Pertama, adalah menunjukkan bagaimana seseorang

bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, maka orang tersebut memanifestasikan karakter jelek. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, maka orang tersebut memanifestasikan, karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan *personality*. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah. Douglas (Samani dan Hariyanto, 2012: 41) menyatakan: "*Character isn't inherited. One builds its daily by the way one thinks and acts, thought by thought, action by action.*" (Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan).

Lickona (1991: 51-51) memberikan definisi pendidikan karakter "*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.*" Selanjutnya Lickona menambahkan bahwa, "*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior.*" Karakter mulia (*good Character*) dalam pandangan Lickona, meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*), kemudian menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*moral feeling*), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*moral behavior*). Dengan kata lain karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*) serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Salah satu ruang lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa adalah melalui lingkup satuan pendidikan. Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi (Kemendiknas, 2010: 5). Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Johansson (2011): "*Schools have long been seen as institutions for preparing children for life, both academically and as moral agents in society. In order to become capable, moral citizens, children need to be provided with opportunities to learn moral values.*"

Johansson menekankan pentingnya lembaga pendidikan untuk membentuk moral anak. Pendidikan merupakan alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Pembentukan karakter merupakan tujuan pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan karakter dikemukakan Budimansyah (2010: 49): “pengembangan karakter bukan saja menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang masih berusia muda, Amerika Serikatpun yang telah memiliki pengalaman hidup bernegara ratusan tahun tidak luput dari upaya ini.”

Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Bab Pasal 4 “Standar Pendidikan Nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.”

Pendidikan merupakan wadah dalam menunjang pembentukan karakter tiap individu. Sekolah Dasar adalah merupakan pendidikan awal penanaman karakter anak dalam perkembangan dirinya. Menurut Kesuma (2011: 6) pendidikan karakter dalam setting sekolah merupakan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Untuk mengetahui tentang pengembangan nilai karakter di sekolah, khususnya sekolah dasar di Kabupaten Banjar maka perlu diadakan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Aktivitas pengembangan nilai-nilai karakter di sekolah, dan 2) Dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan nilai-nilai karakter di sekolah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat mengungkap dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan nilai-nilai tersembunyi (*hidden value*) dari penelitian ini. Di samping itu penelitian ini juga peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berada pada posisi sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985: 198).

Penelitian dilaksanakan di SDN Kabupaten Banjar yang menjadi piloting sekolah berkarakter. Peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) dari Miles dan Huberman. Pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data digunakan teknik *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

III. HASIL PENELITIAN

3.1 Aktivitas Pelaksanaan Pengembangan Nilai-Nilai Karakter

1. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Karakter ke Setiap Mata Pelajaran.

Pengintegrasian ke dalam setiap mata pelajaran bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai pendidikan karakter disetiap mata pelajaran sehingga menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut sehingga menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik pembelajaran yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan, proses pembelajaran sebagian besar secara berkelompok mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas VI.

2. Pengembangan Nilai Karakter Melalui Berbagai Kegiatan

Pertama, Kegiatan Ekstra kurikuler. Berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan yaitu pramuka, seni tari, *marching band* dan seni hadrah. Untuk kegiatan pramuka wajib diikuti oleh semua siswa. Kegiatan pramuka secara rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at mulai pukul 10.00 sd 11.30. Untuk kegiatan seni tari tidak diwajibkan untuk semua siswa, tetapi hanya untuk

sebagian siswa yang berminat untuk mengembangkan bakatnya dibidang tari. Begitu pula dengan seni hadrah, hanya diikuti oleh sebagian siswa yang memang berminat di bidang seni hadrah.

Kedua, Kegiatan Rutin. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan siswa secara terus menerus dan konsisten setiap saat di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah: 1) Berbaris sebelum masuk kelas, 2) Bersalaman saat masuk kelas dan saat mau pulang, 3) Berdoa sebelum dan sesudah belajar, 4) Menghafal surah-surah pendek, 5) Tadarus Al Quran, 6) Salat zuhur berjamaah, 7) Salat Dhuha, 8) Tausiyah, 9) Upacara bendera setiap hari Senin, 10) Jum'at bersih, 11) Piket kebersihan kelas, dan 12) Infak siswa. Untuk kegiatan tausiyah, diberikan oleh guru secara bergiliran, dan semua siswa wajib hadir.

Ketiga, Kegiatan Terprogram. Selain kegiatan rutin, sekolah juga menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya terprogram. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan kalender sekolah. Beberapa kegiatan yang terprogram adalah:

1. Gerakan Saudara Asuh

Gerakan saudara asuh ini adalah memberikan bantuan terhadap siswa yang tergolong miskin setiap tahun. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pakaian sekolah, tas sekolah, sepeda dan keperluan sekolah lainnya. Barang-barang tersebut dibelikan dari uang yang terkumpul dari kegiatan infak siswa selama satu tahun.

2. Peringatan Hari Besar Keagamaan

Peringatan hari besar keagamaan yang selalu dilaksanakan adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Miraj, dan pesantren Ramadhan.

3. Berbagai perlombaan antar kelas (*Kegiatan Class Meeting*)

Berbagai perlombaan antar kelas ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Namun bisa juga diadakan pada saat memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Kegiatan-kegiatan yang dilombakan antara lain adalah tarik tambang, fashion show, menggambar, dan membaca puisi.

4. Kunjungan

Kunjungan dilakukan ke berbagai tempat yang dapat menjadi sumber belajar bagi siswa, misalnya kunjungan ke museum Banjarbaru, ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PTLA) Riam Kanan, ke Bandara Syamsudin Noor, ke kebun Naga di Pelaihari, ke PDAM Martapura, dan ke TPA Sampah Kabupaten Banjar.

5. Karya Wisata

Untuk karya wisata dilakukan khusus oleh kelas VI. Karya Wisata dilakukan ke tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Selatan, seperti pantai Takisung, pantai Batakan, pantai Angsana dan ke makam-makam ulama besar di Kalimantan Selatan.

Keempat, Kegiatan Spontan. Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan terhadap siswa. Misalnya, membiasakan siswa untuk memberi senyum, sapa dan salam kepada guru maupun kepada sesama siswa, membiasakan siswa membuang langsung apabila ada melihat sampah di dalam dan membuang pada tempatnya, mengucapkan salam apabila ada tamu datang ke kelas, meminta izin terlebih dahulu kepada guru apabila ingin ke luar kelas, bersikap santun dengan semua orang, guru langsung melerai apabila ada siswa yang berselisih paham, mengucapkan salam apabila masuk ke ruang guru/ kepala sekolah, langsung membantu apabila ada teman memerlukan bantuan.

3.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan

Nilai-Nilai Karakter

Keberhasilan penanaman nilai-nilai karakter pada siswa juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa sekolah telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana seperti:

3.2.1 Pembangunan Musala dan Tempat Berwudu

Untuk mengembangkan nilai religius, telah berdiri sebuah musala yang dilengkapi dengan tempat untuk berwudu. Namun tempat berwudu masih terlihat seadanya, dan air untuk berwudu terkadang tidak mengalir dari penampungan, sehingga siswa harus ke depan (tempat penampungan air) untuk berwudu. Musala ini digunakan oleh siswa secara bergiliran untuk melaksanakan salat Zuhur secara berjamaah. Selain melaksanakan salat Zuhur berjamaah secara

bergiliran, sekolah juga mewajibkan siswa untuk melaksanakan salat Dhuha secara bergantian.

3.2.2 Bak Sampah

Untuk membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya, sekolah menyediakan tempat sampah di depan kelas masing-masing. Tempat sampah juga ada yang dibuat di halaman sekolah dan di sudut-sudut sekolah.

3.2.3 Wastafel di Depan Kelas

Dalam upaya mendukung budaya hidup bersih, sekolah membuat wastafel di depan kelas. Sekolah telah melakukan sosialisasi gerakan mencuci tangan dengan benar kepada para siswa, budaya untuk mencuci tangan sebelum, maupun setelah kembali dari kantin. Di setiap wastafel disediakan sabun cair, karena mencuci tangan saja tidak cukup, perlu digunakan sabun untuk mensterilkan tangan dari kuman dan bakteri.

3.2.4 Kebun Sekolah

Dua sekolah yang menjadi objek penelitian memiliki lahan yang luas dan berpotensi untuk menghasilkan berbagai keanekaragaman hayati. Untuk itulah sekolah membuat kebun yang ditanami dengan aneka ragam sayuran, seperti terung, lombok, timun dan jagung.

Penanaman berbagai macam sayuran tersebut dilakukan oleh siswa dengan bimbingan para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Adanya kebun sekolah, selain sebagai upaya membuat kondisi agar siswa peduli lingkungan, juga dapat digunakan sebagai sumber belajar yang cukup efektif bagi siswa dalam proses pembelajaran secara langsung. Dengan adanya kebun sekolah, guru dapat menjadikannya obyek pembelajaran langsung yang efektif untuk menunjang proses pembelajaran.

3.2.5 Taman di Depan Kelas

Untuk menambah suasana menyenangkan, sekolah membuat beberapa taman di depan sekolah maupun di depan masing-masing kelas. Setiap siswa secara bergiliran merawat tanaman-tanaman tersebut.

3.2.6 Pemasangan Kata-Kata Bijak dan Semboyan di Lorong atau Dinding Sekolah dan di Dalam Kelas

Berdasarkan observasi yang dilakukan, semua ruang kelas dihiasi dengan berbagai poster, kata-kata mutiara, dan semboyan. Begitu pula di dinding-dinding luar kelas. Dengan seringnya membaca kata-kata mutiara atau semboyan yang terpasang di dinding kelas tersebut tentunya akan menimbulkan energi positif bagi siswa.

IV. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui pengintegrasian dalam pembelajaran, dan melalui berbagai kegiatan baik kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan bidang keagamaan maupun kegiatan lainnya. Menurut Kesuma (2011: 6) bahwa pendidikan karakter dalam setting sekolah merupakan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Hal ini mengandung makna:

- a. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran.
- b. Pendidikan karakter diarahkan pada pengembangan perilaku anak secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan.
- c. Penguatan dan pengembangan perilaku dalam pendidikan karakter didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah.

Menurut Mulyasa (2014: 9) bahwa pengintegrasian pendidikan karakter melalui proses pembelajaran semua mata pelajaran di sekolah sekarang menjadi salah satu model yang banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pendidik karakter (*character educator*). Semua mata pelajaran juga diasumsikan memiliki misi dalam membentuk karakter mulia para peserta didik. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran.

Pada tahap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) nilai-nilai karakter terlihat pada kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok

yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi inti 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 4) (Kemendikbud, 2013).

Pentingnya mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran dan melalui berbagai bentuk kegiatan juga dikemukakan oleh Mustadi (2011) yang mengatakan bahwa penerapan pendidikan karakter di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. Pertama, mengintegrasikan konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah; Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. Keempat, membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua peserta didik.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam upaya mengembangkan nilai-nilai karakter, sekolah juga menciptakan lingkungan yang kondusif, dengan melengkapi berbagai sarana seperti musala, kebun sekolah, taman di depan kelas, wastapel, tempat sampah, dan kata-kata bijak di dinding kelas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mulyasa (2014: 19) bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menyukseskan pendidikan karakter di sekolah adalah lingkungan yang kondusif baik secara fisik maupun non fisik. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib dipadukan dengan optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik merupakan iklim yang dapat membangkitkan nafsu, gairah, dan semangat belajar.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan nilai-nilai karakter di sekolah dasar yang menjadi piloting sekolah berkarakter dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: 1)

mengintegrasikan melalui pembelajaran; 2) melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan rutin, kegiatan terprogram, dan kegiatan spontan.

Dalam upaya pengembangan nilai-nilai karakter, sekolah melengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana seperti pembangunan musala yang dilengkapi dengan tempat wudhu, pembuatan bak sampah, wastapel, kebun sekolah, taman di depan kelas dan pemasangan kata-kata bijak di dinding kelas.

Dari hasil penelitian ini disarankan: 1) pengembangan pendidikan karakter hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, dan melibatkan semua unsur di sekolah dan orang tua siswa, 2) melihat hasil yang sudah dicapai, pengembangan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan di SDN piloting perlu diadopsi oleh satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kondisi dan karakteristik dimana sekolah tersebut berada.

DAFTAR RUJUKAN

- Daryatmo dan Suryati Darmiatun. 2013. *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Malang: Gava Media.
- Budimansyah, Dasim dan Kokom Komalasari. 2001. *Pendidikan Karakter Nilai Inti bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Johansson, Eva. "Practices for Teaching Moral Values in The Early Years: A Call for A Pedagogy of Participation". *International Journal of Education, Citizenship and Social Justice* 6, no. 2: 109-124. September 2011. University of Stavanger, Norway (diakses 9 Pebruari 2016).
- Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum.
- Kemendikbud, "Kompetensi Dasar untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013," *online*, <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/artikel-mendikbud-kurikulum2013> (diakses, 18 Januari 2016).
- Kesuma, Dharma dkk. 2011. *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Kurnisar. "Pendidikan Kakarter Bangsa, Perguruan Tinggi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi," *Jurnal Civicus*. Vol. 17 No. II Juni 2011, h. 27.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. 1982. *Effective Evaluation, Improving the Evaluation Result Trough Responsive and Naturalistic Approach*. California: Jossey-Bass Publisher.
- Marzuki, "Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, Nomor 1, Februari 2012, FIS UNJ, 2012.
- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bandung: Star Energy.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyasa. 2014. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustadi, Ali. Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural di Sekolah Dasar Daerah Istimewa Yogyakarta". Artikel Majalah *Dinamika*, 2011.
- Samani, Mukhlas dan Hariyanto. 2012. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zubaidah, Siti. "Penanaman Nilai-Nilai Karakter di Sekolah," *Online*. <http://himcyoo.files.wordpress.com> (diakses 2 Desember 2013).

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BANGSA

(Telaah Sosiokultural Penanaman Karakter Mandiri Pada Usaha Emping Melinjo di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)

Ratna Puspitasari

puspitasariratna70@yahoo.com

ABSTRAK

Berwawasan global dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal merupakan satu bentuk mengantisipasi tergerusnya nilai-nilai lokal di Indonesia. Kearifan lokal pada masyarakat Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon adalah sesuatu yang berbeda pada masyarakat pinggiran. Kemandirian di bidang ekonomi di tempat ini atau lebih dikenal sebagai *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) di Desa Tuk yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya dalam upaya mengentaskan diri dari kemiskinan. Dalam disiplin antropologi kondisi pada masyarakat Desa Tuk lebih dikenal istilah *local genius*. Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi yang berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun.

Kata kunci: kearifan lokal, Kemandirian ekonomi, Usaha Emping Melinjo.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen Tadris IPS IAIN Syekh Gunung Nurjati Cirebon.

I. PENDAHULUAN

Dampak krisis global tahun 2008, mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 menurun minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 (q-t-q). sementara itu, pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh positif, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,7 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III (Biro Pusat Statistik, 2009). Krisis global yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas – menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV 2008 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri sehingga investasi/pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,4 persen pada triwulan II laju pertumbuhan menurun menjadi 4,0 persen. Imbas dari penurunan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia (Nababan, 2002: 23).

Kemiskinan adalah persoalan struktural bagi masyarakat pinggiran di Indonesia. Masing-masing wilayah dengan mayoritas masyarakat miskin di Indonesia berupaya mengentaskan diri dari aspek kemiskinan, melalui pemanfaatan bantuan pemerintah sampai memanfaatkan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah. Namun masyarakat Desa Tuk kecamatan Kedawang memiliki jawaban atas persoalan kemiskinan ini. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Tuk adalah kemandirian tanpa melibatkan bantuan dari pihak bank, rentenir maupun pemerintah. Kearifan lokal yang dimiliki dalam kurun waktu lama lebih dimotivasi oleh etos kerja yang kuat di kalangan masyarakat.

Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama

dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Antara lain Soebadio (Nababan, 2002: 50) mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Sesungguhnya unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) mempunyai kemampuan mengendalikan, (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya (Iskandar, 209: 3).

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).

Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain (Gobyah, 2003). Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai "suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya". Budaya lokal yang menjadi ciri khas masyarakat desa Tuk adalah kemandirian.

Meski didera krisis ekonomi, Desa ini tetap bertahan mengembangkan industri pengolahan emping melinjo.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana aspek kemandirian ekonomi dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Tuk. Kemandirian sebagai wujud kearifan lokal di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Bagian analisa dalam makalah ini akan menjelaskan beberapa bentuk pengetahuan tradisional tentang kemandirian muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat. Kearifan lokal dengan mengutamakan nilai kemandirian menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal masyarakat Desa Tuk dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal masyarakat setempat.

III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1. Kearifan Lokal Kemandirian

Pengertian kearifan lokal adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu, sehingga dapat dijelaskan bahwa kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif (Naritoom, tanpa tahun).

Oleh sebab itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan

berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Keraf (1995) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Wahono dalam Sunarko (2008) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal.

Pengertian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Menurut Brawer dalam Suhartini (tanpa tahun), kemandirian adalah suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain. Kartini Kartono (1985: 21) menyebut kemandirian seseorang terlihat pada waktu orang tersebut menghadapi masalah. Bila masalah itu dapat diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang tua dan akan bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang telah diambil

melalui berbagai pertimbangan maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk mandiri.

Terkait konsep kemandirian telah disebutkan bahwa kemandirian ekonomi telah menjadi tuntutan politis bagi bangsa Indonesia yang berdaulat. Kemandirian adalah bagian integral dan makna dari. Sebuah kedaulatan itu sendiri. Tidak ada suatu kedaulatan yang kokoh dan *genuine* tanpa kemandirian. Apabila kedaulatan memiliki suatu makna, karena kemandirian memberikan martabat bagi bangsa yang mengaku berdaulat itu. Martabat bangsa yang berdaulat dan mereka tidak tergantung pada bangsa lain, tidak berada dalam protektorat tidak dalam posisi tersubordinasi. Kemandirian bangsa yang berdaulat adalah martabat yang diraih sebagai hasil perjuangan berat dari ketertaklukan, dari *humiliasi* (penghinaan) dan *dehumanisasi* (penurunan martabat kemanusiaan) sosial-politik serta sosial-kultural. Mencapai kemandirian menjadi penegakan misi suci yang kodrati dari bangsa Indonesia.

Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan. Oleh sebab itu dituntut adanya kemampuan, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru. Manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri sehingga humanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan.

Unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) mempunyai kemampuan mengendalikan, (5). mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam "Berpajak pada Kearifan Lokal" dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/2003, mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal

merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. S. Swarsi Geriya dalam "Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali" dalam lun, <http://www.balipos.co.id> mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Dalam penjelasan tentang 'urf, Pikiran Rakyat terbitan 6 Maret 2003 menjelaskan bahwa tentang kearifan berarti ada yang memiliki kearifan (al-'addah al-ma'rifah), yang dilawankan dengan al-'addah al-jahiliyyah. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).

Kearifan lokal apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami

nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. Sudah selayaknya, kita sebagai generasi muda mencoba untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

3.2 Industri dan Kearifan Lokal di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon

Secara umum, kegiatan industri menghasilkan barang jadi. Proses yang berlangsung dalam kegiatan industri ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Kegiatan industri yang kompleks membutuhkan peralatan mesin. Contoh industri perakitan atau assembling mobil, sepeda motor, dan televisi. Berbagai jenis industri dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi industri berikut ini didasarkan modal dan tenaga kerja, barang yang dihasilkan, daerah pemasaran, lokasi, investasi-investasi dan tenaga kerja, serta departemen perindustrian.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam usaha industri, industri di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Industri Rumah Tangga

Sebagian besar warga Desa Tuk bergerak pada *sector industry* rumah tangga sehingga sudah bisa dibayangkan besarnya modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam industri rumah tangga. Industri rumah tangga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) modal yang digunakan relatif kecil, (b) tenaga kerja yang digunakan tidak lebih dari 4 orang, biasanya dari anggota keluarga, (c) peralatan yang digunakan sederhana dan bukan mesin, dan (d) bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Industri Kecil

Industri kecil membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih banyak dibanding industri rumah tangga. Industri kecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; (a) modal yang dibutuhkan lebih besar daripada industri rumah tangga, (b) jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, (c) menggunakan teknologi sederhana, (d) biasanya hanya merupakan usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Industri kecil di desa ini biasanya bergerak di bidang makanan setengah jadi dan jadi. Contoh industri makanan adalah industri makanan kecil, kecap, kerupuk, dan sebagainya. Contoh industri makanan setengah jadi adalah emping melinjo dan kerupuk mlarat.

Jika dicermati lebih dalam, di Desa Tuk banyak industri didirikan berdasarkan pertimbangan atau faktor yang bertujuan untuk memperkecil biaya produksi. Contoh yang nyata adalah industri yang berorientasi pada bahan mentah (*Raw Material Oriented Industry*), industri ini berdiri dengan mendekati lokasi terdapatnya bahan mentah yang melimpah. Dengan mendekati bahan mentah, biaya produksinya bisa lebih hemat. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun industri di suatu lokasi. Beberapa ahli mengungkapkan beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi industri. Salah satunya adalah Robinson. Menurut Robinson (1979) ada enam faktor yang berpengaruh dalam menentukan lokasi industri. Keenam faktor tersebut sebagai berikut sesuai dengan bahan mentah emping melinjo dimana Desa Tuk merupakan penghasil melinjo terbanyak di Kabupaten Cirebon.

a. Bahan Baku atau Bahan Mentah

Bahan mentah merupakan faktor utama dalam mendirikan industri. Jika di suatu lokasi industri tidak tersedia bahan mentah atau bahan baku, maka dengan terpaksa bahan mentah harus didatangkan dari daerah lain. Sampai sekarang bahan mentah tetap menjadi faktor penentu berdirinya suatu industri. Ketersediaan bahan mentah maupun bahan baku yang terbatas sering disiasati oleh para pelaku industri dengan menjadi mitra usaha. Kerja sama terjalin antara para pedagang penyedia bahan baku (pemasok) dengan pelaku industri. Kerja sama ini sangat bermanfaat, setidaknya menghemat biaya produksi, karena pembelian dalam skala besar (grosir) umumnya disertai potongan harga (*discount*). Kemitraan dapat juga menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi industri.

b. Pasar

Industri emping melinjo dibangun karena adanya tuntutan konsumen. Tujuan utama kegiatan industri memproduksi barang untuk dijual kepada konsumen. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pasar atau konsumen merupakan bagian penting bagi berlangsungnya kegiatan industri. Jika konsumen yang membutuhkan banyak, berarti industri tersebut mempunyai pasar

yang cukup luas. Banyak faktor yang memengaruhi luasnya daerah pemasaran pada suatu industri. Faktor-faktor tersebut antara lain kebutuhan masyarakat terhadap produk dan strategi pemasaran dari perusahaan. Selain itu, keadaan ekonomi atau taraf hidup masyarakat juga mempengaruhi luasnya daerah pemasaran. Daya beli masyarakat akan rendah jika taraf hidup masyarakat juga rendah. Bahkan, kondisi geografis suatu wilayah juga mempengaruhi persebaran produk.

Jika kondisi geografis sulit dijangkau, maka sangat sulit bagi suatu industri untuk memasarkan produknya. Hal inilah yang juga memengaruhi perkembangan suatu daerah. Dalam ilmu Ekonomi, luasnya wilayah pemasaran sangat ditentukan oleh strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetisi yang berkelanjutan. Strategi pemasaran dipengaruhi dua faktor sebagai berikut: (1) faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat, (2) faktor makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, teknologi/fisik, dan sosial/budaya.

Sementara itu strategi dan kiat pemasaran dari sudut pandang penjual atau pelaku industri adalah 4P, yaitu tempat yang strategis (*place*), produk yang bermutu (*product*), harga yang kompetitif (*price*), dan promosi yang gencar (*promotion*). Sedangkan dari sudut pandang pelanggan dikenal 4C, yaitu kebutuhan dan keinginan (*customer needs and wants*), biaya pelanggan (*cost to customer*), kenyamanan (*convenience*), dan komunikasi (*communication*).

c. Biaya Angkut

Biaya angkut sangat tergantung pada fasilitas transportasi. Oleh karena pendukung berdirinya lokasi industri sangat kompleks, seperti ketersediaan bahan mentah, tenaga kerja, dan sebagainya. Kita tahu bahwa tidak ada lokasi industri yang sangat ideal. Berarti, hampir tidak ada lokasi industri yang memenuhi semua yang dibutuhkan oleh industri. Contoh suatu lokasi tersedia bahan mentah sangat melimpah tetapi tidak tersedia tenaga kerja atau kurangnya daerah pemasaran. Di sinilah fasilitas transportasi sangat berperan. Jika suatu daerah memiliki fasilitas transportasi yang memadai, maka pengiriman bahan mentah atau hasil industri juga lancar, sehingga biaya angkutan murah. Berbeda dengan daerah yang terisolasi. Kondisi topografi atau relief yang sulit dijangkau dan sarana transportasi tidak memadai mengakibatkan biaya angkutan mahal. Keadaan ini menyebabkan daerah tersebut kurang berkembang.

d. Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor penting lain yang mempengaruhi lokasi industri. Beberapa industri seperti industri tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja dengan tingkat keahlian tidak terlalu tinggi. Industri tekstil cenderung memilih lokasi di dekat daerah yang berpenduduk padat di mana tersedia banyak tenaga kerja. Di bagian lain, ada industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Industri ini dibangun di lokasi di mana tenaga kerja yang tersedia mudah dilatih.

e. Modal

Banyak orang mengatakan bahwa tanpa modal, kegiatan industri tidak akan berjalan. Modal adalah barang atau hasil produksi yang dapat digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Berarti modal tidak harus berupa uang, tetapi dapat juga berbentuk barang. Misalnya mesin jahit, mesin pertanian, gedung, dan juga mesin-mesin berat. Untuk membangun industri, modal dalam bentuk uang dibutuhkan untuk membeli material atau barang, mesin-mesin, dan peralatan lain. Pinjaman modal dapat diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lain. Pemerintah dapat pula menyediakan modal untuk industri tertentu. Sering para investor lokal dan asing menyediakan modal untuk pembangunan industri.

f. Teknologi

Tidak disangkal lagi teknologi memegang peranan penting dalam dunia industri. Teknologi industri berkaitan dengan cara atau metode produksi yang diperbarui, seperti penggunaan mesin modern. Penggunaan teknologi di berbagai bidang industri akan menaikkan produktivitas. Mengapa? Contoh sederhana dapat kamu lihat pada industri konveksi. Penggunaan mesin jahit listrik mampu menaikkan jumlah produksi, karena proses produksi akan lebih cepat. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah produk, tetapi juga penghematan biaya produksi, karena banyak tenaga kerja yang bisa digantikan dengan mesin.

3.3. Kearifan Di Bidang Industri Emping Melinjo

Ada beberapa kegiatan kearifan lokal di bidang industri pengolahan emping melinjo:

- a. Adanya pembatasan penggunaan lahan pertanian di provinsi Jawa Barat.
- b. Adanya pelarangan untuk kegiatan industri pada daerah tertentu di Cirebon.
- c. Adanya pengembangan industri hasil budaya lokal seperti emping melinjo di Desa Tuk yang didukung oleh pemerintah.
- d. Adanya pelarangan menggunakan bahan-bahan kimia dalam mengolah industri melinjo.
- e. Pemanfaatan hasil alam yaitu pohon melinjo dalam pengolahan industri.

Tanaman melinjo dapat tumbuh pada ketinggian tempat 0-1.200 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, tanaman melinjo dapat tumbuh di pegunungan berhawa lembab, bisa juga di dataran rendah yang relatif kering. Namun agar dapat berproduksi secara maksimal, melinjo sebaiknya ditanam di dataran rendah yang ketinggiannya tidak lebih dari 400 m dpl dan dengan curah hujan sekitar 3.000-5.000 mm/tahun merata sepanjang tahun.

Pohon melinjo sudah dapat dipanen setelah berumur 5-6 tahun. Panen dilakukan dua kali setahun. Panen besar sekitar bulan Mei-Juli, sedangkan panen kecil sekitar bulan Oktober-Desember. Sedangkan pemungutan bunga dan daun muda dapat dilakukan kapan saja. Hasil melinjo per pohon untuk tanaman melinjo yang sudah dewasa bervariasi antara 15.000-20.000 biji.

Menurut petani di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, tanaman melinjo umur 15 tahun hasil produksi buahnya mencapai 50 kg klatak (buah yang telah dikupas kulitnya) sekali panen, berarti produksi yang diperoleh klatak 100 kg/pohon/tahun. Berbagai bagian dari pohon melinjo dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Di antaranya, daun, biji melinjo dan kulit biji melinjo sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk sayur. Selain itu, bijinya juga dapat diolah menjadi emping. Emping melinjo adalah sejenis keripik yang dibuat dari biji melinjo yang telah tua. Proses pembuatan emping tidak sulit dan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Emping melinjo merupakan satu komoditi pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tinggi, baik karena harga jual yang relatif tinggi maupun sebagai komoditi ekspor yang dapat mendatangkan devisa. Sejauh ini, emping diekspor ke negara-negara

tetangga diantaranya ke Singapura, Malaysia dan Brunei. Bahkan, pasar ekspor yang potensial menjangkau Jepang, Eropa dan Amerika.

Kendala pertama pengembangan agroindustri emping melinjo adalah persepsi bahwa emping melinjo memunculkan banyak penyakit. Yang pertama kali akan menentang upaya demikian, justru bos-bos para pengambil keputusan yang biasanya kurang olahraga, banyak stres, pikirannya tidak bersih hingga terkena gangguan asam urat. Kalau mereka diajak berbicara tentang emping, pasti dengan segera akan menolaknya.

Kendala utama pengembangan agroindustri emping melinjo adalah kurangnya pasokan bahan baku. Populasi tanaman melinjo di Desa Tuk masih cukup banyak. Meskipun bukan termasuk jenis melinjo unggul.

Sentra industri emping di Desa Tuk memang kurang besar hanya mencukupi untuk wilayah Cirebon. Para produsen dan pedagang emping sendiri memang kurang begitu bergairah untuk melayani permintaan ekspor. Ada perbedaan jenis emping antara pasar lokal dengan ekspor. Pasar lokal lebih menghendaki emping tipis berukuran kecil (@ 2–3 biji melinjo). Sementara pasar ekspor menginginkan emping setengah utuh yang hanya terdiri dari satu biji melinjo dan dalam kondisi siap konsumsi. Kerepotan untuk melayani pasar ekspor memang sangat beralasan.

Persyaratan standar mutu produk (Codex) dan standar *Sanitary* serta *Pythosanitary* (SPS) menjadi sangat penting. Adanya persyaratan yang ketat inilah antara lain yang juga menjadi alasan keengganan pelaku emping kita untuk melakukan ekspor. Kendala psikologis dari para penentu kebijakan (soal asam urat); kendala pasokan bahan mentah dan kendala persyaratan mutu (teknik produksi emping); adalah tiga permasalahan yang telah menghambat pertumbuhan agroindustri emping di Indonesia.

Agroindustri emping adalah bisnis yang sangat padat karya. Mulai dari panen, pengupasan kulit buah, proses pembuatan emping, pemasakan (oven) dan pengemasan, semuanya memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak. Memang agroindustri ini juga memerlukan modal besar. Namun nilai investasi tersebut relatif kecil jika dibanding dengan jumlah tenaga kerja yang bakal bisa diserap olehnya. Lain dengan aroindustri udang yang sangat padat modal. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat susah dewasa ini, kita tidak perlu harus menunggu uluran tangan IMF atau *World Bank*

sambil tidur-tiduran atau sibuk saling menyalahkan. Melinjo adalah komoditas yang sangat strategis bukan hanya untuk menghidupkan perekonomian rakyat, melainkan juga untuk prestise bangsa.

IV. SIMPULAN

Kemandirian sebagai bangsa yang bermartabat dapat diaplikasikan dengan kemandirian ekonomi nasional dimana terdapat sumbangan kemandirian ekonomi lokal. Bentuk kearifan lokal pada masyarakat pengrajin emping melinjo di Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon adalah kemandirian yang berwujud pada agroindustri emping adalah bisnis yang sangat padat karya. Mulai dari panen, pengupasan kulit buah, proses pembuatan emping, pemasakan (oven) dan pengemasan, semuanya memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak. Memang agroindustri ini juga memerlukan modal besar. Namun nilai investasi tersebut relatif kecil jika dibanding dengan jumlah tenaga kerja yang bakal bisa diserap olehnya.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih sangat sulit dewasa ini, masyarakat Desa Tuk tidak perlu harus menunggu uluran tangan pemerintah atau sibuk saling menyalahkan. Melinjo adalah komoditas yang sangat strategis bukan hanya untuk menghidupkan perekonomian rakyat, melainkan juga untuk prestise bangsa.

Aspek kearifan lokal berupa kemandirian ekonomi sudah diterapkan sejak lama oleh masyarakat Desa Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Kuningan. Hal ini tak lepas dari nilai kearifan Isun Titip Tajug lan Faqir Miskin yang dimaknai masyarakat setempat untuk menjalankan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan mengelola hasil alam yaitu emping melinjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eko, Sutoro. Tanpa tahun. *Ekonomi Politik Pembaharuan Desa*.

Gunawan, Rimbo, 1998. *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*. Bandung.

Keraf, S. A., 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas.

- Lampe, Muni. 2006. *Kearifan Tradisional Lingkungan: Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Petani dan Nelayan Tradisional*. Makassar: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Nababan, 1995. *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Di Indonesia*.
- Anshoriy, Nasruddin 2008. *Kearifan Lingkungan, Dalam Perspektif Budaya Jawa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Naritoom, Chatcharee. Tanpa tahun, *Local Wisdom/Indigenous Knowledge System*. Nakhon Pathom, Thailand: Kasetsart University.
- Nugroho, C. A. _____. *Peran Masyarakat untuk Menjaga Keanekaragaman Hayati*. Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Santosa, A. (Ed) 2008. *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi.
- Sunarko, 2008. *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Ilahi: Tinjauan Teologis atas Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriatna, Yatna, 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahono, Francis 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Artikel

- Iskandar, Johan "Mitigasi Bencana Lewat Kearifan Lokal", Kompas, 6 Oktober 2009.
- M, Gadis. _____. *Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Nagari Panninggahan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan*. *Jurnal*. Padang: Jurusan Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Andalas.
- Mukti, Abdul. 2010. *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- NN, *Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan*. Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995.

Suhartini. Jurnal: *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet:

<http://pangasuhbumi.com/article/20582/pemulihan-lingkungan-dengan-kearifan-lokal.html>.

<http://rimanews.com/read/20100802/1940/mencari-kearifan-lokal-lewat-cerpen>.

<http://tal4mbur4ng.blogspot.com/2010/07/kearifan-lokal-guna-pemecahan-masalah.html>.

<http://staff.undip.ac.id/sastra/dhanang/2010/11/22/membangun-masyarakat-madani-berbasis-kearifan-lokal-di-kabupaten-brebes/>.

I Ketut Gobyah dalam *"Berpijak pada Kearifan Lokal"* dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/2003.

PERDAGANGAN KERAJAAN BANJAR DAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Rizali Hadi

rizalihadi07@gmail.com

ABSTRAK

Orang Banjar identik dengan perdagangan. Perkebunan dan perdagangan lada menjadi primadonanya. Perdagangan lada membawa kemakmuran Kerajaan Banjar dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Namun demikian daya tarik keuntungan berdagang lada ini menjadi perhatian pedagang asing VOC untuk ikut. Mereka ikut berdagang dengan berbagai taktik. Monopoli perdagangan dan politik *divide et impera*, berhasil, memecah belah Kerajaan Banjar. Orang Banjar yang masih berpikiran sempit berhasil dikuasai oleh Belanda. Orang Banjar sekarang harus memetik peristiwa lampau ini sebagai pelajaran. Perlu ditanamkan rasa kebangsaan, sama asal-usul, sama ras, sama agama, sama bahasa dan budaya. Nilai kebangsaan yang bersifat sektoral ini perlu dikembangkan menjadi bersifat nasional. Pendidikan nilai kebangsaan ini perlu dilakukan melalui pembelajaran ekonomi dan perdagangan di sekolah-sekolah. Kekuatan ekonomi akan memperkuat nilai kebangsaan suatu negara.

Kata Kunci: perdagangan, orang Banjar, monopoli Belanda, nilai kebangsaan

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah kerajaan, Kesultanan atau Kerajaan Banjar mengatur anggaran dalam kerajaannya. Satu upaya untuk memperoleh pendapatannya adalah dari usaha perdagangan, sesuai dengan pemahaman dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi keperluan hidup dan mempelajari peristiwa-peristiwa untuk mencapai kemakmuran (Hadi, 2013: 15). Dalam arti sederhana manusia mencari pendapatan untuk membiayai hidupnya. Manusia bisa diartikan sebagai keluarga, rumah tangga, satu wilayah tertentu, misalnya kerajaan.

Perdagangan Kerajaan Banjar menjadi terusik karena politik monopoli yang dimainkan oleh Belanda. Monopoli yang diterapkan Belanda, biasanya dimulai dengan adanya kontrak dagang. Secara tersembunyi dalam kontrak dagang itu memuat pasal yang isinya mengikat, tanpa disadari bahwa ikatan itu mematikan perdagangan kerajaan secara perlahan-lahan. Kerajaan Banjar tidak berhasil bernegosiasi untuk meninjau kembali atau mengubah pasal-pasal itu. Akibatnya terjadilah secara sembunyi-sembunyi perdagangan yang dilakukan pedagang Banjar kepada pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Arab dan lainnya. Perdagangan semacam ini dianggap oleh Belanda sebagai pelanggaran. Belanda merasa berhak untuk menghukum Kerajaan Banjar.

Walau pada awalnya belum mengenal kebangsaan yang bersifat nusantara atau Indonesia secara luas, namun perasaan tertekan, perasaan dibodohi, perasaan diperas oleh Belanda akan menjadi cikal bakal tumbuhnya harga diri dan kedaulatan. Minimal kedaulatan dalam kekuasaan Kerajaan Banjar. Ditambah lagi dengan terusiknya masalah pemerintahan, seperti masalah suksesi raja dan makin banyaknya campur tangan Belanda, akhirnya pecahlah Perang Banjar.

Usman (1994: 71- 85) merangkum beberapa tulisan antara lain tulisan B. Scribeke, Dogh (1665), Kilstra E.B (1892), Idwar Saleh (1967) mengenai perkembangan perdagangan Kerajaan Banjar dengan Kompeni Belanda sebagai berikut:

Mulanya perdagangan mereka hanya antar daerah, kemudian meluas sampai ke Patani, Cina, sampai India. Pada awal abad ke-17, perdagangan di Banjarmasin dimonopoli orang-orang Cina. Cina membawa barang-barang porselin, dan pulang membawa lada. Perkebunan lada menjadi berkembang ke seluruh wilayah kerajaan. Tiap bulan Jung-jung Cina datang ke Banjarmasin.

Wakil Kompeni Belanda G. Corszoon pada Juli 1611 datang ke Kerajaan Banjar merayu untuk mendapatkan hak monopoli namun tidak berhasil karena telah diberikan kepada orang Makassar. Kemudian Kompeni unjuk kekuatan mendatangkan 6 buah kapal pada 1634. Kebetulan suasana waktu memang kurang aman, membuat Kerajaan Banjar merasa tertarik bekerjasama dengan Kompeni, asal Belanda mau menjadi perisai menjamin keamanan pelayaran Orang Banjar terhadap serangan Orang Jawa dan Makassar. Pada 4 September 1635, Sultan diwakili oleh Syahbandar Ratna Diraja Godja Babouw, menandatangani suatu kontrak dagang, yang isinya antara lain disebutkan:

- a. Banjarmasin tidak akan menjual atau mengekspor ladanya selama di Banjarmasin masih ada orang-orang VOC ataupun kapal-kapalnya.
- b. Pinjaman uang sejumlah 3.000 real kepada sultan akan dibayar kembali dengan lada seharga 5 real sepikulnya.
- c. Pinjaman ini yang dibelikan kepada picens dan barang-barang lainnya atas nama sultan boleh diangkut tanpa bea oleh kapal-kapal VOC.

Barang-barang yang diperdagangkan selain porselin dan sutera dari Cina, ada juga perdagangan kain yang dipegang orang Portugis seperti kain dari India dan batik Coromandel sangat laku di Banjarmasin. Barang dari Jawa adalah keramik tanah, kendi, gong, tembakau, garam dan lain-lain. Setelah Malaka pada 1641 jatuh kepada Belanda, kekuasaan Belanda dalam perdagangan di nusantara menjadi semakin kuat.

Transaksi jual beli menggunakan mata uang. Uang pembelian lada, emas dan hasil lainnya digunakan uang real Mexico, orang Banjar menggunakan real Maluku. Mata uang Cina, Picins dari timah sangat umum dipakai digunakan dalam wilayah Kerajaan Banjar. Sebagai gambaran, pada tahun 1663 di Banjarmasin, untuk 1 ringgit, dengan kadar perak lebih banyak dari real berharga 12.500 picins, sedangkan sebelumnya 30.000 picins. Pemakaian mata uang ringgit dipopulerkan oleh Opperkoopman Soop ketika berada di kesultanan Banjarmasin–Kayutangi Martapura tahun 1636. Pada 1663 harga emas se-tail sama dengan 16 ringgit. Lada berharga 16 ringgit untuk 180 gantang. Banjarmasin sebagai penghasil lada terbesar merupakan daerah yang dapat melayani perdagangan lada dunia secara besar. Pesatnya perkebunan lada mengakibatkan produksi padi menjadi menurun, Kerajaan Banjar kekurangan

beras, sehingga mendatangkan beras dari luar. Beras didatangkan dari Kotawaringin, Jawa, Makassar. Tahun 1665 beras masuk ke Banjarmasin dengan berbagai kualitas. Harga beras yang paling putih dengan kualitas yang tinggi, seharga 9 sampai 10 ringgit sepikul (B. Scricke, Dogh 1665 dalam Usman, 1994:75)

Pedagang Cina juga mempunyai peran menentukan perkembangan politik kerajaan Banjar. Bahkan Sultan sering menggunakan golongan Cina untuk menghadapi lawan politik dalam negeri, maupun menghadapi politik perdagangan luar negeri (Kilstra. E.B, 1892 dalam Usman 1994:73). Dengan keahliannya dalam strategi dan negoisasi perdagangan, sultan sering mengutus orang-orang Cina untuk berunding memutuskan dan menyelesaikan masalah perdagangan.

Pada abad ke-17 perdagangan lada semakin meluas mewarnai pertumbuhan ekonomi Kerajaan Banjar. Semula penduduk hanya bercocok tanam, kemudian berkembang dengan membuka perkebunan lada. Oleh para bangsawan kerajaan yang menguasai tanah apanage dibuka perkebunan di Taboneo, Pleihari, Pengaron, Alai, Buntok dan sebagainya. Para bangsawan bertindak sebagai pedagang yang berhubungan dengan pembeli-pembeli asing. Di antara para bangsawan terjadi persaingan "seketurunan", tidak hanya masalah tahta, tetapi juga harta kekayaan, utamanya masalah-masalah perdagangan lada.

Perdagangan di Banjarmasin semakin ramai, kekayaan sultan semakin berlimpah ruah, keraton semakin megah dan indah (Idwar Saleh 1967 dalam Usman 1994: 73), seperti laporan yang ditulis oleh John Andreas Paravicini utusan VOC beraudiensi dengan Sultan Banjarmasin. Jalur perdagangan Kesultanan Banjar sampai ke Cochin Cina, di samping perdagangan di seluruh Nusantara. Para pedagang yang ikut meramaikan perdagangan di kesultanan Banjarmasin terdiri dari: orang Cina, Siam, Johor, Jawa, Palembang, Portugis, Inggris dan Belanda. Jenis-jenis barang yang diperdagangkan adalah lada, emas, intan, cengkeh dan pala, mutiara, kamper, bezoin, drakendoed rottings, calambac agelhout, besi tembaga, timah, batu basoar, pedro del porco, lilin, barang anyaman. Barang-barang impor berupa: batu agoat merah, gelang, cincin, tembaga, batu karang, porselin, beras candu, garam, gandum, bawang, gula, asam, kain dan pakaian.

Memperkuat perdagangannya VOC kemudian mendirikan loji-loji dan mendatangkan kapal-kapal bersenjata, memainkan politik monopolinya.

Kerajaan Banjar kadang-kadang juga berselisih paham antara para bangsawan pewaris tahta, bermusuhan dengan kerajaan tetangga, sehingga keberadaan Belanda bisa dianggap sebagai peredam dan pelindung, tidak sadar kalau Belanda sebenarnya adalah ancaman. Dengan demikian pengaruh dan kekuasaan Belanda menjadi semakin kuat. Dengan kuatnya VOC, Belanda mulai membatasi kekuasaan kerajaan di segala sektor. Pedagang yang akan berdagang ke Batavia harus mendapat surat pas dari VOC, sedangkan ke Cochin Cina tidak diberikan meskipun sultan memintanya, berarti hilanglah kebebasan berdagang orang Banjar. Demikian juga tidak mengizinkan pedagang dari Jawa, Cina, Melayu, Makassar untuk menjalankan perdagangannya dengan Kesultanan Banjarmasin.

II. TUMBUHNYA NILAI KEBANGSAAN

Pengertian kebangsaan di sini adalah nilai kebangsaan yang masih berada di seputar Kerajaan atau Kesultanan Banjar. Kebangsaan yang berasal dari kata bangsa, suatu kelompok yang didasarkan atas banyaknya kesamaan, sama ras, sama agama, sama bahasa dan budaya. Kerajaan Banjar yang merasa tertekan, merasa diperas oleh suatu kontrak dagang, mulai merasa dirugikan dan dibodohi. Karena kontrak dagang itu sangat mengikat, misalnya harga pasaran naik, Belanda atau VOC tetap membeli seperti harga yang ditulis di dalam kontrak. Adanya ikatan kontrak dengan harga 5 real sepikul, dan tidak boleh menjual kepada pedagang lain menimbulkan adanya perang anti VOC. Pada tahun 1638, terdapat 108 orang Belanda dan 21 orang Jepang dibunuh, loji VOC dibakar dan penghancuran kapal-kapal VOC. Kerugian VOC ditaksir mencapai f. 160.000,41 (Idwar Saleh 1967 dalam Usman, 1994:79).

Belanda menjelaskan tentang perang anti VOC oleh Kerajaan Banjar ini kepada raja-raja di Nusantara. Kerajaan Banjar dianggap melanggar kontrak dagang tahun 1635, dan Belanda akan membalas dengan segala kekuatannya. Diplomasi minta ganti rugi atas kerugian itu ditolak oleh Sultan, yang kemudian diturunkan menjadi 50.000 real, sampai akhirnya tawaran memperbaharui kontrak dagang tahun 1635 sebelumnya, yang menambah keuntungan bagi Kerajaan Banjar. Sikap lunak Belanda inilah menyebabkan Belanda berhasil merancang kontrak dagang baru pada 18 Desember 1660, yang ditandatangani pada 16 Mei 1661, isinya antara lain:

- a. Semua lada Banjar harus dijual kepada VOC, boleh diangkut sendiri ke Batavia atau ke Malaka.
- b. Harga lada ditetapkan yaitu 180 gantang atau se-tali emas atau 16 real atau barang lain yang seharga dengan itu.
- c. VOC boleh memperdagangkan barang-barangnya hingga Martapura baik dengan kapal maupun mendirikan loji tidak boleh di tempat lain.
- d. Untuk impor dan ekspor VOC harus membayar bea-cukai 5%.
- e. Bila kedatangan orang Belanda melanggar hukum, raja Banjar tidak menghukumnya, tetapi raja Banjar harus menyerahkan si terdakwa kepada pemimpin loji VOC di Martapura.
- f. Seluruh loji di Martapura dibawah perlindungan sultan (Idwar Saleh, 1967 dalam Usman, 1994: 82)

Keadaan perdagangan antara Belanda dan Kerajaan Banjar terus bergejolak karena pada dasarnya Belanda selalu berusaha memperoleh politik perdagangan dengan menerapkan politik *divide et impera*. Gazali Usman menyebutkan bahwa:

- a. Hubungan dagang dengan Belanda selalu diakhiri dengan peristiwa pembantaian dan permusuhan di kedua belah pihak.
- b. Dalam setiap perjanjian kontrak dagang, VOC selalu ingin monopoli, dan tidak memberi peluang terciptanya perdagangan bebas.
- c. Adat istiadat orang-orang Belanda, bertentangan dengan adat-istiadat orang Banjar, sehingga lambat laun akan timbul konflik budaya. (Gazali Usman, 1994: 84).

Permainan Belanda terus berlanjut sampai meletusnya Perang Banjar, (*De Bandjermasinsche Krijg*), yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah, dengan menyerang tambang batubara Oranye Nassau di Pengaron. Selain masalah suksesi antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamdjidillah. Perang ini juga disebabkan oleh kepincangan masalah ekonomi. Belanda sudah mendatangkan kapal-kapal api yang memerlukan batu bara sebagai bahan bakarnya. Kapal-kapal api itu memerlukan logistik batu bara di Banjarmasin. Batubara juga dikirim untuk keperluan Belanda di Pulau Jawa. Perdagangan batubara menjadi salah satu komoditi perdagangan Belanda. Sekitar bulan April 1859, ada utusan menghadap Mangkubumi

Pangeran Hidayatullah meminta izin menyerang benteng tambang batu bara Oranye Nassau. Pangeran Hidayatullah mengizinkannya apapun yang terjadi.

Tambang batu bara Oranye Nassau didirikan pada tahun 1845 setelah memaksa Sultan Adam al Wasik Billah. Pemaksaan membuka usaha tambang dan kontribusi yang tidak memadai bagi Kerajaan Banjar juga merupakan satu pemicu kenapa perusahaan tambang ini diserang. Perusahaan ini mempekerjakan 165 buruh tambang dan mengurungnya dalam benteng. Sayang blokade penyerangan ini tidak berhasil, karena logistik dalam benteng cukup dan datangnya bantuan menyerang pasukan Pangeran Antasari. Kolonel Andresen berhasil memulihkan keadaan, Pangeran Hidayatullah disetujui dilantik naik tahta pada 25 Juni 1859 dan Pangeran Tamdjidillah diturunkan. Pertempuran bukannya berhenti, malah meluas ke daerah-daerah. Pangeran Antasari yang masa kecilnya bernama Gusti Inu, dilahirkan disalah satu desa dalam daerah Barito (Riwut, 1979: 180) terus mundur bertahan ke Hulu Barito, mengatur siasat, untuk terus menyerang Belanda. Andresen ditarik dan selanjutnya Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Cianjur. Kerajaan Banjar dihapus pada 11 Juni 1860 berdasarkan Geb. Besluit 17 Desember 1859. Kerajaan tidak lagi diberi pimpinan, demi keselamatan operasional tambang batubara. Terlihat lagi bahwa masalah ekonomi Belanda dengan pertambangannya menjadi pemicu bergolaknya nilai kebangsaan.

Anak buah dan Pengikut Antasari yang berasal dari Barito atau Bakumpai banyak yang menyingkir ke daerah-daerah lain, menjauh dan menyingkir ke Kapuas, ke Katingan dan ada sampai ke Mahakam. Neuwenhuis dalam perjalanannya dari Pontianak ke Samarinda pada 1894 banyak menemui pedagang-pedagang dari Barito di Mahakam. Dari rumah sementara mereka kearah hilir terdapat rumah-rumah terapung orang Bakumpai; suatu kumpulan pengembara dari Barito, yang sejak beberapa tahun memasuki wilayah Mahakam berdagang dan mencari hasil Hutan (Neuwenhuis, 1894: 258). Mereka di Barito Hulu sebelumnya banyak yang berkebun lada atas anjuran sultan Kerajaan Banjar.

Setelah perkebunan lada, di Kerajaan Banjar dibuka tambang batu bara. Tambang batu bara sebagai lambang kekuatan ekonomi yang dikuasai Belanda dengan mendirikan sebuah perusahaan Oranye Nassau, memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sultan Adam dan Kerajaan Banjar selanjutnya tidak mendapatkan hasil yang memadai. Kecemburuan ekonomi ini kurang

menjadi pertimbangan Belanda, padahal keadaan ekonomi yang tidak seimbang bisa menjadi peperangan.

III. PENDIDIKAN DAN NILAI KEBANGSAAN

Kilas balik sejarah perdagangan orang Banjar dengan Belanda di atas perlu kita kenang dan perlu kita pelajari serta kita ajarkan kepada generasi selanjutnya. Belanda tidak mungkin datang untuk menjajah, tetapi pengalaman pahit diadu domba Belanda jadi pelajaran. Dahulu nilai kebangsaan kita dengan mudah bisa dipecah-pecah oleh Belanda. Di antara elit kerajaan Banjar sering terjadi perpecahan dengan berbagai sebab, antara lain masalah suksesi, pembagian kekuasaan dan persaingan mengumpulkan harta dari perdagangan. Belanda memanfaatkan perselisihan dan persaingan antar elit kerajaan ini untuk memecah belah dan melemahkan kerajaan.

Apa yang disimpulkan oleh Gazali Usman, bahwa sebenarnya tujuan Belanda adalah untuk menguasai perdagangan dengan cara monopoli. Perdagangan monopoli menghasilkan keuntungan besar disatu pihak, tetapi sangat merugikan pihak lain. Setelah lama tertekan dan dikalahkan dalam setiap transaksi perdagangan, baru muncul gerakan anti VOC atau anti Belanda. Sayang semangat nilai kebangsaan itu datang terlambat, setelah kuatnya cengkeraman penjajah Belanda.

Perdagangan dan ekonomi yang kuat akan menjadi pengikat perasaan kebangsaan, merasa memiliki bersama satu kerajaan, sebaliknya kekuatan yang lemah akan mengakibatkan mudahnya pihak lain menggoyang sendi-sendi kebangsaan. Sebuah kerajaan besar seperti Majapahit melemah karena kekuatan ekonominya menurun. Penyebabnya adalah kuatnya praktek korupsi pada adipati, sehingga dana yang masuk ke kerajaan makin hari kian kurang. Akibatnya belanja untuk keamanan, tentara dan peralatannya lemah. Perdagangan yang terbuka di Pantai Utara Jawa telah dikuasai oleh para pedagang Demak, Gresik, Surabaya. Perekonomian Majapahit kian lemah, sehingga setelah ada permasalahan dalam kerajaan Majapahit secara internal maupun eksternal, akhirnya kerajaan ini runtuh, *sirna hilang kerta ning bumi*.

Kisah tentang Perang Banjar yang kadang-kadang disebut sebagai *religious expession of secular conflict* yaitu bersifat politik ekonomis dan sosial

kultural. Masalah ekonomi menjadi sasaran pihak luar untuk melemahkan suatu bangsa. Lemahnya ekonomi akan melunturkan nilai kebangsaan, mudah sekali bangsa menjadi tercabik-cabik. Karena itulah dalam pendidikan nilai kebangsaan, masalah kesatuan ekonomi, kedaulatan ekonomi perlu mendapat porsi yang cukup. Masalah kepincangan ekonomi sering menjadi sebab kerusuhan. Dikuasainya sektor-sektor ekonomi oleh golongan tertentu bisa menjadi pemicu masalah. Tidak meratanya kesempatan kerja bisa menyebabkan adanya demo oleh para pekerja, bisa mengganggu kegiatan perekonomian. Terhambatnya distribusi barang keperluan pokok masyarakat, bisa menyebabkan kenaikan harga yang mengurangi daya beli masyarakat. Pada gilirannya akan menyebabkan menurunnya perputaran ekonomi. Adanya monopoli dengan politik kartel akan mematikan usaha pelaku-pelaku ekonomi yang lain, menyebabkan pemerataan terganggu. Penguasaan sumber-sumber energi oleh segelintir orang akan menimbulkan kecemburuan yang meluas. Regulasi pemerintah sebagai implementasi dari UUD 45 pasal 33 perlu benar-benar berpihak kepada keperluan masyarakat luas.

IV. SIMPULAN

Kerajaan Banjar identik dengan pusat perdagangan di Kalimantan bagian selatan. Pada abad 16, 17 dan 18 hasil lada di Kerajaan Banjar merupakan primadona, yang menarik perhatian para pedagang dari Cina, Johor, Malaka, Siam dan orang-orang Arab. Kemudian datang pedagang dari barat seperti Portugis, Belanda dan Inggris. Belanda dengan VOC nya. Belanda berusaha untuk memonopoli perdagangan dan dengan liciknya memainkan politik adu domba. Kerajaan Banjar yang dikuasai para bangsawan elit politik, terpecah dalam kelompok-kelompok, dimanfaatkan Belanda untuk melaksanakan politik pecah belahnya itu.

Waktu itu rasa kebangsaan dalam kerajaan mudah goyah, dikalahkan oleh berbagai kepentingan, misalnya perebutan tahta, kekuasaan dan persaingan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan kepada generasi penerus selanjutnya agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Dalam pembelajaran ekonomi di sekolah-sekolah supaya terus disampaikan betapa pentingnya nilai ekonomi dalam menegakkan kedaulatan bangsa yang meliputi kedaulatan ekonomi, kedaulatan kekuasaan, kesatuan

bahasa dan budaya. Semua kedaulatan ini menjadi perekat dan perisai mempertahankan ancaman dan gangguan nilai kebangsaan.

DAFTAR BACAAN

- Nieuwenhuis, Anton, 1894. *Di Pedalaman Borneo, Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894*, cetak ulang 1994, Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Gazali, 1994. *Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Lambung Mangkurat University Press.
- Riwut, Tjilik, 1979. *Kalimantan Membangun*.
- Rizali Hadi, 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, LP3 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- _____, 2015. *Mengungkap Peran Pedagang Orang Dayak Bakumpai Memelopori Perdagangan ke Katingan*.

NATIONALISM IN PRESENT CONTEXT

Rochgiyanti

yantibjm87@gmail.com

ABSTRACT

Nationalism as an awareness of the membership of a nation can be actualized by maintaining and preserving the identity and integrity as the strengths of the nation. In an increasingly globalized life, where there is no longer limit among nations, an identity as Indonesian nation must be retained but do not neglect the development of sciences and technologies. The bases of nationalism and community diversity remain benchmarks. Young people who live in the era of globalization has its own ways to actualize nationalism. Although being not able to reject globalization, the identity as a persistent and tough warrior nation as well as the integrity as a nation that uphold moral principles in the life of State must be maintained in accordance with the ideals of the Founding Fathers.

Keywords: nationalism, present context

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

** Doctoral Student of Social Science Diponegoro University Semarang.

I. INTRODUCTION

The thinking of nationalism is never timeless. The term 'nationalism' has continued to transform to adjust recent development. Traditionally, nationalism is defined as the doctrine to love our own nation. There are many ways to love their own people, depending on their respective viewpoints. However, some problems arise in order to actualize the sense of nationalism because many cases that have been shown by elites and society at various levels can threaten the national unity.

The threats to the national unity are due to the wide territory and enormous diversity of ethnic groups in Indonesia. A question that arises is, 'Is Indonesia as a country merely an imagined community?' (Anderson, 2001) or otherwise indeed a tangible State? This reasoning appears after witnessing the daily life of the nation and State that have recently been filled by a variety of turmoils. Almost every day, televisions, newspapers, and online news have reported hand-catching operations against the political elites and officials involved in bribery and corruption cases. In addition, there are various news about horizontal and vertical violences within the community. The State that is supposed to play a role to protect the public, just the opposite, i.e. the presence of the State in every issue facing society becomes the underlying cause of various inconveniences.

Various social problems and anarchical actions become a common sight as the case of motorcycle gangs and terror by motorized robbers that often take lives and disturb the public. Various media have reported directly or indirectly about violences in society such as conflicts in the elite and those at horizontal level the menu of the nation. Politeness, hospitality, and mutual affection have been eroded. From Sabang to Merauke, corruption is prevalently applied by the ruling parties (Trisasongko, 2006). This nation has turned into a nation full of resentment, like to rage violently, and full of anarchy, so that the "war" became common in small towns (Klinken, 2007). The lands to be confiscated and the people to be expelled are common in daily life (Pujiriyani, 2014). In such context, the image seen is that Indonesia as a nation and the ideals of the nation began to be forgotten by the next generation of the nation. The issues inherited as tangled yarns must be woven for more humane problem resolutions in the future, so that the efforts to strengthen nationalism can be realized.

II. THE BASIS OF INDONESIAN NATIONALISM

According to Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), lexically nationalism is defined as ideas (doctrines) to love our nation and State. It is also understood as a consciousness of the membership of a nation that either potentially or actually achieve, maintain, and perpetuate the identity, integrity, prosperity and strength of the nation. Therefore, in nationalism there must be the elements of consciousness, identity, and integrity, i.e. the consciousness as member of a nation, the identity as a nation, and the integrity as a nation. Ernest Gellner (1983) saw nationalism as a political principle, meaning that the unit of the nation should be in line with the political unit. Nationalism as a sentiment is an emotional condition in the form of discontent arising from the violation of this principle, or a sense of satisfaction because this principle is applied well (Saifuddin and Karim, 2008). In contrast to Gellner, Benedict Anderson (1991) prefer to understand strength and persistence of national identity and sentiment. The fact that many people are willing to die to defend the nation showed the presence of this remarkable strength (Saifuddin and Karim, 2008).

Talking about the Indonesian nationalism, certainly it cannot be separated from the thought of the Founding Fathers. It is no doubt that the Founding Fathers of the Republic of Indonesia has made the ideals of independence as a sacred form of their struggle. As a sacred form of struggle, they put the ideals of independence as a goal to liberate people from oppressions by colonialist. Obviously, to achieve the lofty goal, they have done various sacrifices. Soekarno as a mouthpiece for the people was discarded and alienated from the life of his people. Tan Malaka, who was recognized as father of the Republic even lived from prison to prison for his resistant and revolutionary attitudes in order that Indonesia could gain it own independence. Attitudes and behaviors owned by the leaders and founding fathers of the Republic are solely intended to realize the life of the nation and the State.

Observing to the elite's life today, their lives are contrary with those of the Founding Fathers. Hatta, for example, represented the most revolutionary form in himself. Various statements such as not getting married before Indonesia gained its independence, shows a revolutionary struggling attitude. After becoming a vice president, he did not enrich himself, as has been done by the national elites today. Although being one of the founding fathers and proclamators of the

nation, and as Vice President for 10 years, Hatta's life is far from the glitz (Swasono, 1984).

It is easily understood that Hatta calmly faced suffering that was much more severe in the colonialism era, let alone a matter of material deprivation. As a revolutionary figure, such small things do not matter to him. He had hard and firm principles as revolutionary figure as he showed such as not getting married before Indonesia gained its independence (Hatta, 1982).

From the description above, it can be seen that the bases of Indonesian nationalism were built by human beings with vision and mission for the nation's progress. They made the struggle as a holy one (*jihad*) to uphold human dignity. However, the present elite generation actually makes it to plunder the country's wealth for the sake of self, family and group interest. It is inevitable that a variety of inequality occur in social, educational, economic and political sectors. The elite in the circle of power enjoys enormous wealth, while those in marginalized areas greatly suffer. Inequalities have still occurred in many sectors and development is unevenly distributed in different regions.

III. COMMUNITY DIVERSITY

Understanding the real condition, we will find a variety of communities in Indonesia. This can be clearly seen with wealth owned, the number of languages, and ethnics spread from Sabang to Merauke. The results of a study conducted by Grimes showed that in Indonesia there are 672 local languages (Grimes, 1988). The figure can be much more because many remote areas are addressed by studies conducted by researchers. It appears that the various cultural property owned by the Indonesian people become extraordinary divine endowment.

Pluralism in Indonesia is an undisputable reality. There are at least three categories: first, social pluralism, particularly the diversity of ethnics, languages, and religions; second, economic pluralism, with the most easily seen indicator of poverty rate; and third, political and institutional pluralism, which can be seen from a low ratio of the number of police and the community and the increasing political competition in society from village to national levels (Darlis, 2012).

The pluralism conditions show the different understanding of nationalism. These can also be seen from many sectors in an intellectual,

economic, political, social and religious manner to understand the national questions. Among educated people, Indonesian nationalism has become a 'new belief' for intellectuals in this country from the early nineteenth to the mid-twentieth century. The 'new belief' is painstakingly spread by the nationalists to the lower ranks. When Indonesia was established as a nation-state, nationalism was primarily received by those in high class. However, those at the lower class were not disturbed. In fact, the lower one could only imagine nationalism as something a bit just outside itself, its family, its great village, and it is a great luxury to be able to know or understand nationalism.

Referring to Benedict Anderson's thought, nationalism is not more than the Imagined Communities within a society, as seen in the Indonesian nation-state (Anderson, 2001). Anderson defines nation as "an imagined political community". By the word "imagined" it means "people who define themselves as members of a nation, although they "never know or meet with others who collectively claim to be citizens of the same country; but in their mind, there is an image of communion unity (Saifuddin and Karim, 2008).

The real conditions in society show that the issue of nationalism today is different. Among the elite, they truly understand the meaning of nationalism, but it is only at a theoretical level, while among laymans they do not understand it but in practice they actually apply it. Social, economic, legal, and political gaps still occur as in the Dutch colonial era. The difference is that in the past the exploiters were the Dutch people, while at present they are those from our own people. Thus, independence has actually not reached the level of people yet. The leaders in the power has become the new kings, resulting in a pattern of feudalism. According to Suhartono W. Pranoto, any central power is always accompanied by the efforts to strengthen the feudalistic structure. The people's orientation to the boss is getting stronger and always become fully dependent, which is similar to the style of frog, i.e. facing up is to worship, while facing down is to kick, resulting in subordinate loyalty without reserve (Pranoto, 2001). Zakaria (2000) stated that since the New Order, the people become inevitably exhausted to be exploited by the elites.

IV. YOUTH AND GLOBALIZATION

After 71 years Indonesia gained independence, how do young generation in this country make sense of nationalism? The young generation living today has viewpoint so different from that of predecessor. This is very reasonable, indicating that the dynamics occurred in society. The young generation is now a group of the people who did not experience difficult times in the life of nation-state. They live in a relatively more established economic condition, a relatively stable political situation, and a social situation characterized by modern lifestyles and very rapid development in information technology. The very rapid flow of information in the different parts of the world that undermine national borders is considered as one of the conditions that characterize globalization (Armando, 2008).

John Tomlinson in the book *Globalization and Culture* (1999) defined the globalization as 'rapidly developing and ever-densening network interconnections and interdependences that characterize the modern social life', while Roland Robertson in the book *Globalization* (1992) defined it as 'the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole' (Armando, 2008). It can be understood by looking at the characteristics as follows: first, the long-term process that changed the complexion of the community both in terms of social, political, economic, and cultural sectors in an in-depth manner; second, the increasing interconnection and homogenization of economic, social, and political sectors of the world; third, the decrease of spatial distance and time; fourth, it has politically weaken the power of the State, and the fifth, it prompts the deployment of various cultures into the arena of countries (Robet, 2008).

Globalization is generally characterized by the extraordinarily aggressive expansion of capitalist markets and the escalation of people's consumer behavior in different sectors (Nugroho, 2006, in Suyanto, 2014). It leads to changes not only in behavior and lifestyle but also in social structure and affects the dynamics of economic conditions at various levels, from global to local levels. As a social reality, it must be recognized as a process of change that is inevitable, which very quickly spread to various aspects of societal life in many countries. According to Scholte (Suyanto, 2014), the impacts of globalization are closely associated with at least four things: first, it has changed the nature of economic activity; second, it has undermined and inhibited the power of the State; third, it has led to

cultural synchronization and homogenization; and fourth, it has expanded beyond modern society.

The younger generation is the figure most open to global changes today. Smart phones and internets are their toys every day. There is no day without the internet. The social networks of young people are no longer limited to their group, but spread across the country's borders. However, youth is the generation mostly vulnerable to adverse consequences of global changes today. According to Adian (2008), there are two faces of globalization, i.e. bright and dark faces. The bright face of globalization is based on the premise that globalization offers a degree of individual freedom that cannot be guaranteed by any country. Free competition at global scale has liberated entrepreneurial talent and power and spur technological innovations. The dark face of globalization has hit the third-world countries with no adequate social insurance; led to the misallocation of resources between private and public goods; and made primordial bonds strengthening and aggressive.

The content of globalization is actually both capitalism and industrialism. Therefore, as stated by Anthony Giddens (2000) and Ulrich Beck (1992), the globalization should be anticipated as an extension of risk society (Robet, 2008). The 'risk society' refers to an understanding of the conditions of 'low probability-high consequence'. Risk in the risk society is more a 'manufactured risk', because it is a man-made product. The effort to overcome the risk is always done through technological interventions, which in turn generates new risks and trap. It can be understood that initially the technology is created to facilitate the work of humans and make it easier to meet all their needs. Each technology development always promises speed, change, progress, convenience, and improvement in productivity (Martono, 2011). But the technology and the possibilities of progress are fully controlled by the power of money or capital, which is certainly not owned by the people in general. Technology as a result of the physical culture without spiritual values embodied in customs, religion, and arts has lost its function to improve the quality of life and the life as a whole (Wibowo, 2007). In this global situation, the technology has been revoked from the fundamental basis, in the form of values, norms, and ethics, because it has been completely overrun by capitalism.

The young generation has become a part of the world society. The change in status due to the global changes would bring its own consequences.

The world society represents all networks of social relations that are not organized at national level. Such society is also a kind of the experience of life and actions across the border. It can do the traveling to different countries, forming virtual communities that become a daily part of the youth, creating a website to express the concerns of young people across the nations in response to various issues that are no longer local in nature. Forest fires in Sumatera and Kalimantan, for example, do not only make the local community worried about, but also the people in the neighboring countries. The world society has opened a horizon of cultural imagination that has previously been closed. In addition, more and more people meet both vitually and conventionally with other people with different lifestyle, ideology, and tradition. Arjun Appadurai (Adian, 2008) explained this phenomenon as part of the changes in global landscape. According to him, there are five types of landscape change: first, ethnoscape, i.e. a change in human landscape characterized by the presence of humans who are constantly moving such as tourists, immigrants, refugees, etc; second, technoscape, i.e. cross-border movements of machine or computer-based technologies; third, finanscape, i.e. the movement of money between countries in large number through currency market, stock and speculators; fourth, mediascape, i.e. distribution of probability in producing and disseminating electronic images; and fifth, ideoscape, i.e. the relatedness between images, often associated with the State, opposition ideology and ideas.

The world society always reflects its identity and establishes a liquid and flexible identity. Different from the world society's attitude with its liquid identity, some local communities have actually responded to changes in the global landscape with anxiety, so that globalization tends to create the intensification of local ties. They are anxious because of the possibility that one day their identity will be crushed by various foreign identities that are now present on yard of their cultural home (Adian, 2008). Nevertheless, the global anxiety flexes local anxiety among primordial groups. At present solidarity across ethnic, racial, religious, and ideological works optimally in response to global dangers. Young people as a part of transnational social networks are central actors in this solidarity work. They can voice local concerns undergone to be responded globally. Access to information technology is widely open for them, and they remain critical and responsive to the global changes with a variety of potential hazards.

The worldview and actualization of nationalism among young generation differs from its predecessors, because the young generation has at present become global citizens in the age of globalization. They are able to express nationalism through the power of information technology, for example, to upload photography on hidden tourism paradise in Indonesia and the writings of bloggers can be viral in cyberspace and provoke curiosity and desires of people from all over the world to visit it. They are also able to raise local issues to get attention from government, for example, children's struggle through a severely damaged suspension bridge to reach the school, or their struggle across the swift water of the river to school. It is impossible if information technology not as advanced as it is today. The younger generation is still able to show its love for homeland in a different way.

V. CONCLUSION

Nation is new people or society born because of an extraordinary event or momentum and they build a consensus to establish a community group. The birth was characterized by a new spirit of diverse ethnicities to liberate themselves from colonial grip. It begins with the thinking construct as free man. Considering such characteristics, Indonesia as a society needs to review the spirit of nationalism as a result of deviations committed by the elites. The spirit of nationalism needs to be instilled and nurtured among the younger generation who have never experienced bitter struggle in the past. The world situation that has radically changed resulted from globalization has certainly affected how young people interpret and actualize nationalism. Departing from such real conditions, Indonesia needs to restructure the pattern of nationalism in accordance with the ideals of the founding fathers.

REFERENCE

Adian, Donny Gahril. 2008. "Kaum Muda Sebagai Warga Dunia", dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (eds), *Refleksi Karakter Bangsa*". Jakarta : Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Penerbit Forum Kajian Antropologi Indonesia.

- Anderson, Benedict. 2001. *Komunitas Imajiner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Armando, Ade. 2008. "Globalisasi, Dominasi, Informasi Dan Kita", dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (eds), *Refleksi Karakter Bangsa*". Jakarta : Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Penerbit Forum Kajian Antropologi Indonesia.
- Darlis, Andi Muh. 2012. *Konflik Komunal: Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*. Yogyakarta : Mata Padi Presindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Grimes, Barbara, 1988. *Ethnologue: Languages of the World*.
- Hatta, M. 1982. *Memoir Hatta*. Jakarta: Tinta Mas.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pujiriyani, Dwi Wulan (dkk). 2014. *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pranoto, Suharto W. 2001. *Serpihan Budaya Feodal*. Yogyakarta: Agastya Media.
- Radjab, Suryadi. 2002. *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman*. Jakarta: The Asia Foundation dan PBHI.
- Robet, Robertus. 2008. "Mahluk Hobbe-Nietzschean Atau Manusia Indonesia Yang Terbelah", dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (eds), *Refleksi Karakter Bangsa*". Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Penerbit Forum Kajian Antropologi Indonesia.
- Saifuddin, Achmad Fedyani dan Karim, Mulyawan. 2008, "Memperbincangkan Kembali Karakter Bangsa", dalam Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim (eds), *Refleksi Karakter Bangsa*". Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Penerbit Forum Kajian Antropologi Indonesia.

- Suyanto, Bagong. 2014. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-modernisme*. Jakarta: Kencana.
- Swasono (Ed), Mutia F.1984. *Bung Hatta: Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT Tinta Mas.
- Trisasongko, Dadang (ed). 2006. *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua: 10 Kisah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Wibowo, Fred. 2007. *Kebudayaan Menggugat: Menuntut Perubahan Atas Sikap, Perilaku, Serta Sistem Yang Tidak Berkebudayaan*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Zakaria, R. Yando. 2000. *Abieh Tandeh: Masyarakat Desa Di bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: LSAM.

NILAI DIDAKTIS DALAM CERITA RAKYAT NUSANTARA SEBAGAI PEMBENTUK PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Rusma Noortyani

rusmanoortyani@unlam.ac.id

ABSTRACT

The archipelago folklore generally themed the origin of a place. This research is motivated by the folklore that reflects the life of Indonesian society that is multy-compound and in real may be a reflection of nationhood, state, and society that are civilized and dignified. Didactic value that contains in the archipelago folklore includes didactic moral value, moral didactic value, religious didactic value, historical didactic value, and heroism didactic value. Didactic value derived from the archipelago folklore sourced in their own culture in showing the face of Indonesian culture to be the history stake as the forming of unity of the nation.

Keywords: didactic value and the archipelago folklore.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi PBSI FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Sastra daerah hidup pada setiap bagian wilayah Indonesia dan dimiliki oleh setiap suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang dikenal dengan sebutan sastra nusantara (Seli, 1996: 2). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang diperoleh dari PUM Kemendagri yang terbaru tahun 2015 ada 34 provinsi. Sastra daerah berkembang sejalan dengan perkembangan wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan sastra Nusantara beraneka ragam mulai dari keragaman genre, gaya ungkap, tokoh, mitologi, sampai ke masalah sosial, politik, dan budaya etnik.

Karya sastra yang mengangkat warna lokal martabat budaya daerahnya sudah dilakukan. Ini berkaitan dengan fungsi sastra daerah sebagai pelengkap alam pikiran, sikap dan nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Selain itu, sastra daerah juga sebagai penunjang perkembangan bahasa daerah, penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, dan penyampai gagasan-gagasan yang mendukung pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah dan era keterbukaan yang disebarkan oleh para reformis membuka jalan bagi daerah untuk menunjukkan jati dirinya.

Peran budaya daerah menjadi sangat urgen bagi perkembangan sastra Nusantara selanjutnya. Jika dalam karya sastra yang ditampilkan dapat menunjukkan adanya kebhinnekatunggalikaan, karya tersebut dapat menjadi perekat pergaulan antarsuku, ras, agama, dan antargolongan serta menjadi andil yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karya sastra yang menggambarkan budaya daerah menjadi akar dan pilar budaya Indonesia. Budaya daerah juga menjadi substansi utama dalam pengembangan budaya Indonesia baru dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas. Kehadiran budaya daerah dalam khazanah budaya Indonesia harus terus dibina.

Sastra daerah melalui cerita rakyat Nusantara tetap disajikan sampai sekarang. Selain itu, budaya daerah yang potensial dijadikan kekayaan budaya nasional dan juga ikut menopang budaya Nusantara. Kebudayaan nasional harus berdasar dan berakar pada puncak-puncak lama dan asli di daerah. Puncak kebudayaan lama dan asli memiliki unsur kebudayaan yang memenuhi syarat menuju kemajuan adat, budaya, dan persatuan bangsa. Jika mengingat pentingnya usaha memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional,

kebudayaan daerah harus dihidupkan dan dimasyarakatkan. Hubungan budaya lokal dan nasional tentu bersifat dialektis yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam skala nasional, kebudayaan yang berkembang membawa kekayaan lokal untuk melengkapi dan secara positif memberi ruang gerak kepada unsur-unsur lokal mengemuka ke publik. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang sebelumnya bersifat lokal berkembang ke arah nasional.

Usaha untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan sudah dilakukan, salah satunya dengan koleksi cerita rakyat nusantara. Cerita rakyat ini bertujuan mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Cerita rakyat merupakan bagian dari sastra lisan yang pernah hidup dan menjadi milik masyarakat, diwariskan secara lisan dan turun temurun yaitu dari satu generasi ke generasi yang lain. Cerita rakyat juga sebagai buah pikiran warisan leluhur bangsa mengandung bermacam-macam pesan. Cerita rakyat sebagai bagian dari kebudayaan mengandung berbagai gagasan dan penuh hati (makna) yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Cerita rakyat nusantara sebagai salah satu warisan budaya bangsa menyimpan berbagai misteri berupa sejarah dan nilai-nilai masa lalu bangsa yang harus digali dan diperhitungkan eksistensinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat ini berguna bagi kehidupan masyarakat sebagai kekayaan budaya. Finnegan (1978: 77-78) menyatakan bahwa keberadaan sastra lisan perlu dipertimbangkan terhadap hal-hal yang menyangkut geografi, sejarah, kepercayaan, dan agama serta aspek kebudayaan lainnya.

Cerita rakyat yang berkaitan dengan suatu nama tempat dan bentuk topografi, memiliki jumlah tidak terbatas di setiap daerah bila dibandingkan dengan mite atau dongeng (Dundes dalam Danandjaja, 1991: 67). Kajian cerita rakyat Nusantara telah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan cendekia, khususnya pemerhati folklor. Penelitian tentang cerita rakyat sudah dilakukan. *Pertama*, penelitian ditulis oleh Sitiatun (2014) dengan judul *Analisis Tema dan Amanat Kumpulan Legenda Cerita Rakyat Nusantara 33 Provinsi Karya Dea Rosa*. Hasil penelitian ini menemukan tema tentang sejarah dan asal mula, baik asal mula nama kota maupun pulau, sedangkan amanat yang diperoleh dari kumpulan Legenda cerita Nusantara 33 Provinsi ini banyak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik dan berguna untuk orang lain. Namun, khusus

didaktis dalam cerita rakyat Nusantara tidak dijelaskan. *Kedua*, Trisari S. dan Soeratmo dalam artikel jurnal UGM (2011) yang berjudul *Struktur Naratif Cerita Rakyat Jambi: Telaah berdasarkan Teori Vladimir Propp*. Penelitian tersebut menganalisis lima buah cerita rakyat Jambi dengan menggunakan struktur naratif dari Vladimir Propp dalam menganalisis fungsi yang terdapat dalam cerita rakyat. Hasil penelitiannya hanya menjelaskan mengenai jumlah fungsi pelaku dan kerangka urutan fungsi lima cerita rakyat Jambi tersebut. *Ketiga*, penelitian Sunarto (2008) berjudul *Nilai-Nilai Didaktis dalam Cerita Rakyat Aji Kahar Masyarakat Kuala Pane Kabupaten Labuhan Batu*. Penelitian ini sudah membahas nilai didaktis, tetapi hanya satu daerah. Nilai didaktis yang ditemukan yaitu tolong-menolong, memiliki sikap kemanusiaan, kejujuran, sikap tidak hati-hati akan merugikan diri sendiri, dan amanah.

Dari tiga penelitian di atas, belum ada yang meneliti tentang nilai didaktis untuk cerita rakyat Nusantara yang dikaitkan dengan pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu peneliti akan memfokuskan nilai didaktis dalam cerita rakyat Nusantara sebagai pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai didaktis yang terkandung dalam cerita rakyat Nusantara belum terungkap secara mendalam melalui kegiatan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan penelitian lebih khusus dan mendalam sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai nilai didaktis dalam cerita rakyat Nusantara sebagai pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa.

II. METODE

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Suryabrata (1995: 18) penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual yang akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat populasi yang terdapat di daerah tertentu. Penelitian kualitatif sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan Bogdan dan Biklen (1998: 27:30). Alasan menggunakan penelitian kualitatif: 1) cerita rakyat Nusantara dipandang bersifat alamiah sebab peneliti tidak melakukan rekayasa terhadap tulisan cerita rakyat tersebut, 2) cerita rakyat Nusantara dipandang sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai *human instrument* yang secara hermeneutis dapat memahami nilai didaktis dalam cerita rakyat sebagai pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, 3) pemaparan dan pembahasan hasil analisis data bersifat

deskriptif-eksplanatif, 4) penelitian ini lebih mengutamakan proses tanpa mengabaikan hasil, dan 5) analisis data dilakukan secara induktif. Objek penelitian ini berkaitan dengan nilai didaktis dalam cerita rakyat Nusantara. Data penelitian ini berupa cerita rakyat nusantara dalam bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana dianalisis nilai didaktis. Sumber data berupa cerita rakyat Nusantara dari berbagai daerah. Data dikumpulkan melalui penelitian bahasa dan sastra ini digunakan metode hermeneutik, mengingat sifat dari hermeneutik adalah menganalisa atau menafsirkan teks secara keseluruhan. Secara spesifik, dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yang biasa digunakan dalam metode hermenetik, yaitu analisis naratif, analisis struktural, dan apropriasi. Analisis naratif memungkinkan untuk mengetahui unsur-unsur kisah dalam teks sehingga memudahkan pembaca yang belum membaca teks yang diteliti, sedangkan analisis struktural digunakan untuk mengetahui struktur-struktur yang mengikat dan membentuk kisah dalam suatu teks tersebut. Di samping itu apropriasi digunakan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam yakni untuk menyambungkan teks dengan rangka sosial budaya, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan hasil analisis yang lebih optimal. Dalam penelitian ini pun digunakan analisis model interaktif dilaksanakan mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penyimpulan data, dan verifikasi data (Miles dan Huberman, 1984).

III. NILAI DIDAKTIS DALAM CERITA RAKYAT

Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik menurut standar logika (benar atau salah), estetika (baik atau buruk), etika (adil atau tidak adil), agama (dosa atau tidak), serta menjadi acuan dan sistem atas keyakinan diri maupun kehidupan (Darmadi, 2007: 27-28). Santayana (Hazlitt, 2003: 205) menyatakan bahwa nilai merupakan sebuah prinsip perspektif dalam ilmu, tidak lebih kecil daripada kebenaran dalam hidup.

Didaktis merupakan unsur-unsur dari pendidikan yang esensial bagi manusia. Dengan kata lain, pendidikan dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada di alam semesta demi mempertahankan kehidupannya. Pendidikan juga dapat membentuk kepribadian seseorang dan dapat diakui sebagai kekuatan yang dapat menentukan prestasi

dan produktivitas seseorang. Dengan bantuan pendidikan, seseorang memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, sehingga ia mampu menciptakan karya yang bermanfaat, baik dalam hidupnya maupun dalam lingkungan sekitarnya. Dengan bantuan pendidikan manusia dapat mencapai suatu peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Begitu pula dengan seorang pengarang yang selalu menyelipkan unsur-unsur pendidikan (didaktis) dalam karya-karyanya agar terjadi sublimasi terhadap pembacanya, sehingga diharapkan apa yang dibacanya dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam bersikap dan bertindak.

Karya sastra berfungsi sebagai *dulce et utile*, artinya sebagai penghibur sekaligus berguna. Dari pengertian dipahami bahwa peranan novel bukan sekadar menghibur tetapi juga mengajarkan sesuatu. Belgion dalam Welck (1972) mengatakan: *That is to say, every writer adopts a view or theory of life... the effect of the work is always to persuade the reader to accept that view or theory. This persuasion is to say, the reader is always led to believe something, and that assent is hypnotic-the art of the presentation seduces the reader...* (=setiap penulis mengadopsi pandangan atau teori kehidupan... efek dari pekerjaan selalu membujuk pembaca untuk menerima pandangan atau teori. Persuasi ini bertujuan agar pembaca selalu dituntun untuk percaya sesuatu sehingga pembaca menggiring melalui presentasi hipnosis-seni).

Seorang pengarang akan memperhatikan nilai didaktis dalam karyanya. Nilai didaktis yakni pendidikan dan pengajaran dapat mengantarkan pembaca kepada suatu arah tertentu. Oleh sebab itu karya sastra yang baik adalah karya sastra yang memperlihatkan tokoh-tokoh yang memiliki kebijaksanaan dan kearifan sehingga pembaca dapat mengambilnya sebagai teladan. Keteladan yang terdapat dalam cerita bisa berupa: 1) ajaran kebaikan terdapat dalam cerita; 2) moral yang digambarkan; 3) falsafah hidup tokoh-tokohnya; 4) ganjaran yang diterima tokoh-tokohnya; 5) isme-isme yang mempengaruhi atau menggerakkan tokohnya; 6) kekalahan nilai keburukan; 7) keadaan pendidikan tokohnya yang digambarkan; dan 8) amanat di akhir cerita.

Bentuk-bentuk kesusastraan itu diciptakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni sebagai alat mengekspresikan pikiran dan perasaan serta sebagai alat menyampaikan petuah-petuah dan pendidikan. Sastra lisan yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat dikenal pula sebagai

cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan satu bentuk folklor yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan merupakan milik masyarakat yang bersangkutan. Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, diantaranya kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat (Danandjaja, 1991: 2) yang menyebabkan eksistensi kita di masa kini, dan belajar mengapresiasi warisan leluhur.

Satu dari sekian banyak warisan budaya di Indonesia adalah cerita rakyat Nusantara. Cerita rakyat merupakan satu jenis cerita yang hidup dan berkembang dengan caranya sendiri sampai saat ini. Cerita rakyat juga memainkan peranan penting dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, terutama dalam pembangunan rohani bangsa Indonesia. Cerita rakyat Nusantara banyak memberikan pesan moral maupun pengajaran yang penting untuk setiap pembaca. Pada saat membaca cerita rakyat selain bersifat hiburan cerita rakyat juga memiliki nilai-nilai pendidikan atau didaktis yang terkandung di dalam sebuah cerita. Selain itu, cerita rakyat dapat menjadi alat untuk memelihara dan menurunkan buah pikiran suatu suku atau bangsa pemilik sastra itu. Pendapat ini mengandung arti bahwa melalui cerita rakyat nusantara dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

Cerita rakyat Nusantara berhubungan dengan kepercayaan dan merupakan peradaban yang erat pula hubungannya dengan kehidupan. Untuk itu cerita rakyat Nusantara merupakan bahan analisis yang tepat untuk memahami tingkah laku, pikiran dan falsafah kehidupan masyarakat pemilik cerita tersebut. Cerita rakyat yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini adalah cerita rakyat Nusantara dari buku koleksi cerita rakyat nusantara karya Dwiko R. (2006). Dalam buku tersebut banyak di antara cerita rakyat itu yang mengandung ide yang besar, buah pikiran yang luhur, penyelaman jiwa yang berharga dan sebagainya. Semuanya itu masih tetap dapat dimanfaatkan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini Nurgiyantoro (2002: 166) menjelaskan bahwa unsur-unsur (buah pikiran yang luhur) lebih ditekankan, karena cerita tradisional (cerita rakyat) hadir pertama-tama dan terutama untuk memberikan pengajaran (didaktis).

Berdasarkan paparan di atas, cerita rakyat Nusantara layak dikaji dan dianalisis sebagai salah satu usaha pelestarian serta pengembangan nilai-nilai karya sastra daerah juga akan memperkaya hazanah sastra dan budaya Indonesia, sehingga dapat mempersatu bangsa. Apabila tidak dilestarikan atau dikembangkan maka dikhawatirkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan hilang dan generasi yang akan datang tidak akan mengenal lagi cerita-cerita rakyat tersebut. Sementara itu cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia akan lebih dikenal bahkan mendapat posisi di hati masyarakat kita, seperti cerita-cerita yang bercorak kriminal, kekerasan, perusakan, penindasan, pemboman di mana-mana dan lain-lain. Ditambah lagi dengan masuknya cerita-cerita yang hanya bersifat hiburan saja dan tidak mengandung nilai-nilai pengajaran dan pendidikan (didaktis), melalui media informasi seperti televisi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai didaktis dalam cerita rakyat Nusantara meliputi nilai-nilai: (1) nilai didaktis moral, (2) nilai didaktis adat, (3) nilai didaktis agama, (4) nilai didaktis sejarah, dan (5) nilai didaktis kepahlawanan. Berikut nilai didaktis yang ditemukan dalam cerita rakyat Nusantara:

- 1) Moral selalu mengacu pada perbuatan manusia, yakni perbuatan yang baik dan buruk. Moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat ditafsirkan dan diambil lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca (Nurgiyantoro, 2002: 321). Nilai didaktis moral yang berisi ajaran baik dapat ditemukan dalam cerita rakyat berjudul *Asal Usul Patung Joko Dolog*. Sikap baik ditunjukkan pada saat menerima tamu. Menerima tamu dengan hormat adalah sifat yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Selang beberapa saat kemudian, Adipati Jayengrana kedatangan tamu dari Kabupaten Kediri. Tamu itu seorang pemuda bernama Jaka Tarumo, putra Bupati Kediri. Ia memang sering berkunjung ke Surabaya. Bahkan karena kerap kali datang, ia pun sudah tidak merasa asing (Dwiko R., 2006: 10)”.

2) Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984: 10). Secara lengkap, Wujud itu disebut adat tata kelakuan. Adat ini berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Nilai didaktis adat dapat ditemukan dalam cerita rakyat berjudul *Suwunggaling*. Pengangkatan pejabat dilakukan dengan adat upacara. Upacara dapat memperlancar cara mempelajari adat dan pengetahuan kesukuan serta membantu untuk melestarikan kebudayaan. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut:

“Pada saat dilangsungkan upacara perjamuan sebagai perayaan pengangkatan Jaka Berek sebagai Bupati (Dwiko R., 2006: 45)”.

Nilai didaktis tampak juga pada cerita rakyat berjudul *Naga Baru Klinting* adanya upacara bersih desa agar desa terjaga dari musibah dengan kutipan berikut:

“Wanita itu mulai bercerita bahwa beberapa tahun silam di Kademangan Mangiran hendak diadakan hajatan berupa bersih desa. Karenanya ia dipanggil ayahnya, Demang Taliwangsa. “Putriku, pergilah menemui Ki Wanabaya dan katakan bahwa pusaknya dipinjam beberapa hari untuk keperluan upacara bersih desa,” kata Ki Taliwangsa kepada anak gadisnya (Dwiko R., 2006: 20)”

3) Agama diyakini oleh para pendukungnya merupakan sumber rasa kewajiban sosial (Russell, 1993: 80). Ketika seseorang berbuat hal yang tidak menyenangkan bagi para dewa, mereka cenderung menghukum tidak hanya individu yang bersalah tetapi seluruh suku bangsa itu (Russell, 1993: 80). Religi dan kepercayaan mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan tentang wujud dari alam gaib (supernatural); serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1984: 45). Agama sungguh penting untuk pendidikan. Nilai didaktis agama dapat ditemukan dalam cerita rakyat berjudul *Asal Usul Situ Bagendit*. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Wahai Nyi Mas Inten, sadarlah bahwa hartamu itu hanyalah titipan dari Tuhan. Jika kau kikir dan kejam terhadap orang

misikin, maka tunggulah pembalasan Tuhan! Ujar Kakek”
(Dwiko R., 2006: 45)”.

- 4) Sejarah berkaitan dengan warisan budaya. Waluyo (1990) menyatakan bahwa naskah dan tradisi lisan warisan budaya leluhur bermanfaat untuk mengenali perjalanan sejarah masyarakat lokal dan bangsa. Cerita rakyat dapat berperan sebagai penghubung kebudayaan masa silam dengan kebudayaan yang akan datang (Sugono, 2003: 127). Melalui cerita rakyat setidaknya dapat dirunut kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Nilai didaktis sejarah dapat ditemukan dalam cerita rakyat berjudul *Asal Usul Banjarmasin*. Hal tersebut dilihat pada kutipan di bawah ini:

“Biarkan aku tetap berkuasa di Bandar Masih ini. Aku akan membesarkan kota pelabuhan ini. Jika engkau enggan memerintahkan Nagara Daha, biarlah pemerintahan itu bergabung dengan Bandar Masih. Kalau berkenan paman bisa memerintah di Batang Alai. Nanti kita bisa bekerjasama membangun kemajuan rakyat di Kalimantan ini,” jawab Pangeran Samudra. ... Bandar Masih akhirnya menjadi kerajaan besar dan ramai. Sayangnya jika kemarau tiba, air laut masuk ke sungai Barito sehingga rakyat kesulitan air. Karena itu Bandar Masih kemudian berubah menjadi Banjarmasin yang artinya pelabuhan beairasin (Dwiko R., 2006: 121)”.

- 5) Kepahlawanan di dalam setiap peristiwa atau kejadian pasti akan menjadikan idola dalam cerita. Hal ini juga dapat dijumpai dalam karya sastra, termasuk di dalamnya cerita rakyat. Tokoh atau beberapa orang yang menjadi pusat cerita adakalanya dikagumi masyarakat, tetapi ada pula yang dibenci masyarakat. Pelaku cerita yang dikagumi biasanya mempunyai keberanian, jiwa kepahlawanan atau semangat perjuangan, membela kebenaran, memperjuangkan daerah atau tanah kelahirannya, dan sebagainya. Nilai didaktis kepahlawanan dapat ditemukan dalam cerita rakyat berjudul *Asal Usul Huruf Jawa*. Tokoh Ajisaka dalam cerita rakyat ini berusaha

menenangkan rakyat dan berani melawan kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Pada kesempatan lain beberapa prajurit kerajaan Medang memasuki desa Sengkeran. Orang-orang tahu jika prajurit datang pasti mereka mencari seseorang untuk dijadikan mangsa Prabu Dewata Cengkar. Mereka ketakutan dan berlarian mencari persembunyian. Ajisaka berusaha menenangkan. Dia menyarankan agar semua penduduk mengungsi di rumah Nyai Angkeran. Ketika para prajurit mendatangi rumah Nyai Angkeran segera Ajisaka menyongsongnya” (Dwiko R., 2006: 103-105).

Nilai didaktis kepahlawanan yakni tokoh Aku berani terhadap kezaliman yang tampak dalam kutipan berikut:

“Nini, engkau jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Aku akan bertanggung jawab jika pasukan Prabu Menak Prakoso mencarimu.” (Dwiko R., 2006: 30).

V. PENUTUP

4.1 Simpulan

Cerita rakyat Nusantara mencerminkan keberagaman sastra Nusantara di Indonesia yang multikultural itu tidak menyurutkan semangat membangun keindonesiaan yang lebih baik, lebih beradab, dan lebih bermartabat. Perkembangan karya sastra Nusantara di Indonesia secara nyata menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu pun berkaitan erat dengan kehidupan bersastra. Nilai didaktis yang terkandung dalam cerita rakyat nusantara meliputi: 1) nilai didaktis moral, 2) nilai didaktis adat, 3) nilai didaktis agama, 4) nilai didaktis sejarah, dan 5) nilai didaktis kepahlawanan. Berdasarkan lima nilai didaktis yang ditemukan dalam cerita rakyat Nusantara sebagai sarana untuk membentuk nilai-nilai didaktis yang berlaku di masyarakat, sehingga terbentuk persatuan dan kesatuan bangsa.

4.2 Rekomendasi

Kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk merancang dan menentukan arah kebijakan.

Selain itu, dapat digunakan sebagai media untuk melindungi, mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan keberadaan cerita rakyat sebagai kekayaan budaya nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C & Sari Knopp Biklen. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Danandjaja, James. 1991. *Folklor Indonesia: Ilmi Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafiti.
- Darmadi, Hamid. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung : Alfabeta.
- Dwiko R., Firzatullah. 2006. *Koleksi Cerita Rakyat Nusantara*. Surabaya: Pustaka Media.
- Finnegan, Ruth. 1978. *Oral Literature In Africa Nairobi*. London: Oxford University Press.
- Hazlitt, Henry. 2003. *Dasar-Dasar Moralitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koetjaraningrat. 1984. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Miles, M.B. & A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2002. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Russel, Bertrand. 1993. *Pendidikan dan Tatahan Sosial* (Edisi terjemahan oleh A Setiawan Abadi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seli, Sesilia. 1996. *Struktur, Fungsi, dan Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Dayak Kanayatn*. Tesis tidak diterbitkan. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Sugono, Dendy (Ed). 2003. *Buku Praktis Bahasa Indonesia I*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sunarto 2008. *Nilai-Nilai Didaktis dalam Cerita Rakyat Aji Kahar Masyarakat Kuala Pane Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi tidak diterbitkan Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sitiatun. 2014. *Analisis Tema dan Amanat Kumpulan Legenda Cerita Rakyat Nusantara 33 Provinsi Karya Dea Rosa*. Artikel E-Journal. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/EJOURNAL-SITIATUN-090388201131-FKIP-2014.pdf. (Diakses pada 20 September 2016).
- Trisari S, Agatha. dan Siti Chamamah Soeratmo. 2011. *Struktur Naratif Cerita Rakyat Jambi: Telaah berdasarkan Teori Vladimir Propp*. Artikel jurnal UGM Sosiohumanika. Diakses pada 22 September 2016).
- Waluyo, Herman J. 1990. *Apresiasi Prosa dan Drama*. Surakarta: UNS Press.
- Wellek, Rene. 1972. *Literary Theory, Criticism and History dalam 20th Century Literary Criticism David Lodge*. Ed. London dan New York: Logman.

PLUS-MINUS BUDAYA BANJAR

H. Rustam Effendi

rustameffendi@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Sebuah budaya selalu berlaku pada satu etnik/masyarakat tertentu, kawasan tertentu, dan kurun waktu tertentu. Hampir tidak ada budaya yang dapat berlaku/bertahan melintasi kurun-kurun masa/waktu yang dilakoni oleh masyarakatnya. Dalam perjalanan waktu itu, budaya suatu etnik ada yang bisa dipertahankan dan ada yang wajib ditinggalkan. Bagian budaya yang mampu hidup hingga saat ini dan diupayakan dilestarikan hingga saat-saat yang akan datang merupakan budaya inti suatu etnik atau bangsa. Budaya itu (budaya inti) menjadi identitas suatu etnik dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya asing yang tidak bersesuaian dengan ajaran budaya inti ini. Budaya inti telah terbukti mampu bertahan setelah melewati beberapa zaman. Tugas generasi bangsa adalah menjaga dan memertahankan budaya inti. Budaya inti menjadi identitas atau ciri khas antara satu etnik dengan satu etnik yang lain masyarakat.

Masyarakat dan budaya Banjar paling tidak telah melalui beberapa fase atau zaman, yakni, zaman Prasejarah, zaman Pengaruh Hindu, Zaman Peralihan Hindu ke Islam. Zaman Islam, Zaman Pengaruh Barat, dan Zaman Teknologi Informasi (bandingkan dengan Effendi, 2011: 122; Deraman, 2001: 20). Zaman Prasejarah adalah suatu masa semua masyarakat Banjar tidak

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi PBSI FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

mengenal tulisan sehingga peninggalan budayanya hanya bisa terekam melalui tradisi lisan. Zaman Hindu adalah suatu masa kedatangan agama Hindu sekaligus budaya Hindu hingga runtuhnya kerajaan Hindu. Zaman Islam adalah masa masuknya agama Islam sekaligus budaya Islam dan pengaruhnya hingga sekarang. Zaman Peralihan adalah masa permulaan Islam sehingga budaya yang hidup di masyarakat adalah pencampuran antara budaya Hindu dan Islam. Zaman Pengaruh Barat adalah zaman kedatangan penjajah dan tulis-menulis atau literasi telah dikuasai oleh sebagian masyarakat Banjar.

Zaman teknologi dan informasi adalah masa yang seolah batas wilayah budaya etnik/negeri/negara menjadi tidak jelas akibat kemajuan teknologi dan informasi. Pada masa ini, budaya berseliweran di depan setiap mata. Pada masa ini pula, satu etnik yang menguasai teknologi dan informasi akan sangat bebas 'memasarkan' budayanya ke etnik-etnik di seantero bumi. Etnik yang menguasai teknologi dan informasi akan menjadi *super power* dalam pertarungan budaya, dan etnik yang tidak menguasai teknologi dan informasi serta lemah pembinaan kebudayaannya akan menjadi 'mangsa' etnik *super power* dan pada suatu saat, etnik itu hanya tinggal nama sedangkan isinya (budayanya) adalah budaya penjajah.

Sejak ratusan tahun yang lalu (sejak Sultan Suriansyah berikrar memeluk agama Islam) hingga saat ini, sebagian besar etnik Banjar memeluk agama Islam. Etnik Banjar Islam saat ini melewati berbagai kurun waktu dan setiap kurun waktu itu melahirkan kebudayaan baru. Dari sisi keyakinan beragama, etnik Banjar memulai kehidupannya dengan berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada pada pohon-pohon, batu-batu, makhluk-makhluk halus, dan karena itu, mereka meminta rezeki, keselamatan hidup kepada pohon, batu, dan makhluk-makhluk halus itu. Setelah kurun itu, masuk agama Budha dan Hindu. Agama Budha mengajarkan reinkarnasi (penjelmaan), yaitu kelahiran kembali seseorang melalui perjalanan ruhnya. Agama Hindu adalah agama yang mengajarkan adanya kekuasaan tuhan pada segala sesuatu; Atman menurut agama Hindu. Tuhan mewujudkan diri dalam berbagai sifat yang mewakili segala aspek kehidupan nyata, misalnya, Syiwa adalah dewa pencipta sekaligus penari dengan empat tangan, Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu dianggap sedang menjaga kelangsungan dunia, dan lain-lain. Menjadi penganut agama Hindu dengan sendirinya masuk ke salah satu kasta (strata sosial). Kasta/strata sosial seseorang ditentukan oleh sikapnya dan merupakan karma dalam

kehidupannya sekarang (Gayo1994: 168-169). Setelah kurun kepercayaan terhadap agama Hindu maka datanglah agama Islam yang mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang menyerupai-Nya.

Sesungguhnya keyakinan beragama inilah yang mendorong dan memandu lahirnya kebudayaan. Hampir dipastikan, kebudayaan yang meliputi kebudayaan fisik dan nonfisik (cara berpikir dan bertindak/berkelakuan) semuanya dijiwai oleh keyakinan beragama. Arsitektur rumah, permainan rakyat, makanan rakyat, nyanyian rakyat, cerita rakyat, dan lain-lain, sadar atau tidak sadar, selalu terdapat hubungannya dengan kaidah kepercayaan atau agama. Arsitektur rakyat selalu ada bagian-bagian rumah yang letak dan cara pembuatannya dengan bentuk dan arah tertentu agar dengan cara itu pemilik rumah dapat hidup tenteram di dalamnya. Permainan rakyat dibuat dengan tidak menyalahi aturan agama dan terkadang ada mantera untuk memulai permainan. Makanan rakyat selalu mempertimbangkan halal dan haram serta berkah. Begitu juga unsur budaya yang lain, selalu dijiwai oleh keyakinan agama.

Pendidikan juga melahirkan budaya. Masyarakat Banjar yang lama terjajah dan tidak terdidik (karena pendidikan tidak difasilitasi oleh penjajah bahkan dihalang-halangi) menyebabkan etnik Banjar menjadi etnik terkebelakang. Masyarakat Banjar pada masa penjajahan adalah masyarakat yang buta aksara dan atau masyarakat yang sangat minim pendidikan. Lembaga pendidikan pribumi juga sangat tidak memadai. Sekolah pribumi, pesantren, dan sekolah-sekolah nonformal lainnya sangat terbatas dan sangat dibatasi oleh penjajah. Kondisi masyarakat pada masa itu yang minim pendidikan juga melahirkan budaya. Budaya wajib ada tanpa memperdulikan bagaimana dan seperti apa kondisi masyarakatnya karena budaya merupakan keniscayaan dalam masyarakat. Deraman (2001: 11) mengemukakan, "Kebudayaan mempunyai hubungan yang amat rapat dengan masyarakat, karena, kalau tidak ada masyarakat tidak ada budaya." Budaya yang mereka lahirkan tentu adalah budaya yang sesuai dengan wawasan mereka pada saat itu.

II. PLUS-MINUS BUDAYA BANJAR

Kita bisa berbicara plus-minus suatu kebudayaan apabila kebudayaan yang dibicarakan itu merupakan kebudayaan warisan di suatu era atau zaman. Pada saat penjajahan, etnik Banjar memiliki kebudayaan dan sebagian kebudayaan itu tidak cocok lagi ketika kita memasuki era revolusi. Kebudayaan di era revolusi sebagian tidak cocok lagi ketika etnik Banjar berada di era kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Jadi, pemangkasan atau revisi kebudayaan akan terjadi manakala kebudayaan itu dievaluasi dan evaluasi itu hanya mungkin dilakukan disaat adanya pergantian kurun atau era kehidupan masyarakat.

Paling gampang kalau kita mengamati perubahan kebudayaan terhadap kebudayaan yang bersifat fisik, seperti arsitektur rakyat (rumah Banjar dan balai adat). Rumah Banjar yang diwariskan oleh nenek-moyang Banjar sudah punah. Dahulu, rumah Banjar dibuat dengan beberapa anak tangga sehingga kolong rumah dapat digunakan menumbuk padi dan bermain anak-anak. Ornamen yang selalu ada adalah bungkahan kayu yang berbentuk nenas. Bentuk rumah yang semacam itu sudah ditinggalkan masyarakatnya dan diganti dengan arsitektur baru yang jauh berbeda dengan arsitektur dahulu.

Berbeda dengan kebudayaan yang bersifat fisik maka warisan kebudayaan yang berbentuk rohani (cara berfikir, bersikap, dan bertindak) tidak begitu jelas bagaimana gambaran masyarakat terhadap warisan budaya itu. Saya melihat, gotong royong, misalnya, adalah warisan budaya yang patut dipertahankan, namun di kota-kota sudah sangat kurang dilaksanakan. Gotong royong yang pada masa lalu tidak sekedar tolong-menolong tetapi juga untuk menyambung silaturahmi. Masyarakat yang bergotong royong hadir bekerja dan bercengkerama dalam suatu kegiatan. Mereka saling mengenal, saling menolong, keikhlasan dalam tolong menolong itu sangat jelas terukur melalui kehadiran dan saling mengenal satu sama lain. Kalau mereka tidak mengenal atau lupa, maka sejenak akan ada dialong bertanya-jawab tentang juriat masing-masing. Hubungan mereka adalah hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ayah-bunda dan atau datuk-neneknya.

Budaya Banjar yang bernilai plus/positif telah banyak dibicarakan. Datuk Adjim Ariyadi (almarhum) sering muncul di televisi lokal menyampaikan *papadah/nasihat urang bahari* yang bernilai positif. Demikian juga Sirajul Huda, Tajuddin Noor Gani, YS Agus Suseno, dan budayawan Banjar lainnya telah banyak pula

membicarakan budaya Banjar yang bernilai positif. Hingga saat ini hampir tidak pernah ada orang Banjar yang mau membedah budaya warisan nenek moyang ini untuk melihat plus-minus budaya itu bagi masyarakat Banjar sekarang. Mungkin banyak orang yang takut kalau membicarakan kekurangan budaya Banjar dianggap sebagai pengkhianat terhadap nenek moyang atau bisa juga dianggap *mambuang* adat sendiri. Saya kira, kita harus berani memilah yang mana budaya Banjar yang perlu dimuseumkan, direvisi, dan dilestarikan agar generasi kita siap hidup dan siap bersaing pada zaman ini. Makalah ini berfokus kepada budaya Banjar yang berdasarkan fakta budaya bisa dianggap sebagai budaya yang kurang atau tidak relevan lagi bagi kehidupan masyarakat budaya Banjar pada saat ini.

Setiap etnik memiliki budaya dan setiap budaya bernilai positif pada saat budaya itu dipikirkan, dilakukan, dan atau dibuat. Pada saat lain, karena perubahan wawasan masyarakat, baik karena pendidikan, agama, dan pergaulan umat manusia, maka satu kebudayaan bisa saja ditinggalkan oleh masyarakatnya. Hanya kebudayaan yang bernilai plus (positif) yang wajib diwariskan kepada generasi penerusnya, sedangkan budaya yang bernilai minus (negatif) wajib pula ditinggalkan atau paling tidak direvisi oleh masyarakatnya.

Evaluasi terhadap kebudayaan akan menghasilkan tiga kemungkinan perlakuan terhadap warisan kebudayaan. Pertama, produk budaya warisan yang diterima tanpa *reserve* karena memang sangat bernilai positif, kedua, produk budaya warisan yang diterima tetapi dengan revisi, dan, ketiga, produk budaya yang tidak cocok lagi dengan masyarakat sekarang sehingga produk itu cukup dimuseumkan untuk dikenang oleh generasi Banjar berikutnya.

Budaya Banjar warisan yang diterima tanpa *reserve* di antaranya adalah gotong royong, rakat-mufakat, toleransi, agamis, dan bertanggungjawab. Hanya saja, budaya yang sangat ideal ini hanya ada dalam angan-angan namun tidak lagi membudaya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Unsur budaya ini kita akui pernah ada dan kita akui bernilai positif, namun, apa boleh buat, dalam praktiknya, unsur budaya sangat sukar dilaksanakan.

Pada masa lalu, gotong royong tampak pada saat mengerjakan sawah, *bakakawinan* (mengawinkan anak), membangun rumah, dan lain-lain. Rakat-mufakat terlihat pada saat perayaan maulid nabi, *saprah* amal (mengumpulkan uang masyarakat untuk membangun tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain).

Toleransi atau memahami dan menerima perbedaan setiap anggota masyarakat, seperti kebiasaan datang ke *saprah* amal yang diadakan oleh masyarakat lain dan hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu antar umat beragama.

Kehidupan agamis terlihat dari perhatian masyarakat yang sangat serius terhadap ajaran salat. Mereka membangun surau atau masjid dan sekaligus bertanggung jawab mengisi syaf-syaf di surau atau masjid yang mereka bangun. Waktu *baarjan* atau bekerja di sawah tidak akan melanggar waktu salat, biasanya hanya sampai jam 11 atau 11.30. Mereka hati-hati kalau *kaguguran dauh* (asyik bekerja di sawah tiba-tiba beduk untuk salat sudah ditabuh). Sebagian besar mereka tidak bekerja pada hari Jumat atau kalau bekerja maka jam 10 sudah kembali ke rumah masing-masing.

Bertanggung jawab tampak pada sikap pemimpin masyarakat pada masa lalu. Pemimpin masyarakat masa lalu dikenal dengan nama *pambakal*, *wakil pambakal*, dan *pangirak*. *Pambakal* adalah pemimpin sebuah kampung dan *pangirak* adalah pemimpin anak kampung (biasanya anak-anak kampung terpisah satu sama lain, yang memisahkan bisa sungai, hutan, sawah, atau semak-belukar). *Pambakal* dan *pangirak* ditunjuk oleh masyarakat karena dia memiliki kelebihan dari yang lain, terutama rasa tanggung jawab, keberanian, kejujuran dan rela berkorban demi masyarakatnya. Biasanya, *pambakal* dan *pangirak* diyakini memiliki ilmu yang dengan ilmu itu dia dapat melindungi masyarakatnya. Yang dimaksud ilmu dalam budaya Banjar adalah ilmu mistik, yakni ilmu *taguh*, ilmu *bahilang*, dan lain-lain. Di samping ini, orang yang berilmu juga memiliki sahabat. Yang dimaksud sahabat dalam budaya Banjar adalah teman dari golongan makhluk halus.

Kebudayaan warisan yang perlu direvisi seperti sikap cepat puas terhadap hasil yang diperoleh, visi yang tidak terlalu jauh, senang bersuka-sukaan, suka mengalah, curiga yang terlalu berlebihan terhadap orang lain.

Kebudayaan masa lalu sebagian bernilai positif dan sebagian lagi bernilai negatif atau setengah negatif. Oleh karena itu, pewarisan kebudayaan masa lalu bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni kebudayaan yang bernilai positif (plus) yang dapat diterima tanpa reserve, kebudayaan yang bernilai negatif yang harus kita museumkan, dan kebudayaan setengah negatif yang masih bisa kita terima dengan revisi. Bagi masyarakat Islam, mantra

merupakan contoh kebudayaan yang harus dimusemkan. Dia dikenang sebagai bagian dari perkembangan sejarah peradaban Banjar. Mantra tidak dilupakan, tetapi tetap dikenang agar anak cucu selalu tahu bagaimana perjalanan budaya orang tuanya pada masa lalu. Mantra pernah mengalami revisi pada masa sastra pengaruh peralihan, yakni peralihan Hindu ke Islam. Pada masa itu, masyarakat Islam belum memiliki sastra sehingga sastra Hindu itu yang di-Islamkan. Mantra yang pada mulanya berbahasa Banjar di-Islamkan dengan cara menambah *Bismillahirrahmanirrahim* dan diakhiri dengan *barakat lailaha ilalallah Muhammad Rasulullah*.

III. BUDAYA BANJAR BERNILAI PLUS/POSITIF

Sebelum membicarakan budaya Banjar yang bernuansa negatif terlebih dahulu saya bicarakan pula beberapa budaya Banjar yang bernuansa positif dan bahkan sangat positif sehingga perlu dipelihara. Setiap budaya, baik budaya bernilai positif dan atau negatif harus didasarkan pada fakta budaya. Fakta budaya adalah fakta yang berupa kegiatan, karya, dan atau cara berpikir masyarakat Banjar yang pernah berlaku atau masih berlaku hingga saat ini. Fakta budaya itu menjadi *hujah* tentang plus-minusnya sebuah produk budaya.

3.1 Budaya Rakat-Mufakat

Fakta budaya rakat-mufakat; *mambangkit batang tarandam*

Sekitar tahun 65-an, desa Karatungan (sekarang Kecamatan Limpasu) masyarakat bersepakat membangun sebuah masjid. Berdasarkan kesepakatan itu, mereka rela berkorban demi terbangunnya sebuah masjid. Anggota masyarakat yang pandai bertukang, menjadi tukang tanpa upah sedikit pun kecuali makan dan minum sekedarnya yang disajikan di bagian dalam bangunan masjid. Demikian pula anggota masyarakat yang mempunyai *banih* 'padi' yang berlebih akan mewakafkan sebagian padinya untuk masjid. Anggota masyarakat yang tidak memiliki apa-apa untuk diwakafkan dan tidak memiliki keterampilan bertukang akan mewakafkan tenaganya untuk membantu tukang mengangkat material yang diperlukan atau pergi ke hutan mencari dan menebang pohon besar untuk digergaji dijadikan bahan bangunan. Semua anggota masyarakat bersepakat bergotong royong dengan berbagai cara.

Satu hal yang menarik ketika masjid itu kekurangan bahan yang berasal dari kayu ulin. Pada masa itu, di desa Karatungan, kayu ulin sudah lama punah. Walaupun demikian, orang-orang tua pada masa itu masih ingat ada kayu ulin yang pernah rebah di suatu tempat dan sekarang mungkin sudah terbenam di dalam lumpur. Mereka mencari kayu ulin itu dengan cara beramai-ramai memasuki hutan rawa-rawa dengan masing-masing membawa *asak* (tongkat). *Asak* itu mereka tumbuk-tumbukkan ke dalam lumpur. Apabila tongkat mereka tertumbuk pada suatu benda maka mereka berhenti di situ. Secara bergantian mereka menghentak-hentakkan *asak* ke benda keras yang ada di dalam lumpur itu. Sebagian mereka, terutama orang tua-tua, sangat mengenal bunyi hentakkan yang tertumbuk kayu ulin. Apabila mereka sudah yakin bahwa bunyi hentakan atau tumbukan itu berasal dari bunyi kayu ulin yang terpendam maka mereka memulai pekerjaan *maangkat ulin tarandam* "mengangkat pohon kayu ulin yang terbenam dalam lumpur."

Proses mengangkat batang ulin yang terbenam lumpur sangat dramatis. Batang ulin yang besar dan terbenam bersama dahan dan rantingnya adalah pekerjaan yang tidak mudah. Walaupun demikian, mereka tidak menyerah karena semangat gotong royong yang benar-benar ikhlas telah tertanam sempurna dalam diri mereka semua. Mula-mula semua pohon-pohon kecil dan semak-semak yang ada di sekitar pohon itu ditebang dan disingkirkan. Kemudian, mereka menyingkirkan lumpur dan menggali tanah yang menimbun pohon ulin itu. Selanjutnya, mereka menebang beberapa pohon sebesar paha untuk dijadikan tuas. Mungkin ada sekitar dua puluh tuas yang mereka gunakan untuk mengangkat pohon ulin itu. Ujung-ujung tuas itu mereka benamkan persis di bawah batang pohon ulin itu. Pada saatnya, secara serempak namun hati-hati mereka mencongkel batang ulin itu dengan tuas masing-masing. Hasilnya, berkat gotong royong yang ikhlas, batang ulin yang terpendam itu dapat mereka angkat.

3.2 Budaya Tolong-Menolong

Fakta Budaya: *Baarian* sebagai sarana tolong-menolong

Baarian berasal dari kata *ari* 'hari' menjadi *baarian* yang berarti bekerja sukarela membantu kerabatnya menyelesaikan pekerjaan tertentu selama satu hari. Yang dimaksud satu hari di sini biasanya adalah setengah hari (jam 07.30 s.d. jam 12.00 atau sebelum waktu sembahyang Zuhur). *Baarian* bisa juga berasal

dari kata *ari* 'bantu' yang mendapat *ba-an* yang merupakan konfiks resiprokal sehingga menjadi *baarian*. Satu makna konfiks *ba-an* adalah bermakna 'saling' seperti pada kata *babukahan* 'berlari-larian', *basasahan* 'saling kejar,' dan lain-lain. Dengan demikian kata *baarian* berarti saling membantu atau saling tolong-menolong.

Dalam konteks budaya Banjar, *Baarian* adalah kegiatan saling bantu-membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap cukup berat, seperti *barincah*, *batanjang*, *mangatam*, dan lain-lain. Dalam kegiatan itu, mula-mula orang yang memiliki pekerjaan menyampaikan hasratnya untuk melaksanakan *baarian* kepada satu atau beberapa orang sahabatnya yang kebetulan bertemu. Kabar tentang adanya kegiatan *baarian* yang akan dilaksanakan itu dengan cepat menyebar dan mendapat respon yang positif dari semua warga yang mendengar. Pada saatnya, mereka datang ke tempat dilaksanakannya *baarian* itu berbondong-bondong sehingga pekerjaan yang apabila dikerjakan seorang diri memerlukan waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan dalam waktu hanya satu atau dua hari *baarian*.

Orang yang *diari* (dibantu) sewajarnya datang ke tempat orang yang *maari* (membantu) andai suatu saat orang itu juga melaksanakan acara *baarian*. Tidak semua orang yang *maari* (membantu) akan melaksanakan acara *baarian*. Jadi, kedatangannya ke tempat orang *baarian* hanya terdorong oleh keikhlasannya membantu pekerjaan temannya. Tidak ada sanksi tertulis bagi orang yang sudah *diari* (dibantu) tidak datang tatkala sahabatnya juga melaksanakan acara *baarian*. Mereka menganggap ketidakdatangan sahabatnya itu merupakan hal yang biasa dan pasti ada sesuatu yang menyebabkan ketidakhadirannya, seperti sakit atau aral yang lain. Ketidakhadiran satu orang tidak akan menyebabkan tidak selesainya suatu pekerjaan karena biasanya ada-ada saja orang lain yang datang yang menutupi ketidakhadiran seorang yang lain.

Acara *baarian* tidak hanya dilaksanakan dengan kekuatan otot atau kekuatan tenaga, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan cara membantu keuangan melalui acara *bahandil*. *Bahandil* berbeda dengan istilah arisan sekarang. *Bahandil* tidak menyebut jumlah nominal uang yang diandilkan. Setiap orang boleh mengandilkan uangnya berapa saja dan bahkan tidak ada sekalipun. Jadi, setiap orang berbeda besar uang yang diandilkan, sesuai dengan

kemampuan dan atau kondisi keuangan saat itu. Namun yang pasti, seseorang harus mengembalikan sejumlah besaran uang yang pernah dia tarik.

3.3 Budaya Menjaga Hubungan Keekerabatan

Fakta Budaya: *Baandak* sebagai sarana menjaga hubungan keekerabatan

Orang Banjar sangat kuat menjaga hubungan keekerabatan. Salah satu sarana untuk menjaga hubungan keekerabatan adalah melalui *baandak*. *Baandak* adalah prakegiatan (kegiatan awal/pendahuluan) dalam sebuah kegiatan besar, seperti *bakawinan* (acara mengawinkan anak), *bamulut* (maulid rasul), dan *mahaul* (acara tahunan memperingati kematian seseorang).

Dalam kegiatan *baandak*, semua handai taulan, yang dekat dan yang jauh *disaru* (diberi kabar dan diminta datang) untuk hadir ke rumah orang yang punya hajat guna ikut serta menyiapkan sebuah acara yang dianggap besar itu. Kerabat itu datang satu atau dua hari sebelum hari pelaksanaan diadakan. Mereka datang tidak sendiri tetapi dengan seluruh keluarga dan bahkan ada yang membawa anak-cucu.

Sebenarnya, pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu memerlukan banyak tenaga. Di antara mereka ada yang mencari kayu bakar, membersihkan ikan yang dibeli di pasar, dan menumbuk rempah-rempah. Satu hari sebelum hari pelaksanaan, yakni pada malam harinya, kerabat laki-laki membantu menanak nasi dengan cara *mangawah* (menanak nasi dengan kawah atau wajan besar). Dalam acara *baandak* ini, bagi mereka bukan pekerjaannya yang penting, tetapi yang sangat mereka impikan adalah berkumpulnya semua kerabat. Pada saat itulah mereka berbincang tentang hubungan kekeluargaan atau zuriah dan berbincang masalah dan jalan kehidupan masing-masing.

3.4 Budaya Taat Beragama

Fakta Budaya: Menjaga waktu salat, membaca Alquran, dan membaca manakib.

Masyarakat Banjar termasuk masyarakat yang taat beragama. Mereka berupaya menjaga salat lima waktu. Pada saat pergi ke sawah, misalnya, dia harus berhenti sebelum waktu salat Zuhur atau Ashar. Mereka bisa shalat di tengah sawah atau kebunnya atau dia pulang ke rumah beberapa saat sebelum waktu salat tiba. Mereka sangat khawatir kalau *kaguguran dauh* 'beduk berbunyi

sedang dia masih diperjalanan pulang'. Apabila mereka bekerja siang hari maka mereka harus pulang jauh sebelum azan Magrib tiba. Mereka suka dan senang duduk di pelataran masjid menunggu azan magrib sambil bercengkerama dengan kawan sekampung. Apabila mungkin anak-anak diajak ke surau untuk melaksanakan ibadah dan apabila tidak mungkin, anak-anak dilarang berkeliaran di saat orang sedang shalat.

Khusus hari Jumat, para pekerja (di sawah, ladang, tukang, dan lain-lain) pulang lebih awal agar lebih banyak waktu luang berwirid di mesjid. Bahkan, sebagian orang sengaja tidak bekerja pada hari Jumat itu. Pada malam Jumat mereka membaca ayat-ayat Alquran tertentu. Ayat Alquran yang banyak dibaca dan diajarkan/diwariskan turun temurun adalah Surah Yaasiin, Alkahfi, Tabarak, Almulk, dan Arrahman.

3.5 Budaya Menghargai Tuan Guru

Fakta budaya: menghadiri pengajian dan membaca manakib.

Orang Banjar juga sangat menghargai tuan-tuan guru atau guru-guru agama. Para tuan guru itu sering mereka sebut sebagai wali (wali Allah). Apabila tokoh agama itu masih hidup, mereka berbondong-bondong mendatangi tempat pengajiannya dan apabila tokoh agama itu telah wafat mereka secara berkala datang menziarahi kubur para wali itu.

Tokoh agama yang dianggap wali oleh masyarakat Banjar di antaranya adalah Datu Kalampayan (Syekh Arsyad Al-Banjari), Guru Ijai (K.H. Zaini Gani), Syekh Saman Al-Madani, Syekh Abdul Kadir Jailani, dan lain-lain. Mungkin masyarakat Banjar merupakan satu-satunya masyarakat yang memiliki ratusan wali dan yang paling mencintai para wali. Pada umumnya, mereka mendatangi wali adalah dalam rangka menunaikan nazar karena terkabulnya suatu hajat. Ada yang bernazar akan berziarah ke seorang wali/kubur wali apabila hajatnya sembuh dari suatu penyakit atau sawahnya subur sehingga bisa berzakat dan berbagai hajat lainnya. Wali yang didatangi tidak hanya yang wali yang ada di Banjarmasin, tetapi di luar Banjarmasin, bahkan hingga ke luar pulau Kalimantan.

IV. BUDAYA BANJAR BERNUANSA NEGATIF

4.1 Cenderung Kurang Menghargai Waktu

Fakta Budaya: Orang Banjar membagi musim menjadi musim gawi dan musim diam

Masyarakat Banjar tradisional membagi musim menjadi dua, yakni musim *gawi* dan musim *diam*. Musim *gawi* adalah musim bekerja dan musim *diam* adalah musim menikmati hasil pekerjaan pada musim gawi.

Musim *gawi* dimulai dengan kegiatan *manaradak* 'menyemai bibit padi', dan dilanjutkan dengan *malacak* (memindah padi dari tempat penyemaian ke tepi-tepi sawah), *barincah* (membabat/menebas rumput yang ada di sawah dengan tajak), *mamuntal* (memintal rumput yang telah ditebas menjadi gumpalan-gumpalan sebesar tudung saji), *mambalik* (setelah sekitar sepuluh hari *puntalan* dibalikkan agar rumput akan mati dan menjadi pupuk), *maampar* (menghamburkan gundukan *puntalan* yang telah dibalik untuk mendistribusi pupuk dari rerumputan yang telah busuk), *batanjang* (bercocok tanam anak padi dengan menggunakan *tanjangan* atau asak yang terbuat dari kayu), *marumput* (mencabut rumput yang tumbuh di sawah), *mangatam* (mengetam padi dengan *ranggaman* atau ani-ani), *baiirik banih* (menginjak-injak tangkai-tangkai padi untuk melepas butiran padi dari tangkainya), *bajakat* (mengeluarkan zakat), dan *mambaca manakip* (membaca riwayat hidup wali Syekh Saman Al-Madani).

Apabila sudah habis *baiirik* dan padi sudah terkumpul sebagai hasil jerih lelah maka musim pun beralih menjadi *musim diam*. Pada *musim diam* adalah musim menikmati hasil pekerjaan selama musim gawi. Pada musim ini masyarakat hampir tidak bekerja apa-apa lagi. Mereka bersantai dan bergembira menikmati hasil *gawi* atau hasil pekerjaan selama kurang lebih sembilan bulan. Pada masa itu pula, para orang tua mengawinkan anak-anaknya. Anak gadis yang diincar pemuda adalah gadis yang orang tuanya memiliki padi yang banyak. Demikian pula, seorang gadis sangat menyenangkan pemuda yang orang tuanya dianggap berada karena memiliki padi yang banyak. Memiliki padi yang banyak merupakan lambang prestasi dan prestise masyarakat kala itu.

Pada saat itu, budaya musim gawi dan musim diam sangat memungkinkan karena sawah yang luas dan subur serta keperluan hidup yang tidak terlalu banyak. Keperluan mereka pada masa itu hanyalah rumah kayu

tempat berteduh dan berlindung, sepeda *Raleigh* atau jukung yang terbuat dari kayu ulin, dan tentu seorang istri. Selebihnya, seperti kayu bakar, ikan, sayur-mayur tidak terlalu merepotkan hidup mereka. Kayu bakar banyak berserakan di belakang rumah, ikan tinggal dipancing di depan atau di samping rumah, air bersih tersedia dari sumur-sumur atau mengalir di sungai-sungai yang tidak jauh dari rumah. Masyarakat Banjar benar-benar dimanjakan oleh alam.

Akibat pembagian musim seperti ini yang telah tertanam ratusan tahun maka sadar atau tidak sadar, budaya ini masih terbawa hingga sekarang. Sebagian orang Banjar tidak sadar bahwa alam telah begitu cepat berubah sedangkan pola pikir belum seirama dengan cepatnya perubahan alam. Demikianlah, sebagian orang Banjar, apabila sudah memiliki banyak uang atau makanan, mereka cenderung bersantai menikmatinya sampai habis. Kemudian, apabila uang dan makan itu tidak tersisa lagi mereka mulai lagi membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup berikutnya.

4.2 Kurang Tegas Dalam Menyelesaikan Konflik

Fakta Budaya: Cerita rakyat Banjar tidak mengenal konflik berdarah

Dalam sastra lisan Banjar hampir tidak pernah ditemukan pertumpahan darah dalam menyelesaikan konflik cerita (berbeda dengan cerita Jawa, Sunda, dll). Konflik diselesaikan dengan cara salah seorang dari tokoh itu mengalah dan kebanyakan tokoh protagonis yang mengalah atau cara lain yang berakhir dengan damai. Satu penyelesaian konflik tanpa pertumpahan darah terdapat dalam cerita Nini Nambul (Datu orang Haruyan), sebagai berikut:

Orang-orang Mariuh datang dengan sikap keras. Mereka berkumpul di muka balai Tanginau sambil mengeluarkan kata-kata yang menantang. Penduduk mendengarkan perkataan mereka yang demikian menusuk perasaan. Akhirnya Nini Rinjing tak tahan hati.

"Ayo, siapa yang ingin berkelahi, datanglah ke mari siapa berani, ini tubuhku. Cencanglah hingga lumat!", katanya.

"Hai," kata Mara Nambul, "Nini Rinjing jangan bergerak, nanti aku yang menghadapinya."

Setelah berkata demikian, pergelangan tangannya digosok-gosokkannya ke tiang. Terpencar api hingga ke atas atap akibat gesekan itu. Kemudian, batu kemala pemberian Bumburaya dipukul-pukulkan Nini Nambul

ke tanah. Tiba-tiba terdengar gelegar petir bersahut-sahutan. Hujan turun sangat lebat, kilat bersambar-sambaran dan petir berbunyi nyaring tidak henti-hentinya.

Melihat kejadian itu, orang-orang Mariuh yang menyerang kampung Tanginau tidak ada yang berani bergerak maju. Semua terdiam dan menyimpan perasaan yang amat takut. Akhirnya, satu per satu mengundurkan diri.

Sadar atau tidak sadar, cara penyelesaian konflik cerita di atas merupakan refleksi cara berpikir masyarakat Banjar di masa masa lalu (Banjar tradisional). Cara berpikir ini sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat Banjar dari generasi ke generasi hingga generasi Banjar sekarang. Konflik yang sangat merugikan masyarakat sebesar apapun akan berakhir dengan solusi perdamaian atau mengalah sama sekali dengan resiko menanggung berbagai kerugian. Yang penting, konflik selesai dan masalah sebesar apapun dianggap akan berakhir dengan sendiri seiring perjalanan waktu.

Cerita rakyat (legenda, mite, dan dongeng) merupakan produk sastra Banjar tradisional dan telah menjadi bahan pendidikan sejak ratusan tahun yang lalu. Sastra Banjar tradisional biasanya berisi filsafat (pandangan hidup), etika, moral, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap ideal pada masa itu. Dengan demikian, segala pelajaran yang ada di dalam sastra itu diserap dan menjadi panduan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan.

4.3 Hidup Santai dan Penuh Canda Tawa

Fakta Budaya: Lebih suka dongeng dibanding legenda dan mite dan lebih suka pantun dibanding syair

Masyarakat Banjar lebih menyukai dongeng dari pada legenda dan mite serta lebih menyukai pantun dari pada syair. Oleh karena itu, produk sastra Banjar lebih banyak bergenre dongeng daripada bergenre legenda dan mite serta lebih banyak pantun daripada syair. Hal ini merupakan indikasi bahwa masyarakat Banjar menyukai hal-hal yang gampang dan tidak terlalu *ribet*. Isi dongeng dan pantun juga lebih bernuansa santai dan canda-tawa.

Pantun adalah puisi yang yang temanya dapat diselesaikan dalam satu atau dua bait. Tidak ada pantun yang berjumlah ratusan bait seperti halnya syair. Dalam sastra Banjar hampir tidak dikenal syair. Syair yang ada, seperti Syair Siti Zubaidah, Syair, Brama Syahdan, Syair Burung Karuang, dan lain-lain, seperti yang kita lihat di museum Lambung Mangkurat, besar kemungkinan bukan sastra

Banjar, tetapi sastra Jawa (mungkin berasal dari cerita Panji) dan sastra etnik Melayu non-Banjar yang disalin oleh orang Banjar. Dalam proses menyalin itu mungkin saja ada beberapa kata bahasa Banjar yang sengaja diselipkan oleh penyalin. Namun, hal yang inti, seperti alur, tokoh, dan latar, masih tetap seperti cerita asalnya. Penyalin tidak berani mengubah hal inti cerita karena legenda dan mite dianggap memiliki kekuatan magis.

Menulis syair tidak cukup hanya berkhayal seperti halnya menulis pantun. Menulis syair harus memahami benar-benar tema-tema yang akan dituangkan ke dalam syair. Penyair harus mengetahui dan merasakan segala detail kejadian atau peristiwa yang dialami dan dirasakan oleh para tokoh-tokohnya. Syair hampir selalu berhubungan dengan peristiwa sakral perjalanan panjang hidup manusia. Syair adalah roman/novel yang dipuisikan. Oleh karena itu, syair selalu berisi ribuan halaman.

Masyarakat Banjar hanya sedikit berisi legenda dan hampir tidak mengenal mite. Padahal, cerita yang serius itu ada dalam legenda dan mite. Dongeng adalah cerita fantasi yang fungsi utamanya adalah menghibur. Masyarakat diajak banyak tertawa, bersantai, dan berkhayal. Berbeda dalam legenda dan mite, dalam dua genre ini terdapat nilai heroisme, kerja keras, pendidikan berkualitas, dan lain-lain.

4.3 Was-was dan Merasa Curiga

Fakta Budaya: Peribahasa Banjar lebih banyak menggambarkan sifat jelek seseorang

Peribahasa Banjar banyak berisi sifat negatif seseorang. Sifat negatif ini diketengahkan oleh peribahasa untuk gambaran buruk manusia yang tidak bisa dicontoh. Maksud peribahasa ini memang untuk mengajarkan tentang kepribadian manusia ideal dengan cara memperlihatkan contoh manusia yang berkarakter jelek (Effendi, 2014). Walau demikian maksudnya, cara membangun peribahasa itu (menonjolkan sifat jelek seseorang) merupakan gambaran psikologis masyarakat Banjar yang selalu was-was terhadap orang lain.

Apabila peribahasa Banjar dipilahkan berdasarkan dua kutub sifat karakter manusia, maka akan ada dua golongan peribahasa Banjar, yakni peribahasa yang menonjolkan sifat baik (sifat positif atau plus) dan sifat jelek (sifat negatif atau minus). Berdasarkan penelitian, peribahasa Banjar golongan

pertama, yakni penggambaran sifat baik manusia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan golongan kedua, yakni penggambaran sifat jelek manusia.

Peribahasa yang menonjolkan sifat jelek manusia di antaranya sebagai berikut: (1) Lukisan seseorang yang suka menipu, seperti: *akal nang kaya sarawin; akal pilanduk*, (2) Lukisan seseorang yang merasa hebat sendiri, seperti: *amun bapander langit handak digulung*, (3) lukisan seseorang yang tidak tahu berterima kasih, seperti: *amun tagapit bakuciak amun dilapas majji-iji*. (4) lukisan kepribadian yang tidak punya prinsip, seperti: *mailung larut, mambatang timbul, umpat kambing tumbur*. (5) Lukisan seseorang yang dianggap sampah masyarakat, seperti: *amas kada tambaga kada, baguna tangkar baung, baguna tahi larut, biar ada kada dihitung*. (6) Lukisan sifat mau menang sendiri, seperti: *tangga urang dikair, tangga saurang disintak*. (7) Lukisan seseorang yang lupa diri, seperti: *cancut naik ka sampiran, kaya Bangung jadi raja, baras dihampalas, kaladi maucap birah, kaya kudung hanyar bautas, upung mamadahi mayang*. (8) Lukisan manusia serakah, seperti: *dibari daging handak tulang, diandak di bahu handak di kapala*. (9) Lukisan manusia pembuat onar, seperti: *kada kawa diulah bibit, kada mamak dijarang, karuh matan di hulu*. (10) Lukisan manusia bodoh, seperti: *dahulu garubak pada sapi, dapat tandui dibuang binjai, ganal pananjak pada jukung*. (11) Lukisan manusia yang suka berangan-angan, seperti: *jauh lantai dua bubungan*. (12) Lukisan manusia yang kikir, seperti: *kada titik banyu diganggam*. (13). Lukisan manusia yang lupa diri, seperti: *kaya kapar kabaahan, kaya barangkatak kalaluan suluh, kalumpunan lawan tampuknya*. (14) Lukisan manusia yang zalim, seperti: *kapala basurung burit mahambat; ia kandang ia babi*. (15) Lukisan manusia pembuat yang selalu mencari gara-gara, seperti: *lalat mencari kudis*. (16) Lukisan manusia yang sial, seperti: *lanjung bubus kapayang hilang; mambuang sandal tajumput kalum*.

4.4 Kurang Memelihara Lingkungan

Fakta Budaya: Sungai banyak yang semakin dangkal dan bahkan tertutup sampah

Kalimantan Selatan, khususnya lagi Kota Banjarmasin dikenal dengan nama kota seribu sungai. Penamaan ini bukan hasil rekaan namun benar-benar merupakan fakta. Ribuan sungai, besar dan kecil, mengalir di wilayah Kalimantan Selatan. Sungai-sungai itu sebagian besar sudah hilang dan sebagian lagi mengalami pendangkalan.

Penyebab hilangnya sungai dan atau pendangkalan sungai adalah akibat kurangnya pemeliharaan terhadap sungai. Kebiasaan masyarakat membuat pemukiman di tepi-tepi sungai merupakan penyebab utama pendangkalan sungai dan bahkan raibnya sebuah sungai. Kebiasaan membuat rumah di tepi-tepi sungai merupakan ciri khas perkampungan Banjar. Kebiasaan membuat rumah di tepi sungai merupakan budaya yang sangat cerdas namun kebiasaan membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai merupakan gambaran budaya yang kurang bersyukur kehadiran sungai di tengah mereka.

Sampai tahun 80-an, sepanjang jalan Belitung membentang satu sungai yang cukup lebar. Di sepanjang sungai itu berkeliaran jukung yang menjajakan berbagai keperluan rumah tangga, seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan segar, dan lain-lain. Pada saat itu, masyarakat Belitung masih bisa berbelanja keperluan rumah tangga dengan hanya sedikit berjalan menuju ke tepi-tepi sungai.

Pada tahun 80-an juga di sepanjang Teluk Dalam mengalir sungai yang lebih lebar dari sungai Belitung. Sama halnya dengan sungai Belitung, jukung berkeliaran menjajakan berbagai keperluan rumah tangga. Sepanjang sungai Teluk Dalam juga berderet bangunan-bangunan kecil untuk buang hajat. Bangunan kecil itu dikenal dengan sebutan jamban. Mungkin ratusan jamban berjejer pada masa itu di sepanjang sungai Teluk Dalam. Jamban-jamban itu diberi nomor secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya. Nomor jamban juga bisa dijadikan petunjuk alamat rumah seseorang. Misalnya, rumah si Pulan beralamat di sekitar jamban nomor 20.

Sekarang dua sungai yang saya sebutkan sudah tidak kelihatan lagi. Keduanya hilang akibat kekurangpedulian masyarakat terhadap keberadaan sungai.

4.5 Kurang Memiliki Visi

Fakta Budaya: Ilmuan, pejabat, dan pengusaha besar asal Banjar minim

Pada umumnya visi orang Banjar belum bisa menembus ke luar jauh dari tempat kediamannya. Cita-cita hidupnya tertumpu dan terbentuk pada fakta yang ada di sekitar kampung halamannya. Apabila ada seorang pengusaha terkaya atau pejabat tertinggi di kampungnya maka visinya hanyalah ingin seperti atau lebih tinggi sedikit dari yang telah diraih oleh pengusaha atau pejabat yang ada di kampungnya itu. Hanya sedikit orang Banjar yang bercita-cita menjadi

mengusaha nasional, tokoh nasional, atau menduduki suatu jabatan yang tinggi di level provinsi atau nasional.

Seseorang yang memiliki visi yang jauh tergambar dari upayanya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dan atau kerja keras dan tidak kenal lelah dalam merintis suatu perusahaan bisnis. Menurut cerita, H. Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam, memulai pekerjaannya dari bawah, yakni sebagai pekerja perkayuan, tukang tambang, buruh muat, sopir angkutan, dan bahkan sempat menjadi tukang ojek. Namun, kerja keras, semangat dan visi yang jauh, akhirnya beliau menjadi pengusaha Banjar yang sukses. Sekarang beliau memiliki banyak perusahaan yang bergerak di berbagai di bidang usaha, seperti pertambangan, rental pesawat terbang, dan memiliki helikopter serta armada angkutan laut.

Pengusaha Banjar yang sukses dan berkaliber nasional bisa dihitung dengan jari. Di antara mereka adalah H. Abdussamad Sulaiman HB atau Haji Leman, Drs Zaini Mahdi atau Haji Ijai, H. Muhammad Ramlan, H. Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, H. Norhin (pemilik Q Mall di Martapura), dan mungkin ada beberapa orang lagi yang jumlahnya tentu terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan populasi penduduk Banjar.

Karena kurang memiliki visi yang jauh inilah maka tidak banyak pula orang Banjar yang bercita-cita meraih gelar akademik S1, S2, dan atau S3. Karena berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi, jarak yang jauh, masalah keluarga, dan lain-lain, orang Banjar lebih memilih tidak melanjutkan sekolah daripada harus berhadapan dengan masalah itu. Berbeda dengan orang yang memiliki visi yang jauh, tantangan yang semacam itu dianggap hanyalah godaan yang tidak terlalu berarti.

V. SIMPULAN

Generasi Banjar sekarang bertugas meneruskan dan memelihara budaya Banjar tradisional yang bernilai positif yang merupakan warisan dari generasi pendahulunya. Di samping itu, karena interaksi manusia dan lingkungannya berkembang sangat cepat maka budaya manusia pun mengalami perubahan yang teramat cepat pula. Lingkungan masyarakat Banjar bukan lagi lingkungan yang ditandai dengan batas-batas wilayah kelurahan, kecamatan,

kabupaten, tetapi lingkungan masyarakat Banjar sekarang adalah lingkungan masyarakat dunia atau lingkungan masyarakat global.

Perubahan dan atau perkembangan budaya Banjar akibat lingkungan masyarakat global adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terhindarkan. Walau demikian, dengan adanya unsur budaya inti sebagai warisan nenek-moyang Banjar, maka perubahan itu pasti akan membawa masyarakatnya ke kemajuan peradaban yang semakin tinggi, religius, dan tanpa kehilangan identitas keunikannya.

Dalam perubahan dan atau perkembangan budaya, tidak tertutup kemungkinan adanya unsur budaya Banjar yang harus direvitalisasi, direvisi, bahkan harus dimuseumkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Deraman, A. Aziz. 2001. *Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia Suatu Analisis Perkembangan Kebudayaan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Effendi, Rustam. 2011. *Sastra Banjar; Teori dan Interpretasi*. Banjarbaru: Scripta Cendekia.
- Dharmojo. 2005. *Sistem Simbol dalam Munaba Waropen Papua*. Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Gayo, Iwan (ed). 1994. *Buku Pintar Seri Senior*. Jakarta: Upaya Warga Negara.
- Harun Mat Piah, dkk., 2006. *Kesusastraan Melayu Tradisional*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kawi, Djanter & Effendi, Rustam. 1995. *Syair Burung Simbangan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muljana, Slamet. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.

- Noerhadi, Toeti Heraty. 2013. *Aku dalam Budaya Telaah Metodologi Filsafat Budaya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Oemarjati, Boen S. 2012. *Pengajaran Sastra dan Budaya 2 Mengakrabkan Sastra* (Sarumpaet, Riris K.Toha. ed). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Oemarjati, Boen S. 2012. *Pengajaran Sastra dan Budaya 3 Memaknai Kembara Bahasa dan Budaya*. (Sarumpaet, Riris K.Toha. ed). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ras, Johannes Jacobus. Penterjemah: Salleh, Siti Hawa,1990. *Hikayat Banjar*. Selangor Darul Ehsan: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Said, H. Muhammad. 2011. *Raja Diraja Kerajaan Banjar Abad XV—XXI*. Martapura: Pustaka Agung Kesultanan Banjar.
- Setiadi, Elly M; Hakam, H. Kama A; Effendi, Ridwan. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sihabuddin, Ahmad. H. 2011. *Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparlan, Parsudi (ed). 1996. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin R; Yusran, Muhammad; Syahrir, H., Fahrurazie. 1996. *Wujud, Arti, dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Pendukungnya Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

PREPARING MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHERS IN INDONESIA: A COMPARISON TO THE STUDY OF PREPARING TEACHERS AROUND THE WORLD BY ETS

Sarah Miriam

sarah_pfis@unlam.ac.id

ABSTRACT

This study aimed at examining the density of filters applied along the route of mathematics and science teachers' profession in Indonesia, starting from the entry requirements to teacher education programs, to the hiring process, and to the professional development for teachers. Through a literature review and interview with a contact in Indonesia, the data needed for this study were collected. Replicating the idea of "pipeline filters" in the previous study, *Preparing Teachers around the World*, which was written by *Educational Testing Service* researchers in 2003, there are eight pressure points that are identified as the components of the pipeline. These filters are identified as: high stakes, medium stakes, or low or no stakes which were determined on the basis of the classification rubrics developed in the previous study. Furthermore, the findings of this study were compared to those of the previous study which involved eight surveyed countries whose students always showed high proficiency in TIMSS. The comparison shows the result that the "pipeline filters" currently applied in Indonesia are not largely deviated from those of other countries surveyed in the previous study. However, there are some important notes that should be considered in viewing these findings.

Keywords: teacher education, teacher certification, teaching profession, professional development.

* Presented at the International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin October 8th 2016.

** Lecturer Physics Education Study Program, Teacher Training and Educational Sciences Faculty, Lambung Mangkurat University .

I. INTRODUCTION

Among Indonesian students and the public, mathematics and science are known as two subjects that is considered as the most difficult ones among other subjects. In order to find out how is the development of students achievement from time to time and how is the position of Indonesia among other countries for its students achievement on those two subjects, in 1999, for the first time, Indonesia became one of the 38 countries who participated in *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS). Taken by tens of thousands of 4th and 8th grade students in more than three dozen countries at the beginning, now TIMSS tests has become a respected standard of international academic achievement.

The result of TIMSS 1999 was an abuzz to the educators, education policymakers, and the public in Indonesia. Indonesian 8th graders did not even make the top 30 either in mathematics or in science. After years later, the condition was not getting better. According to The result of TIMSS 2011 in the field of science placed Indonesia as the 40th country of 42 participant countries for the eighth class with the score far below the TIMSS *centerpoint* (Martin, Mullis, Foy, & Stanco, 2012).

TIMSS described what 4th and 8th grades students typically know and can do in mathematics and science by identifying four benchmark levels from which the range of performance of students can be demonstrated internationally. These four benchmark levels are: advanced, high, intermediate and low. TIMSS found that percentages of students reaching the various benchmarks across countries were largely differing.

Generally, in mathematics, the advanced international benchmark can be reached mainly when *students can organize information, make generalizations, solve non-routine problems, and draw and justify conclusions from the data*. Whether, the high international benchmark required that *students can apply their understanding and knowledge in a wide variety of relatively complex situations*. The criteria for the high international benchmark meet when *students can apply basic mathematical knowledge in straightforward situations*. While the low international benchmark means that *students have some basic mathematical knowledge*.

In science, these four levels of benchmarks have different meaning. The advanced international benchmark required that *students demonstrate a*

grasp of some complex and abstract science concepts. While the high international benchmark, can be fulfilled when students demonstrate conceptual understanding of some science cycles, system, and principles. The criteria for the intermediate international benchmark meet when students can recognize and communicate basic scientific knowledge across a range of topics. Whether, the low international benchmark required that students recognize some basic facts from the life and physical sciences.

Analyzing the root of the problem of education in Indonesia, the report of *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (1998) from the document of the World Bank explained that some of the reasons why the quality of basic education is still unsatisfactory in Indonesia are that many teachers are poorly trained, and the incentive structure does not promote effective teaching or the most equitable distribution of teachers. As suggested in the report, a key part of quality improvement is teachers-having them equitably distributed, giving them appropriate incentives, and ensuring they are adequately trained. This report mentioned that the findings of *the evidence from Indonesia* (Moegiadi, Suryadi, Somerset, Malo et al., World Bank 1989) points to the following nine factors as the most important reasons why student outcomes are generally unsatisfactory: incentive structures that do not adequately reward good teaching practices; low learning time in grades 1 and 2;

- insufficient resources, particularly for schools in poor communities;
- a large stock of teachers who are poorly trained in both subject matter and teaching processes;
- low levels and quality of textbooks and materials;
- an overloaded and unintegrated curriculum;
- insufficient assessment and evaluation of quality;
- current institutional arrangements in Indonesia; and
- ineffective school management, particularly as it relates to the role of the principal.

These findings of *the evidence from Indonesia* encourage that teacher quality is identified as one of the most important contributing factors in student outcomes as can be seen in the fourth point above.

Although the findings of *the Coleman Report* (also known as The Equality of Educational Opportunity Study (EEOS)) in 1966 concluded that the influence of school quality to student performance is not as much strong as the influence of their socioeconomic background, the report also shows that among all other characteristics of a school that can be controlled by policymakers and schools, excluding the composition of the student body, teacher quality contributed a bigger part of the variation in student test scores. In addition, in *the Mystery of Good Teaching*, Goldhaber (2002) wrote that much of the research published since *the Coleman Report* has confirmed that high-quality teachers raise student performance. However, although some evidence shows that good teachers make a clear difference in student achievement, education research still has not meet a consensus of identifiable teacher characteristics that can be associated to student's learning gains. Thus, it remains an open question what makes for a good teacher. The key is to answer these following questions: Who should be recruited to fill the teaching positions? How to prepare these new recruits? What kinds of knowledge should they have? And once they are recruited, how to certify their performance?. On the other hand, while some researchers and education policymakers are struggling to find the best answers of these questions, ironically, it seems that college graduates with high test scores are less likely to take teaching jobs. "On average, according to the findings of University of Massachusetts economist Dale Ballou, the higher the quality of an individual's undergraduate institution, the less likely a student is to choose a teaching career" Goldhaber (2002). This phenomenon raises another question: "Have teachers received appropriate reward for their works?"

Since there are still no clear answers for these important questions, one of the best way that one can do is to learn from other countries which have better performance in their students achievement and then analyzing what kind of system that those countries applied in preparing, recruiting and developing teachers. Examining some relevant studies on this matter, the author has found an interesting and inspiring finding from the study of *Preparing Teachers around the World* conducted by Educational Testing Service (ETS) in 2003. This report provides an exploratory analysis of teacher education and development policies in eight countries that participated in TIMSS 1999 and scored as well as or higher than the United States in 8th grade mathematics or science, there are:

Australia, England, Hong Kong, Japan, Korea, the Netherlands, Singapore, and the United States itself. The report highlighted the variation among countries on their preference in placing 'pipeline filters' where candidates of teacher can be screened from the profession. The pipeline comprises of components that can help each country in making selection for teachers which focus is on teacher education and development policies. It ranges from admission to teacher education programs to the award of tenure. There are differences in each country's 'pipeline' due to various reasons such as cultural and political reasons. In the final section of the report the authors draw some conclusions about the choices that countries make about where along the pipeline they place filters and about the density of the filters applied.

As policymakers and educators in Indonesia continue to search for effective ways to expand and improve the supply of qualified mathematics and science teachers in the coming years, it will be important for us to examine our own 'pipeline filters' closely to determine whether the mechanisms that currently govern the flow of prospective teachers are the most proper ones to gain the desirable candidates for the teaching profession.

Inspired by the previous study conducted by ETS in 2003, the objectives of this research is to find out a clear view of the 'pipeline filter' used to screen the candidates for mathematics and science teacher in Indonesia. The goal is to compare this pipeline filter with those used by other countries that participated in the study of *Preparing Teachers around the World* conducted by ETS in 2003. This research also will only focus on those who teach for the eighth grade.

The research question of this study is: how is the density of the filter used along the teacher education and development policies in Indonesia compared to other countries that participated in the study conducted by ETS in 2003?

II. PREVIEW OF THE PREVIOUS RESEARCH: PREPARING TEACHERS AROUND THE WORLD

In the report of *Preparing Teachers around the World*, Wang, Coleman, Coley, and Phelps (2003) surveyed the teaching policies of seven countries whose students performed as well as or better than students of the United States in mathematics and science. As the result, the authors had selected eight countries

including the United States itself into the study, there are: Australia, England, Hong Kong, Japan, Korea, the Netherlands, Singapore, and the United States.

The authors founded the idea of the “pipeline filters” from which one can learn the kinds of policies and control mechanisms of every country in the study. The idea of this pipeline is to encompass the entire teacher education and development process which involved some important policies as follows:

- Policies affecting entrance into teacher education
- Policies affecting teacher education curriculum
- Policies affecting completion of teacher education
- Policies affecting entry level certification
- Policies affecting hiring, tenure, and compensation
- Policies affecting professional development
- Policies affecting advanced certification

This information was used by the authors in identifying the eight pressure points as the components of the pipeline filter. These eight pressure points are:

- Entry to teacher education Program
- Evaluation of practical experience requirement
- Exit from teacher education program
- Certification
- Hiring
- Evaluation of induction period
- Evaluation of professional development
- Evaluation of probation period (for tenure).

The order of these pressure points is arranged in the same way as any teacher trainee would experience them. The flow of candidates into teaching can be controlled by placing filters at each pressure point. Based on the rubrics of classification that had been developed by the authors, the density level of these filters can be determined. Each filter is classified as being high-, medium-, or low- or no- stakes.

In order to collect the data needed from the eight countries, the authors had developed a questionnaire that build base on the pipeline idea. Before using

the questionnaire as a survey instrument, it was reviewed and revised based on suggestions from representatives of leading teacher education and research education in the United States. The questionnaire included these following thematic sections: Control and governance; Standards for entrance into and exit from teacher education programs; Characteristics of the education programs for eight-grade mathematics and science teachers; Certification requirements; Availability of advanced certification; Alternative teacher certification programs; Hiring and compensation; In-service and professional development requirements.

The survey instruments were sent to and filled in by all of the contacts in the surveyed countries who are chosen based on a set of selection criteria as follows: Expertise in teacher education and certification policy, willingness to participate, and proficiency in English. Combining all of the responses to the questionnaire with other relevant information they had collected, the authors structured their findings in their report by highlighted these following sections:

2.1 Teacher Education

This section discusses the findings from each surveyed country around the control and governance, standards for entrance into and exit from teacher education programs, and characteristics of the education programs for eighth-grade mathematics and science teachers.

2.2 Teacher Certification

This section elaborates the certification requirements, availability of advanced certification, and alternative of teacher certification programs that conducted in those surveyed countries.

2.3 Continuing Education and Support

The beginning teacher induction and the professional development for practicing teachers in all surveyed countries are discussed in this section.

2.4 Teaching Profession

This is the part to discuss about teacher hiring, tenure, and compensation in each surveyed country.

Classification Rubrics Used in the ETS Study

Table 2.1. displays the classification rubrics that give the definitions of the high-, medium-, and low- or no- stakes filters for the eight pressure points of

the pipeline. This classification rubric are used by the authors in determining the density level of the pipeline filters. A high-stakes filter requires the fulfillment of a certain criterion. A medium-stakes filter requires the fulfillment of some substantial way and is easier to satisfy than it could be. A low stakes filter is characterized as a very minimum requirement.

The Findings of the Previous Research: *Preparing Teachers around the World*

The findings of this study of ETS have been summarized into a table 2.2 which drawn the characteristics of the filters that used by all surveyed countries to control the teacher education and development pipeline.

The most substantial finding of this study was that each surveyed country has their own preferences in placing the “pipeline filters” from where candidates for teaching can be screened out. However, in the effort of taking lessons between countries, it was found that for certain features there are factors that limit the possibility in transporting the lessons. This is due, in part, to the differences across countries in the system used for certain features. Therefore, the authors suggest that conclusive judgments can be derived only after consideration of the entire length of the pipeline.

Table 2.1 Classification Rubrics

	High-Stakes	Medium-Stakes	Low- to No-Stakes
Entry to teacher education	(Undergraduate programs): must exceed threshold levels on subject area examinations, advanced level national examinations or university entrance examinations. (Graduate programs): must hold a bachelor's degree in subject area.	(Undergraduate programs): must exceed threshold levels on secondary school exit examinations or national examinations. (Graduate programs): must hold a bachelor's degree in relevant field.	(Undergraduate programs): must pass a basic skills test. (Graduate programs): must hold a bachelor's degree or its equivalent in some field.
Evaluation of practical experience requirement	Formal monitoring and enforcement, with successful performance required for graduation.	Formal monitoring.	May be required but, generally, no monitoring or enforcement.
Exit from teacher education	Systemwide exit examinations in subject areas and on other topics (e.g., pedagogy).	Institutional examinations in subject area and on other topics (e.g., pedagogy).	Degree requirements, and no others, other than perhaps a basic skills test.
Certification	Systemwide examinations.	Some evaluation of teaching is required and is reviewed by statutory authorities.	Degree requirements only.
Hiring	National examination with high cut-score required; additional tests required locally.	Decision is made by state authorities or national ministry (thus, is standardized) with set thresholds for passage required on multiple criteria.	Up to individual school.
Evaluation of induction period	Programs are systematically monitored and satisfaction with candidate performance must exceed a certain threshold level.	Programs are formally monitored by state authorities or national ministry.	Programs are typically required or provided, but are not monitored.
Evaluation of professional development	State authorities or national ministry operates formal, standardized program (which can be lengthy) and requires participation.	National authority operates programs, but requires participation for those seeking promotion.	Programs are offered, but neither monitored nor standardized, and participation is not required.
Evaluation of probation period	One- to two-year waiting period before tenure is considered.	Many new teachers only able to obtain contract employment at first, which has no tenure.	Tenure is automatic at first hiring; teacher can lose job only through furloughs or improper personal conduct.

Table 2.2. Filters Used Along the Teacher Education and Development Pipeline

	Entry to teacher education program	Evaluation of practical experience requirement	Exit from teacher education program	Certification	Hiring	Evaluation of induction period	Evaluation of professional development	Evaluation of probation period (for tenure)
Australia*	○	○	●	○	○	○	○	○
England	○	●	○	●	○	○	○	○
Hong Kong	○	○	○	○	○	○	○	●
Japan	●	●	○	○	○	○	●	●
Korea	●	○	●	○	●	○	●	○
Netherlands	●	●	○	○	○	○	○	○
Singapore	●	○	●	○	○	○	○	○
United States*	○	○	○	●	○	○	○	○

● High-Stakes ○ Medium-Stakes ○ Low- or No-Stakes

Source: Wang et al. (2003).

*Since teacher education and certification are the responsibility of individual states, practices can differ among them.

III. METHOD

3.1 Nature of the Research

The type of this research is descriptive as this research is trying to describe as fully and carefully as possible a given state of teacher education and development policies in Indonesia. Applying a “pipeline idea” designed by the authors in a previous study, this study has a characteristics as a replication study. The pipeline idea which has been used in the previous study to examine the state of teacher education and development policies in the eight surveyed countries, is used by the author in this study to examine such a state in Indonesia. This “pipeline filters” come in the form of eight pressure points that identified by the authors in the previous study. The density level of the filters in each pressure points is determined according to a classification rubrics that had been developed by the authors. This theoretical framework calls for a case study approach where

the researcher is primarily interested in understanding a specific individual or situation (Fraenkel & Wallen, 2006).

3.2 Data Collection and Procedures

Literature review from secondary data is the primary technique used in collecting data in this study. However, in order to supporting the material collected from the secondary data, the author also collected some primary data through interview using a questionnaire. A provided questionnaire, additional questions, and a classification rubric from a previous study of ETS in 2003 are used to guide the data collection and analysis.

Three contacts in Indonesia were identified on the basis of expertise in teacher education and certification policy, willingness to participate, and proficiency in English. According to the procedures in collecting data applied in the previous study of ETS, at least one contact in the surveyed country should complete a detailed questionnaire on teacher education and certification policies, provided references to relevant materials, and responded to additional questions.

From the three contacts identified, only one responded. The name of the contact is D. R. Muharam. Work in Ministry of National Education of the Republic of Indonesia, D. R. Muharam also has involved in the supporting team in collecting the data for TIMSS and PISA during the year of 2005 to 2006. Responses to the questionnaire and additional questions then combined with other relevant information from secondary data.

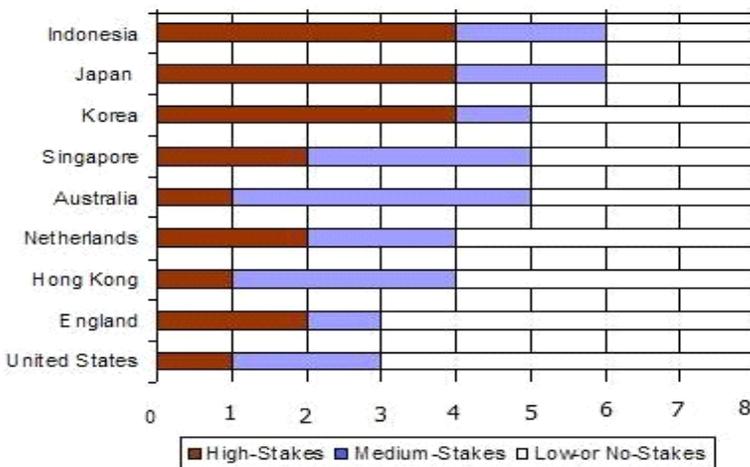
IV. RESULTS

Counting the number of high-, medium-, and low- or no-stakes filters for each country, figure 1. sorted the countries from high to low based on the total number of high- and medium stakes filters they possess. Here, Indonesia, together with Japan and Korea, lead the group of countries with four issues of the pipeline possesses high-stakes filters. While, Singapore, the Netherlands and England follow with two issues of the pipeline possess high-stakes filters. Australia, Hong Kong, and the United States have only one issue of the pipeline possesses high-stakes filters.

Examining the tables provide in this chapter, one may see that it is quite strange that Indonesia whose students perform very far below those of the other

surveyed countries in TIMSS 2003, seemed to have denser filters in the pipeline. That is why, one should note that figure 1. is not attempted to rank the relative density across pressure points nor within each cell of the figure. For instance, if Indonesia's high-stakes entry to teacher education program supposes to represents a denser filter than its high-stakes certification, this information is not reflected in figure 1. Both of pressure points are simply classified as "high-stakes". Also, there are possibilities that the high-stakes filters at some certain pressure points for the other countries are more rigorous than that for Indonesia.

Figure.1. Number and Density of Filters Applied Along the Teacher Education and Development Pipeline



V. CONCLUSION

Surprisingly, the findings of this study show that Indonesia is among of the few countries surveyed whose "pipeline filters" are most dense. At least, there are two reasons that can be found to explain this phenomenon. The first reason is that Indonesia has just starting to implement some new regulations and policies concerning teachers' qualifications and national education system. This new regulations and policies reflecting the effort that had been made by the government of Indonesia in improving the educational quality in Indonesia. Therefore, the density level of the "pipeline filters" was determined based on this new regulations and policies. And thus, the achievement of Indonesian students in TIMSS 2003

cannot be used to reflecting the “pipeline filters” drawn from this study. The second reason is caused by some specific circumstances occur in Indonesia cannot be simply generalized by the options provided in the classification rubrics. There are at least two lessons that Indonesia can learn from this study. The first lesson is that the new regulations and policies applied in Indonesia have set quite dense filters along the pipeline of teacher education and development. It is now left up to the practitioners involved along the process to run the filters effectively. And the second lesson is that it is not always necessary to applied many high-stakes filters along the pipeline. A country could also chose to applied high-stakes filters only at a few pressure points, but make that filters work very effectively that only qualified teacher candidates can pass through.

REFERENCES

Articles and Books

- Brophy, J., & Good, T. L. 1986. Teacher Behavior and Student Achievement. In Wittrock, M. C. (Ed.). *Handbook of Research on Teaching* (3th ed) (pp. 328-375). New York: Macmillan Publishing Company.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. 2006. *How to Design and Evaluate Research in Education* (6th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Goldhaber, D. 2002. The Mystery of Good Teaching. *Education Next: Spring*, 1, 50-55. Retrieved May 14th, 2007, from <http://www.hoover.org/publications/ednext/3368021.html>
- OECD. 1998. *Staying Ahead—In-service Training and Teacher Professional Development*. Paris: Center for Educational Research and Innovation.
- Schalock, D. 1979. *Research on Teacher Selection. Review of Research in Education*, 7, 364-417. Retrieved June 29th, 2007, available from <http://links.jstor.org/sici?sici=0091-732X%281979%297%3C364%3AROTS%3E2.0.CO%3B2-4>

Reports

- Goldhaber, D., & Anthony, E. 2004. *Can Teacher Quality Be Effectively Assessed?*. The urban Institute Website. Retrieved May 14th, 2007, from http://www.urban.org/UploadedPDF/410958_NBPTSOutcomes.pdf

- Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Gonzalez, E. J., & Chrostowski, S. J. 2004. *TIMSS 2003 International Science Report*. Chestnut Hill, MA: Boston College, International Study Center. Retrieved March 1st, 2007, from <http://timss.bc.edu/timss2003i/scienceD.html>.
- Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Gonzales, E. J., & Chrostowski, S. J. 2004. *TIMSS 2003 International Mathematics Report*. Chestnut Hill, MA: Boston College, International Study Center. Retrieved March 1st, 2007, from <http://timss.bc.edu/timss2003i/mathD.html>.
- Wang, A. H., Coleman, A. B., Coley, R. J., & Phelps, R. P. 2003. *Preparing Teachers Around the World*. Princeton, NJ: Educational Testing Service. Retrieved March 1st, 2007, from http://www.ets.org/Media/Education_Topics/pdf/prepteach.pdf.
- World Bank. 1998. *Education in Indonesia- From Crisis to Recovery*. (Report No. 18651-IND). Washington, DC: World Bank, Education Sector Unit, East Asia and Pacific Regional Office.
- World Bank. 2007. *Investing in Indonesia's Education- Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditures*. Jakarta: World Bank. Retrieved July 2nd, 2007, from <http://www.publicfinanceindonesia.org/pdf/InvestEduca.pdf>.
- UNESCO-UIS/OECD. 2005. *Education Trends in Perspective- Analysis of the World Education Indicators*. Paris: UNESCO Institute for Statistics. Retrieved August 3rd, 2007, from <http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/wei/WEI2005.pdf>.

Legal Regulations

- Law of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2005 concerning Teachers and Lecturers, National Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 No. 157.
- Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year 2003 concerning National Education System, National Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 No. 78.

Government Regulation

Government Regulation No. 19 Year 2005 concerning National Education Standard, National Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 No. 41.

Ministry of National Education (2005). *Strategic Plan Ministry of National Education 2005-2009*. Jakarta: Ministry of National Education.

Ministry of National Education (2006). *Teachers Quality Improvement in Indonesia: New Paradigm and Milestones*. Paper presented at Japan Education Forum III (JEF III). Tokyo.

Ministry of National Education (2007). *Conceptualization of Quality Assurance in Indonesian Education*. Paper presented at Workshop of Quality Assurance in Indonesian Education. Jakarta.

Websites

Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Retrieved July 12th, 2007, from http://www.pps.unj.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=1.

Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved July 12th, 2007, from <http://www.upi.edu/?C=Spot&id=5>.

Ministerial Decree

Ministerial Decree of Minister of National Education No. 8 Year 2005 concerning the Organization and the Structure of Ditjen PMPTK.

Decision of Minister

Decision of Minister of National Education No. 178/U/2001 concerning Degree Titles and Graduates of Higher Education Institutes. Retrieved July 2nd, 2007, available from <http://www.dikti.org/>.

Decision of Minister of National Education No. 232/U/2000 concerning Guidance of Curriculum Construction and Assessment of Higher Education Student. Retrieved July 2nd, 2007, available from <http://www.dikti.org/>.

Decision of Minister of Education and Culture No. 0217/U/1995 concerning Nationally Prevailing Curriculum of Educational Undergraduate Study Program. Retrieved July 2nd, 2007, available from <http://www.dikti.org/>.

Other Sources

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Indonesia* [Guideline of Teacher Certification Implementation in Indonesia]. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Interview Muharam, D. R. 2007.

Ministry of National Education. 2005. *Strategic Plan Ministry of National Education 2005-2009*. Jakarta: Ministry of National Education.

Ministry of National Education. 2006. *Teachers Quality Improvement in Indonesia: New Paradigm and Milestones*. Paper presented at Japan Education Forum III (JEF III). Tokyo.

Ministry of National Education. 2007. *Conceptualization of Quality Assurance in Indonesian Education*. Paper presented at Workshop of Quality Assurance in Indonesian Education. Jakarta.

Websites

Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Retrieved July 12th, 2007, from http://www.ppsunj.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=1.

Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved July 12th, 2007, from <http://www.upi.edu/?C=Spot&id=5>.

PERAN PENDIDIKAN GEOGRAFI MENUMBUHKAN SIKAP KEBANGSAAN MANUSIA INDONESIA

Sidharta Adyatma

adyatma_sidharta@yahoo.com

I. PENGANTAR

Cikal bakal NKRI merujuk peristiwa sejarah di masa lalu, dapat diidentifikasi dari kejayaan Kerajaan Singasari di Jawa Timur yang telah menyatukan "Wilayah Singasari", yaitu Indonesia, Malaysia, China (Champa), Filipina dan sekitarnya (Negarakeragama Canto 42). Wilayah Nusantara dapat dipersatukan kembali walaupun tidak seluas sebelumnya pada jaman kejayaan Kerajaan Majapahit, dengan adanya 'Sumpah Palapa" dari Mahapatih Gadjah Mada. Berakhirnya Kerajaan Majapahit dilanjutkan dengan berdirinya Kerajaan Mataram, yang pada akhirnya terpecah belah menjadi Kerajaan Mataram Surakarta (Paku Bhuwono) dan Kerajaan Mataram Ngayogyakarta (Hamengku Bhuwana), karena masuknya bangsa penjajah menguasai dan membagi-bagi Wilayah Nusantara menjadi daerah jajahan. Hal ini menunjukkan bahwa batas wilayah kedaulatan "Wilayah Nusantara", yang hanya diketahui, dipahami dan dikuasai oleh para raja, mahapatih dan aparatnya tanpa diketahui, dipahami dan merasa dimiliki oleh rakyatnya, maka batas wilayahnya semakin lama semakin terkikis dan mengecil. Oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta mengambil momentum kekosongan kepemimpinan penjajah Jepang akibat kekalahannya dalam Perang Dunia ke II, dengan mengangkat kembali sebagian

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

“Wilayah Nusantara” yang sebelumnya dikuasai penjajah Bangsa Belanda dan diteruskan Bangsa Jepang menjadi wilayah NKRI yang berdaulat dengan memproklamasikan “Kemerdekaan Indonesia” 17 Agustus 1945.

Keutuhan NKRI dan jati diri bangsa dalam perjalanannya hingga abad 21 telah mengalami beberapa peristiwa cobaan disintegrasi mulai dari munculnya aksi Gerakan Tiga Puluh September oleh Partai Komunis Indonesia (G30S PKI); masuknya pengaruh dan ketergantungan pada negara-negara Barat di jaman pemerintahan Soeharto; lepasnya sebagian wilayah Kepulauan Timor menjadi Negara Timor Leste pada pemerintahan Habibie; aksi disintegrasi dari munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Gerakan Papua Merdeka (GPM); dan hampir hilangnya Keistimewaan Daerah Yogyakarta di jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Gunawan, T., 2015). Selain cobaan disintegrasi tersebut, memasuki usia 64 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi krisis multidimensi dari krisis ekonomi, krisis moral dan spiritual serta disorientasi nilai dan visi kebangsaan masih menjadi masalah yang krusial yang dihadapi bangsa. Generasi muda Indonesia terindikasi mengalami penurunan semangat kebangsaan dengan lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri dan sangat jarang yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan untuk tanaman pangan, sehingga ketahanan pangan Indonesia dari waktu ke waktu mengalami defisit yang semakin besar, yang berdampak pada semakin besarnya barang impor yang masuk ke Indonesia baik produk pangan dan produk industri. Adanya penurunan semangat kebangsaan dari generasi muda Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa hingga abad 21 ini pemahaman semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI pada generasi penerus bangsa telah mengalami degradasi, sehingga pendidikan yang mengajarkan dan menanamkan sikap kebangsaan sangat diperlukan sebagai tameng untuk generasi penerus bangsa dari aksi disintegrasi dan pengaruh negara-negara asing.

Merujuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) diamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang, sedang Pasal 31 ayat (5) diamanahkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu sarana pembangun karakter kebangsaan memiliki tujuan supaya generasi penerus bangsa khususnya anak didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan untuk keperluan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan dan budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat, sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan tidak hanya sebagai sarana mentransferkan ilmu pengetahuan, tetapi sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi), sehingga pendidikan harus menyentuh dimensi dasar kemanusiaan.

Pembelajaran sikap kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui pendidikan, dengan cara memperbaiki edukasi di Indonesia yang dimulai dari sekolah dasar, karena yang harus dibenahi ialah persoalan mendasar, yakni alur berpikir (*mindset*) atau logikanya (Effendy, M., 2009). Salah satu disiplin ilmu yang diharapkan memberikan pembelajaran sikap kebangsaan adalah melalui pendidikan geografi, karena ketika pendidikan geografi Indonesia tidak diperkenalkan atau diajarkan lagi kepada seluruh generasi bangsa Indonesia, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah (pertama dan atas) dan umumnya kepada seluruh penduduk Indonesia, maka upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh adalah suatu keniscayaan. Hal ini karena generasi penerus bangsa tidak akan mengetahui, memahami, merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap: (1) batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia; (2) persebaran dan distribusi penduduk Indonesia; (3) keanekaragaman penduduk Indonesia; dan (4) potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati Indonesia, sehingga akan muncul sikap apatis dan ketidakpedulian generasi penerus bangsa yang berujung pada kehilangan identitas kebangsaan (karakter bangsa) dan menjadi cikal bakal perpecahan NKRI. Oleh karena itu, pendidikan geografi Indonesia diharapkan menjadi salah satu materi pendidikan yang dapat memberikan pondasi dasar menanamkan sikap kebangsaan untuk membekali generasi penerus bangsa mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.

II. PERMASALAHAN KEBANGSAAN

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku, agama, budaya dan etnis yang tersebar di berbagai pulau merupakan sebuah kekayaan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan dan kebanggaan yang dimiliki tidak akan bermakna, ketika kebhinnekaan tidak menjadi bagian dalam diri setiap anak bangsa, sehingga akan memunculkan sifat sekretarian yang akan menggerus nasionalisme dan masalah kebangsaan yang senantiasa muncul di tengah masyarakat. Kesadaran kebhinnekaan yang termanifestasikan dalam tindakan nyata keseharian, merupakan kerangka dasar untuk menggerakkan sifat nasionalisme yang tinggi, sehingga dapat menjalin nilai-nilai kebersamaan di tengah ketunggalikaan yang berlandaskan moral Pancasila.

Konflik yang terjadi antar suku di Papua, kekerasan yang berlatar belakang agama di Sampang, konflik terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Mesuji dan kasus lainnya, pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan bangsa menjalin persatuan dalam keragaman bangsa Indonesia. Masyarakat tidak menyadari bahwa negara Indonesia terbentuk dari beragam perbedaan dan tidak akan dapat berjaya tanpa semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi perbedaan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan refleksi dari perbedaan dan menjadi harga mati yang harus dicapai demi terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kaya sumberdaya alam dan pernah disegani di Asia Tenggara saat ini terpuruk menjadi bangsa yang miskin, hal ini berasal dari sistem yang rapuh pada sektor ekonomi dan pendidikan Indonesia yang bertumpu pada paradigma kapitalis, liberalis dan sekularis. Sistem ekonomi kapitalis-liberalis-sekularis yang bertumpu pada sektor non riil, dan sistem pendidikan yang lebih mendahulukan nilai dalam bentuk angka daripada etika, sopan santun, akhlak dan moral, menimbulkan sepuluh permasalahan terbesar bagi bangsa Indonesia, yaitu:

2.1 Kestabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi Indonesia akibat runtuhnya ekonomi mikro dan makro, disikapi pemerintah dengan membuat kebijakan "*Tax Amnesty*" untuk menarik uang warga negara Indonesia yang diinvestasikan ke luar negeri kembali ke Indonesia, dengan harapan supaya dana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa.

2.2 Korupsi

Praktek korupsi yang dilakukan secara sendirian atau melembaga oleh oknum aparat dari tingkat pusat hingga daerah seperti di DPR, kementerian, DPRD, dinas dan perusahaan swasta, mempunyai kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah kasus korupsi di Indonesia yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap terdapat 803 kasus yang menjerat 967 terdakwa korupsi. Kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015 mencapai 2.321 kasus, sedang jumlah koruptor yang dihukum pada periode tersebut mencapai 3.109. Jumlah kasus korupsi tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada tahun 2001-2009 yang telah inkrah berjumlah 549 dengan 831 terpidana (Ayuningtas, R., 2016).

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan pemerintah Indonesia Tahun 2014 dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD \$25, yang berarti berada pada standar hidup yang sangat rendah untuk orang Indonesia. Namun jika digunakan nilai garis kemiskinan menurut Bank Dunia, maka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari disebut sebagai hidup di bawah garis kemiskinan. Angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$2 per hari menurut Bank Dunia mencapai angka 50.6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan di berbagai media di Indonesia dinyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Berdasarkan kemiskinan absolut pada bulan September 2014 lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), yaitu: Jawa Timur sebesar 4,7 juta; Jawa Tengah sebesar 4,6 juta; Jawa Barat sebesar 4,2 juta; Sumatera Utara sebesar 1,4 juta

dan Lampung sebesar 1,1 juta, sedang dalam pengertian kemiskinan relatif berdasarkan persentase penduduk miskin dengan total penduduk per provinsi pada bulan September 2014, provinsi-provinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi, yaitu: Papua sebesar 27,8%; Papua Barat sebesar 26,3; Nusa Tenggara Timur sebesar 19,6%; Maluku sebesar 18,4% dan Gorontalo sebesar 17,4% (BPS, 2015).

2.4 Pengelolaan BBM

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menjelaskan bahwa pengelolaan bahan bakar minyak bersubsidi masih menjadi kendala pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan BBM subsidi selama ini menimbulkan beberapa kendala yaitu meningkatnya defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN. Defisit anggaran mengalami revisi menjadi 2,4 persen terhadap PDB dari sebelumnya sebesar 1,69 persen dalam APBN-Perubahan 2014. Subsidi BBM yang besar akan terus membebani impor sementara ekspor cenderung turun, sehingga mengganggu kinerja neraca transaksi berjalan Indonesia, sedang pengurangan angka subsidi BBM dapat memicu terjadinya kenaikan inflasi. Meningkatnya defisit karena BBM dapat menghambat pembangunan infrastruktur di dalam negeri dan jika dana subsidi BBM dikurangi dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (Mahrofi, Z., 2014).

2.5 Kualitas Pendidikan Indonesia

Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah baik efektivitas, efisiensi dan standarisasi dalam pengelolaan pendidikan akan menjadi kendala dalam persaingan global dan diberlakukannya MEA. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia secara khusus disebabkan oleh beberapa faktor yang selama ini tidak pernah diperhatikan dan diselesaikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (*equity*) dan banyaknya peserta didik yang putus sekolah serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Rendahnya mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam (IPA), matematika, serta bahasa khususnya bahasa Inggris, sehingga penguasaan materi merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek.
- c. Rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan.

- d. Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat, karena perkembangan dunia usaha yang masih didominasi oleh pengusaha besar dan jumlahnya terbatas sangat mengutamakan efisiensi (padat modal dan padat teknologi), sehingga penambahan kebutuhan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan penambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan.
- e. Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral, yang menyebabkan rendahnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja, sehingga pendidikan agama menjadi sangat penting sebagai landasan akhlak, moral dan budi pekerti yang perlu diberikan kepada peserta didik sejak dini dan menjadi landasan yang kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat.

Masalah-masalah diatas sangat erat kaitannya dengan berbagai kendala, seperti keadaan geografis, demografis, sosio-ekonomi, besarnya jumlah penduduk yang tersebar diseluruh wilayah geografis Indonesia cukup luas. Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya kelemahan manajemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi juga pada tingkat makro seperti rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sistem pendidikan. Sistem dan tata kehidupan masyarakat yang tidak kondusif turut menentukan rendahnya mutu sistem pendidikan di sekolah dan menyebabkan rendahnya mutu peserta didik dan lulusannya. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas harus dirumuskan secara spesifik, karena fenomena dan penyebab timbulnya masalah berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia (Rochaety, E., dkk. 2006).

2.6 Keterbatasan Lapangan Kerja

Tenaga kerja atau buruh di Indonesia selalu turun ke jalan hampir setiap tahun menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, setiap tahun pemerintah selalu menaikkan upah minimum provinsi (UMP) yang dijadikan rujukan menentukan besaran upah bagi buruh, tetapi buruh selalu meminta kenaikan gaji yang lebih besar. Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di sumber daya manusia (SDM), tetapi berdasarkan hasil kajian Bank Dunia dan CSIS mengenai persoalan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Tingginya

angka tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Hasil kajian Bank Dunia dan LIPI soal ketenagakerjaan di Indonesia merangkum lima permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pelaku usaha, yaitu:

- a. Pekerja alih daya atau *outsourcing* di Indonesia sangat jauh dari sejahtera, karena rata-rata gajinya berbeda 30 persen dibandingkan karyawan kontrak di perusahaan yang sama.
- b. Hasil kajian LIPI menyebutkan bahwa sekitar 43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan, karena kecilnya upah dan tingginya harga barang.
- c. Persoalan pengangguran di Indonesia dipicu tidak adanya kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga membuat tenaga kerja terdidik mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil.
- d. Bank Dunia mengamati fenomena lapangan kerja di Indonesia yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja, karena adanya ketimpangan informasi terutama di kalangan anak muda yang baru lulus sekolah.
- e. Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha, dengan mengadakan pelatihan keterampilan dari pemberi kerja di luar bursa kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru lulus sekolah (Moerti, W., 2014).

2.7 Mahalnya Harga Pangan.

Harga pangan menyumbang 61% dari inflasi nasional sepanjang tahun lalu, sehingga masalah pangan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah, karena selama ini pemerintah cenderung reaktif ketika ada lonjakan harga komoditas dan kebijakan yang diambil hanya parsial dan terbatas, sehingga berujung pada tidak selesainya masalah dan berpotensi terulang di kemudian hari. Masalah data pangan dan penerapan kebijakan yang salah membuat harga pangan di Indonesia rapuh dan rawan bergerak tidak terkendali. Sebagai contoh, harga daging ayam yang langsung naik ketika harga jagung dan pakan melambung serta harga daging sapi yang melejit karena ada kebijakan penerapan Pajak Petambahan Nilai (PPn) impor 10%. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa mahalanya harga pangan dikarenakan rantai distribusi

pangan dari petani sampai ke konsumen cukup panjang, sehingga salah satu upaya untuk memangkas harga dengan menugaskan Bulog menyerap langsung bahan pangan dari petani dan menjualnya langsung ke konsumen (Kontan, Senin 1/2).

2.8 Bencana Alam

Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas tektonik), harus terus menerus menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami. Beberapa peristiwa di Indonesia selama 15 tahun terakhir telah menjadi *headline* di media dunia, karena bencana-bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan hewan serta menghancurkan wilayah daratannya (termasuk banyak infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi).

2.9 Kelaparan dan Krisis Pangan

Kasus kelaparan di dunia berdasarkan catatan FAO, diperkirakan sekitar 1 miliar orang terancam kelaparan. Produksi bahan pangan di beberapa negara maju, 2 hingga 4 persen penduduknya mampu memproduksi makanan untuk seluruh penduduk dan sisanya diekspornya, sedang di banyak negara berkembang, 60 sampai 80 persen penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 menurut Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) diperkirakan mencapai 243 juta jiwa, dengan konsumsi beras per kapita per tahun 139 kilogram per jiwa, maka dibutuhkan beras 33,78 juta ton. Kebutuhan beras pada tahun 2030 untuk pangan akan mencapai 59 juta ton untuk jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 425, sehingga Indonesia beresiko mengalami krisis pangan pada tahun 2025. Krisis pangan di Indonesia akan semakin cepat datangnya jika konversi lahan pertanian semakin meluas, karena lahan agraria semakin berkurang dan kebutuhan konsumsi bahan pangan masyarakat makin tinggi. Faktor penyebab produksi bahan pangan dari hasil pertanian di Indonesia semakin tertinggal diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kondisi infrastruktur pertanian yang terabaikan; b) Kurang berfungsinya organisasi yang mewadahi kepentingan petani; c) Akses petani ke lembaga keuangan lemah sehingga petani tergantung pada rentenir; d) Investasi petani dan pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian rendah; e) Akses petani menjual hasil produksi pertanian langsung ke pasar/konsumen lemah; f) Profesi sebagai petani terpinggirkan dan tidak diminati generasi penerus sehingga jumlah petani

semakin berkurang; g) Kualitas dan keterampilan sumberdaya petani yang mayoritas rendah dan h) Sistem penyaluran dana program ketahanan pangan tidak transparan dan tepat sasaran.

2.10 Krisis Kepemimpinan

Gejala krisis kepemimpinan ada 3, yaitu: a) Masyarakat tidak merasa memiliki pemimpin sesuai harapan; b) Kecenderungan sebagian masyarakat yang loyal kepada pemimpin yang diidolakan sehingga tidak rasional lagi dan c) Kepemimpinan dan keanggotaan partai yang belum profesional karena menyangkut tradisi, budaya dan sistem politik nepotisme (Unisosdem, 2016). Krisis kepemimpinan mungkin merupakan krisis yang paling parah, karena terjadi dari mulai tingkat nasional hingga tingkat daerah atau lokal. Hal ini terjadi karena munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keseriusan para pemimpin terpilih dalam pembangunan dan mengatasi permasalahan di masyarakat dan banyaknya para pemimpin yang terjerat kasus korupsi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof Dr Abdul Malik Fadjar mengemukakan akar permasalahan kebangsaan di Tanah Air adalah pendidikan, karena pendidikan adalah investasi masa depan dan melalui pendidikan nilai-nilai kebangsaan dapat terbangun. Ketua APTISI Prof Dr Edy Suandi menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini hanya terfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan tetapi kurang berpijak pada aspek sikap, sehingga membuat kejujuran dan integritas merupakan hal langka yang dimiliki anak bangsa. Pelajaran yang berkaitan dengan sikap hanya sebatas pelengkap, sehingga Indonesia pernah menjadi bangsa terkorup di dunia. Guru besar Fakultas Ekonomi UNY Prof Suyanto menilai pendidikan di Indonesia miskin inspirasi, sehingga untuk menginspirasi, harus dibangun masyarakat pembelajar yang menguasai delapan keterampilan dan relevan dengan abad 21 (*21st century skills*), yaitu: kepemimpinan, literasi digital, komunikasi, kecerdasan emosional, kewirausahaan, kewargaan global, serta kemampuan *problem-solving* dan *team-working*. Pendidikan yang terpenting adalah menginspirasi, karena semua kemajuan teknologi lahir dari inspirasi dan imajinasi, sedang Rektor Unesa Prof Muchlas Samani menyarankan rancangan pendidikan harus didasarkan atas prediksi situasi 20 tahun mendatang, dengan melibatkan siswa, guru dan dosen yang harus memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian abad 21, supaya hasilnya sesuai dengan situasi ketika

lulusan terjun ke masyarakat dan mampu menghadapi persaingan global (Sukarelawati, E., 2015). Presiden Republik Indonesia Jokowi berharap pendidikan dapat menguatkan mental kebangsaan, karena Indonesia selama ini tertinggal dari banyak bangsa lain disebabkan oleh enam masalah, yaitu: orang Indonesia tidak konsisten untuk bekerja keras, tak konsisten berpikir positif, tidak bekerja produktif, mudah membesar-besarkan masalah, berpikir menjelek-jelekkan, dan gemar mencemooh yang lain (ARN, 2016).

III. PERAN PENDIDIKAN GEOGRAFI MENUMBUHKAN SIKAP KEBANGSAAN

Permasalahan kebangsaan di Indonesia menuju pada titik kritis keutuhan NKRI, sehingga menuntut dan menantang semua komponen bangsa dan institusi untuk peduli memikirkan, mengkaji dan memberi alternatif solusinya. Pendidikan sebagai salah satu institusi mempunyai peran yang dianggap paling efektif dalam memberikan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengatasi masalah kebangsaan. Tanpa mengenyampingkan pendidikan pada mata pelajaran lainnya, pendidikan geografi merupakan salah satu sumber pembelajaran nilai kebangsaan yang paling pas dalam menyuguhkan dan mengangkat masalah kebangsaan. Pendidikan geografi Indonesia telah memberikan kontribusi dalam penataan karakter bangsa dan atau anak bangsa, menuju warga negara yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat dan bangsa.

Masalah kebangsaan yang dikemukakan di atas, merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia, sehingga pendidikan geografi perlu melakukan reposisi peran dan fungsi sebagai pembelajaran yang menumbuhkan karakter kebangsaan dan menjadi sumber nilai kebangsaan. Beberapa alternatif untuk pemecahan masalah kebangsaan dengan cara menumbuhkan karakter kebangsaan, khususnya karakter peserta didik sebagai anak bangsa yang nantinya peduli dengan keutuhan NKRI dan eksistensi bangsa dan negaranya adalah sebagai berikut:

1. Sesuai karakter geografi yaitu mempelajari keanekaragaman fenomena geosfera, maka pendidikan geografi harus mampu menjadi pelopor dan dasar pembelajaran pendidikan multikultural, sehingga pendidikan geografi yang memiliki bahan dasar tentang

objek material geografi yaitu tentang kebhinekaan potensi bangsa, dapat membangkit kesadaran warga negara dan peserta didik tentang Bhinneka Tunggal Ika.

2. Adanya perkembangan kebijakan pendidikan menuju otonomi pendidikan, yaitu setiap satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, maka perlu dimanfaatkan para guru dan dosen mengembangkan kurikulum pendidikan geografi yang berorientasi pada pendidikan nilai atau karakter kebangsaan. Setiap acuan pembelajaran pendidikan geografi di setiap satuan pendidikan, diharapkan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi mampu menanamkan sikap, kesadaran dan keterampilan geografis khususnya wilayah Indonesia bagi peserta didik, sehingga menumbuhkan sikap kepedulian terhadap keutuhan NKRI dan eksistensi bangsa.
3. Pendidikan geografi harus mampu mendorong tiga aspek pembelajaran peserta didik, yaitu: mampu mendorong siswa memiliki pengetahuan geografik (*geographic knowledge*), sikap geografik (*geographic attitude*), dan keterampilan geografik (*geographic skill*). Pengetahuan geografik ditanamkan pada peserta didik supaya dapat menggambarkan, mengetahui, mendata, mengumpulkan, menganalisis, dan merekonstruksi fenomena geografi khususnya di wilayah Indonesia. Sikap geografik ditanamkan pada peserta didik supaya dapat hidup beradaptasi, dinamis, dan interaksi mutualis dalam keanekaragaman dan kedinamikaan alam, sedang keterampilan geografik ditanamkan pada peserta didik supaya mempunyai kemampuan untuk menjadikan pengetahuan geografi sebagai pengetahuan praktis dalam merekayasa kehidupan di masyarakat dalam kepentingan negara demi keutuhan NKRI, sehingga peserta didik mampu melakukan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan serta keanekaragaman alam Indonesia, seperti: sikap tidak membuang sampah sembarangan; tidak menjual kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan kepada bangsa asing secara ilegal; tidak membuat kerusakan alam dan lingkungan; dan dapat menjaga serta melestarikan kekayaan serta keanekaragaman alam Indonesia bagi generasi penerus bangsa.
4. Pengertian geografi yang dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena geosfera dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahannya dalam konteks keruangan, perlu diperluas pada

pengertian geografi yang partisipatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik dalam memberikan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan hidup dalam dinamika dan keanekaragaman fenomena geosfera, sehingga dapat beradaptasi dalam dinamika kehidupan yang penuh dengan keanekaragaman. Pembelajaran hidup rukun dan *adaptable* terhadap dinamika keanekaragaman kehidupan merupakan modal penting dalam meningkatkan nilai kebangsaan dan kesadaran bernegara. Objek material geografi merupakan bahan dasar untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kekayaan alam Indonesia, sedang pendidikan geografi dituntut dapat merangsang, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan sikap rasa cinta, peka, peduli dan tanggungjawab terhadap keanekaragaman alam Indonesia serta bertanggungjawab menumbuh kembangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) peserta didik dalam menjaga dan melindungi kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan serta keutuhan NKRI (Sidauruk, T., 2013).

IV. SIMPULAN

Masalah kebangsaan dan keutuhan NKRI menjadi permasalahan semua anak bangsa, sehingga diperlukan peran serta seluruh rakyat Indonesia dan khususnya pendidik geografi untuk menanamkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam sikap kebangsaan bagi generasi penerus bangsa, sehingga mempunyai rasa dan sikap bertanggungjawab dalam menjaga dan melindungi kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan serta keutuhan NKRI.

Pendidikan geografi diharapkan dapat menunjukkan peran nyata memberikan alternatif pemecahan masalah kebangsaan, dengan mendorong peserta didik dapat berkiprah dalam kehidupan nyata untuk mengembangkan karakter kebangsaan melalui strategi geografi emansipatoris, yaitu pendidikan geografi yang mampu memberikan kontribusi pada kehidupan nyata, dan mampu mendorong peserta didik menjalani dinamika kehidupan di Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman secara harmonis dan dinamis, dengan tetap menjaga dan melindungi kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan serta keutuhan NKRI .

DAFTAR PUSTAKA

- ARN. 2016. *Jokowi: Bangsa Indonesia Tertinggal karena Enam Masalah?*. <https://arrahmahnews.com/2016/05/24/jokowi-bangsa-indonesia-tertinggal-karena-enam-masalah/>
- Ayuningtyas, R. 2016. *Kasus Korupsi di Indonesia Menggila*. <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>.
- Effendy, M., 2009. *"Rethinking & Reshaping" Visi dan Strategi Pendidikan Kebangsaan di Era Global*. Disampaikan dalam acara Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung tanggal 5 s.d. 8 Maret 2009.
- Gunawan, T., 2015. *Pendidikan Geografi di Indonesia Menuju Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Rumah Suluh.
- Mahrofi, Z. 2014. *Pengelolaan Subsidi BBM Masih Menjadi Kendala Ekonomi*. <http://www.antaraneews.com/berita/450584/pengelolaan-subsidi-bbm-masih-menjadi-kendala-ekonomi>.
- Moerti, W. 2014. *5 Masalah Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja di Indonesia*. <https://www.merdeka.com/uang/5-masalah-tenaga-kerja-dan-lapangan-kerja-di-indonesia.html>.
- Rochaety, E., dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sidauruk, T. 2013. *Pendidikan Geografi Berbasis Karakter sebagai Wahana Pembelajaran Kependudukan*. JUPIIS Vol. 5 No. 2 Des. 2013.
- Sukarelawati, E. 2015. *Watimpres: Akar Utama Masalah Kebangsaan adalah Pendidikan*. <http://www.antaraneews.com/berita/499238/watimpres-akar-utama-masalah-kebangsaan-adalah-pendidikan>.
- Unisosdem. 2016. *Apa yang Dilakukan untuk Mengatasi Krisis Kepemimpinan*. http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=307&coid=1&caid=34.

TINJAUAN AKSIOLOGIS LAGU “INDONESIA RAYA”: RELEVANSINYA BAGI PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN DAN PENGUATAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH

Sumasno Hadi

sumasno.hadi@unlam.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan catatan sejarah, diketahui bahwa lagu “Indonesia Raya” karya W. R. Supratman merupakan karya musik modern yang cukup berpengaruh bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal merebut, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Melalui tinjauan filsafat nilai (aksiologi), diketahui bahwa lagu “Indonesia Raya” dalam kualitas empirisnya mengandung makna etis dan estetis yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Kedua makna aksiologis tersebut punya potensi dan sangat relevan untuk diimplementasikan serta dikembangkan secara kontekstual pada dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi kegiatan penumbuhan budi pekerti di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Indonesia Raya, musik, aksiologi, etis, estetis, kebangsaan

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan*, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sendratasik FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Bagi kalangan pendidik atau pemerhati pendidikan, konferensi pers Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 26 Juli 2016 yang lalu merupakan kabar yang mengejutkan, atau barangkali malah mengecewakan. Demikian karena pada momen itu diumumkan perombakan Kabinet Kerja Jilid II yang memunculkan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru. Yaitu Muhajir Effendi, menggantikan Anies Baswedan. Akhirnya, psikologi massa pendidikan kita pun tergoncang. Sosok Anies Baswedan yang populer dan digadang-gadang oleh para pelaku pendidikan untuk membenahi problem dunia pendidikan kita pun pupus.

Harapan dunia pendidikan kita kepada Anies Baswedan kala itu tidaklah mengada-ada dan bukan tanpa sebab. Tokoh muda yang pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina dan juga penggerak Gerakan Indonesia Mengajar ini, diketahui sudah menunjukkan harapan publik untuk membenahi bidang yang amat kompleks ini, pendidikan. Beberapa kebijakan/program potensial yang digagasnya selama menjabat sebagai Mendikbud misalnya: Ujian Nasional (UN) Bukan Penentu Kelulusan, UN Perbaikan, Indeks Integritas UN, Sekolah Aman, Pendidikan Anak Usia Dini Nol Kilometer (PAUD 0 Km), Direktorat Keayahbundaan, Hari Pertama Sekolah dan Penumbuhan Budi Pekerti.

Dinamika dunia pendidikan di negara kita, memang, tidaklah bernilai eksklusif pada ranah pendidikan *an sich*. Bagaimanapun, konsep dan praktik pendidikan kita akan sangat terkait dengan satu bidang yang amat "licin", yakni politik, dengan bentuk dinamika kekuasaannya. Oleh karenanya, persoalan pergantian kebijakan/program atau pergantian menteri pendidikan lantaran dinamika kekuasaan politik menjadi tak terhindarkan. Termasuk soal turunya Anies Baswedan dari kursi politiknya: Mendikbud. Dan dari beberapa peninggalan kebijakan pendidikan menteri Anies Baswedan itu, satu yang menarik dan menjadi pemantik kajian ini adalah soal gerakan Penumbuhan Budi Pekerti.

Gerakan penumbuhan budi pekerti tersebut telah dilegalkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). Yang dimaksud dengan penumbuhan budi pekerti ini adalah suatu kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di lingkungan sekolah. Artinya program ini tak lain sebagai bentuk implementasi dari konsep pendidikan karakter yang fokus pada

penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Di dalam Lampiran Permendikbud itu disebutkan bahwa, gerakan PBP dilatarbelakangi oleh fakta tentang masih terabaikannya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila di masyarakat. Utamanya aktualitas nilai kemanusiaan yang belum ideal, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat luas.

Satu bentuk kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti di lingkungan sekolah ini adalah dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan. Bentuk kegiatan ini pun dijelaskan dengan empat kegiatan wajibnya, yakni: (1) melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketetapan sekolah; (2) melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB untuk jenjang SMP, SMA/SMK dan sekolah pada jalur pendidikan khusus yang setara SMP/SMA/SMK dengan peserta didik bertugas sebagai komandan dan petugas upacara serta kepala sekolah/wakil bertindak sebagai inspektur upacara; (3) sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan/atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air; (4) sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan satu lagu daerah (lagu-lagu daerah seluruh Nusantara).

Dari keempat bentuk kegiatan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan tersebut, dua bentuk pertama terkait dengan nilai-nilai etis, yaitu tentang penanaman nasionalisme dan pendidikan karakter. Dan dua bentuk terakhir jelas sangat terkait dengan materi estetika (seni), khususnya musik, yaitu dengan materi lagu wajib nasional seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya maupun lagu-lagu daerah Nusantara. Pewajiban kegiatan seni di sekolah dengan menyanyikan lagu seakan-akan menyadarkan kita. Bahwa selama ini, praktik pendidikan kita lebih didominasi oleh kegiatan kognitif-logis, kurang atau abai pada kegiatan afektif-intuitif. Dan persoalan dominasi praktik pendidikan ini sebenarnya bisa diurut hingga pada wilayah paradigmatis, yakni pada filsafat pendidikannya. Dari hal itu, pertanyaan reflektif yang perlu dimunculkan adalah: Apakah selama ini paradigma pendidikan kita memang lebih mempercayai filsafat pendidikan rasionalisme ketimbang idealisme? Apakah debat filsafat pendidikan klasik (idealisme-rasionalisme) itu masih relevan dewasa ini, dimana

eksistensialisme, pragmatisme, kontruksionisme dan progresivisme pendidikan sudah berkembang?

Kajian ini tidak akan masuk pada problem filsafat pendidikan (metafisika) tersebut. Meski bahasan metafisika pendidikan itu sungguh penting, akan tetapi membahas masalah pendidikan secara pragmatis-aksiologis pada kesempatan ini dipandang lebih strategis. Oleh karenanya, pada kajian ini penulis akan fokus pada persoalan nilai-nilai konkret-aktual dalam pendidikan kita. Yakni suatu tinjauan aksiologis (aksiologi sebagai objek formal) dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" sebagai objek kajiannya (objek material). Kajian ini akan diawali dengan meninjau lagu "Indonesia Raya" dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini perlu untuk melihat konten sejarah lagu "Indonesia Raya" sebagai latar sosio-kultural. Dan latar ini penting untuk membentuk kerja analisis selanjutnya sehingga bernilai kontekstual. Lalu tinjauan aksiologi seni dilakukan terhadap lagu "Indonesia Raya", dalam rangka menggali kandungan nilai-nilai yang relevan dengan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas. Kemudian penulis pun akan mencoba merefleksikan kajian ini secara kritis dan diakhiri dengan beberapa simpulan-penutup.

II. SEJARAH LAGU "INDONESIA RAYA"

Catatan sejarah telah mengatakan bahwa lagu kebangsaan kita, pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya Wage Rudolf (W. R.) Supratman pada Kongres Pemuda II di gedung Jl. Kramat Raya 106 Batavia (sekarang Jakarta), yakni pada tanggal 28 Oktober 1928.¹ Pada acara itu Supratman menyebarkan sebuah lirik-konsep lagunya kepada hadirin di sana. Lantaran isi liriknya yang dianggap cukup kritis bagi penguasa Hindia Belanda, maka pemuda Soegondo Djojo Poespito yang memimpin kongres hanya mengizinkan Supratman untuk memainkan lagunya secara instrumental.² Maka pada sesi istirahat sidang kongres, berkumandanglah sebuah *ode* (baca: lagu pujian-perjuangan) berjudul "Indonesia Raja" (kini "Indonesia Raya") yang dimainkan dengan instrumen biola oleh penciptanya sendiri, Supratman.

Lagu tersebut menemukan momentum penting lainnya pada acara penutupan Kongres Pemuda II, sekitar akhir Desember 1928.³ Demikian karena pada momen itu, lagu "Indonesia Raya" dikumandangkan secara utuh dengan menyanyikan lirik aslinya. Seorang penyanyi yang melagukannya, Dolly (Theodora

Athia, anak sulung Haji Agus Salim), telah memukau hadirin yang kemudian turut serta berdiri dan menyanyi bersama.⁴ Dua bulan kemudian, *ode* tersebut menjadi amat populer, terutama dipelopori oleh para anggota Kepanduan Bangsa Indonesia, sebab dalam lirik *ode* tersebut ada kalimat “jadi pandu ibuku”.⁵ Meskipun Kongres Pemuda 1928 itu dapat dikatakan menjadi momentum penting bagi publikasi lagu “Indonesia Raya” namun perlu dicatat bahwa setahun sebelumnya, 1927, lagu ini sudah direkam dalam bentuk *instrumentalia* dengan judul “*Indonees, Indoness*”. Hal ini berdasarkan informasi Surat Pembaca dari Hongkong yang dimuat Harian *Kompas* pada 1971.⁶ Kala itu Supratman adalah juga seorang wartawan di Surat Kabar *Sin Po*.⁷ Dan ternyata menurut data Arsip Nasional RI, sehari sebelum Supratman memainkan *instrumentalia* “Indonesia Raya” pada acara kongres pemuda, *Sin Po* telah mempublikasikan teks (lirik dan notasi) lagu itu.⁸ Nampaknya, hal ini lantaran Supratman kala itu juga bekerja sebagai wartawan *Sin Po*.

Tahun 1930, lagu “Indonesia Raya” dilarang pemerintah Hindia Belanda untuk dinyanyikan di muka umum, karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Hal itu lantaran adanya kata-kata “Merdeka, Merdeka” dalam liriknya. Maka para pemuda kala itu pun mengganti kata “Merdeka” dengan kata “Mulia”. Dan diucapkan dalam *refrein* lagu menjadi “Mulia, Mulia!”. Meski kata “Merdeka” lebih berarti, akan tetapi kata “Mulia” yang menggantikannya tidak mengurangi para pemuda untuk menganggap lagu “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan. Nilai kebangsaan lagu ini, sebenarnya juga diperkuat secara tekstual dengan dicantumkannya frasa “lagu kebangsaan” oleh Supratman dalam teks-notasi lagu aslinya.⁹ Artinya, Supratman sudah merancang atau mempersiapkan “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan sebuah republik (Indonesia), yang kala itu belum berdiri.

Ketika Jepang menduduki bangsa kita, pada tahun 1942 lagu “Indonesia Raya” dilarang untuk dikumandangkan, meski beberapa waktu sebelumnya Jepang sempat mengudarakannya lewat Radio Jepang. Tentu hal itu dalam rangka mengambil hati “saudara mudanya”. Setelah merasa kedudukannya semakin lemah dan goyah, pada 1944 Jepang membentuk Panitia Lagu Kebangsaan yang berjumlah 13 orang dan diketuai oleh Bung Karno. Panitia ini melakukan perubahan lagu “Indonesia Raya” (versi 1928) dalam segi musik, lirik-syair, serta membuat ketentuan-ketentuan resmi dalam tata cara

menyanyikan. Satu perubahan tersebut yakni perubahan lirik bagian *refrain*/ ulangan: "Indoness Indoness/ Moelia Moelia/ Tanahkoe, negrikoe yang Koetjinta/ / Indones, Indones/ Moelia Moelia/ Hidoeplah Indonesia Raja// menjadi: "Indonesia Raya/ Merdeka Merdeka/ Tanahku, Negriku yang Kucinta// Indonesia Raya/ Merdeka Merdeka/ Hiduplah Indonesia Raya//". Selain Bung Karno, anggota lain dari kepanitian ini di antaranya: Ki Hajar Dewantara, Achiar, Soedibjo, Darmawidjaja, Koesbini, K.H. Mas Mansur, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Sartromoeljono, Sanoesi Pane, Simandjuntak dan Mr. Oetojo.¹⁰

Tahun 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 28 tentang Pembentukan Panitia "Indonesia Raya" yang mengatur cara menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", bendera dan lambang negara. Panitia ini berjumlah 21 dengan diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara dan Mr. Mohammad Yamin sebagai sekretaris umum. Namun kerja panitia tersebut tak membuahkan hasil lantaran peristiwa pertempuran/agresi Belanda.

Sekitar 1950-an "Indonesia Raya" belum dapat diperdengarkan secara luas untuk masyarakat umum. Kala itu yang bersedia merekamnya adalah *The Indonesian Music Company Irama Limited*, sebuah perusahaan pembuat piringan hitam lagu-lagu Indonesia yang terletak di Jalan Tjikini 78, Jakarta. *Company* ini lalu beralih dengan menyodorkan ide untuk merekam lagu Indonesia Raya versi Jozef Cleber, yang hak ciptanya dimiliki oleh Radio Republik Indonesia. Saat itu Cleber adalah pemimpin orkes simfoni yang sering mengudara di RRI. Ia melibatkan 140 musisi saat merekam aransemen "Indonesia Raya" di Studio RRI Jakarta pada awal tahun 1951. Presiden Soekarno pun menyukai hasil gubahan Cleber ini, yang berirama *maestoso con bravura* (megah dan berani). Kemungkinan besar, versi yang tersebar sekarang adalah versi rekaman Jozef Cleber yang direkam oleh RRI dan Irama Limited.¹¹ Jadi, lantaran peranan Jozef Cleber-lah lagu "Indonesia Raya" menjadi seperti versi yang paling kita kenal sekarang ini.

Pada tahun 1958, Pemerintah RI berhasil merumuskan ketetapan mengenai lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Pada tahun 1958 ini terbentuklah Panitia Peninjauan Lagu Indonesia Raya. Berdasarkan hasil kerja panitia tersebut, serta berdasarkan sidang kabinet tanggal 30 Mei 1958, maka Presiden RI pada tanggal 26 Juni 1958 menetapkan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1958. Peraturan ini memutuskan perihal lagu kebangsaan "Indonesia Raya",

yaitu mengenai nada-nada, irama, iringan, kata-kata, gubahan-gubahan lagu, cara penggunaan dan partitur untuk dapat dimainkan dengan alat musik.¹² Di situ juga memuat perubahan birama, dari yang sebelumnya birama dari 6/8 (*waz*) menjadi 4/4 (*mars*), dengan diberi petunjuk *con bravura* (dibawakan/dinyanyikan dengan cemerlang atau megah).

Jika dilihat soal perubahan teks-liriknya, lagu kebangsaan "Indonesia Raya" sejak tahun 1928 hingga kini dapat dikatakan memiliki tiga (perubahan) bentuk. Yakni bentuk asli (1928), bentuk resmi (1958) dan bentuk modern/ sekarang. Tabel berikut ini menyajikan ketiga bentuk teks-lirik lengkap yang dimaksud: (1) lirik asli tahun 1928;¹³ (2) lirik resmi dengan ejaan tahun 1958;¹⁴ dan (3) lirik modern/sekarang dengan EYD.¹⁵

Tabel 1. Lirik/Syair "Indonesia Raya" dalam Tiga Versi

Lirik Asli (1928)	Lirik Resmi (Ejaan 1958)	Lirik Modern (Ejaan EYD)
<p>INDONESIA RAJA</p> <p>KUPLET I Indonesia tanah airkoe, Tanah toempah darahkoe, Disanalah akoe berdiri, Mendjaga pandoe Iboekoe.</p> <p>Indonesia kebangsaankoe, Kebangsaan tanah airkoe, Marilah kita berseroe: "Indonesia bersatoe".</p> <p>Hidoeplah tanahkoe, Hidoeplah neg'rikoe, Bangsakoe, djiwakoe, semoea, Bangoenlah raj'atnja, Bangoenlah badannja, Oentoek Indonesia Raja.</p> <p>KUPLET II Indonesia tanah jang moelia, Tanah kita jang kaja, Di sanalah akoe hidoep, Oentoek s'lama-lamanja.</p> <p>Indonesia tanah poesaka, Poesaka kita semoea, Marilah kita mendoa: "Indonesia bahagia".</p> <p>Soeboerlah tanahnja, Soeboerlah djwanja, Bangsanja, rajalnja, semoeanja, Sedarlah hatinja, Sedarlah boedinja, Oentoek Indonesia Raja.</p> <p>KUPLET III Indonesia tanah jang soetji, Bagi kita di sini, Di sanalah kita berdiri, Mendjaga Iboe sedjati.</p> <p>Indonesia, tanah berseri, Tanah jang terkoeljintai, Marilah kita berdjandji: "Indonesia bersatoe"</p> <p>S'lamatlah raj'atnja, S'lamatlah poetranja, Poelaenja, laoenja, semoea, Madjoelah neg'rinja, Madjoelah pandoenja, Oentoek Indonesia Raja.</p> <p>REFRAIN/ULANGAN Indones', Indones', Moelia, moelia, Tanahkoe, neg'rikoe jang koeljinta. Indones', Indones', Moelia, moelia, Hidoeplah Indonesia Raja.</p>	<p>INDONESIA RAJA</p> <p>KUPLET I Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Disanalah aku berdiri, Djadi pandu ibuku.</p> <p>Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.</p> <p>Hiduplah tanahku, Hiduplah neg'riku, Bangsaku, rajalku, sem'wanja, Bangunlah djwanja, Bangunlah badannja, Untuk Indonesia Raja.</p> <p>KUPLET II Indonesia tanah jang mulia, Tanah kita jang kaja, Di sanalah aku berdiri, Untuk s'lama-lamanja.</p> <p>Indonesia tanah pusaka, P'saka kita semuanya, Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia.</p> <p>Suburlah tanahnja, Suburlah djwanja, Bangsanja, Rajalnja, sem'wanja, Sadarlah hatinja, Sadarlah budinja, Untuk Indonesia Raja.</p> <p>KUPLET III Indonesia tanah jang sulji, Tanah kita jang sakti, Di sanalah aku berdiri, Ndjaga ibu sedjati.</p> <p>Indonesia, tanah berseri, Tanah jang aku sayangi, Marilah kita berdjandji, Indonesia abadi.</p> <p>S'lamatlah rakjatnja, S'lamatlah putranja, Pulaunja, lautnja, sem'wanja, Madjulah neg'rinja, Madjulah pandunja, Untuk Indonesia Raja.</p> <p>REFRAIN/ULANGAN Indonesia Raja, Merdeka, merdeka, Tanahku, neg'riku jang kutjinta! Indonesia Raja, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raja.</p>	<p>INDONESIA RAYA</p> <p>KUPLET I Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku.</p> <p>Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.</p> <p>Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, Bangsaku, rakyatku, semuanya, Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya.</p> <p>KUPLET II Indonesia tanah yang mulia, Tanah kita yang kaya, Di sanalah aku berdiri, Untuk s'lama-lamanya.</p> <p>Indonesia tanah pusaka, Pusaka kita semuanya, Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia.</p> <p>Suburlah tanahnja, Suburlah jiwanya, Bangsanya, rakyatnya, semuanya, Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya, Untuk Indonesia Raya.</p> <p>KUPLET III Indonesia tanah yang suci, Tanah kita yang sakti, Di sanalah aku berdiri, Menjaga ibu sejati.</p> <p>Indonesia, tanah berseri, Tanah yang aku sayangi, Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.</p> <p>Selamatlah rakyatnya, Selamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya, Majulah negerinya, Majulah pandunya, Untuk Indonesia Raya.</p> <p>REFRAIN/ULANGAN Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang kucintai! Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya.</p>

Seorang sastrawan *dus* pengamat seni ternama Indonesia, Remy Sylado (Yapi Tambayong), pada tahun 2006 pernah menyatakan pendapat yang kontroversial mengenai lagu "Indonesia Raya". Yakni pada saat menyampaikan hasil Festival Film Indonesia (FFI) 2006, Remy Sylado selaku juri FFI mengatakan bahwa "Indonesia Raya" merupakan jiplakan dari lagu berbahasa Belanda-Indo berjudul "Lekka-lekka" atau "Pinda-pinda". Tapi pernyataan itu, sebenarnya pernah dinyatakan dalam *Ensiklopedi Musik* (1992). Di ensiklopedi ini, Sylado menjelaskan bahwa orang pertama yang mengatakan bahwa "Indonesia Raya" itu plagiat dari "Lekka-lekka", sebenarnya adalah musikus *cum* kritikus musik Amir Pasaribu pada tahun 1950.¹⁶ Kaye A. Solapung, seorang pengamat musik menanggapi tulisan Remy dalam *Kompas* tanggal 22 Desember 1991, bahwa Remy hanya sekadar mengulang tuduhan Amir Pasaribu pada tahun 1950-an. Solapung kemudian menganalisis lagu-lagu itu. Menurutnya, lagu "Lekka Lekka Pinda Pinda" tidak sama persis dengan "Indonesia Raya" dengan hanya didasarkan pada delapan ketuk yang sama dan penggunaan *chord* yang jelas berbeda sehingga ia menyimpulkan bahwa Indonesia Raya tidak menjiplak.¹⁷

III. AKSIOLOGI LAGU “INDONESIA RAYA”

Aksiologi (*axiology*) ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki (tentang) hakikat nilai.¹⁸ Dan penyelidikan atau tinjauan aksiologi yang ilmiah ini, sepenuhnya berdasar pada sudut pandang kefilosafatan (*philosophical view*). Maka aksiologi yang dimaksud di sini adalah filsafat nilai. Sebagaimana konsep sistem filsafat, maka tinjauan aksiologis diandaikan dapat dibangun berdasarkan pandangan ontologis dan epistemologis. Jadi untuk membahas aksiologi lagu “Indonesia Raya”, pertama-tama harus dirumuskan dulu nilai metafisis dan epistemologisnya. Namun pada kajian ini dipandang cukup dengan memberikan pandangan metafisisnya saja. Demikian karena “Indonesia Raya” sebagai sumber pengetahuan, beserta cara-cara mendapatkan serta menguji nilai pengetahuannya, diasumsikan sudah terkandung pada bahasan mengenai sejarah “Indonesia Raya” pada uraian terdahulu.

Secara metafisis, “Indonesia Raya” adalah materi estetis (karya seni) yang berbentuk musik. Dari realitas material itulah dapat dinyatakan bahwa metafisika “Indonesia Raya” menunjuk pada entitas musik sebagai substansinya, yakni sebetuk ide, pikiran, gagasan dan perasaan sang komponisnya (Supratman). Artinya, metafisika “Indonesia Raya” adalah realitas gagasan-abstrak (*idea*), yang pada bahasan aksiologis selanjutnya memperoleh penjelasan lebih terang. Kemudian sebagai musik, “Indonesia Raya” termasuk jenis *musik fungsional*—bukan *musik estetis* dalam arti “seni untuk seni”. Dengan melihat sejarah penciptaannya, diketahui bahwa “Indonesia Raya” punya fungsi sebagai media perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan.

Kembali pada aksiologi yang menyoal tentang nilai, yang dimaksud “nilai” di sini dapat dimaknai dalam empat konteks pengertiannya yaitu: (1) nilai sebagai kualitas/objek empiris; (2) nilai sebagai objek dalam kepentingan subjek; (3) nilai sebagai hasil penilaian (teori pragmatis) dan; (4) nilai sebagai esensi.¹⁹ Jika dikembalikan pada konteks kajian ini, maka yang dimaksud aksiologi lagu kebangsaan “Indonesia Raya” adalah tinjauan kefilosafatan terhadap nilai-nilai yang diasumsikan ada di dalamnya, baik dari sisi/konteks kualitas empiris, kepentingan subjek, tujuan dan kegunaan (pragmatis), serta esensinya. Oleh karena, keempat gugusan makna/konteks nilai lagu kebangsaan “Indonesia Raya” tersebut akan coba dibicarakan dalam kajian ini. Pada bahasan gugusan nilai pertama (kualitas) akan terkait dengan nilai etis dan estetis. Hal tersebut

juga terkait dengan nilai gugusan keempat (esensi lagu “Indonesia Raya”) yang sudah dirumuskan di atas. Dan uraian makna etis serta estetis “Indonesia Raya” akan lebih menjabarkan esensi musikalnya secara normatif. Kemudian bahasan gugusan nilai kedua (kepentingan subjek) dan gugusan nilai ketiga (pragmatis) akan dibahas secara reflektif dalam konteks persoalan praksis pendidikan kita.

3.1 Konteks Kualitas Empiris

Yang dimaksud kualitas empiris di sini adalah kualitas yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman (empiris).²⁰ Kualitas adalah sesuatu yang menggambarkan/melukiskan objek. Maka kualitas ini pun berarti suatu yang dinyatakan dalam bentuk kata sifat. Lantas, apa penjelasan dari kualitas (sifat) lagu “Indonesia Raya” ini? Untuk memunculkannya, maka cara yang paling jitu adalah dengan menggali data historisnya, yang tentu saja empiris. Dan berdasarkan uraian historis “Indonesia Raya” sebagaimana telah dibahas sebelumnya, serta analisis-interpretatif tekstualnya yang akan dipertajam uraiannya kemudian, maka kualitas empiris “Indonesia Raya” yang dapat dimunculkan secara aksiologis adalah *nilai etis* dan *nilai estetis*. Nilai etis lagu “Indonesia Raya” adalah kualitas tentang apa “yang baik” dan apa “yang tidak baik”, dalam keseluruhan makna lagunya. Sedangkan nilai estetisnya adalah kualitas lagu “Indonesia Raya” yang menghadirkan suatu konsep keindahan dan seni di dalamnya. Dan berikut ini akan dibicarakan kedua nilai tersebut satu-persatu.

3.2 Nilai Etis

Makna etis di dalam lagu “Indonesia Raya” mau tidak mau harus dirumuskan melalui analisis dan interpretasi materialnya, baik materi tekstual (lirik/syair; sastra) maupun materi bunyi (nada, melodi, irama, harmoni; musik). Tapi dalam analisis makna etis ini hanya merujuk pada materi tekstualnya (lirik) saja, karena materi musik dinilai lebih abstrak dan kompleks sehingga sulit untuk direfleksikan nilai etisnya. Maka, materi musikalnya akan lebih relevan untuk dibahas secara estetis pada uraian selanjutnya.

Berdasarkan bentuk tekstualnya, diketahui bahwa lirik “Indonesia Raya” memiliki dua pola lirik, yaitu *pola kuplet* dan *pola refrain*. Pola kuplet ini memiliki tiga bagiannya yaitu: *kuplet I (pertama)*; *kuplet II (kedua)*; *kuplet III (tiga)* dan; *refrain/ulangan*, sedangkan pola refrain hanya memiliki satu bagian. Dari keseluruhan bagian itu (pola kuplet dan pola refrain), makna etis yang ditemukan

adalah tentang kesadaran moral kebangsaan untuk mewujudkan dan merayakan keindonesiaan. Dan kesadaran moral tersebut dinyatakan secara eksistensial-antroposentistik—penggunaan subjek “aku” atau “ku” yang lebih banyak muncul daripada subjek “kita”. Artinya, pusat kesadaran etisnya adalah manusia.

Pada pola kuplet (I, II, III), masing-masingnya masih bisa diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu *bait satu*, *bait dua* dan *bait tiga*. Jadi tiap kuplet memiliki tiga bait. Dari ketiga bagian bait itu, keseluruhannya (sembilan bait dalam tiga kuplet) memiliki pola makna etis yang sama. Sebelum dideskripsikan, perlu ditampilkan pola bait satu itu dalam tabel sederhana berikut:

Tabel 2. Bait Satu dalam Pola Kuplet I, II dan III “Indonesia Raya”

<i>Bait Satu KUPLET I</i>	<i>Bait Satu KUPLET II</i>	<i>Bait Satu KUPLET III</i>
Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku.	Indonesia tanah yang mulia, Tanah kita yang kaya, Di sanalah aku berdiri, Untuk selama-lamanya.	Indonesia tanah yang suci, Tanah kita yang sakti, Di sanalah aku berdiri, Menjaga ibu sejati.

Bait satu (kuplet I, II dan III) mengandung makna etis tentang penyadaran eksistensial keindonesiaan dan kebangsaan. Kesadaran eksistensial ini adalah kesadaran tentang manusia Indonesia sebagai subjek sebuah bangsa yang ditemukan pada kosmos “tanah-air: Konsep “tanah” dan “air” adalah dua elemen kosmologis dasar yang tak bisa diingkari oleh subjek manusia Indonesia. Tanah-air sebagai kosmos dasar bangsa Indonesia ini diberi kualitas nilai kuat untuk membangun kesadaran eksistensialnya, yakni seperti pada diksi “ibu”, “tumpah darah”, “kaya” “suci” dan “sakti”. Semua diksi tersebut adalah perlu dilihat sebagai kata (benda dan sifat) dengan kualitas penting dan penuh makna. Sebagaimana “ibu” yang bermakna asal-usul, pengayom, kasih sayang; “tumpah darah” yang bermakna tempat kehidupan, “suci” yang bermakna sakral atau penuh kebenaran/kebaikan; serta “sakti” yang bermakna penuh kekuatan. Makna tanah-air sebagai kosmos kebangsaan tersebut pun dikukuhkan dengan menghadirkan frasa eksistensial pentingnya yaitu “di sanalah aku berdiri”. Jadi makna etis dalam pola bait satu ini memang cukup kuat menghadirkan nilai penyadaran eksistensial manusia Indonesia akan sebuah bangsa. Dan inilah yang kemudian dapat disebut “Indonesia Raya” punya makna nasionalisme.

Tabel 3. Bait Dua dalam Pola Kuplet I, II dan III "Indonesia Raya"

<i>Bait Dua (KUPLET I)</i>	<i>Bait Dua KUPLET II</i>	<i>Bait Dua KUPLET III</i>
Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.	Indonesia tanah pusaka, Pusaka kita semuanya, Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia.	Indonesia, tanah berseri, Tanah yang aku sayangi, Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.

Bait dua pada ketiga kuplet, berisi tentang deskripsi penjelaras lebih lanjut tentang kesadaran eksistensial keindonesiaan-kebangsaan. Yakni kosmos "tanah-air" sebagai "pusaka" dan realitas bangsa Indonesia yang "berseri". Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia adalah realitas kosmos yang kaya akan sumber daya (alam maupun manusia). Kekayaan laut, darat dan udara dengan segala kebudayaannya dimetaforakan sebagai tampilan "berseri". Artinya, suatu wajah kebudayaan yang membahagiakan. Pada bait dua kuplet II ada diksi kunci yang menjelaskan nilai penting atas kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia ini, yakni pada diksi "tanah pusaka". Dan kehadiran realitas kebudayaan bangsa Indonesia yang bernilai inilah yang harus melahirkan suatu kesadaran patriotik. Kesadaran untuk menjaga, mempertahankan dan membela Indonesia sebagai tanah-air kebudayaannya. Dalam kesadaran patriotik ini, nampak diperlengkap dengan kesadaran kolektivitas¹ dan religiositas,² bahwa usaha-usaha patriotik itu tak mungkin dilakukan tanpa sebuah adanya penyatuan kekuatan segenap elemen bangsa dan sebuah kekuatan spiritual. Ini dapat dilihat pada munculnya frasa "Marilah kita berseru, Indonesia *bersatu*" (kuplet I), dan "Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia" (kuplet II). Jadi makna etis pada bait dua adalah mengenai nilai patriotisme yang dilahirkan atas kesadaran kebudayaan, dengan dukungan nilai persatuan dan religiositas.

Tabel 4. Bait Tiga dalam Pola Kuplet I, II dan III "Indonesia Raya"

<i>Bait Tiga (KUPLET I)</i>	<i>Bait Tiga KUPLET II</i>	<i>Bait Tiga KUPLET III</i>
Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, Bangsaku, rakyatku, semuanya, Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya.	Suburlah tanahnya, Suburlah jiwanya, Bangsanya, rakyatnya, semuanya, Sadariah hatinya, Sadariah budinya, Untuk Indonesia Raya.	Selamatlah rakyatnya, Selamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya, Majulah negerinya, Majulah pandunya, Untuk Indonesia Raya.

Mengenai kandungan makna etis nasionalisme-patriotik selanjutnya, bait tiga (kuplet I, II dan III), adalah cita-cita ideal atau harapan kemajuan bangsa Indonesia¹ sebagai bangsa yang "Raya" (akbar, megah, mulia).² Artinya, Indonesia yang punya kebesaran, kemegahan dan kemuliaan adalah Indonesia yang ideal. Kerayaan (idealitas) ini dimunculkan tiga kali pada ketiga kuplet pada bait enam di masing-masing baitnya, yakni frasa "Untuk Indonesia Raya". Idealitas bangsa Indonesia itu dimaknai harus digapai dengan beberapa prakondisinya. Yakni prakondisi bangsa yang hidupnya berkualitas (lihat pada bait satu). Kehidupan bangsa yang berkualitas adalah tanah negeri yang berkualitas, baik kualitas alam (kesuburan, kuplet II: "Suburlah tanahnya dst.) dan kualitas manusianya.

Di sini, nampak bahwa kualitas manusia lebih dipersyaratkan atau memiliki keutamaan (antroposentris) dibanding kualitas alamnya. Dan makan kualitas manusia di sini adalah manusia yang sudah "terbangun" jiwa-raganya atau mental dan fisiknya ("bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya"), "tersadar" hati-budinya atau instuisi dan rasionya ("Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya"). Kualitas manusia Indonesia semacam itulah yang diasumsikan mampu untuk mewujudkan Indonesia Raya. Manusia yang mampu menghidupi, memajukan dan menyuburkan tanah negerinya (nasionalisme), menyelamatkan segala kekayaan alamnya (patriotik).

Terakhir, yakni makna etis pada pola refrain ("Indonesia Raya/ Merdeka, merdeka/ Tanahku, negeriku yang kucinta!/ Indonesia Raya/ Merdeka, merdeka/ Hiduplah Indonesia Raya"). Di sini menegaskan atau meneguhkan kembali nilai idealitas bangsa Indonesia (Indonesia Raya) melalui pengakuan nasionalisme akan rasa cinta tanah negeri ("Tanahku, negeriku yang kucinta!"). Selain itu, makna etis cukup pentingnya adalah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai nilai pembebasan manusia-manusia Indonesia dari belenggu penjajahan. Secara historis, makna etis inilah yang paling kuat dan mewakili keseluruhan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Dan secara kontekstual, pembebasan manusia Indonesia dari berbagai belenggunya akan terus aktual. Misal pembebasan dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.

Akhirnya, analisis teks-lirik lagu "Indonesia Raya" ini telah menunjukkan makna etisnya, yakni kandungan akan nilai: (1) penyadaran eksistensial manusia Indonesia atas kebangsaan dan keindonesiaannya; (2) patriotisme yang didukung oleh kesadaran kebudayaan dan nilai persatuan serta religioitas; (3)

idealitas bangsa Indonesia dengan prasyarat negeri (manusia dan alamnya) yang berkualitas; dan (4) pembebasan manusia dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.

3.3 Nilai Estetis

Nilai atau makna estetis lagu "Indonesia Raya" ini lebih banyak digali pada materi musikalnya (estetika musik). Hal ini lebih dikarenakan oleh keterbatasan penulis mengenai potensi estetika sastranya. Mengenai nilai estetis ini, beberapa konsep keindahan (teoritik) yang dipakai adalah dalam teori objektif Plato, teori perimbangan Pythagoras, dan teori ekspresivisme Leo Tolstoy. Pada Plato terkait dengan nilai ketertiban (dalam pengaturan antar bagiannya) dan ukuran/besaran yang pasti (jelas).³ Pada Pythagoras terkait dengan nilai proporsi (perimbangan) antarbagian.⁴ Pada Tolstoy terkait dengan nilai komunikatif, ekspresif dan etis.⁵

Secara musikal, lagu "Indonesia Raya" mengandung makna estetis dalam konsep "ketertiban" dan "besaran" (Plato) serta "perimbangan" (Pythagoras). Hal itu nampak pada estetika lagu "Indonesia Raya" khususnya versi resmi-sekarang. Diketahui bahwa lagu versi ini memiliki atau dinyanyikan dalam *scale* (tanganada) "satu krus" (tanganada G Mayor). Sedangkan sistem biramanya adalah 4/4 (empat per empat) dengan cara membawakan secara *marcia* (*quadrupel*) atau aksentuasi kuat dan tegas (*mars*). Dari sisi ambituas atau rentang melodi lagunya, secara teoritik penggunaan tanganada G bernilai tepat dan "pas", karena *sesuai* dengan ambitus atau jangkauan suara vokal manusia secara umum maupun sesuai dengan instrumen musik yang mengiringinya. Kesesuaian yang dimaksud dalam makna musikalnya disebut harmonis. Homonisasi adalah keselarasan (ketertiban) unsur musik yang disusun secara baik (antarbagian bentuk melodi/nada) sehingga menghasilkan kualitas suara atau bunyi yang bernilai selaras-indah (harmonis-estetis). Dan dari sisi fungsi pragmatisnya, penggunaan irama mars sangat tepat karena mendukung fungsi dan implementasi lagu ini. Yakni irama mars yang mampu membangkitkan perasaan terdugah dan rasa semangat akan nasionalisme dan patriotisme. Dari uraian tersebut menjadi jelas bahwa musikalitas lagu "Indonesia Raya" yang bernilai harmonis secara teoritik maupun pragmatis mengandung makna estetis dalam konsep "ketertiban" di dalam pengaturan antarbagian musikalnya. Konsep yang terakhir akan diperkuat dengan analisis bentuk musiknya berikut:

Dari bentuk musiknya (lagu), "Indonesia Raya" merupakan jenis musik homofoni dengan bentuk "tiga bagian". Struktur tiga bagian ini memiliki bentuk makro (A, B, C) dalam 40 biramanya—makro A (a-b-c-d), makro B (e, e'), makro C (f, f').⁶ Pada kuantitas biramanya, ketiga struktur makro tersebut memiliki bentuk mikronya sebagai berikut. Struktur makro A (birama 1—17) berisi empat bentuk mikro yaitu: a (birama 1—5); b (birama 5—9); c (birama 9—13); d (birama 13—17). Pada struktur makro B (birama 17—25) memiliki dua bentuk mikro yaitu: e (birama 17—21) dan e' (birama 21—25). Pada struktur makro C (birama 25—40) juga berisi dua bentuk mikro: f (birama 25—29 dan birama 33—37); f' (birama 29—33 dan birama 37—40). Dari bentuk lagu tersebut, nampak bahwa ada suatu pola perimbangan yang simetris (*simmetria-harmonia*) pada strukturnya. Yakni pola "4-2-2". Bilangan "4-2-2" yang juga berarti punya proporsi "2:1" (dua banding satu) tersebut menunjuk pada bagian mikro di setiap struktur makronya. Makro A punya 4 bagian mikro, makro B punya 2 bagian mikro, makro C punya 2 bagian mikro. Inilah yang dimaksud pengaturan antarbagian (perimbangan) musikal yang bernilai estetis.

Mengenai tiga nilai prasyarat yang menjadi dasar estetika ekspresivisme (komunikatif, ekspresif dan etis) lagu "Indonesia Raya", berikut penjelasannya: Nilai komunikatif sebagai estetika di sini maksudnya, sebuah karya/objek akan bernilai seni bukan sekadar kandungan keindahannya, akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas komunikatifnya. Dengan melihat realitas empiris "Indonesia Raya", diketahui bahwa makna atau pesan (*massage*) lagu ini cukup jelas. Beberapa makna yang tersurat dan tersirat sebagaimana pada bahasa nilai etis sebelumnya, menunjukkan bahwa "Indonesia Raya" punya nilai komunikasi yang baik. Dan melalui media sastra (lirik) dan musiknya, pesan-pesan lagu "Indonesia Raya" pun semakin tersampaikan. Hal ini juga sekaligus mengandung arti bahwa, pesan lagu sebagai ekspresi gagasan-rasa kebangsaan dan patriotisme sang seniman (Supratman) dapat ditangkap dan dipahami oleh penikmatnya. Jadi, dengan adanya kualitas komunikatif serta ekspresif pada "Indonesia Raya" maka berdasarkan estetika Tolstoy dapat dikatakan lagu ini punya nilai seni yang ideal. Terakhir, satu nilai prasyarat yang melengkapi teori estetika Tolstoy adalah kualitas etis. Dan ini bisa dirujuk pada bahasan makna etis pada lirik 'Indonesia Raya' sebelumnya.

IV. REFLEKSI: TUJUAN BERNEGARA DAN PRAGMATISME PENDIDIKAN

Sebenarnya apa tujuan kita bernegara? Pertanyaan dasar ini perlu dikemukakan untuk merefleksikan kandungan aksiologis lagu “Indonesia Raya” secara aktual dan kontekstual, utamanya dalam konteks pendidikan. Mengenai tujuan bernegara, empat nilai idealitas yang tersurat dalam teks Pembukaan UUD 1945 alenia keempat adalah rujukan yang tak terbantahkan, baik secara historis maupun yuridis. Bahawa tujuan kita bernegara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa serta; (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari keempat tujuan bernegara kita tersebut, dapat diabstraksikan bahwa cita-cita ideal bangsa Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia yang berdaulat, sejahtera, berpendidikan serta berkualitas kosmopolit. Dan keempat idealitas bernegara tersebut, jelas telah termanifestasikan secara etis-estetis dalam lagu kebangsaan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah realitas kebangsaan kita hari ini? Apakah keempat idealitas tersebut sudah menjadi realitas konkret atau masih berada dalam realitas abstrak.

Pertanyaan terakhir di atas tentu saja bisa kita jawab dengan mengamati data-data empiris kita hari ini, baik pada realitas sosial, ekonomi, politik, budaya maupun pendidikan. Di situ bisa kita buat simpulan secara awal dan umum, bahwa realitas konkret kehidupan bangsa kita masih jauh dari nilai ideal. Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, problem korupsi di berbagai sektor masyarakat, apatisme publik terhadap partai politik maupun lembaga penegak hukum, rendahnya budaya literasi dan pemerataan pendidikan yang timpang, semua itu adalah realitas aktual kita hari ini. Solusi paling rasional dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa tersebut adalah pembangunan manusianya. Dan tentunya, dimensi konsep dan praksis pendidikan kita adalah “kompiler masak kebudayaan” kita untuk “menghidangkan” manusia-manusia yang berkualitas.

Pernyataan etis mengenai pentingnya pembangunan kualitas manusia Indonesia diketahui telah dinyatakan dalam teks “Indonesia Raya” yang bersifat antroposentistik. Makna etisnya adalah, bahwa segala persoalan kehidupan bangsa pada akhirnya adalah persoalan kualitas manusianya. Lantas, apa konsep

dan praksis pendidikan kita dalam rangka membangun kualitas manusia Indonesia yang kuat? Di mana relevansi aksiologi lagu “Indonesia Raya” dengan penguatan kualitas manusia Indonesia? Berdasarkan refleksi kritis tersebut, tulisan ini pun akan mencoba membicarakan nilai relevansial yang dimaksud. Khususnya dalam praksis pendidikan kita di lingkungan sekolah.

Secara aksiologis, pendidikan nasional menjadi nilai pragmatis (tujuan dan manfaat) penting dari gagasan kita bernegara. Oleh karenanya, nilai pendidikan menjadi materi yuridis sebagaimana tertuang dalam teks Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945. Di situ, proses dan praktik pendidikan dimaknai sebagai kewajiban negara sekaligus menjadi hak bagi segenap warganya. Pada lingkungan pendidikan formal di sekolah, nampak bahwa pada lingkungan inilah nilai strategis dan fundamental berada dalam hal melaksanakan tujuan bernegara, mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas. Tentunya dengan tidak menafikan lingkungan non formalnya, pendidikan keluarga dan masyarakat. Maka penguatan nilai kebangsaan dan moralitas (karakter) di lingkungan sekolah menjadi penting untuk lebih diperhatikan. Dan program Mendikbud terdahulu tentang gerakan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) di lingkungan sekolah dipandang cukup strategis. Beberapa konsep yang bernilai strategis itu nampak dihadirkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah.

Sehubungan dengan nilai strategis gerakan PBP tersebut, kiranya cukup beralasan jika gerakan tersebut terus dilakukan dan dikembangkan. Maka pemenuhan perangkat dan pendukung kegiatannya pun menjadi prasyarat utamanya. Misalnya dengan penyediaan materi yang baik di sekolah mengenai lagu-lagu wajib nasional dan lagu-lagu daerah Nusantara. Juga peningkatan kompetensi estetika (seni) pada pendidik di sekolah. Hal ini penting, mengingat kegiatan tersebut (bernyanyi) memerlukan dukungan keterampilan musikal pada guru-guru. Dan mengenai lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, segala potensi nilai aksiologis-edukatif yang terkandung di dalamnya pun perlu disampaikan dan disajikan guru di kelas secara kreatif.

V. SIMPULAN

Nilai nasionalisme-patriotik pada lagu "Indonesia Raya" sebagaimana dibahas sebelumnya adalah pada materi lirik/syair lagunya. Namun demikian, nilai yang cukup penting lainnya dari lagu tersebut berada pada materi musikalnya. Kemampun (dan pilihan) sang komponis, W.R. Supratman dalam mengubah kompoisisnya dengan menggunakan konsep musik diatonis, sebenarnya mengandung nilai nasionalime yang jelas. Kondisi perjuangan para pemuda nasionalis pada saat itu diketahui masih terbentur pada pandangan-pandangan etnosentristik atau paham kedaerahan. Maka, jika sebuah lagu kebangsaan digubah dengan dilandasi pada konsep musik daerah tertentu akan menimbulkan masalah yang pelik. Pilihan pemuda Supratman untuk menggunakan musik diatonis (Barat) yang lebih "universal" sebagai dasar musikal lagu "Indonesia Raya" adalah pilihan bijak dan objektif.⁷ Kita tidak bisa membayangkan jika misalnya saat itu Supratman menggunakan dasar musikal Gamelan Jawa untuk "Indonesia Raya", betapa problematiknya. Hal itu boleh saja terjadi karena wacana kebudayaan nasional kita kala itu masih diliputi perdebatan sengit antara pihak yang pro Barat dan pro Timur (Polemik Kebudayaan).

Setelah tulisan ini mengembarai semesta aksiologi lagu "Indonesia Raya", beberapa nilai pentingnya yang relevan bagi pendidikan nasional kita sudah terkuak. Pada makna etis, estetis/keindahan serta makna seninya, kesemua kualitas empirisnya itu pun dapat diimplementasikan dalam berbagai praksis pendidikan kita. Salah satunya gerakan Penumbuhan Budi Pekerti di lingkungan sekolah. Dengan menyadari adanya nilai-aksiologis "Lagu Indonesia", setidaknya ini menjadi penanda bahwa nilai-nilai edukasi yang terkandung dalam karya-karya seni bangsa kita tidak kalah bermaknanya dengan karya seni bangsa lain. Hal inilah yang perlu digarisbawahi manakala realitas kebudayaan kekinian kita makin terbawa arus budaya populer yang cenderung dangkal. Nampaknya demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Endarmoko, Eko. 2009. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, The Liang. 1996. *Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: PUBIB.

- Hutabaat, Anthony C. 2001. *Wage Rudolf Soepratman: Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Pencipta Lagu Kebangsaan Republik Indonesia "Indonesia Raya" dan Pahlawan Nasional*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Kasansengari, Oerip. 1967. *Sedjarah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W.R. Soepratman Pentjiptanja*. Surabaya: Grafika Karya.
- Lestari, Puspita Dwi & Suparwoto. 2014. "Lagu-lagu Karya W.R. Soepratman dalam Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan Tahun 1926-1938". *Jurnal Avatara* Vol. 2, NO. 3, Oktober 2014.
- Mintargo, Wisnu. 2008. *Musik Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- _____, R.M. Soedarsono, Victor Ganap. 2012. "Kontinuitas Perubahan Bentuk serta Makna Lagu Kebangsaan Indonesia Raya". *Jurnal Ekspresi Seni* Vol. 14, No. 1, Juni 2012.
- Nugroho HP., F. X. 2015. "Analisis Struktur Lirik Lagu 'Indonesia Raya' Ciptaan W. R. Supratman". *Jurnal Harmonia* Vol. 6, No. 3, Desember 2005.
- Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 1972. "Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya". Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Pasaribu, Amir. 1986. *Analisis Musik Indonesia*. Jakarta: PT. Pantja Simpati.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salinan.
- Redaksi Great Publisher. 2009. *Buku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher.
- Sudibyo, Agus. 2001. "Pers Tionghoa, Sensibilitas Budaya, dan Pamali Politik", *Harian Kompas* 1 Juni 2001.
- Sunarto. 2016. *Konsep Seni dalam Estetika Ekspresionisme*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sutrisno & Safwan, Mardanas. 1979. *W.R. Soepratman*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Tambajong, Yapi. 1992a. *Ensiklopedi Musik (Jilid 1)*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- _____. 1992b. *Ensiklopedi Musik (Jilid 2)*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- _____. 2012. *123 Ayat Tentang Seni*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Yunita, Ayu Tresna. 2012. "Nasionalisme di Eropa dan Pengaruhnya pada Lagu Seriosa di Indonesia". *Jurnal Resital* Vol. 13, No. 2, Desember 2012.

Internet

- Haryanto, Alexander (Reporter). 2016. "Air Mata dan Dugaan Plagiat Lagu Indonesia Raya". <https://tirto.id/20160818-41/air-mata-dan-dugaan-plagiat-lagu-indonesia-roya-301101>, diakses 16 September 2016.
- Isnaeni, Hendri F. 2015. "Berdiri Menyanyikan Indonesia Raya". <http://historia.id/modern/berdiri-menyanyikan-indonesia-roya>, diakses 17 September 2016.
- Wardayati, K. Tatik. 2013. "Lorong Masa: Sejarah Lagu Indonesia Raya". <http://www.intisari-online.com/read/lorong-masa-sejarah-lagu-indonesia-roya>, diakses 17 September 2016.
- Sularto, ST. 1995. "WR Supratman dan Indonesia Raya". *Harian Kompas* 17 Agustus 2015. <http://print.kompas.com/baca/politik/2015/08/17/WR-Supratman-dan-Indonesia-Roya>, diakses 16 September 2016.
- Kompas.com. 2016.
<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/14/11110081/Koran.Sin.Po.Istilah.Indonesia.dan.Publikasi.Pertama.Indonesia.Roya.?page=all>, diakses 18 September 2016.
- Rijkers, Monique. 2015. "Di Manakah Piringan Hitam 'Indonesia Raja' yang Direkam di Australia?" http://www.kompasiana.com/moniquerijkers/di-manakah-piringan-hitam-indonesia-roya-yang-direkam-di-australia_5630699316937333056e89fc, diakses 22 September 2016.

(Footnotes)

- ¹ Lihat Safwan (1979), hlm. 47; Kasansengari (1967), hlm. 34; Pasaribu (1986). Hlm. 49; Tambayong (1992a), hlm. 239; Hutabarat (2001), hlm. 18; Mintargo (2008), hlm. 27. Dalam catatan Redaksi Great Publisher (2009: hlm. 19), dituliskan bahwa lagu "Indonesia Raya" diciptakan Supratman pada tahun 1924.
- ² Lihat artikel jurnalistik Haryanto (2016), "Air Mata dan Dugaan Plagiat Lagu Indonesia Raya", daring <https://tirto.id>.
- ³ Sularto (*Harian Kompas*, 1995).
- ⁴ Isnaeni, Hendri F., "Berdiri Menyanyikan Lagu Indonesia Raya", daring <http://historia.id>.
- ⁵ Wardayati, "Lorong Masa: Sejarah Lagu Indonesia Raya", daring: <http://www.intisari-online.com>.
- ⁶ Lihat Tambajong (1992a), hlm. 239; Tambayong (2012), hlm. 99.
- ⁷ *Sin Po* adalah surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang terbit di Hindia Belanda sejak tahun 1910 hingga 1965 dan pertama kali terbit di Jakarta sebagai mingguan (Sudibyo, 2001).
- ⁸ Artikel "Koran 'Sin Po', Istilah 'Indonesia', dan Publikasi Pertama 'Indonesia Raya' (kompas.com,

2016).

⁹ Lihat teks-notasi lagu “Indonesia Raya” versi Surat Kabar *Sin Po* (1928) pada halaman selanjutnya.

¹⁰ Tambajong (1992a), hlm. 239.

¹¹ Rijkers (2005).

¹² Hutabarat (2001), hlm. 26.

¹³ Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 1972, hlm. 28–30

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 54–55.

¹⁵ Sularto (1982), hlm. 44–46.

¹⁶ Tambajong (1992b), hlm. 262.

¹⁷ Redaksi Great Publisher (2009), hlm. 20.

¹⁸ Kattsoff: (1992), hlm. 319.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 325–339.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 325.

²¹ Soal kesadaran kolektivitas ini, yang juga bermakna kesadaran akan persatuan bangsa secara lahir dan batin telah disimpulkan oleh Nugroho (2005) melalui analisis struktur lirik (fonologis, morfologis, sintaksis dan semantis).

²² Bandingkan soal nilai religius ini pada analisis Mintargo, R.M. Sudarsono & Victor Ganap (2012), hlm. 2, mengenai fungsi lagu “Indonesia Raya” bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dalam masa 1945–1949.

²³ Bandingkan dengan analisis Lestari (2014), hlm. 142.

²⁴ Lihat *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Endarmoko, 2009), hlm. 513.

²⁵ Gie (1996), hlm. 41–43.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁷ Sunarto (2016), hlm. 66.

²⁸ Analisis bentuk/struktur lagu ini merujuk pada Mintargo (2008), hlm. 41–43 yang menggunakan teori struktur dan gaya musik dari Leon Stein (1979).

²⁹ Mengenai pengaruh musik diatonis-Barat yang terkait nasionalisme Eropa, terhadap nasionalisme musik para komponis Indonesia, lihat dalam tulisan ilmiah Yunita (2012), hlm. 159–165.

MEMBUDAYAKAN KOMPETISI PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI PENGUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Sunarno Basuki

sunarnobasuki@gmail.com

ABSTRAK

Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Proses ini ditempa dalam jangkauan waktu yang lama. Hal ini menjadi aset kekayaan budaya yang beraneka ragam dan tersebar di berbagai daerah Indonesia dalam wujud permainan tradisional. Aset budaya yang demikian diimplementasikan pemerintah melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Secara khusus dalam konteks pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Jasmani guru diharapkan mampu mengajarkan permainan tradisional. Kedua kurikulum tentunya mewajibkan guru pendidikan Jasmani mengajarkan permainan tradisional pada jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas. Dengan demikian, pembiasaan praktik permainan tradisional di persekolahan mampu menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya keberadaan permainan tradisional perlu disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui pembudayaan kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata kunci: persatuan, kesatuan bangsa, permainan tradisional.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan JPOK FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

“Persatuan Indonesia”, demikian bunyi sila ketiga Pancasila. Ini adalah pernyataan yang bisa dimaknai sebagai cita-cita kebangsaan yang berharap, dinamika sosial bangsa Indonesia sampai kapanpun selalu dalam bingkai persatuan bangsa Indonesia. Pemaknaan lainnya dalam sila ini sebagai bentuk kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang sudah sejak lama mampu membina dan menjaga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari banyaknya etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan. Realitas majemuk ini bila dikelola secara benar, kemajemukan akan menghasilkan energi hebat. Sebaliknya, bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas bisa menimbulkan bencana dahsyat.

Sejak negara Republik Indonesia ini didirikan, para *founding father* (pendiri bangsa) mencantumkan kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu diambil dari falsafah Nusantara yang sejak era Majapahit yang dipakai sebagai motto pemersatu wilayah di kawasan Nusantara. Ini berarti kesadaran persatuan dalam kemajemukan sudah dikenal dan menjadi bagian kehidupan sosial bangsa Indonesia sejak lama, jauh sebelum bangsa ini menjadi bangsa modern seperti saat ini.

Manifesto Bhinneka Tunggal Ika merupakan tekad untuk membentuk kohesi sosial dan integrasi sosial, serta menyiratkan landasan mutualisme (kebersamaan, dalam perasaan maupun perilaku) dan kerjasama yang didasarkan atas kepentingan bersama dan perasaan kebersamaan. Makna dari manifesto kultural itu adalah tertanamnya perasaan saling memiliki dan menghargai sesama warga negara Indonesia, meski dengan latar belakang etnik dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Hal ini terjadi karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia dan ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Namun, akhir-akhir ini problem persatuan dan kesatuan bangsa menjadi masalah yang serius. Ada persoalan pemberontakan (*separatis*) di beberapa wilayah di Indonesia, konflik antarkelompok masyarakat, konflik antarpenganut agama, konflik berdasarkan etnis dan sebagainya. Seolah

pemberitaan mengenai masalah konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa tidak pernah berhenti, bahkan semakin sering muncul dalam berbagai variasinya.

Kebhinnekaan dalam masyarakat Indonesia, disatu sisi bisa menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, namun di sisi lain dapat menjadi penguatnya. Satu kekayaan budaya yang beraneka ragam tersebar di berbagai daerah di Indonesia dalam wujud permainan tradisional. Pemerintah melalui Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 mewajibkan guru pendidikan jasmani mengajarkan permainan tradisional di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas.

Permainan tradisional yang diajarkan di sekolah-sekolah memiliki potensi sebagai penguat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya keberadaan permainan tradisional perlu disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui pembudayaan kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

II. SUMBER ANCAMAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", adalah cita-cita integralistik. Menurut Darmodihardjo (1979), persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan; sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ketiga ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi 'Persatuan Indonesia' ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat (Darmodihardjo, 1979).

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa kehidupan sosial itu selalu dinamis, tidak berhenti. Ancaman persatuan dan kesatuan pada masa awal kemerdekaan bisa saja berbeda dengan saat ini. Dulu lebih banyak ancaman itu bersumber dari dimensi politik, dimana banyak daerah ingin memisahkan diri dari Negara Indonesia yang baru merdeka. Kondisi itu juga dipengaruhi oleh kepentingan politik internasional yang sangat besar perannya. Saat ini, ancamannya bisa dominan pada sektor lainnya.

Ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan acuan untuk memahami sumber ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. *Pertama* adalah dimensi ekonomi. Munculnya konflik-konflik vertikal maupun horizontal di beberapa daerah tidak terlepas dari adanya metamorfosis faktor ekonomi yang rapuh kemudian bemuara pada masalah keamanan (Sudrajat, 2003). Pada akhirnya juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Problem ekonomi di tanah air semakin kompleks dalam dinamika pembangunan nasional. Meskipun kini Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang ekonomi, namun juga menghadapi berbagai gangguan ekonomi baik ditinjau secara makro maupun mikro. Secara makro, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata mengalami kendala mendasar. Kondisi ini dapat terlihat bahwa ada kecenderungan beberapa daerah yang masih memiliki potensi sumber daya menghendaki untuk memekarkan diri sebagai sebuah provinsi yang otonom, bahkan beberapa daerah berupaya untuk memisahkan diri. Pertimbangan beberapa daerah tersebut umumnya mempunyai alasan misalnya, distribusi *welfare state* yang tidak adil memicu kesenjangan ekonomi antar daerah. Secara mikro, terjadi kesenjangan yang begitu lebar, antara penduduk yang berpenghasilan tinggi dan rendah, khususnya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka yang bisa menikmati kebutuhan sekunder, bahkan tersier lebih sedikit daripada mereka yang belum maksimal menikmati kebutuhan dasarnya. Disparitas ekonomi, baik makro dan mikro ini berujung pada ketidakadilan dan akhirnya akan menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dimensi *kedua* adalah dimensi sosial. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderat dan akomodatif, hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat terbuka untuk saling menghargai suku, agama, maupun golongan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia meskipun bersifat pluralistik akan tetap mempunyai potensi dalam melaksanakan pola-pola hubungan sosial antar kelompok. Terganggunya pola hubungan sosial masyarakat sebenarnya tidak terlepas dengan adanya euforia demokrasi yang berlebihan yang kemudian justru merusak semangat reformasi. Adanya tindakan yang amat impulsif dan dangkal oleh masyarakat tersebut

mempunyai implikasi terhadap kebebasan yang tidak terkontrol sehingga mengancam kondusifitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berikutnya, *ketiga* adalah dimensi politik. Memasuki era reformasi, permasalahan banyak timbul karena dipicu oleh adanya pertarungan “perebutan kekuasaan”. Menjamurnya partai-partai mengindikasikan semakin rentannya pertikaian antar kelompok masyarakat. Mengemukanya demokrasi selama reformasi digulirkan sesungguhnya banyak menyita perhatian bagi kelompok-kelompok tertentu (partai politik, LSM, mahasiswa) untuk memanfaatkan momentum tersebut sehingga tidak jarang dari mereka dalam aksi politiknya mengarah pada masalah tindakan anarkisme, radikalisme yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dimensi terakhir, *keempat* adalah dimensi keamanan. Isu keamanan yang timbul di dalam negara yang paling menonjol adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme, konflik komunal berciri etho-religius, kelompok radikal, kerusuhan sosial, dan perkelahian pelajar. Dalam konteks isu separatisme, yang kini menjadi fokus perhatian adalah Gerakan Separatis Bersenjata Aceh (GSBA) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terorisme lainnya yang juga menjadi ancaman serius adalah berlatar agama. Kasus-kasus pembakaran tempat ibadah kemudian menimbulkan konflik antar pemeluk agama adalah contoh mutakhir, semakin rentannya keamanan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

III. PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI KEKAYAAN BUDAYA

Permainan tradisional merupakan salah satu wujud kebudayaan berupa aktivitas masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah dilakukan oleh suatu masyarakat itu untuk satu tempo tertentu. Ada berbagai macam permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang tidak hanya terdapat di kalangan anak-anak, tetapi juga permainan untuk orang dewasa (Nisalia Duwata, 2013).

Indonesia dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, sejak dahulu adalah bangsa yang memiliki kemajemukan budaya. Kebudayaan Indonesia meliputi berbagai macam hal, termasuk permainan tradisional. Dengan kebhinnekaan ini, bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang beragam tak hanya

berwajah tunggal dan menampilkan budaya dari satu wilayah saja. Menurut Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah,”.

Permainan-permainan tradisional yang dimiliki Indonesia berbeda-beda, dari daerah satu dengan lainnya. Permainan tradisional yang beberapa tahun terakhir jarang kita temui ialah dampak akan kemajuan zaman yang semakin hari semakin modern dan permainan tradisional ini mungkin kalah ‘pamor’ dengan permainan anak-anak zaman kini, akibatnya permainan-permainan ini kini hampir punah bahkan sangat sulit kita temui.

Permainan tradisional, dalam penjelasan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 10 adalah bagian dari *folklore*. Berikut bunyi pasal 10 (2): “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Penjelasan pasal 10 adalah bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial lain dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a) cerita rakyat, puisi rakyat
- b) lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional
- c) tari-tarian rakyat, permainan tradisional; hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Sebagai kekayaan budaya, negara memberi perlindungan terhadap permainan tradisional, yakni dari sisi hak ciptanya. Ini berarti, permainan tradisional adalah kekayaan bangsa yang memiliki nilai demikian penting. Folklor dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan besar yaitu folklor lisan, folklor sebagian lisan dan folklor bukan lisan, folklor bukan lisan terdiri atas folklor bukan lisan yang materil dan folklor bukan lisan yang bukan materil. Satu ciptaan

tradisional yang termasuk dalam folklor adalah permainan tradisional. Permainan tradisional termasuk kedalam folklor bukan lisan yang materiil terdiri atas bentuk arsitektur rakyat, seni kriya rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh tradisional, alat musik tradisional, alat permainan rakyat, masakan dan minuman tradisional, obat-obat tradisional (Afrillyanna Purba, 2012: 121).

Banyak permainan tradisional yang terdapat di Indonesia, antara lain: Congklak, Gatrik, Bekel, Gobak Sodor, Permainan Benteng, Perepet Jengkol, Permainan Lompat Tali (Lompat Karet), Panjat Pinang, Balogo, Batewah, Bahagaan dan lain-lain. Semua permainan ini adalah suatu ciptaan tradisional yang merupakan warisan turun temurun dan dimainkan secara bersama-sama. Permainan tradisional tersebut merupakan contoh dari ribuan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Namun permainan-permainan tradisional tersebut kini mulai terkikis keberadaannya sedikit demi sedikit khususnya di kota-kota besar di Indonesia dan mungkin untuk anak-anak sekarang ini banyak yang tidak mengenal permainan tradisional yang ada, padahal permainan tradisional tersebut adalah warisan dari nenek moyang rakyat Indonesia.

IV. PERAN PENTING PERMAINAN TRADISIONAL

Indonesia memiliki kemajemukan etnis dan budaya yang demikian kaya. Banyak ekspresi kebudayaan yang muncul, termasuk permainan yang berkembang. Banyak permainan tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu, berbeda dari daerah lainnya. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Permainan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia bisa menjadi sarana menghibur, rekreasi, tetapi juga dapat menjadi media penting dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebudayaan memiliki wujud yang meliputi banyak hal dapat berupa suatu pandangan, aktivitas dan benda, termasuk salah satunya berupa tradisi sebagai bagian dari budaya yang hidup dalam masyarakat, yakni permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan satu wujud kebudayaan berupa aktivitas masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah dilakukan oleh suatu masyarakat itu untuk satu tempo tertentu. Ada berbagai macam permainan tradisional yang ada di Indonesia, yang tidak hanya terdapat di kalangan anak-anak, tetapi juga permainan untuk orang dewasa.

Permainan tradisional anak-anak adalah satu genre atau bentuk folklore yang berupa permainan anak-anak, yang beredar secara lisan diantara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun temurun serta banyak mempunyai variasi. Oleh karena termasuk folklor, maka sifat atau ciri dari permainan tradisional anak sudah tua usianya, tidak diketahui asal-usulnya, siapa penciptanya dan dari mana asalnya. Biasanya disebarakan dari mulut ke mulut dan kadang-kadang mengalami perubahan nama atau bentuk meskipun dasarnya sama. Jika dilihat dari akar katanya, permainan tradisional tidak lain adalah kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan yang merupakan pewarisan dari generasi terdahulu yang dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan mendapat kegembiraan bagi yang memainkannya.

Permainan tradisional ini bisa dikategorikan dalam tiga golongan, yaitu (Ifa, 2006):

- 1) permainan untuk bermain (rekreatif). Permainan tradisional yang bersifat rekreatif pada umumnya dilakukan untuk mengisi waktu senggang.
- 2) permainan untuk bertanding (kompetitif). Permainan tradisional yang bersifat kompetitif, memiliki ciri-ciri: terorganisir, bersifat kompetitif, dimainkan oleh paling sedikit 2 orang, mempunyai kriteria yang menentukan siapa yang menang dan yang kalah, serta mempunyai peraturan yang diterima bersama oleh pesertanya.
- 3) permainan yang bersifat mendidik (edukatif). Sedangkan permainan tradisional yang bersifat edukatif, terdapat unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Melalui permainan seperti ini anak-anak diperkenalkan dengan berbagai macam keterampilan dan kecakapan yang nantinya akan mereka perlukan dalam menghadapi kehidupan sebagai anggota masyarakat.

Permainan Tradisional yang ada di berbagai belahan Nusantara ini dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, seperti (Ifa, 2006):

- a) Aspek motorik melatih daya tahan, daya lentur, sensorimotorik, motorik kasar, motorik halus.
- b) Aspek kognitif mengembangkan maginasi, kreativitas, *problem solving*, strategi, antisipatif, pemahaman kontekstual.
- c) Aspek emosi katarsis emosional, mengasah empati, pengendalian diri.

- d) Aspek bahasa pemahaman konsep-konsep nilai.
- e) Aspek sosial menjalin relasi, kerjasama, melatih kematangan sosial dengan teman sebaya dan meletakkan pondasi untuk melatih keterampilan sosialisasi berlatih peran dengan orang yang lebih dewasa/masyarakat.
- f) Aspek spiritual menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang bersifat agung (*transcendental*).
- g) Aspek ekologis memahami pemanfaatan elemen-elemen alam sekitar secara bijaksana.
- h) Aspek nilai-nilai/moral menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya.

Memperhatikan banyaknya potensi nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, maka sebenarnya permainan tradisional dapat dijadikan media banyak hal, misalnya media pembelajaran, membangun solidaritas sosial, perlombaan dan sebagainya. Bila dicermati, dalam setiap jenis permainan tradisional terkandung pesan moral dan nilai-nilai luhur yang diajarkan melalui permainan tradisional itu, termasuk diantaranya nilai persatuan.

Namun, pentingnya mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap permainan tradisional, kini tidak lagi senantiasa dapat dipahami dan disadari masyarakat secara luas, bahkan perkembangannya tidak sejalan dengan modernisasi dan kemajuan teknologi. Sila Persatuan Indonesia mengandung makna pergaulan dalam persatuan demi persatuan dalam kebhinekaan. Sila ini merupakan inti nasionalisme Indonesia yang tidak bisa diabaikan sepanjang zaman. Kebersamaan dalam bermasyarakat dan bernegara menjadi hal penting untuk kemajuan bangsa harus dibangun secara terus menerus. Menghadapi era global saat ini dengan kesadaran pentingnya modal kebangsaan adalah sangat penting bila peningkatan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila termasuk di dalamnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia perlu dilakukan secara terus menerus oleh segenap bangsa Indonesia.

Setiap permainan tradisional yang ada di berbagai belahan Nusantara ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai landasan filosofis berupa "*world-view*", sebagai pandangan hidup yang menjadi acuan berperilaku suku bangsa tersebut. Secara garis besar, *world view* dari berbagai suku bangsa di Indonesia mencakup gotong royong, tenggang rasa, kesetiakawanan dan

senasib sepenanggungan, cinta persaudaraan dan perdamaian. Nilai-nilai inilah yang selanjutnya berkembang menjadi acuan moral atau akhlak yang mengandung makna tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Pada hakikatnya moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh sesuatu komunitas.

Dalam permainan tradisional, penanaman nilai-nilai moral tidak hanya berupa nilai-nilai sebagai slogan semata, tetapi diajarkan mempraktekannya dalam permainan. Melalui aturan bermain, anak-anak diperkenalkan syarat-syarat untuk mengikuti permainan berupa pedoman perilaku tertentu yang telah disepakati bersama dan tidak lepas dari pesan-pesan moral yang dikemas dengan warna budaya nenek moyang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Melalui aturan permainan ini, anak-anak sejak dini diperkenalkan kepada nilai-nilai positif, yang pada hakikatnya akan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang diajarkan melalui permainan tradisional adalah sebagai berikut (Ifa, 2006):

- 1) Kejujuran, melalui permainan sebab akibat, perjanjian untuk berbuat jujur, dan penghargaan atas kejujuran.
- 2) Tenggang rasa, melalui penghayatan si menang untuk tidak menjelek si kalah. Karena sewaktu-waktu mereka bisa berganti posisi dimana si kalah bisa jadi pemenang, demikian juga sebaliknya.
- 3) Penghargaan terhadap alam, melalui permainan untuk memperhatikan sesuatu (pemandangan alam), karena permainan tradisional banyak berhubungan materi dari alam.
- 4) Konsep diri, melalui permainan setiap pemain dituntut memperhatikan diri, baik fisik dan kemampuan yang dimilikinya, artinya belajar mengenal diri.
- 5) Mengasah empati, melalui permainan para pemain diajarkan untuk mengenal kebutuhan orang lain.

Kejujuran adalah bersikap apa adanya, tidak mengada-ada, tidak bohong. Kehidupan sosial yang dilandasi kejujuran akan kuat, karena tidak ada pihak yang berbohong dan menjadi korban kezaliman akibat adanya kebohongan. Sebagai bangsa, kejujuran menjadi sangat penting. Jika sikap jujur ini dijaga dan dipelihara, maka sebagai bangsa akan tumbuh sebagai bangsa yang jujur,

tidak suka berbohong. Para pemimpin yang jujur, akan memimpin masyarakatnya dengan baik.

Demikian tenggang rasa, mampu mengukur rasa orang lain. Tenggang rasa akan melahirkan sikap toleransi. Masyarakat yang hidup dengan toleransi, tidak mudah menyerang apalagi konflik dengan masyarakat lainnya. Konflik agama akhir-akhir ini lahir, karena sudah menipis tenggang rasa. Orang kaya tidak bisa melihat perasaan tetangganya, tetap memamerkan kekayaannya tanpa peduli perasaan. Kemudian lahir sikap empati, yang mampu mengenal kebutuhan orang lain. Tetangga yang membutuhkan akan segera mendapatkan bantuan, tanpa harus ada komando. Sikap empati muncul karena sudah terlatih dan terbiasa. Masyarakat, baik skala kecil dan besar sebagai bangsa akan muncul sikap tolong menolong.

Aspek mengenal jati diri, berarti sebagai anggota masyarakat mengenal dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Seseorang akan menghargai adat dan budaya di mana dia hidup, karena sadar posisi diri. Demikian pula sebagai anak bangsa Indonesia, akan menyadari sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sifat-sifat kejujuran, tenggang rasa, mengenal diri dan empati pada akhirnya akan memupuk dan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan. Itu semua dapat dicapai melalui pembiasaan dan penanaman nilai-nilai yang dapat dilakukan dengan permainan tradisional. Jika nilai-nilai tersebut mampu menjadi kebiasaan dan perilaku masyarakat, tentu bangsa ini akan jujur, berempati, mengenal jati diri, tenggang rasa dan mampu menghargai kekayaan alam yang dimilikinya. Itu semua adalah nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

V. MEMBUDAYAKAN KOMPETISI PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI PENGUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

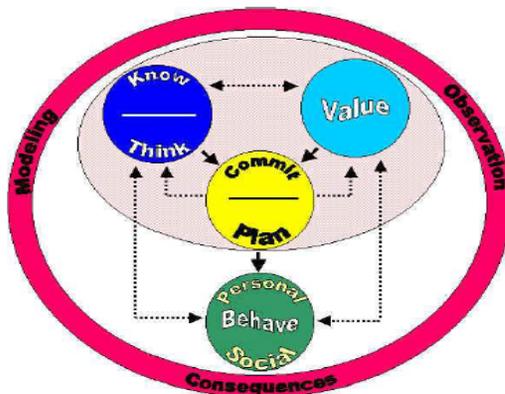
Membudayakan dari kata budaya menurut Koentjaraningrat (1987: 85) nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat,

dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Sedangkan menurut Kebudayaan atau yang dapat disebut juga "Peradaban mengandung pengertian yang sangat luas dan mengandung pemahaman perasaan suatu bangsa yang sangat kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Dari definisi ini, dapat diambil beberapa konsep, bahwa budaya adalah menyangkut nilai dan kebiasaan. Oleh karena itu, membudayakan berarti adalah upaya untuk membiasakan, yang mana kebiasaan ini mempunyai nilai bagi masyarakat yang menjadikannya kebiasaan.

Mengingat betapa pentingnya peran permainan tradisional dalam memberi nilai dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, beberapa daerah mengadakan perlombaan (kompetisi) permainan tradisional. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama sebuah harian lokal bulan April 2016 lalu mengadakan lomba permainan tradisional diikuti oleh lebih dari seribu peserta. Antusiasme masyarakat ini diluar perkiraan panitia (Fajar News, 2016). Demikian pula pemerintah Kota Batu berkomitmen akan membudayakan kembali permainan tradisional, salah satunya adalah *egrang* (Berita Metro, 2015), dan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu yang telah menyelenggarakan Lomba Balogo se Kalimantan Selatan dalam rangkaian Budaya Terapung 2016 (Radar Banjarmasin, 2016).

Membudayakan permainan tradisional butuh upaya sungguh-sungguh dan terus menerus, tidak bisa dilakukan ala kadarnya atau sekali tempo saja. Perlu disadari bahwa permainan tradisional yang dapat membentuk karakter yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa secara teoritik dapat dijelaskan adanya empat komponen, yaitu kognitif, afektif, kemauan (*volition*) dan perilaku (*behavior*) (Huit, 1996). Komponen kognitif meliputi pengetahuan mengenai yang baik dan buruk dengan dasar rasional yang akan memproses secara kreatif sebagai bahan keputusan moral. Selanjutnya, pengetahuan yang sudah tersimpan itu akan mempengaruhi nilai apa yang akan tertanam pada komponen afektif, untuk menghasilkan *judgment* moral/etika. Kedua komponen ini selanjutnya akan mempengaruhi komponen kemauan (*volition*) berupa komitmen untuk memunculkan perilaku baik dan buruk. Dasar komitmen ini didasari pengetahuan untuk mengetahui nilai apa yang dipelajari berdasarkan pengetahuan yang telah tersimpan sebelumnya. Artinya, kedua komponen ini

mempengaruhi kemauan untuk melakukan komitmen; tujuan; rencana; dan kekuatan untuk mencapainya. Selanjutnya, ketiga komponen ini mempengaruhi komponen terakhir, yaitu perilaku *overt* (yang muncul) ke permukaan. Perilaku *overt* ini memiliki dua aspek, *personal virtues* dan *social virtues*. Yang termasuk *personal virtues* adalah keberanian, disiplin diri, jujur, dan lainnya. Sedangkan yang termasuk *social virtues* adalah sopan santun, dapat dipercaya, memiliki perasaan iba pada orang lain. Pada saat individu berhasil merefleksikan pengetahuan, nilai, kemauan komitmennya ke dalam perilaku aktualnya, maka hal tersebut akan semakin menambah dasar pengetahuannya, memperkuat kemampuannya di dalam menganalisis nilai serta dampak nilai yang mereka yakini. Jika hal ini terus berlangsung secara terus menerus, maka akan terbentuk kebiasaan yang akan menjadi karakter yang menetap. Secara model dapat dilihat dalam gambar berikut:



Secara ringkas dikatakan bahwa perilaku seseorang, berdasarkan model ini ditentukan oleh pengetahuan, afeksi dan kemauan. Permainan tradisional dengan segala aturan dan nilai yang terkandung diketahui oleh para pemain, kemudian para pemain menilai bahwa apa yang dihasilkan dari permainan itu baik atau buruk. Ini adalah tahap afeksi, dimana hasilnya adalah nilai, soal baik dan buruk. Ketika nilai yang dihasilkan adalah baik, kemudian didorong adanya kemauan/kemauan untuk berperilaku baik (berdasarkan afeksi, nilai yang sudah diyakini sebelumnya). Proses pembentukan karakter ini harus

terus menerus tidak bisa sesekali, sebab untuk memperoleh *know*, pengetahuan akan nilai-nilai baik dalam permainan tradisional dibutuhkan proses dan waktu panjang.

Dengan demikian, upaya untuk membudayakan kompetisi permainan tradisional dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah harus memperhatikan pembiasaan. Pembentukan karakter melalui permainan tradisional yang bertumpu pada pengetahuan dan pengalaman menuntut adanya pembiasaan. Melalui pembiasaan, masyarakat akan secara mendalam mengetahui nilai-nilai yang baik dalam permainan tradisional. Ini bisa dilakukan lebih intensif melalui pendidikan di sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah melakukan upaya untuk membudayakan permainan tradisional. Secara khusus, dalam Kurikulum 2013 dengan tegas memasukkan permainan tradisional sebagai bagian mata pelajaran Pendidikan Jasmani Kesehatan. Kurikulum 2013 memiliki landasan filosofis kuat yang menempatkan budaya sebagai aspek penting. Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa (PP No. 70 Tahun 2013).

Selanjutnya dalam Kurikulum 2013 tentang Kompetensi Dasar untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Substansi muatan lokal termasuk bahasa daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan substansi muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dalam kompetensi inti mata pelajaran tersebut disebutkan "Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia” (kompetensi inti nomor 4). Hal ini dijabarkan ke dalam kompetensi dasar sebagai berikut:

- 1) Mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor yang dilandasi konsep gerak (seperti konsep: tubuh, ruang, hubungan, dan usaha) dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional.
- 2) Mempraktikkan pola gerak dasar non-lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan tradisional.
- 3) Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan tradisional.

Demikian pula untuk SMP/MTs dan SMA/MA dan SMK, bahwa permainan tradisional menjadi bagian mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.

Dengan demikian, permainan tradisional sudah menjadi bagian integral dalam pelajaran di sekolah, dari dasar sampai menengah. Kita tahu bahwa jumlah mata pelajaran pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan (Penjasorkes) tidak memadai untuk menjadikan permainan tradisional sebagai sebuah kebiasaan yang terus menerus. Sebab di samping permainan tradisional Penjasorkes juga menuntut adanya olahraga prestasi. Dengan kata lain, waktu yang ada belum mencukupi. Oleh karena itu, kompetisi atau pembiasaan memainkan permainan tradisional menjadi kebutuhan yang sangat penting. Upaya membudayakan permainan tradisional dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa bisa dilakukan melalui beberapa hal. *Pertama*, melalui perlombaan permainan tradisional berjenjang, dari tingkat daerah sampai nasional. Jika lomba olahraga tradisional seperti gayung naga, sampai tingkat internasional, mengapa tidak bisa membuat lomba permainan tradisional, yang berisi berbagai cabang permainan. Ini tentu sangat berpeluang mendatangkan dukungan banyak pihak, sekaligus menguntungkan baik sisi ekonomi, pariwisata, budaya dan pengenalan kemajemukan bangsa kepada generasi bangsa. Seperti berita yang dikutip sebelumnya, beberapa pemerintah daerah sudah mengadakan lomba itu, tetapi masih belum terencana secara terus menerus dan belum ada pencabangan khusus dari semua permainan tradisional yang ada. Lomba ini bisa semacam Pekan Permainan Tradisional, dari tingkat daerah

sampai nasional. Perlombaan ini bisa difokuskan pada tingkat pelajar, sebab di sekolah mereka sudah mendapatkan materinya.

Kedua, memasukkan permainan tradisional sebagai cabang yang dilombakan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON). Selama ini sudah banyak pihak berusaha memasukkannya, namun belum berhasil. Misalnya memperagakan permainan tradisional selama PON, tetapi belum menjadi bagian cabang yang dilombakan.

Ketiga, menjadikan permainan tradisional dalam era digital. Internet, dunia digital harus diakui, punya sisi positif, tetapi juga bisa mematikan permainan tradisional. Karena daya tarik permainan (*game*) internet lebih besar dibandingkan permainan tradisional. Kita tidak harus memusuhi teknologi, tetapi harus mampu memanfaatkannya. Permainan tradisional perlu disajikan dalam versi digital, meski ini juga tidak menjadikannya masyarakat kemudian mau bermain permainan tradisional, tetapi dengan adanya permainan tradisional versi digital, masyarakat akan mengenal, memahami bagaimana permainan tradisional itu dimainkan. Banyak *game* berkembang dari olah raga atau permainan di dunia nyata, misalnya catur, *bilyard*, sepakbola dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk tetap menempatkan permainan tradisional dikenal dan eksis di dunia digital yang saat ini menjadi media *mainstream* (arus utama) masyarakat.

VI. SIMPULAN

Permainan tradisional adalah wujud budaya dari sebuah masyarakat. Di Indonesia yang demikian majemuk, memiliki kekayaan melimpah akan permainan tradisional. Masyarakat sejak dulu sudah terbiasa dengan keragaman budaya, juga termasuk keragaman permainan tradisional, yang bisa saling mempengaruhi antar kelompok suku, etnis atau masyarakat. Permainan yang berasal dari Jawa bisa dikembangkan di daerah lainnya dan sebaliknya. Melalui permainan tradisional masyarakat juga diajarkan nilai-nilai penting dalam membangun kehidupan sosial.

Seiring perubahan yang terjadi saat ini, masalah persatuan dan kesatuan bangsa sudah demikian kompleks dan memprihatinkan. Banyak ancaman yang berasal dari masalah ekonomi, politik, keamanan dan sosial. Permainan tradisional yang memiliki potensi membangun persatuan dan kesatuan yang

kokoh, karena melaluinya masyarakat memperoleh pelajaran nilai penting dalam kehidupan sosial, akhirnya kurang berperan, bahkan dilupakan. Oleh karena, bagaimana pun harus berupaya agar permainan tradisional dapat hadir kembali sebagai media pemersatu bangsa yang kokoh. Permainan tradisional sudah harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan komprehensif dari pemerintah serta dikembangkan melalui teknologi yang mutakhir agar tidak semakin ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyanna Purba. 2012. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Berita Metro. 2015. "Ingin Lestarikan Permainan Tradisional", www.beritametro.co.id tanggal 18 Agustus 2015.
- Darmodihardjo, D. 1979. *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Fajar News. 2016. "Peserta Lomba Permainan Tradisional Membludak", 2 Mei 2016.
- Huitt, W. (1996). Systems Model of Human Behavior. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved December 1996, from <http://chiron.valdosta.edu/whuitt/materials/sysmdlhb.html>, diakses tgl 27 Maret 2006
- Ifa, H Misbah. 2006. *"Peran Permainan Tradisional Yang Bermuatan Edukatif Dalam Menyumbang Pembentukan Karakter Dan Identitas Bangsa"*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Balai Pustaka 1987 Jakarta, Balai Pustaka.
- Nisalia Duwata. 2013. "Aktualisasi Nilai Kekeluargaan (Persaudaraan) dan Nilai Kegotongroyongan dalam Permainan Tarik Tambang Pada Warga Masyarakat RT 24 RW06 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2012". *Jurnal Citizenship*. 2013.
- Radar Banjarmasin. 2016. *Tanbu Juara I Lomba Balogo Kal Sel*. 21 September 2016.

- Sudrajat, Mayjen TNI. 2003. "Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia". Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (LNRI Tahun 2002 No.85.TLNRI No. 4220).
- Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar SD/MI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar SMP/MTs, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar SMA/MA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI

Suroto

suroto@unlam.ac.id

ABSTRAK

Memudarnya kohesi dan integrasi sosial yang ditandai oleh munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan dengan motif yang begitu kompleks dalam kehidupan masyarakat, serta berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas yang cenderung meningkat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai intelektual generasi muda diharapkan mampu berdiri kokoh dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan yang berasal dari dalam diri, lingkungan, maupun perkembangan teknologi yang semakin canggih dan instan. Melalui penanaman nilai-nilai Kewarganegaraan yang dititipkan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan melahirkan generasi muda yang memiliki watak sebagai warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*).

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, karakter, perguruan tinggi

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

I. LATAR BELAKANG

Beberapa perubahan di era global yang berlangsung di Indonesia saat ini (2016), cenderung mengarah ke hal-hal yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini terjadi ketegangan antar generasi, yang menyebabkan terjadinya kerancuan (nilai anime), yaitu tidak jelasnya lagi ukuran etis tentang yang baik dan yang buruk. Sebagai akibatnya, terjadi semakin meningkat kenakalan remaja, meluasnya perilaku menyimpang (*deviant behavior*) dan kriminalitas dalam berbagai bentuk di Indonesia. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi muda yang saat ini sedang tumbuh. Generasi muda yang saat ini berusia 16-30 tahun berada pada masa produktif dan banyak sekali sedang melakukan penyerapan terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diserap dapat berasal dari berbagai sumber termasuk dari internet, pendidikan formal, pendidikan informal, maupun Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang semakin maju dan canggih. Dalam refleksi tentang visi dan karakter bangsa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengidentifikasi empat permasalahan utama kebangsaan, sebagai berikut:

Pertama, memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan yang ditandai oleh menguatnya primordialisme (etnis/kedaerahan, kelompok, dan keagamaan). Kedua, kehidupan beragama masih dihadapkan pada paradoks antara maraknya semangat keagamaan dengan kecenderungan sikap hidup permisif, materialistik, dan sekuler yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur agama. Keberagaman belum sepenuhnya berfungsi sebagai faktor integratif dalam mewujudkan kerukunan, kebersamaan, dan budaya anti kekerasan dalam konfigurasi kemajemukan bangsa.

Ketiga, memudarnya kohesi dan integrasi sosial yang ditandai oleh munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat, berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas yang cenderung meningkat, pranata sosial yang luhur semakin menurun seperti gotong royong dan saling menghormati perbedaan semakin menyeluruh dalam tata kehidupan sosial, dan masih kuatnya budaya patriarki yang membawa implikasi pada pandangan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Keempat, dalam kehidupan masyarakat terdapat kecenderungan pelemahan mentalitas yang mencerminkan mental bangsa yang lembek (*soft*

nation). Hal tersebut ditandai oleh kecenderungan sikap *inlander*, inferior, suka menerabas, perilaku instan, tidak disiplin, suka meremehkan masalah, tidak menghargai mutu, kurang bertanggung jawab, mudah mengingkari janji, dan toleran terhadap penyimpangan. Pada saat yang sama kurang berkembang perilaku yang positif seperti kerja keras, jujur, terpercaya, cerdas, tanggung jawab, menghargai kualitas, dan mentalitas yang unggul lainnya (PP Muhammadiyah, 2009: 10-22).

Oleh karena itu, agar suatu bangsa mempunyai karakter unggul, maka generasi mudanya perlu mendapat arahan dari semua pihak agar mampu mempunyai filter diri yang kuat untuk menyaring berbagai macam informasi yang masuk agar tidak salah arah yang nantinya dapat mempengaruhi karakter suatu bangsa. Menyadari begitu pentingnya kedudukan dan peranan pemuda, maka Bung Karno pernah mengatakan "Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia". Pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan, oleh karena itu pendidikan karakter bagi generasi muda menjadi sangat penting dan harus terus menerus dilakukan oleh semua pihak demi harapan dan masa depan bangsa Indonesia.

II. DINAMIKA PERILAKU GENERASI MUDA

Masa remaja merupakan masa "belajar" untuk tumbuh dan berkembang dari anak menjadi dewasa. Masa belajar ini disertai dengan tugas-tugas, yang dalam istilah psikologi dikenal dengan istilah tugas perkembangan. Ada satu semangat perjuangan dalam sejarah gerakan kaum muda di Indonesia yang begitu besar, yaitu semangat kepeloporan kaum muda. Semangat ini sebagai sumber kekuatan, energi dan daya dorong bagi pembaharuan kaum muda di Indonesia. Dalam istilah lain identitas terbaik yang dimiliki oleh pemuda Indonesia saat ini adalah, kesadaran bahwa kita memiliki tugas sejarah untuk menjadi pelopor untuk selanjutnya pada suatu saat mengambil posisi sebagai pembawa tongkat estafet. Kesadaran bahwa pemuda adalah pemilik energi yang memiliki daya dorong bagi perubahan inilah yang membentuk kekuatan besar bagi pemuda untuk segera berbenah dan menyiapkan segalanya dan kemudian mampu mengambil peran sejarah.

Semangat ini dapat lahir dari kesadaran sosial dan pembaharuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Semangat sejarah dan kepeloporan kaum muda pada hakikatnya adalah etika serta prinsip perjuangan untuk menegakkan

keadilan, kebenaran dan fitrah manusia, dalam hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai kaum muda. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah pemuda Indonesia yang berusia 16-30 tahun sebanyak 26,2% dari total penduduk Indonesia, sedangkan usia 0-15 sebanyak 28,8% sehingga jika digabung dari usia 0-30 tahun menjadi sebesar 55% dari total penduduk Indonesia (BKKBN, 2013).

Saat ini penduduk Indonesia berjumlah sebesar 252,2 juta jiwa (Ritonga, 2015), apabila persentase pemuda Indonesia yang berusia 16-30 tahun sebanyak 26,2%, maka paling tidak ada sejumlah 66 juta jiwa pemuda yang perlu mendapat arahan dan bimbingan secara terus menerus agar menjadi pribadi yang utama dan kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Pada dekade terakhir ini timbul kerisauan di sebagian kalangan masyarakat terhadap perilaku manusia (termasuk pemuda) Indonesia yang dinilai menyimpang dari akhlak atau karakter mulia. Harapan pada para pemuda Indonesia untuk membangun diri menjadi manusia yang mempunyai kepribadian yang utama sesuai kehendak Tuhan YME yang tiada lain menjadi pemuda Indonesia yang berkarakter baik perlu mendapat perhatian serius.

III. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SATU MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) merupakan bahan kajian dan pembelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. MPK bertujuan untuk meningkatkan pendayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan pengayaan bahan kajian sehingga mampu membangun kesadarannya sendiri guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kesemua mata kuliah dalam kelompok MPK termasuk pendidikan afektif, memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menetapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya

dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Artinya, kelompok MPK membekali mahasiswa dengan dasar-dasar pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian dalam upaya menginternalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah dipelajarinya untuk kelangsungan dan kejayaan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Berdasarkan paradigma pendidikan tinggi bahwa kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara, serta nasionalisme yang tinggi.
2. Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.
3. Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal, serta menghormati supremasi hukum.
4. Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik.
5. Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman mengenai masyarakat madani (*civil society* atau *madaniy*).

IV. KEUTAMAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH BERBASIS PEMBENTUKAN KARAKTER

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata kuliah yang lebih memfokuskan diri pada pembentukan warga negara yang mampu memahami serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk

menjadi warga negara yang berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Hasan (2004) bahwa *Civic Education* merupakan kegiatan pembelajaran, di mana pendidik dan peserta didik harus mampu mengawasi kebijakan pemerintah. Sementara Nur (2004) melihat ada tiga kompetensi yang harus diperhatikan pendidik dalam pembelajaran PKn sehingga mampu mengontrol kebijakan pemerintah, yaitu (1) peserta didik mampu berpikir kritis, rasional dan kreatif, dalam merespon isu-isu Kewarganegaraan; (2) peserta didik mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (3), peserta didik mampu membentuk diri berdasarkan kepada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis.

Sebagai mana lazimnya, pembelajaran melalui mata kuliah PKn seharusnya juga memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi. Adapun visi mata kuliah PKn adalah terwujudnya suatu pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Sementara misi pembelajaran PKn adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara sesuai dengan UUD 1945. Adapun tujuan pembelajaran PKn adalah (1) peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan; (2), peserta didik memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab; (3), peserta didik memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejalan dengan tujuan pembelajaran PKn, aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran PKn mencakup: (1) Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang menyangkut berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral; (2) Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*), keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (3) Karakter Kewarganegaraan (*civic disposition*) ini merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam pembelajaran PKn, karena dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan

akan membentuk watak/karakter, sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik. Misalnya, religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, rela berkorban dan sebagainya.

Secara historis dan sosiokultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. PKn merupakan salah satu bidang ilmu yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam koridor *value education* menjadi wahana yang sangat strategis untuk mengembangkan karakter bangsa, baik melalui strategi intervensi dalam kegiatan kurikuler maupun dalam proses habituasi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut maka PKn harus diperkuat agar menjadi *powerfull learning area*, yakni bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*).

Untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat menurut Kaelan (2011) seyogyanya didasarkan pada dasar filosofis bangsa. Bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu 'khitah' kenegaraan, *filosofischegrondslag* atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Karena itu, etika politik kenegaraan sebagai prasyarat membentuk karakter bangsa perlu disandarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab sebagai dasar negara/*filosofischegrondslag*, Pancasila bukan merupakan suatu preferensi, melainkan sudah merupakan suatu realitas objektif bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis dan kultural.

Keberadaan PKn merupakan sebuah konsep dan mata kuliah yang sangat penting. Di negara Indonesia, PKn antara lain membahas mengenai pluralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. PKn mengajarkan juga mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Tanpa adanya PKn dalam struktur kurikulum perguruan tinggi dikhawatirkan akan melahirkan masyarakat egois. Tanpa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada akan menjadi penjara dan neraka dalam artian menjadi sumber konflik. PKn melalui kurikulumnya sangat berperan penting dan juga terkait dengan strategi

penanaman watak kewarganegaraan yang dikemas melalui legitimasi kebudayaan khas Indonesia.

Karakter warga negara yang baik merupakan tujuan umum yang ingin dicapai dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di negara-negara manapun di dunia. Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warga negara yang baik melalui PKn diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru pembentukan karakter warga negara tampak ditekankan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca Orde Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk menitipkannya melalui Pendidikan Agama di samping Pendidikan Kewarganegaraan.

Persoalan apakah nilai-nilai pembangunan karakter yang diajarkan dalam setiap mata pelajaran harus bersifat eksplisit ataukah implisit saja, ini perlu dilakukan agar dapat dipahami betapa pentingnya PKn disetiap periode kehidupan bernegara di Indonesia untuk membangun warga negara yang baik meskipun dengan aksentuasi yang berbeda. PKn juga memiliki fungsi penting dalam pembentukan karakter demokratis warga negara yang pada gilirannya secara kolektif akan membentuk karakter bangsa yang demokratis pula. Untuk dapat memerankan fungsinya tersebut, Patric (Samsuri, 2012) mengungkapkan bahwa PKn harus mampu mengembangkan komponen kompetensi karakter demokratis warga negara yang meliputi pengetahuan kewargaan dan pemerintahan demokrasi, kecakapan kognitif dari kewargaan demokratis, kecakapan partisipasi dari kewargaan demokratis, dan keutamaan karakter kewargaan demokratis.

Menurut pandangan lain, Winataputra (2012) mengajukan lima hal yang perlu dilakukan dalam rangka pembentukan karakter demokratis warga negara melalui PKn paradigma baru. Pertama, memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi. Kedua, mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi maupun dalam berbagai kurun waktu. Dalam konteks ini, PKn seyogyanya

memuat kajian tentang hakikat, karakteristik, dan nilai-nilai demokrasi baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional. Pada tataran nasional, misalnya dapat dikemukakan pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan UUD 1945, yakni cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan hak asasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan, mengembangkan otonomi daerah, menegakkan "*rule of law*", mengembangkan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan prinsip keadilan. Perlu menjadi catatan, bahwa isi kurikulum tersebut bukan sekedar agar peserta didik belajar tentang demokrasi, tapi harus memungkinkan peserta didik belajar berdemokrasi.

Ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan peserta didik mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya secara jernih. Keempat, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks. Ketersediaan sumber belajar yang memadai menjadi hal penting dalam pembentukan karakter demokratis warga negara. Dewasa ini, sumber-sumber belajar tersaji dalam bentuk cetak, elektronik, maupun online dapat dengan mudah diperoleh, baik sumber yang sengaja dirancang guru untuk proses pembelajaran, maupun sumber yang tidak dirancang tetapi dapat memfasilitasi siswa belajar tentang demokrasi dan belajar berdemokrasi.

Kelima, dikembangkannya kelas sebagai laboratorium demokrasi (*democratic laboratory*), lingkungan sekolah sebagai "*micro cosmos of democracy*", dan masyarakat luas sebagai "*open global classroom*" yang memungkinkan peserta didik dapat belajar tentang demokrasi dalam situasi yang demokratis, dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis.

Menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi artinya menjadikan kelas PKn yang mampu memberdayakan peserta didik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku interaktif pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, serta penciptaan iklim kelas PKn yang mendukung pengambilan

keputusan secara demokratis. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran PKn harus berorientasi pada proses berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Demikian juga dengan lingkungan sekolah dan masyarakat, keduanya harus dijadikan sebagai bagian dari kelas PKn yang lebih luas. Harapannya, kesenjangan antara yang dipelajari di lembaga pendidikan dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan lingkungan masyarakat secara sistematis dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Hal ini penting, sebab pembangunan karakter demokratis merupakan tugas dari semua pihak. Di sisi lain, hal terpenting yang perlu kita bangun adalah kompetensi pendidik PKn yang mampu menafsirkan dan menerjemahkan paradigma baru tersebut sehingga proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan pembentukan karakter warga negara demokratis dan memiliki kompetensi kewargaan (Samsuri, 2010). Pendidik PKn yang kompeten dan profesional harus disiapkan secara serius oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Lebih dari itu, guru PKn harus menjadi teladan hidup berdemokrasi yang memancarkan nilai-nilai dan karakter demokratis yang religius, moderat, cerdas, dan mandiri dalam proses pembelajaran di kelas, maupun dalam kehidupan di luar kelas.

V. KARAKTER UNGGUL GENERASI MUDA DI ERA GLOBAL

Budimansyah (2010) mengurai konfigurasi karakter ke dalam bentuk: olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan yang menghasilkan karakter jujur dan bertanggungjawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghasilkan pribadi cerdas. Olahraga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreativitas.

Berdasarkan konsep di atas, dalam konteks suatu bangsa, karakter bangsa dapat dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian menjejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa (PP Muhammadiyah, 2009). Karakter bangsa dalam

hal ini berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, menurut rumusan tersebut, manusia Indonesia (generasi muda) yang berkarakter kuat adalah generasi muda yang memiliki sifat-sifat religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Hal tersebutlah merupakan karakter demokratis khas bangsa Indonesia yang perlu untuk terus dibangun dan dipertahankan dalam program pembangunan karakter bangsa.

Karakter demokratis khas Indonesia di atas, dicirikan oleh beberapa karakteristik berikut: Sifat religius dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. Sifat moderat dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian menengah antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Sementara sikap mandiri dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

VI. SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan satu instrumen pendidikan yang bertumpu pada harapan untuk membentuk karakter generasi muda. Melalui pelaksanaan maksimal pendidikan generasi muda yang salah satu tumpuan utamanya adalah Pendidikan Kewarganegaraan akan melahirkan generasi muda yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) serta berkarakter unggul di tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. 2013. *Penyajian tentang TFR Kabupaten dan Kota: Data SUSENAS 2010*. Jakarta: BKKBN.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.

- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kalidjernih, Freddy K. 2010. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan: Edisi Kedua*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2015. *Lessons Learned from Implementation Stage of Accrual Accounting in Indonesia Local Government (Province XYZ)*.
- Sagala, Syaiful dan Gultom, Syawal (Editor). 2011. *Praktik Etika Pendidikan di Seluruh Wilayah NKRI: Langkah Utama Membasmi Sifat Korup dan Keterpurukan Bangsa Indonesia, Membangun Karakter Jujur, Disiplin dan Tanggung Jawab Generasi Muda*. Bandung: Alfabeta.
- Sapriya dan Maftuh, Bunyamin. 2005. *Jurnal Civicus: Implementasi KBK Pendidikan Kewarganegaraan dalam Berbagai Konteks*. Bandung: Jurusan PMPKn FPIPS.
- Setiadi, Elly M. 2005. *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriatnoko. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penaku.
- Syarbaini, Syahrial. 2011. *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*.
- Winataputra, U.S. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis*. Bandung: Widya Aksara Press.

PENGOPTIMALISASIAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT NASIONALISME

Suryaningsi

suryaningsiningsi@gmail.com

ABSTRAK

Nasionalisme merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara langsung maupun tidak langsung. Globalisasi yang membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia, seharusnya meningkatkan kesadaran dan semangat nasionalismenya dengan mengoptimalkan peran keluarga, sekolah dan pemerintah. Penanaman jiwa nasionalisme perlu di lakukan melalui sekolah, sebab memungkinkan untuk melakukan pembentukan jiwa atau karakter serta semangat bagi kawula muda yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di samping itu para generasi penerus bangsa Indonesia yang masih berstatus sebagai pelajar di sekolah sehingga jikalau sekolah mampu memberikan pendidikan nasionalisme penguatan karakter bangsa Indonesia maka akan selamat bagi generasi bangsa untuk masa-masa yang akan datang. Penanaman jiwa nasionalisme serta penguatan karakter bangsa bagi seluruh generasi bangsa akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan NKRI yang kuat dan kokoh serta berkepribadian. Dalam rangka membentuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta karakter bangsa bagi generasi diperlukan sarana prasarana yang dapat mendukung dan melengkapi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kata kunci: nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

**Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman

I. PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Semangat nasionalisme merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman ketahanan nasional di era globalisasi. Globalisasi tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga sekaligus merupakan peluang untuk lebih mengetahui kehidupan lain di berbagai belahan dunia. Globalisasi dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara langsung maupun tidak langsung. Globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan negatif diberbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang akan berpengaruh pada semangat mewujudkan nilai-nilai nasionalisme bangsa. Oleh karena kemajuan suatu bangsa ditandai dengan semangat nasionalisme warga negaranya.

Warga negara adalah insan yang senantiasa hidup berkelompok (*zoon politicon*) yang menampilkan insan sosial (*homo politicus*) sekaligus aspek insan usaha (*homo economicus*), dalam arti bahwa nalar dan naluri hidup berkelompoknya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersamanya. Sebagai insan yang berpikir, maka berdasarkan iman, cita, rasa, dan karsanya seseorang akan memiliki pandangan hidup yang akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hidupnya. Sebagai warga negara dalam kehidupan berkelompok, yang di Indonesia didalilkan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, maka masing-masing akan mengadakan penyesuaian-penyesuaian pandangan hidupnya sehingga terbentuklah pandangan hidup kelompok. Di dalam kehidupan antar kelompok, maka apabila tidak terjadi suatu penggabungan kelompok, maka masing-masing anggota kelompok yakin bahwa pandangan hidup kelompoknya merupakan suatu kebenaran sejauh yang dapat dipikirkan manusia, sehingga tumbuhlah falsafah hidup kelompok yang bersangkutan dari pandangan hidup kelompok tersebut.

Di dalam kehidupan berkelompok tersebut meningkat menjadi bernegara, maka falsafah hidup tersebut disebut di dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) disebut sebagai *Filosofische grondslag* daripada negara yang didirikan. Falsafah hidup suatu bangsa akan menjelmakan suatu tata nilai yang dicita-citakan bangsa yang

bersangkutan, yang membentuk keyakinan hidup berkelompok sesuai yang dicita-citakan bangsa yang bersangkutan. Sebagai yang dicita-citakan maka ia membentuk ide-ide dasar dari segala hal aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berkelompoknya.

Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan kita sebut ideologi. Dengan demikian suatu ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita-citakan. Demikianlah secara teoritis perkembangan tumbuhnya suatu ideologi suatu bangsa, dan bagi bangsa Indonesia hal itu semenjak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila.

Permasalahan yang kedua ialah masalah kehidupan ketatanegaraan. Apabila kita ingin menganalisa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan, maka hal ini berarti kita berhadapan dengan kehidupan ketatanegaraan yang konkrit. Dengan demikian kita pasti tidak akan berhenti pada hal-hal yang bersifat teoritis, universal belaka (*Allgemeinsteatslehre*) melainkan justru kita harus menelusuri teori yang konkret yang sudah diwarnai oleh ideologi yang bersangkutan, sekalipun baru dicita-citakan (*besondersteatslehre*).

Apabila ada kecenderungan sekedar mencari hal-hal yang universal (teoritis) maka pada akhirnya kita akan mendapatkan sebagai hasil analisa suatu keadaan bernegara yang tidak konkret (*Staatslehre Ohne Staat*). Keadaan semacam ini akan nampak pula apabila suatu bangsa tidak memahami keadaan bernegara yang bagaimana yang sebenarnya diinginkan, sekalipun sudah dirumuskan di dalam hukum dasarnya, dengan perkataan lain apa yang di gambarkan di dalam hukum dasar menjadi lamunan belaka. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman tentang teori bernegara bangsa Indonesia, teori inilah yang harus kita patuhi, sehingga membentuk suatu kehidupan nasional dan dengan demikian kepatuhan akan menjelma secara ketatanegaraan menjadi disiplin nasional.

Di dalam mencari suatu teori bernegara yang konkret, maka sudah barang tentu kita tidak dapat melepaskan diri dari teori bernegara pada umumnya. Teori bernegara yang konkret dari bangsa Indonesia dapat kita katakan telah

mengaitkan hal-hal yang umum dan universal dari teori bernegara pada umumnya dengan hal-hal yang khusus pada suatu kelompok manusia (*Situation Gebundenheit*) bersumber pada alam dan budaya bangsa (*natur und kultur bedingungen*), yang oleh Prof. Soepomo disebut dengan suasana kebatinan bangsa Indonesia (*geistelicen Hintergrund*).

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang berarti bahwa segala sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, dan yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Fungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah merupakan gambaran secara tertulis dan fakta serta pola perilaku atau gambaran tentang amal perbuatan bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya di dunia ini. Pancasila memberi ciri khas kepribadian yang tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dalam ketetapan MPR No.XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-silanya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

Pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia ditentukan oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain namun kepribadian yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia tetap hidup. Sebagaimana halnya Pancasila telah tampak jelas segala nilai-nilai dari silanya mencerminkan diri bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila yang digali dari bumi Indonesia menjelma menjadi:

- a. Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;
- b. Pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dapat mempersatukan dan memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya;

- c. Jiwa dan Kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas dan tidak dapat dipisahkan dengan bangsa lain;
- d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata merial dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dengan suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib, dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai;
- e. Perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan.

Dalam realitas menunjukkan bahwa wujud perkembangan pendidikan bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi pudar oleh aksi-aksi pelajar yang tidak menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Di samping itu juga terdapat tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh masyarakat terhadap pendidik maupun pendidik terhadap anak didik yang juga tidak memberi contoh keteladanan. Hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari kepribadian bangsa Indonesia. Hampir-hampir pemediaan lewat televisi, radio, media sosial lainnya tidak pernah sepi dari fenomena-fenomena yang terkadang mencoreng nama pendidikan di negara ini. Fenomena tersebut berupa aksi kekerasan yang dilakukan di sekolah-sekolah, Kasus STPDN/IPDN, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia yang dilakukan oleh sosok pendidik, dari sektor sarana dan prasarana juga negeri ini masih dinilai diskriminatif karena di beberapa daerah banyak terdapat sekolah-sekolah yang hampir roboh dan dapat membahayakan murid dan guru yang sedang melakukan aktivitas belajar mengajar.

Di samping sarana prasarana tersebut ditemukan pemberian upah berupa honor kepada guru-guru terutama yang non Pegawai Negeri Sipil yang sangat memprihatinkan seolah-olah guru honorer tersebut hanya sebagai alat untuk mencerdaskan dan membentuk karakter yang baik akan tetapi imbalan dari jasa seorang guru tidak menjadi prioritas. Munculnya program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau disingkat dengan SM3T bagi sarjana pendidik, yang selanjutnya bisa mengikuti pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG namun program ini juga memberi kekecewaan sebab ketika sarjana pendidik ini ingin memutuskan diri untuk menjadi PNS

ternyata juga tetap mengikuti seleksi CPNS tidak ada bedanya mereka yang tidak melakukan pengabdian yang seharusnya dengan jasa-jasa baik yang di berikan kepada bangsa ini dibalas pula dengan kebaikan misalnya secara spontanitas di-PNS-kan sebab telah menunjukkan jiwa dan raganya membangun bangsa ini melalui pendidikan bahkan siap dan rela mengabdikan di tempat terjauh, terluar dan terdepan yang risikonya juga sangat menantang, bila tidak tentunya tidak memberi rasa keadilan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan jiwa Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

Persoalan di lingkup pendidikan sebagaimana yang penulis uraikan di atas sungguh sangat memprihatinkan, lalu bagaimana dengan persoalan di aspek kehidupan lainnya seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Berbagai permasalahan yang melanda bangsa dan Negara Indonesia, baik persoalan yang kecil maupun yang besar yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan akan eksistensi bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sosok figur seperti apakah yang cocok dalam memimpin bangsa dan negara agar dapat meminimalisir keterpurukan yang melanda bangsa ini.

Penting memahami dan menghayati serta mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan, sehingga tidak hanya merupakan rangkaian kata-kata indah dan tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Jikalau Pancasila tidak dapat menyentuh dalam sendi-sendi kehidupan, maka tidak dapat dirasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga lambat laun kehidupan akan semakin kabur, dan kesetiaan kepada Pancasila akan luntur di bumi Indonesia ini. Pada akhirnya nanti Pancasila akan tinggal sebagai sejarah demikian halnya dengan Bangsa dan Negara Indonesia akan tinggal sebagai sejarah di dunia ini. Dengan demikian sangatlah perlu penyadaran itu tumbuh di setiap warga negara demi keutuhan bangsa dan negeri Indonesia tercinta.

Berkaitan dengan berbagai masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis perlunya pengoptimalisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme berbangsa dan berbegara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi?
2. Faktor-faktor penyebab lemahnya semangat nasionalisme?
3. Bagaimana peranan Pancasila dalam memperkuat semangat nasionalisme?

II. PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila adalah merupakan barometer moral, dimana kerangka kewarganegaraan harus berdasarkan Pancasila. Secara fundamental Pancasila sebagai kerangka yang kuat untuk mendefinisikan konsep kewarganegaraan yang inklusif, sebab di dalamnya memiliki komitmen yang kuat terhadap pluralism dan toleransi. Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa dari berbagai perbedaan etnis, bangsa, suku, ras dan agama. Oleh karena itu, sebagai warga negara hendaknya memiliki kesadaran akan tanggung jawab memikul komitmen-komitmen tersebut, sebagai upaya menanggulangi kecemasan terhadap pudarnya rasa nasionalisme warga negara dengan kembali berkontemplasi, menyadari semakin merosok dengan tajam semangat nasionalisme berbangsa dan bernegara.

Kesadaran dan semangat nasionalisme dapat dipupuk kembali dengan berbagai cara dan upaya. Ditinjau dari aspek pendidikan sebagai guru atau dosen dapat menjadi suri teladan bagi murid, siswa dan mahasiswa. Mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, tulus dan ikhlas, untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berdedikasi, cerdas, terampil dan berprestasi yang gemilang. Sebagai pendidik guru dan dosen senantiasa dapat mengeksplorasi dan mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki oleh para generasi. Mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan secara kompetitif dapat bersaing dengan pemuda-pemuda dari negara-negara lain di dunia ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) telah diterangkan arti dari pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jelas tersirat dalam pengertian di atas meskipun hanya secara definitif kita juga dapat melihat hakikat pendidikan yang tujuan akhirnya adalah sebuah bentuk pengabdian kita terhadap negara. Isu nasionalisme saat ini jarang sekali dikaitkan dengan pendidikan, meskipun sistem kurikulum pendidikan kita telah berubah dengan mengusung tiga aspek penting di antaranya adalah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga nilai tersebut akan semakin mempertegas kita dalam melihat hasil kinerja sistem pendidikan kita yang baru. Siswa tidak lagi hanya difokuskan akan kebutuhan kognitifnya saja, akan tetapi semua hal yang menyangkut pengembangan potensi kita sebagai manusia.

2.2 Hubungan antara nasionalisme dan pendidikan adalah:

Nasionalisme adalah salah satu sikap kecintaan kita terhadap bangsa dan Negara yang kita diami, sebuah semangat dan kecintaan kita untuk tetap mempertahankan kesatuan negara kita. Salah satu jalan untuk menunjukkan akan kecintaan itu adalah dengan tidak membiarkan bangsa penjajah (asing) melakukan agresi, invasi dan bahkan eksploitasi terhadap bangsa kita baik dari segi teritorial, ekonomi sosial dan budaya. Termasuk yang belakangan terjadi dan ramai diperdebatkan adalah pencaplokan kawasan sekitar Ambalat (Sipadan dan Ligitan) yang kembali diklaim Malaysia sebagai daerah kekuasaannya. Sampai pada perebutan harta kita yang paling berharga yakni kebudayaan warisan leluhur kita yang senantiasa kita pertahankan “ujug-ujug” diklaim sebagai budaya dari mereka.

Pendidikan adalah satu hak mutlak yang kita harus kita dapatkan sebagai jalan untuk dapat terlepas dari marjinalisasi dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial. Satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah perlakuan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang tujuannya adalah memberikan hak otonomi dalam pendidikan (bukan privatisasi yang mengarah kepada eksploitasi dan komersialisasi). Hal ini akan semakin mudah mengembangkan siswa untuk berkembang sesuai dengan keahlian dan potensinya yang sangat kontekstual dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dimensi lain juga disentuh dalam sistem pendidikan nasional yakni tentang unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, seperti siswa/peserta didik, tenaga pengajar dan lembaga pendidikan yang berwenang dalam dunia pendidikan.

Dari aspek ekonomi, para pemuda bangsa Indonesia senantiasa cinta dan bangga serta tanpa malu-malu untuk mengonsumsi produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Kepada para pejabat negara dan kaum swasta yang kaya, senantiasa menabung uang dan hartanya di dalam negeri sendiri, demi negara dan pembangunan bangsa. Perekonomian Indonesia mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bisa dikenali, dan sifat-sifat sistem serta moral ekonomi Indonesia itu memang telah melandasi pedoman aneka perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, penguasa, pemerintah dan negara. Sistem serta moral yang dimaksud bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kelima Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan atau gotong royong dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara dan masyarakat sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha Esa; Roda perekonomian Indonesia seharusnya dapat digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi sosial dan moral.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Baradab; Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai dengan asas-asas kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia; prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Usaha koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongrit dari usaha bersama.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari aspek sosial, dapat diwujudkan dengan rasa kebanggaan akan sikap dan sifat keramahtamahan terhadap seseorang dan siapa saja. Saling toleransi, tepasalira, menghargai, mengormati, menyayangi, menyapa, bermusyawarah, gotong royong untuk kepentingan bersama. Terhadap aspek

budaya dan seni, melestarikan nilai-nilai budaya yang masih hidup hingga saat ini, melestarikan lagu-lagu kebangsaan atau bahkan dapat menciptakan lagu-lagu yang berslogan cinta tanah air, melukis, seni peran yang bertajuk semangat juang untuk negara. Berbagai karya-karya seni lainnya yang perlu dikembangkan untuk negara ini.

Perwujudan Pancasila di dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata dapat dilakukan dengan efektif dalam waktu yang relatif pendek oleh karena ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang merencanakan dan kemudian merumuskan hasilnya, seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan selanjutnya MPRS serta DPR. Lagipula lembaga-lembaga kebangsaan dan kenegaraan yang dibentuk merupakan lembaga-lembaga baru yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, sedang lembaga-lembaga baru itu dalam proses pembentukannya tidak perlu menggeser atau mengubah lembaga-lembaga lama yang sudah berakar di dalam masyarakat. Sebab untuk menghapuskan akar-akar sesuatu lembaga yang sudah tumbuh dengan kuatnya di dalam masyarakat biasanya diperlukan kebijaksanaan yang rumit serta waktu yang lama.

Negara Republik Indonesia tidak akan dapat hidup lestari jaya apabila Pancasila hanya menjadi jiwa bagi bangsa dan negara saja dan tidak meresap kedalam jiwa masyarakatnya. Meskipun pengertian bangsa dan masyarakat meliputi manusia-manusia yang sama, hidup di dalam suatu negara, namun ada perlunya kedua pengertian itu dibedakan. Pengertian bangsa selalu dihubungkan dengan pengertian negara. Manusia-manusia yang terhimpun menjadi suatu bangsa menjadi negara dengan segala hak dan kewajibannya yang diatur oleh negara. Untuk menjadi warga negara seorang manusia memerlukan pengakuan yang sah oleh negara menurut undang-undang yang khusus mengatur hal-hal kewarganegaraan. Seorang manusia yang bukan warga negara dapat menjadi warganegara dan diakui sah oleh negara melalui proses hukum yang ditentukan di dalam undang-undang kewarganegaraan itu.

Kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang, namun bisa lambat seperti yang terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kurang sarana untuk komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat lain kalau pun ada karena kemajuan elektronik dan teknologi alat komunikasi namun tidaklah selancar bila di kota sebab faktor jaringan sinyal yang sering bermasalah terutama

bagi mereka yang berada dipelosok. Akan tetapi mungkin perkembangan itu berjalan dengan cepat, atau bahkan dapat terlampau cepat, seperti yang terjadi dalam masyarakat kota modern dengan kecepatan kilat dapat berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat lain di dalam dan di luar negeri. Perkembangan kebudayaan itu terjadi oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi.

Aspirasi untuk meluaskan pengaruh Pancasila dari bidang kehidupan berbangsa dan bernegara ke bidang kehidupan bermasyarakat secara objektif dapat dinilai sebagai aspirasi yang ingin mempersatukan negara dan masyarakat agar kedua-duanya bertambah kuat, jaya dan bahagia. Hal tersebut selaras dengan pedoman penataran Pancasila, dimana dikatakan bahwa apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rusak wujudnya dalam kehidupan sehari-hari maka lambat laun, pengertiannya akan kabur bahkan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur.¹ Untuk membudayakan Pancasila kedalam masyarakat perlu dilakukan usaha-usaha yang teratur dan terarah.

Pembudayaan Pancasila kedalam masyarakat Indonesia kedengarannya agak ganjil oleh karena, pada waktu persiapan serta perumusannya pada tahun 1945 senantiasa ditegaskan bahwa kelima sila Pancasila merupakan hasil penggalian dari kebudayaan Indonesia. Dengan demikian orang dapat mengira, bahwa tidak perlu lagi usaha pembudayaannya yang demikian itu maka kita harus menyadari, bahwa di dalam kebudayaan yang ada di Indonesia ada ratusan, kalau tidak ribuan unsur yang tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. Dari ratusan atau ribuan unsur-unsur budaya itu dipilih hanya lima saja yang kemudian dirangkai menjadi lima sila atau Pancasila. Dalam rangkaian yang baru ini kelima sila Pancasila mendapatkan arti yang baru yang perlu dipahami dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat di dalam mana terdapat ratusan suku yang kebudayaannya masing-masing menunjukkan perbedaan dengan kebudayaan suku lain. Pada waktu disiapkan Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas, bahwa di tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing berwadah di dalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Akan tetapi kesatuan bangsa dan kesatuan negara sesuai dengan ikrar pemuda diwujudkan antara lain dengan melalui suatu bahasa kesatuan, Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diterima lambang negara yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman budaya

diterima sebagai realitas, tetapi semuanya dimasukkan di dalam wadah suatu bangsa dan satu negara. Selain bahasa persatuan bahasa Indonesia yang dimuat sebagai salah satu butir ikrar pemuda maka kemudian diterima dengan bulat Pancasila untuk lebih memperkuat dan mempekerat kesatuan bangsa.

Berdasarkan aspek politik, rasa nasionalisme juga senantiasa ditumbuhkan dengan melaksanakan demokrasi yang sesuai dengan tuntunan Pancasila sebagai yang telah diamanahkan dalam sila ke empat. Pembentukan perilaku moralitas oleh elit politik yang sesuai dengan jiwa Pancasila yakni memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusiawi, mengutamakan rasa persatuan, bermusyawarah dan mufakat serta menuju pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari aspek hukum, senantiasa menjunjung tinggi hukum atau Supremasi hukum, dalam arti yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dalam implementasi hukum memperlakukan sama kepada setiap individu di depan hukum dengan cara yang sama tanpa tebang pilih.

Relevansi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu juga terletak pada posisi komparatifnya terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia yang meyakiniya memahami dan menghayati betul-betul, mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi yang terbaik untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik. Relevansi yang lain terletak pada persepsi yang wajar dan sehat dari bangsa Indonesia terhadapnya, serta kemampuan dan keberhasilan mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan hakikatnya dan sekaligus relevan pula dengan perkembangan aspirasi mereka serta tuntutan perubahan zaman.

Selain yang telah di uraikan di atas relevansi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik juga terletak pada kemampuan dan keberhasilan bangsa Indonesia menjabarkan menjadi program-program dan aturan-aturan permainan dalam proses mewujudkan dan mengembangkan jati dirinya sebagai sistem politik demokrasi yang handal.

2.3 Penyebab Lemahnya Semangat Nasionalisme

Sikap nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai

warga negara. Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggungjawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Nasionalisme yang ideal seperti ini akan mengantarkan warga negara sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas nasionalisme yang tinggi.

Di era kekinian, rasa nasionalisme dan kebangsaan telah memudar seiring dengan mudarnya rasa cinta terhadap tanah air, dapat diukur dengan minimnya pemahaman remaja maupun kalangan orang dewasa akan nilai-nilai budaya. Bahkan lebih cenderung mengikuti budaya barat yang sangat berseberangan dengan budaya, norma, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Lebih menyukai produk-produk impor jika dibandingkan dengan produk dalam negeri yang justru malah malu. Hal tersebut sebagai bentuk melemahnya semangat nasionalisme kebangsaan warga negara Indonesia.

Melemahnya semangat nasionalisme kebangsaan para warga disebabkan karena faktor didikan dan keteladanan yang keliru terhadap anak didik dan terutama terhadap anak sendiri. Sebagai orang dewasa menunjukkan sikap ego yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Berikut ini beberapa faktor penyebab melemahnya rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara.

a. Faktor Internal

Penyebab secara internal adalah:

- 1) Keteladanan pada elit-elit kekuasaan, yang berakibat timbulnya rasa kekecewa pada generasi.
- 2) Perilaku keluarga terhadap anak-anaknya yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga ditiru oleh para generasinya.
- 3) Implementasi demokratisasi yang tidak mempertimbangkan aspek etika dan kesopan santunan, justru yang terjadi adalah unjuk rasa yang mengakibatkan terjadinya frustrasi di kalangan pemuda dan

hilangnya optimisme, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois, instan dan emosional.

- 4) Tidak memiliki rasa kompetitif, yang disebabkan karena tertinggalnya bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.
- 5) Munculnya kebiasaan yang menganggap hanya sukunya yang sempurna atau etnosentrisme.

b. Faktor Eksternal

Ditinjau dari faktor eksternal penyebabnya adalah:

- 1) Arus Globalisasi yang tidak dapat dibendung, yang berimbas pada moralitas bangsa.
- 2) Pengaruh paham liberalism barat dengan mudah merasuki pandangan hidup bangsa Indonesia.
- 3) Hilang rasa cinta terhadap produk dalam negeri sendiri.

Kedua faktor pemicu lemahnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia di atas memberi pengaruh-pengaruh yang secara tidak langsung berdampak pada jiwa nasionalisme bangsa, yang pada akhirnya apabila didiamkan secara terus menerus maka akan berakibat fatal yakni hilangnya rasa nasionalisme dalam suatu negara dan bangsa. Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mengantisipasi faktor negatif tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memantapkan peran keluarga sebagai wujud pendidikan utama atau *tarbiatul'ula*; peran pendidikan; dan peran pemerintah. Ketiga upaya tersebut senantiasa bersinergi untuk dapat mengembalikan jiwa-jiwa nasionalisme yang rapuh.

2.4 Peranan Pancasila Dalam Memperkuat Semangat Nasionalisme

Penanaman jiwa nasionalisme perlu dilakukan melalui sekolah, sebab memungkinkan untuk melakukan pembentukan jiwa atau karakter serta semangat bagi kawula muda yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di samping itu para generasi penerus bangsa Indonesia yang masih berstatus sebagai pelajar di sekolah sehingga jikalau sekolah dapat mampu memberikan pendidikan nasionalisme penguatan karakter bangsa Indonesia maka akan selamat bagi generasi bangsa untuk masa-masa yang akan datang.

Penanaman jiwa nasionalisme serta penguatan karakter bangsa bagi seluruh generasi bangsa akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

dalam rangka mewujudkan NKRI yang kuat dan kokoh serta berkepribadian. Dalam rangka membentuk dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta karakter bangsa bagi generasi diperlukan sarana prasarana yang dapat mendukung dan melengkapi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sajian informasi dalam pemberian materi yang menarik dan relevan

Semangat nasionalisme dan patriotisme sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa agar setiap elemen bangsa bekerja dan berjuang keras mencapai jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Jati diri dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa ini merupakan modal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di masa depan. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam konteks globalisasi saat ini harus lebih dititikberatkan pada elemen-elemen strategis dalam percaturan global. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam ikut membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai contoh: Gerakan Pramuka. Generasi muda adalah elemen strategis di masa depan. Mereka sepertinya menyadari bahwa dalam era globalisasi, generasi muda dapat berperan sebagai subjek maupun objek.
2. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang dalam perspektif kepentingan nasional dinilai strategis.
3. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang hidup di daerah rawan pangan (miskin), rawan konflik, dan rawan bencana alam.
4. Peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Demikian pula dengan anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di dunia internasional. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat RI dalam ikut berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan regional dan internasional, seperti: penyelesaian konflik, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Di Republik Indonesia kita ini tidak mengenal adanya perbedaan etnis, siapakah dia dan dari rumpun manakah dia berasal yang jelas itulah Indonesia, yang

melalui Kongres Pemuda Tahun 1928 di Jakarta diikat dengan semangat Sumpah Pemuda. Ber-Tanah Air yang Satu, Tanah Air Indonesia. Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia. Dan Berbahasa yang Satu, Bahasa Indonesia.

Berangkat hal itu semua, marilah kita selalu berpegang kepada semangat ber-Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan pemersatu bangsa sejak dulu. Hilangkan pikiran-pikiran baru yang rusak dan tidak bertanggung jawab atas upaya untuk melakukan suatu pergeseran makna rasa kebersamaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua harus sadar bahwa ketika hak asasi seseorang yang terlahir dan berasal-usul dari wilayah negeri yang terbentang dari Sabang hingga Merauke ini juga memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama atas bangsa dan negaranya.

Oleh karena perlunya kita menghargai keragaman, tentunya di manapun terjadinya pesta demokrasi baik di pusat atau di daerah, hendaknya menjadi ajang aspirasi yang paling demokratis tanpa dibayangi atau dihantui serta diracuni dengan pikiran-pikiran sempit dari sebagian atau sekelompok orang tertentu yang hendak memudarkan semangat nasionalisme dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dengan memegang semangat nasionalisme yang tinggi atau menghargai sebuah keragaman seperti yang dimaksudkan di atas, maka pada akhirnya nanti masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi benar-benar akan menikmati pesta demokrasi ini secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi juga merasuk dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.

a. Dampak positif

Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan merupakan bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Semakin terbukanya pasar internasional ini akan membuka peluang besar kerja sama dalam sektor perekonomian nasional. Dengan adanya hal tersebut akan semakin meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa guna menunjang kehidupan nasional bangsa dan negara.

Pengaruh adanya globalisasi dalam sektor sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik. Seperti membangun etos kerja yang tinggi dan disiplin, serta meniru Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Pada akhirnya, akan membawa kemajuan bangsa serta mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

b. Dampak Negatif

Selain berdampak positif, munculnya globalisasi juga berdampak negatif yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

Munculnya globalisasi juga berdampak pada aspek ekonomi. Yakni, semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Sebab, sudah semakin banyaknya produk luar negeri seperti Mc Donald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan sebagainya, yang membanjiri dunia pasar di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa mengenai identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Selain itu, globalisasi

juga mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara orang kaya dan miskin. Ini disebabkan karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berdampak terhadap nasionalisme. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Sebab, globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apapun yang ada di luar negeri dianggap baik serta mampu memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Berdasarkan analisa dan uraian di atas, pengaruh negatif globalisasi lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme.

Nasionalisme Indonesia, yakni sebuah penegasan akan identitas diri versus kolonialisme-imperialisme. Kesadaran sebagai bangsa yang adalah hasil konstruksi atau bentukan mengandung kelemahan internal yang serius ketika kolonialisme dan imperialisme tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Karena itu, nasionalisme kita akan ikut lenyap jika kita berhenti mengkonstruksi atau membentuknya tanpa harus menyebutnya sebagai sebuah nasionalisme baru.

Pertama, beberapa pengalaman kolektif seharusnya menjadi "roh baru" pembangkit semangat nasionalisme Indonesia. *Kedua*, negara Indonesia sangat plural. Identifikasi sebuah kelompok etnis atau agama pada identitas kolektif sebagai bangsa hanya mungkin terjadi kalau negara mengakui, menerima, menghormati, dan menjamin hak hidup mereka.

Masyarakat akan merasa lebih aman dan diterima dalam kelompok etnis atau agamanya ketika negara gagal menjamin kebebasan beragama termasuk kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah, persamaan di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Nasionalisme bisa dipraktikkan dalam sebuah sistem pemerintahan sosialis, komunis, ultranasionalis, etnis, atau liberal-demokratis. Masyarakat Indonesia yang sangat plural ini akan menjadi ancaman serius bagi nasionalisme jika negara kebangsaan yang kita bangun bersifat sosialis, ultranasionalis ala nazisme Jerman dan fasisme Italia, atau komunis. Alasannya sederhana, hak individu akan kebebasan, otonomi dan kesetaraan (*equality*) dalam masyarakat dirampas

oleh negara dalam sistem pemerintahan sosialis, komunis, dan ultranasionalis (Ian Adams, 1995: 82).

Tantangan bagi nasionalisme Indonesia ke depan adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah negara kebangsaan yang bersifat liberal-demokratis di mana hak-hak dasar setiap warga negara diakui, dihormati, dan dijamin, di mana hukum ditegakkan secara pasti dan adil, dimana negara mewujudkan kesejahteraan umum, dan sebagainya. Itulah alasan dasar tekad para pemuda 78 tahun yang lalu, yakni menjadi satu Indonesia demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

c. Upaya Menjaga Nilai Luhur Pancasila

Pancasila memiliki nilai-nilai yang tercermin dari kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa senantiasa mampu menjaga nilai-nilai Pancasila, dengan berbagai upaya dilakukan. Upaya-upaya tersebut dapat dengan ideologi praktis, yaitu sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai pokok untuk mencapainya, apabila diterapkan di sebuah negara maka ideologi tersebut diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara.

Pada prinsipnya nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa;

- a) Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;
- b) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara;
- c) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri;
- d) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;
- e) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;

- f) Mengembangkan sikap tenggang rasa;
- g) Tidak semena-mena terhadap orang lain;
- h) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- i) Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- j) Berani membela kebenaran dan keadilan;
- k) Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia; dan
- l) Menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Nasionalisme pada masa sekarang ini sedang merujuk pada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- a) Implementasi nilai-nilai Pancasila di era Globalisasi, cenderung bangga menggunakan produk-produk impor, mengikuti budaya barat, paham negara-negara barat yang sarat dengan liberalismenya, pakaian yang setengah menutup badan atau bahkan sobek-sobek, menyukai dan bangga apabila makan makan ala barat seperti coca cola, pepsi, centuki, dan lain-lain.
- b) Faktor-faktor penyebab lemahnya semangat nasionalisme dikarenakan oleh faktor internal berupa timbulnya kekecewaan terhadap pemuda atas kinerja dan pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya dan eksternal yakni arus globalisasi yang membawa dampak negatif.
- c) Peranan Pancasila dalam memperkuat semangat nasionalisme yakni enggan menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan

kemanusiaan; senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia; dan menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3.2 Saran

- a) Sebagai bangsa yang memiliki ideologi Pancasila seharusnya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah arus globalisasi dengan semangat yang tinggi.
- b) Mengoptimalkan peran keluarga, sekolah atau pendidikan dan pemerintah.
- c) Seharusnya dapat dikonkretkan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya untuk memperkuat semangat Nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Harjono. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*. Jakarta: Gema insani Press.
- Erwim Kusuma, dan Khairul. 2008., *Pancasila dan Islam*, Jakarta: Baur Publishing.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila., (Historis, Kultur, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kancil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Aziz Toyiybi dan A. Kosasih Djahiri. 1997. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor Ms. Bakry. 2001. *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Notonegoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Roeslan Abdoelgani dalam Kusuma Erwin dan Khairul. 2008. *Pancasila dan Islam*. Jakarta: Baur Publishing.
- Rukiyati. 2008. *Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Soejadi R, dkk.1986. *Aliran-Aliran Filsafat dan Filsafat Pancasila* dalam Slamet Sutrisno, 1986. *Pancasila Sebagai Metode*. Yogyakarta: Liberty.

- Sudarnanto. 1987. *Agama dan Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunaryo Wreksosuhardjo. 2000. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tim ICCE UIN. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Jakarta.

(endnotes)

- ¹ Bahan penataran, 1981., Hal. 11

MENUMBUHKAN NASIONALISME PESERTA DIDIK MELALUI PENDIDIKAN SENI MUSIK

Susyam Widianto

chetar_me@yahoo.com.

I. PENDAHULUAN

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memajukan jasmani tetapi juga pikiran dan yang lebih terpenting adalah memajukan budi pekerti peserta didik sehingga mencapai kesempurnaan hidup.

Kita ketahui bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang terdiri dari jajaran pulau-pulau yang masing-masing memiliki adat dan budaya yang beragam. Adapun yang mempengaruhi kebiasaan suatu daerah adalah tiga hal, yaitu individu, masyarakat dan budaya. Budaya yang beragam ini adalah milik Indonesia. Rakyat Indonesia yang wajib mempertahankannya. Bukan pemerintah saja, tetapi segenap rakyat Indonesia. Tentu saja cara mempertahankan khazanah budaya ini salah satunya adalah dengan cara melestarikannya. Dalam hal ini peserta didik menjadi satu mata rantai dalam keberlangsungan hidup kebudayaan kita. Namun, mengapa perilaku peserta didik kita saat ini tidak mencerminkan hal itu. Peserta didik kita nyaris tak mampu menyanyikan lagu wajib dengan lancar kecuali Indonesia Raya dan menghenjingkan cipta, itu pun

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sendratasik FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

karena kedua lagu tersebut dinyanyikan setiap Senin pada upacara bendera. Peserta didik kita juga tidak mampu menjelaskan siapa Pattimura atau siapa Jenderal Ahmad Yani. Realitas menunjukkan bahwa peserta didik juga tak dapat menyebutkan tarian Radap Rahayu asal Banjarmasin yang agung dalam menyambut para tamu.

Perilaku ketidaktahuan dan ketidakpedulian kepada seni ini akan memberikan dampak pada memudarnya nasionalisme generasi muda yang kemudian berpotensi hilangnya identitas bangsa yang telah merdeka dan kaya budaya ini. Yang nanti akan berujung pada asingnya budaya di rumah sendiri. Akibat banyak masuknya budaya asing, generasi muda lebih menjunjung budaya asing dan budaya bangsa sendiri pun dikesampingkan. Tentu kita tidak ingin budaya kita "diambil" oleh bangsa asing, ketika budaya kita sudah diklaim oleh bangsa lain, barulah kita mengakui itu budaya kita. Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini untuk terulang kembali. Pada era globalisasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus berkembang. Masuknya budaya asing juga berpengaruh bagi sikap dan pola pikir generasi muda. Banyak dampak yang kita peroleh dari berkembangnya IPTEK, termasuk dampak positif dan dampak negatif. Jika kita tidak bersikap selektif dalam memilih maka akan banyak dampak negatif yang muncul. Sekarang, banyak generasi muda yang rasa nasionalisme dan patriotismenya mulai meluntur. Padahal, untuk mencapai kata merdeka, para pahlawan rela mengorbankan harta, jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa peserta didik saat ini tak mengenal lagu-lagu kebangsaannya? Apakah karena pendidikan telah gagal membimbing seseorang untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup? atukah hal ini terjadi karena lunturnya rasa cinta tanah air atau nasionalisme? dan apakah fokus pendidikan yang saat ini hanya membidik ranah kognisi juga mempengaruhi rasa cinta tanah air siswa didiknya? Pertanyaannya kemudian lalu bagaimana pendidikan bisa memajukan tidak hanya jasmani, pikiran, budi pekerti, namun juga menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme? Apakah pendidikan yang berbasis pada nilai budaya baik lokal maupun nasional dapat menjadi suatu alternatif? Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menjelaskan dengan sudut pandang pendidikan seni mengenai bagaimana pendidikan yang berbasis pada

nilai-nilai budaya lokal dan nasional dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme pada peserta didik.

Penulis akan mulai dengan menguraikan mengenai tujuan pendidikan serta proses dan dampaknya terhadap perilaku seseorang. Uraian berikutnya adalah mengenai rasa cinta tanah air yang antara lain menjelaskan mengenai pentingnya rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan manfaat cinta tanah air terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pendidikan yang berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional dan diakhiri dengan bagaimana pendidikan berbasis nilai-nilai budaya lokal dan nasional ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme pada peserta didik.

II. PENGERTIAN NASIONALISME

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa dipusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya, maksudnya adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu "bangsa" yang aktual atau "bangsa" yang potesial. Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu: dalam pengertian antropologis serta sosiologis dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Persekutuan hidup semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup yang minoritas. Sedang dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam.

Berikut arti nasionalisme menurut para ahli :

1. Ernest Renan

Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara.

2. Hans Kohn

Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya *National Counciousness*. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri.

3. L. Stoddard

Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.

4. *Encyclopaedia Britannica*:

Nasionalisme merupakan keadaan jiwa, dimana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan.

5. Huzser dan Stevenson :

Nasionalisme adalah menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.

6. *International Encyclopaedia of the Social Science*:

Nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi pengabsahan terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan.

Secara umum nasionalisme diartikan bentuk dari rasa cinta tanah air, dimana seseorang atau sekelompok manusia tinggal dan memperoleh kehidupan. Rasa cinta ini timbul karena adanya perasaan senasib antara sesama manusia yang ada dalam sebuah kelompok dan mendiami suatu daerah.

II. PENDIDIKAN SENI

Pendidikan dalam sistem pelaksanaan prosesnya selalu bersifat dinamis, yaitu selalu berubah untuk dikembangkan menyesuaikan dengan

kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan manusia. Hal ini berkaitan pula dengan sifat pendidikan yang historis, maksudnya bahwa pendidikan memiliki latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada jaman tertentu. Dengan adanya perubahan kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan manusia seiring berjalannya waktu, maka sistem pendidikan terkait kurikulum selalu berproses dengan pengembangan-pengembangan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Di Indonesia, pendidikan formal khususnya, mengalami berbagai pasang surut masalah dari segi pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana maupun output proses pendidikan. Oleh karena itu diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional, yang dipandang berbagai pihak sudah tidak efektif, bahkan dari segi mata pelajaran yang diberikan dianggap kelebihan muatan (*overload*) tetapi tidak mampu memberikan bekal, serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut berbagai perubahan pada komponen pendidikan lainnya. Seluruh elemen yang berpengaruh dalam sistem pendidikan di Indonesia berusaha memperbaiki semua unsur pelaksanaan pendidikan salah satunya merevisi Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diharapkan mampu memperbaiki akhlak serta mencetak SDM yang mampu berkompetensi mengikuti arus perkembangan globalisasi.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013, maka implementasi kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 (Permendikbud 81A tahun 2013).

Kurikulum 2013 bertujuan membangun kesejahteraan berbasis peradaban, dimana modal sosial, modal budaya, modal pengetahuan/keterampilan menjadi modal dasar peradaban untuk membangun sumber daya manusia yang sejahtera. Manusia sebagai sumber daya tentu saja memiliki pikiran dan perasaan yang harus berlandaskan logika, etika, estetika, dan spiritualitas (paparan kebijakan Kurikulum 2013). Membangun manusia yang

beradab diwujudkan dengan internalisasi dan eksternalisasi dari abstraksi sebagai manusia yang memiliki pengetahuan dan perasaan, kemudian diekspresikan melalui berbagai disiplin ilmu, baik IPTEK, bahasa, maupun seni (Triana Dinny, 2013).

Kesenian, khususnya Pembelajaran Seni Musik juga turut diwujudkan dan diinternalisasikan sebagai pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk kreatif dan mampu berekspresi sesuai dengan perkembangannya. Pembelajaran Seni Musik sebagai bagian/komponen dari materi di sekolah formal, tentu mengalami perubahan dalam pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013.

III. PEMBELAJARAN SENI MUSIK

Seni musik merupakan ungkapan batin yang dinyatakan dengan irama nada yang melodis. Melodi seni musik adalah suara, karena itu pengamatan seni musik adalah pengamatan auditif (Bastomi, 1992). Pendidikan kesenian, sebagaimana yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara, merupakan satu faktor penentu dalam membentuk kepribadian anak, karena pendidikan seni di sekolah dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam membentuk jiwa dan kepribadian.

Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan Plato juga mengungkapkan bahwa pendidikan seni dapat dijadikan dasar pendidikan, karena dapat digunakan untuk membentuk suatu kepribadian yang baik. Oleh karena pendidikan kesenian merupakan elemen yang esensial dalam proses pembentukan watak setiap individu, maka keberadaan pendidikan seni sebagai subsistem dalam pendidikan nasional tidak dapat diabaikan.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, pembelajaran seni musik sangat memberi kontribusi yang besar dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Pembelajaran seni musik merupakan pembelajaran yang memberikan kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi seni secara kreatif untuk pengembangan kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. Seni musik membentuk disiplin, toleran, sosialisasi, sikap demokrasi yang meliputi kepekaan terhadap lingkungan. Dengan kata lain pembelajaran seni musik merupakan materi yang memegang

peranan penting untuk membantu pengembangan individu siswa yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan akal, pikiran, sosialisasi, dan emosional.

Pembelajaran seni musik di sekolah mempunyai tujuan untuk: (1) memupuk rasa seni pada tingkat tertentu dalam diri tiap anak melalui perkembangan kesadaran musik, tanggapan terhadap musik, kemampuan mengungkapkan dirinya melalui musik, sehingga memungkinkan anak mengembangkan kepekaan terhadap dunia sekelilingnya; (2) mengembangkan kemampuan menilai musik melalui intelektual dan artistik sesuai dengan budaya bangsanya; dan 3) dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan studi ke pendidikan musik yang lebih tinggi (Jamalus, 1998 : 91 dalam Wicaksono, 2009).

IV. PEMBELAJARAN SENI MUSIK DALAM KURIKULUM 2013

Mata pelajaran Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya yang ada dalam Kurikulum 2013 uraian bahasannya terdiri dari bahan ajaran pendidikan seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater dan prakarya. Seni Budaya dan Prakarya adalah salah satu bagian dari struktur dan muatan Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mapel Seni Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya (karena seni adalah satu dari berbagai unsur budaya).

Sebagai materi pembelajaran, mata pelajaran Seni dan Budaya perlu dipahami guru, seperti bagaimana arah yang tepat untuk mendidik dan membentuk karakter anak. Arah atau pendekatan seni baik itu seni rupa, seni musik, seni tari ataupun seni teater, secara umum dapat dipilah menjadi dua pendekatan, yaitu: (1) seni dalam pendidikan dan (2) pendidikan melalui seni. Pertama, seni dalam pendidikan. Secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak. Maksudnya adalah, keahlian melukis, menggambar, menyanyi, menari, memainkan musik dan keterampilan lainnya perlu ditanamkan kepada anak dalam rangka pengembangan kesenian dan pelestarian kesenian. Seni dalam pendidikan ini sejalan dengan konsep pendidikan yaitu sebagai proses pembudayaan yang dilakukan dengan upaya mewariskan atau menanamkan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu, seni dalam pendidikan merupakan upaya kita sebagai pendidik seni dan juga lembaga yang menaungi kita untuk mewariskan, melestarikan, dan mengembangkan berbagai jenis kesenian yang ada baik lokal maupun mancanegara.

Dalam penulisan ini pembelajaran seni musik menjadi pusat konsentrasi penulis, di mana pembelajaran seni musik masuk dalam Seni Budaya dan Prakarya (SBDP), pembelajarannya dilakukan secara tematik dengan mata pelajaran lain dan disesuaikan dengan tema dan subtema yang telah ada. Guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran dengan lebih menarik agar Pembelajaran Seni Musik dapat berlangsung menyenangkan, aktif, efektif dan efisien. Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya adalah termasuk kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Seni Budaya dan Prakarya (SBDP) yang dalam implementasinya menyesuaikan dengan kebudayaan daerah masing-masing, termasuk bahasa dan keseniannya, maka Pembelajaran Seni Musik juga dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing dengan cara menyanyikan lagu-lagu daerah. Hal ini dapat turut melestarikan kebudayaan daerah, maupun turut mengupayakan adanya Pendidikan Multikultural dalam proses pembelajaran. Mendengar dan memperhatikan secara komprehensif dapat menimbulkan minat peserta didik yang kemudian dapat diteruskan dengan menyanyikan lagu itu kembali berikut dengan dinamika dan makna lagu. Contoh Lagu "Indonesia Pusaka" ciptaan Ismail Marzuki memiliki kombinasi melodi yang harmonis dan memiliki makna yang mendalam. Pada Pembelajaran Seni Musik yang masuk dalam Seni Budaya dan Prakarya ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dapat berlatih keterampilan dalam menyanyi, berlatih mengapresiasi makna dari lagu serta memupuk rasa nasionalisme. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru adalah guru memperkenalkan lagu "Indonesia Pusaka". Kemudian Guru dapat menuliskan syair lagu tersebut di papan tulis. Awalnya guru dapat menyanyikan lagu tersebut di depan kelas atau guru dapat memutar kaset. Kemudian peserta didik diminta bernyanyi bersama dengan bimbingan guru, untuk selanjutnya peserta didik memahami setiap bait lagu.

Setelah peserta didik memahami lagu tersebut peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan isi lagu sebagai bentuk apresiasi mereka. Jika memungkinkan peserta didik dapat bernyanyi di depan kelas secara perseorangan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap lagu tersebut, sekaligus untuk melatih rasa percaya dirinya.

Dalam praktiknya, melalui Pembelajaran Seni Musik, peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang harmoni, merasakan harmoni melalui pengetahuan dan penghayatan musik, mempunyai bayangan penginderaan gerak harmoni, mengiringi lagu-lagu sederhana dengan alat musik harmoni sederhana dan membaca notasi harmoni dengan dengan sederhana. Selain itu, Pembelajaran Seni Musik memiliki kesempatan besar untuk dapat membentuk karakter peserta didik yang merupakan tujuan Kurikulum 2013.

V. KETERKAITAN CINTA TANAH AIR TERHADAP PELESTARIAN SENI MUSIK

Penduduk Indonesia yang besar jumlahnya dengan beranekaragam budaya merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Di dalam mengisi kemerdekaan kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan Musik Daerah dan Nasional sebagai rasa cinta tanah air kita. Keterkaitan rasa cinta tanah air dengan pelestarian juga merupakan kewajiban bela negara. Pelestarian budaya ini tidak kalah pentingnya daripada kewajiban kita terhadap kewajiban bela negara. Dengan kita ikut melestarikan lagu daerah dan lagu nasional bahkan membuatnya terkenal dan dikenal di mata dunia internasional, maka kita menghargai serta memahami nilai-nilai budaya nenek moyang kita. Sama halnya jika kita menghargai dan memahami serta mencintai nilai-nilai Pancasila, yang juga merupakan budaya adaptif bangsa kita sendiri.

Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Definisi lain mengatakan bahwa rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau seni dan budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

Perlunya cinta tanah air harus ditekankan bagi remaja karena itu akan membangun jiwa cinta tanah airnya pada bangsa ini dan dari perlunya kecintaan kita pada negara kita nantinya akan membuat negara kita sendiri menjadi kebanggaan orang lain bahkan orang yang dari negara lain.

Harus kita renungkan bersama bahwa rendahnya minat terhadap seni dan budaya bukan hanya kesalahan generasi muda saja namun juga ada kesalahan sistem dalam hal program pendidikan serta gagalnya pemerintah menyaring budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita

VI.RENDAHNYA MINAT REMAJA TERHADAP SENI DAN BUDAYA INDONESIA

Satu hambatan pembelajaran seni adalah rendahnya minat peserta didik terhadap lagu daerah maupun lagu nasional. Menurut Hidayato, para remaja saat ini cenderung menyukai sampai meniru kebudayaan luar. Adanya fasilitas seperti internet, televisi, radio, majalah yang banyak menampilkan kebudayaan asing, membuat para remaja tidak dapat membendung rasa keingintahuan mereka untuk mencoba dan meniru kebudayaan asing tersebut. Sehingga kebudayaan lokal menjadi tidak mereka sukai, dan mereka cenderung menganggap kebudayaan lokal sebagai kebudayaan kuno atau ketinggalan jaman, sedangkan kebudayaan asing mereka anggap sebagai kebudayaan yang modern & maju.

Kebudayaan luar itu seharusnya disikapi dengan cermat, apakah kebudayaan asing ini bertentangan dengan kebudayaan lokal atau tidak, bukan langsung diterima begitu saja. Jika tidak bertentangan dengan lokal kita bisa mengolah kebudayaan asing tersebut dengan kebudayaan lokal, dan menciptakan suatu perpaduan yang unik sehingga para remaja tidak merasa bosan dengan kebudayaan lokal. Pengaruh globalisasi juga berdampak rendahnya minat generasi muda terhadap seni budaya bangsa.

6.1 Akibat dari pengaruh globalisasi:

- a. Disorientasi, dislokasi atau krisis sosial-budaya dalam masyarakat.
- b. Berbagai ekspresi sosial budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya.
- c. Semakin merebaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme.

6.2 Sisi negatif globalisasi budaya:

- a. Akibatkan erosi budaya.
- b. Lenyapnya identitas *cultural national* dan *local*.
- c. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri.

- d. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme.
- e. Cenderung pragmatisme dan maunya serba instan.

Hal inilah menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan seni musik dalam rangka mempertahankan dan melestarikan khazanah lokal pada khususnya. Musik tradisi, lagu daerah atau lagu nasional dianggap ketinggalan jaman dan dinilai tidak menyenangkan. Inovasi dan eksplor tenaga pendidik dalam hal ini sangat diperlukan, tidak hanya mengenalkan saja tetapi meresapi maknanya agar tumbuh rasa cinta terhadap tanah air yang akhirnya akan berujung pada rasa memiliki di hati peserta didik.

VII. KUNCI SUKSES PEMBELAJARAN SENI MUSIK DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dengan kreativitas, anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. Meski demikian, dalam implementasi Kurikulum 2013 sangat ditentukan oleh berbagai faktor atau kunci sukses. Kunci sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah. Pada Pembelajaran Seni Musik, khususnya, membutuhkan kreativitas guru dalam membelajarkan Seni Musik.

Kreativitas guru yang dimaksud adalah termasuk dalam menggunakan metode dan media yang bervariasi, memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran, mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuan masing-masing pada setiap materi serta mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran.

Kompetensi guru profesional adalah gabungan dari empat aspek, yaitu; komunikator, kurikulum, strategi belajar, dan asesmen yang jitu. Kelas yang baik bukan cuma dilihat dari urusan kurikulum, sumber belajar, dan fasilitas, tapi juga hubungan antar manusianya. Mengajar sesuai dengan kurikulum memang penting, apalagi jika ditambah dengan guru yang mau melakukan eksplorasi

terhadap Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berguna sebagai peta, kreativitas guru adalah kekuatan untuk menapakinya.

Pendidikan yang menjadi sebuah sistem ini, menempatkan guru sebagai pusat untuk berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran seni musik di sekolah dengan harapan peserta didik memahami khasanah budaya daerah dan nasional dalam rangka menumbuhkan rasa mengenal, mencintai dan memiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, Suwaji. 1992. *Wawasan Seni*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Kemdikbud. 2013. *Implikasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mendikbud. 2013. *Salinan Permendikbud 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Mendikbud.
- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wicaksono, Herwin. 2009. *Kreativitas dalam Pembelajaran Musik*. Cakrawala Pendidikan.
- <http://www.beritasatu.com/budaya/306521-tumbuhkan-nasionalisme-generasi-muda-lewat-seni-dan-budaya.html>.

PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Syamsul Arifin

syamsula.jpok@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional bertujuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 tahun 2003. Kegiatan-kegiatan yang muncul dalam pola kesamaan pendidikan didasarkan pada rumusan tujuan pendidikan nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam bentuk kurikulum. Materinya perlu diisi dari hasil studi empiris tentang harapan-harapan masyarakat mengenai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh para lulusan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tayangan televisi baik pemerintah maupun swasta telah memberitakan bahwa sering terjadi kekerasan, geng motor, tawuran antar pelajar dan lebih memilukan lagi adalah tawuran antar mahasiswa, padahal mahasiswa merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian sering pula kita melihat suatu pertandingan sepak bola yang awalnya tertib aman dan lancar

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan JPOK FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

namun di tengah-tengah jalannya pertandingan sering terjadi adu mulut antara wasit dan pemain, antara pemain dengan pemain yang bisa memicu terjadinya konflik antara penonton dan penonton, sehingga terjadilah keributan yang lebih besar, hal ini sebabkan lantaran masing-masing pihak kurang mengerti tentang arti dari nilai suatu pertandingan.

Banyak orang yang berpandangan bahwa kondisi demikian diduga bermula dari dunia pendidikan. Pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar memberikan kontribusi terhadap situasi ini. Mereka yang telah melewati sistem pendidikan selama ini (termasuk pendidikan dalam keluarga) kurang memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan kekacauan, sehingga anak-anak dan remaja selalu menjadi korban konflik dan kekacauan tersebut.

Sederetan distorsi olahraga terjadi akibat kurangnya implementasi nilai-nilai olahraga sangat memprihatinkan. Nilai-nilai olahraga seperti, sportivitas, tanggung jawab, peduli, jujur, *fair play*, disiplin, kerjasama merupakan indikator luhur yang dapat melahirkan prestasi yang diiringi sikap-sikap dan mental yang baik pula. Jika semua itu diterapkan maka pelaku olahraga akan menjadi figur panutan, menang dengan sportif, menang dengan jujur, menang dengan keunggulan, dan dapat menerima kekalahan dengan terhormat. Semua nilai-nilai olahraga tersebut harus diterapkan oleh pelaku olahraga namun dalam kenyataan masih jauh dari harapan.

Distorsi olahraga yang terjadi telah mengakibatkan prestasi olahraga Indonesia semakin terpuruk. Oleh karena itu, Indonesia pada saat ini membutuhkan olahragawan yang memiliki mental dan kepribadian yang tangguh, penuh percaya diri, berani bertindak, dalam mengambil prakarsa, sehat, berkemampuan jasmani yang optimal, memiliki pikiran dan tindakan untuk setiap saat berjuang dalam mewujudkan prestasi olahraga yang tinggi.

Begitu pentingnya nilai-nilai olahraga maka banyak pihak menaruh harapan kepada pendidikan jasmani, meskipun dengan pendidikan jasmani memang tidak serta merta sejumlah persoalan di atas akan terselesaikan, akan tetapi melalui pendidikan jasmani banyak hal yang bisa diajarkan. Misalnya, terkait dengan nilai sportivitas, tanggungjawab, peduli, jujur, *fair play*, disiplin, kerjasama, adanya kesatuan dan persatuan, saling menghargai pendapat orang lain, mengembangkan kecakapan sosial (*social skills*) seperti toleransi dan

saling menghormati, yang kesemuanya merupakan prasyarat dasar mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Melalui pendidikan jasmani maka nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat ditanamkan secara nyata dalam praktek sehari-hari.

Pendidikan jasmani (penjas) sebagai bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Penjas di sekolah mempunyai peran unik di banding bidang studi lain, karena melalui penjas selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Kurikulum penjas 1994 meskipun telah dievaluasi dan diadakan penyempurnaan dalam prosedur penilaiannya yaitu menghilangkan nilai teori. Hal ini tidak akan memecahkan permasalahan penjas di lapangan, justru akan menambah permasalahan, karena menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai oleh penjas di sekolah, yaitu pengembangan aspek fisik, psikomotor, kognitif, dan afektif secara total. Dalam era reformasi sekarang ini, permasalahan yang harus ditanggapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak, khususnya dalam mereformasi bidang pendidikan perlu lebih mengedepankan kepentingan bangsa dengan cara mencarikan solusinya, dan tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, hal ini tiada habisnya. Oleh karena itu, terobosan baru perlu dilakukan khususnya terkait dengan masalah peningkatan kualitas pembelajaran penjas di sekolah.

Sebagai bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia tentu memiliki harapan-harapan dan visi ke depan guna memperbaiki kekurangan selama ini. Bangsa Indonesia menyadari ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber daya manusia kita jauh lebih rendah dari kualitasnya jika dibandingkan dengan negara-negara maju, bahkan dibandingkan dengan negara serumpun (ASEAN) sekalipun. Selayaknya kita terus berusaha memperbaikinya guna mengejar ketertinggalan itu. Jika tidak, di era global ini yang menjadikan sumber daya manusia menjadi keniscayaan dalam kompetisi, maka bangsa kita akan selalu menjadi pecundang.

Niat baik (*political will*) pemerintah sedikit demi sedikit mulai kita rasakan, melalui penataan di berbagai bidang. Diharapkan bidang pendidikan yang dianggap paling strategis dan urgen mendapat perhatian yang lebih, mengingat pendidikan membutuhkan kesungguhan dalam setiap segi penataan. Pendidikan

merupakan kunci kemajuan bagi masa depan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang handal mustahil dapat dipersiapkan hanya dengan modal seadanya.

Upaya pemerintah guna membenahi bidang pendidikan sebenarnya terus dilakukan. Seperti pengucuran dana bantuan yang harus sampai pada titik SDM-nya misalnya dengan diberikan dana bantuan kepada para siswa yang kurang mampu. Hal ini berarti bahwa perhatian pemerintah terhadap persiapan sumber daya manusia merupakan prioritas dan semakin mengarah pada fokus dan sasaran. Diharapkan hal ini tentunya bukan sekedar alat politis guna menghadirkan kesan bahwa menggunungnya hutang negara karena digunakan oleh rakyat.

Bukti lain yang menghebohkan dari perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan yaitu berkenaan dengan kesejahteraan guru. Setiap tahun kesejahteraan guru mendapat perbaikan, tentu sesuai dengan keadaan kemampuan keuangan negara. Kenaikan kesejahteraan guru itu diharapkan dapat mengimbangi fluktuasi nilai rupiah yang berkonsekuensi pada tingginya harga-harga kebutuhan hidup. Namun untuk perbaikan selanjutnya, hendaknya profesionalisme guru dapat dinilai dengan finansial secara proporsional sehingga tidak ada lagi pemero yang mencoreng nama baik bangsa.

Di masa yang akan datang, sekolah yang merupakan pusat kebudayaan dan kampus sebagai masyarakat ilmiah, keduanya merupakan pusat pembinaan budaya, di samping keluarga dan masyarakat yang perlu lebih dikembangkan lagi. Sekolah sebagai wadah utama untuk mengembangkan kebudayaan, yaitu mengembangkan perwujudan logika, etika, dan estetika, serta praktik sehingga peserta didik terbantu untuk menguasai pengetahuan, mampu mengadakan pilihan-pilihan hidup serta sanggup berkomunikasi secara tepat. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia pembangunan yang bertanggung jawab, menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dan dapat mewujudkan peradaban bangsa yang luhur.

Pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai tempat pendidikan pertama dan wahana sosialisasi perlu dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta.

Otonomi pendidikan yang berdimensi budaya bangsa harus dapat mengukuhkan kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan persatuan yang terdiri atas simbol-simbol dan pranata sosial. Dalam setiap kebudayaan terdapat simbol-simbol dan pranata yang menjadi nilai-nilai inti (*core-values*).

Simbol-simbol tersebut berasal dari kebudayaan asli dan kebudayaan yang telah dikembangkan termasuk kebudayaan yang datang dari luar sebagai nilai-nilai baru. Untuk itu nilai inti (*core-values*) tadi perlu ditanamkan penghayatan dan pengamalannya dalam menghadapi derasnya pengaruh budaya global baik melalui difusi maupun kontak langsung. Untuk mengatasi terjadinya kemerosotan mutu pendidikan dari segi pembentukan sikap dan perilaku manusianya, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain:

1. Mendidik/melatih kembali guru/dosen dengan pengetahuan budaya.
2. Menanamkan kesadaran pada penyelenggara pendidikan tentang arti pentingnya keteladanan mereka sebagai pamong,
3. Menanamkan kesadaran pada masyarakat akan arti pentingnya fungsi pendidikan dalam keluarga.
4. Perlu dikembangkan hubungan yang harmonis antara penyelenggara pendidikan dengan orang tua peserta didik.

Pendidikan jasmani sebagai bagian dari proses pendidikan memiliki peranan yang paling unik dibanding bidang studi lain, karena melalui pendidikan jasmani akan dapat dikembangkan secara sempurna baik aspek fisik, psikomotor, kognitif, dan afektif. Untuk merealisasikan tujuan tersebut seorang guru harus memahami hakikat penjas, pengertian dan tujuan penjas, hakikat dan proses belajar penjas tidak sebagai olahraga yang menekankan hanya pada masalah prestasi, namun lebih dari itu. Oleh karena itu seorang guru dituntut kreativitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa.

Disebutkan oleh Bucher dalam Sukintaka (2004: 16) bahwa pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran merupakan bagian integral dari pendidikan total mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat, dengan wahana aktivitas jasmani. Berarti dengan melakukan aktivitas yang teratur dan kontinu akan memperoleh peningkatan kesegaran jasmani dan diharapkan juga peningkatan pengetahuan

dan sikap (afektif). Dengan pendidikan jasmani di sekolah seyogyanya siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan maupun sikap positif mengenai aktivitas jasmani (olahraga) sehingga di luar jam pelajaran sekolah siswa mempunyai kompetensi untuk melaksanakan aktivitas jasmani.

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani berorientasi kepada pencapaian tujuan. Tujuan pendidikan jasmani yang kegiatan belajarnya lewat aktivitas jasmani meliputi pengetahuan dan penguasaan keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain) serta, pembiasaan pola hidup sehat/ membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun secara aktif melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran, yakni siswa diharapkan menguasai kompetensi-kompetensi yang akan mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan aktivitas secara fisik yang didesain oleh seorang guru pendidikan jasmani, murid belajar untuk mencapai tujuan pendidikan baik itu jasmani/ fisik, psikomotor, kognitif maupun afektif.

Peranan guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pendidik di antara murid-murid suatu kelas. Sebagai pendidik, maka guru sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran sampai dengan evaluasi berlangsung di dalam kelas. Mengenai pentingnya peranan guru, Bucher dan Krotee (2002: 34) menyatakan "*physical educators can and should be proud of the contribution they make to humankind*", guru adalah seseorang yang bisa membantu siswanya untuk menjadikan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kesenangan, dan kebermaknaan hidup serta produktif. Guru bertanggungjawab untuk mengatur, mengarahkan dan menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Untuk menunjang tugas guru tersebut perlu adanya manajemen dan pengelolaan kelas yang baik. Dengan demikian, diharapkan proses pengajaran mulai dari penyusunan program rencana pembelajaran sebagai pedoman tertulis bagi guru sampai dengan pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi dapat dicapai tanpa pemborosan waktu, tenaga, material, dan finansial.

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Artinya pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk (Mahendra, 2008: 15). Tetapi juga pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olah raga.

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-spritual-dan sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru harus dapat mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan atau olahraga, penanaman nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain) dari pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik mental, intelektual, emosional dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan pemeliharaan kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia.

“Pendidikan jasmani merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan melalui aktivitas jasmani yang disusun secara sistematis untuk menuju Indonesia seutuhnya” (Sukintaka, 2004:21). Pendidikan jasmani wajib diajarkan di sekolah, karena pendidikan jasmani memiliki peran yang strategis dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional dan sosial.

1.1 Integrasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Materi Pembelajaran Penjas

Penanaman nilai-nilai penjas harus diterapkan melalui praktek sehari-hari, misalnya seperti pada tabel berikut:

Materi	Strategi
Mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dengan teknik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempraktikkan keterampilan teknik bermain salah satu permainan olahraga bola besar secara sederhana serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri • Mempraktikkan keterampilan teknik bermain salah satu permainan olahraga bola kecil secara sederhana serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, kerja keras dan percaya diri • Mempraktikkan keterampilan teknik salah satu nomor atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja keras dan percaya diri
Mempraktikkan aktivitas ritmik menggunakan alat dengan koordinasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik tanpa alat dengan koordinasi gerak lanjutan serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan keluwesan, dan estetika
Mempraktikkan salah satu gaya renang dan loncat indah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mempraktikkan keterampilan salah satu gaya renang untuk pertolongan serta nilai disiplin, keberanian, kerja sama, dan kerja keras.
Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan yang sebenarnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar lanjutan dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri • Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola kecil lanjutan dengan peraturan sebenarnya serta nilai kerjasama, , kejujuran, menerima kekalahan kerja keras dan percaya diri • Mempraktikkan keterampilan atletik lanjutan dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri • Mempraktikkan keterampilan bela diri lanjutan secara berpasangan dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan kerja keras dan percaya diri

II. HAKEKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

2.1 Pengertian Tujuan dan Fungsi Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan jasmani memerlukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya.

Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan tubuh fisik dengan pikiran dan jiwanya.

Pendidikan jasmani sering didefinisikan dalam redaksi yang beragam, namun pada umumnya pandangan tersebut didasarkan pada bagaimana orang tersebut memandang manusia itu sendiri. Pandangan pertama yang sering juga disebut pandangan tradisional yaitu menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua komponen utama yaitu rohani dan jasmani. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata lain pendidikan jasmani hanya sebagai pelengkap saja.

Pandangan terhadap pendidikan jasmani seperti ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.4 tahun 1950 Bab VI pasal 9 sebagai berikut: "Pendidikan jasmani yang menuju keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat kuat lahir batin diberikan pada seluruh jenjang pendidikan" (Suherman, 2009: 3).

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan yang mengaktualisasikan seluruh potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindak dan karya yang diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Suherman (1997: 4) menjelaskan "Pendidikan jasmani sering diartikan sebagai bagian dari program pendidikan secara umum yang memberi kontribusi, terutama melalui pengalaman gerak, terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara menyeluruh". Definisi

tersebut didasarkan pada pandangan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia di mana jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Aktivitas jasmani dalam definisi di atas diartikan sebagai kegiatan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional mencakup kognitif, afektif dan sosial. Aktivitas tersebut harus dipilih dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Melalui kegiatan pendidikan jasmani diharapkan anak didik tumbuh dan berkembang secara sehat dan segar jasmaninya, serta berkembang kepribadian secara harmonis.

Dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk mendorong membimbing dan membina kemampuan jasmani dan rohani serta kesehatan siswa dan lingkungan hidup agar tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sehingga mampu melaksanakan tugas dirinya sendiri dan pembangunan bangsa (Kemendiknas, 2011: 41).

Batasan pendidikan jasmani yang ditetapkan oleh UNESCO dalam *International Charter of Psychology Education of Sport*, menurut Abdulkadir Ateng (1975) dalam Kemendiknas, (2011: 42) bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun seseorang anggota masyarakat yang melakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani serta kecerdasan kemampuan watak.

Selain mengubah perilaku anak didik, pendidikan jasmani melalui aktivitas-aktivitas jasmani senantiasa mengupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini Pangrazi dan Victor (1995:1) mengemukakan "*Physical education is a part of the total program that contributed primarily through movement experiences to the total growth and development of all children.*" Maksudnya adalah pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memberikan kontribusi, terutama melalui pengalaman-pengalaman gerak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara menyeluruh.

Melalui program pendidikan jasmani yang teratur, terencana, terarah dan terbimbing diharapkan dapat tercapai seperangkat tujuan yang meliputi pembentukan dan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Liputan tujuan itu terdiri atas pertumbuhan dan perkembangan aspek jasmani, intelektual, emosional, sosial dan moral spiritual.

Daryl Siedentop dalam Abduljabar (2010: 3) bahwa dewasa ini pendidikan jasmani dapat diterima secara luas sebagai model “pendidikan melalui jasmani”, yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya telaah pendidikan gerak pada akhir abad ke 20 ini dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. Jadi pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, dan melalui jasmani.

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan yang mengaktualisasikan seluruh potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindak dan karya yang diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Pendidikan jasmani terutama pengalaman gerak memberikan kontribusi yang dominan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara menyeluruh, sehingga pandangan terhadap kehidupan manusia bahwa antara jiwa dan raga tidak dipisahkan satu sama lain benar-benar dapat dibuktikan. Pendidikan jasmani adalah proses sosialisasi atau pembudayaan via aktivitas jasmani, bermain dan atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. Intisari pengertian pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan dengan menggunakan gerak sebagai media yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan motorik, sikap, nilai-nilai sosial, emosional dan intelektual. Pengertian ini sejalan dengan pendidikan jasmani yang pada intinya membina manusia seutuhnya yang meliputi aspek jasmaniah, intelektual, emosional, sosial, dan mental spiritual melalui pemanfaatan gerak yang teratur, terprogram, terkendali dan terarah dengan memperhatikan aspek manusia.

Pangrazi dan Dauer (1995: 27) menilai setidaknya ada lima tujuan pendidikan jasmani yang diselenggarakan di sekolah yaitu:

1. *motor skill and movement competences*, artinya kemampuan gerak dan keterampilan gerak.
2. *health-related physical fitness and wellness*, artinya kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan.
3. *human movement principles*, artinya kemampuan berasosiasi dan perencanaan diri yang positif.
4. *lifetime participation in activity*, artinya keikutsertaan beraktivitas selama hidup.

Tampak jelas, bahwa kependidikan dalam esensi pendidikan jasmani akan nampak terwujud penyediaan pengalaman belajar melalui tugas-tugas gerak yang dilaksanakan oleh peserta didik yang berorientasi secara menyeluruh serta mempunyai tujuan atau sasaran yang dicapai oleh siswa itu sendiri berdasarkan klasifikasi keterampilan, prinsip dan proses yang mendasari *performance* keterampilan tersebut.

Apabila tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar membantu siswa ke arah kedewasaan maka hendaknya program aktivitas bermain merupakan suatu kebutuhan yang esensial. Aktivitas bermain merupakan kegiatan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar sebab memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan mental, emosional, sikap spiritual, serta intelektual dan keterampilan fisik (*multilateral skill*).

Sedangkan Dauer dan Pangrazi (1989) dalam Kemendiknas (2011: 42) menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi terutama melalui pengalaman gerak, untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk setiap peserta didik.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran (pendidikan) melalui aktivitas jasmani (gerak) yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosional. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif setiap peserta didik.

Dengan pengertian yang sederhana, pendidikan jasmani bisa diartikan sebagai program pendidikan melalui gerak atau permainan dan olahraga. Dengan kata lain, bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanya sebagai medium atau alat untuk mendidik.

Fokus pendidikan jasmani adalah pada keterampilan peserta didik, bisa berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga berupa keterampilan emosional dan sosial. Oleh karena itu pendidikan harus memahami, bahwa proses dari pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga lebih penting daripada hasil. Sedangkan pengalaman belajar yang disajikan akan membantu siswa untuk memahami,

mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan yang aman, efektif dan efisien.

Dalam hal ini Dougherty dan Bonnano (1979) dalam Kemendiknas (2011: 44) menjelaskan bahwa filosofi pendidikan gerak menekankan pada:

- a. Partisipasi maksimum
- b. Keberhasilan tiap peserta didik
- c. Pemahaman gerak manusia
- d. Pemahaman potensi diri peserta didik
- e. Kreativitas
- f. Pertumbuhan mandiri

Dalam uraian di atas, pendidikan jasmani harus berfokus pada partisipasi peserta didik. Tanpa partisipasi aktif peserta didik, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik melalui aktivitas fisik yang diberikan pendidik adalah kunci utama penyelenggaraan pembelajaran pendidikan jasmani. Partisipasi aktif di sini dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana sebanyak mungkin siswa secara keseluruhan terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkesinambungan atau pengalaman-pengalaman belajar yang direncanakan untuk peserta didik dan diberikan oleh pendidik.

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani

Bukan hal yang baru jika pendidikan jasmani dipercaya sebagai suatu kegiatan yang mempunyai manfaat dalam pengembangan sifat-sifat manusia yang unggul, Dauer dan Pangrazi (1988) yang dikutip oleh Mahendra (1997: 1) seperti "keteguhan, daya juang, sportivitas, kejujuran, serta kemampuan bekerja sama." Ini tentunya suatu nilai lebih yang melekat pada pendidikan jasmani di samping kemampuannya dalam mengembang aspek-aspek psikomotor dan kognitif anak. Keyakinan terhadap nilai lebih itulah yang menjadi alasan mengapa pendidikan jasmani selalu menjadi bidang studi wajib bagi anak-anak sekolah dari tingkat Sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan pengembangan domain afektif, pendidikan jasmani di Indonesia baru sampai pada taraf perumusan ide-ide konseptual mengenai hal tersebut. Hingga sekarang manfaat yang dapat dipetik dari program pendidikan jasmani dalam kaitannya dengan domain afektif tadi masih selalu dipertanyakan. Yang menjadi kendala dalam hal tersebut,

ternyata bukan saja bersumber pada kelemahan para guru dalam memahami bagaimana pelajaran pendidikan jasmani dapat diandalkan sebagai alat pendidikan, melainkan lebih berkaitan dengan masalah-masalah mendasar dari pendidikan nasional yang masih belum memungkinkan para pendidik mampu menggali aspek-aspek unggul dari proses pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan jasmani.

Dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, guru harus memahami secara konseptual maupun operasional tentang tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. Tujuan pendidikan jasmani secara khusus untuk siswa Sekolah Dasar telah dirumuskan di dalam kurikulum SD mata pelajaran pendidikan jasmani (Depdiknas, 2003: 6-7) sebagai berikut:

- a. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai pendidikan jasmani.
- b. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama.
- c. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar pendidikan jasmani.
- d. Mengembangkan sikap positif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani.
- e. Mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam permainan dan olahraga.
- f. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani.
- g. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain.
- h. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan.
- i. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.

Dari rumusan tujuan pendidikan jasmani di atas pada hakikatnya kawasan pendidikan jasmani mencakup aspek organik, kognitif, neuromuskuler, perceptual, sosial dan emosional.

Tujuan pendidikan jasmani sering didefinisikan dalam redaksi yang berbeda-beda dari setiap ahli pendidikan Heterington (1910), William (1930), Adam (1959) dan Weston (1962), namun semua tujuan tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori seperti yang dikemukakan oleh Bucher (1964) dalam Suherman (2009: 7) yaitu:

- a. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang (*physical fitness*).
- b. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (*skillful*).
- c. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya.
- d. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan jasmani tersebut, maka beberapa aktivitas yang sering kali diberikan dalam suatu program pendidikan jasmani adalah aktivitas lokomotor, mengontrol objek, kesegaran jasmani, aktivitas sosial, permainan dan keterampilan olahraga.

2.1.3 Fungsi Pendidikan Jasmani

Adapun fungsi dari pendidikan jasmani adalah:

1. Aspek organik

- a. menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan.
- b. meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot.
- c. meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama.
- d. meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif lama.

- e. meningkatkan fleksibilitas, yaitu; rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera.

2. Aspek *neuromuskuler*

- a. meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot.
- b. mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap/mencongklang, bergulir, dan menarik.
- c. mengembangkan keterampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok.
- d. mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti; memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, memvoli.
- e. mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak, power, waktu reaksi, kelincahan.
- f. mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, soft ball, bola voli, bola basket, baseball, atletik, tennis, beladiri dan lain sebagainya.
- g. mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti, menjelajah, mendaki, berkemah, berenang dan lainnya.

3. Aspek perseptual

- a. mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat.
- b. mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di: depan, belakang, bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri dari dirinya.
- c. mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki.
- d. mengembangkan keseimbangan tubuh (statis, dinamis), yaitu; kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis.
- e. mengembangkan dominansi (*dominancy*), yaitu; konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan/kiri dalam melempar atau menendang.

- f. mengembangkan lateralitas (*laterality*), yaitu; kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri.
 - g. mengembangkan image tubuh (*body image*), yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang.
- 4). Aspek kognitif
- a) mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan.
 - b) meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika.
 - c) mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi.
 - d) meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani.
 - e) menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya.
 - f) meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan.
5. Aspek sosial
- a) menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada.
 - b) mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok.
 - c) belajar berkomunikasi dengan orang lain.
 - d) mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok.
 - e) mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.
 - f) mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat.
 - g) mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif.

- h) mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik.

6. Aspek emosional

- a) mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani
- b) mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton
- c) melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat
- d) memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas
- e) menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan (*Pojokpenjas.blogspot.com/2007/12/bab-i-pendahuluan-rasional.html* 9 Des 2007).

Sedangkan dalam menyusun perencanaan pengajaran ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti yang dijabarkan oleh Nadisah (1992) via Buhari (2009) dalam Kemendiknas (2011: 56-58). Faktor tersebut adalah:

a. Ranah Jasmani

Ranah Jasmani merupakan sasaran yang untuk meningkatkan kemampuan berfungsi normalnya sistem-sistem yang ada dalam tubuh, sehingga individu yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Sasaran dari ranah ini adalah kekuatan (otot), daya tahan, fleksibilitas atau kelentukan.

b. Ranah Psikomotor.

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan saran-saran yang berupa keterpaduan koordinasi antara sistem persyarafan dan sistem perototan untuk menghasilkan gerakan yang dinilai. Adapun rincian dari ranah ini adalah sebagai berikut: a). Kemampuan gerak perseptual, yaitu kemampuan menginterpretasi, merespon suatu stimulus (rangsang), b) kemampuan-kemampuan gerak fundamental yaitu keterampilan manipulatif.

c. Ranah Kognitif.

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan saran-saran yang bersifat intelektual dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan mengingat, memproses dan mengambil keputusan secara jitu dan tepat. Ranah ini terdiri dari: 1) pengetahuan, yaitu mengembangkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan, 2) kemampuan dan keterampilan intelektual.

d. Ranah Afektif.

Ranah ini untuk menggambarkan saran-saran yang berkenaan dengan pengembangan sikap dan pribadi anak didik untuk tetap langgeng dalam penyesuaian diri dengan budaya lingkungan. Rincian ranah afektif ini adalah sebagai berikut: 1) sikap merespon secara sehat terhadap aktivitas jasmani, seperti pengembangan reaksi positif, apresiasi terhadap pengalaman estetis, pengenalan potensi kegiatan, kemampuan untuk bisa menikmati aktivitas olahraga, dan menjadi penonton yang baik. 2) perwujudan diri yang mencakup sarana seperti menyadari akan tubuh sendiri, pengetahuan tentang kemampuan-kemampuan apa yang dapat diterima orang lain, dan kemampuan untuk menentukan tingkah aspirasi. 3) harga diri, yaitu persepsi diri yang merujuk pada keyakinan dasar individu secara utuh tentang dirinya atas dasar pengalaman-pengalaman yang lalu.

III. PENTINGNYA MEMBANGUN KEBANGSAAN

Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan dua hal yang utama yang perlu dilakukan bangsa Indonesia agar dapat mempertahankan eksistensinya. Keduanya seolah-olah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Pembangunan bangsa harus berbarengan dengan pembangunan karakter demikian pula sebaliknya. Hal ini pula yang tersirat dalam syair lagu kebangsaan kita “bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. Membangun jiwa adalah membangun karakter manusia dan bangsa. Inti karakter adalah kebajikan (*goodness*) dalam arti berpikir baik (*Thinking good*), berperasaan baik (*feeling good*), dan berperilaku baik (*behaving good*), Dasim Budimansyah (2010). Dengan demikian karakter itu akan tampak pada satu pikiran, perasaan, dan perbuatan yang baik dari manusia-manusia Indonesia atau dengan kata lain dari bangsa Indonesia.

Kita masih ingat bahwa ketika zaman Orde Baru, ada semacam penataran massal yang berlangsung di berbagai tempat, terutama di instansi-instansi pemerintahan, sekolah, dan kampus-kampus. Penataran massal itu bernama “Pendidikan Moral Pancasila”. Dengan penataran tersebut memiliki efek yang dahsyat dalam mengubah masyarakat Indonesia menjadi insan-insan yang bermoral luhur atau memiliki akhlak yang baik. Tetapi setelah orde baru digantikan dengan orde yang lebih baru, maka penataran massal itu pun menghilang. Terdengar ada sebuah konsep baru dalam menjadikan anak didik

dapat sekaligus dididik moralnya. Konsep baru itu bernama pendidikan budi pekerti. Namun, tidak sebagaimana penataran massal zaman Orde Baru, pendidikan budi pekerti ini hanya terdengar sayup-sayup dan sepertinya kurang mendapat tempat di dunia pendidikan di Indonesia (Ratna Megawangi, 2009).

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan *common denominator* dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.

Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari *belief system* yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Setiap kegiatan dalam negara harus berdasar pada hukum, dan setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum. Perlu kita sadari bahwa satu-satunya norma kehidupan yang diakui sah untuk memaksa warganya adalah norma hukum, hal ini berarti bahwa aparat pemerintah memiliki hak untuk memaksa, dan apabila perlu dengan kekerasan, terhadap warga negara yang tidak mau tunduk dan tidak mematuhi hukum. Memaksa adalah hak asasi aparat penyelenggara pemerintahan dalam menegakkan hukum.

Suatu negara yang tidak mampu menegakkan hukum akan mengundang terjadinya situasi yang disebut anarki. Sebagai akibat warga negara berbuat dan bertindak bebas sesuka hati, tanpa kendali, dengan berdalih menerapkan hak asasi, sehingga yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan. Dewasa ini berkembang pendapat dalam masyarakat, aparat yang dengan tegas menindak perbuatan warganegara yang mengacau dinilai sebagai melanggar hak asasi manusia, bahkan sering diberi predikat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kita perlu sadar bahwa negara-bangsa Indonesia dewasa ini sedang dijadikan bulan-bulanan dalam penerapan dan pembelaan hak asasi manusia. Negara dan bangsa Indonesia dibuat lemah tidak berdaya, sehingga kekuatan luar akan dengan gampang untuk menghancurkannya. Untuk menangkai pengaruh tersebut negara dan bangsa Indonesia harus menjadi negara yang kokoh, berpribadi, memiliki karakter dan jati diri handal sehingga mampu untuk menangkai segala gangguan.

Agar dalam penegakkan hukum ini tidak dituduh sebagai tindak sewenang-wenang, sesuka hati penguasa, melanggar hak asasi manusia, diperlukan landasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh rakyat. Landasan tersebut berupa cita hukum atau *rechtsidee* yang merupakan dasar filsafat yang menjadi kesepakatan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum mengejawantah dalam dasar negara, yang dijadikan acuan dalam menyusun segala peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan common denominator bangsa, kesepakatan bangsa, terbukti sejak tahun 1945 Pancasila selalu dicantumkan sebagai dasar negara. Pancasila dipandang cocok dan mampu dijadikan landasan yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum, dalam menjamin terwujudnya keadilan.

IV. SIMPULAN

Pendidikan jasmani (penjas) sebagai bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Penjas di sekolah mempunyai peran unik di banding bidang studi lain, karena melalui penjas selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Sekolah sebagai wadah utama untuk mengembangkan kebudayaan, yaitu mengembangkan perwujudan logika, etika, dan estetika, serta praktik sehingga

peserta didik terbantu untuk menguasai pengetahuan, mampu mengadakan pilihan-pilihan hidup serta sanggup berkomunikasi secara tepat. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia pembangunan yang bertanggung jawab, menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dan dapat mewujudkan peradaban bangsa yang luhur.

Adapun fungsi dari pendidikan jasmani adalah :

- 1). Aspek organik
- 2). Aspek *neuromuskuler*
- 3). Aspek perseptual
- 4). Aspek kognitif
- 5). Aspek sosial
- 6). Aspek emosional

Guru penjas dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani supaya memperhatikan lingkungan fisik sebagai tempat pembelajaran, seperti adanya lapangan untuk berolahraga yang cukup luas, agar siswa merasa aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas gerak, hal ini bisa membangkitkan sensasi menarik yang kuat secara psikologis bagi siswa untuk melakukan berbagai gerakan seperti lari, melompat bahkan bisa bermain dengan leluasa. Pembelajaran penjas lebih didominasi psikomotor, agar ranah afektif tidak terabaikan, maka aktivitas fisik atau gerak dalam pembelajaran pendidikan jasmani, mengandung nilai sikap perilaku berkarakter, kejujuran, disiplin, kerja sama, tanggung jawab dalam konteks pendidikan yang bersifat menyeluruh. Perlu diadakan kebijakan yang mengarah pada upaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga keteraturan dan ketertiban proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduljabar, B. 2010. *Landasan Ilmiah Pendidikan Intelektual dalam Pendidikan Jasmani*. Bandung: Rizqi Press.
- Bucher, Charles A & March L Krotee. 2002. *Management of Physical Education and Sport (12th ed.)*. New York: McGrawHill.

- Depdiknas. 2003. *Kurikulum 2004, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani*. Jakarta: Depdiknas.
- Dasim Budimansyah. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kemendiknas. 2011. *Pendidikan Karakter pada Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar.
- Megawangi Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter, Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: PBMIGAS Energy.
- Mahendra, A. 2008. *Asas dan Falsafah Pendidikan Jasmani*. Bandung: FPOK UPI dan Direktorat Pembinaan Diklat Ditjen PMPTK.
- Pangrazi, Robert Victor, Dauer P. 1995. *Dynamic Physical Education for Elementary School Children*, Eleventh Edition. USA : Massachusetts A. Division of Simon and Schuster, Publishing Company.
- Suherman A. 2009. *Revitalisasi Pengajaran Dalam Pendidikan Jasmani*, Bandung: CV. Bintang Warli Artika.
- _____ 1997. *Kajian Masalah Kurikulum Pendidikan Jasmani*. Konferensi Nasional Pendidikan Jasmani dan Olahraga, IKIP Bandung.
- Sukintaka. 2004. *Teori Pendidikan Jasmani: Filosofi Pembelajaran dan Masa Depan*. Bandung: Nuansa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.

PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS BERWAWASAN KEBANGSAAN

Utomo

bekantan_mtp@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study departs from the issues of the persons with disabilities that contraction in adaptive physical education who have national perspective, specially for them who are in paralympian candidate that still in school. The purpose of writing this articles are (1) Giving the new comprehension about inclusive education paradigm that brings the changes and inovation in contraction/adaptive physical education with national perspective. (2) Giving information to the teachers that's any new consequence as the impact of reforms in the contruction of the childern with special needs adaptive physical who have nation perspective. (3) Realizing of caring teachers to give contruction adaptive for childern with special needs who have nation to be better untill the international level like Paralympic Games. The expected result from this article is the realization of caring teacher to contribute in the contruction adaptive physical childern with special needs, so childern with special needs can contribute to the development of nation perspective.

Keywords: adaptive, children with special needs, disabillity, difable, paralympian.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Luar Biasa FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Mens sana in corpore sano, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.” Maksudnya jika raga seseorang sehat, maka jiwanya atau psikisnya akan sehat juga. Slogan ini patut untuk dipegang oleh para insan yang ingin menjaga kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menginginkan badan dan jiwanya sehat. Kesehatan mahal harganya. Manusia yang sehat akan menjadi modal seseorang untuk bisa produktif dan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Sebaliknya jika kesehatan seseorang terganggu, maka akan terhambat juga untuk bisa produktif dan kehidupannya pun akan terganggu. Itulah bukti bahwa kesehatan merupakan modal manusia yang tidak bisa dianggap enteng sehingga kesehatan harus selalu dijaga, diupayakan dan ditingkatkan seoptimal mungkin.

Hidup sehat merupakan dambaan dan hak bagi setiap manusia, termasuk didalamnya yang menyandang kebutuhan khusus (penyandang disabilitas). Peran pendidikan tentunya berkontribusi untuk menyiapkan generasi yang sehat baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Mereka yang termasuk anak kebutuhan khusus juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam pendidikan dalam rangka menuju generasi yang sehat sehingga anak berkebutuhan khusus pun diharapkan mampu turut serta dalam mengisi pembangunan sebagai salah satu wujud berwawasan kebangsaan. Tentu terdapat hubungan yang signifikan antara kesehatan seseorang dengan kemampuan untuk turut andil bagian dalam mengisi pembangunan. Masyarakat yang sehat akan lebih berpeluang untuk mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam mengisi pembangunan. Sebaliknya, masyarakat yang tingkat kesehatannya rendah, maka berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat ikut andil bagian dalam pembangunan. Bahkan bisa terjadi justru masyarakat yang tingkat kesehatannya rendah akan menambah beban bagi negara, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam laju pembangunan.

Seseorang yang berkebutuhan khusus tidak berarti “tidak sehat jasmani dan rohani”. Ketidaksehatan jasmani dan rohani tidak disebabkan oleh berkebutuhan khusus. Masyarakat awam seringkali menyamakan antara “tidak sehat jasmani dan rohani” termasuk di dalamnya berkebutuhan khusus (istilah lama penyandang cacat). Tentu pendapat itu salah dan tidak beralasan.

Penyandang berkebutuhan khusus dikatakan “tidak sehat jasmani dan rohani” jika kebetulan mereka sakit. Jika mereka tidak sakit, mereka tidak bisa dikatakan “tidak sehat jasmani dan rohani”. Memang tidak dipungkiri bahwa beberapa penyakit bisa mengakibatkan seseorang berkebutuhan khusus. Hal itu secara teori dikatakan hanya merupakan “Penyebab” bukan penyamaan arti.

Pendidikan jasmani yang diperuntukkan untuk menyiapkan generasi sehat bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus seringkali harus mengalami penyesuaian. Dalam khasanah keilmuan bidang olahraga maupun khasanah keilmuan bidang ke-PLB-an (Pendidikan Luar Biasa), penyesuaian seluruh kegiatan/komponen pendidikan jasmani tersebut dikenal dengan “Pendidikan Jasmani Adaptif”. Pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan jasmani yang diadaptasikan atau disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan jasmani adaptif juga bisa bermakna pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan modifikasi jika pendidikan jasmani tidak bisa dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus. Penyesuaian/adaptasinya dilihat dari kemampuan atau ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan jasmani yang disebabkan anaknya mempunyai hambatan. Jika anak masih mampu untuk mengikuti program pendidikan jasmani, maka bisa jadi tidak memerlukan adaptasi. Sebaliknya, jika anak tidak mampu untuk mengikuti program pendidikan jasmani yang disebabkan anak mempunyai hambatan, maka saatnya program jasmani tersebut memerlukan penyesuaian/adaptasi.

Mengapa anak berkebutuhan khusus memerlukan adaptasi dalam program pendidikan jasmani? Alasannya cukup banyak. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak dan kewajiban yang setara seperti halnya anak-anak lainnya, karena secara hakikat, mereka juga makhluk Tuhan yang mempunyai kesempatan yang setara untuk hidup sehat, produktif dan berhak serta berkewajiban pula dalam mengisi pembangunan. Hak dan kewajiban yang sama dalam bidang olahraga, bukan berarti anak-anak berkebutuhan khusus harus bisa mengikuti seluruh program-program pendidikan jasmani yang biasa dilakukan anak-anak pada umumnya tanpa kecuali. Jika yang terjadi demikian, maka ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi. Mereka oleh Tuhan dianugerahi hambatan (berkebutuhan khusus) yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tidak bisa mengikuti seluruh program kegiatan yang

diperuntukkan bagi anak-anak pada umumnya. Mereka memerlukan penanganan dengan menggunakan pendekatan "*social models*", di mana lingkungan yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan/kondisi anak berkebutuhan khusus. Bukan anak berkebutuhan khusus yang harus selalu menyesuaikan dengan lingkungan. Jadilah lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, agar mereka bisa berkembang layaknya anak-anak pada umumnya. Tanpa penyesuaian mustahil mereka bisa beraktivitas seperti yang dituntut dalam pendidikan jasmani. Solusinya anak berkebutuhan khusus memerlukan program pendidikan jasmani adaptif berwawasan kebangsaan.

II. PERGESERAN PARADIGMA PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF BAGI ABK BERWAWASAN KEBANGSAAN

Secara umum, pergeseran paradigma dalam pendidikan jasmani adaptif bagi ABK mengikuti pergeseran paradigma seluruh layanan pendidikan bagi ABK. Dalam artikel ini akan dibahas juga pergeseran-pergeseran paradigma layanan pendidikan tersebut karena pergeseran paradigma pendidikan jasmani adaptif ada di dalamnya.

2.1 Pergeseran Istilah

Ada beberapa pergeseran istilah yang dipakai dari paradigma lama menuju paradigma baru dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum tahun 1990-an beberapa istilah yang dipakai masih menggambarkan/menonjolkan keberadaan kelainan anak berkebutuhan khusus. Istilah-istilah yang dipakai pada masa paradigma lama misalnya untuk menyebut peserta didik yaitu dengan istilah anak cacat, anak berkelainan, anak tidak normal, anak luar biasa, penyandang cacat, dan ada juga yang menyebut penyandang anak berkelainan. Istilah-istilah tersebut saat ini (sekitar mulai tahun 1990-an) sudah tidak banyak dipakai karena beberapa istilah justru sering menimbulkan dampak negatif bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus. Istilah-istilah yang ada mengarah kepada "*labelling*" ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus. Dengan memakai istilah-istilah pada paradigma lama seperti halnya menganggap anak-anak berkebutuhan khusus tidak mempunyai potensi, yang ada hanya kelainan/kecacatan. Padahal kenyataannya tidak

demikian, anak-anak berkebutuhan khusus tetap mempunyai potensi walaupun di beberapa sisi mempunyai hambatan.

Masa kini, dunia pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus sudah mengalami pergeseran. Istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut peserta didik/individu yang berkebutuhan khusus mengalami pergeseran dan sepertinya hanya ada tiga istilah yang sering muncul, yaitu penyandang disabilitas atau boleh hanya dengan “disabilitas”, anak berkebutuhan khusus (ABK), dan difabel. Ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda tetapi saling berhubungan. Penyandang disabilitas (diambil dari Bahasa Inggris “*disability*”) yang berarti orang yang mempunyai keterbatasan. Istilah ABK (terjemahan dari *child with special needs*) diperuntukkan untuk menyebut mereka yang penyandang disabilitas, namun masih usia sekolah. Mengapa menggunakan istilah ABK? Paradigma baru memaknai mereka yang berkebutuhan khusus, pelayanannya difokuskan kepada “kebutuhan” anak, bukan membesar-besarkan keterbatasannya. Keterbatasannya perlu diketahui oleh guru hanya untuk proses mengatasi keterbatasan yang ada pada diri anak. Selain itu guru juga harus bisa mendeteksi potensi pada diri individu untuk dikembangkan secara optimal. Istilah difabel (*diffable*) sebenarnya berupa singkatan dari *different able*. Difabel adalah orang disabilitas yang dapat melakukan aktivitas tertentu, namun dilakukannya dengan cara yang berbeda. Misalnya, anak yang kehilangan kedua tangannya masih dapat menulis dengan memanfaatkan jari-jari kakinya atau mulutnya. Bagi anak-anak pada umumnya aktivitas menulis, alat tulisnya dipegang oleh jari-jari tangannya, namun bagi anak yang tidak mempunyai tangan, alat tulisnya (pensil atau bolpoin) dipegang oleh jari-jari kakinya atau memakai mulut.

Dampak pergeseran istilah untuk aktivitas pendidikan jasmani adaptif cukup membawa angin segar di dunia pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Pasalnya dari perubahan istilah tersebut ABK dimaknai sesuatu yang berbeda saja layaknya perbedaan pada setiap manusia, walaupun berbedanya dalam kategori perbedaan yang “ekstrim/mencolok”. Hal ini tidak menjadikan masalah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tidak dipandang dari segi keterbatasannya namun lebih banyak dipandang dari segi potensinya yang bisa dikembangkan walaupun dengan cara yang “adaptif”. Misalnya pelaksanaan dalam kegiatan olahraga, masih banyak olahraga yang bisa diikuti oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi

peserta didik. Para guru pun akan bisa lebih kreatif untuk memodifikasi dan menciptakan berbagai olahraga untuk ABK agar mereka tetap bisa mengupayakan badan dan jiwanya tetap sehat, berprestasi dan tidak dipandang sebelah mata. Target yang lebih jauh, ABK masih bisa menjadi warga negara yang mampu membela bangsa Indonesia melalui aktivitas dalam bidang olahraga adaptif sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu PG (*Paralympic Games*).

2.2 Pergeseran Layanan Pendidikan ABK

Dewasa ini dunia pendidikan luar biasa mendapatkan pengayaan paradigma baru dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Pola lama, anak-anak berkebutuhan khusus dididik dengan pendekatan segregasi. Pendekatan segregasi artinya anak-anak berkebutuhan khusus dididik dengan cara dipisahkan dengan anak-anak pada umumnya. Pendekatan ini memunculkan sekolah-sekolah khusus yang berlabel Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada tahun 1980-an ada pendekatan yang berusaha menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Pendekatan tersebut dikenal dengan model integrasi/terpadu, yang maknanya anak-anak berkebutuhan khusus digabungkan pendidikannya bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Pendekatan ini masih mensyaratkan bahwa yang boleh bergabung adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang mampu/bisa mengikuti kurikulum/sistem di sekolah reguler. Jika tidak mampu maka ABK harus bersekolah di SLB. Paradigma yang terbaru adalah munculnya paradigma pendidikan inklusif. Ada satu kesamaan dengan model integrasi yaitu ABK bergabung dengan anak-anak pada umumnya. Tetapi, sebenarnya kedua paradigma tersebut berbeda filosofinya. Filosofi paradigma pendidikan integrasi yaitu "anak diminta untuk mengikuti kurikulum/sistem yang ada di sekolah", sedangkan filosofi paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan bahwa "kurikulum yang harus mengikuti kebutuhan anak".

Paradigma pendidikan inklusif merupakan paradigma pendidikan yang paling ramah, sehingga mewajibkan semua sekolah tidak diperkenankan melakukan penolakan terhadap siswa walaupun siswa tersebut dalam keadaan/kondisi apapun (misalnya berkebutuhan khusus). Kalaupun ada persyaratan, namun menggunakan persyaratan yang wajar (sesuai dengan kaidah keilmuan), misalnya persyaratan usia, jarak terdekat dengan rumahnya. Semua anak sangat memungkinkan untuk belajar bersama dan mengembangkan kerjasama yang

harmonis antar siswa. Paradigma pendidikan inklusif diyakini menjadi paradigma yang paling ideal untuk mengentaskan semua anak bangsa dari kebodohan, karena pendidikan inklusif mengisyaratkan bagaimana semua anak bisa terlayani pendidikan sesuai dengan kebutuhan setiap individu peserta didik tanpa harus dipisah-pisahkan dan justru semua anak akan belajar untuk saling menghargai, saling memberi dan menerima yang merupakan amanah dari pendidikan karakter (Skjorten: 2003).

Pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru membawa implikasi pergeseran dalam layanan pendidikan jasmani adaptif bagi ABK. Paradigma lama menggambarkan anak-anak berkebutuhan khusus menjalani aktivitas pendidikan jasmani hanya bersama-sama dengan teman yang sesama berkebutuhan khusus. Paradigma pendidikan inklusif memberikan peluang yang setara kepada ABK berkesempatan beraktivitas olahraga bersama-sama dengan teman-teman sebayanya yang tidak menyangkut kebutuhan khusus. Mereka bisa berkolaborasi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain sesuai dengan perbedaan masing-masing individu. Bisa jadi implementasinya untuk ABK agak berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya yang tidak berkebutuhan khusus, hal ini seyogyanya harus dibiasakan. Membiasakan hidup dalam perbedaan adalah sebuah kewajiban. Justru hal ini akan menjadikan kekayaan/inovasi/ pengembangan pelaksanaan pendidikan jasmani. Anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus sepertinya lebih banyak dituntut untuk memahami mereka yang berkebutuhan khusus, dan bahkan di beberapa aktivitas perlu mengadakan penyesuaian, misalnya berolahraga bersama "volley duduk" dengan mereka yang mengalami kelainan kaki (amputasi/lumpuh). Betapa harmonisnya jika hal itu bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan.

Uraian perubahan paradigma pendidikan ABK di atas sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU nomor 20 tahun 2003) pada penjelasan pasal 15 dinyatakan bahwa "Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah". Peraturan di dalam penjelasan UUSPN No. 20 tahun 2003 tersebut mengatur bahwa pendidikan bagi ABK bisa dilaksanakan dengan model segregatif (satuan pendidikan khusus/SLB) atau bisa dilaksanakan secara inklusif.

III. KARAKTERISTIK, HAMBATAN DAN KOMPENSATORIS/PENANGANAN KHUSUS BAGI ABK

Pemahaman karakteristik, hambatan dan kompensatoris/penanganan khusus ABK menjadi persyaratan mutlak untuk mengimplementasikan gagasan pendidikan jasmani adaptif ABK. Persyaratan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan, melaksanakan dan menyusun bahan evaluasi pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif bagi ABK. Perlu dipahami bahwa setiap jenis ABK mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung *impairment* atau *disability*-nya. Karakteristik ABK akan membawa dampak *handicap* pada beberapa aktivitas ABK termasuk juga aktivitas yang berhubungan dengan olahraga jasmani. Hal ini berpengaruh terhadap adaptifnya jenis olahraga yang akan dilakukan oleh ABK. Tentu saja pengetahuan kompensatoris dan penanganan khusus ABK menjadi komponen yang tidak bisa diabaikan. Kompensatoris adalah pengalihan dari indera atau bagian tubuh yang terhambat (tidak bisa difungsikan) ke indera atau bagian tubuh lain yang masih bisa difungsikan untuk aktivitas tertentu. Sedangkan penanganan khusus diartikan sebagai penanganan/aktivitas tertentu untuk mengurangi/menghilangkan hambatan sebagai dampak dari *impairment* atau *disability*-nya. Berikut ini gambaran karakteristik, hambatan dan kompensatoris/penanganan khusus ABK, antara lain:

3.1 ABK dengan hambatan penglihatan

ABK dengan hambatan penglihatan sering dikenal dengan tunanetra. Tunanetra dibagi menjadi dua kategori, yaitu *blind*/buta dan *low vision*/lemah penglihatan. Karakteristik tunanetra yaitu mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan informasi visual sehingga tunanetra sering mengalami masalah dalam mobilitas dan konsep yang tidak utuh, terutama bagi mereka yang tergolong buta (tunanetra total). Tunanetra memerlukan kompensatoris ke indra lain selain visual, terutama bagi mereka yang kategori buta. Indra yang paling banyak menjadi pengganti fungsi visualnya yaitu indra perabaan, pendengaran dan kinestetik. Mereka yang masih tergolong *low vision* mempunyai karakteristik yang masih bisa memanfaatkan penglihatannya sesuai dengan berat ringannya sisa penglihatannya. Maka dari itu hambatan penglihatannya juga tidak sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Penanganan khusus yang diperlukan anak yaitu memaksimalkan sisa penglihatannya semaksimal mungkin (*sight enhancement*). Secara garis besar penyandang *low vision*

memerlukan adaptasi jarak, pembesaran, penyesuaian kontras, pemilihan warna dan perlu bantuan peralatan penglihatan baik optik maupun non optik.

3.2 ABK dengan hambatan pendengaran

Sebutan "tunarungu" sering menjadi istilah yang dipakai untuk menandai ABK dengan hambatan pendengaran. Tunarungu terdiri dari kategori tuli (tunarungu berat dan sangat berat) dan tunarungu yang masih mempunyai sisa pendengaran (tunarungu sangat ringan, ringan, dan sedang). Ukuran ketunarunguan memakai ukuran kekerasan suara yang disebut *desible* (dB). Karakteristik tunarungu berkuat pada dampak dari ketunarunguan yaitu terjadinya hambatan pendengaran yang mengakibatkan tunarungu akan bermasalah di bahasa dan komunikasi. Kompensatoris yang diperlukan adalah mengganti bahasa ujar ke bahasa visual. Ada tiga jenis komunikasi anak tunarungu (terutama kategori tuli) yaitu bahasa isyarat, bahasa bibir, dan komunikasi total. Tunarungu yang masih mempunyai sisa pendengaran membutuhkan adaptasi alat bantu pendengaran, adaptasi jarak dan adaptasi volume suara.

3.3 ABK dengan hambatan fisik/motorik/mobilitas

ABK dengan hambatan fisik motorik sering disebut tunadaksa. Karakteristik yang mudah ditemukan pada anak tunadaksa adalah mereka mempunyai masalah dalam motorik dan mobilitas. Mereka sangat memerlukan lingkungan yang aksesibel untuk mengatasi keterbatasan gerakannya. Kompensatoris yang diperlukan adalah bagaimana peralatan dan aktivitas yang ada dapat mengatasi keterbatasan fisik dan motoriknya. ABK jenis ini sangat banyak variasinya karena menyangkut fisik seseorang baik mereka yang mengalami kehilangan sebagian anggota tubuhnya, kelainan anggota tubuhnya, maupun karena ketidakfungsian anggota tubuhnya.

3.4 ABK dengan hambatan kecerdasan

Kecerdasan merupakan pusat beraktivitas seseorang. Artinya semua aktivitas manusia sebenarnya dipandu atau dikendalikan oleh otak. Jika seseorang mengalami kelainan atau hambatan kecerdasan, maka aktivitas manusia akan terpengaruh kurang optimal juga. Pada tingkat kecerdasan yang rendah, maka dampaknya akan lebih serius. Kelainan jenis ini sering disebut dengan hambatan kecerdasan atau dalam bahasa Sanskerta muncul istilah tunagrahita. Ada tiga kategori tunagrahita, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita

sedang dan tunagrahita berat. Ukuran ketunagrahitaan diukur dengan menggunakan instrumen/tes inteligensi baik menggunakan skala wishler atau skala binnet. Hambatan/karakteristik anak tunagrahita adalah mereka sulit untuk menerima pemikiran yang abstrak, pelajaran yang sulit dan sering menimbulkan perilaku *maladaptive*. Mereka memerlukan modifikasi kesederhanaan materi, kesederhanaan perintah, dan pemikiran yang dikonkritkan.

3.5 ABK dengan hambatan perilaku

Yang termasuk kategori hambatan perilaku adalah autis, hiperaktif, anak dengan gangguan konsentrasi, anak tunalaras dan beberapa dampak dari ketunagrahitaan. Hambatan perilaku bertitik tolak dari ketidaksesuaian dengan ukuran perilaku/kebiasaan umum yang normatif, misalnya ukuran anak hiperaktif adalah anak yang keaktifannya melebihi dari ukuran keaktifan anak pada umumnya. Penanganan khusus yang diperlukan bagi ABK dengan hambatan perilaku adalah modifikasi perilaku agar perilaku mereka mendekati perilaku yang normatif.

Pemahaman karakteristik, hambatan dan kebutuhan kompensatoris atau penanganan khusus ABK sangat diperlukan dalam program pendidikan jasmani adaptif. Tentu juga program-program lainnya yang dibutuhkan untuk perkembangan ABK. Kegunaan pemahaman tersebut adalah sebagai bekal untuk ketepatan menentukan seberapa membutuhkan penyesuaian terhadap aktivitas jasmani yang mengarah kepada kesehatan ABK. Yang perlu diingat adalah jangan sampai aktivitas pendidikan jasmani justru akan membuat ABK kondisinya malah semakin buruk.

IV. RUANG LINGKUP PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF BAGI ABK BERWAWASAN KEBANGSAAN

Pendidikan jasmani adaptif bagi ABK berwawasan kebangsaan mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pendidikan jasmani pada umumnya. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jasmani lebih banyak diarahkan untuk membuat jasmani dan rohani menjadi sehat (ilmu kesehatan). Hal ini juga diperuntukkan bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus. Secara garis besar ruang lingkup program pendidikan jasmani adaptif adalah:

1. Pengetahuan dan keterampilan tentang gizi/nutrisi.

2. Pengetahuan dan keterampilan menjaga kebersihan individu
3. Pengetahuan dan keterampilan menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan
4. Pengetahuan dan keterampilan berperilaku hidup sehat dan seimbang
5. Pengetahuan dan keterampilan olahraga adaptif

Ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif berawasan kebangsaan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah pengetahuan dan keterampilan olahraga adaptif sehingga ABK dapat berperan aktif membela negara melalui prestasi olahraga baik di tingkat nasional, Asia Tenggara, Asia, maupun tingkat dunia/ internasional. Hal ini karena aktivitas jasmani adaptif lebih banyak berkuat pada aktivitas olahraga.

V. RUANG LINGKUP ADAPTASI PENDIDIKAN JASMANI BAGI ABK BERWAWASAN KEBANGSAAN

Pendidikan jasmani adaptif pada dasarnya merupakan olahraga yang diperuntukkan bagi orang pada umumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi ABK karena mereka akan mengalami hambatan beraktivitas olahraga jika olahraga tersebut tidak disesuaikan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Winnick (2005) dalam sebuah konferensi, disebutkan bahwa *adapted sport encompasses "disability sport (e.g., deaf sport), which typically focuses on segregated participation in regular or adapted sport. Although disability sport terminology has been used as a term encompassing sport related to individuals with disability, adapted sport terminology is preferred for the following reasons."* Pendidikan jasmani adaptif bisa juga bukan merupakan adaptasi olahraga yang ada, namun menciptakan olahraga baru yang "inovatif" yang perencanaan dan pelaksanaannya mempertimbangkan karakteristik, hambatan dan kemampuan kompensatoris/program khusus ABK.

Atas dasar kedua wilayah tersebut (adaptasi jenis olahraga yang sudah ada dan penciptaan olahraga baru/kreatif) maka pendidikan jasmani adaptif memerlukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian pendidikan jasmani adaptif lebih ditekankan pada ruang lingkup pengetahuan dan keterampilan olahraga adaptif (nomor 5 pada bagian D), sedangkan ruang lingkup yang lain (*part-D*, nomor 1-4) tidak terlalu banyak menekankan penyesuaian. Penyesuaian bidang

olahraga diperlukan bagi ABK, karena hal ini termasuk dalam teori aksesibilitas, seperti yang diungkapkan oleh Tarsidi (2008) "Sesungguhnya para penyandang ketunaan tidak mengharapkan dan tidak pula memerlukan lebih banyak hak daripada orang-orang pada umumnya. Mereka hanya menghendaki agar dapat bergerak di dalam lingkungannya dengan tingkat kenyamanan, kemudahan dan keselamatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang normal, dapat semandiri mungkin dalam batas-batas kemampuannya." Ruang lingkup adaptasi olahraga yang diperlukan adalah sebagai berikut:

5.1 Adaptasi sarana dan prasarana

Adaptasi sarana dan prasarana dalam pendidikan jasmani adaptif sepertinya yang paling banyak mendapat kajian. Hal itu biasanya menjadi tolak ukur penyesuaian terhadap kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh ABK. Pengadaptasian sarana dan prasarana olahraga akan membawa perubahan/ adaptasi lainnya seperti adaptasi cara bermain, adaptasi peraturan permainan, adaptasi waktu yang dibutuhkan, adaptasi petugas olahraga yang mengawasinya, termasuk wasit dan adaptasi-adaptasi lainnya.

Satu contoh adaptasi sarana/paralatan olahraga balap sepeda yang diperuntukkan bagi tunadaksa yang lumpuh kaki yaitu sepedanya beroda tiga dan pengayuhnya bukan di pedal sepeda melainkan di kedua rodanya. Perhatikan gambar di bawah ini:



5.2 Adaptasi cara permainan

Olahraga yang diperuntukkan bagi ABK bisa jadi memerlukan adaptasi cara permainan. Hal ini sebagai dampak konsekuensi dari kebutuhan kompensatoris/ kebutuhan khusus ABK. Adaptasi cara permainan tentu saja berhubungan dengan adaptasi unsur lainnya, misalnya adaptasi peralatan

olahraga. Sebagai contoh adaptasi bidang olahraga angkat berat bagi penyandang tunadaksa. Satu cabang olahraga yang diperuntukkan bagi penyandang tunadaksa yang mempunyai ketidakfungsian bagian bawah badan (kaki) yaitu olahraga angkat berat. Cara permainan angkat besi mengalami perubahan dari cara olahraga angkat berat aslinya. Adaptasinya yaitu penyandang tunadaksa terlentang di papan angkat, kemudian cara mengangkatnya hanya cukup mengarahkan beban ke dada kemudian mendorong beban ke atas.



Gambar di atas hanya merupakan salah satu contoh adaptasi cara permainan angkat besi. Jenis olahraga dan jenis ABK yang memainkannya tentu masih banyak lagi. Setiap jenis olahraga dan peruntukannya bagi jenis ABK memerlukan adaptasi cara yang berbeda-beda. Pada prinsipnya penyesuaian cara permainan digunakan untuk mengatasi agar para penyandang disabilitas tetap bisa melakukan olahraga layaknya manusia pada umumnya walaupun dilakukan dengan “cara yang berbeda”.

5.3 Adaptasi peraturan permainan

Dampak dari adanya kelainan pada fisik, indra, maupun perilaku pada seseorang akan berpengaruh terhadap berubahnya peraturan permainan. Perubahan/adaptasi peraturan permainan juga dipengaruhi oleh sarana maupun sarana olahraga yang adaptif, meskipun perubahan peraturan permainan tidak selalui harus mengikuti perubahan/adaptasi peralatan. Misalnya permainan olahraga tenis meja bagi tunanetra. Selain lapangan, *bed*, dan bola yang dimodifikasi, maka beberapa peraturan permainannya juga ikut diadaptasikan, misalnya bola tidak boleh lewat di atas net, namun harus melewati bawah net.



5.4 Adaptasi waktu permainan

Adanya hambatan yang ada pada ABK bisa jadi memerlukan waktu yang lebih lama atau bahkan sebaliknya memerlukan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan permainan olahraga. Penyesuaian penambahan waktu yang dibutuhkan biasanya dikarenakan ABK tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permainan olahraga. Sebagai contoh permainan catur bagi tunanetra akan memerlukan waktu yang lebih lama karena tunanetra akan mendeteksi biji-biji catur dengan perabaannya. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mendeteksi biji catur dengan penglihatan dan mendeteksi biji catur dengan cara meraba akan membutuhkan waktu yang lebih lama.



Pendidikan jasmani adaptif pada prinsipnya untuk menjembatani agar para penyandang disabilitas dapat beraktualisasi diri dalam bidang olahraga. Ruang lingkup dan jenis adaptasi bisa berkembang ke komponen-komponen lain yang diperuntukkan dalam perkembangan olahraga jasmani adaptif. Masih banyak komponen lain yang belum sempat dibahas dalam artikel ini, seperti

adaptasi petugas olahraga, adaptasi lingkungan dan adaptasi-adaptasi lainnya sesuai dengan kebutuhan ABK dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

VI. PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA ABK BERWAWASAN KEBANGSAAN

Aktivitas keolahragaan akan selalu bersinggungan dengan apa yang dikenal dengan “berprestasi, juara, sportivitas.” Angan-angan setiap olahragawan/wati untuk berprestasi dan mendapatkan juara yang diraih dengan cara menjunjung tinggi sportivitas merupakan dambaan setiap olahragawan/wati. Hal ini tidak terkecuali bagi mereka yang menyandang disabilitas. Aktivitas olahraga adaptif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsensus olahraga nasional, bahkan skala internasional. Wadahnya pun telah terbentuk sejak lama walaupun secara berkala mengalami perubahan sebagai wujud perubahan tuntutan zaman yang terus berevolusi dan reformasi. Saat ini secara nasional wadah para atlet disabilitas untuk mengembangkan dan menyalurkan potensinya di bidang olahraga adaptif yaitu NPC (*National Paralympic Committee*) yang sebelumnya bernama BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat). NPC sebelumnya bernaung di bawah bendera KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan sejak tahun 2015 NPC secara resmi berpisah dengan KONI karena tuntutan organisasi olahraga disabilitas tingkat dunia menginstruksikan demikian, sehingga NPC berdiri sendiri dan sejajar dengan KONI (NPC: 2015).

Pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas seharusnya dimulai sejak dini, yaitu sejak usia kanak-kanak layaknya anak-anak pada umumnya. Pemahaman tentang pendidikan jasmani adaptif sebaiknya dimiliki oleh semua guru mulai dari PAUD/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA-SMK-MA/SMALB maupun mereka yang membina olahraga di perguruan tinggi. Olahraga disabilitas merupakan aktivitas yang cukup menjanjikan bagi para penyandang disabilitas dan bisa dijadikan salah satu bidang yang dapat memperbaiki kesejahteraan mereka, baik sejahtera lahir maupun batin. Sejahtera lahir, selain mendapatkan manfaat kesehatan para penyandang disabilitas bisa juga berprestasi sampai ke tingkat internasional. Bonus bagi olahragawan/wati penyandang disabilitas (dalam istilah di olahraga adaptif disebut *paralympian*) menanti untuk diraih dan bisa dijadikan tumpuan kehidupan.

Secara hierarki, even-even olahraga paralympic sudah terstruktur dengan baik mulai dari tingkat pelajar sampai ke tingkat internasional. Wadah

adu prestasi olahraga tingkat pelajar bagi penyandang disabilitas yaitu PEPARPENAS (Pekan Paralympic Pelajar Nasional). PEPARPENAS diperuntukkan bagi paralympian junior dan dijadikan ajang pembinaan tingkat pelajar. Bibit-bibit paralympian ini untuk selanjutnya bisa berpirah di olahraga prestasi tingkat nasional. Penyelenggaraannya bisa bersifat *single event* maupun *multi event*. *Multi event*-nya olahraga adaptif bagi penyandang disabilitas dikenal dengan PEPARNAS (pekan Paralympic Nasional) yang setara dengan PON bagi olahragawan/wati yang tidak berkebutuhan khusus (normal). Langkah karir paralympian berikutnya bisa memasuki jenjang APG (Asean Paralympic Games). APG menjadi even tingkat Asia Tenggara. Jika paralympian berhasil lolos di arena APG tingkat ASEAN maka paralympian bisa berkiprah di ajang Asia yang dikenal dengan singkatan yang sama yaitu APG (Asia Paralympic Games). Lolos di APG tingkat benua Asia, maka langkah yang paling ditunggu-tunggu oleh paralympian adalah bertanding di laga PG (Paralympic Games). PG adalah olahraga bagi paralympian di tingkat dunia, sejajar dengan olahraganya bagi atlet-atlet non disabilitas yaitu olimpiade.

VII. SIMPULAN

Hak bagi anak berkebutuhan khusus atau secara umum disebut penyandang disabilitas untuk dapat berkiprah disegala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang jasmani tentu saja secara hakikat setara dengan anak-anak lainnya. Mereka memerlukan kepedulian yang cukup dari seluruh komponen bangsa ini untuk berjuang menyetarakan kiprahnya dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sehat jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani bagi mereka pun harus dicarikan jalan terbaik. Konsep yang telah ada yaitu mereka memerlukan pembinaan dalam bidang pendidikan jasmani adaptif berwawasan kebangsaan.

Berkiprah memberikan layanan dalam bidang pendidikan jasmani adaptif berwawasan kebangsaan, para guru tidak hanya dituntut menguasai material bidang pendidikan jasmani saja, namun diperlukan pengetahuan bidang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan wawasan kebangsaan. Maksud dari wawasan kebangsaan dalam bidang pendidikan jasmani adaptif, yaitu melalui aktivitas keolahragaan maka penyandang disabilitas bisa berkiprah memberikan pembelaan bagi negara Republik Indonesia melalui prestasi

olahraga. Kebutuhan pengetahuan yang diperlukan adalah pengetahuan karakteristik, hambatan, dan kompensatoris serta penanganan khusus sebagai dampak dari kelainan yang ada pada ABK dan komponen-komponen pembelaan negara melalui bidang prestasi olahraga.

Perubahan paradigma layanan pendidikan ABK, juga membawa konsekuensi di sekolah umum, yaitu para guru yang biasanya hanya berkiprah untuk mendidik anak-anak reguler, saat ini dengan adanya paradigma pendidikan inklusif, penyandang disabilitas berkesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikannya di sekolah umum. Konsekuensi ini sebenarnya membawa angin segar bagi dunia pendidikan, terutama akan meningkatkan profesionalisme para guru. Tentu saja tenaga khusus yaitu GPK (Guru Pendidikan Khusus) perlu dihadirkan di sekolah reguler untuk ikut berkolaborasi mendidik ABK sesuai dengan haknya.

Pembinaan olahraga adaptif bagi ABK secara proporsional akan membawa calon-calon paralympian bisa berkiprah di tingkat pelajar, nasional, ASEAN, Benua Asia, bahkan sampai ke jenjang Paralympic Games tingkat dunia. Mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga bisa membawa nama baik bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selamat berpeduli dan berkiprah dalam dunia pendidikan jasmani adaptif yang berwawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. 1996. *Pendidikan Jasmani Adaptif*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Andam Zuriadi. 2010. *Peraturan Tenis Meja Tunanetra*, [Online]. Tersedia: <http://www.slbaykabsurakarta.blogspot.com>. [6 Juni 2010].
- Andersen, JK. 2000. "Pengaruh Ketunanetraan terhadap Fungsi Kognitif Anak Penyandang Ketunanetraan Bawaan" *Makalah*. Bali.
- Astati. 2001. *Pendidikan Luar Biasa di Sekolah Umum*. Bandung: Pendawa
- Auxter, D., et al. 2001. *Principles and Methods of Adapted Physical Education and Recreation-Ninth Edition*. New York: Mc Graw Hill.

- Elderly New. 2007. *Olahraga Adaptif* [online]. Tersedia: <http://www.sahabatlansia.blogspot.com>. [6 Juni 2010].
- Imam Y. & Utomo. 2015. *Pendidikan Inklusif Paradigma Pendidikan Ramah terhadap Anak*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Johnsen, B. H & Skjorten, M. D. 2003. *Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Mansur H. dkk. 2015. *Pedoman Pembelajaran Penjas Adaptif bagi Peserta Didik dengan Hambatan Pendengaran*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Mason H & Mc Call. 1997. *Visual Impairment Acces to Education for Children and Young people*, London: David Fultron Publishers
- NPC Kal-Sel. 2016. *NPC Merupakan Induk Organisasi Olahraga bagi Atlit Berkebutuhan Khusus* (online). Tersedia: www.npckalsel.com. [10 September 2016].
- Tarsidi D. 2008. *Aksesibilitas Fisik bagi Penyandang Ketunaan* (Online). www.didi-tarsidi.blogspot.com.
- _____. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Restindo Mediatama.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK MEMPERKUAT NILAI KEBANGSAAN

Wahyu, Mariatul Kiptiah, dan Mohammad Yamin

mariatulkiptiah@unlam.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan karakter dalam segala mata pelajaran sangat penting untuk dilakukan. Bahasa Inggris sebagai materi pelajaran mendesak untuk internalisasi pendidikan karakter dalam proses pembelajarannya. Kemendesakan tersebut untuk menjawab semakin meluasnya demoralisasi dalam kehidupan generasi bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter mencakup teks tentang budi pekerti; pengalaman seseorang; cerita tentang sejarah dan kehidupan sehari-hari; teks tentang sejarah dan kehidupan sehari-hari; materi tentang kehidupan sosial, agama, ekonomi, budaya dan lain-lain; materi tentang pejuang bangsa dan tokoh dunia; cerita tentang kancil dan buaya yang licik yang bermakna agar jujur; teks tentang kehidupan sosial dan sejarah; teks tentang etika dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari; materi yang mengandung nilai positif bagi siswa; cerita tentang amanah yang baik; teks tentang kedisiplinan siswa, kepedulian dan kebersamaan; teks mitos dan legenda; cerita daerah; cerita lucu yang mendidik, bernilai serta mengandung amanah untuk kebaikan sehari-hari; teks tentang pengembangan diri dalam bercakap dengan teman; dan teks tentang pelajaran hidup. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam mengajar adalah memasukkan nilai-nilai dalam bahasa Inggris; berdongeng secara kreatif; menyajikan teks yang mengandung nilai budi pekerti; memahami karakteristik siswa; mempraktikkannya serta menyimpulkannya; mengajar bahasa Inggris secara unik.

Kata kunci: pendidikan karakter, pembelajaran Bahasa Inggris, nilai kebangsaan

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** **Wahyu** dan **Mariatul Kiptiah** dosen Program Studi PPKn, dan **Mohammad Yamin** dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Membangun karakter bangsa (*nation-character building*) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara eksistensi suatu bangsa dan negara, maka tidak mengherankan jika diawal kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, telah menekankan prinsip berdaulat dalam politik, berdiri di kaki sendiri (Berdikari) dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Fattah, 2008: 3). Namun hingga kini karakter warga negara belum menunjukkan karakter yang baik, seperti terlihat dari banyaknya perilaku warga negara yang menyimpang dari nilai-nilai, moral, dan norma yang berlaku.

Budimansyah (2009), dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar FPIPS menyatakan bahwa: Secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Seperti yang tercermin dalam berbagai dokumen sejarah politik dan ketatanegaraan, sehingga pada mulanya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa penyabar, ramah, penuh sopan santun, tetapi sekarang berubah menjadi bangsa pemarah, suka mencaci, pendendam, kejam, dan sebagainya. Bila kondisi ini tidak segera diantisipasi, tentunya akan dapat mengancam stabilitas dan disintegritasi bangsa dan negara.

Oleh sebab itu, karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter berhubungan sangat erat terkait bagaimana seorang manusia harus mampu berperilaku baik kepada sesama. Kemampuan diri untuk berinteraksi dengan sesama dan semua secara konstruktif menjadi sebuah hal niscaya. Nilai terpenting dari pendidikan karakter secara implimentatif adalah ditampilkannya pribadi manusia yang mengedepankan kebersamaan, semangat menghargai satu sama selain dan praktik-praktik kehidupan yang baik lainnya (Mu'in, 2011).

Ketika pendidikan karakter dikaitkan dengan implementasi di sekolah, ini pun semakin menjadi sesuatu yang mendesak, mengingat Kemdikbud memberikan prioritas sangat tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Dengan

kata lain, pendidikan karakter menjadi suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Tentu, dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) perlu dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, sebut saja isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kemdikbud mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam olah hati atau *spiritual and emotional development*, olah pikir atau *intellectual development*, olah raga dan kinestetik atau *physical and kinesthetic development*, dan olah rasa dan karsa atau *affective and creativity development*. Dengan demikian, pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada *grand design* tersebut.

Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran pun menjadi penting. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dielaborasi, selanjutnya dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga

kependidikan, dan komponen terkait lainnya (Yamin, 2012). Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah (Yamin, 2009). Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Permasalahan pendidikan karakter yang selama ini ada pun perlu segera dikaji, dan dicari alternatif-alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan di sekolah (Muchtar Buchori, 1999).

Menarik apa yang disampaikan Minsih terkait hasil penelitiannya tentang pendidikan karakter yang berjudul 'Pendidikan Karakter Berbasis Kecersasan Majemuk dalam Membentuk Kemandirian Siswa SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Surakarta' (2012) yang menunjukkan bahwa internalisasi pendidikan karakter berbasis kecerdasan majemuk yang mencakup kecerdasan verbal-bahasa, kecerdasan kinestetik, kecerdasan gambar, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, kecerdasan logika-matematika, dan kecerdasan spritual kepada anak-anak didik memberikan dampak positif dan konstruktif. Itu terpantau dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Dalam implementasi pendidikan karakter, ada tiga pendekatan yang dilakukan, yaitu *inquiry-based learning* (pendekatan yang merangsang daya minat anak), *collaborative dan cooperative learning*, dan *integrated learning*.

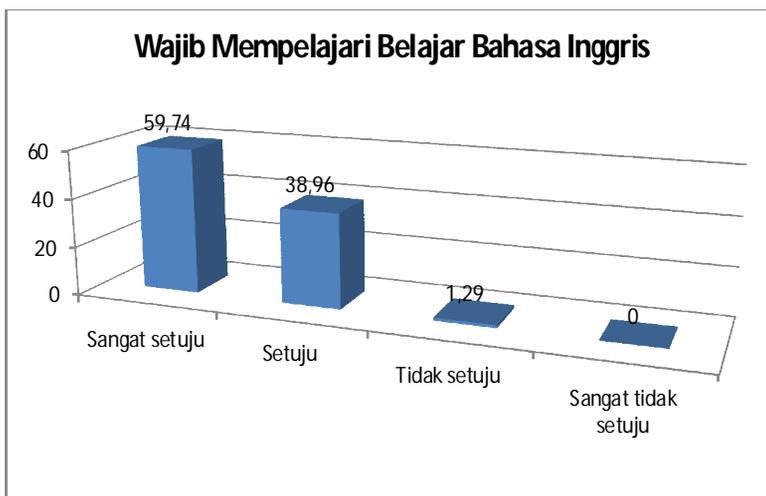
Sementara Buletin *Character Educator* yang diterbitkan oleh *Character Education Partnership* (<http://pondokibu.com/parenting/pendidikan-psikologi-anak/dampak-pendidikan-karakter-terhadap-akademi-anak/>, diakses 2 Februari 2013) menguraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri-St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah berbasis penerapan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter memperlihatkan penurunan drastis perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik.

Tentu, dengan mempertimbangkan dua hasil penelitian tersebut, peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian tentang strategi implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Inggris tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Banjarmasin.

II. PEMBAHASAN

2.1 Peta Sikap Pilihan Siswa tentang Bahasa Inggris dan Budi Pekerti

Gambar 1.1 Wajib Mempelajari Belajar Bahasa Inggris



Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Mempelajari bahasa Inggris menjadi sebuah tuntutan dan bisa disebut sebagai sebuah kewajiban bagi siapapun yang berkepentingan untuk berkompetisi dengan kelompok atau bangsa lain. Dengan belajar bahasa Inggris, ini setidaknya memudahkan cara berkomunikasi dan menyampaikan apapun yang dipandang sangat penting untuk disampaikan kepada pihak lain. Menurut data yang diperoleh yang kemudian dijelaskan dalam grafik di atas, para siswa sebagai subyek penelitian terkait pengembangan model pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMAN di Banjarmasin dengan jurusan IPS menunjukkan bahwa mereka menyebut mempelajari bahasa Inggris adalah sebuah kewajiban. Kewajiban dalam mempelajari bahasa Inggris menjadi sebuah penentu bagaimana pengembangan kemampuan dan kompetensi diri kemudian diarahkan dengan sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan di sekolah dan pada tingkat jangka panjang demi membangun siswa yang tidak hanya mampu memahami dan bisa berbahasa Inggris, namun lebih dari itu mereka kemudian menggunakan kearifan lokal dalam menggunakan bahasa

Inggris sebagai alat komunikasi. Berdasarkan data di atas, ada 59,74 persen yang menyebut sangat setuju bahwa belajar bahasa Inggris merupakan sebuah kewajiban. 38,96 persen menyatakan setuju bahwa belajar bahasa Inggris merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan 1,29 persen menyatakan tidak setuju dan 0 persen menyebut sangat tidak setuju bahwa belajar bahasa Inggris adalah suatu kewajiban. Ilustrasi jawaban yang mengatakan sangat setuju dan setuju belajar bahasa Inggris merupakan suatu kewajiban selanjutnya memberikan suatu jawaban bahwa sebenarnya semua anak didik dengan sampel yang ada tersebut meyakini bahwa mempelajari bahasa Inggris memiliki kegunaan sangat luar biasa bagi pembangunan kompetensi diri dalam kehidupan mereka. Belajar bahasa Inggris menjadi sangat strategis dalam pengembangan diri bagi masa depan mereka.

Gambar 1.2. Bahasa Inggris Bahasa Internasional

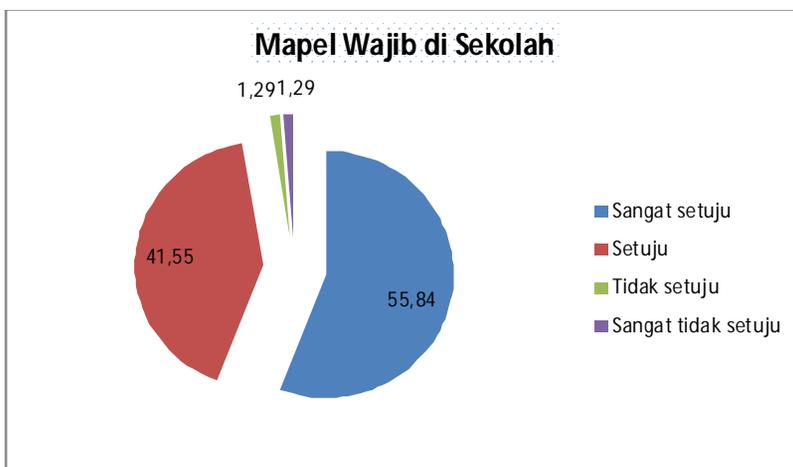


Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Berdasarkan grafik di atas, siswa kemudian berpandangan bahwa bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa internasional dimana persentase 61,03 menyebut sangat setuju; 36,36 persen menyatakan setuju; 1,29 persen menyatakan tidak setuju, dan 1 persen menyebut sangat tidak setuju. Ini berarti

bahwa hampir sebagian besar atau lebih dari 60 persen menyatakan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dimana kita semua wajib mempelajarinya sebagai bagian dari bahasa dan interaksi dunia. Ini kemudian sesungguhnya memberikan sebuah penjelasan substantif bahwa sesungguhnya ketika bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dimana semua bangsa di dunia menggunakannya sebagai bahasa dunia, kita semua dan para peserta didik memberikan pandangan bahwa mempelajari bahasa Inggris merupakan suatu kewajiban. Bahasa internasional dengan bahasa Inggrisnya kemudian menuntut semuanya untuk terlibat aktif dan partisipatif dalam mempelajari bahasa asing tersebut agar tidak tercecer dari interaksi dunia.

Gambar 1.3. Mapel Wajib di Sekolah



Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Mengenai mata pelajaran bahasa Inggris yang menuntut agar menjadi mata pelajaran wajib, para siswanya juga sangat setuju ditandai dengan persentase 55,84 persen; 41,55 persen menyatakan setuju; 1,29 persen menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sekolah dimana para siswa belajar cukup memiliki komitmen dan kepedulian sangat tinggi terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Mereka sudah beranggapan bahwa dengan belajar bahasa Inggris dan itu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah, mendorong siswa untuk semakin aktif belajar. Dengan menjadikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, ini kemudian semakin mendorong siswa

untuk tidak berhenti belajar dan mempelajari bahasa Inggris. Ada keinginan besar dari para siswa bahwa dengan bahasa Inggris sebagai wajib, ini mendesak mereka untuk tidak melewatkan setiap topik dan tema dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tentu, harapannya adalah mereka semakin rajin dalam belajar.

Gambar 1.4. Pentingnya Mempelajari Budi Pekerti di Sekolah

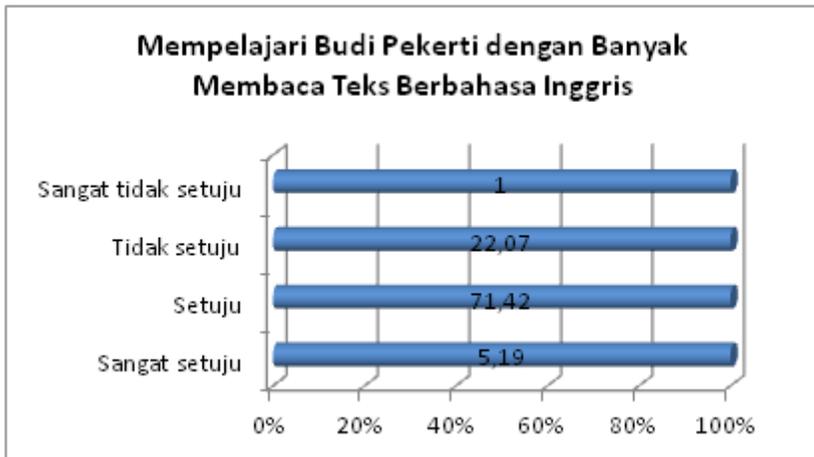


Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Muncul pertanyaan selanjutnya adalah apakah penting siswa belajar budi pekerti di sekolah, jawabannya adalah bahwa ada sebagian besar siswa dengan persentase 75,32 menjawab sangat setuju dan 23,37 persen menjawab setuju. Selebihnya, 1,29 persen menyebut tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Apabila membaca persentase jawaban sangat setuju berada di angka 75,32, kita kemudian memiliki pandangan yang sama bahwa ternyata budi pekerti dan mempelajari budi pekerti merupakan sesuatu hal yang niscaya. Sekolah sebagai kawahcandradimuka dalam mempelajari moralitas dan kebajikan sangat dituntut kehadirannya dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan serta kebajikan. Budi pekerti menuntun para siswa untuk mengenal yang baik dan buruk, etika dan tidak beretika dan begitu seterusnya. Penanaman nilai-nilai budi pekerti yang mengajarkan banyak hal tentang kebajikan dan kebaikan menjadi unsur pokok sekolah yang harus dilakukan sebagai miniatur kehidupan bagi anak didik. Dengan menghadirkan budi pekerti di sekolah, tentu siswa

selanjutnya dapat menjadikan segala contoh kebaikan tersebut untuk kepentingan jangka panjang kehidupan mereka ke depannya. Para siswa dapat mengambil banyak pelajaran dari penanaman budi pekerti baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Gambar 1.5. Mempelajari Budi Pekerti dengan Banyak Membaca Teks Berbahasa Inggris

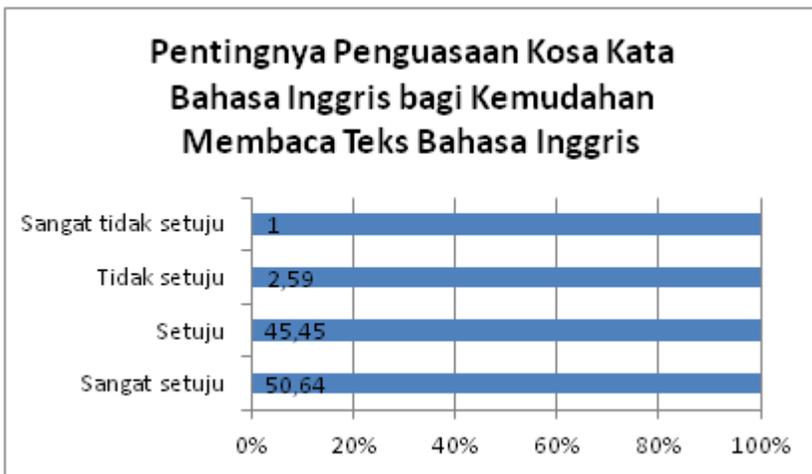


Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Pertanyaan selanjutnya adalah mampukah siswa mempelajari budi pekerti dengan banyak membaca teks berbahasa Inggris, jawabannya adalah 71,42 persen menyebut setuju atau mampu dan 5,19 persen menyebut sangat setuju atau sangat mampu. Namun yang cukup menjadi persoalan adalah ada 22,07 persen yang menyebut tidak setuju atau tidak mampu. Walaupun jumlahnya tidak banyak namun berada di angka 22 persen, ini sebetulnya cukup mengganggu proses belajar anak didik dalam menggunakan teks bahasa Inggris sebagai media mempelajari budi pekerti. Ini berarti bahwa mengajarkan budi pekerti melalui teks bahasa Inggris menyimpan persoalan tersendiri yang kemudian perlu mendapatkan penanganan secara serius dan terpadu. Membaca teks bahasa Inggris berbasis budi pekerti kemudian membutuhkan strategi tersendiri agar apa yang dibaca selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terukur terkait apa yang disebut budi pekerti. Barangkali, kita semua memiliki jawaban yang sama bahwa mempelajari budi pekerti dengan

menggunakan bahasa Indonesia lebih mudah, namun ketika masuk dalam bahasa Inggris, ini menjadi masalah tersendiri sebab membaca teks bahasa Inggris menuntut kemampuan pemahaman tersendiri dimana satu sisi harus mampu memahami bahasa asing tersebut dan di sisi lain harus mampu membaca makna di balik teks bahasa Inggris tersebut.

Gambar 1.6. Pentingnya Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris bagi Kemudahan Membaca Teks Bahasa Inggris



Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Muncul pertanyaan baru, seberapa pentingkah penguasaan kosakata bahasa Inggris bagi kemudahan dalam membaca teks berbahasa Inggris, maka jawaban responden kemudian jatuh pada sangat penting atau sangat setuju dengan persentase 50,64 persen dan setuju atau penting dengan persentase 45,45 persen. Ini berarti bahwa responden mengatakan bahwa tidak akan mungkin dapat mempelajari budi pekerti dalam teks bahasa Inggris tanpa memiliki kepenguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Logika jawaban para responden sangat sederhana namun tepat sasaran. Dengan demikian, penguasaan kosakata dalam konteks pemahaman komprehensif dan holistik terhadap teks bahasa Inggris untuk mendapatkan makna bacaan menuntut pembacanya untuk memiliki banyak perbendaharaan kosakata. Semakin banyak kosakata yang dimilikinya, ini akan semakin memudahkan dalam menerjemahkan makna teks bahasa Inggris tersebut baik yang dimunculkan

secara tersirat maupun tersurat. Tuntutan mendesak yang harus dilakukan menurut pandangan responden adalah hafalkan dan pahami setiap kosa kata bahasa Inggris yang ditujukan untuk memudahkan pemahaman teks berbahasa Inggris sebagaimana yang diinginkan.

Gambar 1.7. Sekolah Dimana Saya Belajar Menggunakan Teks Bahasa Inggris tentang Budi Pekerti

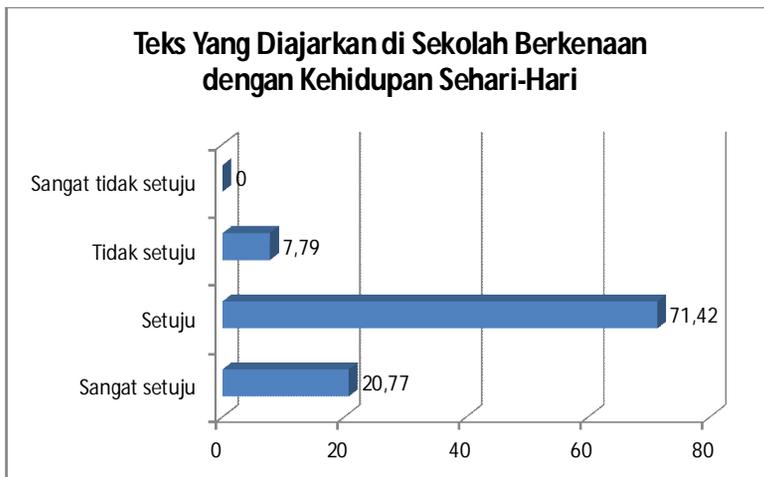


Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Selanjutnya adalah ternyata responden siswa juga memiliki pengalaman yang menarik ketika mereka belajar di sekolah. Data dalam grafik menyebutkan bahwa para siswa setuju menggunakan teks bahasa Inggris tentang budi pekerti di sekolah dimana data persentase tersebut berada di posisi 76,62 yang menyatakan setuju dan 18,18 yang menyatakan sangat setuju. Ini berarti bahwa sekolah sudah mulai mengakrabkan siswa dengan teks bahasa Inggris yang mengajarkan nilai kebaikan dan kebajikan. Harapan sekolah adalah agar siswa kemudian menjadi terbiasa dalam memahami teks bahasa Inggris berbudi pekerti yang kemudian diteruskan dengan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengalaman yang menarik bahwa sekolah menebarkan perhatiannya terhadap penanaman budi pekerti menggunakan teks bahasa Inggris menyimpan dua keuntungan. Pertama adalah membiasakan anak didik terhadap bacaan bahasa Inggris dan kedua adalah mereka mendapatkan

keuntungan dalam membangun kesadaran baru tentang budi pekerti itu sendiri sebagai modal hidup dan kehidupan. Budi pekerti sebagai nilai hidup dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dapat dipelajari secara bersamaan dengan hasil yang sama-sama diperoleh secara bersamaan pula. Ini merupakan sesuatu hal yang menarik dalam konteks perjalanan sekolah dan anak didik dalam dunia pendidikan.

Gambar 1.8. Teks Yang Diajarkan di Sekolah Berkenaan dengan Kehidupan Sehari-Hari

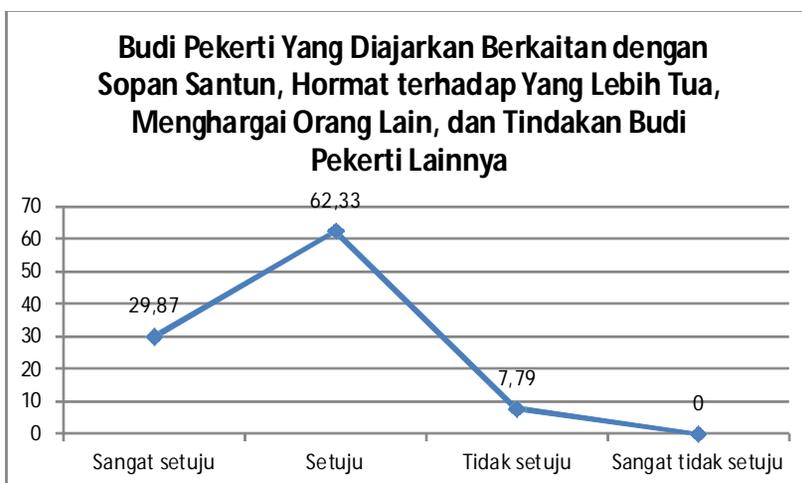


Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Selanjutnya, responden siswa juga menyebutkan bahwa teks yang diajarkan di sekolah berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, maka jawabannya adalah ada yang mengatakan sangat setuju sebesar 20,77 dan 71,42 menyebut setuju. Berdasarkan dua kategori setuju dan sangat setuju tersebut yang kemudian diakumulasi menjadi lebih dari 90 persen, ini menjadi penjawab atas semua pertanyaan sebelumnya bahwa responden siswa menghendaki agar teks bahasa Inggris yang berkenaan dengan penanaman budi pekerti harus berbasis kehidupan sehari-hari. Ini dimaksudkan agar apa yang mereka pelajari kemudian lebih mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang siswa dapatkan di sekolah kemudian dapat lebih praktis dan tepat sasaran ketika mereka berada dalam kehidupan nyata. Sekali lagi kita harus mengatakan sepakat bahwa kehidupan yang nyata bukanlah di sekolah, namun di tengah kehidupan yang

luas. Sekolah masih merupakan kehidupan masyarakat yang sempit dan terbatas atas ruang serta waktu; sementara kehidupan masyarakat di luar sekolah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ini berarti bahwa teks yang diajarkan di sekolah harus mampu merefleksikan atas segala realitas kehidupan nyata dimana penyederhaan teks sangat diperlukan bagi memudahkan pemahaman siswa tentang realitas hidup yang konkret dan nyata.

Gambar 1.9. Budi Pekerti Yang Diajarkan Berkaitan dengan Sopan Santun, Hormat terhadap Yang Lebih Tua, Menghargai Orang Lain, dan Tindakan Budi Pekerti Lainnya

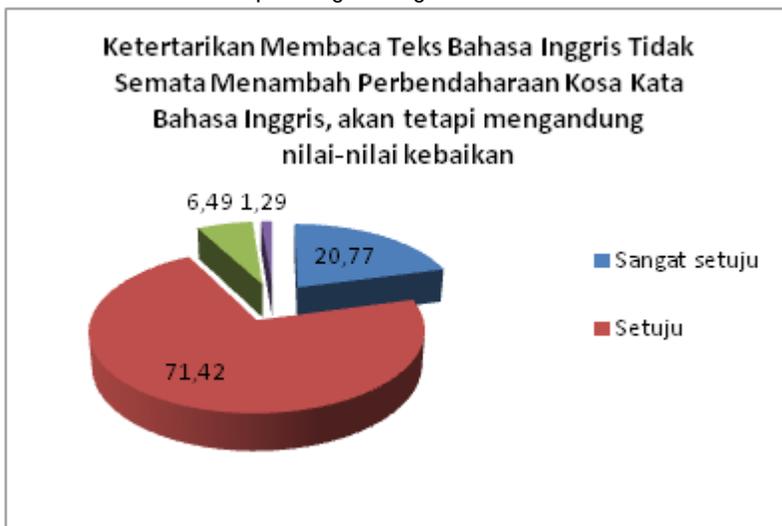


Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Ketika berbicara tentang budi pekerti, ini selanjutnya berkembang kepada pertanyaan baru yakni budi pekerti apakah yang harus dikembangkan dan diajarkan di sekolah. Jawabannya adalah budi pekerti terkait sopan santun, hormat kepada yang lebih tua, menghargai orang lain, dan budi pekerti lainnya. Atas dasar item budi pekerti tersebut, responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 29,87 persen dan 62,33 persen mengatakan setuju. Ini berarti bahwa responden siswa memiliki suatu pandangan yang cukup positif dan membangun bahwa sesungguhnya nilai-nilai budi pekerti tersebut harus dipelajari, dibangun dalam alam kesadaran para siswa, dan dilaksanakan dalam

kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut, teks bahasa Inggris yang dipelajari para siswa selanjutnya hanya sebatas kepada kemampuan kognitif, namun lepas dari tujuan awal bahwa belajar bahasa bukan semata kemampuan dan kompetensi berkomunikasi namun etika dalam kehidupan. Etika berbahasa tidak cukup untuk dipelajari, namun etika dalam berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus dipelajari baik secara teori dan dilatih secara praktik. Dengan demikian, ada tujuan kolektif yang dapat dicapai secara bersamaan tanpa meninggalkan hal-hal lain yang dituntut dalam tujuan pembelajaran di sekolah. Ini penting untuk dapat dipahami secara bersama, lintas sektor antara guru dan kepala sekolah yang kemudian perlu mendapatkan dukungan penuh dari orang tua siswa.

Gambar 1.10. Ketertarikan Membaca Teks Bahasa Inggris Tidak Semata Menambah Perbendaharaan Kosa Kata Bahasa Inggris, akan tetapi mengandung nilai-nilai kebaikan



Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016.

Muncul pertanyaan lanjutan bahwa responden siswa sangat setuju dengan persentase 20,77 persen bahwa mereka tertarik membaca teks bahasa Inggris bukan semata menambah perbendaharaan kosa kata bahasa Inggris, melainkan juga mengandung nilai-nilai kebaikan. 71,42 persen menyatakan setuju atas hal tersebut sehingga ini semakin memperkuat pandangan bahwa teks berbahasa Inggris memiliki dampak luar biasa bukan semata mengajarkan

siswa tentang bahasa Inggris namun juga mampu membangun kesadaran baru mengenai pentingnya pengalaman nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam teks bahasa Inggris. Atas dasar tersebut, teks bahasa Inggris berbasis budi pekerti sebetulnya merupakan kerangka belajar bahasa Inggris yang multi guna dan membawa asas kemanfaatan yang sangat signifikan bagi pembangunan kehidupan peserta didik ke depannya sehingga keterlibatan aktif dan partisipatif nilai-nilai budi pekerti dalam teks bahasa Inggris menuntut satu program pembelajaran terintegrasi demi pembangunan dan pengembangan pembelajaran yang konstruktif dan dinamis bagi tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia. Kita belajar bahasa bukan semata untuk lancar berbahasa namun yang lebih penting dari itu adalah kemampuan dan kompetensi berbahasa harus dilandasi dengan nilai-nilai budi pekerti.

Tabel. 1.1 Pandangan Siswa tentang Budi Pekerti

No	Pandangan Siswa tentang Budi Pekerti	No	Pandangan Siswa tentang Budi Pekerti
1	Kesadaran terhadap sikap dan perilaku	10	Kelakuan dan sikap yang menyeluruh dari seseorang
2	Pemikiran, watak, tabiat dan perilaku	11	Perilaku atau akhlak baik yang dimiliki manusia
3	Tata krama dan sopan santun	12	Tindakan yang dapat diterima masyarakat umum
4	Budi pekerti terkait kesopansantunan	13	Sikap yang menggambarkan seseorang
5	Tauladan yang baik dan ditiru dalam kehidupan sehari-hari agar membentuk kepribadian	14	Tuntunan sikap dalam kehidupan sehari-hari
6	Sopan santun, menghormati yang lebih tua dan menghargai sesama	15	Sikap atau perilaku yang berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat
7	Suatu tindakan/perilaku yang membentuk pribadi siswa	16	Sikap yang mencerminkan nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari
8	Sikap sadar terhadap perilaku sehari-hari	17	Sikap atau perilaku yang memiliki nilai positif bagi kehidupan
9	Pengajaran tentang sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari	18	Sikap atau perilaku seseorang terhadap orang lain, dan begitu sebaliknya

Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Tabel. 1.2 Pandangan Siswa terkait Teks Bahasa Inggris dan Budi Pekerti di Mapel Bahasa Inggris

No	Pandangan Siswa terkait Teks Bahasa Inggris dan Budi Pekerti di Mapel Bahasa Inggris	No	Pandangan Siswa terkait Teks Bahasa Inggris dan Budi Pekerti di Mapel Bahasa Inggris
1	Memberikan pemahaman langsung bagi siswa	11	Sangat baik dalam menambah wawasan dan pengetahuan siswa, selain dalam berbahasa itu sendiri
2	Mampu menanamkan budi pekerti	12	Bertujuan mempelajari budi pekerti melalui bahasa
3	Mendapatkan keunggulan tersendiri, yakni bisa belajar budi pekerti melalui bahasa Inggris	13	Baik dalam menanamkan budi pekerti dalam kehidupan sehari hari
4	Dimungkinkan membentuk perilaku kita menjadi lebih baik	14	Menjadi contoh perilaku dalam kehidupan sehari hari
5	Dapat membentuk kita berbudi pekerti dalam berbahasa	15	Memberikan pelajaran moral melalui bahasa Inggris
6	Tercipta generasi yang berbudi pekerti dalam berbahasa	16	Mengajarkan budi pekerti melalui bahasa
7	Menjadi hal positif bagi para pelajar dan dapat menerima pembelajaran sekaligus belajar bahasa Inggris dan budi pekerti	17	Membantu membentuk sikap siswa karena tujuan belajar bahasa bukan kepada kompetensi bahasa itu sendiri, melainkan pembentukan kepribadian diri siswa
8	Sangat membantu dalam menanamkan nilai nilai budi pekerti	18	Belajar menghormati orang lain melalui bahasa Inggris yang berbasis teks budi pekerti
9	Dapat memberi pelajaran lebih	19	Membentuk generasi yang berkarakter
10	Menyadarkan generasi muda untuk berbudi pekerti yang baik		

Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Tabel 1.3 Pandangan Siswa terkait Pentingnya Nilai Budi Pekerti dalam Mapel Bahasa Inggris

No	Pandangan Siswa terkait Pentingnya Nilai Budi Pekerti dalam Mapel Bahasa Inggris	No	Pandangan Siswa terkait Pentingnya Nilai Budi Pekerti dalam Mapel Bahasa Inggris
1	Menjelaskan budi pekerti melalui bahasa Inggris	9	Memberikan arah dalam melaksanakan nilai moral di kehidupan sehari-hari
2	Mengajarkan dengan budi pekerti sambil belajar bahasa Inggris	10	Bertujuan mempelajari bahasa dan kosakata yang benar dalam penggunaannya
3	Belum banyak materi tentang budi pekerti di dalam bahasa Inggris	11	Bertujuan untuk menarik minat siswa belajar bahasa Inggris
4	Sangat berpengaruh positif terhadap siswa	12	Bertujuan untuk mengenalkan dan mengetahui nilai-nilai budi pekerti
5	Sarana menanamkan budi pekerti	13	Bertujuan memberikan pengetahuan tentang nilai budi pekerti melalui bahasa Inggris
6	Menanamkan nilai budi pekerti dan mengajarkan bahasa	14	Membentuk siswa berperilaku baik tidak hanya di sekolah, namun di luar sekolah
7	Penting untuk membangun karakter siswa yang tangguh	15	Membantu dalam berbahasa yang santun
8	Memberi makna baru dalam kehidupan siswa		

Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Tabel. 1.4 Masukan Siswa terkait Peran Guru dan Sekolah agar Bahasa Inggris Dapat Memuat Teks Budi Pekerti

No	Masukan Siswa terkait Peran Guru dan Sekolah agar Bahasa Inggris Dapat Memuat Teks Budi Pekerti	No	Masukan Siswa terkait Peran Guru dan Sekolah agar Bahasa Inggris Dapat Memuat Teks Budi Pekerti
1	Sebaiknya mengajar dengan baik	22	Mengarkan dengan memasukkan nilai-nilai dalam bahasa Inggris
2	Menjelaskan secara jelas	23	Berikan perhatian kepada yang kurang paham
3	Gurunya harus baik	24	Berdongeng dalam kelas tentang kehidupan sehari-hari yang mengandung budi pekerti
4	Mengajarkan dengan metode berbeda	25	Mendongeng cerita rakyat yang memiliki nilai budi pekerti
5	Guru harus kreatif	26	Membuat pendekatan pembelajaran yang lebih baru dan kontekstual sesuai kebutuhan siswa
6	Mengajukan tanya jawab menggunakan bahasa Inggris yang memuat/teks tentang budi pekerti	27	Memasukkan nilai budi pekerti dalam teks
7	Lebih banyak mengajar di luar kelas	28	Sering mengajak siswa berdialog dan mengajarkan kosa kata yang benar
8	Banyak melakukan praktik berbicara/public speaking	29	Mengajar secara lebih serius
9	Sebaiknya mengajar dengan budi pekerti	30	Menyajikan teks yang mengandung nilai budi pekerti demi membangun pribadi siswa yang berbudi pekerti
10	Sebaiknya guru mengajar dengan jelas	31	Memperbanyak teks sosial
11	Guru harus mencari sumber lain/mencari referensi dari banyak buku agar tercipta siswa yang berbudi pekerti	32	Story telling yang menarik perlu digunakan dalam kelas bahasa Inggris
12	Sering mempelajari cerita-cerita yang mengandung makna kebaikan	33	Harus lebih memahami karakteristik siswa
13	Mempraktikkannya dengan mengajar dan memberikan contoh agar siswa lebih mengerti	34	Mengajar dengan beretika dan siswa mudah memahami
14	Tauladan guru menjadi hal penting dalam mengajarkan bahasa berbudi pekerti	35	Meminta siswa membaca dan memahami setiap teks yang dibaca serta menyimpulkannya
15	Mengajar bahasa Inggris secara unik sehingga pelajar tertarik untuk belajar	36	Mengingatkan dan memperbaiki satu sama lain
16	Saling bersikap sopan	37	Disiplin dalam belajar dan mengajar
17	Mengajarkan berbasis nilai-nilai hidup	38	Mengajar dengan penuh humor
18	Memberikan tugas kepada siswa tentang budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari	39	Mengajar dengan jelas dengan materi yang jelas
19	Mengajar dengan banyak berdialog	40	Latihan dan memberikan contoh kedisiplinan
20	Mempraktikkannya dalam kehidupan nyata	41	Guru mengajar dengan nyaman
21	Guru menceritakan pengalaman pribadi terkait nilai budi pekerti		

Sumber: Analisis Kuesioner Siswa, 2016

Bahasa Inggris dan Budi Pekerti di Mapel Bahasa Inggris sangat baik dalam menambah wawasan dan pengetahuan siswa, selain dalam berbahasa itu sendiri; membantu membentuk sikap siswa karena tujuan belajar bahasa bukan kepada kompetensi bahasa itu sendiri, melainkan pembentukan kepribadian diri siswa; belajar menghormati orang lain melalui bahasa Inggris yang berbasis teks budi pekerti; membentuk generasi yang berkarakter; menyadarkan generasi muda untuk berbudi pekerti yang baik; memberikan arah dalam melaksanakan nilai moral di kehidupan sehari-hari; bertujuan untuk mengenalkan dan mengetahui nilai-nilai budi pekerti; bertujuan memberikan pengetahuan tentang nilai budi pekerti melalui bahasa Inggris; membantu dalam berbahasa yang santun.

Selanjutnya, mengenai teks yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter mencakup teks tentang budi pekerti; pengalaman seseorang; cerita tentang sejarah dan kehidupan sehari-hari; teks tentang sejarah dan kehidupan sehari-hari; materi tentang kehidupan sosial, agama, ekonomi, budaya dan lain-lain; materi tentang pejuang bangsa dan tokoh dunia; cerita tentang kancil dan buaya yang licik yang bermakna agar jujur; teks tentang kehidupan sosial dan sejarah; teks tentang etika dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari; materi yang mengandung nilai positif bagi siswa; cerita tentang amanah yang baik; teks tentang kedisiplinan siswa, kepedulian dan kebersamaan; teks mitos dan legenda; cerita daerah; cerita lucu yang mendidik, bernilai serta mengandung amanah untuk kebaikan sehari-hari; teks tentang pengembangan diri dalam bercakap dengan teman; dan teks tentang pelajaran hidup.

Selanjutnya, mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam mengajar adalah mengajarkan dengan memasukkan nilai-nilai dalam bahasa Inggris; berdongeng dalam kelas tentang kehidupan sehari-hari yang mengandung budi pekerti; mengajarkan dengan metode berbeda; guru harus kreatif; lebih banyak mengajar di luar kelas; sering mengajak siswa berdialog dan mengajarkan kosa kata yang benar; menyajikan teks yang mengandung nilai budi pekerti demi membangun pribadi siswa yang berbudi pekerti; sering mempelajari cerita-cerita yang mengandung makna kebaikan; harus lebih memahami karakteristik siswa; mempraktikkannya dengan mengajar dan memberikan contoh agar siswa lebih mengerti; meminta siswa membaca dan

memahami setiap teks yang dibaca serta menyimpulkannya; mengajar bahasa Inggris secara unik sehingga pelajar tertarik untuk belajar; latihan dan memberikan contoh kedisiplinan.

Nilai karakter memiliki kaitan yang erat dengan nilai kebangsaan dan pandangan hidup Pancasila. Sikap nilai karakter merupakan salah satu tanda kebanggaan seseorang terhadap budaya bangsanya. Dengan menjadi seorang pribadi yang berkualitas, seseorang mampu membangun sebuah masyarakat ideal yang lebih otentik dan khas manusiawi. Kesadaran diri bahwa setiap manusia harus menjaga dan melindungi bangsa dan negerinya merupakan langkah awal bertumbuhnya nilai-nilai karakter dalam diri seseorang.

Variasi belajar ini dapat berupa membaca bahan rujukan, melakukan pengamatan, melakukan percobaan, mewawancarai nara sumber, dan sebagainya dengan cara kelompok maupun individual. Terselenggaranya variasi modus belajar para siswa perlu ditunjang oleh variasi modus penyampaian pelajaran oleh para guru. Kebiasaan penyampaian pelajaran secara eksklusif dan pendekatan ekspositorik hendaknya dikembangkan kepada pendekatan yang lebih beragam seperti diskoveri dan inkuiri. Kegiatan penyampaian informasi, pemantapan konsep, pengungkapan pengalaman para siswa melalui monolog oleh guru perlu diganti dengan modus penyampaian yang ditandai oleh pelibatan aktif para siswa baik secara intelektual (bermakna) maupun secara emosional (dihayati kemanfaatannya) sehingga lebih responsif terhadap upaya mewujudkan tujuan utuh pendidikan. Dengan bekal variasi modus pembelajaran tersebut, maka skenario pembelajaran yang di dalamnya terkait pendidikan karakter seperti contoh yang dapat dilaksanakan lebih bermakna.

Penempatan pendidikan karakter diintegrasikan dengan mata pelajaran tidak berarti tidak memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, perlu ada komitmen untuk disepakati dan disikapi dengan saksama sebagai konsekuensi logisnya. Komitmen tersebut antara lain sebagai berikut. Pendidikan karakter (sebagai bagian dari kurikulum) yang terintegrasikan dalam mata pelajaran, dalam proses pengembangannya haruslah mencakupi tiga dimensi yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses.

III. SIMPULAN

Secara global, siswa sebetulnya menghendaki agar pembelajaran bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter harus didekati dengan materi ajar yang mengajarkan profil tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam kehidupan, cerita lucu dan penuh amanah dalam rangka membangun pribadi siswa yang kuat dan jujur sehingga dengan demikian hasil yang dicapai dalam belajar bagi siswa adalah melahirkan para siswa yang memiliki kepribadian teguh dalam berpendirian, selalu menjunjung tinggi etika dan santun dalam kehidupan sehingga selalu mampu menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang toleran dan hormat kepada siapapun, terutama yang lebih tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Mochtar. 3 Mei 1999. *Kembalikan Otonomi Pedagogis kepada Sekolah dan Guru*. Harian Kompas.
- Budimansyah, D. 2009. *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FPIPS UPI.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Fattah, A. 2008. *Pembangunan Karakter Unggul Generasi Penerus bangsa*. Jakarta: PT Arga Publishing
- Minsih. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Kecerdasan Mejemuk dalam Membentuk Kemandirian Siswa SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Surakarta*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mu'in, Fatchul. 2011. *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Arruzz Media.
- Yamin, Moh. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.
- , 2012. *Sekolah yang Membebaskan: Perspektif Teori dan Praktik Membangun Pendidikan yang Berkarakter dan Humanis*. Malang: Madani.

NASIONALISME DAN TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA

Wisnu Subroto

wiswis96@yahoo.com

ABSTRAK

Satu kunci penting dalam keberlangsungan sebuah negara adalah nasionalisme. Pembangunan kesadaran nasionalisme dan pemupukan rasa nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui upaya penggalian dan penelusuran sejarah. Secara historis, hubungan antara nasionalisme dan demokrasi di Indonesia dapat ditelusuri jauh ke belakang, seiring sentralisasi kekuasaan yang berada di pusat ibukota Indonesia sejak kemerdekaan sampai era orde baru tumbang. Pemerintahan presiden Soekarno dan Soeharto yang militeristik menggambarkan suatu kekuasaan yang otoritarian. Kekuasaan ini tidak melihat ke bhinekaan yang berada di wilayah kepulauan Nusantara atau bisa dikatakan demokrasi yang berlangsung tidak mengakui keragaman dan pembagian kekuasaan namun yang terjadi adalah pemusatan kekuasaan.

Kata kunci: nasionalisme dan demokrasi.

* Dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober 2016.

** Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

I. PENDAHULUAN

Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban dan sepanjang waktu, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. (Kuntowijoyo, 2005).

Pada saat diskusi tahun 2001, Syafii Ma'arif menegaskan betapa bangsa Indonesia sedang mengalami krisis nasionalisme, krisis kebangsaan, setidaknya sedang mengidap ambivalensi dan ambiguitas tentang nasionalisme yang di masa lalu mampu menggerakkan rakyat untuk mencapai Indonesia merdeka. Bahwa ada kekhawatiran, nasionalisme menjadi usang oleh dominasi kapitalisme dan sebagian akibat formalisme paham kebangsaan oleh era demokrasi terpimpin dan orde baru di masa lalu.

Pada dekade awal abad ke-21 ini, nasionalisme dan nasionalitas di Indonesia menjadi fokus analisis para intelektual di dalam dan di luar negeri. Satu analisis barat, Profesor Robert I. Rotberg, direktur program konflik Jhon F Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat menegaskan bahwa krisis multidimensi di Indonesia membutuhkan solusi efektif dan cepat. Bagi Indonesia, sangat penting memiliki pemimpin yang kuat, visioner, dan *legitimate*. Ketiganya merupakan keharusan sebagai *conditio sine qua non*, mengingat Indonesia saat ini berada dalam zona bahaya atau zona merah dari sebuah negara bangsa lemah yang bergerak menuju negara yang gagal.

Dalam pandangan Rotberg, Indonesia akan selamat dan terlindung dari bahaya menjadi negara bangsa yang gagal, apabila memiliki kepemimpinan yang kuat dan visioner serta ada komitmen untuk membangun Indonesia dalam bidang ekonomi dan rekonstruksi sosial, khususnya dalam upaya penegakkan hukum. Rotberg juga berpendapat bahwa Indonesia akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa tahun mendatang dan memerlukan kepemimpinan yang berbobot dan kuat untuk menghindari terjadinya disintegrasi. Persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah perekonomian yang lemah dan tingginya eskalasi konflik sosial. Apabila konflik sosial tidak segera ditangani, Rotberg khawatir berlatarbelakang perbedaan etnis, agama atau bahasa akan berkembang terus menerus tanpa sebab yang jelas. Di sini perlunya penguatan pemerintah berdasarkan hukum desentralisasi tanpa perpecahan, sekaligus penguatan nilai-nilai secara nasional. Indonesia memiliki keuntungan

adanya sentimen nasional yang kuat tetapi sekaligus memiliki sumber-sumber yang potensial menciptakan instabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu perlu kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Ada empat kategori negara bangsa, yakni negara bangsa yang kuat, lemah, gagal dan runtuh. Fenomena kegagalan negara bukan hal yang baru di dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, dari jumlah 192 negara yang berada dalam transisi demokrasi, di antaranya banyak yang lemah dan menghadapi bahaya menuju kegagalan. Di antaranya telah gagal pada tahun 1990 dan beberapa negara telah runtuh. Negara-negara di dunia tidak dapat lagi mengambil jarak terhadap kebersamaan negara yang lemah atau gagal. Kegagalan negara tidak hanya berdampak pada keamanan dan kedamaian di negara yang bersangkutan, namun juga pada negara-negara tetangga dan mengganggu ketertiban dunia. Karena itu merupakan sesuatu yang imperatif bagi masyarakat internasional dan organisasi-organisasi multinasional untuk mencegah suatu negara menjadi lemah dan gagal. Kelemahan atau kegagalan negara berasal dari faktor-faktor fisik geografis, faktor sejarah akibat kesalahan-kesalahan pada masa kolonial, kebijakan luar negeri atau kesalahan lainnya. Namun, faktor utama yang menjadikan negara itu gagal adalah faktor manusianya. Keputusan-keputusan yang salah dan tidak cermat dari para pemimpin memberikan kontribusi yang besar terhadap kegagalan negara. Meminjam bahasa Rotberg, indikator negara yang kuat antara lain tingkat keamanan dan kebebasan yang tinggi, perlindungan lingkungan untuk menjadi pertumbuhan ekonomi, sejahtera dan damai, yang kesemuanya bisa dimungkinkan kalau ada pemimpin yang kuat dan didukung rakyat.

Sebaliknya negara-negara yang gagal cenderung menghadapi konflik yang berkelanjutan, tidak aman, kekerasan komunal, maupun kekerasan negara sangat tinggi, konflik etnis, agama dan bahasa secara terbuka, serta infrastruktur fisik dibiarkan rusak. Beberapa negara yang gagal seperti Yugoslavia, Irak, Sudan, Somalia, Suriah, Sierra Leon, dan Afghanistan. Negara-negara itu tidak memiliki penguasa dan otoritas di dalam batas-batas wilayah negara dan otoritas negara berpindah ke tangan panglima-panglima perang. Seolah-olah rakyat hidup tanpa pemerintahan, tanpa keamanan, dan tidak ada pembangunan infrastruktur fisik untuk masyarakatnya. Ada lebih dari 30 negara dalam kondisi lemah menuju gagal atau runtuh saat ini, antara lain di bekas wilayah Uni Soviet, Balkan, Afrika, Asia dan Amerika latin.

II. PLURALISME ATAU PLURALITAS

Ada dua ekstremitas dalam wacana dan strategi tentang pluralitas; di satu segi dipandang sebagai sesuatu yang dengan mudah diikat dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, di segi lain dipandang sebagai momok yang perlu diatasi dengan berbagai strategi politisasi. Keduanya meletakkan pluralitas sebagai stigma yang harus ditanggulangi. Kegagalan ekstremitas yang pertama terjadi setelah sekian lamanya bangsa dan negara Indonesia hanya mengandalkan pada ideologi dan doktrin dalam mengikat persatuan dan kesatuan NKRI. Pada saat ini, dalam era reformasi, rakyat disentak oleh kecenderungan dan kenyataan tentang betapa tidak cukupnya segala macam ideologi dan doktrin tersebut.

Betapa tidak memadainya BP7 dan penataran P4 dalam menjawab persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia modern abad ke XXI. Percuma saja kelompok nasionalis kanan meneriakkan doktrin dan ideologi dengan teriakan sekeras apapun dan setinggi apapun kepalan tangan diacungkan, karena dari waktu ke waktu ideologi dan doktrin cenderung mengalami kendur, mundur dan pelapukan. Kebenaran dalam sistem politik dan pemerintahan modern cenderung bersifat nominal induktif, bukan sakral deduktif. Pendekatan empirisme dalam politik dan pemerintahan terkait dengan kapasitas dalam penyelenggara pembangunan, bukan pada semboyan yang meninabobokan. Realitas politik dan pemerintahan menjadi lebih terkait pada kapabilitas, bukan pada kharismatik yang cenderung memanipulasi realitas yang ada ke dalam sakralisasi yang arkais.

Kegagalan ekstremitas kedua dalam mengatasi pluralitas berasal dari mereka yang berpikir secara strukturalis, bahwa dalam pluralitas yang ada hanyalah pertentangan sehingga sukar sekali diupayakan integrasi. Dengan kata lain, integrasi politik dalam masyarakat plural dipandang hanya mungkin diupayakan melalui paksaan atas dasar ukur-ukuran yang sengaja diadakan agar tindakan kursif tersebut tetap *legitimate*. Pendekatan strukturalisme ini dipergunakan oleh orde baru secara efektif sehingga meredam perbedaan dalam masyarakat plural tersebut tidak menjadi konflik manifes atau tidak meledak ke permukaan. Apa yang terjadi selanjutnya telah diketahui, berbagai perbedaan yang ditekan menjadi laten itu akhirnya berubah menjadi magma konflik yang mudah meletus dan memuntahkan lahar konflik yang panas dan membakar apa saja yang dilaluinya.

Pertanyaan yang menggelitik; mengapa pluralitas dipandang sebagai stigma, sehingga perlu tipuan ideologi dan doktrin serta penekanan secara kursif? Jangankan dalam hubungan sosial masyarakat, dalam hubungan orang perorang saja perbedaan selalu ada, bahkan saudara kembar identik, pasti ada perbedaannya. Perbedaan mudah meledak dalam konflik ketika perbedaan itu dijadikan senada dalam kerangka otoritarianisme kekuasaan dan sentralisme pemerintahan serta dalam slogan-slogan nasionalisme kanan yang sempit. Dengan demikian, penyebab pertama perpecahan dan konflik bukan semata-mata terletak pada pluralitas-primordial yang ada di masyarakat, melainkan lebih kepada cara-cara penanganannya oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang kurang tepat. Penanganan yang kurang tepat itu memunculkan gelombang reaksi ketidakpuasan masyarakat.

III. TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA

Bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami proses transisi demokrasi, benar-benar sedang berada dalam situasi kritis karena kini berada dipersimpangan jalan keselamatan atau kehancuran. Bila proses transisi ini tidak dapat dilalui dengan baik, maka ancaman yang dihadapi tidak saja proses disintegrasi bangsa (lepas wilayah tertentu dari suatu negara), tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya proses disintegrasi sosial atau hancurnya kerekatan sosial dalam masyarakat, demikian sosiolog Imam Prasodjo berpendapat. Apabila kerekatan sosial hancur, akan tumbuh *social distrust* (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok satu dengan kelompok yang lain dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan saling berusaha meniadakan. Dalam situasi ini, menurut Imam Prasodjo, tawuran massal gaya Thomas Hobbes, *war of all against all*, bukan lagi menjadi khayalan. Situasi yang penuh pertentangan di antara masyarakat itu dinamakan *state of nature*, dimana manusia saling bersaing dan berkompetisi tanpa aturan dan ketiadaan hambatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan apabila perlu membunuh dan menghalalkan segala cara untuk menguasai.

Pada tataran abstraksi ini, manusia dipandang sebagai serigala yang saling berkelahi untuk mendapatkan kebebasan atau makanan bagi dirinya. Jadi aturan yang adapun hanya dipergunakan agar tidak terjadi tindakan yang

mungkin menghancurkan diri sendiri, dengan kata lain "Suatu proses untuk memperoleh apa yang kita kehendaki ataupun mengelakkan apa yang tidak kita sukai" (Deliar Neor, 1980). Bagi Thomas Hobbes, cara yang paling efektif untuk menghentikan situasi itu dengan menciptakan suatu pemerintahan yang kuat agar mampu melakukan tindakan represi dan menegakkan aturan. Sosok pemerintah yang kuat itu digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang menyera mkan dari lautan dan setiap orang menjadi lemah dan takut berhadapan dengannya. Dengan itu, masyarakat dapat ditertibkan dan dikendalikan. Unikny, sosok itu sendiri dibutuhkan oleh masyarakat yang saling berkelahi itu untuk menciptakan ketertiban. Dalam nada yang lebih positif, John Locke, menggambarkan situasi yang mendorong manusia untuk melakukan kesepakatan di antara mereka sendiri untuk mengadakan badan sendiri yang mempunyai kekuasaan politik. Kedua pemikir ini dipandang sebagai peletak dasar teori-teori kontrak sosial yang populer di dalam alam pikiran barat.

Di Indonesia, konflik horizontal dan pertarungan kekuasaan antar elite politik baik yang berkedudukan di lembaga legislatif maupun eksekutif, telah menyeret kehidupan berbangsa dan bernegara ke dalam ketegangan yang berkepanjangan. Sekarang bangsa Indonesia memasuki periode kesempatan ke empat di dalam usaha menata diri sebagai bangsa-negara merdeka-modern berdasar tatanan demokrasi konstitusional. Itu artinya, 71 tahun yang lalu, kita telah menjalani tiga kesempatan dengan ciri-cirinya sendiri. Negara ini sudah pernah menggunakan empat Undang-undang Dasar Negara atau konstitusi, UUD 1945, UUD 1949 (negara federal), UUDS 1950 dan UUD 1945. Kesempatan pertama, setelah terlebih dahulu menjalani periode transisi perang mempertahankan kemerdekaan, 1945-1949, dengan sebutan periode Demokrasi Liberal (parlementer). Periode ini dijalani selama delapan tahun, 1950-1958. UUD yang berlaku ketika itu ialah UUD 1949 (negara federal) dan kemudian digantikan oleh UUD Sementara 1950. Paham liberal dan pengakuan pada sistem multipartai dan adanya oposisi terhadap pemerintah dimungkinkan dan diakui berdasarkan ketentuan UUDS 1950. Rupanya pemahaman terhadap demokrasi liberal waktu itu masih sangat dangkal. Pergantian kabinet pemerintah berdasar kebebasan dan oposisi terjadi tanpa memperhatikan kestabilan pemerintahan negara. Setelah 8 tahun berjalan kesempatan pertama ini berakhir. Selama berlangsungnya periode Demokrasi Liberal terjadi

ketidakpastian yang berlarut-larut dan Presiden Soekarno dengan langkah alternatifnya mengganti Demokrasi Liberal dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD. dengan itu bangsa Indonesia memasuki kesempatan kedua. Tetapi usaha melaksanakan demokrasi secara konstitusional terkendala. Tiga bulan kemudian, pidato kenegaraan Presiden, 17 Agustus 1959, dirumuskan menjadi GBHN. Penyimpangan konstitusi mulai terlihat; lembaga yang merumuskan dan menetapkan GBHN bukan MPR (S), melainkan DPA.

Kepemimpinan Presiden Soekarno yang bersifat kharismatis-otoriter secara pelan tapi pasti, berkembang dalam situasi yang melingkupi dirinya makin terbuka untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa otoriter. Pimpinan pada lembaga-lembaga kenegaraan, DPRGR, DPA, MA, diangkat secara terhormat sebagai menteri. Sama halnya lembaga-lembaga itu hanya sekedar sebagai pembantu Presiden. Setelah enam tahun berlangsung kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir. Demonstrasi mahasiswa yang didukung oleh ABRI pimpinan Jenderal Soeharto berhasil memaksa Presiden Soekarno meninggalkan kedudukan kepresidenannya.

Setelah masa transisi 1965-1967, Jenderal Soeharto menjadi presiden tahun 1968 menggantikan Soekarno. Dalam proses penggantian kepemimpinan itu terdengar semboyan untuk mengembalikan tatanan kehidupan demokrasi konstitusional. Semboyan "menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Seperti halnya Presiden Soekarno, maka Presiden Soeharto menampakkan sikap otoriter sejak periode awal kekuasaannya. Langkah-langkah yang nampak demokratis dilakukan, bahkan terencana. Atas nama Demokrasi Pancasila, pemilu mulai dilaksanakan sejak 1971 dan berkala setiap 5 tahun sekali sampai pemilu tahun 1997 sebelum kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto. Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada bulan Mei 1998 berarti bangsa Indonesia sudah menjalani tiga periode kesempatan untuk menciptakan tatanan demokrasi konstitusional.

Bangsa Indonesia masuk kesempatan keempat sampai sekarang (periode reformasi-pasca reformasi), Presiden Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil dan terbuka, (M.C. Ricklefs, 2005). Pada bulan November 1999, Habibie digantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kepemimpinannya menampilkan keterbukaan,

pluralisme, dan kecerdasan. Kekurangan secara fisik dan kurangnya pemahaman dalam tata pemerintahan menjadi keterbatasan Gus Dur dalam memimpin pemerintahan, yang terkadang bertindak seenaknya. Pada bulan Juli 2001, Gus Dur diberhentikan oleh MPR terkait isu Buloggate. Penggantinya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden yang kelima. Kasus demi kasus terus menghadang bangsa Indonesia, kasus pengeboman di Kuta, Bali tahun 2002. Terorisme inilah yang harus segera dihadapi pemerintahan Megawati, selain ekonomi yang masih tertatih-tatih. Pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yang dimenangkan oleh Letjend. Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Perubahan terjadi sangat mengesankan adalah banyaknya pemilih yang pindah dari partai yang mereka dukung, pengaruh tokoh-tokoh tradisional mulai melemah, pemilih memilih menurut pikiran mereka sendiri dan ada juga pemilih yang tidak ikut memilih (Gol-put). Ini berarti, demokrasi sudah mempunyai akar yang semakin dalam di Indonesia. Namun demikian, bangsa Indonesia sedang mengalami pembusukan (*decaying*), bukan hanya *political decay* tetapi juga *social economic decay*. Modal politik hancur akibat konflik para elite politik yang terkesan tidak tahu diri dan irrasional. Modal ekonomi meleleh akibat ketidakberesan dan ketidakmampuan para pengambil keputusan dalam mengelola perekonomian, sedangkan modal sosial terus menerus tergerus akibat krisis kepercayaan dari rakyat terhadap para pemimpin. Indonesia yang dilanda multikrisis dewasa ini memerlukan kepemimpinan nasional yang ikhlas dan komit untuk berkorban dalam semangat jihad untuk membangkitkan spirit, aktivisme dan intelektualisme beserta segenap rakyat untuk menyelamatkan reformasi total.

IV. NASIONALISME DAN KE-INDONESIAAN

Nasionalisme bangsa Indonesia terancam retak krisis multidimensi: krisis moral, krisis politik, krisis moneter, krisis sosial, krisis kebangsaan dan sebagainya. Nasionalisme bangsa Indonesia, sebagaimana kata Benedict Anderson, memang sedang diuji dan dipertanyakan. Masyarakat yang dibayangkan, meminjam wacana Ben Anderson, mengalami pengaburan karena mengalami berbagai krisis dan kesenjangan sosial kultural yang kontraproduktif. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya dipertanyakan, ditolak dan tidak dikehendaki. Mulai wilayah paling barat dan paling timur Indonesia, ada Gerakan Aceh

merdeka dan Gerakan Papua Merdeka (Anhar Gonggong, 2002). Kekinian bangsa Indonesia yang retak makin nampak jika menyebut rangkaian pertentangan yang saling bunuh membunuh dengan latar agama dan etnik seperti di Sambas-Kalimantan Barat, Ambon-Maluku dan di Poso-Sulawesi Tengah.

Organski membagi tahap perkembangan nasionalisme menjadi empat tahap, (Nasikun, 2002). Pertama, tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif. Kedua, tahap perkembangan politik industrialisasi. Ketiga, tahap perkembangan politik kesejahteraan nasional dan yang keempat, tahap perkembangan politik kemakmuran. Realitas politik Indonesia pasca Orde Baru justru menunjukkan adanya pertanyaan kembali tentang identitas bersama yang dibangun sebagai sebuah bangsa. Masalah integrasi di Indonesia nampaknya belum selesai. Nasionalisme Indonesia masih bergumul dengan etno-nasionalisme Papua dan Aceh. Titik temu dan titik pecah untuk sementara merambah jalan sejarah di kedua wilayah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dalam melihat benih-benih separatisme dan disintegrasi di wilayah itu, James Castle berpendapat otonomi daerah akan membuka peluang bagi solusi atas tuntutan-tuntutan daerah itu sehingga masalah daerah itu bisa dipecahkan (James Castle, 2002). Kecenderungan otonomi daerah, menurut Castle sangat sehat karena akan mengurangi secara tajam larinya orang-orang pandai di daerah ke Jakarta. Sudah tentu otonomi daerah ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Dalam konteks ini, isu nasionalitas atas persoalan Papua dan Aceh yang menyeruak kembali akhir-akhir ini menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa, untuk menyelesaikan krisis daerah dengan jalan demokrasi.

Untuk mempertahankan Papua dalam pangkuan NKRI, maka suatu politik identitas ke-Indonesiaan harus diwujudkan dengan membuka peluang dan ruang seluas-luasnya bagi otonomi untuk memungkinkan kesetaraan, aktualisasi dan penghayatan keragaman sosio-kultural masyarakatnya. Identitas politik Indonesia yang pro-demokrasi, pluralisme, HAM, toleransi dan keadilan sosial harus diimplementasikan oleh para elite nasional dengan nalar sehat, akal budi dan bahasa yang dapat dipahami oleh kelompok warga khususnya Papua yang sedang kecewa dan frustrasi.

Pada kurun 1930-an, Soekarno, Hatta dan Sjahrir, berkali-kali menegaskan bahwa persatuan dan kemerdekaan Indonesia akan tercapai bila

perbaikan nasib rakyat banyak, keadilan dan kesetaraan terwujud. Tanpa perbaikan nasib rakyat, keadilan dan kesetaraan itu, persatuan hanya akan menjadi persatean sekalipun dibawah kemerdekaan. Paralel dengan artikulasi dan sikap Soekarno, Hatta dan Sjahrir itu, maka dengan perbaikan nasib, kesetaraan dan keadilan sosial yang konkrit, maka kelompok yang ingin merdeka bisa merasakan identitas tumpah darahnya.

Dekonomisasi dan depolitisasi masyarakat era rezim Orde Baru jangan sampai terulang lagi karena pada gilirannya akan melahirkan pemberontakan dengan simbol-simbol kultural dan etnis. Di sini alasan-alasan baru bagi keberlanjutan *nation state* perlu diketemukan karena konsep *nation state* lama juga sudah usang, lagi pula globalisasi cenderung mengubur negara bangsa gagal karena nasionalisme palsu yang dikandungnya. Karena itu, reinventing alasan-alasan historis, sosiologis dan filosofis bagi berlanjutnya negara bangsa harus diupayakan. Kini Indonesia memerlukan tindakan kreatif dan penyegaran di segala bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar Gonggong. 2002. *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan: Pergumulan Antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka-Ciptaan*. Yogyakarta: Ombak.
- _____. 2002. *Indonesia di Simpang Tiga*. Yogyakarta: Ombak.
- Deliar Noer. 1980. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- James Castle. 2002. *Kumpulan Tulisan di Harian Suara Pembaharuan*. Sinar Harapan.
- John Locke. 1690. *Two Treatises of Government*. London: Tanpa penerbit.
- M.C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Nasikun. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Robert I. Rotberg. 2012. *Transformative Political Leadership: Making a Difference in the Developing World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Thomas Hobbes. 1668. *Leviathan, sive de materia forma dan protestate civitatis ecclesiasticae et civilis*. England: Tanpa penerbit.

PENYUNTING



Dr. Drs. Ersis Warmansyah Abbas, BA, M.Pd.,

dosen pada FKIP Unlam Banjarmasin. Lahir di Muaralabuh, Solok Selatan, 15 November 1957. Doktor Pendidikan (IPS) UPI Bandung (2013), Magister Pendidikan (Pengembangan Kurikulum) IKIP Bandung (1995), Sarjana Pendidikan (Sejarah) IKIP Yogyakarta (1980), Sarjana Muda Pendidikan Sejarah IKIP Padang (1978). Tamatan PGAN 6 Tahun Padang, PGAN 4 Tahun Muaralabuh dan SDN 1 Muaralabuh. Pernah kuliah di FK Filsafat UGM (1982), dan alumnus Pendidikan (Kursus) Teori, Metodologi dan Aplikasi Antropologi UGM (1993).

Tulisannya dimuat beberapa jurnal, dan atau, dipresentasikan pada berbagai seminar, baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya pada *5th UPSI-UPI Conference on Education*, Selangor Malaysia (2012) dan *Universiti Kebangsaan Malaysia* (2015). Untuk mendukung dan mengembangkan keprofesionalannya, Presiden Lembaga Pengkajian Kebudayaan dan Pembangunan Kalimantan (LPKPK), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Kalimantan Selatan (LPPPKS), dan Pusat Studi Sejarah dan Nilai Budaya Kalimantan Selatan (PSNBKS), mengikuti berbagai seminar dan *workshop* dalam berbagai bidang dan melakukan kerja sama penelitian dengan *Asia Foundation*, PT Djarum Kudus, Pemkab, Pemko dan Pemprov Kalimantan Selatan serta instansi lainnya.

Ratusan tulisannya dimuat berbagai media cetak, antara lain *HU Kompas*, *Sinar Harapan*, *Suara Pembaharuan*, *Kedaulatan Rakyat*, *Berita Nasional*, *Jayakarta*, *Pelita*, *Bandung Pos*, *Haluan*, *Radar Banjarmasin*, *Dinamika Berita*, *Banjarmasin Pos*, *Bandjarbaroe Post*, *Sinar Kalimantan* dan media cetak lainnya.

Pemimpin Umum *Bandjarbaroe Post* dan majalah *GAGAH* mengusung prinsip: **Tulis apa yang ada di pikiran bukan memikirkan apa yang akan ditulis.** Tulis apa yang hendak ditulis, pasti jadi tulisan. Publikasi harian tulisannya dapat diikuti melalui www.ersiswarmansyah.wordpress.com dan **facebook Ersis Warmansyah Abbas.**

Sebagai penyaluran kehendak menulis dan memotivasi berbagai kalangan untuk menulis, Ersis mendirikan dan mengembangkan Gerakan Persahabatan Menulis (GPM) berbasis dunia maya yang cabang daratnya berkembang di kota-kota Indonesia dengan pelibat di Singapura, Taiwan, Hongkong, Mesir, dan berbagai negara lainnya. GPM wilayah melakukan kegiatan menulis dan telah menerbitkan puluhan buku dan untuk itulah sering bergian ke berbagai kota dalam lakon *sharing* menulis atau pelatihan menulis.

Ersis Warmansyah Abbas menerbitkan beragam buku berbagai tema:

I. TENTANG MENULIS

1. ***Menulis Sangat Mudah.*** 2007. Yogyakarta: Mata Khatulistiwa.
2. ***Menulis Mari Menulis.*** 2007. Yogyakarta: Mata Khatulistiwa.
3. ***Menulis dengan Gembira.*** 2008. Yogyakarta: Gama Media.
4. ***Menulis Berbunga-Bunga.*** 2008. Yogyakarta: Gama Media.
5. ***Virus Menulis Zikir Menulis.*** 2008: Yogyakarta: Gama Media.
6. ***Menulis Mudah: Dari Babu Sampai Pak Dosen.*** 2008: Yogyakarta: Gama Media.
7. ***Menulis Tanpa Berguru.*** 2009. Yogyakarta: Gama Media.
8. ***Menulis Membangun Peradaban.*** 2009. Yogyakarta: Gama Media.
9. ***'Jatuh Cinta' Menulis.*** 2011: Bandung: Wahana Jaya Abadi.
10. ***Indonesia Menulis.*** 2011: Bandung: Wahana Jaya Abadi.
11. ***Suer, Menulis Itu Mudah.*** 2012: Jakarta: Elex Media Komputindo, KK Gramedia.
12. ***Percaya Ngak Percaya, Menulis Itu Mudah.*** 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
13. ***Mudah Menulis Memudahkan Menerbitkan Buku.*** 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
14. ***Menulis Menyenangkan.*** 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
15. ***Menulis Mudah Memudahkan Menulis.*** 2013. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
16. ***Indonesia Menulis: Perjalanan Spiritual.*** 2013. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
17. ***Menulis di Otak.*** 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
18. ***Menulis Menuliskan Diri.*** 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

19. **Menulis Mengasyikkan**. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
20. **Menulis Membangun Mindset**. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
21. **Menulis Menjinakkan Kegagalan**. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
22. **Menulis Menghancurkan Belenggu**. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
23. **Menulis Enjoy Enjoy Sajalah**. 2015. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
24. **Mengatasi Kesulitan Menulis**. 2016. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

II. FIKSI

1. **Surat Buat Kekasih**. Antologi Puisi. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
2. **Garunum**. Antologi Puisi (Bersama). 2006. Yogyakarta: Gama Media.
3. **Taman Banjarbaru**, antologi puisi bersama. 2006. Yogyakarta: Gama Media.
4. **Kolaborasi Nusantara**. Antologi Puisi (Bersama). 2006. Yogyakarta: Gama Media.
5. **Tajuk Bunga**. Antologi Puisi (Bersama). 2006. Yogyakarta: Gama Media.
6. **ASAP** (Novel). 2010. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
7. **Menjaring Cakrawala**. 2011. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
8. **Zikir Rindu**. 2011. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
9. **Deru Awang-Awang**. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
10. **Senyawa Kata Kita**. Antologi Puisi (Bersama). 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
11. **Astagfirullah**, Antologi Cerpen (Bersama). Bandung: Wahana Jaya Abadi.
12. **Bogor Kasohor**, Antologi Puisi (Bersama). 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

III. MOTIVASIONAL SPIRITUAL

1. **Nyaman Memahami ESQ**. 2005. Yogyakarta: Gama Media.
2. **Sabar, Ikhlas, dan Bersyukur: Melejitkan Potensi Diri**. 2013. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

IV. BUKU AJAR, PEMIKIRAN, DAN PENELITIAN

1. **Pemuda dan Kepahlawanan**. 1988. Bandung: Materpamur.
2. **Bab-Bab Antropologi**. 1996. Penyunting tulisan Fudiat Suryadikara. Banjarmasin: EWA Book Company.
3. **Memahami Sejarah**. 1997. Banjarmasin: EWA Book Company.

4. **Pembangunan Kalimantan**. 1998. Penyunting tulisan Ismet Ahmad. Banjarmasin: EWA Book Company.
5. **Perjuangan Rakyat Kabupaten Banjar dalam Revolusi Fisik 1945-1949**. 2000. Martapura: Pemkab Banjar dan LPKPK.
6. **Tanah Laut: Sejarah dan Potensi**. 2000. Pelaihari: Pemkab Tanah Laut dan LPKPK.
7. **Data Dasar Banjarbaru: Banjarbaru Menuju Metropolitan**. 2002. Pemko Banjarbaru dan LPKPK.
8. **Banjarbaru**. 2002. Banjarbaru: Pemko Banjarbaru dan LPKPK.
9. **Menguak Atmosfir Akademik**. 2004. Penyunting bersama Sutarto Hadi. Banjarmasin: FKIP Unlam.
10. **Menggugat Kepedulian Pendidikan Kalimantan Selatan**. 2005. Banjarbaru: LPKPK.
11. **Nyaman Memahami ESQ**. 2005. Yogyakarta: Gama Media.
12. **Sejarah Kotabaru**. 2010. Bandung: Rekayasa Sains.
13. **PDAM Bandarmasih: Primadona Kota Air**. 2010. Bandung: Rekayasa Sains.
14. **Mewacanakan Pendidikan IPS**. 2013. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
15. **Pendidikan Karakter**. 2014. Penyunting. Bandung: Niaga Sarana Mandiri dan FKIP-Unlam Press.
16. **Building Nation Character Through Education**. 2014. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi dan FKIP-Unlam Press.
17. **Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal**. 2015. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
18. **Ethnopedagogy**. 2016. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
19. **Pendidikan Sejarah, Patriotisme & Karakter Bangsa: Malaysia-Indonesia**. 2016. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
20. **Building Education Based on Nationalism Values**. 2016. Book I. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.
21. **Building Education Based on Nationalism Values**. 2016. Book II. Penyunting. Bandung: Wahana Jaya Abadi, dan FKIP-Unlam Press.

V. BIOGRAFI

1. **Buku Kenangan Purna Tugas M.P. Lambut**. 2003. (Editor Bersama). Banjarmasin: FKIP Unlam.

2. **Rudy Resnawan: *Untukmu Banjarbaru***. 2010. Bandung: Rekayasa Sains.
3. **Guru Sekumpul: *Biografi Pendidikan Profetik***. 2014. Bandung: Wahana Jaya Abadi.
4. **Guru Sekumpul**. 2014. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

VI TEMA BEBAS

1. **Masa Kecil Yang Tak Terlupakan** (Bersama). 2011. Malang: Bintang Sejahtera.
2. **Cinta Pertama: Kisah-Kisah Cinta Berhikmah**. 2012. Bandung: Wahana Jaya Abadi.

IV. PROSES TERBIT

Beberapa bukunya dalam proses penerbitan.

V. SEMINAR, SHARING, TALKSHOW, DAN PELATIHAN MENULIS

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, KAMMI Kalsel, Radio MQFM Bandung, Tahajud Call Bandung, Masjid Salman ITB Bandung, UIN Malang, Malang Post Malang, Universitas Pakuan Bogor, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Institut Keislaman Hasyim As'ari Jombang, Politeknik Negeri Banjarmasin, Politeknik Negeri Tanah Laut, Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Banyuanyar Pamekasan, Badiklad Pemprov Kalsel, LPMP Kalsel, SMA/MA, dan berbagai insitusi dan instansi.

PENYUNTING



Professor Madya Dato Dr Abdul Razak Ahmad, **15 Ogos 1962 di Temerloh, Pahang, Malaysia**. Profesor Madya, Jabatan Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor **Bidang Pengkhususan Sosiologi Pendidikan, Pendidikan Dewasa dan Pendidikan Sejarah**.

Anugerah & Penghargaan:

1. Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Pahang (A.M.P), 2002 Darjah Kebesaran Setia Mahkota Pahang (S.M.P), 2007.
2. Pemenang Anugerah Khidmat Masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia 2009 Darjah Kebesaran Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P. 2011).

Kelayakkan Akademik:

1. Ph.D Sosiologi Pendidikan, 24 April 2008, Universiti Malaya.
2. Ijazah Sarjana Sosiologi Pendidikan, 1998-1999, Universiti Kebangsaan Malaysia.
3. Diploma Pendidikan, 1991-1992, Maktab Perguruan, Sultan Abdul Halim Kedah, Malaysia.
4. Diploma Bahasa Arab, 1990, American University in Cairo.
5. B.A (Hons.) 1986-1987, Universiti Malaya.

Kurniaan dan Penghargaan:

1. Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Pahang (A.M.P), KDYMM Sultan Pahang, 24 Oktober 2001.
2. Darjah Kebesaran Setia Mahkota Pahang (S.M.P), KDYMM Sultan Pahang, 10 April 2007.
3. Pemenang Anugerah Khidmat Masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia 2009, Universiti Kebangsaan Malaysia, 7 Ogos 2009.
4. Anjakan Gaji (AG) bagi tahun 2010 (Penilaian tahun 2009), Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, 9 Ogos 2010.
5. Darjah Kebesaran Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P.), KDYMM Sultan Pahang, 24 Ogos 2011.
6. Perlantikan Sebagai Felo Penyelidikan Bersekutu Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan, Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan, 16 November 2011.
7. Perlantikan Sebagai Hakim Pertandingan Jurnal Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru (KKPG), Institut Pendidikan Guru, 31 Oktober 2011-1 November 2011.
8. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC), Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, 3 Mei 2013.
9. Pemenang Pingat Emas Karnival Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (K-Novasi) UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016.

Penerbit:

1. Maxwell Journal: **AbdulRazaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang. 2016. *Culturally Responsive Pedagogy: Socio- Educational Support and Coomunity Engagement for Educational Development of Abroginal Students*. DOI:10.15804/tner.2016.43.1.13. Index: Scopus. Jurnal Antarabangsa.
2. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahmad Ali Seman, Mohd Mahzan Awang & Fadzilah Sulaiman. 2015. *Application of Multiple Intelligence Theory to Increase Student Motivation in Learning History*. 7(1): 210219. ISSN: 1916-9663. Jurnal Antarabangsa.
3. Mohd Mahzan Awang, Noor Azam Abdul Rahman, Noraziah Mohd Amin dan **Abdul Razaq Ahmad**. 2015. *Mesej Perpaduan Dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 4 dan 5: Analisis Terhadap Peribahasa Melayu*. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 5(1):44-52. ISSN: 2180-4842. Jurnal Kebangsaan.
4. Norwaliza Abdul Wahab, **Abdul Razaq Ahmad**, Zalizan Mohd Jelas, Norshariani Abd Rahman, and Lilia Halim. 2014. The Role and

Perspectives of Administrators in the Schools of Orang Asli Students: A Case Study in the State of Pahang. *International Journal of Learning and Teaching* Vol. 1, No. 1. Jurnal Kebangsaan.

5. **Abdul Razaq Ahmad**, Najamuddin Hj. Bachora. Interaction for Unity among Trainee Teachers at Selected Teacher Training Institutes in East Malaysia. *IJUM Journal of Educational Studies*, 2:2. 2014. 5-21. ISSN: 2289-8085. INDEX: Google Scholar, DOAJ (Directory of Open-Access Journals), MyCite. Jurnal Kebangsaan
6. Ruslin Amir, Anisa Saleha, Zalizan Mohd Jelas, **Abdul Razaq Ahmad** & Hutkemri. 2014. *Student's Engagement by Age and Gender: A Cross-Sectional Study in Malaysia*. Middle-East Journal of Scientific Research 21 (10): 1886-1892. ISSN: 1990-9233. INDEX: ISI Thomson. Jurnal Antarabangsa.
7. Alfitri, Mohd Mahzan Awang dan **Abdul Razaq Ahmad**. 2014. *Culturally-Responsive Strategies for Resolving Social Conflict in Rural Community*. Mediterranean Journal of Social Sciences 5(20): 2267. Jurnal Antarabangsa.
8. Alfira, Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad** dan Mohd Khairi Ahmad. 2014. *Social-Educational Support And Arabic Language Practices Among Secondary School Students*. Journal of Language and Literature 5(3): 219-228. ISSN: 2078-0303. Jurnal Antarabangsa.
9. **Abdul Razaq Ahmad**. *Determination Of Teaching Aids And Methods To Inculcate Thinking Skills In History Subjects*. *Tawarikh International Journal For Historical Study*. Vol.5 (3) Oktober **2014**. ISSN 2085-0980. Aspensi Bandung Indonesia. Jurnal Antarabangsa.
10. **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang and Tajuddin Mohd Yunus. 2014. *Mentoring Practices In Schools: The Roles of Senior Subject Teachers as Perceived by Heads and Teachers*. Journal of Education and Sociology. 5(2): 65-75. ISSN: 2078-032X. Jurnal Antarabangsa.
11. Norwaliza Abdul Wahab, **Abdul Razaq Ahmad**, Zalizan Mohd Jelas, Norshariani Abd Rahman and Lilia Halim. 2014. *The Role And Perspectives of Administrators in the Schools of Orang Asli Students: A Case Study in the State of Pahang*. International Journal of Learning and Teaching. 1(1): 60-64. Jurnal Antarabangsa.
12. **Abdul Razaq Ahmad**, Najamuddin Hj. Bachora. 2014. *Interaction for Unity among Trainee Teachers at Selected Teacher Training Institutes in East Malaysia*. IJUM Journal of Educational Studies. 2(2):5-21. ISSN: 2289-8085. Jurnal Kebangsaan.

13. Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad** dan Mohd Muhaimi Abdul Rahman. 2014. *Penggunaan Peta Minda oleh Pelajar Pintar Cerdas dalam Pembelajaran Sejarah*. Jurnal Pendidikan Malaysia. 39(2): 95-100. Jurnal Kebangsaan.
14. **Abdul Razaq Ahmad** & Tajuddin Mohd Yunus. 2014. *Performance Of The Senior Subject Teachers In School: Evaluation By The Administrators*. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 8(13) August 2014, Pages: 90-97. ISSN: 1991-8178 [Q3]. INDEX. Thomson Reuters (Formerly Known As ISI), Ulrich Periodicals, Ebsco Host, Cabi (Cab International). Jurnal Antarabangsa.
15. Norshariani Abd Rahman, Lilia Halim, **Abdul Razaq**. 2014. *Environmental Knowledge Among Aboriginal Students*. *Journal Of Education and Social Research*. ISSN 2239-978X, ISSN 2240-0524. Vol. 4 No.6, September 2014. INDEX. EBSCO-Electronic Journal Service, DOAJ - Directory of Open Access Journal, UlrichsWeb - Global Serial Solutions, Cabell's Publishing – Directories of Academic Journal, Jurnal Antarabangsa.
16. Jalaludin Abdul Malek, **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang, Juhari Ahmad & Alfitri. 2014. *Sustainable Environmental Management and Preservation Knowledge among Multi-ethnic Residents*. *Asian Journal Of Scientific Research*. ISSN: 1992-1454. [Q3] . INDEX. ASCI-Database, Chemical Abstract Services, Directory of Open Access Journals, Google Scholar, SCIMAGO, SCOPUS. Jurnal Antarabangsa.
17. Jalaludin Abdul Malek, **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang & Alfitri. 2014. *Symbiotic Relationship Between Telecentre And Lifelong Learning For Rural Community Development: A Malaysian Experience*. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*-July 2014. Volume 13, Issue 3. 48-155. INDEX. Education Research Index, ERIC, SCOPUS Database and others. Jurnal Antarabangsa.
18. Norwaliza Abdul Wahab, Ramlee Mustapha, **Abdul Razaq Ahmad** & Zalizan Mohd Jelas. *Vocational Education and Skills Training for Indigenous Community in Malaysia*. *Journal of Education and Practice*. ISSN 2222-1735. Vol. 5, No. 11. 2014. INDEX. EBSCO (U.S.), Index Copernicus (Poland), Ulrich's Periodicals Directory (ProQuest, U.S.), JournalTOCS (UK), PKP Open Archives Harvester (Canada), SCI-Edge (U.S.) and others. Jurnal Antarabangsa.

19. **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang & Fong Peng CHEW. *Adult Student Perspectives on Computer Literacy Programme*. Pensee Journal. Espaces Marx. ISSN: 0031-4773 Vol 76, No. 1 (Jan 2014). INDEX. ISI Thomson Reuters, Scopus Elsevier, CSA (ProQuest), EBSCO and others. Jurnal Antarabangsa.
20. Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad** et al. *Examining Gaps Between Students' Expectations and Experiences in a Private University*. Mediterranean Journal of Social Sciences. ISSN: 2039-2117 (online), Vol 5, No 8 (May 2014). INDEX. Jurnal Antarabangsa.
21. **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang & Alfitri. *Culturally-Responsive Strategies For Resolving Social Conflict In Rural Community*. Mediterranean Journal of Social Sciences. Universiti Sriwijaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. ISSN 2039-2117 (online) Vol 5 No 20. September 2014. INDEX. Jurnal Antarabangsa.
22. **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang, Ahmad Ali Seman, Ramle bin Abdullah. *The Skills of Using History Textbooks in Secondary School*. *Asian Social Science*. 9(12):229-236. 2013. Canadian Center of Science and Education ISSN: 1911-2017. [Q3]. INDEX. SCOPUS, Australian Business Deans Council, DOAJ (Directory of Open-Access Journals), Lockss, Open J-Gate, ProQuest and others. Jurnal Antarabangsa.
23. Najamuddin Bachora, **Abdul Razaq Ahmad** & Zalizan Mohd Jelas. 2013. *Perhubungan Etnik Antara Guru Pelatih di Salah Sebuah Institusi Pendidikan Guru Zon Sabah*. Jurnal Penyelidikan Pendidikan.
24. Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad**, Jamalul Lail Abdul Wahab, Nordin Mamat. *Effective Teaching Strategies To Encourage Learning Behaviour*. IOSR Journal for Humanities and Social Science. 8(2):35-40. 2013. ISSN: 2279-0845. Jurnal Antarabangsa.
25. **Abdul Razaq Ahmad**, Zalizan Mohd Jelas, Zahiah Kassim. *Social Intelligence of the Indigenous Pupils*. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 7(8):1004-1010. 2013. INSInet Publications. ISSN: 1991-8178. [Q3] INDEX: Thomson Reuters (Formerly Known As ISI), Ulrich Periodicals, Ebsco Host, Cabi (Cab International). Jurnal Antarabangsa.
26. Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad**, Manisah Mohd Ali. *Professional Teachers' Strategies for Promoting Positive Behaviour in Schools*. *Asian Social Science*. 9 (12): 205-211. 2013. Canadian Center of Science and Education. ISSN: 1911-2017. [Q3] INDEX

- SCOPUS, Australian Business Deans Council, DOAJ (Directory of Open-Access Journals), Lockss, Open J-Gate, ProQuest and others Jurnal Antarabangsa.
27. **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang, Wan Hasmah Wan Mamat. *The Effectiveness of Human Development Programmes in Improving Community Wellbeing*. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 7(9):51-57. 2013. INSInet Publications. ISSN: 1991-8178. [Q3]. INDEX. Thomson Reuters (Formerly Known As ISI), Ulrich Periodicals, Ebsco Host, Cabi (Cab International). Jurnal Antarabangsa.
 28. Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad**, Nora'asikin Abu Bakar, Sayuti Abd Ghani, Asyraf Nadia Mohd Yunus, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Jaya Chitra Ramalu, Che Pee Saad, Mohd Jasmy Abd Rahman. *Students' Attitudes and Their Academic Performance in Nationhood Education*. *International Education Studies*. 6(11):21-28. 2013. Canadian Center of Science and Education. ISSN: 1913-9039. [Q4]. INDEX. DOAJ, Google Scholar, Lockss, NewJour, Open J-Gate, ProQuest, SCOPUS and others. Jurnal Antarabangsa.
 29. **Abdul Razaq Ahmad**, Mohamad Johdi Salleh, Mohd Mahzan Awang, Nazifah Alwaani Mohamad. *Investigating Best Practice and Effectiveness of Leadership Wisdom among Principals of Excellent Secondary School Malaysia: Perceptions of Senior Assistants*. *International Education Studies*. 6 (8): 38-46. 2013. Canadian Center of Science and Education. ISSN: 1913-9039. [Q4]. INDEX. DOAJ, Google Scholar, Lockss, NewJour, Open J-Gate, ProQuest, SCOPUS and others. Jurnal Antarabangsa.
 30. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahamad Rahim, Ahmad Ali Seman. *Active Learning Through History Subject Towards Racial Unity in Malaysia*. *The Social Sciences* 8 (1): 19-24. 2013. Medwell Journal. ISSN: 1818-5800. Jurnal Antarabangsa.
 31. Mohd Mahzan Awang, **Abdul Razaq Ahmad**, Jamalul Lail Abdul Wahab, Nordin Mamat. *Effective Teaching Strategies To Encourage Leaning Behaviour*. *IOSR Journal Of Humanities And Social Sciences (IOSR-JHSS)*. 8(2): Jan-Feb. 2013. e-ISSN 2279-0837. P-ISSN:-2279-0845 www.iosrjournals.org. INDEX. UlrichWeb (Global Serial Directory), Cabell's Directories, Google scholar, Jour Informatics and others. Jurnal Antarabangsa.
 32. Zarina MD Yasin, Zahara Aziz, **Abdul Razaq Ahmad**, Ruslin Amir. 2013. *Kemahiran Pemikiran (KPS) Dalam Kalangan Guru Menengah Atas: Satu Penilaian*. *Jurnal Pendidikan Pendidikan*. Jilid 14. INDEX. Jurnal Kebangsaan.

33. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahmad Ali Seman. 2012. Diversity As A Medium to Reinforce Ethnic Tolerance in History Subject In Malaysia. *International Journal of Academic Research in business and Social Sciences*. 2(12). ISSN 2222-6990. INDEX. UlrichWeb (Global Serial Directory), USA, Cabell's Directories, USA, ProQuest, United Kingdom, Index Copernicus, Poland, EBSCO, Gale | Cengage Learning, Database of Open Access Journals (DOAJ), Journal Seek, Academic Resources (ourGlocal.com), Electronic Journals and Newsletters (Open New Jour) and others. *Jurnal Antarabangsa*.
34. Azwani Ismail, Zahara Aziz, Sharipah Nor Puteh, **Abdul Razaq Ahmad**. 2012. *Kesan Model STAD terhadap Sikap dan Kemahiran Berkomunikasi Pelajar dalam Matapelajaran Sejarah*. *Jurnal Pendidikan dan Latihan*. Bil.1. Jilid 4. Ms 65. *Jurnal Pendidikan dan Latihan*. Majlis Amanah Rakyat. ISSN: 1985-9597. *Jurnal Kebangsaan*.
35. Ahmad Ali Seman, **Abdul Razaq Ahmad**, Warti Kimi. 2012. Student's Centered And Creativity Of Teachers During History Class. *International Journal of Arts and Commerce*. Vol:1, No:4, September 2012. ISSN : 1929-7106. Publisher: Centre For Enhancing Knowledge, UK. Indexed in Copernicus, ProQuest, Ulrichsweb, GoogleBeta, Hochschulbibliothek Reutlingen, Newjour. *Jurnal Antarabangsa Indexed*.
36. Hambali, **Abdul Razaq Ahmad**. 2011. Membentuk Karakter Bangsa Melalui Budaya Sekolah. *Jurnal Sosiologi Universitas Sriwijaya*. Volume 14, bil.2, Ogos-Disember. ISSN 1412-1411. Publisher: UNRI Press. *Jurnal Antarabangsa*.
37. Ahamad b. Rahim, Azwani b. Ismail, **Abdul Razaq Ahmad**, Zahara bt Aziz dan Sharifah Nor Puteh. 2011. Kurikulum Sejarah ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia. *Jurnal Pendidikan dan Latihan*. Bil 1. Jilid 3. ms 1-18. ISSN 1985-9597. Penerbitan Majlis Amanah Rakyat (MARA). *Jurnal Kebangsaan*.
38. **Abdul Razaq Ahmad**, Norhasni Zainal Abiddin, Zalizan Mohd Jelas, Anisa Saleha. 2011. Teachers' Perspectives toward Schools Diversity in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2, No. 4, m.s 178-189. ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online). Penerbitan Centre for Promoting Ideas (CPI). *Jurnal Antarabangsa*.
39. Aminuddin Hassan, Norhasni Zainal Abiddin & **Abdul Razaq Ahmad**. 2011. *Islamic Philosophy as the Basis to Ensure Academic Excellence*. *Jurnal* Vol. 7, No. 3, m.s 37-41. ISSN: 1911-2017 (print). ISSN 1911-2025 (online). INDEX. AMICUS, Canadiana (The National

Bibliography), DOAJ (Directory of Open-Access Journals), EBSCOhost, Google Scholar, Library and Archives Canada, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, The Excellence in Research for Australia, Ulrich's, Universe Digital Library, Wanfang Data. Jurnal Antarabangsa.

40. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahmad Razaai Ayudin. 2011. History Curriculum Development Model Towards Nation Building of Malaysia. International Journal of History Education (Historia).Vol. XII, No.1. ISSN 2086-3276. Penerbitan Association of History Educators and Reseachers. Jurnal Antarabangsa.

Penerbitan Buku:

1. Ahmad Rafai bin Ayudin, **Abdul Razaq Ahmad**, Zuraini Husain. Sejarah Dunia SPM Tingkatan 4. Penerbit: RAFNI ENTERPRISE. ISBN 978-9834124-47-3. Penulis bersama. Kebangsaan.
2. Ahmad Rafai bin Ayudin, **Abdul Razaq Ahmad**, Zuraini Husain. Sejarah Dunia SPM Tingkatan 5. Penerbit: RAFNI ENTERPRISE. ISBN 978-9834124-47-3. Penulis bersama. Kebangsaan.
3. Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, **Abdul Razaq Ahmad** & Mahdum. 2013. Himpunan Penyelidikan Pendidikan Serantau. ISBN: 978-983-2267-53-9. Editor. Kebangsaan.
4. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahmad Ali Seman & Rahmat Ghazali. 2011. *Perjuangan ke Puncak : Adunan Kisah Ke arah Merealisasikan Impian dan Cita-Cita*. Yayasan Istana Abdulaziz. Penulis bersama. Kebangsaan.
5. **Abdul Razaq Ahmad** & Anuar Ahmad. 2011. *Pendidikan dan Hubungan Etnik*, Penerbit UKM. ISBN 978-983-2267-28-7 Hubungan Etnik. Penulis. Kebangsaan.

Tulisan Bab Dalam Buku:

1. Norwaliza Abdul Wahab, **Razaq Ahmad**, Zalizan Mohd Jelas: Sinergi Peribumi. 2014. Penglibatan Komuniti Dalam Pendidikan Orang Asli pg 40-61 ISBN: 978-983-44636-6-3. Bab Dalam Buku.
2. Ahmad Razaai Ayudin, **Abdul Razaq Ahmad** & Ahmad Ali Seman: Sumbangan Kualiti Instruksional Dalam Membentuk Orientasi. 2013. Amalan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Pendidikan pg. 259-270. ISBN: 978-983-2267-53-9. Bab Dalam Buku.

3. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahamad Rahim& Ahmad Ali Seman: Hubungan Gaya Pembelajaran Aktif Ke Arah Meningkatkan Penghayatan Pembelajaran Sejarah. 2013. Amalan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Pendidikan pg. 271-283. ISBN: 978-983-2267-53-9. Bab Dalam Buku.

Prosiding:

1. **Abdul Razaq Ahmad** & Mohd Mahzan Awang. 2015. Penerokaan Minat dan Potensi Kerjaya Murid Orang Asli: Satu kajian Kes. Seminar Pendidikan Pedagogi Peribumi Kebangsaan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan pada 6-8 Oktober 2015. 142-152. ISBN 978-967-11496-9-0. Kebangsaan.
2. Siti Hasmah Bandu, **Abdul Razaq Ahmad**, Mohd Mahzan Awang, 2015. Patriotism: Issues and Challenges in Malaysia. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 116 – 120. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
3. Noor Idayu Md Nasir & **Abdul Razaq Ahmad**, 2015. Higher Order Thinking Skills in Learning History Subject. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 171 – 179. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
4. Zunaida Zakaria, **Abdul Razaq Ahmad** & Mohd Mahzan Awang, 2015. Museum as Learning Institutions in the Teaching of History: Its Funtions, Strategies and Process of Implementation. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 222 – 227. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
5. Samni Suraji, **Abdul Razaq Ahmad** & Mohd Mahzan Awang. 2015. The Effectiveness of Learning thought Play Approaches for Pre School Education. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 326 – 329. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
6. Mohamad Iskandar Shah Sitam, **Abdul Razaq Ahmad** & Mohd Mahzan Awang. 2015. A Development of Conceptual Framework in Researching School Admission Preferences in A Multi- Ethnic Society. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 397–403. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.

7. Abdul Aziz Abdul Rahman, **Abdul Razaq Ahmad** & Noria Munirah Yakub. 2015. Creating Tolerance Among People of Various Ethnicities in Malaysia Through Patriotism. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 433-439. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
8. Mima Suriati Shamsuddin, Mohd Mahzan Awang & **Abdul Razaq Ahmad**. 2015. The Relationship Between Students Learning Style and Their Academic Achievements: A Literature Review. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 451-456. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
9. Norazrinie Abdul Tahar Ariffin & **Abdul Razaq Ahmad**. 2015. The Concept of Adult Learning. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 468 – 469. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
10. Nurul Hidayati Hamid, **Abdul Razaq Ahmad** & Mohd Mahzan Awang. Leisure Time Activities and Quality of Life in Community. 2015. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 479-482. ISSN: 2460-7185. Antarabangsa.
11. Noor Rosmawati Yusuf, **Abdul Razaq Ahmad** & Mohd Mahzan Awang. 2015. Transfer of Training Studies In Polytechnic Malaysia. 2nd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE) at Yogyakarta State University, Indonesia on 25-26 August 2015. 529. ISSN 2460-7185. Antarabangsa.
12. Nurul Adila Hamdan, Izyan Safwani Ismail, Mur Izdihar Che Cob@Ab Ghaffar & **Abdul Razaq Ahmad**. 2015. Sikap Pelajar Sekolah Luar Bandar Terhadap Media Massa dan Hubungannya dengan Kecekapan Berbahasa Inggeris. Seminar Penyelidikan dan Pendidikan Masyarakat Terpinggir. M.s 240. ISBN 978-983-2267-76-8. Antarabangsa.
13. Nurul Nadian Ahmad Sobri, Soffian Hashnuddin, Nor Fariha Aniza Md Isa & **Abdul Razaq Ahmad**. 2015. Analisis Trend Penyertaan dan Keciciran di Kalangan Pelajar Orang Asli. M.s 170. ISBN 978-983-2267-76-8. Antarabangsa.
14. Muhd Zuber Abd. Majid, Nor Fariha Aniza Md Isa, Wan Muhd Faizudin Wan Mat Zin & **Abdul Razaq Ahmad** (2015). Projek Keusahawanan

- dan Hubungan dengan Literasi Kewangan Pelajar Universiti. M.s 1. ISBN 978-983-2267-76-8. Antarabangsa.
15. Nurul Anith Nasihah Che Azmi, Nur Syahirah Fatin Mohd Zamri, Engku Dewi Noraniza Engku Mansor & **Abdul Razaq Ahmad**. 2015. Tahap Pengetahuan, Motivasi dan Sokongan untuk Aktiviti Keusahawanan dan hubungannya dengan Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Keusahawanan Di Universiti. M.s 17. ISBN 978-983-2267-76-8. Antarabangsa.
 16. Anita Abu Hasan, **Abdul Razak Ahmad** & Zahara Aziz (2013). Keberkesanan Kursus Murid dan Alam Belajar Dalam Membantu Program Praktikum di Sekolah dari Persepsi Guru Pelatih di Institusi Pendidikan Guru. 6th International Seminar on the Regional Education (UKM-UR): Quality and Excellence in Education / Faculty of Education, UKM. Antarabangsa.
 17. Norwaliza Abdul Wahab, **Abdul Razak Ahmad**, Zalizan Mohd Jelas, Wan Hasmah Wan Mamat, Ramle Abdullah. 2012. The Role Of Administrators in The School of Aboriginal Students: A Case study in the State Of Pahang, Malaysia. 1st International Conference On Current Issues in Education. M.s 411. ISBN 978-602-18661-1-5. INDEX. EBSCO, CNKI, DOAJ, WorldCat, Google Scholar, Ulrich's Periodicals. Antarabangsa.
 18. Mohd Richard Neles, **Abdul Razaq Ahmad**, Fazilah Idris. 2012. *Application Of Rationale Choice Theory and Theory of Planned Behaviour in The Multiethnic Classroom Management towards Ethnic Tolerance in Malaysia*. 1st International Conference On Current Issues in Education. M.s 340. ISBN 978-602-18661-1-5. Antarabangsa.
 19. Mohd Fauzi Ali, **Abdul Razaq Ahmad**, Ahmad Ali Seman. 2012. *Historical Thinking Skills in Malaysian Integrated Secondary School Curriculum*. 1st International Conference On Current Issues in Education. M.s 334. Aditya Media. ISBN 978-602-18661-1-5. Antarabangsa.
 20. Mastura Kamarudin, **Abdul Razaq Ahmad** & Zalizan Mohd Jelas. 2012. *The Influence of Motivation towards Achievement of English Language among Students in Pahang Rural Areas*. 1st International Conference On Current Issues in Education. M.s 19. Aditya Media. ISBN 978-602-18661-1-5. Antarabangsa.
 21. Abdul Aziz Rahman, **Abdul Razaq Ahmad**. 2012. *Strengthening The Identity of Various Communities in Nation Building: Issues and Challenges*. 1st International Conference On Current Issues in Education. M.s 1. Aditya Media. ISBN 978-602-18661-1-5. Antarabangsa.

22. Ramle b. Abdullah, **Abdul Razaq Ahmad**, Wan Hasmah Wan Mamat, Zalizan Mohd Jelas. 2012. *Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli Suku Kaum Semelai: Peranan Ibu Bapa dan Jabatan Kemajuan Orang Asli*. International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. M.s 1302. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
23. Mohd Nasaruddin b. Mohd Nor, **Abdul Razaq Ahmad**, Anuar Ahmad, Ahamad Rahim. 2012. *Pendidikan dan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Orang Asli di Malaysia*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. M.s 2183. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
24. Haslina Mohd Yunus, **Abdul Razaq Ahmad**, Irwan affendi Md Naim, Zainal Jantan. 2012. *Isu dan Cabaran Keciciran Orang Asli Di Negeri Pahang*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. M.s 1244. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
25. Siti Syazwani Abdul Mubin, **Abdul Razaq Ahmad**, Ramle Abdullah, Ahamad Rahim. 2012. *Faktor-Faktor Keciciran Murid Orang Asli Dalam Pendidikan*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. M.s 1231. Rizqi Press. ISBN: 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
26. Jusliani bte Jaapar, **Abdul Razaq Ahmad**, Ahamad b. Rahim. 2012. *Tabiat Merokok dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. M.s 1173. Rizqi Press. ISBN: 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
27. Norwaliza Abdul Wahab, **Abdul Razaq Ahmad**, Ahamad Rahim 2012. *Amalan Pedagogi guru di Sekolah Masyarakat Orang Asli: Satu Kajian Kes di Negeri Pahang*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia M.s 1087. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
28. Mohd Fauzi b. Ali, **Abdul Razaq Ahmad**, Ahmad Ali Seman. 2012. *Kompetensi Guru Sejarah di Malaysia*. Isu dan Cabaran. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia .M.s 938. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.

29. Mohd Richard Neles Abdullah, **Abdul Razaq Ahmad**, Fazilah Idris. 2012. *Penerapan Teori Pilihan Rasional dan Teori Tingkah Laku Terancang dalam Meningkatkan Pengaruh Positif Agama Terhadap Toleransi Etnik di Malaysia*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia m.s 948. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
30. Ahmad Rizal Md Rais, Najamuddin Hj. Bachora, **Abdul Razaq Ahmad**, Mastura Kamarudin, Norina Nordin. 2012. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia .M.s 854. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
31. **Abdul Razaq Ahmad**, Ahamad b.Rahim, Ahmad Ali Seman, Norwaliza Abdul Wahab. 2012. Pembelajaran aktif Dalam Matapelajaran Sejarah Kearah Perpaduan Kaum di Malaysia. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia m.s 650. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
32. Zunaida Zakaria, **Abdul Razaq Ahmad**, Ramle Abdullah 2012. *Gaya Pembelajaran dan Hubungan Dengan Pencapaian Pelajar orang Asli*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. M.s 633. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
33. Hidayah Harun, **Abdul Razaq Ahmad**, Ahamad b.Rahim, Ramle Abdullah. 2012. *Sikap dan Tahap Pencapaian Akademik Rendah Murid Orang Asli Di Malaysia: Faktor-Faktor dan Penyelesaian*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. Ms 559-563. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
34. Wan Hasmah Wan Mamat, EdD, **Abdul Razaq Ahmad**, PhD, Ramle Abdullah, PhD, Ahmad Ali Seman. 2012. *Perspektif Murid Orang Asli Tentang Sekolah dan Pendidikan*. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. m.s 419. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
35. Ahmad Ali Seman, **Abdul Razaq Ahmad**, Fadzilah Sulaiman.(2012). *Keberkesanan Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) Untuk Meningkatkan Pencapaian dan Motivasi Pelajar Berpencapaian Akademik Rendah Dalam Matapelajaran Sejarah*. International

- Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. m.s 369. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
36. Norshariani Abd Rahman, Arbaat Hassan, Lilia Halim, **Abdul Razaq Ahmad**. 2012. Kompetensi Guru Dalam Penerapan Alam Sekitar. International Seminar Educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia. m.s 265. Rizqi Press. ISBN 979-602-9098-44-0. Antarabangsa.
 37. Ramle b. Abdullah dan **Abdul Razaq Ahmad**. 2011. Potensi Pendidikan Masyarakat Orang Asli Suku Kaum Semelai di Malaysia. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
 38. Norwaliza Abdul Wahab, **Abdul Razaq Ahmad**, Zalizan Mohd Jelas dan Abdul Rashid Johar. 2011. *Perspektif Guru dalam Pendidikan Orang Asli: Satu Kajian Kes Di Negeri Pahang, Malaysia*. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
 39. Mareena Mohamad, Norhasni Zainal Abidin dan **Abdul Razaq Ahmad**. 2011. *Tinjauan Hubungan Gaya Organisasi dan Sub Budaya Terhadap Komitmen Pekerja*. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
 40. Juhari Ahmad, Norshariani Abd Rahman, Jalaluddin Abdul Malek dan **Abdul Razaq Ahmad**. 2011. *Amalan Penjagaan Alam Sekitar Dalam Kalangan Masyarakat Malaysia*. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
 41. **Abdul Razaq Ahmad**, Zahiah Kassim dan Zalizan Mohd Jelas. 2011. *Kompetensi Kecerdasan Sosial Pelajar Orang Asli Di Malaysia*. ms. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
 42. Norshariani Abd Rahman, Lilia Halim, **Abdul Razaq Ahmad**, Arba'at Hassan. 2011. *Penerapan Pendidikan alam Sekitar Dalam Kalangan Pelajar Orang Asli Di Malaysia*. Ms 397. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between

- Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
43. Liza Md.Isa, **Abdul Razaq Ahmad**. 2011 .*Kurikulum Sejarah Ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia*. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9. Antarabangsa.
 44. Ahamad Rahim, **Abdul Razaq Ahmad**, Zunaida Zakaria. 2011. *Kurikulum Sejarah Ke arah Pembentukan Bangsa di Malaysia*. International Seminar Educational Comparative in Curriculum for Active Learning Between Indonesia and Malaysia.m.s 231. Rizqi Press. ISBN 978-602-9098-12-9.6. Antarabangsa.
 45. Ahamad b. Rahim, **Abdul Razaq Ahmad**, Anuar Ahmad dan Azwani Ismail. 2011. *Hubungan Gaya Pembelajaran Aktif ke Arah Meningkatkan Penghayatan Pembelajaran Sejarah di Malaysia*. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke 5. Vol 2. ms 715-727. ISBN 978-602-19531-0-5. Antarabangsa.
 46. **Abdul Razaq Ahmad** dan Ahmad Razaai Ayudin. 2011. *Sumbangan Kualiti Pengajaran Guru dalam Membentuk Orientasi Belajar Sejarah di Malaysia*.Prosiding Seminar Pendidikan Serantau ke 5. Vol 2. M.s 756-766. ISBN 978-602-19531-0-5. Antarabangsa.

Penyelidikan:

1. Modul Kawalan Ekstrimisme dalam Kalangan Belia. 2016-2017. (RM61,200). Ketua (Aktif).
2. Menghasilkan Databes dan Maklumat dalam Skop Kelestarian Pendidikan dan Kesejahteraan Hidup. 15 Jun 2015-30 September 2016. DPP-2015-093. (RM5000). Ahli bersama (Aktif).
3. Pelaksanaan Pendidikan Inklusid untuk Kanak-kanak berkeperluan Khas di Sekolah. 15 Jun 2015-30 September 2016. DPP-2015-095 (RM5000). Ahli bersama (Aktif).
4. Keberkesanan Program Intervensi Akademi Menara Gading (AMG) Terhadap Motivasi dan Kemahiran Insaniah Pelajar. Jun 2014-Jun 2015. Geran Luar Yayasan Istana Abdulaziz. (RM45,000). Ketua.
5. Aspirasi Kepimpinan Politik Negara Dari Perspektif Belia Pelbagai Etnik. 1 Ogos 2015- 31 Disember 2015. GG-2015-004. (RM30,000). Ketua.
6. Kemahiran Soft Skills Pada Komunitas Pelajar: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Malaysia. 28 Oktober 2013- 21 Disember 2015. GG-2014-009. (RM30,000). Ketua.

7. Memperkasakan Kesejahteraan Hidup Melalui Pendidikan Sepanjang Hayat. 1 Januari 2013-31 Mac 2014. DPP-2013-178 (RM37,000). Ahli bersama.
8. Ketelibatan Murid Bekeperluan Khas Di Sekolah. 1 Januari 2013-31 Mac 2014. DPP-2013-182. (RM28,000). Ahli bersama.
9. Memperkasakan Kesejahteraan Hidup Melalui Pendidikan Sepanjang Hayat. 01 April 2014-31 Mac 2015. DPP-2014-093. (RM20,000). Ahli bersama.
10. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Untuk Kanak-Kanak Berkeperluan Khas di Prasekolah. 1 April 2014-31 Mac 2015. DPP-2014-103. Ahli bersama.
11. Kelab Kerjaya Komuniti Orang Asli Negeri Pahang. 19 Feb 2013- 19 Ogos 2015. GG-2013-007. (RM10,500). Ahli bersama.
12. Positive Behaviour Enhancement Model for National Secondary. 16 Mei 2013-16 Mei 2015. GPM-2013-042. (RM93,200). Ahli bersama.
13. Bimbingan Kerjaya Komuniti Orang Asli menggunakan modul RIASEK. 10 Mei 2013-09 Mei 2015. KOMUNITI-2013-023. (RM25,000). Ahli bersama.
14. Positive Behaviour Enhancement Model for National Secondary. 16 Mei 2013-16 November 2015. GGPM-2013-042. (RM30,000). Ahli bersama.
15. Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri berasaskan Pemodelan untuk meningkatkan Kemahiran Penyelidikan Pelajar Pascasiwazah Jurusan Sosiologi. 01 Ogos 2014-31 Ogos 2015. PTS-2014-024. (RM10,000). Ahli bersama.
16. Meningkatkan Kreativiti dan Inovasi dalam Kaedah Pengajaran Mikro GE2113 di Fakulti Pendidikan UKM. 1 Jun 2012-30 Jun 2014. PTS-2012-018. (RM10,000). Ahli bersama.
17. Bantuan Kewangan Bahan Penyelidikan (BKBP). 1 Mac 2013-28 Jun 2014. BKBP-FPEND-K007416. Ketua (Tamat).
18. Memperkukuhkan Kaedah Penilaian Kemahiran Generik Dalam Kursus Sains Kehidupan Menggunakan Web 3.0. 1 April 2011- 30 Jun 2013. UKM-PTS-100-2010(2). Ahli bersama.
19. Meningkatkan Kreativiti dan Inovasi dalam Kaedah Pengajaran Mikro GE2113 di Fakulti Pendidikan. 1 Jun 2012-1 Jun 2013. PATS-2012-018. Ahli bersama.
20. Dana Operasi Universiti Penyelidikan. 1 Januari 2012 – Disember 2012. UKM 3.2.8/244/6/2/1. Ahli bersama.
21. OUP Kumpulan. 1 Januari 2012-31 Disember 2012. OUP-2012-028. (RM30,000). Ahli kumpulan.
22. OUP Kumpulan. 1 Januari 2011-31 Disember 2011. UKM-OUP-CMNB-07-28/2011. Ahli kumpulan.

23. OUP Kumpulan. 1 Januari 2010-31 Disember 2010. UKM-OUP-CMNB-07-28/2010. (RM30,000). Ahli kumpulan.
24. Jatidiri Kebangsaan, Negara Bangsa, Kepelbagaian Budaya dan Globalisasi. 1 Januari 2010-31 Disember 2010. UKM3.2.8/244/6/3 Ahli bersama (tamat).
25. Halatuju Pendidikan dan Kerjaya Pelajar Orang Asli di Negeri Pahang. Ogos 2010-Feb 2012. GG/006/2010 (GL). (RM 100,000). Ketua (tamat).
26. Pembinaan Kurikulum Sejarah ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia. Mac 2010-Mac 2012. UKM-SK-05-FRGS0070-2010. (RM 31,000). Ketua (tamat).
27. Pembudayaan Pembangunan Lestari Menerusi "Problem Oriented projek Based Learning" dalam kalangan pelajar Sarjana Muda. 2009-2010. Geran UKM (12,000) UKM-PTS-110-2009. Ahli.
28. Penilaian Tahap Penguasaan dan Pembentukan Modul Kemahiran Komunikasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Program Sarjana Muda. 1 Jun 2008-31 Ogos 2010. UKM.GUP.KRIB-9/2008. Geran UKM (120,000). Ahli bersama (Tamat).
29. Pembentukan Indeks Tingkahlaku Sosial di Kalangan Pelajar-Pelajar Institut Pengajian Tinggi Ke arah Perpaduan di Malaysia. Nov 2006-Okt 2008. UKM-GG-05-FRGS. (RM 60,000). Ahli (Tamat).
30. Projek Kajian Pendidikan Non-Formal Bagi Orang Dewasa anjuran KEMAS di Semenanjung Malaysia. 2005-2006. GG/002/2005. Geran UKM. (RM 4,348). Ketua (Tamat).
31. Strategi Pembelajaran dan Hubungan Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Melayu Luar Bandar: Pengaruh Modul Latihan Pendidikan dan Rakan Sebaya. 15 Jun 2000-15 Dec 2001. (G3/2000). Geran UKM (RM6,200). Ketua (Tamat).

Khidmat Masyarakat/Khitmad profesional Penglibatan Dalam Pembangunan Masyarakat:

1. Pengurus dan penceramah Akademi Menara Gading selama 11 tahun dari kohort I sesi 1999/2001 hingga kini kohort VI sesi 2010/2012 Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini telah berjaya membantu 500 pelajar miskin dan anak yatim dari seluruh Negeri Pahang melanjutkan pelajaran ke universiti di seluruh tanah air. Akademi Menara Gading juga membantu mereka dalam meningkatkan tahap pendidikan mereka.

2. Ceramah Keibubapaan dan kecemerlangan pelajar yang telah melibatkan seramai 8000 orang ibu bapa dan 50,000 pelajar dari seluruh negeri Pahang dari tahun 1995 hingga kini melalui pelbagai program khidmat masyarakat yang telah dianjurkan oleh Yayasan Istana Abdulaziz, Universiti Kebangsaan Malaysia, Majlis Belia Malaysia, Ahli Dewan Undangan Negeri Daerah Temerloh, Kuantan, Jerantut dan Pekan serta program yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kuantan, Pejabat Pelajaran Daerah Pekan, Pejabat Pelajaran Daerah Temerloh, Pejabat Pelajaran Daerah Raub, Pejabat Pelajaran Daerah Jerantut, dan Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Lipis. Khidmat masyarakat ini juga dijalankan di Selangor dan Wilayah Persekutuan yang melibatkan masyarakat Setinggalan.
3. Pengurus dan penceramah *Kem 1: Motivasi dan Pembangunan Personaliti*. Akademi Menara Gading Kohort VI sesi 2012-2014 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Kem Pertanian Jubli Perak SAS, Kuantan, Pahang, 13-15 Jun 2012.
4. Pengurus dan Penceramah Program Pembangunan Pendidikan Orang Asli Pahang bagi Suku Kaum Semakberi dan Jakun. SK Kota Perdana dan Kg. Batu Sawah, Pekan, Pahang. 10-13 Mei 2012.
5. Penasihat dan penceramah Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM) anjuran Fakulti Pendidikan UKM. Pos Iskandar, Bera, Pahang. Ogos 2010.
6. Pengurus dan penceramah Dari Desa ke Menara Gading anjuran Biro Pendidikan Umno. Majlis Derah Temerloh. 7 Julai 2010.
7. Pengurus dan Penceramah Program Keibubapaan. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz. Majlis Derah Temerloh. 5 Ogos 2010.
8. Pengurus dan Penceramah Program Keibubapaan Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz. Majlis Derah Kuantan. 3 Julai 2010.
9. Pengurus dan Penceramah Program Keibubapaan. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz. Balok, Kuantan. 4 Disember 2010.
10. Pengurus dan Penceramah Kem 2 Kemahiran Belajar dan Interpersonal Akademi Menara Gading Balok 2010/2012. Aman Sari Beach Resort, Kuantan. 24-26 September 2010.
11. Pengurus dan penceramah *Kem 1: Motivasi dan Pembangunan Personaliti* Akademi Menara Gading Kohort VI sesi 2010-2012 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Malaysia Pahang. 7-9 Mei 2010.

12. Pengurus dan Penceramah *Kem 8: Pemilihan Pelajar Ke IPT* Akademi Menara Gading Kohort V sesi 2008-2010. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Lembaga Kemajuan Perempuan Islam Pahang. 19-20 Mac 2010.
13. Pengurus dan Penceramah Program Kecemerlangan Pelajar Miskin Peringkat Kuantan dan Pekan Akademi Menara Gading Kohort VI sesi 2010-2012. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dewan Pejabat Agama Islam, Kuantan. 2 Mac 2010.
14. Pengurus dan Penceramah Program Smart Learning Peringkat Daerah Temerloh Akademi Menara Gading Kohort VI sesi 2010-2012. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dewan Tun Abdul Razak, Temerloh. 3 Mac 2010.
15. Program Pembangunan Setinggalan Bersama Mahasiswa Peringkat Wilayah Persekutuan. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekitar Wilayah Persekutuan. Dari Mac hingga April 2010.
16. Penyelaras Program Khidmat Masyarakat bagi Orang Asli anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia. RPS Banun, Semeloh, Sg. Raba. 3-6 September 2009.
17. Pengurus dan Penceramah *Kem 7: Kecemerlangan Milik Bersama* Akademi Menara Gading Kohort V sesi 2008-2010. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Sekolah Sains Selangor, Seri Puteri, Alm Shah, SM Dato Abdul Razak. 25-30 Ogos 2009.
18. Pengurus dan Penceramah *Kem 6: Kecemerlangan SPM* Akademi Menara Gading Kohort V sesi 2008-2010. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. 15-18 Julai 2009.
19. Ceramah Kaedah Pembelajaran Dewasa yang Berkesan dan Strategi Pembelajaran dan Kaunseling Akademik Pelajar Dewasa anjuran Polis Diraja Malaysia. Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur. 15-16 Jun 2009.
20. Pengurus dan Penceramah *Kem 5: Komunikasi dan Pembelajaran Berkesan* Akademi Menara Gading Kohort V sesi 2008-2010. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Lembaga Kemajuan Perempuan Islam Pahang. 1-3 Jun 2009.
21. Pengurus dan Penceramah *Kem 4: Kepimpinan dan Kecemerlangan Akademik* AMG Kohort V sesi 2008-2010. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dirasmikan oleh: YB. Dato' Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Universiti Kebangsaan Malaysia. 30 April -6 Mei 2009.
22. Pengurus *Kem 3: Pembinaan Waja Diri Ke Arah Kecemerlangan Akademik*. Akademi Menara Gading Kohort V sesi 2008-2010

- anjaran Yayasan Istana Abdulaziz, UKM dan Rejimen 505 Askar Wataniah. Dirasmikan oleh Dato' Setia Amar Segara Dato' Hj Halim bin Ibrahim. Kem Wataniah 505, Teluk Sisek, Pahang. 20–24 Februari 2009.
23. Pengurus dan penceramah *Kem 1: Psikologi dan Pembangunan Diri*. Akademi Menara Gading Kohort V sesi 2008-2010 anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dirasmikan oleh YB Dato' Hj. Wan Adnan Wan Mamat, SIMP, DSAP, D.I.M.P. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri Pahang. Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Pahang. 25-27 Mei 2008.
 24. Ceramah Kecemerlangan Pelajar. SMK. Bandar Baru Bangi. 10 April 2008.
 25. Pengurus Kem Pemilihan Peserta Amg. Kohort V sesi 2008-2010 dari daerah Pekan Rompin, Kuantan anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Majlis Ugama Islam. Kuantan Pahang. 19 Mac 2008.
 26. Pengurus dan Penceramah *Kem 8: Pemilihan Pelajar Ke IPT* Akademi Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008 anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Lembaga Kemajuan Perempuan Islam Pahang. 19-20 Mac 2008.
 27. Pengurus dan Penceramah *Kem 7: Kecemerlangan adalah bagi Semua*. Anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri. 1-5 September 2007.
 28. Pengurus dan Penceramah *Kem 6: Bengkel Kecemerlangan SPM* Akademi Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008 Anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. 20-24 Julai 2007.
 29. Pengurus & Penceramah *Kem 5: Komunikasi dan Pembelajaran Berkesan*. Akademi Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008 anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh YH Dato' Hashim Wahab. Kolej Islam Pahang Kuantan. 7 Jun 2007.
 30. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008. *Kem 4: Kepimpinan dan Kecemerlangan Akademik*. Anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. 1 – 5 Mac 2007.
 31. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008. *Kem 3: Pembinaan Waja Diri ke arah Kecemerlangan Akademi* anjaran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dirasmikan KDYTM Tengku Mahkota Pahang. Kem Wataniah 505, Teluk Sisek, Kuantan, Pahang. 17 -21 Nov 2006.

32. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008. *Kem 2: Kemahiran Belajar dan Interpersonal* anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. IKIP, Jalan Dato' Bahaman, Kubang Buaya, Kuantan, Pahang. 28 – 30 Julai 2006.
33. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008. *Bengkel Penulisan Modul Mata Pelajaran Projek Menara Gading Fasa IV*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Hotel Shahzan Inn, Kuantan, Pahang. 26 – 27 Mei 2006.
34. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008. *Kem 1: Kecemerlangan Diri dan Akademik*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dewan Lembaga Perempuan Islam Malaysia (Pahang). 7 – 9 April 2006.
35. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort IV sesi 2006-2008. *Kem Pemilihan Projek Menara Gading IV 2006-2008*. Dewan Jabatan Agama Islam Pahang. 19 Mac 2006.
36. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004-2006. *Kem 9: Seminar dan Taklimat Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Rumah Rehat Bentong, Pahang. 16–17 Mac 2006.
37. Penceramah Motivasi Bersama. Anjuran Petronas Malaysia. Petronas Twin Tower. 25 Ogos 2006.
38. Penceramah Sempena Bulan Penghayatan Disiplin dan Kempen Nilai Murni Tahun 2006 Anjuran Unit Disiplin. Anjuran Unit Sekolah Berasrama Penuh Malaysia. SMK Jalan Empat. 28 Feb 2006.
39. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004–2006. *Kem 4: Kepimpinan dan Kecemerlangan Akademik*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Disember 2005.
40. Pengurus dan Fasilitator bagi Projek Menara Gading, Kohort 3, Sesi 2004–2006. *Kem 8: Latih Tubi SPM*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Pusat Rekreasi Top Range, Raub, Pahang. 29 Sept– 2 Okt 2005.
41. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading III sesi 2004-2006. *Kem 7: Bengkel Kecemerlangan SPM* Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. SMK Clifford, Kuala Lipis, Pahang. 26–28 Ogos 2005.
42. Pengurus dan Fasilitator bagi Projek Menara Gading, Kohort 3, Sesi 2004–2006. *Kem 6: Kecemerlangan adalah bagi Semua*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM

43. Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Sekolah Sains Dato' Abdul Razak. 20–30 Jun 2005.
44. Penceramah Motivasi Pelajar-pelajar SPM. Sekolah Menengah Pasir Panjang, Klang. 2005.
45. Penceramah Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004–2006. *Kem 5: Komunikasi dan Pembelajaran Berkesan* Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Februari 2005.
46. Pengurus dan Penceramah Kem 4: Kepimpinan dan Kecemerlangan Akademik Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004–2006. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. 13–19 Mac 2005.
47. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004–2006. *Kem 3: Pembinaan Waja Diri ke Arah Kecemerlangan Akademik*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Kem Wataniah 505 Teluk Sisek, Kuantan. 23–26 September 2004.
48. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004–2006. *Kem 2: Kemahiran Belajar dan Interpersonal*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Pusat Latihan UMNO, Janda Baik, Pahang. 6–8 Ogos 2004.
49. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading Kohort III sesi 2004–2006. *Kem 1: Motivasi ke Arah Kecemerlangan Diri* Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Selesa Hill Home & Golf Resort Bukit Tinggi. 6–8 Jun 2004.
50. Pengurus & Panel Pemilih Kem Pemilihan Projek Menara Gading III 2004–2006. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dewan Jubli Majlis daerah Raub. 3 April 2004.
51. Pengurus & Penceramah *Kem 7: Kemasukan Ke Menara Gading*. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001–2003 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. IKIP, Kuantan, Pahang. 3–5 Mac 2003.
52. Penceramah "*Sesi Bersama Pensyarah Universiti*". Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Kolej Tunku Kursiah. Kolej Tunku Kurshiah, Seremban. 7 Oktober 2002.
53. Penceramah "*Sesi Bersama Pensyarah Universiti*". Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Sekolah Dato' Abdul Razak. Sekolah Dato' Abdul Razak, Seremban. 4 Oktober 2002
54. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading 2. *Kem 6: Kecemerlangan Milik Bersama*. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz

- dengan kerjasama Fakulti Pendidikan UKM. Sekolah-sekolah asrama penuh. 4-11 Oktober 2002.
55. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading 2. *Kem 5: Pembangunan Diri dan Interpersonal*. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001-2003. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Resort Tamu Kami, Pantai Balok, Kuantan. 23-25 Ogos 2002.
 56. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading 2. *Kem 4: Kemahiran dan Kecemerlangan Akademik*. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001-2003 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. 30 April-5 Mei 2002.
 57. Program Keibubapaan. Anjuran Pejabat Pelajaran Rompin. Kawasan Daerah Muazam/Rompin. 14-15 April 2002.
 58. Program Keibubapaan. Anjuran Pejabat Pelajaran Pekan dan Kuantan. Daerah Kuantan, Pekan dan Felda Gugusan Lepar. 7-8 April 2002.
 59. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading 2. *Kem 3: Waja Diri Berteraskan Akademik*. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001-2003. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Kem Wataniah 505, Teluk Sisek, Kuantan. 14-17 Februari 2002.
 60. Pengarah Bengkel Penulisan Modul bagi Guru Pakar Projek Menara Gading 2. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Hotel Shahzan Inn, Kuantan. 16 Februari 2002.
 61. Pengurus & Penceramah *Kem 2: Kepimpinan dan Kecemerlangan Akademik*. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001-2003 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. IKIP, Kuantan. 22 - 25 Oktober 2001.
 62. Ahli Jawatankuasa Majlis Perasmian Projek Menara Gading 2 dan Mushaf Al Quran. Dirasmikan oleh KDYMM Sultan Pahang Tuanku Sultan Hj. Ahmad Shah Ibn Almarhum Tuanku Abu Bakar al-Haj. Dewan Jubli Perak, Kuantan. Julai 2001.
 63. Pengurus & Penceramah Projek Menara Gading 2. *Kem 1: Motivasi Kearah Kecemerlangan Diri*. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001-2003 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. IKIP, Kuantan, Pahang. 26-29 Julai 2001.
 64. Penceramah Jemputan bagi Lawatan ke Sekolah Daerah Kuantan bagi memantau pelajar. Projek Menara Gading Kohort 2 sesi 2001-2003. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Sek. Men. Paya Besar, Sek. Men. Keb. Beserah, SMK Tg. Lumpur. April 2001.
 65. Pengurus & Penceramah "English Camp" Daerah Kuantan dan Pekan Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan Pejabat Pelajaran Daerah Pekan. Daerah Kuantan dan Pekan. 2003.

66. Konsultan Pendidikan Yayasan Istana Abdulaziz Pahang. Pahang. 2000–2010.
67. Penceramah Bengkel Kecemerlangan Pelajar dan Keterampilan Ibu Bapa Anjuran Pusanita Kebangsaan. Kuala Lumpur. 11–13 Ogos 2000.
68. Pengurus & Penceramah Perkhemahan Bahasa Inggeris Anjuran Fakulti Pendidikan, Kampung Akademik, Majlis Belia Malaysia, Shell Malaysia dan Telekom. Kuala Lumpur. 2000.
69. Timbalan Pengarah & Penceramah Kursus Penjana Wawasan Anjuran Persatuan Pendidikan Malaysia Anjuran Majlis Belia Malaysia. Kuala Lumpur. 2000.
70. Pengurus dan Penceramah *Kem 10: Perkhemahan Akademik Jiwa Murni* Projek Menara Gading Kohort 1sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Casuarina Cottage Pekan. 13-15 Oktober 2000.
71. Pengurus dan Penceramah *Kem 9: Pembangunan Pendidikan Masyarakat Melayu: Satu Tanggungjawab Bersama* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh YB. Dato' Seri Adnan Yaakob. Dewan Tun Abdul Razak Temerloh. 22-24 September 2000.
72. Pengurus dan Penceramah *8: Kecemerlangan Pelajar Melayu Kawasan Parlimen Jerantut, Pahang* Projek Menara Gading Kohort 1sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh Y.A.M Tengku Dato' Azlan Ibni Sultan Abu Bakar. Majlis Perbandaran Daerah Jerantut. 18-20 Ogos 2000.
73. Pengurus dan Penceramah *Kem 7: Kecemerlangan Milik Bersama* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh YB. Dato' Mahadzir Mohd Khir. Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan SM Sanis Selangor. 17-25 Jun 2000.
74. Pengurus dan Penceramah *Kem 6: Ke Arah Kecemerlangan Peperiksaan* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001 anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. 28 April-30 April 2000.
75. Pengurus dan Penceramah *Kem 5: Pembinaan Waja Diri Ke arah Kecemerlangan Akademik* Projek Menara Gading Kohort 1sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh Timbalan Komander Askar Wataniah 505 Kuantan Pahang. Kem wataniah 505 Teluk Sisik Kuantan Pahang. 25-27 Februari 2000.

76. Pengurus dan Penceramah *Kem 4: Persekitaran Pembelajaran Merangsang Kecemerlangan Akademik* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh KDYTM Tengku Mahkota Pahang. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 30 Nov-7 Dis 1999.
77. Pengurus dan Penceramah *Kem 3: Kepimpinan dan Kecemerlangan Akademik* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM yang dirasmikan oleh Y.M Tengku Dato' Uzir Bin Tengku Ubaidillah. Universiti Kebangsaan Malaysia. 30 September - 3 Oktober 1999.
78. Pengurus dan Penceramah *Kem 2: Kemahiran Belajar dan Kecemerlangan Mata Pelajaran Peperiksaan* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dirasmikan oleh Senator Dato' Aziz Abdul Rahman. Institut Latihan RISDA, Pekan Awah Temerloh Pahang. 26-29 Ogos 1999.
79. Pengurus dan Penceramah *Kem 1: Motivasi Ke Arah Kecemerlangan Diri* Projek Menara Gading Kohort 1 sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dan UKM. Dewan Tun Razak. 25-28 Julai 1999.
80. Jawatan kuasa Pelancaran Projek Menara Gading Sesi 1999-2001. Anjuran Yayasan Istana Abdulaziz dengan kerjasama Fakulti Pendidikan UKM dilancarkan oleh KDYTM Tengku Mahkota Pahang. Muadzam Shah Pahang. 21 Mei 1999.
81. Pengurus & Penceramah Program Kecemerlangan Akademik Sekolah-sekolah Agama Anjuran Fakulti Pendidikan, UKM dan Sekolah Menengah Agama Temerloh & Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah. Sekolah Menengah Agama Temerloh & Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah. 22-23 Mac 1997.
82. Pengurus & Penceramah Program Rakan Sebaya Anjuran Fakulti Pendidikan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. Temerloh, 1997.
83. Pengurus & Penceramah Seminar Kepimpinan Puteri Islam Malaysia Ke arah Abad 21 anjuran Puteri Islam Malaysia. Kuala Lumpur, 19 Julai 1997.
84. Pengurus & Penceramah Bengkel Motivasi dan Kecemerlangan Akademik Anjuran Puspanita dan Fakulti Pendidikan, UKM 1996. Fakulti Pendidikan, UKM, 1996.

PENYUNTING



Dr Mohd Mahzan Bin Awang lahir Lahir di Kelantan 5 September 1973. Bidang Sosiologi Pendidikan, Pendidikan Komuniti dan, kepakaran Pendidikan Sejarah & Kewarganegaraan. Memulakan kerjaya sebagai guru di Sekolah Kebangsaan (Orang Asli) Kedaik, Rompin Pahang pada tahun 1994. Beliau terlibat aktif dalam usaha pembangunan pendidikan anak-anak Orang Asli termasuklah membantu badan-badan NGO yang

membuat penyelidikan pembangunan masyarakat Orang Asli di Kawasan tersebut. Atas minat yang tinggi dalam bidang pembangunan peribumi dan masyarakat, beliau melanjutkan pengajian Sarjanamuda di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dengan membuat pengkhusuan dalam bidang Sosio-Budaya Melayu dan telah tamat dengan Kepujian Kelas Dua Tinggi pada tahun 1999. Beliau kemudiannya bertugas sebagai pensyarah di *Institute of Advertising & Communication Training di Damansara* dan seterusnya berkhidmat di Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur. Setelah menamatkan Sarjana Sosiologi Pendidikan di Fakulti Pendidikan, UKM pada tahun 2005, beliau telah menerima Hadiah Latihan Skim Latihan Akademik Universiti (SLAI) Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk pengajian kedoktoran di Universiti Dundee, United Kingdom. Beliau telah menamatkan PhD dengan jayanya pada tahun 2012 dan berkhidmat di Fakulti pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga kini.

Anugerah dan Penghargaan:

1. Anugerah Skim Latihan Akademik Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia 2008.
2. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC), Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014.
3. Anugerah Kertas Terbaik ACER-N Conference 2015, ACER-N, 2015.
4. Anugerah Idea Terbaik bulan Julai 2015 '*Cabaran Idea Perdana UKM*', Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.
5. Lonjakan nama UKM di Media Massa, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016
6. Penghargaan Pencapaian Sistem Pengajaran dan Pembelajaran (SPPP) untuk subjek Sosiologi dan Pendidikan Sejarah, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013-2016.

Kelayakan Akademik:

1. Ijazah Doktor Falsafah, 1 Oktober 2012, Universiti Dundee, Scotland, United Kingdom.
2. Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan), 2012-2015, Universiti Kebangsaan Malaysia.
3. Ijazah Sarjanamuda Pengajian Melayu (Sosio-Budaya Melayu), 1996-1999, Universiti Malaya.
4. Sijil Perguruan Malaysia (Pendidikan Sekolah Rendah-Pengajian Melayu), 1992-1994, Maktab Perguruan Ipoh Perak.

Sejarah Kerjanya;

- 1994–1996 Pegawai Perkhidmatan Bukan Siswazah, Sekolah Kebangsaan Kedaik, Pahang
- 1999–2000 Pensyarah, Institute of Advertising & Communication Training, Damansara, Petaling Jaya
- 2000–2008 Ketua, Centre of Foundation Studies & Continuing Education, Infrastructure University Kuala Lumpur, Kajang, Selangor
- 2008–2013 Pensyarah, Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pendidikan UKM
- 2013– kini Pensyarah Kanan, Jabatan Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan UKM.M

Sumbangan Komuniti:

1. Mendidik murid Orang Asli untuk kejayaan dalam bidang akademik dan non-akademik, RPS Kedaik, Rompin Pahang, 1994-1996.

2. Program pembangunan masyarakat Orang Asli keturunan Jakun di RPS Kedaik, Rompin Pahang, Kedaik, Pahang, 1994-1996.
3. Menerbitkan artikel tentang strategi dan kemajuan dakwah Islamiah dalam kalangan Orang Asli, Penerbitan dalam Utusan Malaysia, 2000.
4. Mengenal potensi, bakat dan kemahiran murid Orang Asli dalam pembangunan masa depan kerjaya. Membangunkan profail minat kerjaya murid Orang Asli, Sungai Mas, Kuantan, 2013-2016.
5. Menubuhkan Kelab Kerjaya Komuniti Orang Asli dengan sokongan UKM dan Yayasan Istana Abdulaziz bagi memastikan murid-murid Orang Asli memiliki hala tuju kerjaya jelas, Sungai Mas & Sungai Lembing, Pahang, 2013-2016.
6. Dokumentasi aktiviti pelajar Akademi Menara Gading, UKM, 2013-2016.
7. Membantu kejayaan pelajar dari keluarga tidak bernasib baik di Pahang menerusi Akademi Menara Gading, Kuantan & Temerloh, 2014-2016.
8. Membuat penilaian terhadap keberkesanan program Akademi Menara Gading, Kuantan, Pahang, 2015.
9. Dilantik sebagai ahli jawatankuasa Akademi Menara Gading, Yayasan Istana Abdulaziz, Pahang Darul Makmur, Kuantan, Pahang, 2015.
10. Menganjurkan Seminar Penyelidikan dan Pendidikan Masyarakat Terpinggir, anjuran bersama Majlis Bekas Wakil rakyat Malaysia (MUBARAK), Yayasan Istana Abdulaziz, dan UKM, Kuantan, Pahang, 2015.
11. Ceramah Motivasi kepada para pelajar Akademi Menara Gading, Kuantan, Pahang, 2015
12. Pemerkasaan pembelajaran Sejarah Malaysia-Indonesia anjuran Yayasan Istana Abdulaziz, dan UKM, Palembang, Indonesia, 2015.
13. Penceramah dalam kepimpinan pelajar Akademi Menara Gading, UKM, 2016.

Keanggotaan Badan Ikhtisan:

1. Persatuan Sejarah Malaysia, Wisma Sejarah, Kuala Lumpur, Ahli Seumur Hidup.
2. Kelab Kakitangan Akademik, UKM Bangi, Ahli.
3. Koperasi UNIKEB, UKM Bangi, Ahli.
4. ASEAN Comparative Education Research Network, Malaysia, Setiausaha.
5. Yayasan Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang, Jawatankuasa Pentadbiran.

Pewasit Jurnal:

1. School Population and Teachers' Effectiveness in Kwara State Basic Schails, Nigeria, *Jurnal Pendidikan Malaysia*, Accepted with minor revision.
2. Sensitiviti Kepelbagaian Budaya dalam Kalangan Guru Pelbagai Etnik di Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia, *Jurnal Pendidikan Malaysia*, Terima untuk penerbitan.
3. Global Trends in Higher Education: A Cross Cultural Qualitative Approach in the Context of Pakistan, *ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education (AJTHLE)*, Accepted with minor revision.
4. The Influence of Individual Characteristic and Organization Climate on Job Satisfaction and Its Impact on Employee Performance, *Sains Humanika*, Accepted with minor revision.

Penerbitan Jurnal:

1. Abdul Aziz Rahman, Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Jalaludin Abdul Malek. (2016). Social Involvement and Acculturation of Noble Values among Residents in a Modern City. *The Social Sciences*. 11(6), 958-964.
2. Abdul Razaq Ahmad, Ahmad Ali Seman, **Mohd Mahzan Awang**, Fadzilah Sulaiman. 2015. Application of Multiple Intelligence Theory to Increase Student Motivation in Learning History. *Asian Culture and History*. 7(1), 210-219.
3. Nur Hadi Ibrahim, **Mohd Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad. 2015. The Effectiveness of Intensive Workshop Activities for Enhancing Students' Understanding on Educational and Sociological Theories. *International Journal of Education and Social Science*. 2(12), 37-40.
4. Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Tajuddin Mohd Yunus. 2015. *Senior teachers' perception on the roles and responsibilities of middle managers in schools. European Journal of Scientific Research*. 132 (3), 278-291.
5. **Mohd Mahzan Awang**, Noor Azam Abdul Rahman, Noraziah Mohd Amin, Abdul Razaq Ahmad. 2015. Mesej Perpaduan dalam Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 4 dan 5: *Analisis terhadap Peribahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*. 5(1), 44-52.
6. Abdul Razaq Ahmad, Ahmad Ali Seman, **Mohd Mahzan Awang**, Fadzilah Sulaiman. 2014. *Application of Multiple Intelligence Theory*

to Increase Student Motivation in Learning History. *Asian Culture and History*. 7(1), 210-219.

7. **Mohd Mahzan Awang**, Faridah Mydin Kutty, Abdul Razaq Ahmad. 2014. Perceived Social Support and Well Being: First-Year Student Experience in University. *International Education Studies*. 7(13), 261-270.
8. Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Tajuddin Mohd Yunus. 2014. Mentoring Practices In Schools: The Roles of Senior Subject Teachers As Perceived By Heads and Teachers. *Journal of Education and Sociology*. 5(2), 65-75.
9. Jalaluddin Abdul Malek Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Juhari Ahmad, Alfitri. 2014. Sustainable Environmental Management and Preservation Knowledge among Multi-ethnic Residents. *Asian Journal of Scientific Research*. 7(4), 546-560.
10. Alfitri, **Mohd Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad, Mohd Khairi Ahmad. 2014. Socio-educational Supports for Improving Arabic Language Learning among Muslim Youth. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(3), 219-228.
11. Alfitri, **Mohd Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad. 2014. Culturally-Responsive Strategies for Resolving Social Conflict in Rural Community. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(20), 2267-2277.
12. Anita Abu Hasan, Mohd Isa Hamzah, **Mohd Mahzan Awang**. 2014. Inculcating Noble Values for Pre-Service Teachers. *International Education Studies*, 7 (11), 111-119.
13. **Mohd. Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad, Nora'asikin Abu Bakar, Sayuti Abd Ghani, Che Pee Saad, Saliza Husin, Zaharuddin Hashim, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Alfitri. 2014. Examining Gaps between Students' Expectations and Experiences in a Private University. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(8). 396-401.
14. **Mohd. Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad, Alfitri, Norila La Ulu. 2014. The Images of Japanese Army in Malaysian and Indonesian History Textbooks. *Journal of Language and Literature*, 5 (4) 37-45.
15. Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Fong Peng Chew. (2014). Adult Student Perspectives on Computer Literacy Programme. *Pensee Journal*. 76(1) 31-40.
16. Jamalullail Abdul Wahab, Azlin Norhaini Mansor, **Mohd Mahzan Awang** & Norazlina Mohamad Ayob. 2013. Managing Learners' Behaviours in Classroom through Negative Reinforcement Approaches. *Asian Social Science*. 9(16), 61-73.

17. **Mohd Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad, Nora'asikin Abu Bakar, Sayuti Abd Ghani, Asyraf Nadia Mohd Yunus, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Jaya Chitra Ramalu, Che Pee Saad & Mohd Jasmy Abd Rahman. 2013. Students' Attitudes and Their Academic Performance in Nationhood Education. *International Education Studies*. 6(11), 21-28
18. **Awang, M.M.**, Jindal-Snape, D. & Barber, T. 2013. A Documentary Analysis of the Government's Circulars on Positive Behaviour Enhancement Strategies. *Asian Social Science*. 9(5), 203-208.
19. **Mohd Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad, Jamalul Lail Abdul Wahab & Nordin Mamat. 2013. Effective teaching strategies to encourage learning behaviour. *IOSR Journal for Humanities and Social Sciences*. 8 (2). 35-40.
20. Abdul Razaq Ahmad, Mohamad Johdi Salleh, **Mohd Mahzan Awang** & Nazifah Alwani Mohamad. 2013. Investigating Best Practice and Effectiveness of Leadership Wisdom among Principals of Excellent Secondary School Malaysia: Perceptions of Senior Assistants. *International Education Studies*. 6(8), 38-46.
21. **Mohd Mahzan Awang**, Abdul Razaq Ahmad, Manisah Mohd Ali. 2013. Professional Teachers' Strategies for Promoting Positive Behaviour in Schools. *Asian Social Science*. **M9**(12), 205-211.
22. Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Ahmad Ali Seman, Ramle bin Abdullah. 2013. The Skills of Using History Textbooks in Secondary School. *Asian Social Science*. 9(12), 229-236.
23. Abdul Razaq Ahmad, **Mohd Mahzan Awang**, Wan Hasmah Wan Mamat. 2013. The Effectiveness of Human Development Programmes in Improving Community Wellbeing. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. 7(9), 51-57.
24. Rhoda D.B., Muhammad Imran, Y., **Mohd. Mahzan, A.**, Asif, N.R. 2011. The effect of prior knowledge in understanding chemistry concepts by senior secondary school students. *International Journal of Academic Research*. 3(2), 607-611.
25. **Mohd. Mahzan, A.**, Muhammad Imran, Y., Sayuti, A.G. (2011) A study of preferred socio-religious activities by Muslim Youth. *European Journal of Social Sciences*. 18(4), 596-601.

Penerbitan Buku:

1. Sosiologi Pendidikan, Fakulti Pendidikan UKM, Pengarang.
2. Pengajian Malaysia, Ikram College of Technology, Pengarang.

3. Pendidikan untuk Masyarakat Terpinggir, Fakulti Pendidikan UKM, Editor
4. Asian Social Science Journal (Special Edition), Canadian Center of Science and Education, Guest Editor.
5. Pendidikan Masyarakat Marginal, Universitas Sriwijaya, Pengarang.
6. Education and development, Universitas Riau, Editor.

Prosiding:

1. Mahiran Mohamed, Mohd Amar Md. Arif, Izzati Mohd Yusop, **Mohd Mahzan Awang**. 24-25 Feb. 2014. Kepuasan pengisian masa senggang dan aspirasi kerjaya. International Seminar on Global Education II : Educational Transformation Towards a Developed Country/Fakulti Pendidikan UKM. 1985-1999
2. Nurhijrah Zakaria, Sharifah Nor Puteh, Amla Mohd Salleh, Zuria Mahmud, Mohd Izham Mohd Hamzah, Ruhizan Mohd Yasin, **Mohd Mahzan Awang**. 24-25 Feb. 2014. Kompetensi pelbagai budaya dalam pengajaran dan pembelajaran: apa kata guru Sejarah? International Seminar on Global Education II : Educational Transformation Towards a Developed Country/Fakulti Pendidikan UKM.2538-2560
3. Thong Pui Yee, **Mohd Mahzan Awang**. (24-25 Feb. 2014). Sikap dan pemikiran keusahawanan dalam kalangan mahasiswa/i Malaysia dan Guang Zhou International Seminar on Global Education II : Educational Transformation Towards a Developed Country / Fakulti Pendidikan UKM. 1278-1291
4. Nor Aini Mohamad Ibrahim, **Mohd Mahzan Awang**. Abdul Razaq Ahmad. 24-25 Feb. 2014. Modal sosial dalam kalangan pelajar universiti International Seminar on Global Education II : Educational Transformation Towards a Developed Country / Fakulti Pendidikan UKM. 2397-2410
5. **Mohd Mahzan Awang**, Mohd Isa Hamzah, Amla Salleh. 5-6 Jan 2013. Teaching and Preaching Islam in 21st Century: Approaches and Challenges. International Conference on Islam and Multiculturalism: Islam, Modern Science and Technology. Organised by Waseda University and Institute of Asia-Europe. University of Malaya Kuala Lumpur. 206-217
6. Ahmad Rizal Md. Rais, Hafidzah Omar, Norhaidawati Mohd Noor, Juliya Hapido, **Mohd. Mahzan Awang** & Abd. Razaq Ahmad. Aktiviti Masa Senggang Pelajar Lelaki Di Malaysia Dan Indonesia. *Prosiding*

Seminar Antarabangsa Pendidikan Serantau ke-6. 22-23 Mei 2013. NIOSH Bangi, Malaysia.

7. Mahaslina Mat Yacob, Hidayah Harun, Nor Haidawati Mohd Noor, Abd Razaq Ahmad & **Mohd Mahzan Awang**. Konsep Pendidikan Masa Senggang Dari Perspektif Timur Dan Barat. *Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Serantau ke-6. 22-23 Mei 2013. NIOSH Bangi, Malaysia.*
8. Abdul Jamir Md Saad, Siti Rahimah Ahmad, Mardiah Ali, Norma Jusof, Siti Nazila Omar, **Mohd Mahzan Awang** & Abd Razaq Ahmad. Penggunaan Laman Sosial Facebook Untuk Tujuan Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Kolej MARA. *Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Serantau ke-6. 22-23 Mei 2013. NIOSH Bangi, Malaysia.*
9. Mohd Iskandar Shah Sitam, Mohd Amar Md Arif, Izzati Mohd Yusop, Norhazwah Estiar, Noriha Kasim, **Mohd Mahzan Awang** & Abd Razaq Ahmad. Kajian Perbandingan terhadap Penyesuaian Sosial dan Strategi Menangani Buli dalam kalangan Pelajar di Pekanbaru dan Hulu Langat. *Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Serantau ke-6. 22-23 Mei 2013. NIOSH Bangi, Malaysia.*
10. Mohammad Zuhilmi Monel, San Kamaruzzaman Rahim, Nor Aini Mohammad, Aziani Yusof, **Mohd Mahzan Awang** & Abd Razaq Ahmad. Pengisian Masa Senggang Mahasiswa/i Di Malaysia Dan Indonesia. *Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Serantau ke-6. 22-23 Mei 2013. NIOSH Bangi, Malaysia.*
11. **Mohd. Mahzan Awang**. 2012. Effective strategies to promote positive behaviour in a school context. In Abdul Ghafar Ismail & Roosfa Hashim. *Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. P. 8-16.*
12. **Mohd. Mahzan Awang**, Sayuti Abd. Ghani, Che Pee Saad & Md. Sabri Adenan. 25 – 26 July 2008. Surau sebagai institusi sosial ke arah pembangunan insan: Kajian kes di institusi pengajian tinggi. *Proceeding of Wacana Pendidikan Islam ke-7. Universiti Kebangsaan Malaysia.*
13. **Mohd Mahzan Awang**, Raja Mohd Salahuddin Raja Mamat. 20 – 21 April 2016. Menelusuri Isu, Cabaran dan Harapan dalam Memajukan Pendidikan Orang Asli. *Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (PASAK2016). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).*

Penulisan Media:

1. Cabaran Pendidikan Komuniti ASEAN, Rencana, 29 September 2015, m.s. 10, Utusan Malaysia.
2. Keperluan Dana ASEAN Atasi Jerebu, Rencana 14 September 2015 m.s 10, Utusan Malaysia.
3. Budayakan Perniagaan Beretika, Rencana 4 Februari 2015 m.s 10, Utusan Malaysia.
4. Alurkan Cinta dan Sikap Positif, Rencana 9 September 2015 m.s 10, Utusan Malaysia.
5. Mencari Formula Baru Perbincangan Isu Sensitif, Rencana 13 Mei 2015 m.s 10, Utusan Malaysia.
6. Prasyarat Kelestarian Kemerdekaan, Rencana, 26 Ogos 2014, ms. 10, Utusan Malaysia.
7. Nudism, Gaya Hidup Songsang Berpotensi Pengaruhi Masyarakat, Rencana, 29 Ogos 2014, ms. 13, Utusan Malaysia.
8. Menghormati Sensitiviti Kaum di Malaysia, Rencana 24 Julai 2013, ms. 11, Utusan Malaysia.
9. Hormati Simbol Kebesaran Negara, Rencana 28 Ogos 2013, ms. 11, Utusan Malaysia.
10. Cegah Jenayah Terhadap Kanak-Kanak, Rencana, 6 Feb 2013, ms. 10, Utusan Malaysia.
11. Sokongan Seimbang dan Persediaan Akhir Calon UPSR, Rencana 6 Sept. 2013, ms. 10, Utusan Malaysia.
12. Kelestarian Keharmonian Menerusi Belajar Hidup Bersama, Rencana 27 Mei 2013, ms. 11, Utusan Malaysia.
13. Mohd. Mahzan bin Awang. Kenali Aspek Positif Pelajar Kurang Disiplin. Januari 2010, *Majalah Pendidik*, Bil. 68, hal. 53 – 55, Utusan Malaysia.
14. Mohd. Mahzan bin Awang. Mekanisme Mengumpul Pandangan Uakyat. 15th of March 2010, Rencana, Utusan Malaysia.
15. Mohd. Mahzan bin Awang. Persekitaran Sesuai Mampu Galak Tabiat membaca kanak-kanak. 24th of March 2010, Rencana,
16. Pendidikan Alternatif di Britain, Rencana Julai 2010, Utusan Malaysia.
17. Aliran Autonomi Sekolah di Britain, Rencana 2010, Utusan Malaysia.
18. Harapan UK Pada Penjenamaan Semula Pendidikan, Rencana 2010, Utusan Malaysia.
19. Teknologi Satelit Bantu Didik Pemandu Ingkar, Rencana 2010, Berita Harian.
20. Mekanisme Mengumpul Pandangan Rakyat, Rencana 2010, Utusan Malaysia.

21. Persekitaran Sesuai Mampu Galak Tabiat Membaca Kanak-Kanak, Rencana 2010, Utusan Malaysia.
22. Cara Finland Martabatkan Guru, Rencana 2009, Utusan Malaysia.
23. Kurikulum perlu sesuai keperluan setempat, Rencana 2009, Utusan Malaysia.
24. Bincang Secara Rasional, Rencana 2009, Utusan Malaysia.
25. Jadikan Penyelidikan Budaya Untuk Kemajuan Malaysia, Rencana 2009, Utusan Malaysia.
26. Alternatif Pembelajaran Sewaktu Kuarantin, Rencana 2009, Utusan Malaysia.
27. Cara Finland Martabatkan Guru, Rencana 16 Dis. 2009, Rencana, Utusan Malaysia.

Penyelidikan:

1. Bimbingan Kerjaya Komuniti Orang Asli menggunakan modul RIASEK, Geran Galakan Universiti-Komuniti (KOMUNITI-2013-023), RM25,000, Ketua Projek 2013-2015.
2. Kelab Kerjaya Komuniti Orang Asli, Yayasan Istana Abdulaziz, RM10,500, Ketua Projek 2013-2015.
3. Positive Behaviour Enhancement Model for National Secondary Schools, Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM-2013-042), RM30,000, Ketua Projek 2013-2015.
4. Aplikasi Dan Pembudayaan ICT Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Penelitian Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia, Geran Luar GG-2013-006, RM30,000, Ahli.
5. Kemahiran Soft Skills Pada Komunitas Pelajar: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Malaysia, Geran luar GG-2014-009, RM30,000, Ahli.
6. Pembentukan Model Baharu Pendaftaran Tanah Wakaf di Malaysia, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS/1/2013/SSI03/UPNM/02/1), RM80,000, 2013-2015, Ahli.
7. Inventori Kesejahteraan Diri Masyarakat Malaysia, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS/1/2013/SSI09/UKM/02/7), RM60,000, 2013-2015, Ahli.
8. Peranan Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran & Pendidikan Agama Islam (LEPAI) Dalam Membantu Negeri dan Jemaah Pengurusan Sekolah Membangunkan Sistem Pendidikan Islam, Geran Galakan Penyelidikan Universiti-Industri (INDUSTRI-2013-041), RM25,000, 2013-2015, Ahli.
9. Kesepaduan Sosial Negara, Long-Term Research Grant Scheme Bottom-Up (LRGS-BU) LRGS/BU/2011/UKM/CMN, RM3,507,000, 2012-2015, Ahli.

10. Kesukarelawan Pendidikan Melalui Kelab Kerja Rumah Untuk Kanak-Kanak Kurang Bernasib Baik, Geran Galakan Universiti Komuniti (KOMUNITI-2012-022), RM25,000, 2012-2014, Ahli.
11. A study of student and professional expectations and their experiences on academic and social life in a private higher education institution, Geran
12. Luar KLIUC GG/009/2012 (GL), RM7,000, 2012-2013, Ketua Projek. Surau sebagai institusi sosial ke arah pembangunan insan: Kajian persepsi dan sikap dalam kalangan pelajar, Dana Penyelidikan KLIUC, RM4000, 2007-2008, Ketua Projek.
13. Learning To Live Together Through Education In The Asia-Pacific Region UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau For Education (UNESCO Bangkok), UNESCO Asia - Pacific Regional Bureau For Education (UNESCO Bangkok), RM12,000, Ahli.
14. Assessment Methods And Student'S Performance In Mathematics And Statistic: A Case Study Of Engineering Student's Attitude At IUKL, Geran Luar GG-IUKL-2014-001, RM5,400, Ahli.
15. Kajian Kesahan Dan Kebolehpercayaan Inventory Nilai Malaysia, Dana Pembangunan Penyelidikan Kumpulan Penyelidikan (DPP-2013-150), RM37,000, Ahli.
16. Modul Komprehensif Pencegahan Buli dan Gangsterism Pelajar Sekolah Menengah, FRGS/1/2015/SSI09/UKM/02/3, RM70,700, Ketua.
17. Pembangunan Indeks Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia, FRGS/1/2015/SS06/UKM/01/1, RM77100, 2015-2017, Ahli.
18. Aspirasi Kepimpinan Politik Negara dalam Kalangan Belia Pelbagai Kaum, Geran Luar (Kementerian Belia & Sukan), RM30,000, Ahli.
19. Indeks Jati Dri Pelajar Keguruan Malaysia, FRGS, RM70,000, 2015-1017, Ahli.
20. Modul Pencegahan Buli dan Gangsterisme Pelajar Sekolah Menengah, FRGS, RM70,000, 2015-2017, Ketua.

Perundingan:

1. Grand Challenge Fakulti Pendidikan: Kualiti Pendidikan Komuniti B40, 2016–kini, Universiti Kebangsaan Malaysia, Ahli.
2. Projek Penyelidikan Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan Pendidikan Masyarakat Melayu, 2 Nov 2015 – 1 Jan 2016, Universiti Malaya, Panel.
3. Penyelesaian Masalah / Inovasi Remaja, 25 Ogos 2015, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Fasilitator

4. Program Kursus Pensijilan Profesional Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran), 12 Okt 2014–Mac 2015, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, Pensyarah.
5. Bengkel Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Pancasila, 25 Mei 2016, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Perunding.
6. Mesyuarat Memperkukuhkan Perpaduan Melalui matapelajaran Pendidikan Islam, Moral dan Elemen Sivik dalam Kurikulum, 8 Okt 2013, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, Panel.
7. Program Jati Diri dan Kepimpinan Tingkatan 4, 26 Mac 2016, Sekolah Sultan Alam Shah, Penceramah.
8. Program ASEAN Komuniti Sekolah-Sekolah Daerah Sepang, 20 Nov 2016, Pejabat Pendidikan Daerah Sepang, Penceramah.
9. Social Conflicts in the Classroom: Teaching Problem Solving Skills to Young Children, 27 Apr 2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Penceramah.
10. Teambuilding, 24 Jan 2016, Sekolah Sri Al-Amin Bangi, Penceramah.
11. Persidangan Meja Bulat Program Kesepaduan Sosial Negara, 30 Mei 2013, Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia, Penyelidik.
12. Bengkel Intensif Sosiologi Penyelidikan Aliran Ekonomi, 4–5Apr 2016, PTS 201 –024 Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Penceramah.

Sumbangan Kepada Fakulti dan Universiti:

1. Kunjungan Delegasi Universitas Negeri Makassar, 23 Jan 2014, Antarabangsa, Ahli.
2. Seminar Siswazah 6/2013 Fakulti Pendidikan, 23 Nov 2013, Universiti, Pengerusi Sesi.
3. International Conference on Education for Learner Diversity, 17–18 Sep 2014, Antarabangsa, AJK.
4. Regional Conference on School Structure and Teacher Competence, Duties and Character 2013 (ReCSTec), 27–28 Jun 2013, Antarabangsa, AJK Abstrak & Prosiding.
5. ASEAN Comparative Education Research Network Conference 2015, 7–8 Okt 2015, Antarabangsa, Setiausaha.
6. Bengkel Penulisan Tesis Pantas dan Mandeley Gaya UKM, 14 Apr 2016, Universiti, Pengarah Program.
7. Seminar Kebangsaan Pendidikan Negeri Kali ke 16–17 Dis 2015, Kebangsaan, AJK.

PENYUNTING



Heri Susanto, M.Pd., dosen Pendidikan Sejarah pada FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan jabatan Fungsional Lektor. Lahir di Jangglengan, 02 September 1982. Mata kuliah yang diampu: Strategi Pembelajaran Sejarah, Sejarah Australia-Oceania, Sejarah Afrika, Media Pembelajaran Sejarah, dan Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Dapat dihubungi di alamat email iniherisusanto@unlam.ac.id.

Menempuh pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Sejarah 2001-2006 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan skripsi *"Dampak Sosial-Ekonomi Keberadaan Transmigran Terhadap Penduduk Setempat di Desa Kambitin I Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tahun 1984-1991"*. Pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pendidikan Sejarah 2010-2012 dengan tesis: *"Hubungan Pemahaman Sejarah Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya di Kalimantan Selatan dengan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin"*.

Pengalaman Penelitian:

1. Pengembangan Daerah Konsesi Maluka pada masa Pemerintahan Inggris di Kalimantan Tenggara tahun 1811-1816 (2009) Sumber dana DIPA (PNBP) FKIP Unlam.

2. Sosial Mapping Aktivitas Hulu Migas di Kalimantan Selatan dan Tengah (2012) Pertamina (BPH Migas).
3. Paringin dari Kecamatan Menjadi Ibukota Balangan (Melacak Perjalanan Sejarah Sebuah Kota di Daerah Hulu Sungai Kalimantan Selatan) (2012) Dana BOPTN Unlam 2012.
4. Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 (Studi Pembelajaran Sejarah pada SMAN 2 dan SMAN 3 Banjarmasin (2013) Dana BOPTN Unlam tahun 2013.
5. Pemetaan Uji Kompetensi Guru (UKG) jenjang Pendidikan SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin (2013) Suber Dana Bappeda Kota Banjarmasin.
6. Kajian Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Tabalong (2013) Sumber Dana; Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak Kemdikbud) dan Jaringan Penelitian (Jarlit) Kabupaten Tabalong. Dasar, keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong No: 188.45/58/Bappeda-Litdal/050/7/2013.
7. Pemetaan Sarana-Prasarana Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah di Kabupaten Tabalong (2014) Sumber Dana; Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak Kemdikbud) dan Jaringan Penelitian (Jarlit) Kabupaten Tabalong. Dasar, keputusan Kepala Puslitjak Kemdikbud RI No: 7024/H2/LT/2014.
8. Analisis Muatan Karakter dan Keunggulan Lokal pada Kurikulum Kejuruan di Kabupaten Tabalong (2015) Sumber Dana; Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak Kemdikbud) dan Jaringan Penelitian (Jarlit) Kabupaten Tabalong. Dasar, keputusan Kepala Puslitjak Kemdikbud RI.
9. Kearifan Lokal dalam Usaha Non Pertanian Oleh Petani di Lahan Basah Pada Musim Kemarau dan Musim Hujan di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan (2015) Sumber dana; Hibah PUPT IDB–Dikti (*Development and Upgrading of Seven Universities in Improving the Quality and Relevance of Higher Education in Indonesia*).
10. Kesesuaian Aspek Pedagogi Pendekatan Saintifik dan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah (2015) Sumber dana; DIPA PNBP FKIP Unlam

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Sosialisasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah pada Guru Mata Pelajaran Sejarah se-Kota Banjarmasin (2013) Dana BOPTN Unlam 2013.
2. Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013 (2013) Dana BOPTN Unlam 2013.
3. Penyuluhan Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 8 Martapura Kabupaten Banjar (2015) DIPA (PNBP) FKIP Unlam 2014/2015.
4. Program Pendampingan Kurikulum 2013 (2015), LPMP Prov Kalimantan Selatan.
5. Pendampingan Implementasi Pembelajaran Saintifik Mata Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013 (2016) Sumber dana; DIPA PNBP FKIP Unlam.

Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal:

1. Dinamika Sosial Ekonomi Transmigran di Desa Kambitin I Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong 1984-1991, Volum 14, Nomor 1, Mei 2012, Jurnal Wiramartas.
2. Kontribusi Program CD (*Community Develovment*) dan CSR (*Corporate Social Responsibillity*) dalam Pengembangan Pendidikan di Tabalong, Volum 15, Nomor 1, Mei 2013, Jurnal Wiramartas.
3. Understanding Regional History and Perception of Cultural Diversity in Developing Nationalism, Volume 14 Nomor 1, tahun 2013, *Historia International Journal of History Education*.
4. Analisis Ketersediaan Sarana-Prasarana Pendidikan dan Kesiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Kabupaten Tabalong, Jilid 27 Nomor 7, Oktober 2015, *Vidya Karya Jurnal Kependidikan*.

Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Seminar Ilmiah:

1. Seminar Nasional Pendidikan Sejarah dan Revitalisasi Nasionalisme (*Penanaman Nasionalisme Melalui Pembelajaran Sejarah yang Adaptif*) Surakarta, 26 Mei 2011.
2. Seminar Nasional Inovasi Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran IPS (*Pendekatan Cross-Indigenous Pembelajaran IPS dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Multikulturalisme*) Bandung 12 Mei 2012.

3. Seminar Nasional Implementasi Kurikulum 2013 dan Aktualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Upaya Memantapkan Insan Berkarakter (*Pembelajaran IPS Berbasis Multikulturalisme dalam Membentuk Karakter Kebangsaan*) Banjarmasin, 3-4 Mei 2013.
4. Seminar Nasional Pendidikan Sejarah "Menyongsong Kurikulum Sejarah 2013 (*Pemahaman Sejarah Daerah dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya dalam Membina Sikap Nasionalisme: Studi Korelasi Pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Unlam*) Jakarta, 18 Mei 2013.
5. Semiloka Hasil-hasil Penelitian Pendidikan (*Kajian Implementasi Desentralisasi: Korelasi Ketersediaan Sarana-Prasarana Pendidikan dengan Prestasi Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Tabalong*) Jakarta, 28-30 November 2013.
6. International Seminar on Character Education (*Kemampuan Berfikir Kritis dalam Pedagogi Sejarah Sebagai Upaya Membangun Karakter Peserta Didik*) Banjarmasin, 24 Mei 2014.
7. The International Conference: The Social Studies Contribution to Reach Periodic Environmental Education Into Stuning Generation 2045 (*Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Berwawasan Etika Lingkungan*) Bandung, 17-18 September 2014.
8. Seminar Nasional dan Lokakarya: Pembelajaran Sejarah di Tengah Perubahan (*Implementasi Kurikulum 2013 dan Tantangan Pembelajaran Saintifik Bagi Guru Sejarah*) Malang, 27-28 September 2014.
9. Seminar Nasional Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal (*Cross-Indigenous Pembelajaran IPS dalam Mengajarkan Nilai-nilai Multikulturalisme*) Banjarmasin, 30 Mei 2015
10. Konvensi Nasional Pendidikan IPS III (*Tantangan Pedagogi Sejarah Untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif*) Bandung, 11-12 Agustus 2015.
11. International Conference of Contributing History for Social Sciences and Humanities (*Strategi Mengembangkan Historical Empathy dalam Pedagogi Sejarah*) Malang, 5 September 2015.
12. International Seminar on Ethnopedagogy (*Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Kegiatan Peternakan Kerbau Rawa oleh Masyarakat di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (Tim)*) Banjarmasin, 14 November 2015.
13. Seminar Nasional dan Pertemuan Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (*Menghadirkan Kelas Konstruktivis Dalam Melatih*

Kemampuan Berpikir Historis Melalui Model Latihan Penelitian
Banjarmasin, 27-28 November 2015.

14. Seminar Nasional "Revitalisasi Kearifan Lokal untuk Membangun Martabat Bangsa" Surabaya, 21 Mei 2016.
15. International Seminar on Building Education Based on Nationalism Values. Banjarmasin, 8 Oktober 2016.
15. Seminar Nasional "*Kajian Kesesuaian Kurikulum Sejarah di Perguruan Tinggi dengan Kurikulum Sejarah di Sekolah.* Yogyakarta, 19 Oktober 2016.
16. Seminar Nasional "Sejarah Indonesia dalam Perspektif Regional" Malang, 2 November 2016
17. 2nd International Conferences Education & Training (ICET) on: "Improving the Quality of Education and Training Through Strengthening Networking" Malang, 6 November 2016.
18. International Social Studies Association (ISSA) on: "Social Studies and Entrepreneurship in Digital Era" Surabaya, 12 November 2016.

Pengalaman Penulisan Buku/Editor Artikel Ilmiah:

1. Prosiding Seminar Nasional Implementasi Kurikulum 2013 dan Aktualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Upaya Memantapkan Insan Berkarakter, 2013 (Editor) Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unlam dan Pascasarjana Pendidikan IPS.
2. Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran), 2014, Aswaja Pressindo.
3. Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah, 2015 (Editor), Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam.

Pengalaman penulisan buku/editor artikel ilmiah:

1. Penyunting Jurnal Vidya Karya (2016) FKIP Unlam Banjarmasin.
2. Penyunting Jurnal Prabayaksa (2013-2016) Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin.
3. Penyunting Jurnal Wiramartas (2012-2014) Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unlam Banjarmasin.

Pengalaman Organisasi Profesi:

1. Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (Hispisi), 2013–sekarang, Wakil Sekretaris.
2. Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS), 2014–sekarang, Wakil Sekretaris.
3. *Asean Comparative Research Network (ACER-N)*, 2015–sekarang, Anggota.